



UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELUARAN
PADA KAWASAN AGROPOLITAN KOTA BATU**

TESIS

**NENI SUSILAWATI
0906655553**


**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN
SALEMBA
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Neni Susilawati

NPM : 0906655553

Tanda Tangan : 

Tanggal : 16 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Neni Susilawati
NPM : 0906655553
Program Studi : Administrasi dan Kebijakan Perpajakan
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Pengeluaran pada
Kawasan Agropolitan Kota Batu

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi pada Program Studi Administrasi dan Kebijakan Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Safri Nurmantu, M.Si (.....)

Penguji : Dr. Ning Rahayu, M.Si (.....)

Pembimbing : Dr. Haula Rosdiana, M.Si (.....)

Sekretaris Sidang : Milla S. Setyowati, S.Sos, M.Ak (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 16 Januari 2012

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Neni Susilawati
NPM : 0906655553
Program Studi : Administrasi dan Kebijakan Perpajakan
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Implementasi Kebijakan Pengeluaran pada Kawasan Agropolitan Kota Batu

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Tangerang
Pada Tanggal : 16 Januari 2012

Yang Menyatakan



(Neni Susilawati)

KATA PENGANTAR

The government's view of the economy could be summed up in a few short phrases: If it moves, tax it. If it keeps moving, regulate it. And if it stops moving, subsidize it. – Ronald Reagan (1911-2004)

Kata-kata Ronald Reagan di atas menyiratkan akan fleksibilitas pemerintah dalam menyikapi perubahan perekonomian, termasuk di dalamnya adalah kebijakan fiskal yang diterapkan untuk mengatur perekonomian. Kebijakan fiskal memiliki dua instrumen pokok, yakni kebijakan perpajakan dan kebijakan pengeluaran. Dengan menggunakan dua komponen utama tersebut kebijakan fiskal mampu menjawab pertanyaan tentang bagaimana pengaruh penerimaan dan pengeluaran negara terhadap kondisi perekonomian, tingkat pengangguran, dan inflasi. Dalam konteks perencanaan pembangunan ekonomi, rancangan kebijakan fiskal tidak hanya diarahkan untuk pengembangan aspek ekonomi seperti pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan stabilisasi ekonomi, tetapi juga peningkatan aspek sosial seperti pemerataan pendapatan, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang diaplikasikan oleh pemerintah seyogyanya dapat mendukung perkembangan perekonomian rakyat, bukan demi kepentingan politik semata.

Salah satu kebijakan fiskal yang berkaitan dengan perkembangan perekonomian adalah dalam hal ketahanan pangan, khususnya dalam hal ini program pengembangan kawasan agropolitan. Instrumen kebijakan fiskal yang paling menonjol peranannya dalam pengembangan kawasan agropolitan adalah kebijakan pengeluaran (*expenditure policy*). Kota Batu adalah salah satu kawasan agropolitan rintisan yang memiliki corak pertanian untuk perekonomian rakyatnya, baik dari segi SDA, SDM, maupun SDB nya. Tesis yang berjudul **"Implementasi Kebijakan Pengeluaran pada Kawasan Agropolitan Kota Batu"** ini berusaha untuk menganalisis implementasi kebijakan fiskal pada kawasan agropolitan Kota Batu khususnya dalam aspek *expenditure policy* dan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengeluaran tersebut pada kawasan agropolitan Kota Batu.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya, serta penutup para Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad

SAW atas keteladanan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya. Penulis juga menyadari bahwa tesis ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak . Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari awal hingga terselesaikannya tesis ini :

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmo, M.Sc., selaku Dekan FISIP UI.
2. Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc., selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
3. Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc., selaku Ketua Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi.
4. Lina Miftahul Jannah, S.Sos., M.Si., selaku Sekretaris Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
5. Dr. Haula Rosdiana, M.Si., selaku dosen pembimbing tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.
6. Seluruh dosen Administrasi dan Kebijakan Perpajakan FISIP UI yang telah mengajar dan berbagi pengetahuan selama penulis kuliah di FISIP UI.
7. Bpk Ridwan dan Ibu Damayanti (Kementerian Pertanian RI), yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi dan data yang diperlukan penulis.
8. Ibu Enny Rachyuningsih (Kepala Bappeda Kota Batu), Bpk. Yayat (Kepala Bidang Data dan Penelitian Bappeda Kota Batu), Mas Dimas (Staf Bidang Data dan Penelitian Bappeda Kota Batu), Ibu Sri Wahyuni dan Bpk. Suwoko (Distahut), Bpk. Tunggul Madyantono (Dinas Koperindag), Ibu Nindya DS (KKP), Ibu Endang Dwi dan Bpk. Abdillah (Bidang Perekonomian Setda Kota Batu), Ibu Puspa Permanasari (ESDM), Bpk. Heru Waskito dan Bpk. Awanto Pribowo (BPMPKB), Ibu Luki Budiarti, Bpk. Winardi, dan Bpk Miskan (Gapoktan) para narasumber yang telah menyediakan waktunya untuk wawancara dan memberikan data.

9. Puska Ilmu Administrasi, DFID, dan Bidang Perubahan Iklim Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral BKF. Terimakasih atas mekanisme kerjasama pemberian bantuan penulisan tesis ini.
10. *International Office* UI dan Sasakawa (Tokyo Foundation). Terimakasih atas mekanisme kerjasama pemberian Bantuan Penulisan Tesis S2 UI-Sylff Tahun Ajaran 2011/2012 semester ganjil.
11. Suami penulis Rochmad Sigit Setiyono yang selalu mendampingi dan memberikan dukungan lahir batin, dan juga putra tersayang Farras Ahnaf Hafizh Signi yang selalu memberikan kebahagiaan kepada penulis. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang kalian.
12. Orang tua penulis dan adik tercinta, Leni Purwaningsih dan Ahmad Fauzan yang telah memberikan semangat serta bantuan moril kepada penulis. Terima kasih atas doa dan dukungan kalian selama penulisan tesis ini.
13. Wahyu Mahendra dan Mas Ayi Mulyadi yang telah membantu secara moril dan materil sehingga kegiatan turlap bisa terlaksana dengan baik., banyak terima kasih saya haturkan, semoga kebaikan kalian dibalas Allah SWT
14. Rizka Fumita Rishandari dan Achmad Yusuf Setiawan, pasangan adik iparku yang telah membantu mengakomodasi aku sekeluarga selama di Malang
15. Mba Inayati, Mba Aisyah, dan Murwendah, sebagai tim riset fiskal yang selalu menyemangati dan membantu proses penelitian baik secara akademis maupun non akademis.
16. Nidaan Khafian, Desy Hariyati, Nurul Safitri, Mas Azis Muslim, Rani Fariha, dan Mas Eko Saka purnama, rekan –rekan penulis di Departemen Ilmu Administrasi yang memberikan lingkungan penuh pembelajaran dan semangat bagi penulis. Terutama Rani Fariha dan Nidaan Khafian yang bersamaku sampai detik-detik terakhir.
17. Mas Deny W. Tasniawan, Mba Ninik Suherlan, Mba Ana, Wahyu Mahendra, Mas Yanto, Mas Mulyadi, Mba Yuni, Mas Priyanto, Pak Purwanto, Mas Rizal, Pak Mustofa, Pak Taufik, Pak Rohadi, rekan-rekan staf Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi yang telah sangat membantu proses perkuliahan dan sidang tesis.

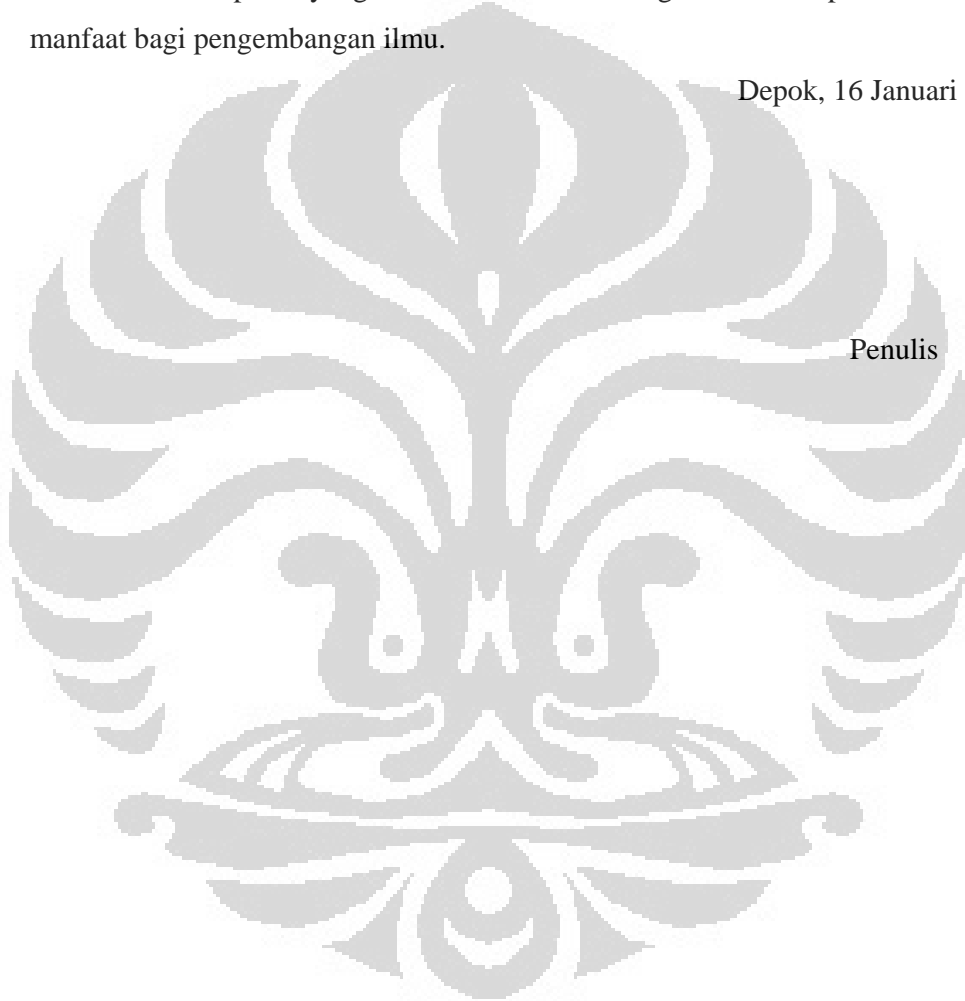
18. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu namun telah memberikan kontribusi pada penulisan tesis ini.

Sebagai sebuah karya ilmiah, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis terbuka untuk menerima masukan agar di kemudian hari penulis dapat membuat karya ilmiah yang lebih baik.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 16 Januari 2012

Penulis



ABSTRAK

Nama : Neni Susilawati
Program Studi : Administrasi dan Kebijakan Perpajakan
Judul : Implementasi Kebijakan Pengeluaran pada Kawasan Agropolitan Kota Batu

Tesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan pengeluaran pada kawasan agropolitan Kota Batu. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan pengeluaran pada kawasan agropolitan Kota Batu, faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan, dan faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan pengeluaran di kawasan agropolitan Kota Batu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengeluaran dalam rangka pengembangan kawasan agropolitan di Kota Batu saat ini banyak dipengaruhi oleh perubahan visi pembangunan Kota Batu dari sentra pertanian berbasis pariwisata menjadi sentra pariwisata berbasis pertanian. Fokus pembangunan bukan lagi pada sektor pertanian namun lebih kepada pembangunan fisik sarana prasarana, infrastruktur, dan fasilitas lain yang dibangun bertujuan untuk menarik minat wisatawan dan investor (walaupun sektor pertanian tetap diperhatikan). Kebijakan perpajakan ditemukan belum terlalu berperan dalam pengembangan kawasan agropolitan Kota Batu, justru masyarakat banyak mengeluhkan mengenai PBB besarnya mengalami kenaikan terus setiap tahunnya. Diketahui pula setidaknya ada dua jenis retribusi yang diterapkan disini yaitu retribusi dari Rumah Potong Hewan dan Pasar Benih Ikan.

Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengeluaran pada kawasan agropolitan disini adalah sikap aparat pemerintah yang sangat mendukung masyarakat petani, dan kesadaran masyarakat akan manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh dari program kegiatan yang diberikan oleh pemerintah untuk pengembangan pertanian karena memang *nature* masyarakat Kota Batu ada di sektor pertanian. Faktor penghambat kebijakan fiskal untuk pengembangan kawasan agropolitan di Kota Batu diantaranya adalah kurangnya koordinasi tim pokja agropolitan, kurangnya sumber dana, penyempitan lahan pertanian, pendampingan PPL yang kurang efektif, rendahnya SDM masyarakat petani, perubahan visi pembangunan ekonomi dari sentra pertanian berbasis pariwisata menjadi sentra pariwisata berbasis pertanian, belum terbentuknya Bapelu, belum tersedianya KUD yang menangani semua sektor, banyaknya kepentingan yang terlibat dalam pengembangan agropolitan, konflik kepentingan di pasar Batu, dan karakter penguasa.

Kata Kunci:

Implementasi, Kebijakan Pengeluaran, Agropolitan, Ketahanan Pangan, Perubahan Iklim

ABSTRACT

Name : Neni Susilawati
Study Program : Administration and Policy for Taxation
Title : Expenditure Policy Implementation on Batu City Agropolitan Area

This thesis discusses the implementation of expenditure policy in Batu City agropolitan area. The problems are examined in this research is implementation of expenditure policy in Batu City agropolitan area, the contributing factors for policy implementation, and the cumberer factors for policy implementation. This research conducted with using qualitative approach with in depth interview, documentation study, and observation as collecting data method. The result showed that the implementation of expenditure policy in order development of agropolitan area in the Batu City much influenced by changes in the vision of Batu City from agriculture center based tourism being tourism center based agriculture. Development is no longer focus on the agricultural sector but more to the development of physical infrastructure and other facilities that were built in order to attract tourists and investors (although the agricultural sector continues to note). Taxation policy is found not too play a significant role in the development of the Batu City agropolitan area, thus many have complained about the Property Tax due which is increased steadily each year. It is founded also that there are at least two types of service charges that applied in agropolitan area, they are retribution from Slaughterhouses and Fish-Seed Market.

Contributing factor in the implementation of expenditure policy in the Batu City agropolitan area is the attitude of the Government apparatus supporting the farming community, and public awareness of long-term benefits that can be obtained from the program activities provided by Governments for the development of agriculture because it is nature society Batu City is in the agricultural sector. Meanwhile, the restricting factors are the lack of coordination between agropolitan program team, lack of funds, narrowing of farmland, a less effective mentoring, lack of human resources, a change in the Batu City Vision from agriculture center based tourism being tourism center based agriculture, yet the formation of Instigation Institution, yet the availability of Cooperative Village Unit which handles all the sectors, the many interests involved in the development of agropolitan, a conflict of interest in the market, and the character of the ruler.

Keywords:

Implementation, Expenditure Policy, Agriculture, Food Security, Climate Change

ABSTRAK

Nama : Neni Susilawati
Program Studi : Administrasi dan Kebijakan Perpajakan
Judul : Implementasi Kebijakan Pengeluaran pada Kawasan Agropolitan Kota Batu

Tesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan pengeluaran pada kawasan agropolitan Kota Batu. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan pengeluaran pada kawasan agropolitan Kota Batu, faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan, dan faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan pengeluaran di kawasan agropolitan Kota Batu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengeluaran dalam rangka pengembangan kawasan agropolitan di Kota Batu saat ini banyak dipengaruhi oleh perubahan visi pembangunan Kota Batu dari sentra pertanian berbasis pariwisata menjadi sentra pariwisata berbasis pertanian. Fokus pembangunan bukan lagi pada sektor pertanian namun lebih kepada pembangunan fisik sarana prasarana, infrastruktur, dan fasilitas lain yang dibangun bertujuan untuk menarik minat wisatawan dan investor (walaupun sektor pertanian tetap diperhatikan). Kebijakan perpajakan ditemukan belum terlalu berperan dalam pengembangan kawasan agropolitan Kota Batu, justru masyarakat banyak mengeluhkan mengenai PBB besarnya mengalami kenaikan terus setiap tahunnya. Diketahui pula setidaknya ada dua jenis retribusi yang diterapkan disini yaitu retribusi dari Rumah Potong Hewan dan Pasar Benih Ikan.

Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengeluaran pada kawasan agropolitan disini adalah sikap aparat pemerintah yang sangat mendukung masyarakat petani, dan kesadaran masyarakat akan manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh dari program kegiatan yang diberikan oleh pemerintah untuk pengembangan pertanian karena memang *nature* masyarakat Kota Batu ada di sektor pertanian. Faktor penghambat kebijakan fiskal untuk pengembangan kawasan agropolitan di Kota Batu diantaranya adalah kurangnya koordinasi tim pokja agropolitan, kurangnya sumber dana, penyempitan lahan pertanian, pendampingan PPL yang kurang efektif, rendahnya SDM masyarakat petani, perubahan visi pembangunan ekonomi dari sentra pertanian berbasis pariwisata menjadi sentra pariwisata berbasis pertanian, belum terbentuknya Bapelu, belum tersedianya KUD yang menangani semua sektor, banyaknya kepentingan yang terlibat dalam pengembangan agropolitan, konflik kepentingan di pasar Batu, dan karakter penguasa.

Kata Kunci:

Implementasi, Kebijakan Pengeluaran, Agropolitan, Ketahanan Pangan, Perubahan Iklim

ABSTRACT

Name : Neni Susilawati
Study Program : Administration and Policy for Taxation
Title : Expenditure Policy Implementation on Batu City Agropolitan Area

This thesis discusses the implementation of expenditure policy in Batu City agropolitan area. The problems are examined in this research is implementation of expenditure policy in Batu City agropolitan area, the contributing factors for policy implementation, and the cumberer factors for policy implementation. This research conducted with using qualitative approach with in depth interview, documentation study, and observation as collecting data method. The result showed that the implementation of expenditure policy in order development of agropolitan area in the Batu City much influenced by changes in the vision of Batu City from agriculture center based tourism being tourism center based agriculture. Development is no longer focus on the agricultural sector but more to the development of physical infrastructure and other facilities that were built in order to attract tourists and investors (although the agricultural sector continues to note). Taxation policy is found not too play a significant role in the development of the Batu City agropolitan area, thus many have complained about the Property Tax due which is increased steadily each year. It is founded also that there are at least two types of service charges that applied in agropolitan area, they are retribution from Slaughterhouses and Fish-Seed Market.

Contributing factor in the implementation of expenditure policy in the Batu City agropolitan area is the attitude of the Government apparatus supporting the farming community, and public awareness of long-term benefits that can be obtained from the program activities provided by Governments for the development of agriculture because it is nature society Batu City is in the agricultural sector. Meanwhile, the restricting factors are the lack of coordination between agropolitan program team, lack of funds, narrowing of farmland, a less effective mentoring, lack of human resources, a change in the Batu City Vision from agriculture center based tourism being tourism center based agriculture, yet the formation of Instigation Institution, yet the availability of Cooperative Village Unit which handles all the sectors, the many interests involved in the development of agropolitan, a conflict of interest in the market, and the character of the ruler.

Keywords:

Implementation, Expenditure Policy, Agriculture, Food Security, Climate Change

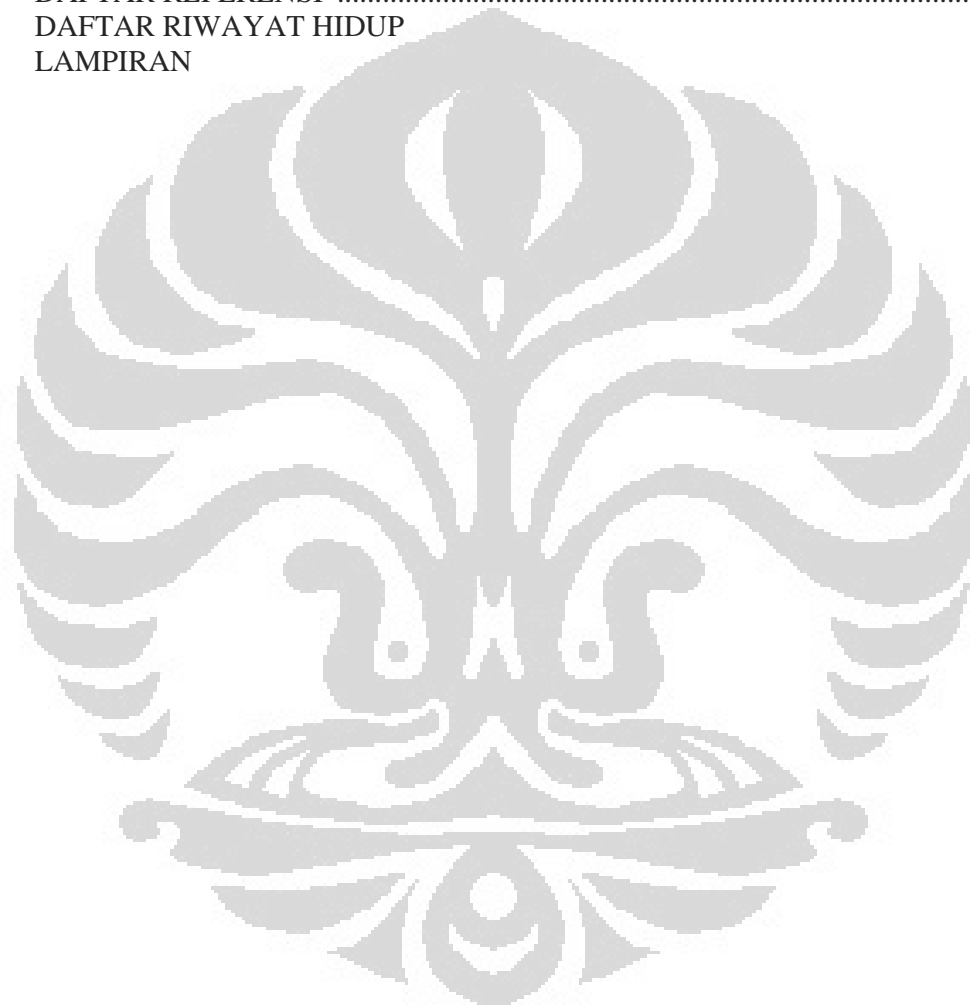
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GRAFIK	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	17
1.3 Tujuan Penelitian	18
1.4 Signifikansi Penelitian	18
1.5 Pembatasan Penelitian	19
1.6 Sistematika Penulisan	19
2. KERANGKA PEMIKIRAN	21
2.1 Tinjauan Pustaka	21
2.2 Kerangka Teori	24
2.2.1 Fungsi Pemerintah	24
2.2.2 Kebijakan Publik	26
2.2.3 Kebijakan Fiskal	28
2.2.4 Pengeluaran Negara	31
2.2.5 Kebijakan Pajak	32
2.2.6 Fungsi Pajak	33
2.2.7 Implementasi Kebijakan	34
2.2.8 Konsep Pengembangan Kawasan Agropolitan	42
2.2.8.1 Pengertian Agropolitan	44
2.2.8.2 Konsepsi untuk Program Kawasan Agropolitan	46
2.2.8.3 Visi dan Misi Agropolitan	52
2.2.8.4 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Agropolitan	54
2.2.8.5 Komponen Penting dalam Kebijakan Pengembangan	
Agropolitan	55
2.2.8.6 Indikator Keberhasilan	64
2.3 Alur Pemikiran	66
3. METODE PENELITIAN	67
3.1 Pendekatan Penelitian	67

3.2 Jenis Penelitian	67
3.3 Narasumber/Informan	70
3.4 Teknik Analisis Data.....	72
3.5 Site Penelitian	73
3.6 Proses Penelitian	73
3.7 Validitas dan Reliabilitas Data	74
3.8 Keterbatasan Penelitian	75
4. GAMBARAN UMUM KAWASAN AGROPOLITAN KOTA BATU .	79
4.1 Gambaran Wilayah.....	79
4.1.1 Letak Geografis dan Administrasi.....	79
4.1.2 Keadaan Topografi dan Klimatologi.....	80
4.1.3 Keadaan Geologi dan Hidrologi.....	83
4.1.4 Pola Penggunaan Lahan	84
4.2 Pemerintahan.....	84
4.3 Penduduk.....	85
4.4 Potensi Wilayah.....	89
4.5 Sarana dan Prasarana	92
4.6 Latar Belakang Pengembangan Kawasan Agropolitan Kota Batu	94
4.7 Dasar Hukum Pengembangan Kawasan Agropolitan Kota Batu	94
4.8 Lingkup Lokasi.....	96
4.9 Pengembangan Kawasan Agropolitan Kota Batu	96
4.9.1 Kegiatan Agribisnis	96
4.9.1.1 Kegiatan Agribisnis Hulu	96
4.9.1.2 Kegiatan <i>On Farm</i>	98
4.9.1.3 Kegiatan Agribisnis Hilir	100
4.9.1.4 Sub Sistem Penunjang	101
4.9.2 Embrio Pemusatan dan Distribusi	102
4.9.3 Pembentukan Kawasan Fungsional	103
4.9.3.1 Kawasan Produksi	103
4.9.3.2 Kawasan Pengolahan	106
4.9.4 Struktur Ruang	107
4.9.4.1 Klaster Pertanian	107
4.9.4.2 Hirarki Pusat Pelayanan	109
4.9.5 Sistem Kegiatan	110
4.9.5.1 Sistem Agribisnis Klaster Pertanian Tanaman Pangan.....	110
4.9.5.2 Sistem Agribisnis Klaster Pertanian Tanaman Buah	110
4.9.5.3 Sistem Agribisnis Klaster Pertanian Tanaman Sayur	111
4.9.5.4 Sistem Agribisnis Klaster Pertanian Tanaman Hias	112
4.9.5.5 Sistem Agribisnis Klaster Peternakan.....	112
4.9.5.5 Sistem Agribisnis Klaster Perikanan.....	113
5. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELUARAN PADA KAWASAN	
AGROPOLITAN KOTA BATU	114
5.1 Implementasi Kebijakan Pengeluaran pada Kawasan Agropolitan Kota	
Batu	114
5.1.1 Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2011	114
5.1.1.1 Pendapatan Daerah.....	124

5.1.1.2	Belanja Daerah	129
5.1.1.3	Pembiayaan Daerah.....	137
5.1.2	Rencana Kebijakan Pengeluaran pada Kawasan Agropolitan Kota Batu	141
5.1.2.1	Sub Sistem Agribisnis Hulu	141
5.1.2.2	Sub Sistem Agribisnis Budidaya.....	143
5.1.2.3	Sub Sistem Agribisnis Hilir	143
5.1.2.4	Sub Sistem Penunjang.....	170
5.1.2.5	Sistem Prasarana Agropolitan	177
5.1.3	Implementasi Kebijakan Pengeluaran pada Kawasan Agropolitan Kota Batu	191
5.1.3.1	Implementasi Kebijakan Pengeluaran untuk Sub Sistem Agribisnis Hulu	191
5.1.3.2	Implementasi Kebijakan Pengeluaran untuk Sub Sistem Usaha Tani	199
5.1.3.3	Implementasi Kebijakan Pengeluaran untuk Sub Sistem Agribisnis Hilir	202
5.1.3.4	Implementasi Kebijakan Pengeluaran untuk Sub Sistem Penunjang	208
5.1.4	Implementasi Kebijakan Perpajakan dan Retribusi pada Kawasan Agropolitan Kota Batu	229
5.1.4.1	Pajak Bumi dan Bangunan.....	229
5.1.4.2	Retribusi.....	232
5.2	Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pengeluaran pada Kawasan Agropolitan Kota Batu	233
5.2.1	Faktor Disposisi atau Sikap	233
5.2.2	Faktor Tipe manfaat	234
5.3	Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengeluaran pada Kawasan Agropolitan Kota Batu	235
5.3.1	Faktor Komunikasi	235
5.3.1.1	Kurangnya Koordinasi Tim Program Kerja Agropolitan ..	235
5.3.2	Faktor Sumber Daya	237
5.3.2.1	Kurangnya Sumber Dana.....	237
5.3.2.2	Penyempitan Lahan Pertanian	238
5.3.2.3	Pendampingan Penyuluh Lapangan Kurang Efektif.....	239
5.3.2.4	Rendahnya SDM Masyarakat Petani.....	243
5.3.3	Disposisi atau Sikap	245
5.3.3.1	Perubahan Visi dari Sentra Pertanian ke Sentra Pariwisata	245
5.3.4	Faktor Struktur Birokrasi	248
5.3.4.1	Belum Terbentuknya Badan Penyuluhan.....	248
5.3.4.2	Belum Ada KUD yang Mengangani Seluruh Sektor Agropolitan	248
5.3.5	Faktor Kepentingan yang Dipengaruhi	249
5.3.6	Faktor Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang terlibat	249
5.3.6.1	Peralihan Transaksi dari Pasar Batu ke Pasar Pujon dan Pasar Karang Ploso	249
5.3.7	Faktor Karakteristik Lembaga dan Penguasa.....	251

5.3.7.1 Ekspektasi BUMD terhadap BUMD.....	251
5.3.7.2 Preferensi Walikota Batu dalam Prioritas Pembangunan Ekonomi	252
5.3.8 Faktor Kepatuhan dan Daya Tanggap Implementor	252
5.3.8.1 Pemberian Izin Pitanisasi di Hutan yang Mengurangi Debit Air	252
6. KESIMPULAN DAN SARAN	255
DAFTAR REFERENSI	258
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Perubahan Iklim dan MDGs	2
Tabel 1.2.	Laju dan Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007-2010 (persen).....	6
Tabel 1.3.	Laju dan Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha semester 1 2011 (persen)	7
Tabel 1.4.	Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007 - semester 1 2011 (persen)	8
Tabel 1.5.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Daerah (1998-2011).....	9
Tabel 1.6.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Indonesia Menurut Daerah (Maret 2010- Maret 2011)	10
Tabel 2.1.	Tinjauan Antarpemelitian	21
Tabel 4.1.	Penduduk Kota Batu	87
Tabel 4.2.	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur	88
Tabel 4.3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan PDRB tahun 2006-2010	90
Tabel 4.4.	Ketersediaan Alat/Mesin Pertanian yang Digunakan Tahun 2009	97
Tabel 4.5.	Jumlah Kebutuhan Pupuk Tahun 2009.....	97
Tabel 4.6.	Embrio Kegiatan Pertanian.....	102
Tabel 4.7.	Pemusatan Kawasan dan Distribusi Sub Sektor Tanaman Pangan	103
Tabel 4.8.	Pemusatan Kawasan dan Distribusi Sub Sektor Tanaman Sayuran	104
Tabel 4.9.	Pemusatan Kawasan dan Distribusi Sub Sektor Tanaman Buah-Buahan	104
Tabel 4.10.	Pemusatan Kawasan dan Distribusi Sub Sektor Tanaman Hias... ..	105
Tabel 4.11.	Pemusatan Kawasan dan Distribusi Sub Sektor Peternakan	105
Tabel 4.12.	Pemusatan Kawasan dan Distribusi Sub Sektor Perikanan	106
Tabel 4.13.	Pembagian Klaster Pertanian.....	107
Tabel 4.14.	Sistem Agribisnis Klaster Tanaman Pangan	110
Tabel 4.15.	Sistem Agribisnis Klaster Tanaman Buah.....	110
Tabel 4.16.	Sistem Agribisnis Klaster Tanaman Sayuran	111
Tabel 4.17.	Sistem Agribisnis Klaster Tanaman Hias	112
Tabel 4.18.	Sistem Agribisnis Klaster Peternakan	112
Tabel 4.19.	Sistem Agribisnis Klaster Perikanan	113
Tabel 5.1.	Struktur Ekonomi atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2000 dan 2010	117
Tabel 5.2.	Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2011	124
Tabel 5.3.	Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011	126
Tabel 5.4.	Proyeksi Pendapatan Dana Berimbang Tahun 2011	127
Tabel 5.5.	Proyeksi Pendapatan Lain-Lain yang Sah Tahun Anggaran 2011	128
Tabel 5.6.	Rencana Belanja Tahun Anggaran 2011	129

Tabel 5.7.	Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 Menurut Urusan Wajib Pemerintah Daerah	135
Tabel 5.8.	Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 Menurut Urusan Pilihan Pemerintah Daerah	137
Tabel 5.9.	Rincian Pembiayaan Tahun Anggaran 2011	138
Tabel 5.10.	Ringkasan APBD Kota Batu Tahun Anggaran 2011	140
Tabel 5.11.	Rencana Lokasi Penyediaan Bibit	142
Tabel 5.12.	Sistem Positif dan Negatif Rencana Persampahan	186
Tabel 5.13.	Sistem Positif dan Negatif Rencana Air Limbah <i>On Site</i>	189
Tabel 5.14.	Sistem Positif dan Negatif Rencana Air Limbah <i>Off Site</i>	190
Tabel 5.15.	Implementasi Kebijakan Pengeluaran untuk Subsistem Agribisnis Hulu	192
Tabel 5.16.	Implementasi Kebijakan Pengeluaran untuk Subsistem Agribisnis Usata Tani (<i>On Farm</i>)	200
Tabel 5.17.	Implementasi Kebijakan Pengeluaran untuk Subsistem Agribisnis Hilir	203
Tabel 5.18.	Implementasi Kebijakan Pengeluaran untuk Subsistem Penunjang	209
Tabel 5.19.	Persentase Penduduk Usia 15Ttahun Keatas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Kota Batu tahun 2008-2010	243
Tabel 5.20.	Ringkasan Faktor-faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Fiskal pada Kawasan Agropolitan Kota Batu	254

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.	Pemanfaatan Ruang Faktual Kota Batu.....	14
Grafik 1.2.	Produk Domestik Regional Bruto Kota Batu Tahun 2000-2010.....	15
Grafik 1.3.	Komponen Produk Domestik Regional Bruto Kota Batu Tahun 2009	16
Grafik 4.1.	Piramida Penduduk.....	89
Grafik 5.1.	Struktur Ekonomi Kota Batu	119
Grafik 5.2.	Perubahan Struktur Ekonomi Kota Batu Tahun 2000-2010.....	120



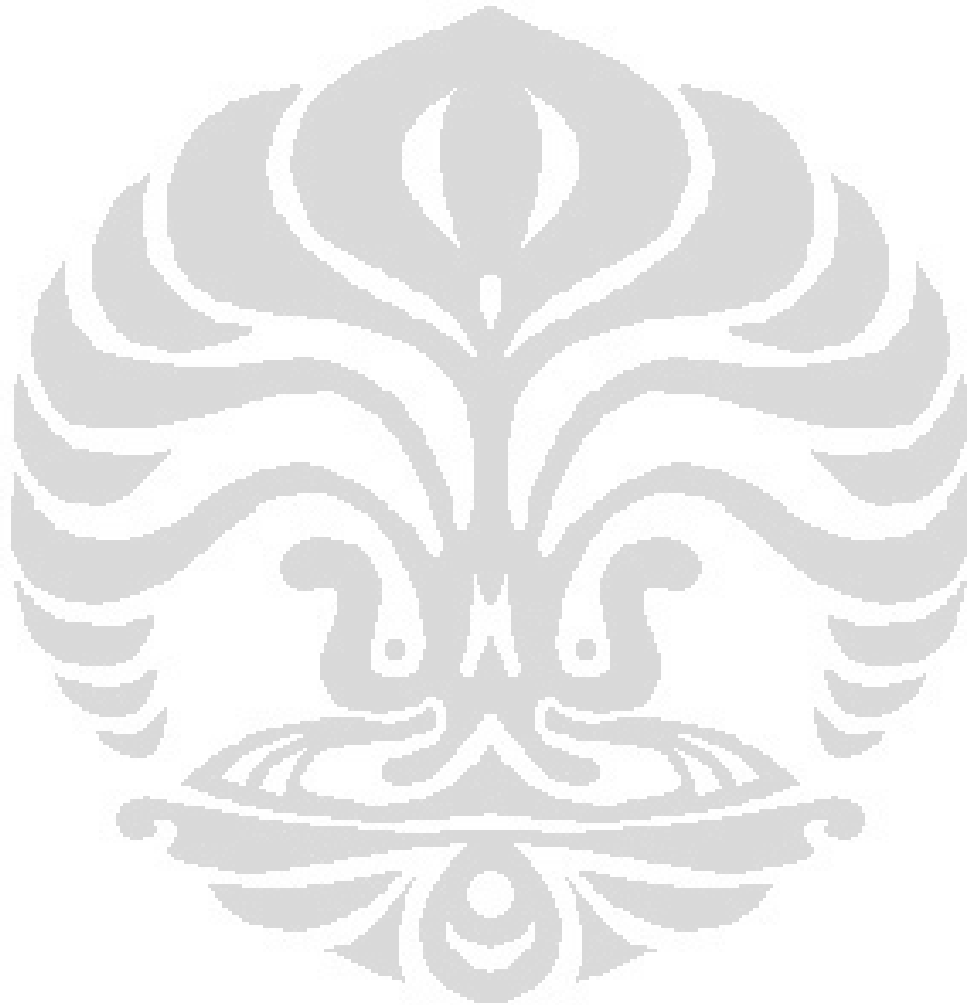
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Hubungan Antar Faktor Implementasi Kebijakan.....	36
Gambar 2.2. Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle.....	41
Gambar 2.3. Sketsa Agropolitan	46
Gambar 2.4. Alur Pemikiran	66
Gambar 3.1. Komponen dalam Analisis Data (<i>Interactive Model</i>).....	72
Gambar 3.2. Proses Penelitian.....	74
Gambar 4.1. Peta Kota Batu	80
Gambar 4.2. Pusat Kawasan Agropolitan Kecamatan Bumiaji.....	108
Gambar 4.3. Hirarki Pusat Pelayanan Kecamatan Bumiaji.....	109
Gambar 5.1. Rencana Pengembangan Agribisnis Sektor Tanaman Pangan	148
Gambar 5.2. Rencana Pengembangan Agribisnis Sektor Tanaman Sayuran ...	152
Gambar 5.3. Rencana Pengembangan Agribisnis Sektor Tanaman Buah.....	156
Gambar 5.4. Rencana Pengembangan Agribisnis Sektor Tanaman Hias.....	160
Gambar 5.5. Rencana Pengembangan Agribisnis Sektor Peternakan	164
Gambar 5.6. Rencana Pengembangan Agribisnis Sektor Perikanan	169
Gambar 5.7. Keterkaitan Sektor Peternakan-Perikanan- Tanaman Pangan	169
Gambar 5.8. Lokasi Pengambilan Contoh Air Limbah	170
Gambar 5.9. Rencana Sistem Jaringan Air Bersih	180
Gambar 5.10 Rencana Sistem Persampahan	187
Gambar 5.11 Sistem Jaringan Drainase/Sanitasi.....	188
Gambar 5.12 Sistem Jaringan dengan Treatment.....	188
Gambar 5.13 Pengolahan Limbah <i>On Site</i>	190

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara Mendalam dan Observasi
2. Transkrip wawancara mendalam Ibu Sri Wahyuni, Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemerintah Kota Batu.
3. Transkrip wawancara mendalam Bpk. Suwoko, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemerintah Kota Batu.
4. Transkrip wawancara mendalam Bpk. Tunggul Madyantono, Sekretaris Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Pemerintah Kota Batu.
5. Transkrip wawancara mendalam Ibu Nindya Dwi S., Kepala Seksi Distribusi Pangan, Kantor Ketahanan Pangan Pemerintah Kota Batu.
6. Transkrip wawancara mendalam Ibu Endang Dwi (Kepala Seksi Penanaman Modal, Bidang Perekonomian) dan Bpk. Abdillah (Kepala Bidang Perekonomian) Sekretariat Daerah Kota Batu.
7. Transkrip wawancara mendalam Ibu Puspa Permanasari, Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Energi, Dinas Sumber Daya Air dan Energi Pemerintah Kota Batu.
8. Transkrip wawancara mendalam Bpk. Heru Waskito, Kepala Bidang Usaha Ekonomi dan Kelembagaan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Batu.
9. Transkrip wawancara mendalam Bpk. Awanto Pribowo, Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Batu.
10. Transkrip wawancara mendalam Ibu Luki Budiarti, Ketua Gapoktan Mitra Arjuno dan juga sebagai Pemilik CV Arjuno Flora (sektor hortikultura) .
11. Transkrip wawancara mendalam Bpk. Winardi (Ketua Gapoktan Langgeng Mandiri) dan Bpk. Miskan (Sekretaris Gapoktan)
12. Transkrip wawancara mendalam Ibu Enny Rachyuningsih, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu.
13. Transkrip FGD dengan Bappeda Kota Batu, SKPD dan lembaga teknis terkait, serta masyarakat petani dan kelompok tani
14. Keputusan Walikota Batu Nomor 180/59/KEP/422.01 3/2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Kota Batu
15. Lokasi Kawasan Agropolitan Tahun 2002-2009, Laporan Data Base Kawasan Agropolitan Tahun 2010, Kementerian Pertanian RI.
16. Produk Domestik Regional Bruto Kota Batu atas Dasar Harga Berlaku (Tahun 2006-2010)
17. Produk Domestik Regional Bruto Kota Batu atas Dasar Harga Konstan (Tahun 2006-2010)
18. Rekap Usulan Prioritas Rancangan Renja SKPD Tahun Anggaran 2012
19. Peta Kota Batu
20. Peta Batas Administrasi Kota Batu
21. Peta Batas Administrasi Kecamatan Bumiaji
22. Peta Arah Struktur Ruang Kawasan Agropolitan Kota Batu

23. Peta Klaster Pertanian
24. Peta Rencana Jaringan Jalan
25. Peta Rencana Jaringan Listrik
26. Peta Rencana Jaringan Sampah
27. Peta Rencana Jaringan Telepon
28. Foto Kegiatan Agropolitan Kota Batu



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dunia tengah menatap masa depan dengan sumber daya paling dasar yakni bahan pangan, energi, dan air yang semakin langka. Era saat ini dapat dikatakan *the end of the age of abundance* atau berakhirnya masa keberlimpahan. Dampak negatif perubahan iklim semakin nyata dan terbukti telah menerpa di Indonesia. Bukti dan dampak tersebut baru-baru ini telah disampaikan melalui *The Indonesia Country Report on Climate Variability and Climate Change* yang disusun oleh para ahli dari berbagai sektor dan institusi terkait. Bukti-bukti tersebut sesuai dengan hasil kajian secara global yang dilakukan oleh *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)*. Dampak-dampak tersebut memiliki tantangan terhadap pembangunan dalam aspek lingkungan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan, serta terhadap pencapaian tujuan pembangunan Indonesia (Witoelar, hal.iii). Perubahan iklim mengancam usaha penanggulangan kemiskinan di Indonesia dan pencapaian Target Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals – MDGs*) (lihat Tabel 1.1).

Salah satu perubahan iklim ini berimplikasi besar pada ketahanan pangan nasional. Perubahan iklim ekstrem membuat produksi pangan turun di tengah permintaan yang tetap, bahkan naik, sehingga harga bahan pangan pun terus meningkat. Di Jayapura misalnya, sekitar 13.000 warga yang tinggal di dua distrik di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, yaitu Distrik Homeo dan Distrik Wandai terancam kekurangan pangan. Cuaca buruk yang menerjang kawasan itu sejak tiga bulan terakhir (Agustus 2011) menyebabkan warga tidak bisa panen hasil kebunnya. Kalaupun ada beras, harganya melambung menjadi Rp 500.000 per karung ukuran 15 kg (“Gagal Panen”, par.1 dan 3). Krisis pangan tak hanya terjadi di Indonesia, tapi merata hampir di seluruh dunia. Saat ini negara-negara produsen cenderung mengamankan produksinya untuk kebutuhan dalam negeri.

Tabel 1.1
Perubahan Iklim dan MDGs

No.	MDGs	Potensi Dampak Perubahan Iklim pada MDGs
1	Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan ekstrim	Perubahan iklim diperkirakan akan: <ul style="list-style-type: none"> • Menghancurkan hutan, populasi ikan, padang rumput, dan lahan bertanam yang diandalkan sebagai sumber makanan dan penghasilan • Merusak perumahan rakyat miskin, sumber air dan kesehatan yang akan melemahkan kemampuan mereka mencari nafkah • Meningkatkan ketegangan sosial soal penggunaan sumber-sumber nafkah dan memaksa masyarakat berpindah
2	Mencapai pendidikan dasar secara universal	Perubahan iklim dapat melemahkan kemampuan anak untuk belajar di sekolah <ul style="list-style-type: none"> • Lebih banyak anak (terutama anak perempuan) kemungkinan akan mesti keluar sekolah untuk merawat keluarga dan membantu mencari nafkah • Kurang gizi dan penyakit di kalangan anak-anak dapat mengurangi kehadiran mereka di sekolah dan mempengaruhi proses pembelajaran mereka di kelas • Banjir dan angin kencang merubuhkan bangunan sekolah, dan menyebabkan pengungsian
3	Meningkatkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan	Perubahan iklim diperkirakan memperburuk berbagai ketimpangan gender yang ada <ul style="list-style-type: none"> • Perempuan cenderung untuk bergantung pada lingkungan alam sebagai sumber kehidupan mereka ketimbang laki-laki, dan karena itu lebih rentan ketimbang laki-laki terhadap ketidakmenentuan dan perubahan iklim • Perempuan dan anak perempuan biasanya ditugaskan mengangkut air, mencari makan ternak, kayu bakar, dan juga makanan. Di masa iklim yang sulit mereka harus menghadapi sumber daya alam (SDA) yang makin terbatas dan beban yang lebih berat • Rumah tangga yang dikepalai perempuan dengan harta benda yang seadanya juga umumnya terkena dampak parah bencana yang berkaitan dengan iklim
4	Menurunkan angka kematian anak	Perubahan iklim akan menyebabkan lebih banyak kematian dan penyakit akibat gelombang panas, banjir, kemarau panjang, dan angin kencang
5	Memperbaiki kesehatan ibu	Dapat meningkatkan kejadian berbagai penyakit yang ditularkan melalui nyamuk atau melalui air. Anak-anak dan ibu hamil terutama rentan terhadap penyakit ini
6	Mengatasi berbagai penyakit	Diperkirakan akan mengurangi kualitas dan kuantitas air minum, dan memperparah kurang gizi di kalangan anak-anak
7	Menjamin kelestarian lingkungan	Perubahan iklim akan mengubah kualitas dan kuantitas SDA dan ekosistem, sebagian diantaranya mungkin tidak dapat dipulihkan. Perubahan ini juga akan menurunkan keanekaragaman hayati dan memperparah kerusakan lingkungan yang sedang berlangsung
8	Mengembangkan suatu kemitraan global	Perubahan iklim merupakan tantangan global, dan untuk menghadapinya dibutuhkan kerjasama global, terutama dalam menguatkan negara-negara berkembang menangani kemiskinan dan ketidaksetaraan. Perubahan iklim mendesak perlunya negara donor meningkatkan komitmen bantuan resmi pembangunan mereka dan memberikan sumber daya tambahan untuk adaptasi.

Sumber: Oxfam, Nota Ringkas. *Berhadapan terhadap Perubahan Iklim. Apa yang Dibutuhkan oleh Negara Miskin dan Siapa yang Harus Membiayai?*, 2007, dalam buku "Sisi Lain Perubahan Iklim: Mengapa Indonesia Harus Beradaptasi untuk Melindungi Rakyat Miskinnya", Jakarta : UNDP, 2007.

Kondisi krisis pangan ini menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam menyiapkan kebutuhan pangan, pemerintah perlu turun tangan dalam pemantauan sekaligus mendampingi petani, karena walaupun pemerintah telah menyusun kebijakan khusus untuk mendorong produktivitas dan transformasi kapasitas kaum tani, namun belum tentu mampu mengurangi disparitas teknologi dan ekonomi pemodal dan kaum tani, sehingga masa depan kaum tani masih jauh dari terjamin apalagi dalam globalisasi dan lingkungan kompetitif yang terus meningkat (Kay, 1997, hal.11-24).

Menjawab tantangan untuk ketahanan pangan nasional, Kementerian Pertanian RI mencanangkan strategi Pembangunan Pertanian yang *pro growth* (pertumbuhan perekonomian nasional), *pro job* (penciptaan lapangan kerja), *pro poor* (pengurangan kemiskinan), dan *pro environment* (pelestarian lingkungan hidup). Strategi pembangunan pertanian ini mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. RPJMN menjadi acuan dalam penyusunan RPJM Daerah dan menjadi pedoman bagi pimpinan nasional dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. Sebenarnya sejak RPJMN 2004-2009 strategi pembangunan ekonomi yang *pro growth*, *pro jobs*, dan *pro poor* telah ditetapkan oleh pemerintah (Badan Pusat Statistik, hal.14).

Visi pertanian tahun 2010-2014 yaitu terwujudnya pertanian industrial yang unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya saing, ekspor, dan kesejahteraan petani. Salah satu kebijakan strategis pembangunan pertanian adalah dengan Pengembangan Sistem dan Usaha Agribisnis, dengan mengembangkan sistem dan usaha agribisnis, pemerintah berkomitmen untuk tidak saja meningkatkan produktivitas petani tetapi juga efisiensi usaha dan kesejahteraan petani. Untuk pengembangan sistem usaha agribisnis Kementerian Pertanian RI telah mengembangkan beberapa instrumen kebijakan yang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan. Instrumen kebijakan tersebut yaitu: (1) upaya peningkatan produksi komoditi pertanian dilaksanakan dengan menerapkan konsep pengembangan agribisnis, (2) Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), (3) Pengembangan Kawasan Agropolitan, (4) Pengembangan Agribisnis

oleh LM3, (5) Penyediaan Kredit Usaha Tani (KUT), (6) Pengembangan Kelembagaan *Micro Finance*, (7) Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (Poktan, Gapoktan, Lembaga Ekonomi Petani Berbadan Hukum), (8) Pengembangan Koperasi Pertanian, (9) Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis, (10) Melaksanakan Diklat Agribisnis dan Kewirausahaan untuk SDM Pertanian (Sekretariat Pokja Agropolitan, hal.56).

Dari 10 instrumen diatas, instrumen yang dikaji penulis adalah program Pengembangan Kawasan Agropolitan. Program ini bukan hanya dapat digunakan untuk mengatasi krisis pangan dengan memfokuskan kegiatan ekonomi pada sektor pertanian, namun juga dapat menumbuhkan perekonomian yang kuat, mengingat negara Indonesia sejatinya adalah negara agraris. Adanya krisis multi dimensi menyebabkan konsep pengembangan kawasan agropolitan dilirik kembali setelah perekonomian nasional terpuruk. Konsep pengembangan kawasan agropolitan untuk negara-negara berkembang di Asia telah dianjurkan Friedman dan Douglass pada tahun 1975. Sejalan dengan hal ini, dengan melihat dinamika global yang terjadi serta memperhatikan potensi dan peluang keunggulan geografi dan sumber daya di Indonesia, serta mempertimbangkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, dalam kerangka MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025), Indonesia perlu memposisikan dirinya sebagai basis ketahanan pangan dunia, pusat pengolahan produk pertanian, perkebunan, perikanan, dan sumber daya mineral, serta pusat mobilitas logistik global. Fokus pengembangan MP3EI ini diletakkan pada 8 program utama yaitu pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, dan telematika, serta pengembangan kawasan strategis. Oleh karena itu, semua tema pembangunan 6 koridor ekonomi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-NT, Papua-Kep.Maluku) sebagai salah satu strategi dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi mengarah pada sasaran posisi untuk menjadi basis ketahanan pangan dunia, pusat pengolahan produk pertanian, perkebunan, perikanan, dan sumber daya mineral, serta pusat mobilitas logistik global (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, MP3EI, 2011).

Pengembangan kawasan agropolitan di Indonesia, yang diuji coba mulai tahun 2002 merupakan salah satu upaya dalam merealisasikan pembangunan

ekonomi berbasis pertanian pada kawasan pertanian terpilih dengan pendekatan pertanian industri. Kawasan pertanian yang terpilih ini dapat merupakan kawasan atau sentra produksi pertanian berbasis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, atau berbasis komoditas campuran.

Rintisan pengembangan kawasan agropolitan dimulai tahun 2002 setelah adanya kesepakatan antara Menteri Pertanian dan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah. Program ini mendapat dukungan departemen lain seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bappenas, dan instansi lainnya. Pada tahun 2002 rintisan pengembangan kawasan agropolitan dilaksanakan di 8 kabupaten yaitu Kabupaten Agam (Sumatera Barat), Kabupaten Rejang Lebong (Bengkulu), Kabupaten Cianjur (Jawa Barat), Kabupaten Kulon Progo (DIY), Kabupaten Bangli (Bali), Kabupaten Baru (Sulawesi Selatan), Kabupaten Kutai Timur (Kalimantan Timur), dan Kabupaten Boalemo (Gorontalo). Khusus untuk Gorontalo, gubernur Gorontalo (Fadel Muhammad) melaksanakan rintisan pengembangan kawasan agropolitan ini di semua kabupaten/kota dengan basis komoditi jagung (Suwandi,2005, hal.71). Penetapan kabupaten pelaku program tahun 2002 masih bersifat “*top down*”, yaitu yang menetapkan Departemen Pertanian dengan memilih masing-masing atas dasar kabupaten yang memiliki sentra produksi berbasis tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan.

Sebagai gerakan pengembangan wilayah, yang melibatkan masyarakat dan merupakan program sinergi antar instansi dan antar sektor program pengembangan kawasan agropolitan yang diintrodusir pada tahun 2002, dalam implementasinya telah menarik perhatian banyak kalangan pemerintah kabupaten/kota, sehingga pada tahun 2003 telah berkembang menjadi 61 kawasan. Untuk tahun 2003 penetapan kabupaten/kota diusulkan oleh gubernur berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah pusat (dalam hal ini Departemen Pertanian) (Suwandi,2005, hal.72).

Pengembangan kawasan agropolitan bukan saja harus disiapkan sebagai suatu revolusi mental petani dan pejabat saja, tetapi juga harus didukung oleh komitmen nasional yang konsisten untuk jangka panjang. Pemerintah telah memasukkan target pengembangan jumlah kawasan agropolitan yang tertangani

dalam RPJMN tahun 2010-2014 sejumlah 205 kawasan dengan alokasi dana Rp 780 Milyar (berarti sekitar Rp3,8 Milyar per kawasan). Sejalan dengan itu, Kementerian Pertanian RI pun telah menargetkan rencana pencapaian rencana strategis kawasan agropolitan tahun 2010-2014 sejumlah 271 kawasan. Sementara itu, sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2009 tercatat jumlah kawasan agropolitan telah bertambah menjadi 147 kawasan di seluruh Indonesia (Tim Pokja Pengembangan Kawasan Agropolitan, hal.61).

Perkembangan jumlah kawasan agropolitan yang terbentuk sejak 2002 dinilai memang cukup maju dan juga memiliki optimisme yang tinggi bila dilihat dari rencana pengembangan jumlah kawasan, namun bagaimana dengan manfaatnya secara langsung bagi masyarakat? Dan bagaimana kontribusi sektor agropolitan ini dalam pertumbuhan nasional? Hal ini dapat ditelaah dengan melihat kontribusi dan laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan oleh sektor pertanian dan tingkat kemiskinan masyarakat desa dan kota sebagaimana ditunjukkan oleh data tabel-tabel dibawah ini. Tabel 1.2 dan 1.3 menunjukkan laju pertumbuhan PDB sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan (yang terangkum dalam lingkup agropolitan) dalam beberapa tahun tidak terlalu signifikan jika dibanding dengan sektor lain. Ini berarti sektor pertanian belum benar-benar menjadi primadona bagi perekonomian nasional setelah diterapkan program pengembangan kawasan agropolitan sejak 2002 sampai sekarang.

Tabel 1.2

**Laju dan Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2007 – 2010 (persen)**

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan				Sumber Pertumbuhan			
		2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	3,5	4,8	4,1	2,9	0,5	0,6	0,5	0,4
2	Pertambangan dan Penggalian	1,9	0,7	4,4	3,5	0,2	0,1	0,4	0,3
3	Industri Pengolahan	4,7	3,7	2,2	4,5	1,2	0,9	0,6	1,1
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	10,3	10,9	14,3	5,3	0,1	0,1	0,1	0,0
5	Konstruksi	8,5	7,5	7,1	7,0	0,5	0,4	0,4	0,4
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	8,9	6,9	1,3	8,7	1,4	1,1	0,2	1,4
7	Pengangkutan dan Komunikasi	14,0	16,6	15,5	13,5	0,9	1,1	1,2	1,1

8	Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan	8,0	8,2	5,1	5,7	0,7	0,7	0,5	0,5
9	Jasa-Jasa	6,4	6,2	6,4	6,0	0,6	0,5	0,6	0,5
	PDB	6,3	6,0	4,6	6,1	6,3	6,0	4,6	6,1
	PDB Tanpa Migas	6,9	6,5	5,0	6,6	-	-	-	-

Sumber : Badan Pusat Statistik, Data Strategis 2011.

Sektor pengangkutan dan komunikasi selama tahun 2007-2010 selalu mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 14,0 persen (2007), 16,6 persen (2008), 15,5 persen (2009), dan 13,5 persen (2010). Bahkan kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi terhadap total pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai tingkat tertinggi pada tahun 2008 dan 2009. Sementara sektor perdagangan, hotel, dan restoran memberikan kontribusi pertumbuhan terbesar pada tahun 2007, 2008, dan 2010. Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar kedua selama periode ini.

Tabel 1.3

Laju dan Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha Semester 1 2011 (persen)

Lapangan Usaha Pertumbuhan <i>y-on-y</i>		Semester I- 2010 Terhadap Semester II- 2009	Semester I- 2010 Terhadap Semester I- 2009	Sumber
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	6,9	3,7	0,5
2	Pertambangan dan Penggalian	2,6	2,3	0,2
3	Industri Pengolahan	1,0	5,4	1,3
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	1,0	4,1	0,0
5	Konstruksi	0,5	6,2	0,4
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	2,7	8,7	1,4
7	Pengangkutan dan Komunikasi	2,7	12,1	1,0
8	Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan	3,8	7,1	0,6
9	Jasa-Jasa	2,1	6,3	0,6
	PDB	2,2	6,5	6,5
	PDB Tanpa Migas	2,5	7,0	-

Sumber : Badan Pusat Statistik, Data Strategis 2011.

Pada semester 1 tahun 2011, semua pertumbuhan terbesar masih berasal dari sektor perdagangan, hotel, dan restoram sebesar 1,4 persen terhadap total

pertumbuhan sebesar 6,5 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 8,7 persen (*year on year*). Sementara sektor industri pengolahan dan sektor pengangkutan-komunikasi memberikan kontribusi pertumbuhan masing-masing 5,4 persen dan sebesar 12,1 persen. Pada semester ini, pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi masih yang tertinggi dibanding sektor lain.

Tabel 1.4
Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2007 – Semester 1 2011 (persen)

Lapangan Usaha		2007	2008	2009	2010	Smt I- 2011
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	13,7	14,5	15,3	15,3	15,5
2	Pertambangan dan Penggalian	11,2	10,9	10,6	11,2	11,8
3	Industri Pengolahan	27,0	27,8	26,4	24,8	24,2
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
5	Konstruksi	7,7	8,5	9,9	10,3	10,1
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	15,0	14,0	13,3	13,7	13,7
7	Pengangkutan dan Komunikasi	6,7	6,3	6,3	6,5	6,5
8	Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan	7,7	7,4	7,2	7,2	7,3
9	Jasa-Jasa	10,1	9,7	10,2	10,2	10,2
	PDB	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	PDB Tanpa Migas	89,5	89,5	91,7	92,2	91,6

Sumber : Badan Pusat Statistik, Data Strategis 2011.

Distribusi PDB menurut sektor atau lapangan usaha atas dasar harga berlaku menunjukkan peran sektor-sektor ekonomi pada tahun tersebut. tiga sektor utama: sektor pertanian, industri-pengolahan, dan perdagangan, hotel dan restoran mempunyai peran lebih dari separuh dari total perekonomian yaitu sebesar 55,8 persen pada tahun 2007, 56,3 persen pada tahun 2008, 54,9 persen pada tahun 2009, dan 53,9 persen pada tahun 2010 serta 53,4 persen pada semester 1 tahun 2011. Pada tahun 2010 sektor industri pengolahan memberi

kontribusi terhadap total perekonomian sebesar 24,8 persen, sektor pertanian 15,3 persen, dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran 10,3 persen; sama halnya pada semester 1 tahun 2011 komposisi ini tidak berubah yaitu sektor industri pengolahan sebesar 24,2 persen, sektor pertanian 15,5 persen, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran 10,1 persen.

Tabel 1.5

**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia menurut Daerah
1998-2011**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
1998	17,60	31,90	59,50	21,92	25,72	24,23
1999	15,64	32,33	47,97	19,41	26,03	23,43
2000	12,30	26,40	38,70	14,60	22,38	19,14
2001	8,60	29,30	37,90	9,76	24,84	18,41
2002	13,30	25,10	38,40	14,46	21,10	18,20
2003	12,20	25,10	37,30	13,57	20,23	17,42
2004	11,40	24,80	36,10	12,13	20,11	16,66
2005	12,40	22,70	35,10	11,68	19,98	15,97
2006	14,49	24,81	39,30	13,47	21,81	17,75
2007	13,56	23,61	37,17	12,52	20,37	16,58
2008	12,77	22,19	34,96	11,65	18,93	15,42
2009	11,91	20,62	32,53	10,72	17,35	14,15
2010	11,10	19,93	31,02	9,87	16,56	13,33
2011	11,05	18,97	30,02	9,23	15,72	12,49

Sumber : Badan Pusat Statistik, Data Strategis 2011.

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia cenderung menurun selama periode 1998-2011. Pada tahun 1998 persentase penduduk miskin tercatat sebanyak 24,23 persen (49,5 juta orang). Tingginya angka kemiskinan tersebut dikarenakan krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan 1997 yang berakibat pada meroketnya harga-harga kebutuhan dan berdampak parah pada penduduk miskin. Sejalan dengan harga-harga kebutuhan yang kembali menurun,

angka kemiskinan juga menurun. Selama periode 1992-2002 jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 9,57 juta orang dari 47,97 juta orang (23,43 persen dari total penduduk). Angka kemiskinan terus menurun dan mencapai 35,1 juta orang (15,97 persen dari jumlah penduduk) pada tahun 2005. Sebagai akibat dari kebijakan pemerintah menaikkan harga minyak pada tahun 2005 yang berdampak pada meningkatnya harga-harga kebutuhan dasar, kemiskinan tercatat meningkat menjadi 17,75 persen (39,3 juta orang) pada tahun 2006, atau meningkat sebanyak 4,2 juta orang dibanding tahun 2005. Meskipun demikian selama periode 2007-2011, angka kemiskinan kembali turun. Pada tahun 2007 penduduk miskin tercatat 37,17 juta orang (16,58 persen). Beberapa program pemerintah yang ditujukan bagi penduduk miskin dijalankan pemerintah sejak 2005 memiliki dampak positif bagi penurunan angka kemiskinan, baik dalam jumlah maupun persentase penduduk miskin. Pada 2011 persentase penduduk miskin tercatat menurun menjadi 12,49 persen (30,02 juta orang).

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Tabel 1.6

**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
di Indonesia menurut Daerah
Maret 2010 – Maret 2011**

Indeks/Tahun	Kota	Desa	Kota+Desa
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
Maret 2010	1,57	2,80	2,21
Maret 2011	1,52	2,63	2,08
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)			
Maret 2010	0,40	0,75	0,58
Maret 2011	0,39	0,70	0,55

Sumber : Badan Pusat Statistik, Data Strategis 2011.

Pada periode Maret 2010 – Maret 2011 Indeks Kedalaman Kemiskinan (p1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (p2) menurun. Indeks kedalaman kemiskinan turun dari 2,21 pada Maret 2010 menjadi 2,08 pada Maret 2011. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,58 menjadi 0,55 pada periode yang sama. Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan masih tetap lebih tinggi di perdesaan daripada di perkotaan, sama seperti tahun 2009. Pada tahun 2010, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan untuk perkotaan hanya 1,57 sementara di daerah perdesaan mencapai 2,80. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan untuk perkotaan hanya 0,40 sementara di daerah perdesaan mencapai 0,75. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perdesaan lebih buruk dari daerah perkotaan.

Permasalahan ini penting untuk dikaji, apakah strategi pembangunan nasional pemerintah telah didukung dengan implementasi kebijakan-kebijakannya yang tepat?. Untuk mendukung keberhasilan program agropolitan ini peranan pemerintah dalam menetapkan kebijakan fiskal sangatlah krusial. Kebijakan fiskal memiliki dua instrumen pokok, yakni kebijakan perpajakan dan kebijakan pengeluaran. Dengan menggunakan dua komponen utama tersebut kebijakan fiskal mampu menjawab pertanyaan tentang bagaimana pengaruh penerimaan dan pengeluaran negara terhadap kondisi perekonomian, tingkat pengangguran, dan inflasi. Dalam konteks perencanaan pembangunan ekonomi, rancangan kebijakan fiskal tidak hanya diarahkan untuk pengembangan aspek ekonomi seperti pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan stabilisasi ekonomi, tetapi juga peningkatan aspek sosial seperti pemerataan pendapatan, pendidikan, dan kesehatan. Sebagai contoh dari negara lain, sebagai negara Asia termaju, pemerintah Jepang pun selalu memperhatikan perkembangan kondisi sektor pertaniannya. Manakala sektor pertanian dianggap tidak menarik lagi oleh para generasi mudanya, pemerintah Jepang memberikan insentif-insentif untuk mengakselerasi pertanian lokal. Di 20 tahun terakhir ini, pemerintah telah memfasilitasi pertanian lokal untuk memasuki pasar. Menjual tanah pertanian

kepada kepentingan komersial, akan dipajaki sangat tinggi oleh pemerintah, sementara memberikan tanah tersebut ke anak untuk pertanian hanya dipajaki sangat minim. Pusat pertanian juga mengundang anak-anak sekolah untuk menanam dan memanen, untuk meningkatkan minat mereka (Arli, par.8).

Sementara jika dilihat kebijakan yang telah diambil pemerintah sampai saat ini untuk mendorong pertanian dirasa masih belum signifikan. Berbagai kebijakan diambil pemerintah menyikapi harga bahan pangan yang terus naik. Menko Perekonomian menjelaskan telah menyiapkan dana darurat sebesar Rp 3 triliun sebagai jurus pemerintah menghadapi krisis pangan. Rincian dana terbagi Rp 1 triliun untuk stabilitasi pangan dan Rp 2 triliun mengantisipasi iklim ekstrem. Jurus lain yakni membebaskan bea masuk sejumlah bahan pangan, pakan ternak, dan bahan baku pupuk. Apakah jurus ini jitu? Yang pasti pembebasan bea masuk ini membuat negara kehilangan pendapatan cukup besar. Termasuk mengancam nasib dan masa depan petani. Seharusnya pemerintah berupaya bagaimana caranya supaya produksi pangan meningkat, bukan bergantung pada impor dari negara lain. Impor pangan per tahun menghabiskan devisa negara tak kurang Rp50 triliun. Mulai tahun 2012, Indonesia akan mengimpor 1 juta ton beras per tahun, ungkap Yingluck Shinawatra (“Yingluck”, par.8). Padahal, negeri Indonesia yang terkenal sebagai lumbung pangan dan negara agraris ini seharusnya mampu mengatasi peningkatan kebutuhan pangan (Sutjahjo, par.7). contoh kebijakan lain adalah impor teh dari Vietnam yang volumenya terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini karena turunnya bea masuk sejak diberlakukannya AFTA pada 1 Januari 2010, padahal Vietnam masih menerapkan bea masuk 50 persen (“Impor Teh”, par.1).

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan studi implementasi kebijakan pengeluaran untuk pengembangan kawasan agropolitan. Program pengembangan agropolitan banyak melibatkan penyediaan dan pembangunan sarana, infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM) dan aspek lainnya yang membutuhkan pembiayaan cukup besar. Sebagaimana hasil penelitian Byerlee dan Sain (1986, hal.961-969) bahwa insentif harga bukanlah isu utama terkait peningkatan produktivitas pertanian, misalnya di negara yang pertumbuhan produktivitas gandumnya lambat (tercatat adalah Timur Tengah dan

Afrika Utara) pengembangan teknologi yang tepat untuk pertanian, pengiriman sumberdaya pendukung, dan sistem perluasan adalah kendala yang lebih penting. Oleh karena itu, unsur *spending policy* harus menjadi pembahasan. *Spending policy* merupakan pembuka jalan untuk pengembangan kawasan agropolitan (Rosdiana, 2011). Kemudian, setelah berkembang dibutuhkan dukungan kebijakan perpajakan, apakah di Indonesia kebijakan perpajakan dapat memiliki peranan dan implikasi untuk mendorong pengembangan kawasan agropolitan sebagaimana berlaku di Jepang. Pertimbangan ini juga mengacu pada hasil penelitian Arestic dan Sawyer (2003, hal.3-25) yang menyatakan bahwa dibawah kondisi tertentu kebijakan fiskal adalah instrumen yang kuat untuk kebijakan ekonomi makro. Kebijakan fiskal dapat dan memang harus digunakan sebagai kunci perbaikan, ketika ekonomi membutuhkan dorongan permintaan agregat. Arestic dan Sawyer juga berpendapat bahwa jangkauan kebijakan fiskal dapat mempengaruhi tingkat penanaman modal dalam jangka panjang.

Mengingat sangat beragamnya kondisi masing-masing kawasan agropolitan dan keterbatasan peneliti untuk mengkaji semua kawasan agropolitan di Indonesia, sebagai langkah awal penulis harus memilih salah satu kawasan terdahulu untuk dikaji yang dinilai dapat menjadi objek yang cukup representatif dan memang memiliki nilai lebih sehingga dapat menjadi model untuk kawasan lain. Dalam penulisan kali ini penulis memilih kawasan agropolitan Kota Batu (Jawa Timur) sebagai objek penelitian untuk dikaji lebih mendalam dan dianalisis mengenai perkembangan kawasan agropolitannya dan kebijakan fiskal yang diimplementasikannya.

Kawasan Agropolitan Kota Batu merupakan salah satu kawasan rintisan agropolitan (Suwandi, hal.72) dengan latar belakang untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan daerah (*Executive Summary Penyusunan Master Plan dan Action Plan Agropolitan Kota Batu*, hal.1), dengan komoditas utama adalah tanaman hias. Seiring jalannya waktu, berbeda dengan kawasan agropolitan lainnya kawasan ini mampu berkembang dengan komoditas utama tidak hanya tanaman hias, namun juga mencakup 5 klaster pertanian lainnya yang dikembangkan dalam agropolitan yaitu tanaman pangan, tanaman sayuran dan buah, perkebunan, perikanan dan peternakan (*Executive Summary Penyusunan*

Master Plan dan Action Plan Agropolitan Kota Batu, hal.3). Masing-masing klaster ini berkontribusi dalam pendapatan daerah kota Batu.

Penduduk Kota Batu sebagian besar bekerja sebagai petani dimana hasil pertanian utama dari Kota Batu adalah buah, bunga, dan sayur mayur. Hasil perkebunan andalan yang menjadi komoditi utama adalah buah apel (“Profil Kota Batu”). Dari luas wilayah 202,30km² , 56,59 % nya diperuntukkan untuk pertanian.

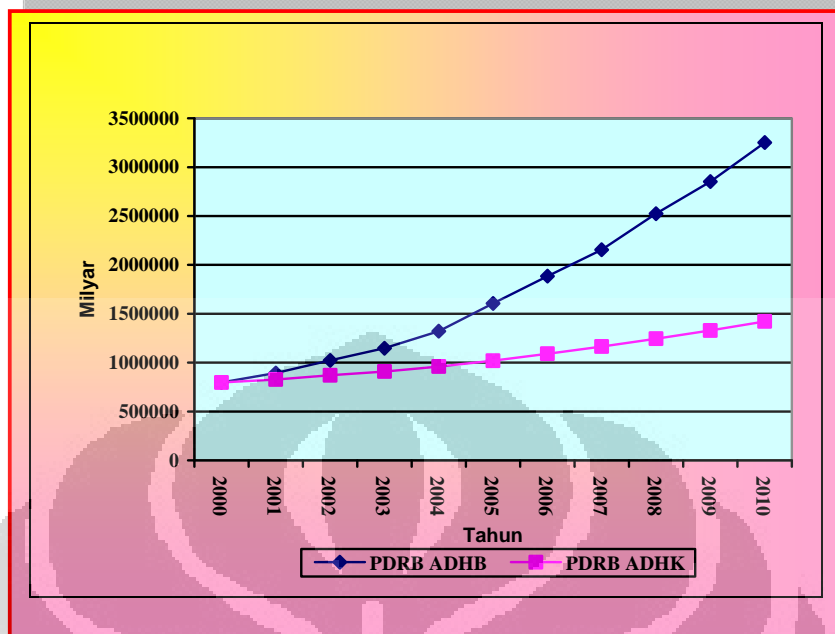


Sumber : Naskah Akademik Fakta dan Analisa RTRW Kota Batu 2010 - 2030

Grafik 1.1

Pemanfaatan Ruang Faktual Kota Batu

Dibandingkan dengan daerah lain di sekitar Kota Batu, secara umum peningkatan kegiatan ekonomi di Kota Batu menunjukkan terjadi perkembangan perekonomian yang semakin cepat. Pembangunan tempat wisata, hotel, perumahan dan kompleks pertokoan yang semakin banyak menambah gerak roda perekonomian di Kota Batu. Selain itu penggunaan alat komunikasi yang sudah merata sampai lapisan masyarakat bawah membuat pergerakan perekonomian juga meningkat (Bappeda, PDRB 2010 Kota Batu).



Sumber : Bappeda Kota Batu, PDRB 2010 .

Grafik 1.2

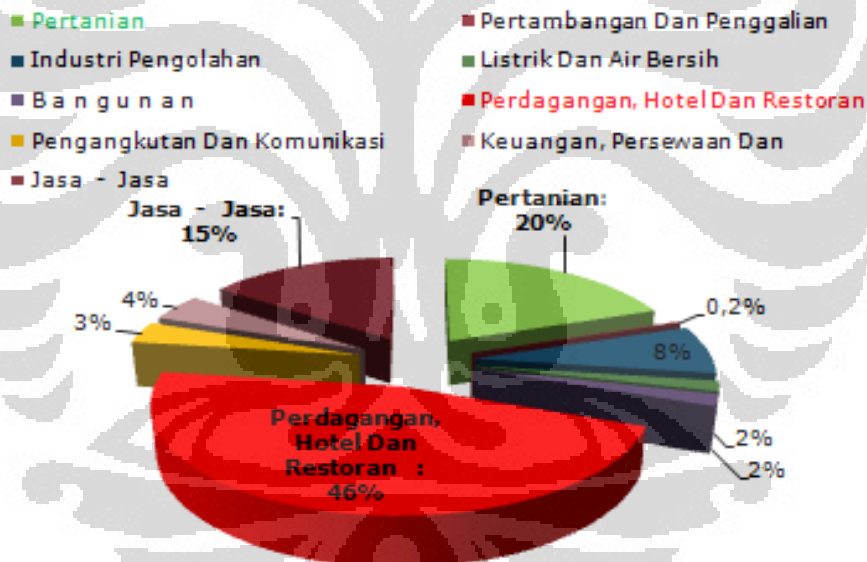
**Produk Domestik Regional Bruto Kota Batu Tahun 2000-2010
(dalam Milyar Rupiah)**

Selama lima tahun terakhir (2006-2010) perkembangan ekonomi Kota Batu atas dasar harga Konstan tidak berbeda jika dibandingkan dengan harga berlaku, yaitu selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan harga konstan 2000, laju pertumbuhan PDRB pada tahun 2010 digerakkan oleh semua sektor. (Bappeda Kota Batu, PDRB 2010). Sekarang Kota Batu merupakan daerah tujuan wisata terkemuka di Jawa Timur dan pertumbuhannya menduduki peringkat 4 nasional (““Pertumbuhan Ekonomi Kota Batu Peringkat 4 Nasional,” par.2)¹. Pertumbuhan ekonomi Kota Batu pada tahun 2010 relatif tinggi yaitu sebesar 7,01% (Bappeda Kota Batu, PDRB 2010, hal.53). Penulis pun tertarik dengan bagaimana Badan Perencanaan Kota Batu tetap konsisten dan komitmen

¹ Sampai dengan dituliskannya laporan penelitian ini, peneliti belum menemukan data langsung berupa publikasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bappenas, maupun BPS yang memuat peringkat pertumbuhan ekonomi nasional. Pernyataan ini diungkapkan oleh Arminda S. Alisyahbana, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada saat kunjungannya ke Kota Batu (Juni 2011). Peneliti berpendapat belum ada data yang terpublikasi karena laporan tahun 2011 belum resmi dikeluarkan.

menjaga kelestarian alam Kota Batu (yang juga merupakan salah satu MDGs) dengan menjaga tata ruang kotanya agar tetap *pro environment* (Rachyuningsih, 6 Oktober 2011).

Namun demikian, sektor pertanian merupakan sektor yang unik dan mempunyai ciri khas tersendiri dalam struktur perekonomian Kota Batu. Sektor ini relatif merupakan sektor yang tidak mendapat perhatian serius dalam aksi pembangunan. Mulai dari proteksi, kredit hingga kebijakan lain tidak satupun yang menguntungkan. Meski demikian sektor ini merupakan sektor yang sangat banyak menampung luapan tenaga kerja dan sebagian besar penduduk Kota Batu tergantung padanya. Secara umum kontribusi sektor pertanian Kota Batu dalam menyusun Produk Domestik Regional Bruto tidaklah sebesar sektor Perdagangan, hotel dan restoran (Bappeda Kota Batu, PDRB 2010, hal.53). Hal ini dapat dilihat dalam grafik dibawah ini.



Sumber : BPS Kota Batu, Batu Dalam Angka 2009.

Grafik 1.3

Komponen Produk Domestik Regional Bruto Kota Batu Tahun 2009

Peneliti menilai fenomena yang terjadi di Kota Batu ini hampir sama dengan fenomena pertanian nasional. Sumber daya alam, sumber daya budaya, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan sebenarnya potensial untuk

menjadikan sektor pertanian sebagai pembangunan ekonomi utama, secara eksplisit pula dinyatakan bahwa visi Kota Batu adalah menjadi sentra pertanian, pariwisata, dan pendidikan. Namun pada kenyataannya sektor pertanian belum mampu menjadi pendongkrak perekonomian rakyat dan kalah dengan sektor lainnya dalam kontribusi PDRB.

1.2 Pokok Permasalahan

Sektor pertanian sejatinya dapat mendukung perekonomian nasional dengan beragam SDA dan SDM yang dimiliki Indonesia. Namun sekarang ini sektor pertanian kurang diminati oleh generasi muda, apalagi ditambah kebijakan pemerintah yang kadang kurang menginsentif pembangunan sektor pertanian. Untuk itu melalui program yang digagas oleh Kementerian Pertanian, sekarang telah ditetapkan program pengembangan kawasan agropolitan untuk merevitalisasi sektor pertanian agar dapat menjadi penguat perekonomian nasional dan juga mengatasi krisis pangan akibat perubahan iklim. Terlaksananya program pengembangan kawasan agropolitan ini tidak lepas dari dukungan kebijakan pengeluaran yang diterapkan pemerintah. Belajar dari negara Asia yang telah maju seperti Jepang yang mampu memajukan sektor pertaniannya dengan dukungan kebijakan anggaran pengeluaran dan perpajakannya yang bersifat menginsentif, maka diperlukan suatu studi implementasi kebijakan pengeluaran untuk strategi pembangunan ekonomi *pro growth* melalui upaya pengembangan kawasan agropolitan.

Bertujuan lebih memfokuskan kajian agar menghasilkan pembahasan yang konkrit dan operasional, penulis memilih kawasan agropolitan Kota Batu sebagai *site* atau objek penelitian dalam penulisan ini, berdasarkan latar belakang pengembangan kawasan agropolitannya yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan daerah (*pro growth*) dan riwayat perkembangan kota Batu yang mampu meningkatkan perekonomian sehingga menjadi daerah yang menduduki peringkat ke 4 nasional dalam hal pertumbuhan ekonomi daerah. Namun ternyata pertumbuhan ekonomi yang pesat ini bukanlah disumbangkan oleh sektor pertanian melainkan sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang sejatinya bukanlah sektor perekonomian utama rakyat.

Berdasarkan ulasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan studi implementasi kebijakan fiskal pada kawasan agropolitan Kota Batu. Adapun pokok permasalahan (*research problem*) dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengeluaran untuk pengembangan kawasan agropolitan Kota Batu?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengeluaran di kawasan agropolitan Kota Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, secara umum penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis implementasi kebijakan pengeluaran untuk pengembangan kawasan agropolitan Kota Batu.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengeluaran di kawasan agropolitan Kota Batu,.

2.1 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademis maupun secara praktis.

1. Signifikansi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian awal serta bahan referensi lebih lanjut bagi peneliti lainnya untuk melanjutkan penelitian mengenai implementasi kebijakan pengeluaran untuk pengembangan kawasan agropolitan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya terkait kebijakan pengeluaran di sektor pertanian.

2. Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah khususnya Badan Kebijakan Fiskal mengenai implementasi kebijakan pengeluaran untuk pengembangan kawasan agropolitan dengan studi kasus Kota Batu agar dapat digunakan untuk mendorong perkembangan sektor pertanian secara umum, dan juga Pemerintah Daerah Kota Batu melalui hasil studi implementasi kebijakan pengeluaran dalam pengembangan kawasan

agropolitan serta identifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan fiskal untuk pengembangan kawasan agropolitannya sehingga dapat menjadi masukan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan daerahnya.

2.2 Pembatasan Penelitian

Pembatasan dalam penelitian ini terdapat pada pembahasan konsepsi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal pada dasarnya merupakan kebijakan yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara (Mar'ie, 2009, hal.68). Penerimaan negara bersumber dari pajak, penerimaan bukan pajak, dan bahkan penerimaan yang berasal dari pinjaman/bantuan dalam dan luar negeri. Sedangkan dalam penelitian ini hanya mencakup instrument kebijakan pengeluaran dan sedikit tentang pajak dan retribusi daerah, tidak membahas mengenai kebijakan perpajakan secara luas, penerimaan bukan pajak, dan penerimaan lainnya. Selain itu, pembatasan juga dilakukan dalam hal periode waktu kebijakan fiskal di kawasan agropolitan Kota Batu yang diteliti yaitu untuk tahun anggaran 2011.

2.3 Sistematika Penulisan

Secara garis besar skripsi ini terdiri dari enam bab. Sistematika penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang permasalahan, pokok permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini beserta tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang mendasari penelitian dan teori-teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik

pengumpulan data, narasumber/ informan, proses penelitian, teknik analisis data, site penelitian, proses penelitian, validitas dan reliabilitas data, dan keterbatasan penelitian.

BAB 4 GAMBARAN UMUM KAWASAN AGROPOLITAN KOTA BATU

Bab ini memaparkan tentang deskripsi wilayah Kota Batu dan kawasan agropolitannya.

BAB 5 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELUARAN PADA KAWASAN AGROPOLITAN KOTA BATU

Bab ini memaparkan analisis peneliti implementasi kebijakan pengeluaran untuk pengembangan kawasan agropolitan Kota Batu, identifikasi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengeluaran untuk pengembangan kawasan agropolitan Kota Batu, dan identifikasi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengeluaran untuk pengembangan kawasan agropolitan Kota Batu.

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memaparkan kesimpulan dari keseluruhan rangkaian penelitian dan rekomendasi peneliti yang relevan dengan hasil penelitian.

BAB 2 KERANGKA TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Pengeluaran pada Kawasan Agropolitan Kota Batu,” peneliti perlu melakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya. Peneliti mengambil dua hasil penelitian yang relevan dengan studi kebijakan fiskal. Tinjauan pustaka ini diharapkan dapat memberikan suatu perspektif umum yang berguna dalam penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Tinjauan Antarpemelitian

No.	Pengkaji, Judul, dan Tahun Publikasi Kajian	Fokus Kajian	Temuan
1.	Satya Bimantoro	Tujuan dan manfaat penelitian dalam Tesis ini adalah untuk menelusuri kondisi dan struktur perekonomian yang memenuhi asumsi bagi penerapan kebijakan agropolitan sebagai pilihan kebijakan dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Kulon Progo, menganalisis apakah penetapan kebijakan agropolitan secara empiris dimungkinkan di Kabupaten Kulon Progo, serta mengidentifikasi strategi kebijakan perencanaan yang memberikan daya dukung yang memadai bagi efektivitas kebijakan agropolitan.	Hasil analisis dan identifikasi kebijakan strategis menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi yang memenuhi asumsi bagi penerapan kebijakan agropolitan karena sektor yang memiliki prioritas tinggi sebagai sektor andalan adalah subsektor perkebunan, peternakan, dan perikanan. Oleh karenanya kebijakan agropolitan secara empiris dimungkinkan sebagai kebijakan yang memiliki potensi untuk mengembangkan perekonomian kabupaten dari sektor pertanian.
	Agropolitan sebagai Alternatif Sarana Pembangunan Pertanian “Studi Kasus Kebijakan Perencanaan Kabupaten Kulon Progo”	Penelitian ini menggunakan 2 metode analisis yaitu analisis penentuan sektor-sektor strategis dan analisis kebijakan perencanaan daerah, dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan (pengamatan dan	Disamping itu hasil identifikasi strategi kebijakan perencanaan
	2003		
	Tesis Program Studi Perencanaan dan Kebijakan Publik, FE Universitas Indonesia. Tidak diterbitkan.		

No.	Pengkaji, Judul, dan Tahun Publikasi Kajian	Fokus Kajian	Temuan
		wawancara) dan studi kepustakaan .	pengembangan potensi agropolitan memberikan pilihan kebijakan yang dapat dipergunakan untuk menilai apakah perencanaan kebijakan yang selama ini berlangsung di Kabupaten Kulon Progo memberikan dukungan bagi terciptanya domain agropolitan.
2.	<p>Timbul Simangunsong</p> <p>Pengaruh Pengenaan PPN terhadap Harga Hasil Pertanian dan Daya Saing di Pasaran Ekspor 2002</p> <p>Tesis Program Studi Administrasi dan Kebijakan Perpajakan, FISIP Universitas Indonesia. Tidak diterbitkan.</p>	<p>Tesis ini membahas mengenai pengaruh PPN terhadap pembentukan harga jual produk pertanian, dan pengaruh pengenaan PPN atas produk pertanian terhadap daya saing di pasaran ekspor. Peneliti melakukan penelitian terhadap 117 perusahaan yang bergerak di bidang produksi maupun perdagangan barang-barang hasil pertanian, yaitu dengan cara kuesioner. Juga terhadap Direktorat Jenderal Pajak untuk mengetahui peraturan dan kebijakan perpajakan yang berhubungan dengan pengenaan PPN atas barang-barang hasil pertanian .</p>	<p>Hasil penelitian ini adalah (1) faktor utama yang mempengaruhi harga jual barang-barang hasil pertanian adalah kualitas barang. Dengan demikian pengenaan PPN atas barang-barang hasil pertanian tidak serta merta menaikkan harga jual sebesar tarif PPN 10% , melainkan apabila seluruh pengusaha sepanjang jalur distribusi sebagai PKP, kenaikan harga yang dibayar oleh konsumen dibawah 10% karena adanya mekanisme pengkreditan PM terhadap PK. (2) pengaruh pengenaan PPN terhadap daya saing juga kurang signifikan . faktor utama yang mempengaruhi daya saing adalah di pasar internasional adalah kualitas barang hasil pertanian itu sendiri , bukan harga. Bahkan dengan mekanisme PPN pajak masukan yang dikenakan atas pengusaha dapat diminta kembali, sehingga dapat menambah <i>cashflow</i> perusahaan.</p>

No.	Pengkaji, Judul, dan Tahun Publikasi Kajian	Fokus Kajian	Temuan
3.	<p>Haula Rosdiana, Inayati, Achmad Lutfi, dan Sri Susilih.</p> <p>Akselerasi Pembangunan Agropolitan melalui Revitalisasi Kebijakan Fiskal 2011</p> <p>Riset Strategis Nasional UI 2011, diselenggarakan oleh DRPM UI. Tidak diterbitkan.</p>	<p>Penelitian ini membahas mengenai penerapan <i>expenditure policy</i> dalam pembangunan agropolitan, mengidentifikasi kebijakan perpajakan yang dapat bersifat insentif maupun disinsentif terhadap pembangunan agropolitan, dan menjelaskan mengapa kebijakan fiskal yang telah dilakukan pemerintah belum mampu mengakselerasi pembangunan agropolitan.</p> <p>Penelitian ini menggunakan paradigma <i>constructivism</i> dengan menggunakan pendekatan <i>mixed approach</i>. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam dan <i>Focused Group Discussion</i> (FGD). Site penelitian terdiri dari Kabupaten Bangli, Kabupaten Kuningan, dan Kota Batu.</p>	<p>a) Terdapat perbedaan <i>spending/expenditure policy</i> yang diterapkan di Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bangli dan Kota Batu. Perbedaan ini mempengaruhi keberhasilan implementasi program agropolitan di masing-masing wilayah tersebut.</p> <p>b) Kebijakan pajak yang bersifat insentif masih sangat terbatas. Dapat dikatakan tidak ada kebijakan insentif yang secara khusus ditujukan untuk pembangunan/pengembangan agropolitan.</p> <p>c) Terdapat beberapa kebijakan pajak yang bersifat disinsentif, termasuk beberapa fasilitas pembebasan pajak untuk impor barang pertanian.</p> <p>d) Kebijakan fiskal belum mampu mendorong akselerasi pembangunan agropolitan karena belum dilakukan secara komprehensif, integratif dan holistik dengan melibatkan semua instansi terkait.</p>

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Peneliti menganalisis mengenai bagaimana implementasi kebijakan pengeluaran di kawasan agropolitan Kota Batu, dan faktor-faktor apa

saja yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengeluaran di kawasan agropolitan Kota Batu. Peneliti mengkaji mengenai kebijakan pengeluaran ini dari semua sub sektor agropolitan dan dari sudut pandang semua *stakeholder*. Peneliti membahas secara mendalam fenomena dan permasalahan yang dihadapi hampir semua SKPD yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengeluaran, sehingga diharapkan memperoleh gambaran yang lebih spesifik guna memberikan masukan yang tepat sasaran.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Fungsi Pemerintah

Pemerintah memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi menurut Samuelson dan Nordhaus dalam Mansury (1999, hal.10), adalah:

- a. mengupayakan peningkatan efisiensi perekonomian, yaitu dengan cara melakukan koreksi atas kegagalan pasar, seperti monopoli dan polusi yang berlebihan;
- b. melancarkan program-program untuk meningkatkan keadilan dalam pembagian penghasilan dengan jalan melakukan redistribusi penghasilan dengan menggunakan instrumen fiskal, dalam bentuk pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara; dan
- c. mengupayakan pertumbuhan ekonomi tanpa inflasi dan mengurangi pengangguran.

Menurut Musgrave dan Musgrave (1993, hal.6), fungsi pemerintah dapat dijabarkan menjadi tiga bagian yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi tersebut oleh Musgrave dan Musgrave disebut sebagai *fiscal function*. Adapun fungsi kebijakan fiskal secara rinci yang dilakukan pemerintah dapat dibagi menjadi empat, yaitu fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi, dan regulasi (Rosdiana, 2005, hal.3-39).

1. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi ada karena terdapat barang dan jasa yang seluruhnya atau sebagian tidak dapat disediakan melalui mekanisme pasar karena karakteristik barang atau jasa tersebut merupakan barang publik.

Pemerintah harus dapat menyediakan barang publik karena masyarakat sangat membutuhkan barang dan jasa jenis ini namun pasar tidak dapat menyediakannya. Dalam kebijakan fiskal, fungsi alokasi berarti bahwa melalui pemungutan pajak sumber daya yang dikuasai masyarakat dan sektor swasta dialihkan kepada pemerintah untuk menghasilkan barang publik, seperti pertahanan, ketertiban, dan keadilan. Oleh karena itu pemungutan pajak harus dikenakan secara adil dan memberikan dampak negatif sekecil mungkin kepada ekonomi masyarakat (Mansury, 1999, hal.21).

2. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi dilakukan oleh pemerintah untuk mendistribusikan kekayaan atau penghasilan agar tercipta kondisi kesejahteraan yang merata. Oleh karena itu negara bertanggung jawab untuk mendistribusikan pendapatan dan kesejahteraan hanya pada satu kelompok saja. Melalui pemungutan pajak, negara bisa menyediakan pelayanan kesehatan yang murah atau subsidi barang-barang kebutuhan pokok lainnya.

3. Fungsi Stabilisasi

Fungsi stabilisasi berkenaan dengan peran pemerintah untuk menangani masalah pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, suplai uang, nilai tukar, dan masih banyak aspek makroekonomi (*macroeconomic problems*) lainnya dimana pasar tidak dapat menanganinya sehingga pemerintahlah yang harus menangani masalah tersebut.

4. Fungsi Regulasi

Apabila pengaturan mengenai persaingan diserahkan sepenuhnya kepada pasar yang dimonopoli oleh kelompok tertentu, kompetisi usaha yang adil mustahil tercapai. Untuk itu negara berfungsi mengatur terciptanya kompetisi yang adil dan menjamin bahwa semua barang yang diproduksi pasar merupakan preferensi dari konsumen untuk menghindari terjadinya monopoli yang timbul karena kegagalan pasar (*market failure*) tersebut (Mansury, 1999, hal.23). Selain itu, fungsi regulator sebenarnya juga terkait dengan antisipasi munculnya eksternalitas dari sebuah kebijakan,

khususnya eksternalitas negatif. Maka negara harus berfungsi untuk mengatur agar tercipta kompetisi yang menjamin bahwa semua barang-barang yang diproduksi pasar (*private sector*) adalah merupakan preferensi dari konsumen (Rosdiana, 2005, hal.38).

2.2.2 Kebijakan Publik

Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah membutuhkan instrumen untuk mengimplementasikan fungsinya tersebut. Instrumen yang dimaksud adalah kebijakan. Laswel dan Kaplan dalam Islamy (1997, hal.17) menyatakan bahwa "*policy as a projected of goals, values, and practices.*" Berdasarkan pendapat Laswel dan Kaplan, kebijakan dapat dirumuskan sebagai suatu program pencapaian tujuan-tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah.

Eaulau dan Previt dalam Thoha (2005, hal.61) merumuskan kebijakan sebagai keputusan yang teguh yang ditandai oleh adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan pada bagian dari keduanya yakni bagi orang yang membuat kebijakan dan melaksanakannya. Dengan demikian kebijakan merupakan suatu keputusan untuk menetapkan tujuan yang berkesinambungan, melaksanakan dan mengevaluasinya.

Istilah kebijakan publik banyak dikemukakan oleh para pakar di bidang politik maupun administrasi negara. Salah satu definisi yang sering digunakan adalah pendapat dari Thomas R. Dye dalam Thoha (2005, hal.62) yang menyebutkan sebagai berikut: "*Whatever government choose to do or not to do.*" Ryant Nugroho juga mengutip teori kebijakan publik Dye dari buku *Understanding Public Policy*, kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil (Ryant, 2004:3). Menurut Dye, kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. dalam pengertian ini, kebijakan publik tidak hanya berupa apa yang dilakukan pemerintah melainkan termasuk juga apa saja yang tidak dilakukan pemerintah. Tindakan yang tidak dilakukan pemerintah pun mempunyai dampak yang besar seperti halnya apa yang dilakukan

pemerintah. Pemerintah tidak melakukan tindakan bukan berarti tidak merespon masalah publik. Namun bisa saja masalah publik tersebut telah diatur ketentuannya dengan kebijakan yang sudah ada sehingga tidak membutuhkan kebijakan baru.

Edwards dan Sharkansky dalam Islamy (1997, hal.18) mengartikan kebijakan publik hampir seperti yang diungkapkan oleh Dye, yaitu “...is what governments say and do, or do not do.” Edwards dan Sharkansky mengatakan bahwa kebijakan publik dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah atau berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Thoha (2005, hal. 59-60) mengemukakan lebih lanjut bahwa public *policy* dalam arti luas mempunyai dua aspek pokok:

1. *Policy* merupakan praktik sosial, ia bukan *event* yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat.
2. *Policy* adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh baik untuk mendamaikan “claim” dari pihak-pihak yang konflik, atau untuk menciptakan “incentive” bagi tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menetapkan tujuan akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha tersebut.

Senada dengan Thoha, Chandler dan Plano dalam Tangkilisan (2003, hal.1) berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Dengan demikian suatu kebijakan dapat berbentuk usaha yang kompleks dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, kebijakan juga dapat menjadi cara untuk mengatasi konflik dan menimbulkan insentif.

2.2.3 Kebijakan Fiskal

Terkait dengan fungsi pemerintah seperti yang dikemukakan sebelumnya oleh Samuelson dan Nordhaus, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, melaksanakan pendistribusian penghasilan dan mengupayakan pertumbuhan ekonomi salah satunya dengan menggunakan instrumen fiskal, dalam bentuk pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara.

Segala macam instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan fiskal dikelompokkan menjadi beberapa instrumen pokok, yaitu (Soetrisno, 1983, hal. 252-253):

1. *Buying and selling*

Buying mencakup segala pembelian yang dilakukan pemerintah. Sedangkan *selling* atau penjualan meliputi segala macam penjualan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah, misalnya penjualan beras dengan subsidi, pelelangan mobil bekas, dan lain-lain.

2. *Giving and taking*

Giving atau pemberian, termasuk di dalamnya pemberian subsidi, bantuan-bantuan sosial, kemudahan pendirian perusahaan, jasa peradilan, pendidikan cuma-cuma, tanah untuk transmigrasi, dan lain-lain. *Taking* atau pengambilan, misalnya meliputi pemungutan pajak dan retribusi, pengenaan denda, penyitaan barang-barang dan lain-lain.

3. *Lending and borrowing*

Lending atau pemberian pinjaman dapat dikemukakan sebagai pemberian pinjaman dari pemerintah seperti kredit perumahan murah, intensifikasi pertanian, dan sebagainya. Sedangkan *borrowing* atau pinjaman yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat dan termasuk di dalamnya pinjaman jangka panjang, misalnya obligasi pemerintah, pinjaman jangka pendek, dan lain-lain.

Instrumen-instrumen tersebut digunakan pemerintah dalam menjalankan kebijakan fiskal, dimana kebijakan fiskal adalah suatu tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah dengan menggunakan teknik tertentu. Samuelson (1986, hal.227) mendeskripsikan kebijakan fiskal sebagai proses pembentukan perpajakan dan pengeluaran publik dalam upaya menekan fluktuasi siklus ekonomi dan ikut berperan menjaga ekonomi yang tumbuh dengan penggunaan tenaga

kerja yang tinggi dan berubah-ubah. Definisi kebijakan fiskal menurut Due (1985, hal.349) adalah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran-pengeluaran pemerintah untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki.

Mankiw dalam Subiyantoro dan Riphath (2004, hal.3) mendefinisikan kebijakan fiskal sebagai pilihan pemerintah mengenai tingkat pengeluaran dan perpajakan (*“The government’s choice regarding levels of spending and taxation”*). Sedangkan Mar’ie (2004, hal.109) mendefinisikan kebijakan fiskal sebagai kebijakan pengelolaan keuangan negara dan terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN.

Kebijakan fiskal sering dipandang dari segi penentuan pengeluaran pemerintah dan perpajakan tanpa memerhatikan keadaan permintaan agregat pihak swasta. Hal ini sesuai dengan pendapat Arestis and Sawyer (2004, hal.135) yaitu:

“Fiscal policy is often viewed in terms of the determination of government expenditure and taxation as undertaken without specific regard to the state of private aggregate demand.”

Empat komponen utama dari kebijakan fiskal terdiri dari pengeluaran atau anggaran reformasi, mobilisasi pendapatan, khususnya penerimaan pajak, pengendalian defisit atau pembiayaan, dan penetapan transfer fiskal dari tingkatan pemerintah yang lebih tinggi ke tingkat di bawahnya. Kebijakan fiskal diterapkan melalui permintaan agregat dan penawaran agregat. Perubahan jumlah pajak dan pengeluaran negara akan mempengaruhi tingkat permintaan agregat dalam perekonomian, sedangkan struktur perpajakan dan pengeluaran negara mempengaruhi, antara lain, insentif investasi, pengambilan risiko, serta ekspor dan impor barang atau jasa. Hal ini sesuai dengan pendapat Jha (2007, hal.2) , yaitu:

“The four main components of fiscal policy are 1) expenditure, budget reform, 2) revenue (particularly tax revenue) mobilization, 3) deficit containment/ financing and 4) determining fiscal transfers from higher to lower levels of government. Fiscal policy works through both aggregate demand and aggregate supply channels.

Changes in total taxes and public expenditure affect the level of aggregate demand in the economy, whereas, the structure of taxation and public expenditure affect, among others, the incentives to save and invest (at home and abroad), take risks, and export and import goods and services.”

Menurut Djojosebroto dalam Subiyantoro dan Riphath (2004, hal.21), kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Pada dasarnya yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah pajak-pajak dan berbagai pungutan yang dipungut pemerintah dari perekonomian dalam negeri yang menyebabkan kontraksi dalam perekonomian. Di lain sisi, yang dimaksud pengeluaran negara adalah semua pengeluaran untuk operasi pemerintah dan pembiayaan berbagai proyek di sektor negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Mansury (1999, hal.1) membagi dua definisi kebijakan fiskal, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Kebijakan fiskal dalam arti luas yaitu kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi dengan menggunakan instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara. Adapun pengertian kebijakan fiskal dalam arti sempit adalah kebijakan yang berhubungan dengan penentuan siapa-siapa yang akan dikenakan pajak, apa yang dikenakan dasar pengenaan pajak, bagaimana menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan bagaimana tata cara pembayaran pajak terutang.

Menurut Siscat, kebijakan fiskal (*fiscal policy*) berkaitan dengan pemanfaatan gabungan pengeluaran pemerintah, perpajakan dan utang pemerintah untuk mencapai sasaran yang dikehendaki. Kebijakan fiskal harus dirancang untuk membantu meredakan goncangan liar siklus dunia usaha (*business cycles*) agar perekonomian menjadi lebih stabil. Kebijakan fiskal juga harus dirancang guna memantapkan pertumbuhan pendapatan dari waktu ke waktu, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan keadilan pembagian pendapatan dan kekayaan (Siscat, 1991, hal.313). Adapun tiga tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah (Due, 1985, hal.349):

1. Untuk menjamin bahwa laju pertumbuhan perekonomian yang sebenarnya menyamai laju pertumbuhan potensial dengan mempertahankan kesempatan kerja yang penuh;
2. Untuk mencapai suatu tingkat harga umum stabil yang wajar; dan
3. Untuk meningkatkan laju pertumbuhan potensial yang sebisa mungkin tidak merintangi tujuan-tujuan lain dari masyarakat yang hendak dicapai.

2.2.4 Pengeluaran Negara

Pengeluaran negara menggambarkan suatu pembiayaan terhadap kegiatan suatu pemerintah dan prioritas kegiatan yang dipilihnya (Arsjad, 1992, hal.11). Menurut Herber (1979, hal.93), pengeluaran negara dapat dikelompokkan dalam dua kategori yaitu *exhaustive* dan *non exhaustive*, yaitu:

An exhaustive expenditures is one whose initial effect is allocational in nature, since it directly absorbs resources into governmental production. Such resources, assuming full employment, would be absorbed from alternative allocational uses elsewhere in the economy. A non exhaustive expenditure is one whose initial effect is on the distribution of income in the society. It does not directly absorb resources; a payment is received by an individual without an exchange of productive resources for that payment.

Pengeluaran yang bersifat *exhaustive* adalah suatu pengalokasian dimana sumber daya langsung diserap ke dalam produksi pemerintah. Sumber daya tersebut akan diserap dari alternatif penggunaan alokasi dalam perekonomian. Pengeluaran yang bersifat *non-exhaustive* adalah suatu bentuk distribusi pendapatan di masyarakat. Pengeluaran ini secara tidak langsung menyerap sumber daya dimana individu menerima suatu pembayaran tanpa adanya pertukaran sumber daya produktif.

Pada dasarnya, pengeluaran negara dapat dikelompokkan ke dalam pengeluaran negara untuk pembelian barang dan jasa (*exhaustive*) dan subsidi (*government transfer payment*). Pengeluaran negara untuk pembelian barang dan jasa (*government purchases on goods and services*) lebih merupakan alat kebijakan pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi, sedangkan

subsidi merupakan alat pemerintah dalam rangka redistribusi pendapatan (Arsjad, 1992, hal.35).

2.2.5 Kebijakan Pajak

Pajak memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi. Salah satunya sebagai instrumen dalam kegiatan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, pemerintah memiliki tiga instrumen pokok yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat, instrumen tersebut menurut Samuelson dalam Arsjad antara lain (1992, hal.3):

- a. Pajak-pajak yang bisa mengurangi konsumsi atau investasi masyarakat dan oleh karena itu ada sejumlah sumber dana yang sekarang bebas dipergunakan untuk pengeluaran negara.
- b. Pajak-pajak yang dapat menggalakkan atau menghalangi (*discourage*) sejumlah kegiatan ekonomi tertentu.
- c. Pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bisa mendorong perusahaan dan para pekerja memproduksi barang-barang dan jasa-jasa tertentu dan juga salah satu jenis pengeluaran yang disebut *transfer payments* yang bisa mendukung pendapatan.

Keefektifan suatu kebijakan pajak, menurut Thuronyi tergantung pada kata-kata yang penuh arti, dapat dimengerti, masuk akal, dan tersusun dengan baik (*'The effectiveness of a tax law is enhanced if its words are meaningful, intelligible, well thought out, and well organized'*). Selain itu, menurutnya sebuah kebijakan pajak yang baik akan memenuhi empat kriteria, yaitu (Thuronyi, 1998, hal.72):

- a. *Understandability refers to making the law easier to read and follow;*
- b. *Organization refers to both the internal organization of the law and its coordination with other tax laws;*
- c. *Effectiveness relates to the law's ability to enable the desired policy to be implemented;*
- d. *Integration refers to the consistency of the law with the legal system and drafting style of the country.*

Mansury (1996, hal.18) mengatakan bahwa kebijakan pajak positif merupakan alternatif yang nyata-nyata dipilih dari berbagai pilihan lain, agar

dapat dicapai sasaran yang hendak dituju sistem perpajakan. Sistem perpajakan itu sendiri terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu:

- a. Kebijakan perpajakan (*tax policy*);
- b. Undang-Undang perpajakan (*tax laws*); dan
- c. Administrasi perpajakan (*tax administration*).

Tujuan kebijakan pajak adalah sebagai berikut (Mansury, 2000, hal.5) :

- a. Peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran;
- b. Distribusi penghasilan yang lebih adil; dan
- c. Stabilitas.

Selain itu, tujuan kebijakan pajak juga terkait dengan pertumbuhan ekonomi, stabilitas internal dan eksternal, serta pencapaian distribusi pendapatan dan kekayaan. Hal tersebut diungkapkan oleh Bird (1992, hal.8):

“Many of the goals or objectives commonly attributed to tax policy in developing countries are really those of public policy as a whole. Economic growth, internal and external stability, and the attainment of an appropriate distribution of income and wealth fall.”

2.2.6 Fungsi Pajak

Berkenaan dengan kebijakan pajak, pajak merupakan instrumen dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi dan kebijakannya. Nurmantu menyebutkan dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulierend. Namun, pembedaan ini tidaklah dikotomis. Dalam banyak hal, kedua fungsi pajak ini digunakan secara bersamaan (Rosdiana, 2005, hal.39).

1. Fungsi Budgetair

Fungsi budgetair adalah suatu fungsi dimana pajak digunakan untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku (Nurmantu, 2005, hal.30). Fungsi pajak yang paling utama adalah untuk mengisi kas negara (*to raise government's revenue*). Fungsi ini disebut juga fungsi fiskal (*fiscal function*). Karena itu suatu pemungutan pajak yang baik sudah seharusnya memenuhi asas *revenue productivity* (Rosdiana, 2003, hal.7). Terkait

dengan fungsi budgetair, ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu (Siahaan, 2004, hal,9):

- a. Jangan sampai ada Wajib Pajak atau Subjek Pajak yang tidak memenuhi sepenuhnya kewajiban perpajakan;
- b. Jangan sampai ada Objek Pajak yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak kepada fiskus; dan
- c. Jangan sampai ada Objek Pajak yang terlepas dari pengamatan atau penghitungan fiskus.

2. Fungsi Regulerend

Fungsi regulerend disebut juga sebagai fungsi tambahan, yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu (Nurmantu, 2005, hal.36). Rosdiana dan Tarigan menyebutkan bahwa pada kenyataannya pajak bukan hanya berfungsi untuk mengisi kas negara, pajak juga digunakan pemerintah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang ditetapkan pemerintah (Rosdiana, 2005, hal.40). Selain itu, pajak juga dapat digunakan untuk mendorong atau melindungi industri dalam negeri dan menghambat atau mendistorsi suatu kegiatan perdagangan.

2.2.7 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut Lester dan Stewart dalam Winarno (2008, Hal.144), implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Lester dan Stewart kemudian mengatakan bahwa implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna

meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2002, hal.101). dalam proses implementasi atau pelaksanaan kebijakan, kemungkinan akan selalu terbuka terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan atau yang sudah direncanakan oleh para pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan tadi). Hal inilah yang kemudian disebut dengan *implementation gap* atau kesenjangan. Pada batas tertentu kesenjangan ini masih dapat dibiarkan, sekalipun dalam monitoring harus diidentifikasi untuk segera diperbaiki apalagi jika kesenjangan yang terjadi lebih besar dari batas toleransi maka harus segera diperbaiki.

Wibawa (1994, hal.15) menyebutkan bahwa di dalam “cara” (implementasi) terkandung beberapa komponen kebijakan lainnya, yakni siapa pelaksana atau implementornya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan, atau bagaimana sistem manajemennya, dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. Teori inilah yang digunakan peneliti untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan fiskal pada kawasan agropolitan Kota Batu.

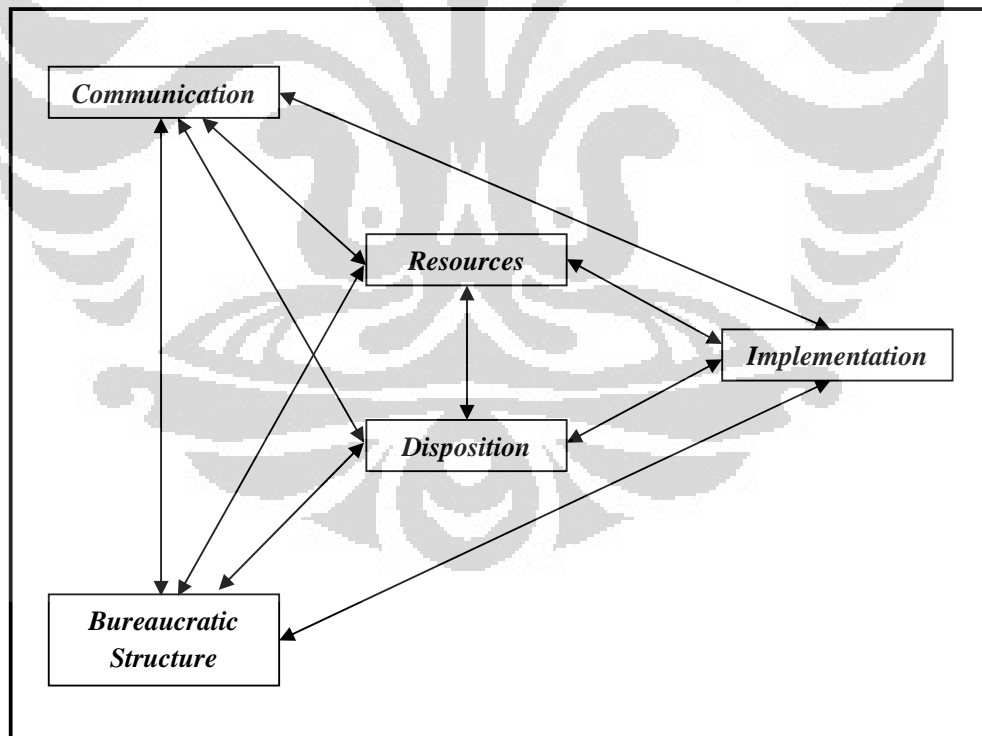
Menurut Edwards III, studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi administrasi publik dan kebijakan publik. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Edwards III (1980, hal.1):

“The study of policy implementation is crucial for the study of public administration and public policy. Policy implementation, as we have seen, is the stage of policymaking between the establishment of a policy-such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, of the promulgation of a regulatory rule-and the consequences of the policy for the people whom it affects. If a policy is inappropriate , if it cannot alleviate the problem for which it was designed, it will probably be a failure no matter how well it is implemented. But even a brilliant policy poorly implemented may fail to achieve the goals of its designers.”

Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak

mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edwards III (1980, hal 9-10) membicarakan empat faktor krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor tersebut adalah komunikasi, Sumberdaya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi (“...by considering four critical factors or variables in implementing public policy: communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure”). Hubungan antarfaktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Edwards III, dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Edwards III, 1980, h. 148.

Gambar 2.1
Hubungan Antarfaktor Implementasi Kebijakan

Mengenai keempat faktor yang saling berhubungan dan berpengaruh dalam implementasi kebijakan, Edwards III mengemukakan sebagai berikut (winarno, hal. 175-205):

1. Komunikasi (*communication*)

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus dimengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

2. Sumberdaya (*resources*)

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana,

informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien.

Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada. Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

3. Disposisi atau Sikap (*dispositions or attitudes*)

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

4. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

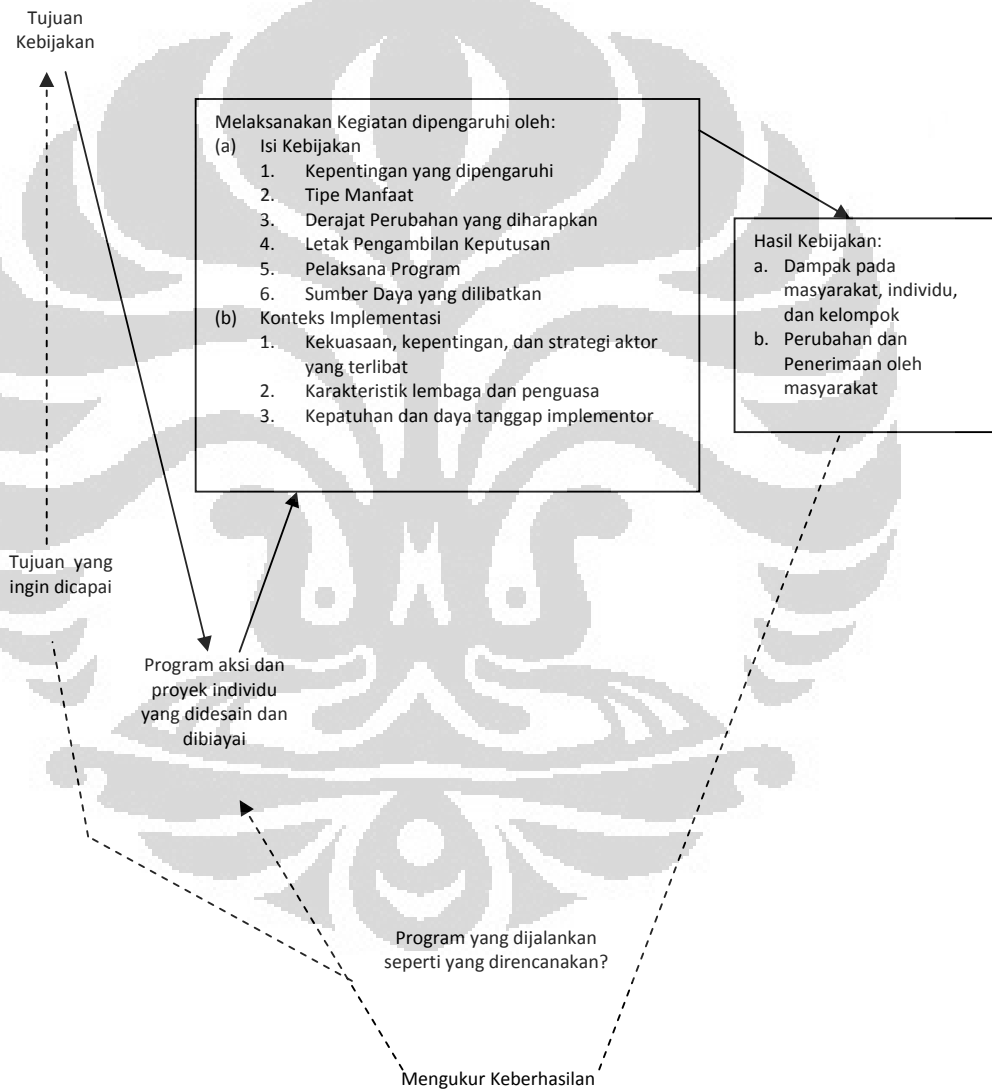
Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Horn dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
2. Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana;
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif);
4. Vitalitas suatu organisasi;
5. Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

Implementasi kebijakan menurut Grindle (1980, hal.6) ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Grindle juga melihat implementasi dalam keterpengaruhannya oleh lingkungan (sebagaimana juga dengan Meter dan Horn). Studi ini melihat adanya tiga dimensi-analisis dalam suatu organisasi, yakni tujuan, pelaksanaan tugas, dan kaitan organisasi dengan lingkungan (Katz dalam Wibawa, 1994, hal.22). Ide dasar Grindle adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual dan biaya telah tersedia, maka implementasi kebijakan dilakukan. Tetapi ini tidak berjalan mulus, tergantung pada *implementability* dari program itu – yang dapat dilihat pada isi dan konteks kebijakannya. Isi kebijakan mencakup : (1) kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, (2) jenis manfaat yang akan dihasilkan, (3) derajat perubahan

yang diinginkan, (4) kedudukan pembuat kebijakan, (5) siapa pelaksana program, dan (6) sumber daya yang dikerahkan. Jika digambarkan, model Grindle tampak seperti pada Gambar 2.2 dibawah ini.



Sumber: Grindle, 1980, hal.11

Gambar 2.2

Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle

Kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang saling berbeda lebih sulit diimplementasikan dibandingkan yang menyangkut sedikit kepentingan. Kebijakan yang memberikan manfaat yang aktual (bukan hanya formal, ritual, dan simbolis) kepada banyak pelaku lebih mudah diimplementasikan dibanding dengan yang kurang bermanfaat. Manfaat kebijakan berkaitan dengan perubahan yang diinginkan oleh kebijakan. Kebijakan yang mensyaratkan adanya perubahan sikap dan perilaku biasanya sulit diimplementasikan. Kebijakan-kebijakan yang mempunyai tujuan jangka panjang juga lebih sukar diimplementasikan dibanding yang mempunyai tujuan jangka pendek. Isi kebijakan menunjukkan kedudukan pembuat kebijakan. Apa posisi pembuat kebijakan mempengaruhi bagaimana implementasi kebijakannya. Konteks kebijakan mempengaruhi proses implementasi. Yang dimaksud oleh Grindle dengan konteks kebijakan adalah : (1) kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, (2) karakteristik lembaga dan penguasa dan (3) kepatuhan serta daya tanggap pelaksana. Intensitas keterlibatan para perencana, politisi, pengusaha, kelompok sasaran, dan para pelaksana program akan bercampur baur mempengaruhi efektivitas implementasi (Grindle, 1980, hal.6-12).

Peneliti menggunakan teori Edward III dan model Grindle, dengan mengambil poin-poin yang relevan saja, untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan fiskal di kawasan agropolitan Kota Batu.

2.2.8 Konsep Pengembangan Kawasan Agropolitan

Sekarang ini, banyak negara menyadari bahwa pertanian memiliki peranan yang sangat strategis dalam memperkuat ketahanan nasional suatu negara. Penguatan sektor pertanian secara signifikan antara lain dapat memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan serta mengurangi ketergantungan terhadap impor. Bahkan raksasa ekonomi dunia yang baru, China, juga mengandalkan pertanian sebagai basis perekonomian nasionalnya, sebagaimana dapat dilihat dalam kutipan berikut ini:

Agriculture is the basis of China's national economy. The agricultural development and its modernization play an important part in making the country strong and the public wealthy. And agriculture industrialization is the important method to make the agriculture modernization. (Wang dan Zhang, 2010, hal.173)

Dari kutipan di atas dapat dilihat bahwa pembangunan pertanian dan modernisasinya berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan suatu negara sekaligus memperkuat ketahanan nasional suatu negara. Dalam kasus Indonesia, sektor pertanian terbukti yang paling tahan terhadap guncangan ekonomi dan menjadi kontributor penting terhadap pelambatan kejatuhan ekonomi dan merupakan penyumbang devisa negara disaat krisis (Irianto, 2010). Hal ini membuktikan bahwa ketahanan ekonomi hanya dapat tercapai jika suatu negara bertumpu pada kondisi geografisnya.

Kecenderungan negara untuk mengembangkan perekonomian berdasarkan kondisi geografisnya menjadi suatu fenomena, sehingga banyak melahirkan konsep dan teori geoekonomi. Mengutip konsepsi yang dikemukakan oleh Ryerson dan Aronoff, Geoekonomi adalah :

The GeoEconomy is how we define the economy that is increasingly being driven by, and dependent on, geospatial or geographic information – information that is tied to or linked to a geographic locaton. This location based information termed geospatial or geographic information or geo-information. (Ryerson, 2009, hal.1)

Jauh sebelum konsepsi/terminologi geoekonomi diperkenalkan, Friedmann and Douglass memperkenalkan konsepsi baru yang disebut agropolitan sebagai solusi bukan saja untuk membentuk arus urbanisasi tetapi juga untuk memberdayakan perekonomian di pedesaan.

Friedmann and Douglass (1975:40) proposed the idea of “agropolis” or “city in the fields”, stating that “instead of

encouraging the drift of rural people to cities by investing in cities”, such an approach would encourage rural people “to remain where they are, by investing in rural districts, and so transmute existing settlements into a hybrid form of agropolis, or city in the fields”.

Kementerian Pertanian Indonesia sendiri mendefinisikan agropolitan sebagai kota pertanian yang tumbuh dan berkembang yang mampu memacu berkembangnya sistem dan usaha agribisnis sehingga dapat melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Pengembangan kawasan agropolitan menjadi salah satu kebijakan yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian. Yang dimaksud dengan pengembangan kawasan agropolitan, adalah pembangunan ekonomi berbasis pertanian di kawasan agribisnis, yang dirancang dan dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada untuk mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi, yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah.

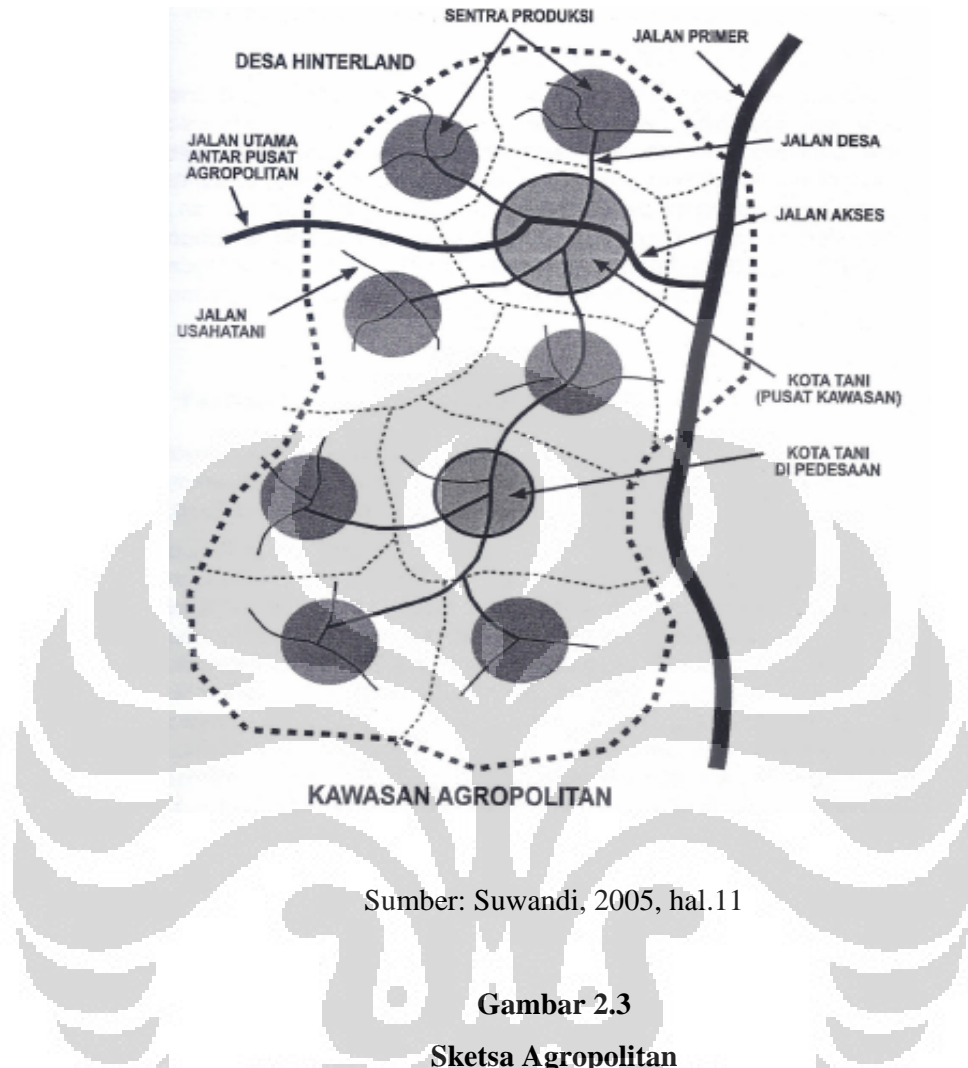
2.2.8.1 Pengertian Agropolitan

Friedman dan Douglass dalam Suwandi (2005, hal.9) menyarankan kawasan agropolitan (kota pertanian dan desa-desa penyangganya/sentra produksi pertanian) sebagai aktivitas pembangunan berpenduduk antara 50.000 sampai 150.000 orang. Mungkin luasan dan besaran penduduk ini, secara administrasi setara dengan satu Wilayah Pengembangan Partial (WPP) permukiman transmigrasi atau bisa lebih dari lima kecamatan di luar Jawa, sedangkan di Jawa berkisar satu sampai lima kecamatan. Menurut pemikiran Friedman, kawasan agropolitan terdiri dari distrik-distrik agropolitan dan distrik agropolitan didefinisikan sebagai kawasan pertanian pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk rata-rata 200 jiwa per km². Dalam distrik agropolitan ini akan dijumpai kota-kota tani yang berpenduduk 10.000-25.000 jiwa. Untuk kepentingan program, dianalogikan distrik ini sebagai kecamatan. Untuk memudahkan koordinasi, kawasan agropolitan berada

dalam satu administrasi kabupaten/kota, dan merupakan kelipatan dari kecamatan.

Ditinjau dari aspek tata ruang maka secara umum struktur hierarki sistem kota-kota agropolitan, menurut Rustan Harun dalam Suwandi (2005, hal.10), dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Ordo yang paling tinggi (kota tani utama) dalam lingkup kawasan agropolitan berskala besar sebagai:
 - Kota perdagangan yang berorientasi ekspor ke luar daerah (nasional dan internasional) dan bila berada ditepi pantai maka kota ini memiliki pelabuhan samudra
 - Pusat berbagai kegiatan *manufacturing final* industri pertanian (*packing*), stok pergudangan dan perdagangan bursa komoditas
 - Pusat berbagai kegiatan tertier agrobisnis, jasa perdagangan, asuransi pertanian, perbankan dan keuangan
 - Pusat berbagai pelayanan (*general agro-industry services*)
- b. Ordo kedua (pusat distrik agropolitan) yang berfungsi sebagai:
 - Pusat perdagangan wilayah yang ditandai dengan adanya pasar-pasar grosir dan pergudangan komoditas sejenis
 - Pusat kegiatan agro-industri berupa pengolahan barang pertanian jadi dan setengah jadi serta kegiatan agro-bisnis
 - Pusat pelayanan agro-industri khusus, pendidikan, pelatihan, dan pemuliaan tanaman unggulan
- c. Ordo ketiga (pusat satuan kawasan pertanian)
 - Pusat perdagangan lokal yang ditandai dengan adanya pasar harian
 - Pusat koleksi komoditas pertanian yang dihasilkan sebagai bahan mentah industri
 - Pusat penelitian, pembibitan dan percontohan komoditas
 - Pusat pemenuhan pelayanan kebutuhan pemukiman pertanian
 - Koperasi dan informasi pasar barang perdagangan.



Sumber: Suwandi, 2005, hal.11

Gambar 2.3

Sketsa Agropolitan

Berdasarkan uraian diatas, dapat disempurnakan lagi definisi kawasan agropolitan, yaitu kawasan pertanian yang terdiri dari kota pertanian atau beberapa kota pertanian dan desa-desa sentra produksi pertanian serta desa lainnya yang ada disekitarnya, yang memiliki fasilitas untuk berkembangnya pertanian industri. Fasilitas tersebut antara lain: lembaga pasar, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, lembaga penyuluhan dan alih teknologi pertanian, lembaga kesehatan, jaringan jalan, irigasi, transportasi, telekomunikasi, serta prasarana umum lainnya (Suwandi, 2005, hal.12).

2.2.8.2 Konsepsi untuk Program Kawasan Agropolitan

Pertanian industri (bukan industri pertanian atau agroindustri)

mempunyai ciri yang pelakunya selalu berorientasi bahwa produk yang dihasilkan adalah produk untuk selanjutnya dipasok ke proses industri (Sadjad dalam Suwandi, 2005, hal.12). Pertanian industri demikian menjadi basis desa industri, karena semua proses industrinya lebih lanjut dilaksanakan di desa bukan di kota. Dengan demikian nilai tambah jatuh di desa bukan di kota.

Desa industri yang berbasis pertanian industri merupakan satu sistem. Sistem ini memiliki subsistem atau *stakeholder* yang bisa dikategorikan sebagai industri primer, sekunder, dan tertier. Pertanian industri yang menghasilkan bahan baku untuk diproses di industri tertier merupakan subsistem industri sekunder. Industri primer mensuplai benih untuk industri sekunder. Karena desa industri merupakan satu sistem, maka semua subsistem harus saling tahu dan saling menunjang, satu sub sistem tidak boleh lebih makmur dari subsistem lainnya. Dengan demikian parameter kesejahteraan petani atau warga desa bisa berubah.

Dorongan efisiensi kerja yang memerlukan kontinuitas produk dan volume produk yang lebih besar, apalagi dengan standar produk yang ditentukan, tentu akan memerlukan parameter produk yang rasional dan lebih profesional. Dengan demikian akan terjadi konsolidasi agronomis, dan akhirnya konsolidasi lahan secara alami, tanpa proses agrarian reform sekalipun. Untuk berkembangnya produk yang dihasilkan oleh para petani di desa, haruslah komoditasnya merupakan komoditas yang diminta pasar dan produknya mempunyai daya saing yang tinggi. Oleh karena itu, dalam kawasan pertanian yang terpilih menjadi kawasan agropolitan, harus ada komoditas unggulan yang diminta pasar yang dapat memberikan kesejahteraan masyarakatnya (memiliki efek multiplier yang tinggi) dan cocok dibudidayakan di desanya. Komoditas unggulan itulah yang dikembangkan.

Dalam kawasan agropolitan diupayakan terdapat satu komoditas unggulan utama, yang dikembangkan melalui diversifikasi usaha baik diversifikasi dalam usaha tani maupun dalam proses industrinya. Bila dalam kawasan agropolitan terdapat lebih dari satu komoditas unggulan, maka

untuk efisiensi usaha tani perlu pengaturan supaya satu daerah terdapat satu komoditas unggulan yang merupakan primadonanya, walaupun demikian pada desa tersebut tetap dikembangkan komoditas unggulan lainnya.

Kawasan agropolitan adalah kawasan pertanian yang terpilih dan sudah berkembang seperti Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN), kawasan peternakan, kawasan hortikultura, atau kawasan tanaman pangan, yang akan disukseskan melalui kerjasama dengan masyarakat dan kerjasama lintas sektoral serta kerjasama lintas pusat dan daerah yang diorganisasikan oleh manajemen yang efisien. Pada kawasan ini diharapkan masyarakat berperan aktif dan pemerintah bersifat memberikan fasilitas yang strategis.

Berdasarkan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pertanian merupakan urusan pemerintahan yang bersifat urusan bersama dan pilihan. Urusan bersama berarti program pengembangan kawasan agropolitan merupakan urusan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan urusan pilihan berarti program ini merupakan urusan yang secara nyata di daerah (kabupaten/kota) dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah. Mengingat program terpadu ini, wilayahnya merupakan wilayah kabupaten/kota, maka dengan demikian pemerintah kabupaten/kota merupakan penanggung jawab utama terhadap kesuksesan program di wilayahnya.

Sebelum program pengembangan kawasan agropolitan dilaksanakan, terlebih dahulu harus ada rencana jangka panjang/jangka menengah gerakan masyarakat pengembangan kawasan. Ada kata **gerakan masyarakat** berarti program ini harus melibatkan masyarakat. Untuk itu disyaratkan pemerintah kabupaten/kota harus membantu menyusun dan menyiapkan *master plan* pengembangan kawasan agropolitan yang merupakan rencana pengembangan kawasan agropolitan jangka panjang/menengah di wilayahnya. Penyusunan *master plan* ini harus melibatkan masyarakat setempat. Begitu pula pelaksanaannya yang dijabarkan dalam rencana tahunan. Untuk mengembangkan kawasan agropolitan, pemerintah

kabupaten/kota wajib memfasilitasinya dan mengkoordinasikan serta mensinergikan semua investasi yang masuk dalam kawasan, baik anggaran dan kegiatan yang berasal dari pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, maupun yang datang dari swasta, BUMN serta masyarakat setempat.

Fasilitasi pemerintah diarahkan untuk mendorong masyarakat dan kelembagaannya yang ada di kawasan memiliki ketangguhan dalam berusaha serta mendorong kalangan dunia usaha (pengusaha dan pedagang) termasuk perbankan dan industri asuransi, nyaman berinvestasi dan berusaha melaksanakan kemitraan dengan petani di desa industri. Untuk berkembangnya pertanian industri, pemerintah mendukung fasilitasi publik, dan kegiatan strategis untuk berkembangnya usaha masyarakat.

Persyaratan pokok dalam pengembangan kawasan agropolitan adalah adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah (Bupati/Walikota dan DPRD) dan masyarakat, dalam menyusun dan melaksanakan master plan kawasan agropolitan. Waktu untuk program pengembangan kawasan agropolitan ini tergantung dari kepentingan dan kondisi masing-masing daerah. Selain itu master plan harus merupakan bagian dari pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota, yang penyusunannya harus melibatkan masyarakat praktisi, dan pakar setempat. Master plan ini harus diterbitkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), dan dijabarkan setiap tahun dalam bentuk rencana program tahunan.

Fasilitas pemerintah diarahkan untuk mensukseskan visi, dan tujuan program pengembangan kawasan agropolitan, berdasarkan master plan kawasan, dan rencana program tahunan, disesuaikan dengan kondisi daerah dan dinamika masyarakat. Gerakan pengembangan kawasan agropolitan merupakan pembangunan ekonomi berbasis pertanian di kawasan pertanian, harus dirancang dan dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada untuk mendorong berkembangnya pertanian industri yang berdaya saing, dan berkelanjutan yang digerakkan oleh masyarakat. Pertanian industri ini menggerakkan komoditas unggulan spesifik wilayahnya yang diminta pasar dan mempunyai *multiplier effect* yang tinggi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkembangnya pertanian

industri berdaya saing dicirikan antara lain : berorientasi pasar, meningkatkan pangsa pasar baik nasional maupun internasional, meningkatkan produktivitas dan nilai tambah melalui :

- 1) Pemanfaatan modal (*capital driven*)
- 2) Pemanfaatan inovasi teknologi (*innovation driven*)
- 3) Kreativitas sumber daya manusia (*skill driven*)

dan bukan lagi mengandalkan kelimpahan sumber daya alam dan tenaga kerja tidak terdidik. Sedangkan pertanian industri berkelanjutan dicirikan antara lain : memiliki kemampuan merespons perubahan pasar yang cepat dan efisien, berorientasi kepentingan jangka panjang, mengadopsi inovasi teknologi yang terus menerus, menggunakan teknologi ramah lingkungan dan mengupayakan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Selain itu, yang harus diperhatikan adalah masalah *social capital*. *Social capital* ini, harus menjadi pilar dalam mewujudkan kawasan agropolitan (Sudaryono, 2004). Asumsi dasarnya adalah bahwa masyarakat yang ada dikawasan ini pada hakekatnya merupakan ujung sejarah dari anyaman-anyaman yang panjang dari kejadian-kejadian dan momentum-momentum yang telah terlewati. *Social capital* menyangkut tidak hanya bagaimana proses dan jalinan panjang telah membentuk pertanian masyarakat pada saat ini, melainkan juga menyangkut jalinan-jalinan antar kelompok, antar keluarga dan juga antar individu, serta bangunan-bangunan industry yang ditegakkan.

Ketika suatu kawasan pertanian ditetapkan atau dikukuhkan sebagai kawasan agropolitan, maka penetapan tersebut akan membawa implikasi pada terbangunnya kebanggaan local dari seluruh anggota komunitas didalamnya. Namun, satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa sebelum suatu kawasan pertanian ditetapkan atau dikukuhkan sebagai agropolitan, tentu seluruh anggota masyarakat tersebut telah memiliki kebanggaan tersendiri atas kawasan yang menjadikan mereka memiliki identitas sebagai suatu masyarakat. Dalam konteks ini, tatanan baru dari tata ruang agropolitan hendaknya justru memperkuat dan mengembangkan kebanggaan local yang telah mereka miliki tersebut.

Bila gerakan pengembangan kawasan agropolitan terlaksana maka berarti di pedesaan memiliki struktur pertanian progresif yang digambarkan oleh A.T. Mosher (1974) berfungsi seperti halnya sistem peredaran darah dalam tubuh manusia. Proses-proses kehidupan terjadi didalam sel-sel individual yang tersebar di seluruh tubuh manusia dan ini dibantu oleh zat-zat hara yang diangkut kepadanya oleh system peredaran darah. Demikian pula, dengan produk pertanian yang dijual ke pasar, memerlukan sarana produksi dan informasi dari daerah lain. Oleh karena itu unsur yang harus terdapat dalam struktur pertanian progresif menurut A. T. Mosher adalah sebagai berikut :

- 1) Pasar, dimana petani dapat membeli sarana produksi dan alat pertanian dan menjual hasil pertanian
- 2) Jalan-jalan pedesaan
- 3) Percobaan-percobaan pengujian local
- 4) Penyuluhan pertanian
- 5) Fasilitas kredit, untuk menyediakan sarana produksi

Konsep AT Mosher ini, sebenarnya telah diadopsi pemerintah selama lebih tiga puluh tahun dalam bentuk Program Bimas. Melalui instruksi Presiden (Inpres) No 4 Tahun 1973 tentang Unit Desa. Pemerintah menetapkan bagaimana pembentukan, pengaturan dan pembiayaan Unit Desa. Dalam Inpres tersebut yang disebut unit desa adalah suatu kesatuan agro-ekonomi dari masyarakat dalam suatu wilayah, yang memiliki fungsi-fungsi penyuluhan pertanian, perkreditan, penyaluran sarana produksi serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Wilayahnya disebut Wilayah Usaha Desa (Wilud). Wilud terdiri dari satu atau beberapa desa yang terletak pada satu atau lebih kecamatan yang meliputi areal persawahan sekitar 600-1000 hektar. Pada umumnya satu kecamatan sama satu wilud. Tidak ada satu Wiludpun yang diperkenankan mempunyai areal persawahan di kabupaten lain. Untuk melaksanakan fungsinya, Unit Desa memiliki unsur kelengkapan kelembagaan, penyuluh pertanian, BRI Unit Desa/Bank, Pengecer/Kios/Warung Unit Desa dan Koperasi Unit Desa (KUD). Atas dasar Inpres no.4 Tahun 1973 itulah sekarang di pedesaan ada BRI Unit

Desa, Penyuluh, KUD (bertambah dan berkembang) dan berkembangnya kios sarana produksi.

Dengan adanya koordinasi dan sinkronisasi kegiatan baik yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, maupun swasta dan masyarakat, maka kawasan agropolitan diharapkan terwujud pertanian maju di pedesaan. Untuk melindungi eksistensi program pengembangan kawasan agropolitan ini diperlukan dukungan fasilitasi pemerintah yang kuat. Tanpa adanya perlindungan dari pemerintah eksistensi kawasan agropolitan sulit untuk ditegakkan, bertahan dan berlanjut.

Dukungan tersebut, menurut Friedman dan Douglass dalam Suwandi (2005, hal.18) yaitu perlu adanya suatu pemerintahan dan perencanaan yang sesuai dengan lingkungannya dan yang dapat mengendalikan pemberian prioritas-prioritas pembangunan dan pelaksanaannya pada penduduk daerahnya. Ini berarti pada kawasan agropolitan perlu manajemen yang diberi wewenang dalam mengambil keputusan dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan sumber daya (dana, tenaga, teknologi, alam) yang masuk pada kawasan baik dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat setempat. Untuk berkembangnya pertanian industri pada kawasan agropolitan, maka tentu harus dirancang/dikembangkan fasilitas yang menyebabkan orang nyaman hidup di pedesaan, yaitu antara lain, adanya pasar, bank, sekolah, lembaga penyuluhan, dan alih teknologi pertanian, unit (industri) pengolahan hasil, rumah sakit/klinik kesehatan, jaringan jalan, irigasi, transportasi, telekomunikasi serta prasarana dan sarana umum lainnya.

2.2.8.3 Visi dan Misi Agropolitan

Visi dan kurun waktu pengembangan kawasan agropolitan pada suatu kabupaten /kota tentu berbeda dengan visi dan kurun waktu yang ditempuh kabupaten/kota lainnya. Secara umum , untuk memberikan wawasan kepada pemerintah daerah, disarankan visinya berkisar sekitar visi umum yang maknanya mengarah ”:menjadi kawasan pertanian industri yang berdaya

saing dan berkelanjutan”.

Begitu pula dengan misi untuk mencapai visi, setiap daerah berbeda satu sama lain. Walaupun demikian secara umum, misi yang harus diemban dalam mewujudkan visi pengembangan kawasan agropolitan, terutama menyangkut hal sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas petani dan mengembangkan kelembagaan petani (koperasi, asosiasi, kelompok tani) serta kelembagaan perdesaan yang berperan dalam pembangunan ekonomi wilayah
- b. Meningkatkan diversifikasi ekonomi pedesaan melalui peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian baik berupa bahan segar maupun olahan
- c. Meningkatkan akses petani terhadap sumber daya produktif dan permodalan melalui fasilitasi dukungan ketersediaan dan layanan yang dibutuhkan petani dan masyarakat. Layanan penyediaan sarana produksi, sarana pasca panen/pengolahan hasil dan permodalan yang tersedia di kawasan dalam jumlah, jenis, waktu, kualitas dan lokasi tepat, merupakan fasilitasi yang harus dikoordinasikan oleh pemerintah.
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memajukan usaha pertanian industri yang sesuai kebutuhan masyarakat. Fasilitasi dari pemerintah diarahkan pada pembangunan dan sarana publik, yang harus dilakukan dengan pendekatan kawasan, dengan memperhatikan hasil identifikasi sumberdaya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia dan tingkat perkembangan kawasan agropolitan
- e. Meningkatkan kapasitas manajemen dan petugas di kawasan agropolitan. Perubahan sikap aparat ke arah profesional, rajin, tekun, dan mampu kerjasama, harus bisa diupayakan secara terus menerus termasuk kepada intelektualnya, dan juga pendidikan kampusnya.
- f. Mewujudkan pemukiman pedesaan yang nyaman dan tertata rapi serta menjaga kelestarian lingkungan melalui pengaturan dan pelaksanaan masterplan kawasan agropolitan secara konsisten dan terkoordinasi.

2.2.8.4 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Agropolitan

Program pengembangan kawasan agropolitan pada kawasan terpilih ini, ditempuh dengan penekanan pada pengembangan pemberdayaan masyarakat. Secara umum tujuan dan sasaran pengembangan agropolitan dapat dibagi menjadi tujuan dan sasaran jangka panjang (*goal*), tujuan dan sasaran jangka menengah (*purpose*), dan tujuan dan sasaran jangka pendek. Seperti halnya dengan misi, maka tujuan dan sasaran program dari setiap kabupaten/kota atau provinsi akan berbeda-beda tergantung dari kepentingan dan kondisi masing-masing daerah. Namun secara umum tujuan dan sasaran program pembangunan ini dapat digambarkan adalah sebagai berikut:

a. Jangka Panjang (*Goal*)

Tujuan program pengembangan agropolitan jangka panjang (misalnya dalam 20 tahun) adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani dan keluarganya di kawasan agropolitan, meningkatkan ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Sasarannya harus lebih jelas, sebagai contoh sasaran pendapatan petani dalam tahun 2015 sebesar \$5000 per kepala per tahun dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik 20% dari angka IPM sekarang.

b. Jangka Menengah (*Purpose*)

Tujuan program pengembangan kawasan agropolitan jangka menengah (misalnya 5 tahun), harus konsisten atau terkait dengan tujuan pembangunan jangka panjang yaitu untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, meningkatkan ketahanan pangan dan menjaga kelestarian lingkungan. Hanya disamping tujuan tersebut terdapat tujuan antara, sebagai contoh tujuannya ditambah dengan:

- 1) Menumbuhkembangkan kelembagaan usaha ekonomi petani (*on farm* dan *off farm*) yang efektif, efisien, dan berdaya saing.
- 2) Menumbuhkembangkan sarana dan prasarana umum dan sosial yang mendukung kelancaran usaha ekonomi masyarakat.
- 3) Menciptakan iklim usaha ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha masyarakat di kawasan agropolitan

Begitu pula dengan sasarannya, misalnya sasaran pendapatan petani dalam tahun 2014 sebesar \$6000 per kepala per tahun dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik sebesar 10% dari angka IPM sekarang.

c. Jangka Pendek (*Objective*)

Tujuan dan sasaran program pengembangan kawasan agropolitan jangka pendek (misalnya tahun 2012 dan 2014) disusun oleh masing-masing kabupaten/kota atau provinsi sesuai dengan potensi dan permasalahan yang dihadapi. Tujuan dan sasaran ini tetap harus konsisten dengan tujuan dan sasaran program pembangunan kawasan agropolitan jangka panjang dan jangka menengah.

2.2.8.5 Komponen Penting dalam Kebijakan Pengembangan Agropolitan

Banyak orang menilai pembangunan pedesaan kurang berhasil, padahal dana pembangunan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk pedesaan, yang disalurkan melalui dinas/lembaga teknis daerah, sebenarnya cukup berlimpah. Ada alasan kenapa hal tersebut terjadi: (1) karena semula ini masyarakat pedesaan tidak (kurang) diajak dalam merencanakan program, dan maupun pelaksanaannya, (2) karena lemahnya koordinasi dan tingginya ego sektoral, (3) karena tidak ada rencana pembangunan kawasan pertanian yang merupakan garapan bersama semua instansi yang dilakukan secara terpadu.

Harus ditanamkan bahwa pembangunan kawasan agropolitan adalah pembangunan wilayah, harus merupakan komitmen bersama semua unsur masyarakat setempat yang difasilitasi oleh pemerintah. Masyarakat harus dilibatkan baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan. Adapun komponen penting dari pengembangan kawasan agropolitan, yang merupakan prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat adalah pengembangan dari unsur-unsur esensial yaitu SDM dan kelembagaan yang berperan, yang minimal ada di kawasan agropolitan, serta adanya master plan kawasan dan rencana program tahunannya.

a. Unsur SDM yang Berperan

Ada empat unsur kelompok sasaran (*stakeholder*) yang berperan dalam pengembangan kawasan agropolitan:

- 1) Unsur Masyarakat (Terutama Petani)
- 2) Unsur Birokrat
- 3) Unsur Pengusaha
- 4) Unsur Pendukung

Unsur pendukung ini terdiri dari:

- Para cerdas pandai, pemuka masyarakat
- Pemuka adat, pemuka agama
- Universitas, pesantren
- LSM, perorangan dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang peduli terhadap upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh manajemen kawasan agropolitan harus dilakukan secara sistematis dan mendidik. Ada empat prinsip yang harus diterapkan dalam mengembangkan kawasan agropolitan, yaitu:

- 1) Prinsip Kerakyatan. Pembangunan diutamakan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat banyak, bukan kesejahteraan orang per orang atau kelompok
- 2) Prinsip Swadaya. Bimbingan dan dukungan kemudahan (fasilitas) yang diberikan haruslah mampu menumbuhkan keswadayaan dan kemandirian, bukan menumbuhkan ketergantungan
- 3) Prinsip Kemitraan. Memperlakukan pelaku agribisnis sebagai mitra kerja pembangunan yang berperan serta aktif dalam pengambilan keputusan. Ikut serta mereka dalam seluruh proses pengambilan keputusan akan menjadikan mereka sebagai pelaku dan mitra kerja yang aktif dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan
- 4) Prinsip Bertahap dan Berkelanjutan. Pembangunan dilaksanakan sesuai dengan potensi dan kemampuan masyarakat setempat serta memperhatikan kelestarian lingkungan.

b. Kelembagaan di Kawasan Agropolitan

Untuk mewujudkan pertanian industri, maka pada kawasan agropolitan, disyaratkan minimal harus memiliki fasilitas kelembagaan berikut:

- 1) Pasar, dimana petani dapat membeli sarana produksi dan alat pertanian dan menjual hasil pertanian
- 2) Pengecer/kios/warung, sarana yang bertugas melaksanakan fungsi penyaluran sarana produksi: pupuk, pestisida, benih, serta alat-alat mesin
- 3) Bank yang bertugas mengurus fungsi perkreditan
- 4) Koperasi dan KUD (Koperasi Unit Desa), Asosiasi, dan Kelompok Tani yang bertugas melaksanakan fungsi penyediaan sarana pertanian, permodalan, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi pertanian.
- 5) Unit Pengolahan hasil dan Unit Pengumpul Komoditas Pertanian sebagai bahan mentah industri
- 6) Balai Benih/Pembibitan yang bertugas untuk menyiapkan benih/bibit yang bersertifikat
- 7) Pusat pemenuhan pelayanan kebutuhan pemukiman pertanian.
- 8) Balai Penyuluhan Pertanian, yang bertugas memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada petani dan pelaku agribisnis lainnya. Mengingat program pengembangan kawasan agropolitan merupakan program pembangunan wilayah, maka sebaiknya status ditingkatkan menjadi Balai Penyuluhan Pembangunan Kawasan. Balai ini merupakan tempat berkumpulnya semua penyuluh (pertanian dan non pertanian)
- 9) Badan/Unit Pengelola Kawasan Agropolitan, bertugas mensinkronkan, mensinergikan semua program dan investasi yang masuk kedalam kawasan agropolitan serta mengkoordinasikan para penyuluh, petugas dan pendamping kawasan yang melaksanakan fungsi penyuluhan pembangunan wilayah dengan penekanan pada pertanian industri.
- 10) Pusat Pelatihan dan Konsultasi milik petani, atau yang sekarang disebut dengan Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S). P4S harus berfungsi sebagai Klinik Konsultasi Agribisnis (KKA) yaitu yang memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan jasa

konsultasi, pelayanan informasi pasar, tempat pelatihan, dan bisa juga ditambah berfungsi sebagai tempat percontohan dan kios. KKA perlu dilengkapi ruang konsultasi, para ahli pertanian, apotek/kios sarana pertanian, perpustakaan, laboratorium lapang, laboratorium mini untuk mendeteksi hama/penyakit/unsur hara serta sistem informasi pasar/internet. Status kepemilikan KKA ini dapat sebagai milik pemerintah (yang diperasionalkan oleh Badan /Unit Pengelola Kawasan Agropolitan, atau Balai Penyuluhan Pertanian/Pembangunan Kawasan baik dioperasional sendiri atau bekerjasama dengan swasta dan atau perguruan tinggi, dan atau petani. KKA juga dapat dimiliki oleh swasta atau dimiliki oleh petani. Dengan demikian KKA dapat berfungsi sebagai Pos Pelayanan Penyuluhan (Posyanluh) di pedesaan (kawasan)

Pada kawasan agropolitan dengan skala yang lebih besar yang memiliki kota pertanian yang lebih besar (kota menengah/kota besar), pada kawasan perlu memiliki fasilitas seperti pada unit kawasan diatas ditambah dengan fasilitas berikut:

- 1) Pusat Perdagangan Wilayah yang ditandai dengan adanya pasar-pasar grosir dan pergudangan komoditas sejenis
- 2) Pusat Kegiatan Agro-Industri berupa pengolahan barang pertanian jadi dan setengah jadi serta kegiatan agro-bisnis
- 3) Pusat Pelayanan Agro-Industri Khusus, pendidikan, pelatihan, dan pemuliaan tanaman unggulan.

Pada kawasan agropolitan dengan skala besar yang memiliki kota pertanian utama, maka pada kawasan tersebut perlu memiliki fasilitas disamping kota pertanian strata orde kedua, juga ditambah dengan fasilitas berikut:

- 1) Pelabuhan samudra
- 2) *Manufacturing final* industri pertanian (*Packing*), stok pergudangan dan perdagangan bursa komoditas
- 3) Fasilitas kegiatan tertier agrobisnis, jasa perdagangan, asuransi pertanian, perbankan dan keuangan

4) Lembaga pelayanan.

c. Organisasi Pengelola

Dalam melaksanakan gerakan pengembangan kawasan agropolitan, pada manajemen kawasan agropolitan perlu diberikan kewenangan dalam mengambil keputusannya dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan sumber daya, sumber dana yang masuk pada kawasan. Komitmen dan keseriusan pemerintah daerah dapat dilihat dari adanya organisasi khusus untuk menangani program ini. Organisasi ini dapat berbentuk Badan/Unit Pengelola Kawasan Agropolitan, atau bentuk lain, yang penting terhadap organisasi ini diberikan kewenangan dalam mengkoordinasikan dan mensinkronkan perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan kawasan agropolitan, dan harus dikelola oleh manajemen dan tenaga profesional.

Untuk mengendalikan badan/unit ini dan juga untuk memberikan saran-saran teknis, di tingkat kabupaten/kota, dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang unsurnya terdiri dari unsur dinas/lembaga teknis daerah dan unsur lain yang terkait program seperti Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), perguruan tinggi, pengusaha (Swasta, BUMN) dan LSM. Begitu pula di tingkat provinsi dan tingkat nasional. Berjalannya pokja tergantung dari peranan dan kegesitan sekretariat Pokja. Oleh karena itu sekretariat Pokja yang tetap harus ada, dan tergantung dari Menteri Pertanian (di tingkat pusat), gubernur dan bupati/walikota, dimana sekretariat Pokja ini akan diletakkan. Badan/Unit Pengelola Kawasan Agropolitan atau Balai Penyukuhan Pembangunan Kawasan dibentuk oleh gubernur (bila lintas kabupaten/kota) dan bupati/walikota (untuk kabupaten/kota).

Badan hukum dari Badan/Unit ini sebaiknya ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan bila Perda belum terbit untuk sementara dapat ditetapkan melalui Penetapan/Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota.

Tugas Badan/Unit Pengelola Kawasan Agropolitan antara lain:

a. Mempersiapkan master plan dan rencana program tahunan

- b. Mensinkronkan, mensinergikan semua program/proyek dan investasi yang masuk ke dalam kawasan agropolitan
- c. Mengkoordinasikan para penyuluh (pertanian, industri, koperasi, keluarga berencana), tenaga fungsional lainnya, petugas kesehatan hewan, pengamat hama, juru penerang, penyuluh swakarsa dan kontak tani dan petugas pendamping lainnya.
- d. Menyampaikan permasalahan untuk dipecahkan oleh instansi terkait
- e. Membuat laporan berkala dan insidental kepada gubernur dengan tembusan bupati/walikota (bila lintas kabupaten/kota) atau kepada bupati/walikota atau kepada pejabat yang ditunjuk oleh gubernur atau bupati/walikota.

Sementara sekretariat Pokja yang bertindak sebagai Pos Simpul Koordinasi (Posko) merupakan dapur pengolah data dan informasi yang berfungsi:

- a. Menyiapkan dan melaksanakan pengolahan data dan informasi
 - b. Membantu menyiapkan pedoman/petunjuk dan bahan-bahan informasi
 - c. Membantu dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi baik perancangan, sosialisasi, pelatihan, pelaksanaan maupun pengawasan
 - d. Menyampaikan informasi kepada instansi yang berkepentingan untuk ditindaklanjuti
 - e. Membuat laporan berkala
- d. Master Plan dan Rencana Tahunan

Konsep pengembangan kawasan agropolitan bukan saja diarahkan untuk membangun sektor pertanian yang tangguh, tetapi juga memperbaiki arah dan dasar-dasar pertumbuhan daerah secara konsisten dalam program jangka panjang (20-25 tahun). Hal ini, sebenarnya memberikan terobosan bagi pemerintah daerah untuk tidak memilih berbagai arah dan tujuan pembangunan yang terlalu banyak dan dibuat sangat kompleks.

Gagasan yang baik dan tujuan yang baik harus dapat diterjemahkan ke dalam bentuk rencana yang baik, sehingga dapat dipahami dengan jelas oleh setiap *stakeholder* yang akan terlibat dalam implementasinya. Karena

itu menurut Rustan Harun (2004), perlu adanya suatu *blue print* perencanaan pembangunan yang dituangkan kedalam bentuk peta spasial agar para *stakeholder* memahami apa yang dikerjakannya, dimana kegiatan dilaksanakan, kapan dilaksanakan dan siapa mengerjakan apa. Perencanaan pengembangan wilayah dengan basis konsep agropolitan ditetapkan berdasarkan strategi pengembangan perwilayahan komoditas unggulan yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif pemasaran jangka panjang, yang dilakukan secara terpadu dan konsisten. Perencanaan pengembangan wilayah tersebut diterjemahkan dalam bentuk Master Plan Agropolitan yang dapat dibaca oleh semua pihak (petani, lembaga pertanian, pengusaha, aparat pemerintah, sektoral/departemen dan para *stakeholder* lainnya)

Master plan agropolitan adalah suatu dokumen formal rencana induk pengembangan kawasan termasuk didalamnya penataan ruang spasialnya, yang dipakai arahan dan pedoman para *stakeholder* dalam melaksanakan kegiatan pembangunannya. Master plan agropolitan mengintegrasikan pembangunan desa dan kota yang ada ke dalam konsep pengembangan wilayah.

Efisiensi skala ekonomi usaha tani perlu diterapkan secara cermat, terutama efisiensi integrasi usaha tani yang beragam, skala usaha tani yang kecil dan tidak efisien ke dalam skema usaha tani ekonomi yang lebih besar, untuk bisa mempertahankan *marketing* dan *scale of market* (spesifik lokal, regional, nasional).

Pokok-pokok pekerjaan penyusunan Master Plan Kawasan Agropolitan antara lain:

- a. Sebelum menetapkan lokasi kawasan agropolitan, pemerintah provinsi (bila lokasinya akan lintas kabupaten/kota), maupun kabupaten/kota (bila merupakan inisiatif kabupaten/kota) terlebih dulu harus melakukan studi kelayakan atau analisis potensi komoditas-komoditas unggulan yang mempunyai prospek yang paling tinggi dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Komoditas unggulan ialah komoditas pertanian (baik tanaman pangan, hortikultura,

perkebunan, peternakan, perikanan) yang diusahakan oleh mayoritas masyarakat kawasan karena adanya kesesuaian agroklimat kawasan, terjamin ketersediaan secara terus menerus, baik masih dalam bentuk primer, atau produk olahan sementara, atau produk olahan akhir, telah diusahakan dalam industri baik kecil, menengah, atau besar, berdaya saing dan mempunyai pangsa pasar baik lokal ataupun regional ataupun internasional, serta didukung oleh kebijakan pemerintah, terutama pemerintahan daerah, dan akan atau menjadi ciri khas daerah/kawasan. Atas dasar hasil kelayakan tersebut baru pilihlah lokasi kawasannya. Bila program ini merupakan program provinsi, maka lokasi kawasannya harus merupakan lintas kabupaten/kota. Ini berarti pemerintah provinsi harus bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan kawasan yang ada di kabupaten/kota.

Analisis potensi pengembangan komoditas unggulan ini dilakukan untuk skenario minimal 10 tahun ke depan, dan yang dianalisis terutama adalah sebagai berikut:

- Analisis penentuan komoditas unggulan (permintaan pasar, nilai ekonomis, dukungan sumberdaya alam, teknologi, kualitas produksi, kemampuan pemenuhan pasar, kebijakan pemerintah). Analisis ini perlu dikaitkan dengan analisis skala dan jenis usaha (skala besar, sedang, kecil, dan rumah tangga) dan analisis pengembangan sumberdaya manusia pertaniannya.
 - Analisis kesesuaian lahan dan agroklimat, yaitu penilaian kesesuaian dan daya dukung setiap sistem lahan untuk mengembangkan komoditas unggulan tertentu.
 - Analisis ketersediaan lahan dan kapasitas produktivitas lahan, yaitu kajian ketersediaan lahan dan tingkat produktivitasnya untuk tanaman unggulan dan turunannya, luasan tanah yang sudah digunakan, status kepemilikan lahan, status hutan, geologi lingkungan serta sistem infrastruktur wilayah yang telah ada.
- b. Mengidentifikasi kelayakan untuk penetapan batas-batas kawasan agropolitan serta mengintegrasikan desa dan kota yang ada di dalam

suatu sistem perkotaan pedesaan untuk mengembangkan ekonomi desa berbasis komositas unggulan. Termasuk dalam identifikasi ini adalah mengidentifikasi kota-kota yang dapat dijadikan kota utama, kota tani dan pusat-pusat permukiman pertanian lainnya. Menurut Rustan Harus (2004), kawasan agropolitan perlu ditetapkan dengan luasan areal yang direncanakan kurang lebih 50.000 – 400.000 Ha. Dalam *planning region* ini telah mengakomodasikan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, provinsi, kabupaten termasuk kawasan lindung, kawasan budidaya serta sistem perkotannya, dan Rencana Sistem Jaringan yang telah ada dan telah disepakati untuk dikembangkan di kawasan tersebut, maupun di wilayah yang lebih luas kawasan lebih ditentukan oleh skala ekonomi (bisa satu kecamatan atau lintas kecamatan atau lintas kabupaten), serta terdiri dari kota pertanian dan desa-desa sentra produksi pertanian yang ada di sekitarnya, dengan batasan yang tidak ditentukan dengan memperhatikan skala ekonomi yang ada. Namun dalam rangka memudahkan koordinasi sebaiknya kawasan berada dalam satu kabupaten/kota atau kelipatan kabupaten/kota.

- c. Melakukan analisis kebijakan pembangunan daerah termasuk mengkaji arah kebijaksanaan pembangunan ekonomi dan sosial budaya, mengkaji arah kebijakan dan pengendalian tata ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRW Prop), RTRW Kabupaten/Kota, yang menunjukkan arahan kawasan andalan, kawasan ekonomi terpadu, sektor unggulan, sistem perkotaan, dan rencana sarana-prasarananya, serta pengembangan prioritas sektor pertanian serta sektor-sektor penunjang lainnya.
- d. Mengidentifikasi sistem infrastruktur wilayah (sistem jaringan jalan, transportasi, komunikasi, pengembangan, Daerah Aliran Sungai dan sistem jaringan irigasi dan prasarana permukiman). Melakukan analisis tata ruang, diantaranya mengevaluasi sebaran dan aglomerasi permukiman, analisis sistem jaringan, analisis hirarki permukiman serta mengidentifikasi jangkauan pelayanan dari pusat-pusat permukiman

yang ada, batasan kawasan-kawasan yang sesuai dikembangkan, kawasan yang perlu dialihfungsikan (dikonversikan), kawasan konservasi dan kawasan lindung.

- e. Berdasarkan hasil analisis diatas, baru disusun Rencana Induk Jangka Panjang atau Master Plan kawasan agropolitan secara komprehensif dan layak. Dalam penyusunan ini hendaknya pemerintah daerah melibatkan tokoh dan pemuka masyarakat dan pakar setempat, seperti camat, kepala desa, kontak tani andalan, penyuluh lapangan, perguruan tinggi, dan pengusaha. Master plan kawasan ini selanjutnya harus berbentuk legal hukum yaitu Peraturan Daerah (Perda) atau Penetapan Presiden (Penpres).
- f. Rencana program tahunan yang merupakan penjabaran dari master plan kawasan harus disusun untuk bahan fasilitasi pemerintah dan pegangan bagi para *stakeholder*. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program tahunan ini harus melibatkan masyarakat setempat.

2.2.8.6 Indikator Keberhasilan

Setiap daerah (provinsi/kabupaten/kota) pelaksana program pengembangan kawasan agropolitan perlu menyusun indikator keberhasilannya berupa dampak dan *output* yang diharapkan dari pelaksanaan program pengembangan kawasan agropolitan. Indikator keberhasilan tersebut perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing. Parameter kunci atau indikator untuk mengetahui suatu kawasan agropolitan yang berhasil, yaitu bila pada kawasan:

- a. Terjadinya peningkatan pendapatan khususnya petani dan keluarganya di kawasan agropolitan. Variabel untuk mengukur pendapatan dan tingkat kesejahteraan ini dapat diukur dari pendapatan per kapita per tahun. Indikator keberhasilan ini dapat dibandingkan sebelum dan sesudah program dilaksanakan. Apabila pendapatan per kapita per tahun bisa mencapai target yang ditetapkan, berarti program pengembangan kawasan agropolitan berhasil dari segi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat. Indikator ketahanan pangan

dapat dilihat dari angka kemiskinan dan diversifikasi konsumsi pangan, dan berkembangnya kelembagaan usaha ekonomi petani (*on farm* dan *off farm*) yang efektif, efisien, dan berdaya saing.

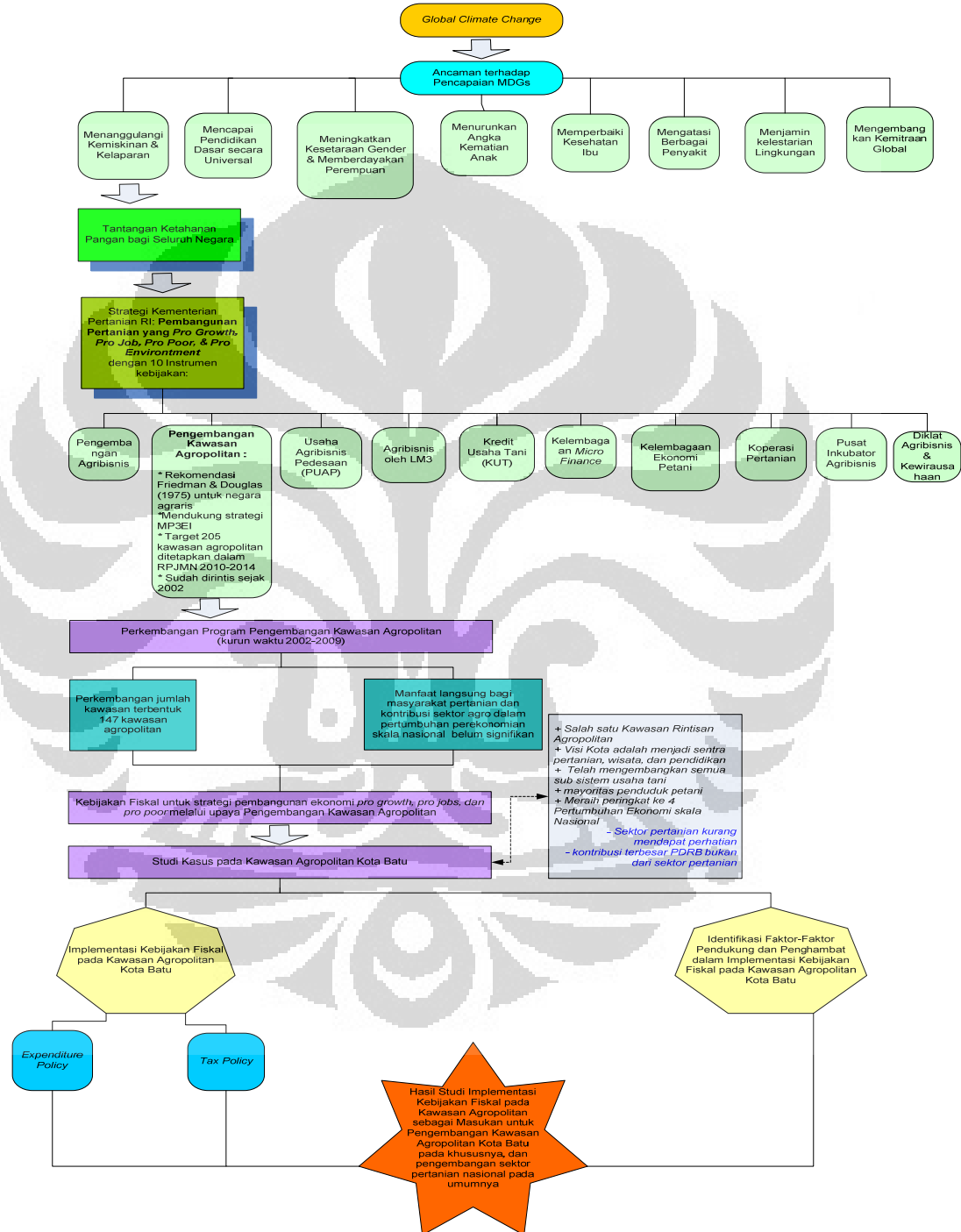
- c. Terbentuknya pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, kreatif, inovatif, berjiwa wirausaha, dan profesional. Variabel untuk mengukur ini dapat diukur dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator keberhasilan ini dapat dibandingkan sebelum dan sesudah program dilaksanakan. Apabila angka IPM bisa mencapai target yang ditetapkan, berarti program pengembangan kawasan agropolitan berhasil dari segi pengembangan SDM.
- d. Terjaganya kelestarian lingkungan dan meningkatnya kenyamanan hidup di pedesaan yang bernuansa kota, yang ditandai dengan:
 - Hadirnya dukungan sarana dan prasarana yang strategis;
 - Terwujudnya keserasian, kesesuaian, dan keseimbangan;
 - Terbukanya akses terhadap modal dari lembaga penyedia keuangan formal/pemerintah/swasta/masyarakat; akses terhadap teknologi dan informasi; akses terhadap jaringan pemasaran yang berkesinambungan; dan akses terhadap lembaga pengelolaan lokal/lembaga adat.

Untuk keperluan pembinaan dan fasilitas, pemerintah dapat membuat strata kawasan agropolitan. Strata tersebut adalah strata Pra Kawasan Agropolitan I, strata Pra Kawasan Agropolitan II, dan strata Kawasan Agropolitan. Indikator untuk menilai strata Kawasan Agropolitan, perlu dipersiapkan oleh pemerintah dan masyarakat. Namun sebagai bahan acuan dapat digunakan tujuh indikator variabel yaitu:

- 1) Komoditas unggulan
- 2) Kelembagaan pasar
- 3) Kelembagaan tani
- 4) Kelembagaan penyuluhan
- 5) Sarana prasarana ke/di sentra produksi
- 6) Sarana prasarana umum
- 7) Sarana dan prasarana kesejahteraan sosial.

2.3 Alur Pemikiran

Untuk menjelaskan alur pemikiran penulis dalam penelitian ini, berikut digambarkan dalam skema alur pemikiran (Gambar 2.4).



Gambar 2.4
Alur Pemikiran

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, analisis data lebih bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Creswell (1994, hal.1-2) , penelitian kualitatif adalah: *“process of understanding a social or human problem, based on building a complex, holistic picture, formed with words, reporting detailed views of informants and conducted in a natural setting.”*

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena peneliti ingin menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, mengembangkan realitas yang kompleks serta memperoleh pemahaman atas fenomena yang diteliti. Adapun fenomena permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan fiskal pada kawasan agropolitan Kota Batu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pola non-linier (*cylical*) yang memungkinkan peneliti untuk mengulang langkah-langkah penelitian hingga tercapai hasil optimal (*logic in practice*).

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan, manfaat, dimensi waktu, dan teknik pengumpulan data dari penelitian yang dilakukan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan keempat klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian secara umum, maka jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menemukan penjelasan tentang mengapa suatu kejadian atau gejala terjadi (Prasetyo, 2005, hal.43). Penelitian ini menghubungkan pola-pola yang berbeda dan menghasilkan pola hubungan sebab akibat. Neuman (2006, hal.35) mendefinisikan penelitian eksplanatif yaitu: *“Research in which the primary purpose is to explain why events occur and to build, elaborate, extend or test theory.* Dikaitkan dengan studi implementasi kebijakan, Dolbeare dalam Ekowati (2009, hal.45) mengamati, studi kebijakan secara tipikal bertanya tentang “mengapa hal ini terjadi?”.

b. Berdasarkan Manfaat Penelitian

Berdasarkan manfaat penelitian, penelitian ini termasuk penelitian murni. Penelitian murni merupakan penelitian yang manfaatnya dirasakan untuk waktu yang lama karena penelitian dilakukan untuk kebutuhan peneliti sendiri. Penelitian ini juga mencakup penelitian-penelitian yang dilakukan dalam kerangka akademis (Prasetyo, 2005, hal.38). Tujuan penelitian murni menurut Patton yaitu (2002, hal.215):

“The purpose of basic research is knowledge for the sake of knowledge. Researchers engaged in basic research want to understand how the world operates. They are interested in investigating a phenomenon to get at the nature of reality with regard to that phenomenon. The basic researcher’s purpose is to understand and explain.”

Neuman mendefinisikan penelitian murni sebagai penelitian yang memperluas pengetahuan dasar yang menguji penjelasan teoritis. Penelitian ini memberikan landasan bagi pengetahuan dan pemahaman yang digeneralisasikan pada berbagai kebijakan, masalah atau studi. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Nueman (2006, hal. 24):

“Basic research is research designed to advance fundamental knowledge about how the world works and build/ test theoretical explanations. The scientific community is its primary audience.”

c. Berdasarkan Dimensi Waktu

Jika dilihat dari dimensi waktu, penelitian ini tergolong dalam penelitian *cross sectional*. Menurut Prasetyo dan Jannah (2005, hal.45), penelitian *cross sectional* adalah penelitian yang hanya digunakan dalam waktu yang tertentu dan tidak akan dilakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk diperbandingkan. Untuk jenis penelitian tersebut, Neuman (2006, hal.37) mengatakan bahwa: “*In cross sectional research, researchers observe at one point in time. Cross sectional research is usually the simplest and least costly alternative.*” Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2011 sampai dengan Januari 2012.

d. Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi yang dapat menjelaskan permasalahan suatu penelitian secara objektif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

Data dan informasi penelitian dapat diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*). Menurut Neuman (2006, hal.46), *field research* adalah: “*qualitative research in which the researcher directly observes and records notes on people in natural setting for an extended period of time*”. Studi ini dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam (*in depth interview*), observasi, studi dokumentasi, dan triangulasi. Jenis wawancara yang terbaik untuk studi implementasi adalah wawancara yang bebas dan terbuka. Lebih lanjut, informasi yang valid sering diperoleh evaluator melalui *story telling* dan anekdot. Keduanya seringkali dapat mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu lokasi proyek. Catatan pribadi dan catatan harian juga merupakan sumber informasi yang baik (Byant dan White dalam Wibawa, 1994, hal.28). Hasil wawancara dikonfirmasi kebenarannya melalui studi dokumentasi dan observasi. Dokumentasi yang dimaksud adalah data yang diperoleh baik berupa data primer maupun data sekunder. Peneliti pun melakukan observasi untuk mengecek kebenaran sebagian informasi. Observasi yang dilakukan misalnya dengan melihat langsung ke kelompok tani yang memperoleh bantuan, subsidi atau hibah, mendatangi acara pameran yang

diselenggarakan oleh Dinas Koperindag dalam rangka promosi dan pemasaran produk, lokasi pembangunan sarana dan infrastruktur, dan kegiatan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat petani.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik pengumpulan data yang juga digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi ini dilakukan dengan membaca dan mengumpulkan data dan informasi dari Undang-Undang Perpajakan, peraturan-peraturan perpajakan, buku-buku, *paper* atau makalah, jurnal, majalah, surat kabar, bahan seminar, penelusuran di internet untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan permasalahan penelitian.

3.3 Narasumber/Informan

Dalam menentukan informan yang akan diwawancarai, peneliti mengacu kepada empat kriteria informan yang baik yang dikemukakan Neuman (2006, hal.411), yaitu:

1. *The informant who is totally familiar with the culture and is position to witness significant events makes a good informant;*
2. *The individual is currently involved in the field;*
3. *The person can spend time with the researcher;*
4. *Non analytic individuals make better informants.*

Peneliti menentukan informan dengan cara *purposive* dan *snowball*, serta berkembang selama proses penelitian. Selaras dengan hal tersebut, Nasution dalam Prastowo (2011, hal.44) mengungkapkan bahwa metode kualitatif tidak menggunakan *random sampling* dan tidak menggunakan populasi dan sampel yang banyak. Sampelnya bisa sedikit dan dipilih menurut tujuan penelitian.

Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan dibawah ini:

1. Sri Wahyuni, Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemerintah Kota Batu. Data dan informasi yang diperoleh terkait dengan seluruh program Distanhut khususnya mengenai agropolitan
2. Suwoko, Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemerintah Kota Batu. Informasi yang diperoleh seputar gambaran umum

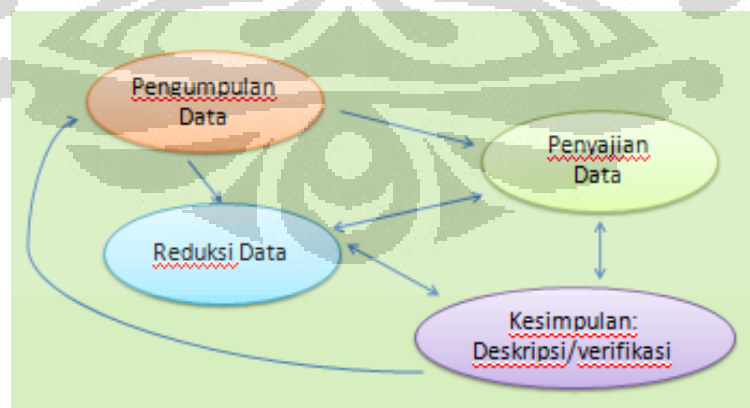
perkembangan agropolitan di Kota Batu termasuk program-program yang dilakukan, beliau juga salah seorang yang mengerti seluk beluk agropolitan Kota Batu sejak pertama kali dibentuk pada tahun 2003.

3. Tunggul Madyantono, Sekretaris Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Pemerintah Kota Batu. Informasi yang diperoleh seputar program-program kerja yang dilakukan oleh Dinas Koperindag terkait pengembangan agropolitan Kota Batu, sejarah terbentuknya Kota Batu, dan juga data LAKIP Dinas Koperindag tahun 2009 dan 2010.
4. Nindya Dwi S., Kepala Seksi Distribusi Pangan, Kantor Ketahanan Pangan Pemerintah Kota Batu. Informasi dan data diperoleh mengenai program kerja KKP terkait pengembangan agropolitan dan gambaran umum tentang persebaran pangan di Kota Batu.
5. Endang Dwi (Kepala Seksi Penanaman Modal, Bidang Perekonomian) dan Abdillah (Kepala Bidang Perekonomian) Sekretariat Daerah Kota Batu. Diperoleh informasi sekilas tentang agropolitan Kota Batu dan data laporan monitoring dan evaluasi perkembangan perekonomian Kota Batu tahun 2011 (laporan *update* sampai dengan periode Agustus 2011)
6. Puspa Permanasari, Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Energi, Dinas Sumber Daya Air dan Energi Pemerintah Kota Batu. Informasi diperoleh seputar program kerja divisi Pengelolaan dan Pengembangan Energi terkait pengembangan agropolitan Kota Batu, diperoleh juga data laporan program yang telah dilaksanakan berupa konstruksi Biogas di beberapa desa.
7. Heru Waskito, Kepala Bidang Usaha Ekonomi dan Kelembagaan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Batu. Heru Waskito juga adalah salah satu pelopor dibentuknya Agropolitan Kota Batu, sehingga beliau juga banyak memberi informasi mengenai seluk beluk agropolitan Kota Batu dan perkembangannya selain informasi mengenai program-program yang dijalankan oleh BPMPKB.
8. Awanto Pribowo, Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Batu. Diperoleh data program kerja BPMPKB termasuk data LAKIP tahun 2010.

9. Luki Budiarti, Ketua Gapoktan Mitra Arjuno dan juga sebagai Pemilik CV Arjuno Flora (sektor hortikultura) yang terhitung merupakan salah satu petani kota Batu yang sukses. Ia berhasil mengembangkan usahanya hingga ekspor ke beberapa negara lain. Diperoleh informasi mengenai bagaimana peran pemerintah melalui program-programnya dalam membantu mengembangkan usahanya.
10. Winardi (Ketua Gapoktan Langgeng Mandiri) dan Miskan (Sekretaris Gapoktan) kelompok tani yang tercakup disini meliputi hampir semua sektor (hortikultura, pangan, perkebunan, kehutanan, dan peternakan). Diperoleh informasi mengenai bagaimana peran pemerintah melalui program-programnya dalam membantu mengembangkan usahanya.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu, dengan cara induktif dan mencari pola atau model. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2011, hal.334) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Model interaktif dalam analisis data ditunjukkan dalam gambar 3.1 berikut:



Sumber : Sugiyono, 2011, hal .335

Gambar 3.1

Komponen dalam Analisis Data (*Interactive Model*)

Peneliti membuat catatan penelitian dalam bentuk transkrip data yang disertai dengan pembentukan koding dan kategorisasi data. Dalam analisis data, peneliti melakukan tahapan reduksi data sehingga peneliti tidak menggambarkan semua temuan yang didapat dari lapangan, melainkan hanya data penting dan relevan untuk membantu memecahkan masalah penelitian. Peneliti juga melakukan triangulasi yaitu proses *check* dan *recheck* antara satu sumber dengan sumber data lainnya (Prasetya, 2006, hal.76). Setiap data yang ditelaah tersebut harus diketahui maksud serta maknanya, kemudian dihubungkan dengan masalah penelitian. Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk kutipan-kutipan langsung atau penjelasan dari hasil wawancara dengan informan penelitian, dan pada akhirnya dilakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan ini juga diverifikasi selama proses penelitian berlangsung.

3.5 Site Penelitian

Site penelitian yang digunakan peneliti adalah Kawasan Agropolitan Kota Batu termasuk didalamnya adalah semua instansi dan pihak yang terkait dengan kepentingan studi implementasi kebijakan fiskal di kawasan tersebut.

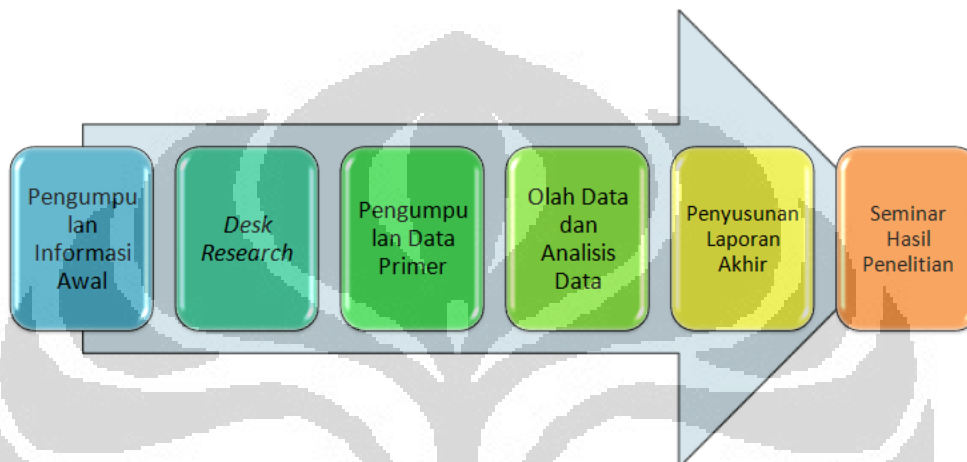
3.6 Proses Penelitian

Beberapa tahap yang ditempuh dalam penelitian ini adalah :

1. Tahap I: Mengumpulkan informasi-informasi awal mengenai data program pengembangan kawasan agropolitan, informasi di media massa, serta penelitian-penelitian terkait yang relevan dan melakukan perizinan penelitian.
2. Tahap II: melakukan studi dokumen (*desk research*) untuk menganalisis aspek-aspek terkait dalam program pengembangan kawasan agropolitan, kemudian menyusun instrumen penelitian berupa pedoman wawancara mendalam, dan persiapan turun lapangan
3. Tahap III: melakukan pengumpulan data primer yaitu melakukan wawancara mendalam dan observasi.

4. Tahap IV: melakukan analisis, interpretasi dan pembahasan dari data wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi.
5. Tahap V: melakukan analisis menyeluruh terhadap hasil temuan serta penulisan laporan akhir penelitian.
6. Tahap VI : seminar hasil penelitian

Bila digambarkan dalam sebuah alur adalah sebagai berikut :



Gambar 3.2
Proses Penelitian

3.7 Validitas dan Reliabilitas Data

Validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara perolehan informasi dan data dari narasumber/informan yang memiliki kapasitas memberi informasi yang dibutuhkan peneliti. Reliabilitas data dilakukan dengan melakukan triangulasi. Wiliam Wiersma dalam Sugiyono (2011, hal.369) menyatakan bahwa *triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data sources or multiple data collection procedures*. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Triangulasi yang peneliti lakukan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan

wawancara dan cek silang data dengan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Batu, lembaga teknis (Bappeda), dan masyarakat yang diwakili oleh ketua Gapoktan. Data dari beberapa sumber itu dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, mana yang berbeda, dan mana yang spesifik dari beberapa sumber itu. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan beberapa sumber tersebut. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu data diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan dokumentasi (data sekunder) dan observasi. Bila dengan teknik pengujian ini menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Dapat juga semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3.8 Keterbatasan Penelitian

Dalam proses penyelesaian penelitian ini tidak luput dari keterbatasan yang dialami peneliti, diantaranya:

1. Ada perbedaan informasi yang dikumpulkan peneliti pada saat menyusun rencana penelitian mengenai profil kota Batu dibandingkan dengan data yang diperoleh peneliti pada saat turun lapangan. Awalnya didapati data dari *website* Kota Batu bahwa visi daerahnya adalah menjadi sentra pertanian, pariwisata, dan pendidikan, namun dari data yang diperoleh dari SKPD diketahui bahwa ada perubahan visi daerah dari sentra pertanian menjadi sentra pariwisata berbasis pertanian sejak masa kepemimpinan walikota baru pada tahun 2007. Hal ini tentu berpengaruh pada persepsi peneliti dalam mengkaji permasalahan, sehingga banyak diperlukan penyesuaian dalam pembahasan.
2. Dalam beberapa hal metode penelitian yang direncanakan ketika menyusun rancangan penelitian terdahulu, tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya pada saat pengambilan data ke lapangan. Sehingga pada akhirnya peneliti harus menyesuaikan lagi desain penelitian agar tetap memberikan hasil maksimal.

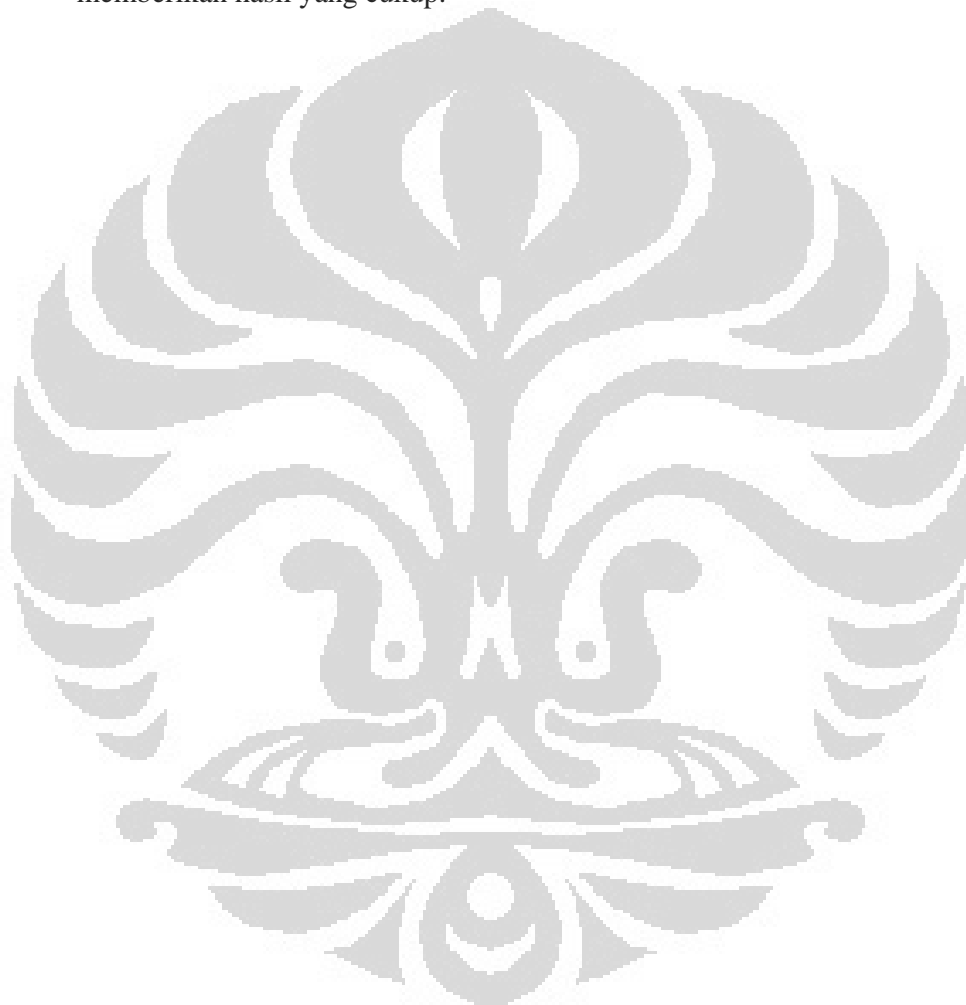
Sebelum turun ke lapangan untuk mengumpulkan data peneliti telah berkoordinasi dengan seorang *local partner* agar beberapa kegiatan administratif dapat dilaksanakan sebelum peneliti terjun ke lapangan dan proses pengambilan data (dengan metode *mixed method*) berjalan lancar. Namun beberapa hari menjelang pengambilan data, *local partner* menyatakan tidak bisa membantu proses penelitian dikarenakan dirawat di rumah sakit. Hal ini agak menyulitkan peneliti dalam hal korespondensi dengan calon narasumber di semua SKPD, lembaga teknis dan masyarakat yang akan diwawancara dan disurvei. Namun pada akhirnya demi melanjutkan penelitian yang sudah mendekati tenggat waktu dan tidak bisa menemukan pengganti *local partner* tersebut, peneliti langsung mengambil alih tugas tersebut. Korespondensi cukup terbantu karena peneliti sudah mendapatkan nomor kontak beberapa nara sumber sebelumnya, sehingga peneliti tidak perlu menunggu respon melalui prosedur birokrasi yang memakan waktu lama untuk bisa mewawancarai nara sumber. Namun hal ini hanya bisa diterapkan pada beberapa nara sumber saja, nara sumber lainnya yang tersebar di beberapa SKPD, lembaga teknis dan masyarakat hanya bisa diperoleh melalui jalur birokrasi atau *snowball*. Hasilnya adalah, tidak semua SKPD atau lembaga teknis dapat diwawancara oleh peneliti. Sampai dengan waktu dimana peneliti harus kembali, para nara sumber tersebut belum mengkonfirmasi kesediaannya di wawancara, seperti Dinas Pendidikan, Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Pengairan dan Irigasi, Dispenda, Cipta Karya, Rumah Potong Hewan dan KUD. Alasan lain juga adalah karena lembaga-lembaga tersebut banyak disibukkan oleh kegiatan akhir tahun, mengingat waktu pengambilan data oleh peneliti adalah menjelang akhir tahun. Hal ini membuat peneliti harus mengubah pendekatan penelitian dari *mixed method* menjadi *qualitative method*. Keterbatasan ini diharapkan dapat tertutup dengan adanya data hasil Musrenbang 2012 dari Bappeda Kota Batu yang didalamnya sudah mencakup semua SKPD dan Lembaga Teknis tersebut.

3. Informan kunci yang sudah dihubungi peneliti jauh sebelum pelaksanaan pengambilan data, yaitu Kepala Bappeda Kota Batu, yang diharapkan dapat

memberikan informasi lebih banyak mengenai pengembangan agropolitan Kota Batu (mengingat beliau adalah ketua tim pokja) dan juga diharapkan dapat menjadi *gate keeper* bagi peneliti agar bisa mewawancarai semua anggota tim pokja agropolitan Kota Batu, tepat pada saat peneliti tiba di lapangan dikabarkan bahwa sedang mendapat musibah yaitu dengan wafatnya sang ayah. Kejadian ini mengharuskan yang bersangkutan mengambil cuti panjang dan tidak bisa membantu terlaksananya penelitian ini. Namun begitu, peneliti dapat menemui pegawainya yaitu Kepala Bidang Data dan Penelitian yang sangat sigap membantu peneliti memberikan data-data apa saja yang dibutuhkan, tetapi Kepala Bidang Data dan Penelitian ini mengaku tidak bersedia diwawancarai karena merasa tidak memiliki kapasitas dan pengetahuan cukup untuk menjawab pertanyaan peneliti seputar permasalahan agropolitan Kota Batu. Sebenarnya peneliti mendapat bantuan lain yaitu dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Ibu Dr. Haula Rosdiana, M.Si (dimana peneliti sebagai salah satu pembantu periset), karena peneliti dapat membaca salinan transkrip wawancara dan FGD dengan Bappeda sebelumnya ketika dilakukan penelitian tentang agropolitan, diharapkan solusi ini dapat memberikan cukup informasi yang dibutuhkan.

4. Masalah lain yang cukup menjadi kendala adalah terkait dengan dana untuk keperluan riset. Kegiatan turun lapangan untuk mengumpulkan data tidak membutuhkan dana yang sedikit, dengan sumber daya yang dimiliki peneliti pribadi diperhitungkan peneliti hanya bisa melakukan penelitian lapangan selama satu minggu (atau 5 hari kerja setelah dikurangi durasi waktu untuk perjalanan). Sementara dengan kondisi jam kerja semua SKPD dan lembaga teknis di Kota Batu yang mana jam kerja efektifnya mulai dari Pkl 08.00 s.d 15.00 (bahkan ada juga instansi yang sudah tutup pada pkl.14.00), peneliti hanya mampu paling banyak mewawancarai 3 orang dalam satu hari kerja. Sedangkan target nara sumber yang direncanakan ingin diwawancarai adalah setidaknya 20 orang. Hal ini bertambah sulit ketika peneliti harus melakukan sendiri kegiatan memasukkan surat permohonan izin wawancara ke beberapa instansi yang cukup menyita waktu. Sebelumnya peneliti sudah memperhitungkan kebutuhan dana ini, oleh karena itu peneliti berupaya

mencari sponsor. Setelah didapat beberapa sponsor ternyata tetap saja ada kendala pada saat pencairan dana menjelang turun lapangan, sehingga sampai dengan saat peneliti menulis laporan akhir ini pun dana penelitian tersebut belum juga diterima. Peneliti memang mengira proses pengumpulan data akan lebih maksimal bila kegiatan dilakukan lebih lama, setidaknya dua minggu, namun dengan data dan informasi yang ada ini peneliti berupaya untuk dapat memberikan hasil yang cukup.



BAB IV

GAMBARAN UMUM KOTA BATU

4.1 Gambaran Wilayah

4.1.1 Letak Geografis dan Administrasi

Kota Batu adalah salah satu wilayah pemerintahan kecil di Propinsi Jawa Timur yang mempunyai letak strategis. Kota ini berbeda dengan kota-kota lain di Indonesia, memiliki keunikan tersendiri. Kota yang tergolong relatif baru tersebut, sekalipun cukup jelas nuansa perkotaannya, ternyata masih sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri pedesaan. Daerah dengan udara yang sejuk, pemandangan alam yang indah, serta buah apelnnya yang terkenal. Kota ini berada pada jalur transit yang dapat menjadi pilihan untuk melanjutkan perjalanan melalui jalur selatan menuju kota-kota di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Daerah ini bisa dicapai dengan kendaraan roda empat dalam waktu kurang lebih 2,5 jam ke arah Selatan dari Kota Surabaya.

Secara umum, Kota Batu dapat dibagi menjadi 2 bagian utama yaitu daerah lereng/bukit dengan proporsi lebih luas dan daerah dataran. Luas kawasan Kota Batu secara keseluruhan adalah sekitar 19.908,72 Ha atau sekitar 0,42 persen dari total luas Jawa Timur. Sebagai daerah yang topografinya sebagian besar wilayah perbukitan, Kota Batu memiliki pemandangan alam yang sangat indah, sehingga banyak dijumpai tempat-tempat wisata yang mengandalkan keindahan alam pegunungan. Kondisi topografi pegunungan dan perbukitan tersebut menjadikan Kota Batu terkenal sebagai daerah dingin. Selama berada di Kota Batu, pengunjung dapat menikmati berbagai fasilitas yang tersedia seperti akomodasi dan tempat wisata alam maupun buatan yang banyak diminati sebagai tujuan wisata utama di Propinsi Jawa Timur.

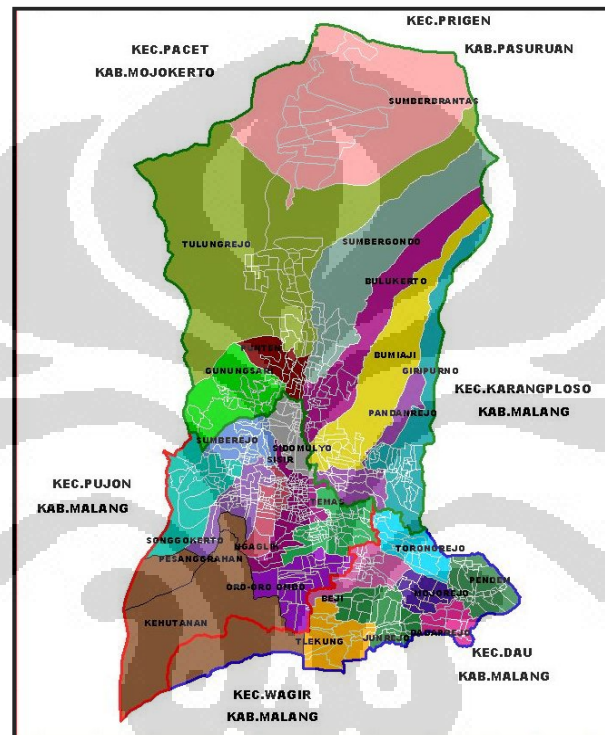
Kota Batu terdiri dari 3 (tiga) kecamatan, yaitu : Wilayah kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Junrejo. Secara geografis Kota Batu terletak pada posisi antara $7^{\circ}44', 55,11''$ sampai dengan $8^{\circ}26', 35,45''$ Lintang Selatan dan $122^{\circ} 17',10,90''$ sampai dengan $122^{\circ} 57',00,00''$ Bujur Timur. Adapun Batas-batas Kota Batu adalah sebagai berikut :

Utara : Kecamatan Prigen, Kabupaten Mojokerto

Selatan: Kec. Dau & Kec. Wagir , Kabupaten Malang

Timur : Kec. Karangploso & Kec. Dau Kabupaten Malang

Barat : Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.



Sumber: Batu Dalam Angka 2011

Gambar 4.1

Peta Kota Batu

4.1.2 Keadaan Topografi dan Klimatologi

Secara umum wilayah Kota Batu merupakan daerah perbukitan dan pegunungan. Diantara gunung-gunung yang ada di Kota Batu, ada tiga gunung yang telah diakui secara nasional, yaitu Gunung Panderman (2.010 meter), Gunung Welirang (3.156 meter) dan Gunung Arjuno (3.339 meter). Berdasarkan ketinggiannya, Kota Batu diklasifikasikan kedalam 6 (enam) kelas, yaitu :

✚ 600 – 1.000 DPL dengan luas 6.019,21 Ha

Wilayah yang termasuk dalam ketinggian ini adalah :

1. Kecamatan Batu (terutama Desa Sidomulyo secara keseluruhan, sebagian besar Kelurahan Temas, Kelurahan Sisir, Kelurahan Ngaglik dan Desa Sumberejo serta sebagian kecil Desa Oro-oro Ombo, Desa Pesanggrahan dan Kelurahan Songgokerto.
2. Kecamatan Junrejo (terutama Desa Junrejo, Torongrejo, Pendem, Beji, Mojorejo, Dadaprejo dan sebagian Desa Tlekung)
3. Kecamatan Bumiaji (terutama pada sebagian kecil desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Bumiaji)

✚ 1.000 – 1.500 DPL dengan luas 6.493,64 Ha

Wilayah yang termasuk dalam ketinggian ini adalah : sebagian besar desa-desa yang ada di Kecamatan Bumiaji dan sebagian dari desa-desa yang ada di Kecamatan Batu (Terutama wilayah Kelurahan Songgokerto, Desa Oro-Oro Ombo dan Desa Pesanggrahan) serta di sebagian kecil Desa Tlekung yang berada di wilayah Kecamatan Junrejo.

✚ 1.500 – 2.000 DPL dengan luas 4.820,40 Ha

Wilayah yang termasuk dalam ketinggian ini adalah : sebagian kecil Desa Tlekung Kecamatan junrejo. Selain itu juga terdapat di sebagian kecil Desa Oro-oro ombo dan Desa Pesanggrahan terutama di sekitar kawasan gunung Panderman, Gunung Bokong serta Gunung Punuksari. Sedangkan di wilayah Kecamatan Bumiaji seluruh bagian desa mempunyai ketinggian ini, terutama kawasan-kawasan di sekitar Gunung Rawung, Gunung Tunggangan, Gunung Pusungkutuk.

✚ 2.000 – 2.500 DPL dengan luas 1.789,81 Ha

Wilayah yang termasuk dalam ketinggian ini relatif sedikit, yaitu di sekitar Gunung Srandil serta diujung Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu yang berbatasan dengan Kecamatan Wagir. Untuk Kecamatan Bumiaji ketinggian ini berada di sekitar Gunung Anjasmoro dan pada sebagian

kecil di wilayah Desa Giripurno, Desa Bumiaji, Desa Sumbergondo dan Desa Torongrejo.

✚ 2.500 – 3.000 DPL dengan luas 707,32 Ha

Wilayah yang termasuk dalam ketinggian ini adalah sebagian kecil desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Bumiaji, terutama pada wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Kecamatan Prigen.

✚ > 3.000 DPL dengan luas 1.789,81 Ha

Wilayah yang termasuk dalam ketinggian ini adalah pada beberapa desa di Kecamatan Bumiaji, khususnya di sekitar Gunung Arjuno (Desa Sumbergondo), Gunung Kembar dan Gunung Welirang (Desa Tulungrejo).

Sedangkan kemiringan lahan (slope) di Kota Batu berdasarkan data dari peta kontur Bakosurtanal 2001 diketahui bahwa sebagian besar wilayah kota Batu mempunyai kemiringan lain sebesar 25 – 40% dan kemiringan > 40. Rincian mengenai kemiringan ini adalah :

- **0 - 8 % seluas 2.207,21 Ha**
- **8 -15 % seluas 2.223,73 Ha**
- **15 - 25 % seluas 1.799,37 Ha**
- **25 - 40 % seluas 4.529,85 Ha**
- **> 40 % seluas 4.493,33 Ha**

Ditinjau dari keadaan klimatologinya diketahui Kota Batu pada tahun 2010 memiliki suhu minimum 18,0 – 20,1⁰C dan suhu maksimum antara 26,2 – 27,3⁰C dengan kelembaban udara sekitar 50 – 99% dan curah hujan rata-rata 227,75 mm per bulan dengan hari hujan rata-rata 14 hari per bulan, oleh karenanya Kota Batu tidak memiliki perubahan musim yang drastis antara musim kemarau dan musim penghujan.

4.1.3 Keadaam Geologi dan Hidrologi

Keadaan geologi/tanah di Kota Batu secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) jenis tanah yaitu :

✚ Relogol Kelabu

Tanah ini terbentuk dari dua bahan induk abu vulkanik intermedie, fisiografi vulkanij, bentuk wilayah bergunung kedalaman tanah dalam sedang dan drainase agak cepat. Jenis tanah ini terdapat didaerah pegunungan di Kecamatan Batu dan Bumiaji.

✚ Andosol Coklat

Tanah ini terbentuk dari abu dan tufa vulkanik, intermedie, drainase tanah yang baik, menempati punggung gunung/puncak-puncak gunung serta terdapat di Kecamatan Batu dan Bumiaji.

✚ Latosol Coklat Kekuningan

Tanah ini hampir mendominasi seluruh Kota Batu, menempati fisiografi dataran Vulkanik dan lereng bawah/tengah tanah terbentuk dari bahan induk abu dan tufa vulkan intermedie, drainase baik agak terhambat.

✚ Litosol

Tanah ini merupakan asosiasi dengan litosol coklat menempati fisiografi vulkan. Kedalaman tanah dangkal sampai dengan 20 – 50 sm , drainase baik agak cepat.

Dilihat dari formasi geologi diatas, menunjukkan bahwa Kota Batu merupakan wilayah yang subur untuk pertanian karena jenis tanahnya merupakan endapan dari sederetan gunung yang mengelilingi Kota Batu, sehingga di Kota Batu mata pencaharian penduduk didominasi oleh sektor pertanian. Sedangkan untuk kondisi hidrologi Kota Batu banyak dipengaruhi oleh sungai-sungai yang mengalir di bagian pusat Kota, sehingga akan berpengaruh juga terhadap perkembangan Kota. Hidrologi di Kota Batu dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu air permukaan, air tanah dan sumber mata air. Untuk Kota Batu air permukaan yang ada adalah air Sungai Brantas beserta anak-anak sungainya yang

menjadi alternative sumber air permukaan. Untuk air tanah yang cukup berlimpah terutama pada kecamatan Junrejo yang merupakan zona air tanah produktif tinggi – sedang.

4.1.4 Pola Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan di wilayah Kota Batu terdiri dari lahan sawah dan bukan sawah, luas untuk lahan sawah sebesar 2.513,00 Ha atau 12,6 persen sedangkan lahan bukan sawah sebesar 17.395,72 Ha atau sekitar 87,4 persen. Kecamatan Junrejo yang paling luas lahan sawahnya yaitu sebesar 1.108 Ha. Untuk lahan bukan sawah dibedakan menjadi pekarangan, tegal/kebun, Hutan dan lain-lain. Penggunaan lahan untuk pekarangan sebesar 1.592,83 Ha, tegal/kebun sebesar 2.553,74 Ha, hutan sebesar 8.199,31 Ha dan lain-lain sebesar 5.622,75 Ha. Luas lahan bukan sawah di Kecamatan Batu dan Kecamatan Bumiaji lebih luas dibandingkan dengan kecamatan Junrejo.

Kegiatan hutan di wilayah Kota Batu sebagian besar merupakan kawasan dengan topografi yang cenderung berbukit dan terjal. Luas hutan di Kecamatan Bumiaji paling luas yaitu 6.682,30 Ha. Penggunaan lahan di Kecamatan Batu didominasi untuk pekarangan dan bangunan yaitu seluas 2.077,25 Ha. Hal ini terjadi karena Kecamatan Batu merupakan pusat kegiatan dan aktivitas Kota.

4.2 Pemerintahan

Kota Batu yang terbagi menjadi 3 (tiga) wilayah Kecamatan terdiri atas 19 (Dua Puluh) Desa dan 5 (empat) Kelurahan. Dari ketiga wilayah Kecamatan yang ada di Kota Batu, Kecamatan Bumiaji memiliki lahan yang paling luas yaitu 127,979 km², sedangkan untuk wilayah kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Batu dan Kecamatan Junrejo memiliki luas wilayah masing-masing adalah 45,458 km² dan 25,650 km²

Pada tahun 2010, Kota Batu terbagi habis menjadi 3 kecamatan, 24 desa/kelurahan, 231 RW dan 1.092 RT. Dilihat komposisi jumlah desa/kelurahan, Kecamatan Batu mempunyai 8 desa/kelurahan, Kecamatan Junrejo mempunyai 7 desa dan Kecamatan Bumiaji memiliki jumlah desa terbanyak yaitu 9 desa. Banyaknya jumlah desa/ kelurahan yang dimiliki otomatis menjadi daerah dengan jumlah RW dan RT terbanyak pula. Terbukti jumlah RW dan RT terbanyak di

Universitas Indonesia

Kecamatan Batu yaitu masing-masing 91 RW dan 427 RT. Berikutnya Kecamatan Bumiaji 81 RW dan 426 RT dan sisanya berada di Kecamatan Junrejo.

Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini tidak akan berhasil apabila desa/kelurahan sebagai satuan terkecil pemerintahan tidak pernah tersentuh pembangunan. Pada tahun 2010, hasil pembangunan di Kota Batu telah dapat dirasakan. Hal ini dapat ditengarai dari jumlah status desa di Kota Batu yang semuanya sudah mencapai tingkat swasembada. Hal ini menunjukkan bahwa semua desa/kelurahan di Kota Batu memiliki partisipasi yang baik dan kemandirian dalam menyelenggarakan pemerintahan desanya.

4.3 Penduduk

Dalam pembangunan manusia, penduduk adalah *central* dari sasaran pembangunan, sehingga data tentang kependudukan menjadi sangat vital dalam penentuan kebijakan pembangunan yang berorientasikan manusia sebagai sasaran utamanya. Data kependudukan merupakan salah satu data pokok yang sangat diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan karena penduduk merupakan obyek sekaligus subyek pembangunan. Fungsi obyek bermakna penduduk menjadi target dan sasaran pembangunan yang dilakukan oleh penduduk, dan fungsi subyek bermakna penduduk adalah pelaku tunggal dari sebuah pembangunan. Kedua fungsi tadi diharapkan berjalan seiring dan sejalan secara integral.

Jumlah penduduk yang besar memang merupakan potensi yang besar pula, namun demikian peningkatan jumlah penduduk harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Agar peningkatan kualitas SDM terpenuhi, maka kebutuhan akan sarana maupun prasarana pendidikan, kesehatan, perumahan dan sebagainya perlu diupayakan secara optimal. Jika pertumbuhan penduduk dan kualitas sumber daya manusia tidak mendapat perhatian dari pemerintah Daerah Kota Batu dapat mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol. Ini dikhawatirkan akan menambah jumlah pengangguran dan penduduk miskin, sehingga mengganggu program-program yang berjalan.

Laju pertumbuhan penduduk merupakan suatu indikator yang menunjukkan seberapa banyak rata-rata penambahan penduduk per tahun di suatu

wilayah dalam periode tertentu. Pertumbuhan penduduk di Kota Batu diasumsikan mengikuti deret geometri, oleh karena itu laju pertumbuhan penduduk dihitung secara matematis dengan rumus sebagai berikut :

$$r = (P_t / P_0)^{1/n} - 1$$

Dengan

- r = tingkat laju pertumbuhan penduduk
- P_t = jumlah penduduk pada akhir periode
- P_0 = jumlah penduduk pada awal periode
- n = jumlah tahun dalam periodetersebut

Dari data Susenas Jumlah Penduduk Kota Batu tahun 2009 sebesar 189.604 jiwa dan pada tahun 2010 sebesar 190.176 jiwa. Berdasarkan hasil penghitungan laju pertumbuhan penduduk di Kota Batu untuk tahun 2009 – 2010 sebesar 0,30 artinya bahwa selama kurun waktu tersebut penduduk kota Batu bertambah sebesar 0,30 persen. Laju pertumbuhan penduduk Kota Batu ini termasuk tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Jawa Timur, hal ini tidaklah mengherankan karena sebagai wilayah administrasi relatif baru, tentunya Kota Batu akan menawarkan berbagai peluang bagi pendatang. Apalagi ditunjang dengan wilayahnya berada di pegunungan yang sejuk dan memiliki berbagai tempat tujuan wisata, telah menjadikannya sebagai daerah yang bagus untuk tempat tinggal maupun membangun usaha.

Berdasarkan hasil Susenas Tahun 2010 jumlah Penduduk Kota Batu, pada tahun 2010 tercatat sebesar 190.176 jiwa dengan tingkat kepadatan 955 orang/km. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa 49,49 persen adalah penduduk laki-laki dan 50,51 persen adalah penduduk perempuan dengan angka sex ratio sebesar 97,97 persen.

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1. 2008	94.755	93.058	187.813	101,82
2. 2009	95.025	94.579	189.604	100,47
3. 2010	94.114	96.062	190.176	97,97

Sumber: Hasil Susenas Tahun 2008 – 2010, Batu Dalam Angka 2011

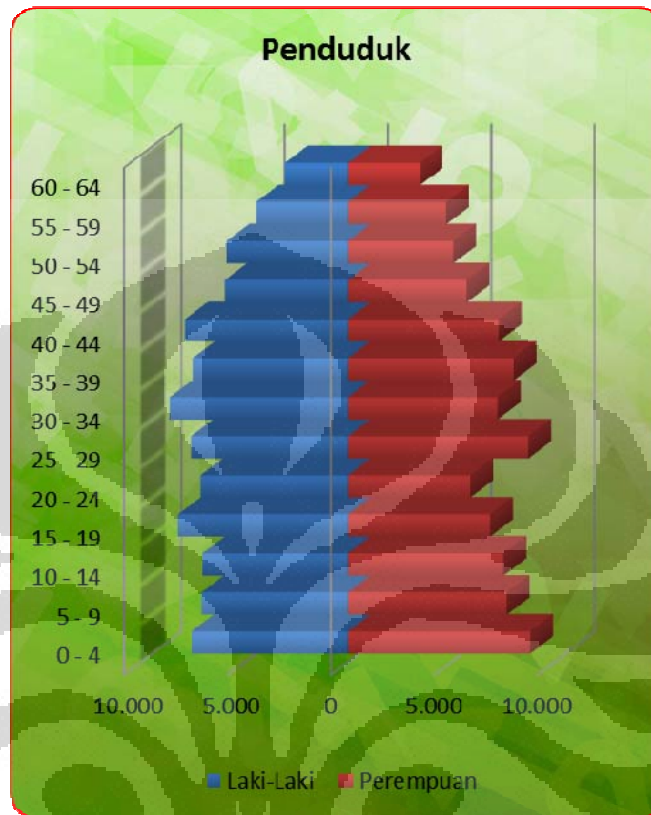
Informasi struktur umur penduduk sangat bermanfaat sebagai estimasi indikator kependudukan lainnya. Bila struktur umur mengarah pada kelompok penduduk berusia muda, maka intervensi pembangunan didominasi oleh pelaksanaan program dibidang kesehatan ibu dan anak, pendidikan, dan pengendalian kelahiran. Sedangkan bila struktur umur mengarah pada kelompok penduduk berusia tua, maka intervensi pembangunan diarahkan pada pelaksanaan program dibidang jaminan hari tua. Dari Piramida Penduduk diketahui bahwa kelompok umur yang dominan adalah kelompok usia produktif. Keadaan piramida yang seperti ini akan sangat mendukung tercapainya sasaran pembangunan, karena sumber daya manusia yang produktif sebagai modal dasar pembangunan banyak tersedia. Struktur umur penduduk cenderung mengarah pada kelompok berusia muda, ini ditunjukkan dengan angka beban ketergantungan penduduk muda sebesar 35,31 persen. Dengan demikian angka beban ketergantungan secara keseluruhan mencapai 46,89 persen atau dengan angka absolut dikatakan bahwa setiap seratus penduduk usia produktif akan menanggung sekitar 47 orang bukan usia produktif (0 – 14 tahun dan 64 tahun ke atas) atau dengan ratio 2 : 1.

Tabel 4.2
Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Kota Batu, Tahun 2009 dan 2010

Kelompok Umur	Tahun 2009			Tahun 2010		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
0-14	23,09	22,67	22,88	23,04	25,02	24,04
15-64	71,65	69,81	70,73	70,48	65,73	68,08
65+	5,26	7,51	6,38	6,48	9,25	7,88
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Hasil Susenas Tahun 2008 – 2010, Batu Dalam Angka 2011

Bila dilihat dari angka ketergantungan ini sudah baik, namun realita secara ekonomis dilapangan sangat bergantung pada sumber daya manusia penduduk usia produktif, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang ada.



Sumber: Hasil Susenas Tahun 2008 – 2010, Batu Dalam Angka 2011

Grafik 4.1

Piramida Penduduk

4.4 Potensi Wilayah

Untuk mengetahui potensi wilayah Kota Batu dapat ditinjau dari data laju pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi Kota Batu. Tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat pertumbuhan sektoralnya. Jika suatu sektor mempunyai peranan yang dominan, akan tetapi jika perkembangannya lambat, maka akan menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya jika sektor tersebut mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi, maka sektor tersebut secara otomatis akan

Universitas Indonesia

menyebabkan total tingkat pertumbuhan juga tinggi. Dari data laju pertumbuhan ekonomi Kota Batu berikut ini dapat diketahui sektor mana yang pertumbuhannya paling cepat.

Tabel 4.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan PDRB Tahun 2006-2010

Sektor	2006	2007	2008	2009	2010
1. Pertanian	5,86	6,23	6,13	6,09	6,10
2. Pertambangan & Peggalian	7,02	8,16	6,91	5,64	6,59
3. Industri Pengolahan	6,30	6,01	6,37	5,59	6,02
4. Listrik, Gas & Air Bersih	8,74	9,06	8,66	8,93	8,95
5. Bangunan	12,81	12,89	11,60	10,81	11,92
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	6,20	6,08	6,34	6,48	6,76
7. Pengangkutan & Komunikasi	7,60	7,47	7,75	7,19	7,26
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	8,27	7,18	6,89	6,78	6,57
9. Jasa – jasa	9,96	9,52	9,19	8,43	9,03
PDRB	6,89	6,80	6,87	6,74	7,01

Sumber : PDRB Kota Batu Tahun 2010

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah tingkat pertumbuhan ekonominya. Dengan asumsi bahwa dengan pertumbuhan yang tinggi akan menyerap tenaga kerja yang tinggi pula, yang pada hakekatnya

meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Sehingga pertumbuhan yang tinggi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran penduduk.

Secara umum pertumbuhan ekonomi di Kota Batu pada tahun 2010 mencapai 7,01 persen. Pertumbuhan ekonomi Kota Batu mengalami kenaikan pada tahun 2010 yaitu mencapai 7,01 persen, angka ini menunjukkan perkembangan yang baik dari tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan yang paling tinggi adalah di sektor Bangunan yaitu sebesar 11,92 persen. Menyusul kemudian sektor Jasa sebesar 9,03 persen dan sektor Listrik, Gas dan air sebesar 8,95 persen dan. Pertumbuhan pada 2010, ditinjau dari struktur produksi sektoral, pertumbuhan yang terjadi kurang mencerminkan fondasi yang menggembirakan bagi pertumbuhan yang lebih berkelanjutan, terutama mengingat belum optimalnya pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan yang mempunyai keterkaitan hulu-hilir (*backward-forward*) terbesar.

Terlepas dari belum optimalnya angka pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Kota Batu, kecenderungan laju pertumbuhan yang terus meningkat sejak 2003 sebenarnya memberi momentum yang baik bagi proses peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan laju pertumbuhan yang terus menerus ini. Pertama, sebagai daerah otonom baru, Kota Batu banyak melakukan pembangunan. Kedua, sebagai Kota *Agro Wisata*, Kota Batu membangun beberapa objek wisata baru yang cukup menarik wisatawan terutama wisatawan domestik untuk mengunjungi obyek wisata tersebut, antara lain Museum Satwa (Jatim Park 2). Momentum pertumbuhan ini juga didukung oleh *multiplier effect* yang ditimbulkan sektor pariwisata dalam menggerakkan roda perekonomian

Dengan memperhatikan laju pertumbuhan ekonomi dan kenyataan bahwa Kota Batu berada di lokasi yang strategis dan menjadi tujuan utama wisata di Jawa Timur, sektor Pengangkutan dan Komunikasi dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran menjadi sangat potensial untuk dikembangkan karena kedua sektor tersebut sangat berkaitan dengan kegiatan wisata di kota Batu.

4.5 Sarana dan Prasarana

Sarana yang penting dalam mendukung laju pembangunan adalah prasarana jalan. Tersedianya jalan untuk menjangkau semua daerah di suatu wilayah pemerintahan sangat besar pengaruhnya terhadap kecepatan pendistribusian hasil pembangunan. Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang penting guna memperlancar kegiatan perekonomian selain untuk memudahkan mobilitas penduduk dari satu daerah menuju daerah lainnya. Seiring dengan semakin meningkatnya pembangunan jalan yang terbagi atas jalan nasional, jalan provinsi dan kotamadya harus selalu ditingkatkan, baik panjang maupun kualitasnya, agar pembangunan regional/nasional dapat berjalan lancar. Panjang jalan yang ada di Kota Batu mencapai 490,83 Km, terbagi atas jalan provinsi sepanjang 19,00 km dan jalan Kotamadya 471,83 km. Jika diamati menurut jenis permukaan, jalan aspal merupakan proporsi terbesar dibanding dengan jalan non aspal yaitu dengan komposisi sebesar 66,67 persen dari total panjang jalan. Berikutnya berupa kerikil sebesar 15,18 persen dan tanah sebesar 7,96 persen. Sarana angkutan untuk mobilitas penumpang dan barang di Kota Batu cukup tersedia.

Teknologi komunikasi kini semakin dirasakan penting peranannya dalam penyampaian informasi jarak jauh. Aktifitas pemerintahan, swasta maupun masyarakat sangat erat kaitannya dengan pos dan telekomunikasi sebagai sarana untuk pengiriman informasi. Bahkan ketersediaan teknologi informasi berdampak pada intelektualitas penduduk, karena dengan tersedianya teknologi dan kemampuan sumber daya manusia maka akan sangat mudah membaca kemajuan yang mutakhir sehingga dapat memacu perkembangan teknologi di daerah.

Jumlah telepon umum koin dan kartu dari tahun ke tahun semakin berkurang, sedangkan jasa telekomunikasi menunjukkan jumlah pelanggan telepon kabel semakin berkurang dari tahun ke tahun, karena pengguna jasa telpon mulai bergeser dari telpon kabel ke telpon seluler. Ini ditandai dengan semakin menjamurnya kios-kios ponsel yang juga melayani pembelian pulsa. Untuk kepentingan pengiriman barang dan surat lewat pos, Kota Batu memiliki 1 kantor Pos dan Giro Besar. Ketersediaan bank sangat mendorong laju pertumbuhan

ekonomi di segala bidang, khususnya dalam penyediaan modal dan lalu lintas uang antar daerah. Kepentingan lalu lintas uang di Kota Batu sangat mudah karena telah tersedia bank-bank pemerintah maupun bank swasta. Bank pemerintah yang terdapat di Kota Batu antara lain: Bank Rakyat Indonesia (BRI), BNI 46, Bank Mandiri dan Bank Jatim. Sedangkan bank swasta antara lain: Bank Central Asia (BCA) , LIPPO Bank, BTPN, dan Bank Bukopin. Serta BPR-BPR yang berkembang pesat beberapa tahun terakhir ini.

Sekolah adalah sarana pendidikan yang diharapkan mampu mencetak sumber daya manusia yang handal dalam menyukseskan pembangunan. Sekolah TK, SD hingga SMU sudah tersedia memadai di Kota Batu baik itu sekolah negeri, madrasah maupun swasta. Sekolah Dasar dan SLTP tersebar di masing-masing kecamatan secara merata. Jumlah SD Negeri di Kota Batu tersebar masing – masing di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Batu (26 Sekolah); Kecamatan Junrejo (16 Sekolah) dan Kecamatan Bumiaji (23 Sekolah). Jumlah SMP negeri di Kota Batu sebanyak 7 sekolah dimana di Kecamatan Batu (2 Sekolah); Kecamatan Junrejo (1 Sekolah) dan Kecamatan Bumiaji (4 Sekolah). Hanya ada 2 Sekolah SMU Negeri di Kota Batu yang terdapat masing-masing di Kecamatan Batu dan Kecamatan Junrejo. Selain itu ada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK) sebanyak 3 sekolah yang juga tersebar merata di tiga kecamatan. Selain sekolah-sekolah negeri diatas, tersebar sekolah-sekolah swasta lainnya di masing-masing kecamatan, hingga saat ini Perguruan Tinggi negeri maupun swasta belum tersedia di Kota Batu.

Kualitas kesehatan penduduk merupakan indikator yang sangat penting dalam pembangunan yang berorientasi pada manusia. Kesehatan penduduk dapat dicapai dengan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan kesadaran masyarakat untuk memiliki pola hidup yang sehat. Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan bagi penduduk Kota Batu telah berdiri tiga buah Rumah Sakit Umum yang terdapat 4 buah di kecamatan Batu, dan 1 buah di kecamatan Junrejo. Selain Rumah Sakit di Kota Batu terdapat 5 puskesmas dan 6 puskesmas pembantu yang tersebar di masing-masing kecamatan.

4.6 Latar Belakang Pengembangan Kawasan Agropolitan Kota Batu

Pengembangan Kawasan Agropolitan di dasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Terdapat sumber daya alam yang sudah digali dan dikembangkan, sedang atau belum digali. Sehingga perlu adanya pengembangan lebih lanjut.
- Sebagian besar masyarakatnya berada di daerah pedesaan dengan mata pencaharian utama bergantung pada potensi sumber daya alam (sektor pertanian).
- Terdapatnya sumber tenaga kerja dari masyarakat sendiri, sehingga secara tidak langsung dengan adanya pengembangan kawasan strategis diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin, terutama pada masyarakat sekitar.
- Terdapatnya lahan-lahan pengembangan berbagai sektor seperti sektor perkebunan, pertanian, pariwisata, perikanan, peternakan dan lain sebagainya.

Pengembangan Kawasan Agropolitan berguna untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan daerah. Selain itu juga digunakan sebagai acuan investasi baik pemerintah maupun swasta, usaha untuk menginformasikan potensi dan peluang pengembangan di kawasan agropolitan. Untuk jangka pendeknya usaha ini diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi baik dalam negeri maupun luar negeri (*Foreign Direct Investment*), serta dalam jangka panjang dapat mendorong perkembangan kawasan dan juga mempercepat peningkatan perekonomian daerah.

4.7 Dasar Hukum Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Kota Batu

Dasar hukum dalam pengembangan kawasan Agropolitan Kota Batu adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;
4. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan Dan Permukiman;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu;
11. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;
12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
13. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
14. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
15. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah;
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
17. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
18. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan Hidup
22. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
23. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2006 tentang Irigasi
24. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang kriteria teknis kawasan peruntukan pertanian
26. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1989 Tentang Pengelolaan Kawasan Budidaya;
27. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 Tentang Kawasan Industri;
28. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
29. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu 2003-2013 dan Hasil Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2008-2028;
30. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor No. 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
31. Keputusan Walikota Batu Nomor. 180/59/KEP/422.01.3/2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Kota Batu)

4.8 Lingkup Lokasi

Kegiatan pengembangan kawasan agropolitan berlokasi pada pusat Agropolitan Kota Batu, yaitu Wilayah Kecamatan Bumiaji dengan luas wilayah 12.798,42 Ha. Kecamatan Bumiaji menjadi pusat pengembangan kawasan agropolitan karena sejak awal pembentukan Kota Batu, Kecamatan Bumiaji memiliki *nature* yang cocok untuk agropolitan, baik dari segi kontur alamnya maupun mayoritas penduduknya yang bergerak di bidang pertanian (Suwoko, Distanhut, 20 Desember 2011).

4.9 Pengembangan Kawasan Agropolitan Kota Batu

4.9.1 Kegiatan Agribisnis

4.9.1.1 Kegiatan Agribisnis Hulu

Kegiatan agribisnis hulu merupakan proses awal dalam pelaksanaan kegiatan pertanian,. Komoditi pertanian yang dikembangkan yaitu Tanaman pangan, tanaman sayuran, tanaman buah, tanaman hias, peternakan dan perikanan. Selain itu dalam mendukung kegiatan agribisnis, terdapat juga

peralatan dan jenis pupuk yang digunakan yang diperoleh dari bantuan Dinas Pertanian dan Kahutanan, adapun jenis peralatan dan pupuk yang digunakan yaitu :

Tabel 4.4
Ketersediaan Alat/Mesin Pertanian yang digunakan Tahun 2009

No	Kecamatan	Desa	Jenis Alat/Mesin Pertanian	Volume	Satuan
1	Bumiaji	Giripurno	RMU (Rice Milling Unit)	1	unit
			Power Thresher	1	unit
			Box Dryer	1	unit
			Sabit bergerigi	150	unit
		Sumberbrantas	Mesin pembuat kompos	1	unit
			Power Sprayer	3	unit
			Power Thresher	1	unit
		Pandanrejo	Sabit Bergerigi	100	unit
			Mesin pembuat kompos	1	unit
		Bulukerto	Chopper	1	unit

Sumber: Bappeda Kota Batu, Tahun 2010

Tabel 4.5
Jumlah Kebutuhan Pupuk Tahun 2009

No	Kec.	Sub Sektor	Luas Areal	Jumlah Kebutuhan Pupuk (Ton)				
				Urea	SP 36	ZA	NPK	Pupuk Organik
1	Bumiaji	Tanaman Pangan	2038,2	1.834,38	489,17	1.650,94	1.100,63	4.076,40
		Perkebunan	15,5	13,95	3,72	12,56	8,37	31,00
		Peternakan	186,6	167,94	44,78	151,15	100,76	373,20
		Perikanan	23,5	21,15	5,64	19,04	12,69	47,00
		Kehutanan	81	72,90	19,44	65,61	43,74	162,00
Jumlah			2344,8	2110,32	562,752	1899,288	1266,192	4689,6

Sumber: Bappeda Kota Batu, Tahun 2010

4.9.1.2 Kegiatan *On Farm*

a. Tanaman Pangan

Komoditi terbesar tanaman pangan yaitu Jagung yang berada di Desa Giripurno dengan luas lahan untuk 88 Ha, dan produksi tahun 2009 yaitu 1936 ton/thn atau 40.69% jika dibandingkan dengan tanaman jagung untuk Kota Batu. Sedangkan jenis tanaman pangan lainnya yaitu Padi, berada di Desa Bulukerto dengan produksi pada tahun 2009 yaitu 470 ton/Ha berada di desa Giripurno atau 12,08% bila dibandingkan dengan tanaman padi untuk kota batu. Dan untuk ubi jalar dan ubi kayu yaitu masing-masing 13.5 ton/tahun dan 20 ton/thn atau berada di Desa Bulukerto. Proses budidaya yang dilakukan untuk tanaman pangan, khususnya tanaman jagung yang memiliki nilai produksi terbesar yaitu dengan proses alami, hanya dilakukan dengan proses pembenihan kemudian perawatan dengan pupuk dan 4 kali penyemprotan, maka dengan waktu 75 hari jagung dapat di panen.

b. Tanaman Buah

Tanaman buah lebih di dominasi oleh tanaman apel dengan jumlah produksi yaitu 11000 ton/thn berada di desa Tulungrejo atau 19,70% bila dibandingkan dengan tanaman apel untuk kota Batu. Sedangkan untuk tanaman buah lainnya yaitu jeruk memiliki jumlah produksi 600 ton/thn yang berada di desa Pandarejo atau 18,65% bila dibandingkan dengan jumlah tanaman jeruk untuk Kota batu. Untuk proses panen untuk tanaman apel 2 kali dalam setahun (per 6 bulan) dan dalam 6 bulan untuk 1 Ha kebun apel dapat menghasilkan 10 ton/thn, namun setiap tahunnya produksi apel mengalami kemerosotan.

c. Tanaman Sayuran

Tanaman sayuran pada kecamatan Bumiaji yang memberikan hasil produksi terbesar yaitu untuk tanaman sayuran wortel, kubis, sawi, kembang kol dan kentang. Prosentase perbandingan dengan tanaman sayuran Kota batu yaitu untuk Tanaman kentang 21,56% , wortel 88,59%, kubis 56,94%, sawi 35,10 % dan kembang kol 44,81% terbesar berada di desa Tulungrejo. Adapun proses budidaya untuk tanaman sayuran yaitu dilakukan dengan proses alami berupa pengolahan tanah, penanaman benih sayuran, di pupuk, kemudian menunggu waktu panennya.

Universitas Indonesia

d. Tanaman Hias

Produksi terbesar untuk jenis tanaman mawar berada di desa Bumiaji dengan jumlah produksi yaitu 1.800.000 tangkai/thn atau 1,85% jika dibandingkan dengan tanaman mawar satu kota Batu , untuk jenis tanaman hias krisan dengan jumlah produksi 7.200.000 tangkai/thn atau 0,49% berada di desa Bumiaji jika dibandingkan dengan tanaman krisan seluruh kota Batu, dan jenis tanaman hias anggrek jumlah produksi terbesar berada di desa Punten yaitu 90.000 tangkai/thn atau 20,45% jika dibandingkan dengan seluruh kota Batu. Proses budidaya untuk tanaman hias khususnya mawar dilakukan dengan cara pengolahan lahan untuk dibersihkan, penyediaan bibit mawar, perawatan, saat 4 bulan dilakukan penyambungan tunas, pemupukan dilakukan 1 bulan sekali, penyemprotan dilakukan 1 minggu sekali (tergantung cuaca), maka dalam waktu 7 bulan tanaman mawar dapat di panen.

e. Peternakan

Untuk ternak sapi perah jumlah populasi terbesar berada di desa Punten dengan jumlah 1514 ekor/thn atau 31,64% jika dibandingkan dengan sapi perah untuk kota Batu , ternak kelinci yang memiliki jenis populasi terbesar pada desa Gunungsari yaitu 6172 ekor/thn atau 64,36% jika dibandingkan dengan kelinci untuk keseluruhan kota Batu, dan jenis unggas ayam pedaging berada di desa Bumiaji yaitu 26000 ekor/thn atau 7,45% jika dibandingkan dengan ayam pedaging untuk seluruh Kota Batu. Untuk proses budidaya pada ternak sapi perah dilakukan dengan proses alami yaitu dengan dikawinkan antara sapi jantan dengan sapi betina, selain itu ada prose inseminasi atau penyuntikan. Sedangkan untuk ternak kelinci dilakukan dengan proses dikawinkan jika kelini betina sudah berumur 6-7 bln dan kelinci jantan sudah berumur \pm 8 bulan, kemudian kelinci jantan dan betina di jadikan dalam satu kandang.

f. Perikanan

Populasi terbesar berada di desa Gunungsari sebesar 3350 ekor untuk jenis ikan mas atau 42,86% jika dibandingkan dengan keseluruhan kota Batu ,

sedangkan jenis nila dan lele terbesar berada di desa Pandanrejo dan giripurno dengan jumlah populasi yaitu 15815 ekor atau 75,9% untuk ikan nila dan 1500 untuk ikan lele atau 73,9% jika dibandingkan dengan seluruh kota Batu. Proses budidaya dilakukan yaitu dengan pemilihan kolam yang tidak bocor, air yang digunakan tidak mengandung limbah, bibit yang digunakan tidak bervirus, kemudian dilakukan proses pemijahan yaitu pejantan dan betina dipisahkan dari kolam, dilipil yang mulai siap bertelur, untuk jenis tombro pejantannya berjumlah 3 ekor dan betinnya 2 ekor.

4.9.1.3 Kegiatan Agribisnis Hilir

a. Rantai Pemasaran

Rantai pemasaran untuk kegiatan agribisnis hilir pada sektor pertanian, peternakan dan perikanan yaitu :

- ◆ Tanaman Pangan = Surabaya (Pasar Porong dan Pasar Keputren), Pasar Gadang, Pasar Dinoyo, Pasar Batu
- ◆ Tanaman Buah = Pasar Jawa dan Bali, Pasar Batu, Pasar Selecta
- ◆ Tanaman Sayur = ekspor ke Taiwan dan Singapura, Tangerang (Pabrik ABC dan Kokita), Pasar Karangploso, Pasar Dinoyo, Pasar Batu, Pasar gadang, Pasar Mantung.
- ◆ Tanaman Hias = Jakarta, Bali, Semarang ,Surabaya, Pasar Splendid Malang, Pasar Batu
- ◆ Peternakan = ke seluruh Indonesia (Jawa, Bali, Sumatera, Sualwesi, Kalimantan, Maluku, Papua), KUD DAU dijual Ke Pabrik Nestle, Kawasan wisata Jatim Park dan Senggoriti, Hewan hidup dan Pakan dijual ke Pasar Pujon
- ◆ Perikanan = Rumah Makan dan Hotel di Bumiaji

b. Industri Olahan

Industri olahan yang berada di Kecamatan Bumiaji terdiri dari sub sektor tanaman pangan, tanaman sayuran, tanaman buah dan peternakan yaitu :

- ◆ Pertanian Tanaman Pangan, jenis pangan olahan

Desa Pandanrejo	: Bumbu Pecel
Desa Giripurno	: Keripik Kentang

Universitas Indonesia

- Desa Punten : Abon, kue, snack
- ◆ Pertanian Tanaman Sayur, jenis pangan olahan
 - Desa Bulukerto : Buah campur dalam kaleng, sayur dalam kaleng
- ◆ Pertanian Tanaman Buah, jenis pangan olahan
 - Desa Bumiaji : Sari Apel, Jenang Apel , Tonic Apel, Cuka Apel , Tofi Apel
 - Desa Sumbergondo : Kripik Apel
 - Desa Tulungrejo : Kripik Apel, Nangka, Nanas dan Kesemek, Sirup Tamarillo, Coktail, Selai , Sirup/Sari Tamarillo, Jenang

4.9.1.4 Sub Sistem Penunjang

Adapun sub sistem penunjang terdiri dari Kelembagaan dan Fasilitas pendukung yang dibahas sebagai berikut:

a. Kelembagaan

Untuk kelembagaan di Kecamatan Bumiaji terdiri dari 7 lembaga LMDH, 8 lembaga GAPOKTAN dan 106 lembaga kelompok tani.

b. Fasilitas Penunjang

Fasilitas pendukung yang ada di Kecamatan Bumiaji terdiri dari :

1. Arboretum = Desa Sumber Brantas
2. Pengkajian Apel = Desa bulukerto
3. P4S = Desa Bumiaji
4. UPR = Desa Giripurno dan Desa Pandanrejo
5. BBI = Desa Punten
6. BPP Tanaman Hias = Desa Gunungsari
7. Koperasi
8. Toko Pertanian
9. Bank

4.9.2 Embrio Pemusatan dan Distribusi

Dari hasil observasi dan analisa yang dilakukan terdapat beberapa potensi terjadinya pemusatan dan distribusi kegiatan agropolitan baik dari sektor hulu maupun hilir. Pemusatan dan distribusi kegiatannya antara lain :

Tabel 4.6
Embrio Kegiatan Pertanian

No	Sektor	Pemusatan	Keterangan	Distribusi
1.	Tanaman Pangan	Desa Pandanrejo	- Kegiatan on farm	Pasar lokal: pasar gadang, pasar dinoyo, pasar batu Pasar luar: Surabaya, pasar porong dan pasar keputren
2.	Tanaman Sayur	Desa Sumberbrantas	- Paguyuban Petani - Kegiatan On farm	Pasar luar: Kalimantan Pasar lokal: pasar karangploso, pasar Ngantang, pasar batu, pasar besar gadang Pasar Ekspor: Taiwan dan Singapura Pabrik ABC, Kokita
3.	Tanaman Buah	Desa Bulukerto	- Kegiatan on farm - Balai Pengakajian tanaman apel	Pasar lokal: pasar batu, pasar selecta Pasar luar: seluruh pulau jawa, Bali.
4.	Tanaman Hias	Desa Punten	- Kebun percontohan tanaman hias - Kegiatan on farm	Pasar luar: Jakarta (daerah rawa belong), Bali (daerah denpasar), semarang,

Universitas Indonesia

No	Sektor	Pemusatan	Keterangan	Distribusi
				Surabaya Pasar lokal: pasar spelendid Malang
5.	Peternakan	Desa Gunungsari	- P4S - Kegiatan on farm	Pasar luar: sumatera, jawa, bali, papua, Maluku, Pasar Lokal : KUD Dau, pasar pujon, tempat wisata kota Batu
6.	Perikanan	Desa Giripurno	- BBI Kota - Batu - UPR	Pasar lokal: Hotel purnama, lesehan-lesehan di kota Batu

Sumber : Hasil Kajian Bappeda Kota Batu, 2010

4.9.3 Pembentukan Kawasan Fungsional

4.9.3.1 Kawasan Produksi

a. Kawasan Produksi Pertanian Tanaman Pangan

Tabel 4.7

Pemusatan Kawasan dan Distribusi Sub Sektor Tanaman Pangan

Sub Sektor Pertanian	Hasil Produksi (Ton)	Kawasan Produksi	Daerah Distribusi
I. Tanaman Pangan			
a. Padi	470	Desa Giripurno	Pasar lokal, Pasar Batu Pasar gadang, pasar dinoyo, pasar batu
b. Jagung	1936	Desa Giripurno	Surabaya, pasar porong dan pasar keputren Pasar gadang, pasar dinoyo, pasar batu
	240	Desa Pandanrejo	Surabaya, pasar porong dan pasar keputren
c. Kacang Tanah	1.3	Desa Bumiaji	Pasar lokal, Pasar Batu
d. Kedelai	1.2	Desa Bumiaji	Pasar lokal, Pasar Batu
e. Ubi Kayu	13.5	Desa Pandanrejo	Pasar lokal, Pasar Batu
f. Ubi Jalar	20	Desa Bulukerto	Pasar lokal, Pasar Batu

Sumber : Bappeda Kota Batu, 2010

b. Kawasan Produksi Pertanian Tanaman Sayur

Tabel 4.8

Pemusatan Kawasan dan Distribusi Sub Sektor Tanaman Sayuran

Sub Sektor Pertanian	Hasil Produksi (Ton)	Kawasan Produksi	Daerah Distribusi
II. Tanaman Sayuran			
a. Kentang	1500	Desa Tulungrejo	Pasar gadang, pasar Mantung, pasar Karangploso, psar besar gadang Kalimantan
b. Wortel	4000	Desa Tulungrejo	Pasar gadang, pasar Mantung, pasar Karangploso, psar besar gadang Kalimantan
c. Kubis	5000	Desa Tulungrejo	Pasar gadang, pasar Mantung, pasar Karangploso, psar besar gadang Kalimantan, Eksport Singapura dan taiwan
d. Sawi	4500	Desa Tulungrejo	Pasar gadang, pasar Mantung, pasar Karangploso, psar besar gadang Kalimantan, Eksport Singapura dan taiwan
e. Kembang Kol	1500	Desa Tulungrejo	Pasar gadang, pasar Mantung, pasar Karangploso, psar besar gadang Kalimantan

Sumber : Bappeda Kota Batu, 2010

c. Kawasan Produksi Pertanian Tanaman Buah-buahan

Tabel 4.9

Pemusatan Kawasan dan Distribusi Sub Sektor Tanaman Buah-buahan

Sub Sektor Pertanian	Hasil Produksi (Ton)	Kawasan Produksi	Daerah Distribusi
III. Tanaman Buah			
a. Apel	11000	Desa Tulungrejo	Pasar batu, pasar selecta, pulau jawa, Bali.
	4840	Desa Giripurno	Pasar batu, pulau jawa, Bali.
	2500	Desa Bulukerto dan Desa Sumbergondo	Pasar batu, pasar Surabaya, Jakarta, Bali
b. Jeruk	600	Desa Pandanrejo	Pasar lokal, pasar Batu
c. Alpukat	300	Desa Sumbergondo	Pasar lokal, pasar Batu
d. Kesemek	240	Desa Tulungrejo	Pasar lokal, pasar Batu
e. jambu biji	11	Desa Punten	Pasar lokal, pasar Batu

Universitas Indonesia

Sub Sektor Pertanian	Hasil Produksi (Ton)	Kawasan Produksi	Daerah Distribusi
f. Nangka	13.2	Desa Punten	Pasar lokal, pasar Batu
g. Strowberi	250	Desa Pandanrejo	Pasar lokal, pasar Batu

Sumber : Bappeda Kota Batu, 2010

d. Kawasan Produksi Pertanian Tanaman Hias

Tabel 4.10

Pemusatan Kawasan dan Distribusi Sub Sektor Tanaman Hias

Sub Sektor Pertanian	Hasil Produksi (Tangkai)	Kawasan Produksi	Daerah Distribusi
IV. Tanaman Hias			
a.Mawar	1800000	Desa Bumiaji	Jakarta, Bali, Semarang, Pasar splendid, pasar Batu
b.Anggrek	90000	Desa Punten	Pasar lokal, pasar batu,
c.Krisan	7200000	Desa Bumiaji	Jakarta, Bali, Semarang, pasar lokal, pasar batu
d.Authrium	500000	Desa Sumbergondo	Pasar lokal (pasar bunga), pasar batu
e.Anyelir	4000	Desa Tulungrejo	Pasar lokal (pasar bunga), pasar batu

Sumber : Bappeda Kota Batu, 2010

e. Kawasan Produksi Peternakan

Tabel 4.11

Pemusatan Kawasan dan Distribusi Sub Sektor Peternakan

Sub Sektor Pertanian	Jumlah Populasi (ekor)	Kawasan Produksi	Daerah Distribusi
I. Peternakan			
a. Sapi potong	393	Desa Giripurno	Pasar Malang, Pasar Batu
b. Sapi perah	1514	Desa Gunungsari	Pasar Hewan Pujon, KUD Dau
c. Kambing	338	Desa Giripurno	Pasar Lokal, Pasar Batu
d. Domba	936	Desa Gunungsari	Pasar Malang, Pasar Batu
e. Kelinci	6172	Desa Bulukerto	Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku, Papua
	3097	Desa Punten	Tempat-tempat wisata di Kota Batu (Jatim park, selecta dll)

Universitas Indonesia

Sub Sektor Pertanian	Jumlah Populasi (ekor)	Kawasan Produksi	Daerah Distribusi
a. Ayam Buras	3995	Desa Giripurno	Pasar Malang, Pasar Batu
b. Ayam Pedaging	26000	Desa Bumiaji	Pasar Malang, Pasar Batu
c. Ayam Petelor	21585	Desa Giripurno	Pasar Malang, Pasar Batu
d. Itik	65	Desa Giripurno	Pasar Malang, Pasar Batu

Sumber : Bappeda Kota Batu, 2010

f. Kawasan Produksi Perikanan

Tabel 4.12

Pemusatan Kawasan dan Distribusi Sektor Perikanan

Sub Sektor Pertanian	Hasil Produksi (Ton)	Kawasan Produksi	Daerah Distribusi
I. Perikanan			
a. Nila	5340	Desa Pandanrejo	Pasar lokal, pasar batu
	4200	Desa Gunungsari	Hotel Purnama dan Lesehan- lesehan di Kota Batu
b. Mas	3350	Desa Gunungsari	Hotel Purnama dan Lesehan- lesehan di Kota Batu
c. Lele	1200	Desa Giripurno	Pasar lokal, pasar batu
d. Koi	550	Desa Gunungsari	Hotel Purnama dan Lesehan- lesehan di Kota Batu

Sumber : Bappeda Kota Batu, 2010

4.9.3.2 Kawasan Pengolahan

a. Kawasan Pengolahan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan diarahkan di desa Gunungsari dan desa Pandanrejo dikarenakan di kedua desa tersebut memiliki jumlah produksi terbesar terutama untuk tanaman jagung dan padi.

b. Kawasan Pengolahan Pertanian Tanaman Buah

Kawasan industri pengolahan tanaman buah lebih diarahkan di desa Tulungrejo dikarenakan desa tersebut memiliki tempat wisata selecta sehingga memudahkan untuk dipasarkan.

c. Kawasan Pengolahan Pertanian Tanaman Sayuran

Kawasan pengolahan tanaman sayuran lebih diarahkan di Desa Tulungrejo dan Desa Sumberbrantas dikarenakan produksi tanaman sayuran lebih di dominasi.

d. Kawasan Pengolahan Pertanian Tanaman Hias

Diarahkan kawasan pengolahan tanaman hias pada Desa Punten dikarenakan lokasi tersebut memiliki jumlah produksi tanaman hias yang lebih dominan.

e. Kawasan Pengolahan Peternakan

Pengolahan pada bahan baku sapi perah diarahkan di Desa Gunungsari dan untuk kelinci lebih diarahkan di Desa Bumiaji, dikarenakan di desa tersebut telah memiliki P4S untuk kelinci serta salah satu desa yang memiliki produksi kelinci terbesar.

f. Kawasan Pengolahan Perikanan

Pengembangan perikanan dilakukan di desa Gunungsari dan desa Giripurno.

4.9.4 Struktur Ruang

4.9.4.1 Klaster Pertanian

Di kawasan agropolitan Kecamatan Bumiaji terbagi menjadi 6 klaster pertanian. Pembagian klaster pertanian kawasan agropolitan Kecamatan Bumiaji dapat dilihat pada tabel berikut :

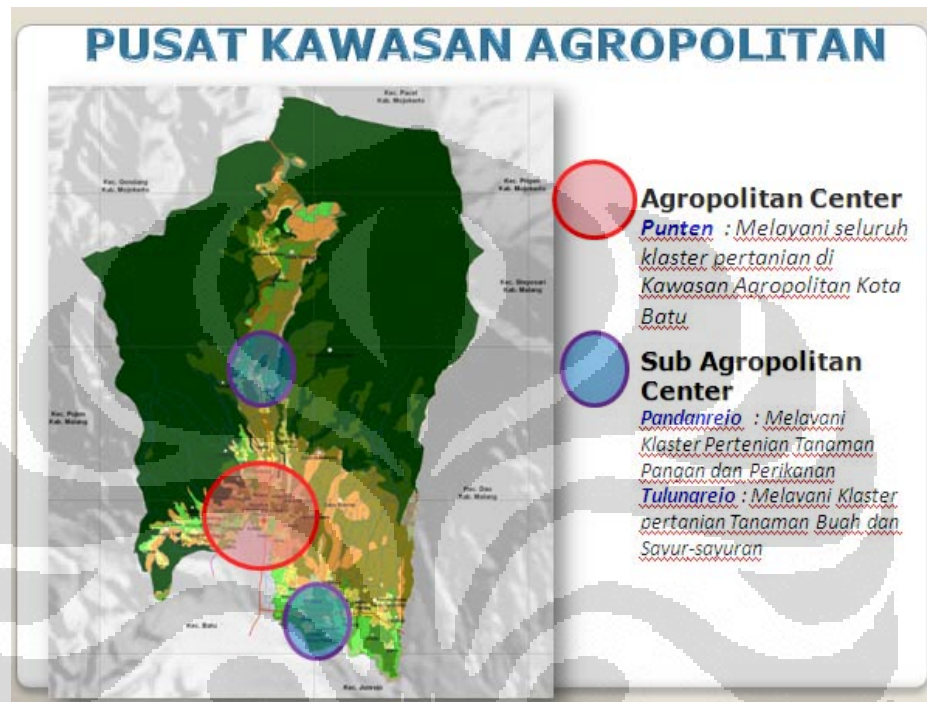
Tabel 4.13

Pembagian Klaster Pertanian

No.	Klaster	Luasan (Ha)	Komoditi	Pembagian Wilayah
1.	Tanaman Pangan	980,56	Jagung	Giripurno
2.	Tanaman Sayuran	7024,5	Kembang kol, sawi, wortel, kubis, Kentang	Desa Sumberbrantas, dan Tulungrejo
3.	Tanaman Buah	2386,23	Apel, Jeruk, Alpukat	Desa Sumbergondo, dan Bulukerto
4.	Tanaman Hias	245,72	Mawar, Anggrek, Authrium	Desa Punten
5.	Perikanan	628,16	Ikan Nila	Desa Pandanrejo
6.	Peternakan	1533,25	Sapi potong, sapi perah, kambing, kelinci, domba,	Desa Gunungsari,

No.	Klaster	Luasan (Ha)	Komoditi	Pembagian Wilayah
			ayam buras	dan Bumiaji

Sumber : Bappeda Kota Batu, 2010



Sumber : Bappeda Kota Batu, 2010

Gambar 4.2

Pusat Kawasan Agropolitan Kecamatan Bumiaji

Pusat kawasan agropolitan yang ada di Kecamatan Bumiaji dibagi menjadi dua yaitu agropolitan *center* dan sub agropolitan *center*, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini:

- 1) Agropolitan Center berpusat di Punten melayani seluruh klaster pertanian di Kawasan Agropolitan Kota Batu;
- 2) Sub Agropolitan Center berpusat di dua desa yaitu Pandanrejo melayani Klaster Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan, sedangkan Tulungrejo melayani Klaster pertanian Tanaman Buah dan Sayur-sayuran.

4.9.5 Sistem Kegiatan

4.9.5.1 Sistem Agribisnis Klaster Pertanian Tanaman Pangan

Tabel 4. 14

Sistem Agribisnis Klaster Tanaman Pangan

Sub sistem Hulu	Sub Sistem Usaha Tani	Sub Sistem Hilir	Sub Sistem Penunjang	Pola Kemitraan
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Teknologi bercocok tanam bagi petani tanaman pangan • Penyediaan peralatan bercocok tanam yang lebih modern • Kios Sarana produksi budidaya jagung, padi • Pengembangan Irigasi Teknis • Penyediaan Bibit Jagung untuk petani Pandanrejo dan Giripurno 	<p>Tanaman pangan jagung di Desa Giripurno dengan Luas Lahan 419,72 ha</p>	<p>Pengolahan di Desa Giripurno berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gula Jagung • Permen Jagung • Beras Jagung <p>Pengemasan Produk di Sub Agropolitan Center Desa Pandanrejo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Tempat pengolahan hasil pertanian pada Desa Giripurno • Pasar Pengepul di Desa Pandanrejo • Pembangunan BPP (Balai Pelatihan Pertanian) di Desa Punten • Penambahan Sekolah Lapang dan Laboratorium di Desa Punten • Penyediaan sarana prasana untuk pelatihan dan penyuluhan di Desa Punten 	<p>Pola Kemitraan Terintegrasi Vertikal (KTV). KTV terdiri dari tiga model kemitraan, yaitu pemilikan group swasta setempat, pemilikan group/Koperasi Petani dan pemilikan group/KOPME bekerjasama dengan Pemerintah Daerah</p>

Sumber : Bappeda Kota Batu, 2010

4.9.5.2 Sistem Agribisnis Klaster Pertanian Tanaman Buah

Tabel 4.15

Sistem Agribisnis Klaster Tanaman Buah

Sub sistem Hulu	Sub Sistem Usaha Tani	Sub Sistem Hilir	Sub Sistem Penunjang	Pola Kemitraan
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Irigasi Teknis • Pengembangan balai bibit untuk petani apel • Penyediaan kios sarana budidaya tanaman buah 	<p>Tanaman buah apel di Desa Tulungrejo, Desa Bulukerto, Desa Sumbergondo . Dengan luas 382,83 ha</p>	<p>Inovasi Pengolahan produk berada di Desa Sumbergondo berupa : Yogurt Apel, permen Apel, Biskuit Apel, dan Jus Apel</p> <p>Pengemasan produks berada di Sub Agropolitan Center Desa Tulungrejo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan tempah pengolahan tanaman buah apel di Desa Sumbergondo dan Bulukerto • Pengembangan Kelompok Industri usaha kecil di masing-masing desa • Pembangunan fasilitas workshop di pasar Agropolitan Center (desa Punten) • Penyediaan sarana dan prasarana pelatihan 	<p>Pola Kemitraan Terintegrasi Vertikal (KTV). KTV terdiri dari tiga model kemitraan, yaitu pemilikan group swasta setempat, pemilikan group/Koperasi Petani dan pemilikan group/KOPME bekerjasama dengan Pemerintah</p>

Universitas Indonesia

			untuk petani apel (Desa Bulukerto)	Daerah
--	--	--	------------------------------------	--------

Sumber : Bappeda Kota Batu, 2010

4.9.5.3 Sistem Agribisnis Klaster Pertanian Tanaman Sayur

Tabel 4.16

Sistem Agribisnis Klaster Tanaman Sayuran

Sub sistem Hulu	Sub Sistem Usaha Tani	Sub Sistem Hilir	Sub Sistem Penunjang	Pola Kemitraan
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan teknologi bercocok tanam untuk mengoptimalkan produksi tanaman sayuran • Pengembangan Irigasi Teknis • Pengembangan balai bibit untuk petani sayuran • Penyediaan kios sarana budidaya tanaman sayur 	<p>Tanaman sayuran (Wortel, kubis, kentang, sawi) di Desa Tulungrejo dan Desa Sumberbrantas dengan luas 730,48 ha</p>	<p>Inovasi pengolahan produk yaitu : sayuran organik, kripik kentang, minuman sari sayuran (ex: Nutrisari sayuran), di Desa tulungrejo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan tempat penyimpanan sayuran di Desa Sumberbrantas • Pengembangan tempat pengolahan sayuran di Desa Tulungrejo • Penambahan sekolah lapang dan Laboratorium di Desa Punten • Penyediaan kios budidaya tanaman sayuran di Desa Tulungrejo • Penyediaan alat Pembuatan MOL (Mikro Organisme Lokal) di Desa Sumberbrantas 	<p>Pola Kemitraan Terintegrasi Vertikal (KTV). KTV terdiri dari tiga model kemitraan, yaitu pemilihan group swasta setempat, pemilihan group/Koperasi Petani dan pemilihan group/KOPME bekerjasama dengan Pemerintah Daerah</p>

Sumber : Bappeda Kota Batu, 2010

4.9.5.4 Sistem Agribisnis Klaster Pertanian Tanaman Hias

Tabel 4.17

Sistem Agribisnis Klaster Tanaman Hias

Sub sistem Hulu	Sub Sistem Usaha Tani	Sub Sistem Hilir	Sub Sistem Penunjang	Pola Kemitraan
<ul style="list-style-type: none"> • Penge mbangan bibit ekspor tanaman hias • Penge mbangan teknologi bercocok tanam untuk tanaman hias • Penge mbangan balai bibit untuk petani tanaman hias di Desa Punten • Penyedian kios sarana budidaya tanaman hias di Desa Punten 	<p>Tanaman Hias (Mawar, Krisan, Anyelir, Anggrek, Glodial) di Desa Punten dengan Luas 58,31 ha</p>	<p>Inovasi pengolahan produk yaitu : Parfum, bahan dasar sabun mandi, bahan dasar lulur mandi. Di Desa Bumiaji</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyedian bibit kualitas import untuk petani tanaman mawar di Desa Punten • Pengemban gan tempat pengolahan tanaman hias di Desa Punten • Penyedian kios budidaya tanaman hias di Desa Punten • Penambaha n sekolah lapang dan laboratoriu n penelitian di Desa Punten • Penyedian workshop center di Desa Punten 	<p>Pola Kemitraan Terintegrasi Vertikal (KTV). KTV terdiri dari tiga model kemitraan, yaitu pemilikan group swasta setempat, pemilikan group/Koperasi Petani dan pemilikan group/KOPME bekerjasama dengan Pemerintah Daerah</p>

Sumber : Bappeda Kota Batu, 2010

4.9.5.5 Sistem Agribisnis Klaster Peternakan

Tabel 4.18

Sistem Agribisnis Klaster Peternakan

Sub sistem Hulu	Sub Sistem Usaha Tani	Sub Sistem Hilir	Sub Sistem Sarana Penunjang	Pola Kemitraan
<ul style="list-style-type: none"> • Penyedian kios sarana budidaya peternakan • Pengembanga n bibit kelinci dan sapi di desa Gunungsari dan Bumiaji • Penyedian peralatan pembuatan pakan ternak yang lebih modern 	<p>Peternakan (Sapi perah dan Kelinci) di desa Gunungsari dan Desa Bumiaji</p>	<p>Inovasi pengolahan produk yaitu : Yogurt, keju, dendeng kelinci, permen susu, kornet kelinci, coklat susu. Di Desa Gunungsari</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyedian RPH dan POSKESWAN di Desa Bumiaji • Pengembangan pemeras susu yang modern pada desa Gunungsari • Pengembangan pembuatan biogas di masing-masing desa • Pengembangan pasar hewan di Desa Bumiaji • Penyedian tempat pendingin susu di Desa Gunungsari • Pengembangan pembuatan pakan ternak kelinci di Desa Bumiaji • Pengembangan Koperasi susu di Desa Gunungsari 	<p>Pola Kemitraan Terintegrasi Vertikal (KTV). KTV terdiri dari tiga model kemitraan, yaitu pemilikan group swasta setempat, pemilikan group/Koperasi Petani dan pemilikan group/KOPME bekerjasama dengan Pemerintah Daerah</p>

Sumber : Bappeda Kota Batu, 2010

4.9.5.6 Sistem Agribisnis Klaster Perikanan

Tabel 4.19

Sistem Agribisnis Klaster Perikanan

Sub sistem Hulu	Sub Sistem Usaha Tani	Sub Sistem Hilir	Sub Sistem Penunjang	Pola Kemitraan
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan benih ikan air tawar • Penyediaan kios sarana budidaya perikanan • Pengembangan teknologi pengelolaan perikanan • Penyediaan peralatan pembuatan pakan ikan yang lebih modern 	Perikanan (Ikan Nila) di Desa Pandanrejo	Inovasi pengolahan produk yaitu : Sarden ikan, abon ikan, krupuk ikan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan produksi ikan di desa pandanrejo • Penyediaan peralatan produksi perikanan untuk petani ikan di Desa Pandanrejo • Pengembangan tempat pengelolaan ikan di desa pandanrejo • Pembangunan gudang dan cold storage di Desa Pandanrejo • Penyediaan Kios Budidaya di desa Pandanrejo • Penyediaan bibit ikan yang di fasilitasi oleh BBI Kota Batu di Desa Punten 	Pola Kemitraan Terintegrasi Vertikal (KTV). KTV terdiri dari tiga model kemitraan, yaitu pemilikan group swasta setempat, pemilikan group/Koperasi Petani dan pemilikan group/KOPME bekerjasama dengan Pemerintah Daerah

Sumber : Bappeda Kota Batu, 2010

BAB 5
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL
PADA KAWASAN AGROPOLITAN KOTA BATU

5.1 Implementasi Kebijakan Fiskal pada Kawasan Agropolitan Kota Batu

Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola sumber daya yang tersedia di wilayahnya, yang meliputi sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya manusia yang tersedia di daerah dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pembangunan nasional, menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah akan semakin menentukan pencapaian sasaran pembangunan secara nasional. Oleh karena itu, pendayagunaan sumber daya nasional secara optimal di daerah menjadi isu sentral dan landasan pokok di dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama yang menyangkut pendayagunaan sumber daya alam yang didukung oleh tersedianya sumberdaya manusia yang memadai dan teknologi yang sesuai.

Di dalam memasuki era globalisasi dan liberalisasi perdagangan, pendayagunaan sumberdaya alam di daerah harus lebih diarahkan secara produktif pada pengembangan komoditas unggulan nasional yang didasarkan pada potensi masing-masing daerah dan dilaksanakan secara terpadu dan diarahkan pada upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing produk di pasaran internasional. Dari segi pendayagunaan sumberdaya alam ini, identifikasi potensi lahan perlu dilakukan sebagai salah satu dasar dan titik awal bagi perumusan kebijaksanaan serta menjadi acuan dalam upaya pengembangan investasi dan pembangunan perekonomian daerah. Beberapa langkah kebijakan yang perlu mendapatkan perhatian agar sasaran tersebut dapat dicapai, antara lain peningkatan efisiensi dan kualitas produk, serta pengembangan usaha yang dapat memenuhi persyaratan skala ekonomis.

Pengembangan kawasan agropolitani Kota Batu diarahkan sesuai dengan kebijakan arah pembangunan Kota Batu yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan lapangan usaha, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal serta

memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Pertimbangan-pertimbangan pembentukan kawasan agropolitan Kota Batu adalah:

- a. Terdapat sumber daya alam yang sudah digali dan dikembangkan, sedang atau belum digali. Sehingga perlu adanya pengembangan lebih lanjut.
- b. Sebagian besar masyarakatnya berada di daerah pedesaan dengan mata pencaharian utama bergantung pada potensi sumber daya alam (sektor pertanian).
- c. Terdapatnya sumber tenaga kerja dari masyarakat sendiri, sehingga secara tidak langsung dengan adanya pengembangan kawasan strategis diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin, terutama pada masyarakat sekitar.
- d. Terdapatnya lahan-lahan pengembangan berbagai sektor seperti sektor perkebunan, pertanian, pariwisata, perikanan, peternakan dan lain sebagainya.

Kota Batu sebagai daerah otonomi tingkat II mempunyai struktur perekonomian yang sama dengan struktur ekonomi nasional. Atau dengan kata lain struktur ekonomi suatu daerah merupakan bagian dari struktur ekonomi nasional. Perubahan struktur ekonomi nasional akan berpengaruh pada struktur ekonomi daerah. Secara garis besar, kegiatan ekonomi di suatu wilayah dapat dibagi menjadi tiga sektor besar, yaitu sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Di mana sektor primer mencakup sektor pertanian, dan sektor pertambangan dan penggalian. Sektor sekunder meliputi sektor industri pengolahan, sektor listrik dan air bersih serta sektor bangunan. Sedangkan sektor tersier mencakup sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa.

Kontribusi sektoral terhadap PDRB sangat tergantung dari Sektor-sektor andalan yang menyumbang cukup besar terhadap PDRB. Apabila sektor tersebut mengalami kemunduran, maka secara otomatis total perekonomian juga akan mengalami kontraksi karena sumbangannya yang cukup besar.

Penduduk Kota Batu sebagian besar bekerja sebagai petani, sebagaimana telah disinggung dalam Bab 1 bahwa lahan Kota Batu 56,59 % nya diperuntukkan untuk pertanian. Namun, perkembangan perekonomian Kota Batu bila dilihat dari PDRB beberapa tahun belakangan ini tidak menunjukkan adanya kontribusi utama dari sektor pertanian, justru sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang mendominasi PDRB Kota Batu. Dinamika perkembangan wilayah Kota Batu saat ini lebih mengarah pada perkembangan Kota Batu ke depan sebagai sentra pariwisata berbasis pertanian, sentra wisata dengan ikon Kota Batu sebagai “Kota Wisata”. Visi dan misi Kota Batu sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2007-2012 adalah “ Kota Batu sebagai sentra pariwisata berbasis pertanian didukung oleh SDM, SDA, dan SDB serta pemerintahan yang kreatif, inovatif dan bersih, bagi seluruh rakyat, yang dijiwai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Sementara visi dan misi Kota Batu sebelumnya (periode 2002-2007) adalah Kota Batu sebagai sentra pertanian berbasis pariwisata, terlihat disini memang ada perubahan arah kebijakan pemerintah dalam mengelola perekonomian daerahnya. Seperti juga dikatakan oleh Heru Waskito :

“Hanya memang dulu ada pertanian yang bernuansakan wisata, itu dulu..tapi sekarang dibalik, wisatanya dulu, tapi tetep di komoditas pertanian, artinya pertanian di sini, teknologi, tanaman pangan, hasil perikanan, perkebunan, itu kita kembangkan semua jadi kawasan wisata, ada desa wisata, wisata untuk memetik apel, kemudian ada rumah inap petani, sudah kita kembangkan begitu, jadi kita sudah punya data, desa Sidomulyo, desa sangrahan sebagai kawasan desa wisata, jadi ada pengunjung datang kesana melihat nuansa, kehidupan petani, dia juga menanamkan sahamnya untuk membeli tanaman disana, nanti kalo kaya apel panen dia juga bisa”

Turunnya pangsa sektor primer yang tradisional merupakan tanda transformasi struktural dari sisi penawaran, Pada saat yang bersamaan sektor sekunder meningkat dan selanjutnya diikuti oleh peningkatan sektor tersier. Dalam proses ini, pergeseran pangsa tetap harus diikuti oleh pertumbuhan dari masing-masing sektor meskipun dengan laju yang berbeda. Lebih lanjut, laju percepatan dari suatu proses transformasi akan berbeda untuk masing-masing daerah, tergantung dari karakteristik daerah yang bersangkutan. Proses

transformasi Kota Batu yang mengandalkan kekayaan alam cenderung lebih lambat dibandingkan dengan daerah yang perekonomiannya relatif tidak tergantung pada sumber daya alam.

Tabel 5.1
Struktur Ekonomi Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan
Tahun 2000 dan 2010 (%)

Sektor (1)	Berlaku		Konstan	
	2000 (2)	2010 (3)	2000 (4)	2010 (5)
1. Primer	22,60	18,36	22,60	20,87
a. Pertanian	22,36	18,15	22,36	20,64
b. Pertambangan dan Penggalian	0,24	0,21	0,24	0,23
2. Sekunder	11,45	9,98	11,45	10,47
a. Industri Pengolahan	9,18	6,75	9,18	7,31
b. Listrik Gas dan Air	1,26	1,45	1,26	1,56
c. Bangunan	1,01	1,78	1,01	1,60
3. Sektor Tersier	65,95	71,67	65,95	68,67
a. Perdagangan, Hotel & Restoran	47,56	48,55	47,56	46,05
b. Angkutan dan Komunikasi	3,32	3,49	3,32	3,62
c. Keuangan, Persewaan & Jasa Persh	4,20	3,93	4,20	4,50
d. Jasa-jasa	10,87	15,70	10,87	14,50

Sumber: PDRB Kota Batu 2010, Bappeda Kota Batu.

Perbedaan ini karena untuk daerah-daerah yang kaya sumber daya alam cenderung masih membutuhkan pertumbuhan yang relatif tinggi pada sektor primer untuk mendukung percepatan pertumbuhan pada sektor lainnya. Dari Tabel 5.1 mengenai perubahan pangsa terhadap PDRB Kota Batu terlihat sampai tahun 2010, pangsa sektor tersier terus meningkat hingga 5,72 poin. Pada tahun 2000, pangsa sektor tersier masih mencapai 65,95 persen dan secara konsisten naik hingga mencapai 71,67 persen pada tahun 2010. Sementara itu, pangsa sektor sekunder yang sebelumnya diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian Kota Batu bersama sektor tersier, justru mengalami penurunan yaitu dari 11,45 persen pada tahun 2000 menjadi 9,98 persen pada tahun 2010.

Sektor industri yang merupakan penyumbang output terbesar pada pangsa sektor sekunder Kota Batu mengalami penurunan peranan pada periode tersebut.

Menurunnya peranan sektor industri pengolahan bukan berarti menurun produksinya tetapi kenaikan produksinya tidak bisa mengimbangi pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang relatif lebih cepat.

Penurunan pangsa sektor sekunder memang tidak terlalu dratis karena masih tertolong oleh peningkatan pangsa industri makanan, minuman dan tembakau, pangsa sektor listrik dan air bersih, serta pangsa sektor bangunan. Sektor yang juga berperan dalam sektor sekunder adalah sektor bangunan, karena dalam tahun 2010 ada beberapa kegiatan pembangunan yang besar antara lain pembangunan tempat wisata *Secret Zoo*, beberapa hotel serta semakin menjamurnya ruko-ruko dan bangunan tempat tinggal (perumahan) selain itu pada tahun 2010 juga mulai dibangun kompleks perkantoran terpadu dari Pemerintah Kota Batu. Kenaikan sektor konstruksi mencapai 0,77 persen, yaitu pada tahun 2000 hanya 1,01 persen dan pada tahun 2010 mencapai 1,78 persen (PDRB Kota Batu 2010, Hal.37).

Pangsa sektor primer sempat berubah arah dengan meningkatnya kembali pangasanya untuk PDRB harga konstan, sejalan dengan terkontraksinya sektor-sektor lain akibat adanya krisis ekonomi kembali mengalami penurunan peranannya. Ternyata peningkatan pangsa sektor primer di Kota Batu ini hanya berlangsung satu tahun dan pada periode berikutnya arah pergerakan telah kembali ke pola transformasi struktural yang normal. Penurunan peranan sektor ini terlihat dari terus menurunnya pangsa primer yaitu dari 22,60 persen pada tahun 2000 menjadi 18,15 persen pada tahun 2010. Grafik 5.1 menggambarkan kontribusi masing-masing sektor dalam PDRB Kota Batu tahun 2010.

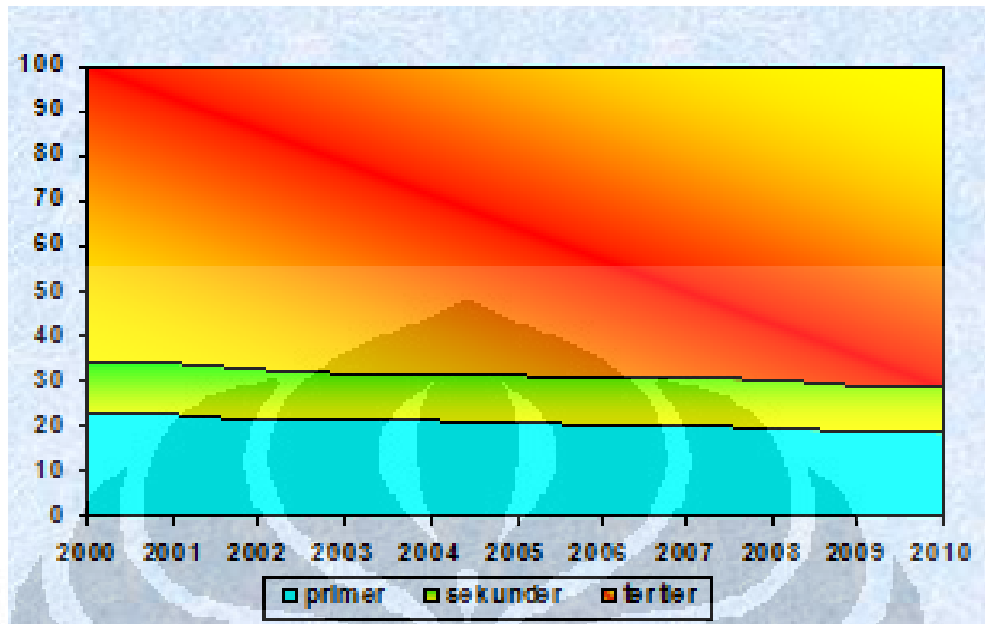


Sumber: PDRB Kota Batu 2010, Bappeda Kota Batu.

Grafik 5.1

Struktur Ekonomi Kota Batu Tahun 2010

Walaupun relatif lambat dibandingkan dengan beberapa daerah perkotaan lain di Jawa Timur, proses perubahan struktur ekonomi di Kota Batu boleh dikatakan cukup pesat sejak berdirinya kota ini pada akhir tahun 2001. Seperti yang dapat dilihat pada Grafik 5.2, peranan dari sektor-sektor primer dan sekunder menurun, sedangkan sektor-sektor tertier terus meningkat. Kendati demikian, struktur perekonomian Kota Batu selama periode tersebut tidak mengalami perubahan struktur yang signifikan. Pergeseran pangsa yang terjadi masih merupakan penyesuaian terhadap landasan perekonomian Kota Batu yang masih berumur sangat muda. Sektor sekunder dan tersier diharapkan akan tetap menjadi motor pertumbuhan dengan pangsa yang terus meningkat, sedangkan sektor primer diharapkan tetap menjadi *leading sector*. Pelajaran yang dapat ditarik yang terkait dengan perubahan struktur tersebut adalah perlunya strategi pembangunan, khususnya sektor industri, yang lebih berbasis pada sumber daya alam sehingga proses peralihan dari sektor primer yang tradisional ke sektor sekunder dan tersier berlangsung secara lebih wajar.



Sumber: PDRB Kota Batu 2010, Bappeda Kota Batu.

Grafik 5.2

Perubahan Struktur Ekonomi Kota Batu 2000-2010 (%)

Ada tiga gejala menarik selama periode 2000-2010 mengenai pergeseran struktur ekonomi yang dapat diamati pada Grafik 5.2 di atas. Pertama, meskipun peranan sektor sekunder diharapkan meningkat, di luar dugaan proporsinya justru menurun ini berarti kenaikan produksi dari sektor sekunder tidak secepat sektor tersier.

Kedua, proporsi sektor primer dalam pembentukan PDRB Kota Batu ternyata masih cukup besar. Adalah menarik untuk diketahui apakah adanya perubahan status dari Kotatib menjadi Kota pada akhir 2001 telah banyak berperan menurunkan peranan sektor primer dalam tujuh tahun terakhir. Salah satu faktor penyebabnya adalah dari segi alokasi dana dan bantuan pusat ke daerah. Perubahan status daerah ini menjadi kendala bagi Kota Batu memperoleh alokasi bantuan dari pusat, sebagaimana diungkapkan Enny Rachyuningsih

"bentuk bantuan dari pusat tuh apa ya, karena dianggapnya tidak maksimal, di sektor pertanian juga kita ga dianggap karena dianggapnya kita itu kota, padahal kita ini desa, dari 24 desa kelurahan, 5 itu baru kelurahannya selebihnya itu desa dengan kultur kalo memang orang disini itu bisa jalan2, itu kulturenya orang disini,

dan kalo di kota kaya malang itu ya ditopang oleh jasa, disini ditopang oleh pertanian, walaupun kondisi pertanian ya nomor dua lah setelah perdagangan dan perhotelan yah, misalnya hotel 45% sedangkan pertanian 15%, tapi pekerjaan kerja2 itu lebih banyak di sektor2 pertanian, jadi itu berkali-kali kita dipertanian loh ndak bisa dapet itu karena kota”

Ketiga, pergeseran perekonomian Kota Batu dari sektor primer dan sektor sekunder ke tersier tengah berlangsung, terutama pada sektor andalannya yaitu sektor pariwisata. Tidak bisa dipungkiri bahwa sektor pariwisata ini telah demikian berkembang, pengaruhnya mirip magnet yang mampu menarik modal ekonomis yang ada ke dalam spektrumnya seperti sumber daya manusia yang mempunyai kualitas, tanah, modal dan lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Puspa Permanasari berikut :

“pariwisatapun itu sepertinya perdagangan jasa. Kalo pariwisata murni jelas investornya bukan dari Batu, mereka dari luar. Jadi tidak mungkin PDRB-nya meningkat dari Batu. Kalo mereka efeknya langsung perdagangan. Kalo distribusi langsung itu mereka jadi saklek penjual gitu ya kaayaknya belum bisa. Malah yang petani-petani itu cenderung terancam pendapatannya. Mereka cenderung beralih. Anaknya malah gak mau jadi petani, mending jadi pegawai ae , malah enak. Selain itu mending kerja apa di BNS atau di hotel”.

Pergeseran adalah sesuatu yang wajar terjadi pada suatu pembangunan ekonomi. Namun, pergeseran yang terjadi di Kota Batu nampaknya telah menyeret aset penting sektor pertanian ke dalamnya. Keadaan ini dengan mudah dapat dilihat dari berubahnya hamparan tanaman menjadi lahan bangunan baik pemukiman, perkantoran, obyek wisata maupun lainnya. Apabila keadaan ini terus dibiarkan berlangsung tanpa pengendalian yang jelas, maka bukan tidak mungkin pada suatu saat nanti, Kota Batu bukan lagi pemasok sayur-sayuran dan buah-buahan ke daerah lain. Memang pada kenyataannya, bisnis perhotelan dan restoran di Kota Batu, masih banyak yang memasok bahan makanan yang diperlukan dari luar daerah, terutama dari daerah tetangganya. Permasalahan lain yang muncul, bila hal tersebut terjadi, apakah masyarakat Kota Batu siap dan mampu bersaing dalam pasar kerja modern yang dikenal mempunyai daya saing tinggi dengan bekal ketrampilan yang masih terbatas. Seperti ungkapan Tunggul Madyantono berikut:

“dan untuk Batu sendiri kan kota dengan pola pikir desa, orangya masih berpola pikir desa, tapi sudah jadi kota, sehingga kalau ada program kerja pemerintah, ada banyak program kerja yang tidak nyambung. Tidak direspon oleh masyarakat karena mereka masih berpola pikir tradisional. . Pola pikir petani ya bagaimana dia biaya produksi rendah, pemasarannya mudah, kan gitu aja yang mereka pikir. Mereka belum berpikir ke kawasan. Jadi sepanjang terpenuhi mereka enggak pusing dengan maunya pemerintah mau korup atau pemerintahnya jalannya enggak bener, mereka enggak perlu tahu“

Begitupun dengan pendapat Puspa Permanasari :

“Tapi juga kecenderungan masyarakat Batu akhirnya semua objek wisata, hotel restoran yang ada di Kota Batu kan berjanji awal-awal mereka 80% untuk sekitar, tapi nanti gak diperpanjang. Lama-lama jadi tidak dipenuhi. Jadi mending didatangkan dari Malang yang SDM nya lebih tinggi. Mungkin mereka juga cenderungnya ke pegawai yang biasa-biasa aja bukan Top Manajer atau apa. Malah banyak yang beralih”.

Sehingga pada akhirnya pertumbuhan ekonomi Kota Batu tidak dirasakan manfaatnya sampai ke tingkat masyarakat bawah, hanya beberapa lapis masyarakat atas yang secara nyata merasakan kenaikan perekonomian. Hal ini atas dasar informasi Tunggu Madyantono dibawah ini:

“kalau pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu, secara makro, iya. Tapi secara mikro ya seperti tadi, jadi yang merasakan tingkat atasnya, disini perputaran uang tinggi memang. Tapi tidak kepada petani langsung kepada masyarakat langsung kan, pada pelaku usaha bahkan yang punya pusat oleh-oleh bukan orang Batu, Pusat Oleh-oleh yang tiap hari toko-toko itu kan orang Malang, orang Surabaya yang melihat peluang usaha. Yang orang Batu sebagian kecil. Ada memang yang orang Batu tapi pemilik modalnya bahkan orang Denpasar”

Oleh karena itu Pemerintah Kota Batu selain menggalakan pembangunan fisik harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM yang ada, sehingga pesatnya pembangunan bisa diimbangi dengan meningkatnya kualitas keterampilan masyarakat.

Fenomena ini menarik peneliti untuk mengkaji permasalahan tentang kebijakan pemerintah Kota Batu dalam pengembangan perekonomiannya, khususnya terkait kebijakan fiskal yang diterapkan pada sektor primernya ,

khususnya pada kawasan agropolitannya. Peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan fiskal tersebut, model pembahasan peneliti adalah mengkaji dahulu rencana atau desain kebijakan pemerintah dan kemudian menyandingkannya dengan implementasi yang telah dilakukan.

5.1.1 Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2011

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2011 merupakan arah kebijakan Pemerintah Kota Batu dalam merespon dan mengantisipasi perubahan kondisi makro dan mikro yang terjadi di kota Batu. Kebijakan ini, merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dengan kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Batu 2007 – 2012 (RPJMD Kota Batu) yang telah ditetapkan dan penjabarannya pada tahun 2011 dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batu (RKPD Kota Batu). Oleh karena itu, Kekuatan dari KUA 2011 ini adalah pada sinkronisasi dan konsistensi arah serta hasil pembangunan yang secara keseluruhan bermuara pada tercapainya visi Kota Batu sebagai : “Kota Batu sebagai sentra pariwisata berbasis pertanian didukung oleh SDM, SDA, dan SDB serta pemerintahan yang kreatif, inovatif dan bersih, bagi seluruh rakyat, yang dijiwai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Selanjutnya, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2011 ini menjadi dasar dalam menentukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Batu tahun 2011 yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu (RAPBD Kota Batu) tahun 2011. Sebagaimana halnya kaitan antara KUA dan RPJMD serta RKPD, maka kekuatan dari KUA 2011 juga dirancang untuk dapat mengalami sinkronisasi dan konsistensi dengan PPAS 2011 dan RAPBD kota Batu 2011.

Dalam rangka mencapai kebutuhan sinkronisasi dan konsistensi tersebut, maka diharapkan dalam pembahasan dan penetapan rancangan KUA 2011 ini dapat dibangun atas dasar kesamaan visi dan pemahaman baik antara jajaran eksekutif dan legislatif serta antara SKPD terhadap posisi dan keterkaitan rancangan KUA 2011 dengan RPJMD, RKPD dan PPAS serta RAPBD kota Batu 2011. Atas dasar ini, maka dapat disusun kalender kegiatan perencanaan, pembahasan dan penetapan yang tepat waktu dan tepat guna.

5.1.1.1 Pendapatan Daerah

Detail rencana pendapatan tahun 2011 setelah perubahan dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.2
Pendapatan APBD tahun anggaran 2011

No	URAIAN	PAGU
1	2	3
I	Pendapatan Asli Daerah	30.000.000.000,00
	a. Pajak Daerah	18.785.000.000,00
	b. Retribusi Daerah	4.300.000.000,00
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.350.000.000,00
	d. Lain-lain PAD Yang Sah	5.565.000.000,00
II	Dana Perimbangan	345.059.118.014,00
	a. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	35.177.594.814,00
	b. Dana Alokasi Umum	292.297.023.200,00
	c. Dana Alokasi Khusus	17.584.500.000,00
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	49.491.220.248,15
	a. Pendapatan Hibah	1.730.000.000,00
	b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi & Pemda Lainnya	25.120.420.248,00
	c. Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus	28.678.419.000,00
	d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda Lainnya	8.213.100.000,00
	TOTAL PROYEKSI PENDAPATAN 2011	438.801.057.262,00

sumber: PPAS-PAPBD Kota Batu 2011

a. Pendapatan Asli Daerah

Arah kebijakan perencanaan pendapatan asli daerah difokuskan melalui perbaikan database, intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tidak menambah beban bagi masyarakat, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011, realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, target PAD sesuai dengan RPJMD serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan, pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi pelaku ekonomi dan tidak membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak daerah dan retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD.

Penerimaan bunga pinjaman dari dana bergulir, dianggarkan dalam APBD pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sesuai dengan obyek dan rincian obyek berkenaan. Berdasarkan uraian di atas kebijakan pendapatan daerah Kota Batu pada tahun 2011 sebagai berikut:

1. Peningkatan target pendapatan daerah baik pajak langsung maupun tidak langsung secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala dan potensi yang ada
2. Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan
3. Perluasan sumber-sumber penerimaan daerah, antara lain optimalisasi kinerja BUMD dan pemanfaatan aset daerah
4. Mengembangkan kerjasama/kemitraan publik, privat dan masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan daerah

b. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2011 diproyeksikan sama seperti tahun 2010 sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), adapun sesuai dengan RPJMD 2007-2012 pada tahun 2011 ditargetkan sebesar Rp. 31.363.961.469,00 (tiga puluh satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) secara detail proyeksi pendapatan asli daerah tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut.

Tabel 5.3
Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011

No	URAIAN	Pagu	
		PAD Tahun 2010 (Rp)	PAD Tahun 2011 (Rp)
1	2	3	4
I	Pendapatan Asli Daerah	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
	a. Pajak Daerah	13.750.000.000,00	18.785.000.000,00
	b. Retribusi Daerah	4.300.000.000,00	4.300.000.000,00
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00
	d. Lain-Lain PAD Yang Sah	10.600.000.000,00	5.565.000.000,00

sumber: PPAS-PAPBD Kota Batu 2011

c. Dana Perimbangan

Mengingat proses penyusunan APBD sudah dimulai sejak bulan Juni 2010 sedangkan penetapan alokasi dana perimbangan tahun anggaran 2011 direncanakan sekitar bulan Oktober 2010, maka pencantuman alokasi dana perimbangan yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2011 didasarkan pada alokasi dana perimbangan tahun anggaran 2010 dengan tetap memperhatikan realisasi penerimaan tahun anggaran 2009.

Terhadap perencanaan alokasi dana bagi hasil, pemerintah daerah dapat memperkirakan besaran alokasi dana bagi hasil lebih rendah dari peraturan menteri keuangan tahun anggaran 2010, untuk mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga minyak dan gas atau hasil pertambangan lainnya di tahun 2011 dan memperhatikan realisasi penerimaan tahun anggaran 2009. Selanjutnya apabila alokasi dana bagi hasil tersebut tidak sesuai dari yang diperkirakan, dapat dilakukan penyesuaian dalam perubahan APBD tahun anggaran 2011.

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dialokasikan ke kabupaten/kota dan provinsi sesuai dengan keputusan gubernur, supaya diarahkan untuk melaksanakan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai illegal).

d. Proyeksi Dana Perimbangan

Detail proyeksi dana perimbangan dapat dilihat pada tabel 5.4 di bawah ini.

Tabel 5.4

Proyeksi Pendapatan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2011

No	URAIAN	Pagu	
		2010 Setelah PAK (Rp)	2011 Setelah PAK (Rp)
1	2	3	4
II	Dana Perimbangan	308.976.937.981,00	345.059.118.014,00
	a. Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak	42.978.577.781,00	35.177.594.814,00
	b. Dana Alokasi Umum	247.723.360.200,00	292.297.023.200,00
	c. Dana Alokasi Khusus	18.275.000.000,00	17.584.500.000,00

sumber: PPAS-PAPBD Kota Batu 2011

e. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pemerintah Kota Batu dalam menetapkan pendapatan bagi hasil yang diterima dari provinsi pada tahun anggaran 2011 menggunakan pagu tahun anggaran 2010. Sedangkan bagian pemerintah Kota Batu yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target tahun anggaran 2010 akan ditampung dalam perubahan APBD tahun anggaran 2011.

Penerimaan hibah yang bersumber dari APBN atau sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat dan telah diarahkan penggunaannya untuk dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pendapatan, kelompok lain-lain

pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan hibah sesuai dengan obyek dan rincian obyek berkenaan.

f. Proyeksi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Detail proyeksi lain-lain pendapatan yang sah dapat dilihat pada tabel 5.5 berikut ini.

Tabel 5.5
Proyeksi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2011

No	URAIAN	Pagu	
		2010 Setelah PAK (Rp)	2011 Setelah PAK (Rp)
1	2	3	4
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	73.349.259.054,00	49.491.220.248,15
	a. Pendapatan Hibah	0,00	1.730.000.000,00
	b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi & Pemda Lainnya	25.758.567.054,00	25.120.420.248,00
	c. Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus	39.883.482.000,00	28.678.419.000,00
	d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda Lainnya	7.707.210.000,00	8.213.100.000,00

sumber: PPAS-PAPBD Kota Batu 2011

g. Upaya-upaya Pemerintah Dalam Mencapai Target

1. Perbaikan database, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dengan tidak memberatkan masyarakat karena bersentuhan langsung dengan perekonomian masyarakat
2. Optimalisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah yang lebih proporsional sesuai dengan kondisi obyektif Kota Batu
3. Meningkatkan intensitas usaha BUMD dan usaha lainnya agar memperoleh laba/deviden yang optimal
4. Melaksanakan sumber-sumber lainnya baik potensi yang belum tergali maupun dalam bentuk hibah dari pihak ketiga

5. Meningkatkan SDM/Aparatur pemerintah melalui diklat-diklat menuju aparatur yang professional dalam menjalankan tugasnya dengan titik berat pada diklat teknis fungsional
6. Memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga vertikal/antar daerah/ perguruan tinggi/NGO agar sukses dalam penggalian PAD
7. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi antar unit penghasil di dalam melaksanakan tugasnya

5.1.1.2 Belanja Daerah

Detail perkiraan belanja dapat dilihat pada tabel 5.6 berikut:

Tabel 5.6
Rencana Belanja Tahun Anggaran 2011

No	URAIAN	PAGU
1	2	3
I	Belanja Tidak Langsung	242.513.111.774,81
	a. Belanja Pegawai	196.084.149.907,00
	b. Belanja Bunga	-
	c. Belanja Subsidi	-
	d. Belanja Hibah	15.031.331.167,00
	e. Belanja Bantuan Sosial	12.042.580.000,00
	f. Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota/Desa	-
	g. Belanja Bantuan Kepada Prov/Kab/Kota/Desa	18.855.050.700,00
	h. Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00
II	Belanja Langsung	228.515.099.720,00
TOTAL PROYEKSI BELANJA 2011		471.028.211.400,81

sumber: PPAS-PAPBD Kota Batu 2011

a. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja daerah disusun berdasarkan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh masyarakat, khususnya dalam pemberian pelayanan umum serta untuk membiayai program

kegiatan prioritas sebagaimana diamanatkan dalam RKPD tahun 2011. Oleh karena itu, dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2011, pemerintah Kota Batu menetapkan target capaian baik dalam konteks kota, satuan kerja dan kegiatan sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Berdasarkan uraian di atas pada tahun 2011 kebijakan belanja daerah yang ditetapkan pemerintah Kota Batu sebagai berikut:

1. Pemenuhan belanja sesuai urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan sesuai prioritas pada RPJMD 2007-2012 dan RKPD 2011 serta kemampuan daerah
2. Memprioritaskan alokasi belanja daerah pada sektor-sektor peningkatan pelayanan dasar
3. Memprioritaskan alokasi anggaran belanja daerah untuk program-program penanggulangan kemiskinan
4. Memprioritaskan pembangunan prasarana perkotaan, permukiman, penataan ruang dan pelestarian lingkungan hidup yang berkualitas
5. Stimulasi belanja bantuan keuangan desa untuk percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan dan penanggulangan kemiskinan
6. Meningkatkan kepedulian terhadap penerapan prinsip-prinsip efisiensi belanja dalam pelayanan publik
7. Melanjutkan proyek-proyek strategis yang bersifat tahun jamak (multi years) sesuai tahapan
8. Memenuhi prinsip-prinsip keadilan tidak hanya terkonsentrasi pada lokus tertentu serta dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat
9. Sinkronisasi pemanfaatan belanja dengan program prioritas nasional pada RKP 2011 dan RKPD Propinsi Jawa Timur 2011
10. Belanja penanganan bencana alam dan pasca bencana alam melalui belanja tidak terduga dan belanja langsung yang melekat pada SKPD terkait

b. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

A. Belanja Pegawai

Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai agar diperhitungkan *acress* yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan).

Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah (PNSD) agar disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai yang sudah dilakukan di masing-masing daerah dalam rangka perhitungan DAU tahun anggaran 2011 dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang ditetapkan pemerintah.

Untuk mengantisipasi pengangkatan CPNSD, pemerintah daerah menganggarkan belanja pegawai dalam APBD sesuai dengan kebutuhan pengangkatan CPNSD dan formasi pegawai tahun 2011.

B. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah agar dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Belanja hibah dari pemerintah daerah kepada instansi vertikal mekanisme penganggaran dan pemberiannya mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah, dan bagi instansi penerima dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya memperhatikan peraturan menteri keuangan terkait hibah daerah.

Dalam menjalankan fungsi pemerintah daerah di bidang kemasyarakatan dan guna memelihara kesejahteraan masyarakat dalam skala tertentu, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat, yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan diupayakan dalam penetapan besaran bantuannya sejalan dengan Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Beserta Perubahannya dalam arti jumlahnya dibatasi tidak melebihi batas toleransi untuk penunjukkan langsung.

Pemberian bantuan sosial harus didasarkan kriteria yang jelas dengan memperhatikan azas keadilan, transparan dan memprioritaskan kepentingan masyarakat luas.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah diupayakan agar jumlah alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial agar dibatasi dan diperjelas format pertanggungjawabannya yang tata cara dan mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial diatur dalam peraturan kepala daerah.

C. Belanja Bagi Hasil

Untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa disesuaikan dengan rencana pendapatan pada tahun anggaran 2011, sedangkan pelampauan target tahun anggaran 2010 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah yang menjadi hak kabupaten/kota atau pemerintah desa ditampung dalam perubahan APBD tahun anggaran 2011.

D. Belanja Bantuan Keuangan

Pemerintah Kota Batu menganggarkan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kota untuk desa yang pembagiannya setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa (ADD) sesuai maksud pasal 68 peraturan pemerintah no. 72 tahun 2005 tentang desa, dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, perolehan bantuan dana sumber yang lain dan luas wilayah. Selain itu Pemerintah Kota Batu juga dimungkinkan masih mendapatkan dana bantuan dari pemerintah propinsi yang diterimakan langsung kepada pemerintah desa seperti bantuan keuangan desa atau bantuan langsung kepada masyarakat.

E. Belanja Tidak Terduga

Dalam penetapan anggaran belanja tidak terduga agar dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran 2009 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran 2011.

Berdasarkan uraian di atas kebijakan belanja tidak langsung yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Batu pada tahun 2011 sebagai berikut:

1. Belanja pegawai diarahkan untuk memenuhi gaji yang disesuaikan dengan ketentuan penggajian PNS dan sebagaimana pidato presiden dalam pengantar nota keuangan RAPBN tahun 2011 yang diproyeksikan kenaikan rata-rata sebesar 10%, sedangkan tunjangan pegawai dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta berdasarkan kemampuan daerah
2. Belanja bantuan hibah diarahkan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah
3. Belanja bantuan sosial diarahkan untuk keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat
4. Belanja bantuan keuangan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan diarahkan secara khusus untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi baik melalui percepatan pembangunan infrastruktur, sektor usaha ekonomi produktif, maupun di bidang pelayanan dasar lainnya. Besaran belanja bantuan keuangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
5. Belanja tidak terduga diarahkan untuk keperluan tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta bencana alam di daerah

c. Kebijakan Belanja Langsung

Untuk merencanakan alokasi belanja dalam APBD agar lebih mengutamakan keberpihakan pada kepentingan publik daripada kepentingan aparatur. Dalam penyusunan anggaran belanja untuk setiap kegiatan, agar mempedomani/mempertimbangkan analisis standar belanja (ASB) dan/atau standar harga yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Penganggaran honorarium non PNSD hanya dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap (PTT) yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi serta yang terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing SKPD, termasuk narasumber/tenaga ahli dari luar instansi pelaksana kegiatan.

Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dengan memperhitungkan sisa persediaan barang tahun anggaran 2010. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan. Penganggaran belanja barang modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dialokasikan pada belanja barang dan jasa. Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi.

Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding agar dibatasi frekuensi, jumlah hari dan pesertanya serta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan, yang hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel. Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat agar dilaksanakan di kantor kecuali dengan alasan tertentu dapat dilaksanakan di luar kantor. Dalam rangka antisipasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) pedesaan dan perkotaan yang akan dikedaerahkan terhitung 1 Januari 2014 menjadi Pendapatan Asli Daerah maka pemerintah kabupaten/kota agar mengambil langkah-langkah dalam penyiapan dukungan program/kegiatan pengalihan (data, sistem, standar pengelolaan, keterampilan, dsb) atas PBB pedesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

yang berlaku efektif 1 Januari 2011 menjadi pajak daerah, serta penyiapan sarana dan prasarana.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah agar dalam merencanakan belanja modal diarahkan untuk pembangunan infrastruktur yang menunjang investasi daerah. Penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun asset tetap, tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset tetap tersebut sampai siap digunakan.

d. Urusan Pemerintah Daerah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara pada perubahan APBD Tahun anggaran 2011 yang disusun menurut masing-masing urusan ditampilkan pada table berikut:

Tabel 5.7

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 Menurut Urusan Wajib Pemerintah Daerah

No	Urusan	PPAS (Rp)
1	2	3
1	Pendidikan	
	1.1 Dinas Pendidikan	32.019.356.000,00
2	Kesehatan	
	2.1 Dinas Kesehatan	9.711.721.117,00
3	Pekerjaan Umum	
	3.1 Dinas Pengairan dan Bina Marga	50.220.870.000,00
	3.2 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	55.803.214.801,00
4	Perumahan	
5	Penataan Ruang	
6	Perencanaan Pembangunan	
	6.1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.703.500.000,00
7	Perhubungan	
	7.1 Dinas Perhubungan Kom. dan Informatika	2.762.410.000,00
8	Lingkungan Hidup	
	8.1 Kantor Lingkungan Hidup	2.066.700.000,00
9	Pertanahan	
10	Kependudukan dan Catatan Sipil	
	10.1 Dinas Kependudukan dan Capil	2.169.781.889,00
11	Pemberdayaan Peremp. dan Perlindungan Anak	

	11.1 BPMPKB	180.000.000,00
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	
	12.1 BPMPKB	979.490.000,00
13	Sosial	
	13.1 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	2.531.324.000,00
14	Ketenagakerjaan	
15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	15.1 Dinas Kop, UKM, Perindag	2.432.800.000,00
16	Penanaman Modal	
17	Kebudayaan	
18	Pemuda dan Olahraga	
	18.1 Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.326.429.000,00
19	Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri	
	19.1 Kantor Kesbang Polinmas	1.000.000.000,00
	19.2 Satuan Polisi Pamong Praja	1.059.807.500,00
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	
	20.1 DPRD	
	20.2 Walikota dan Wakil Walikota	
	20.3 Sekretariat Daerah	
	20.3.01 Bagian Pemerintahan	1.100.000.000,00
	20.3.02 Bagian Hukum	1.050.000.000,00
	20.3.03 Bagian Pembangunan	1.350.000.000,00
	20.3.04 Bagian Perekonomian	1.000.000.000,00
	20.3.05 Bagian Umum	7.840.518.000,00
	20.3.06 Bagian Humas & Protokol	1.633.000.000,00
	20.3.07 Bagian Organisasi	875.000.000,00
	20.3.08 Bagian Kesra	750.000.000,00
	20.3.09 Bagian Keuangan	2.538.414.000,00
	20.3.10 Bagian Perlengkapan	4.430.930.000,00
	20.4 Sekretariat DPRD	8.196.076.000,00
	20.6 Inspektorat	1.800.555.000,00
	20.7 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	965.000.000,00
	20.8 BKD	4.122.934.300,00
	20.9 Kecamatan Batu	750.000.000,00
	20.10 Kecamatan Bumiaji	750.000.000,00
	20.11 Kecamatan Junrejo	750.000.000,00
	20.12 Dinas Pendapatan	2.249.846.440,00
21	Ketahanan Pangan	
	21.1 Kantor Ketahanan Pangan	750.000.000,00
22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.040.709.173,00
23	Statistik	
24	Kearsipan	

25	Komunikasi dan Informatika	
26	Perpustakaan	
	26.1 Kantor Perpustakaan Kearsipan & Dokumentasi	750.000.000,00

Sumber: PPAS-PAPBD Kota Batu 2011

Tabel 5.8

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 Menurut Urusan Pilihan Pemerintah Daerah

No	Urusan	PPAS (Rp)
1	2	3
1.	Pertanian	
	1.1 Dinas Pertanian dan Kehutanan	10.913.559.500,00
2	Kehutanan	
3	Energi dan Sumber Daya Mineral	
4	Pariwisata	
	4.1 Dinas Pariwisata & Kebudayaan	4.991.153.500,00
5	Kelautan dan Perikanan	
6	Perdagangan	
7	Industri	
8	Ketransmigrasian	

Sumber: PPAS-PAPBD Kota Batu 2011

PPAS terbesar diberikan kepada Dinas Cipta Karya dan Tata ruang, diikuti Dinas Pengairan dan Bina Marga, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata dan Budaya, Bappeda, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, dan Dinas Koperindag pada urutan ke sepuluh. Dapat dilihat disini bahwa memang pemerintah banyak melakukan pembangunan fisik, informasi yang diterima peneliti bahwa pembangunan fisik ini dilakukan untuk menarik minat wisatawan dan investor ke Kota Batu. Dinas Pertanian dan Kehutanan masih mendapat prioritas lebih karena memang basis pertanian masih diperhatikan.

5.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2011 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2010 yang bersumber dari efisiensi belanja dan pendapatan lain-lain yang sah dan diterima namun belum dianggarkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.9 berikut ini.

Tabel 5.9
Rincian Pembiayaan Tahun Anggaran 2011

No	URAIAN	PAGU
1	2	3
I	Penerimaan Pembiayaan	33.152.057.825,05
	a. SILPA Tahun Sebelumnya	31.632.370.048,05
	b. Pinjaman Daerah	1.519.687.777,00
II	Pengeluaran Pembiayaan	924.903.592,24
	a. Pembentukan Dana Cadangan	-
	b. Penyertaan Modal Daerah	924.903.592,24
	c. Pembayaran Pokok Utang	-
PEMBIAYAAN NETTO		32.227.154.232,81

Sumber: PPAS-PAPBD Kota Batu 2011

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pemerintah dalam rangka menutup deficit dapat melakukan pinjaman daerah berupa pinjaman jangka menengah/panjang proses dan prosedurnya mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2005 tentang pinjaman daerah. Selain melakukan pinjaman daerah juga dapat mempergunakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) dengan syarat SILPA agar dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional. Penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2010 yang bersumber dari kelebihan capaian target pendapatan, efisiensi belanja dan pendapatan lain yang sah diperkirakan sebesar Rp. 33.152.057.825.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pengeluaran penyertaan modal/investasi, pembayaran hutang, pemberian pinjaman dan lain-lain yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah Kota Batu dalam rangka pemberdayaan masyarakat telah menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu pemerintah Kota Batu juga melakukan penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah yaitu PT. Batu Wisata Resources (BWR) yang keberadaannya sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Batu No. 7

tahun 2009 tentang PT Batu Wisata Resources (BWR) dan Peraturan Walikota No. 23 tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Batu kepada PT. Batu Wisata Resources serta Peraturan Daerah Kota Batu No. 2 tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Batu kepada PT. Bank Jatim.

Mengingat pada tahun 2012 pemerintah Kota Batu akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung (PILKADA) maka pada tahun 2011 ini pemerintah daerah menganggarkan dana cadangan yang tujuan pembentukan, program dan kegiatan, besaran dan rincian tahun cadangan akan ditetapkan lebih dahulu melalui peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan. Berdasarkan uraian di atas kebijakan pembiayaan daerah Kota Batu tahun 2011 sebagai berikut:

1. Dalam hal APBD diperkirakan surplus akan dipergunakan untuk melakukan pembentukan dana cadangan guna kegiatan investasi baik investasi yang bersifat permanen maupun non permanen
2. Dalam hal APBD diperkirakan defisit perlu ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diantaranya dengan memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran 2010 dan pinjaman daerah
3. Untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah maka diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan neto nilainya harus dapat menutup terjadinya defisit anggaran sehingga tidak menimbulkan hutang dan kesulitan likuiditas keuangan daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka secara ringkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batu Tahun Anggaran 2011 dapat digambarkan sebagaimana tersebut dalam Tabel 5.10 berikut :

Tabel 5.10
Ringkasan APBD Kota Batu Tahun Anggaran 2011

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3
A	PENDAPATAN	438.801.057.262,00
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	30.000.000.000,00
	a. Pajak Daerah	18.785.000.000,00
	b. Retribusi Daerah	4.300.000.000,00
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.350.000.000,00
	d. Lain-lain PAD yang Sah	5.565.000.000,00
II	DANA PERIMBANGAN	345.059.118.014,00
	a. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	35.177.594.814,00
	b. Dana Alokasi Umum	292.297.023.200,00
	c. Dana Alokasi Khusus	17.584.500.000,00
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	63.741.939.248,00
	a. Pendapatan Hibah	1.730.000.000,00
	b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi & Pemda Lainnya	25.120.420.248,00
	c. Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	28.678.419.000,00
	d. Bantuan Keuangan Dari Propinsi atau Pemda Lainnya	8.213.100.000,00
B	BELANJA	471.028.211.494,81
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	242.513.111.774,81
	a. Belanja Pegawai	196.084.149.907,00
	b. Belanja Bunga	-
	c. Belanja Subsidi	-
	d. Belanja Hibah	15.031.331.167,81
	e. Belanja Bantuan Sosial	12.042.580.000,00
	f. Belanja Bantuan Sosial	-
	g. Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota/Desa	-
	h. Belanja Bantuan Kepada Prov/Kab/Kota/Desa	18.855.050.700,00
	i. Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00
II	BELANJA LANGSUNG	228.515.099.720,00
SURPLUS (DEFISIT)		(32.227.154.232/81)
I	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	33.152.057.825,05
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	31.632.370.048,05
	b. Pinjaman Daerah	1.519.687.777,00
II	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	924.903.592,24
	a. Penyertaan Modal Daerah	-
	b. Pembentukan Dana Cadangan	924.903.592,24
	c. Pembayaran Pokok Utang	-
PEMBIAYAAN NETTO		32.227.154.232,81
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN		

Sumber: PPAS-PAPBD Kota Batu 2011

5.1.2 Rencana Kebijakan Pengeluaran pada Kawasan Agropolitan Kota Batu

5.1.2.1 Subsistem Agribisnis Hulu

Sebagai suatu sistem kegiatan ekonomi, kegiatan agribisnis terbagi menjadi tiga sub sistem yang saling terkait satu sama lain. Sub sistem tersebut adalah sub sistem agribisnis hulu, sub sistem agribisnis hilir dan sub sistem agribisnis budidaya untuk masing-masing komoditas unggulan.

a. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian (Saprotan)

Saprotan yang berupa bahan an-organik disediakan di agen/ distributor yang terletak di Agropolitan Center dan di toko-toko (ruko) yang tersedia di Agropolitan Center dan Sub Agropolitan Center. Sedangkan Saprotan yang bersifat organik, disediakan atau dikelola disekitar sumber bahan bakunya. Untuk mendukung kegiatan ini juga perlu penyadaran kepada masyarakat untuk berperan aktif, kaitannya dengan pemisahan jenis sampah organik dan anorganik pada saat mereka membuang sampah, sehingga memudahkan proses *recycling* sampah. Di Agropolitan Center tepatnya di Desa Punten didirikan Lembaga Pengkajian dan Penerapan Teknologi *Farming*, dimana dilakukan pengkajian Sarana Produksi Pertanian, sehingga dapat diketahui Saprotan yang tepat guna bagi Kawasan Agropolitan. Hasil pengkajian disosialisasikan melalui penyuluhan dan pelatihan di Kawasan Produksi (*hinterland*).

b. Penyediaan Bibit

Di Kecamatan Bumiaji belum adanya kebun bibit ataupun perhimpunan petani bibit, dikarenakan bibit yang ada biasanya diolah sendiri oleh petani ataupun membeli bibit dari tengkulak atau di kios-kios pertanian. Untuk itu, kedepannya dapat direncanakan penyediaan bibit unggul dalam bentuk Kebun bibit yang nantinya dapat bekerjasama dengan pihak swasta maupun dinas misalnya Tanaman Obat (Biotrop), PGI dan perguruan tinggi negeri maupun swasta yang berkompeten di bidangnya. Selain itu perlunya perhimpunan petani penangkar Benih (HPPB) yang nantinya dapat membantu untuk mengorganisir petani dalam penerimaan bantuan maupun informasi mengenai bibit. Untuk sekarang, adanya usaha pembibitan yang sudah berjalan dapat lebih ditingkatkan dalam segala aspeknya.

Tabel 5.11
Rencana Lokasi Penyediaan Bibit

No.	Klaster	Komoditi	Lokasi Penyediaan Bibit
1.	Tanaman Pangan	Jagung	Desa Giripurno
2.	Tanaman Sayuran	Sawi, wortel, kentang, kubis	Desa Tulungrejo
			Desa Sumberbrantas
3.	Tanaman Buah-buahan	Apel, jeruk	Desa Sumbergondo
4.	Tanaman Hias	Mawar, Anyelir, Anggrek	Desa Punten
			Desa Gunungsari
5.	Perikanan	Mas, Nila	Desa Pandanrejo
6.	Peternakan	Sapi perah	Desa Gunungsari
		Kelinci	Desa Bumiaji

Sumber : Bappeda Kota Batu, 2010

c. Penyediaan Alat Mesin Pertanian (Alsintan)

Pada Lembaga Pengkajian dan Penerapan Teknologi Farming, dimana dilakukan pengkajian teknologi Alsintan, diciptakan teknologi tepat guna pada Kawasan Agropolitan Kecamatan Bumiaji. Hasil pengkajian disosialisasikan melalui penyuluhan dan pelatihan di desa-desa *hinterland*. Berdasarkan keragaman agribisnis di Kota Batu, maka dibutuhkan Rencana Pertanian Rakyat Terpadu (*corporate farming*) atau Rencana Agribisnis Terintegrasi Horisontal. Berdasarkan analisis agribisnis komoditas unggulan, maka dibutuhkan pengadaan alat-mesin pertanian, antara lain adalah :

- 1) Alat-mesin mekanisasi pengolahan tanah (*hand tractor* dan lain sebagainya)
- 2) Alat mesin pengolahan limbah cair di klaster peternakan
- 3) Alat mesin untuk pengemasan limbah cair dan padat
- 4) Alat-mesin yang terkait dengan inseminasi buatan di klaster peternakan
- 5) Alat-mesin yang terkait dengan peningkatan oksigen kolam di klaster perikanan
- 6) Alat mesin mekanisasi pemanenan komoditas
- 7) Alat dan Mesin penyimpan sayuran
- 8) Alat dan Mesin untuk pemerah susu

- 9) Alat dan Mesin pendingin susu
- 10) Alat dan Mesin pompa air pada kola ikan

5.1.2.2 Subsistem Agribisnis Budidaya

Budidaya komoditas unggulan di Kecamatan Bumiaji merupakan kegiatan dengan ketrampilan yang telah memadai, adapun budidaya yang dilakukan adalah budidaya padi, jagung, wortel, kentang, kubis, sawi, apel, jeruk, mawar, anggrek, anyelir, sapi perah, nila dan mas. Kecuali jika keterampilan yang dilakukan merupakan hasil turun temurun untuk masyarakat yang ada di Kecamatan Bumiaji (khususnya didalam kluster) juga akan terus mendapatkan pembinaan dan inovasi dari Pemerintah (Dinas-dinas yang terkait). Perubahan dan peningkatan budidaya lebih disebabkan berubahnya teknologi dan permintaan pasar.

Ketrampilan budidaya dengan pola tumpangsari, dimana mampu mengakomodasi kepentingan ekonomi, kelestarian sumberdaya alam dan model kontrak farming. Tumpangsari dengan model lama (antar barisan) sudah mulai dikembangkan di Kecamatan Bumiaji. Pola pertanian terpadu antar kluster dapat direncanakan sehingga adanya sistem produksi pada Kecamatan Bumiaji. Sistem produksi Kecamatan Bumiaji dengan konsep pertanian terpadu diharapkan dapat membantu petani dalam meningkatkan hasil produksinya. Adapun pola Budidaya tanaman organik perlu dilakukan berbagai studi untuk petani sehingga implementasi dilapangan dapat dilakukan dan mampu meningkatkan hasil produksi pertahunnya Peningkatan dan intensifikasi ikan kolam lebih diarahkan kepada pola mina-padi atau mina-ayam. Budidaya sapi perah direncanakan lebih berorientasi pada peningkatan populasi dan peningkatan produksi pakan ternak, peningkatan kesehatan ternak serta suksesnya kegiatan inseminasi untuk peningkatan genitas sapi. Pola pemeliharaan sapi perah dengan kandang bersama perlu dikembangkan dalam rangka efisiensi dan efektifitas produksi.

5.1.2.3 Subsistem Agribisnis Hilir

Pengolahan hasil pertanian merupakan keterampilan / keahlian yang dimiliki oleh rata-rata petani di Kecamatan Bumiaji. Namun pengolahan hasil pertanian selama ini tidak berkembang. Dikarenakan pemsaran yang dilakukan

hanya dalam bentuk bahan baku Dalam pengembangan sektor hilir untuk pertanian, peternakan dan perikanan lebih ditingkatkan dengan produk-produk yang inovatif. Pengelolaan-pengelolaan ini direncanakan di kawasan pasar Agropolitan Center

Pada kondisi sekarang, untuk beberapa komoditi pertanian belum mampu berinovasi lebih dikarenakan keterbatasan teknologi, hanya saja untuk sektor peternakan khususnya ternak sapi perah sudah melakukan kegiatan hilir berupa adanya pengelolaan kotoran sapi menjadi Biogas dan pakan konsentrat untuk ternak sapi perah, namun masih terkendala pada dana dan teknologi pengolahannya. Kedepannya perlu adanya pengembangann pada pengolahan biogas sebagai bahan bakar yang membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya, selain itu ramah akan lingkungan. Pengelolaan biogas dan konsentran ini direncanakan berada di Desa Gunungsari karena pada desa ini perlu adanya pengembangan yang berlanjut untuk Biogas dan pakan konsentrat.

Pengolahan hasil produksi buah apel di Desa Tulungrejo lebih diorientasikan untuk upaya diversifikasi produk yaitu juga direncanakan untuk produk yogurt apel dan permen apel. Upaya tersebut perlu perencanaan. Pembangunan bangkel kerja untuk pengolahan diversifikasi produk ini patut juga untuk dikembangkan karena sebagai fasilitas penunjang dalam mengembangkan produk apel.

A. Pengembangan Sektor Pertanian Tanaman Pangan

Pengembangan Sektor pertanian tanaman pangan di Kecamatan Bumiaji didorong oleh strategi pengembangan sektor tanaman pangan. Adapun strategi sektor pertanian tanaman pangan adalah *Conglomerate Strategy* yaitu strategi pengembangan yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada nantinya. Pengembangan dari sektor Tanaman pangan yaitu berada di Desa Giripurno.

a) Rencana Sub Sistem Hulu

Sub sistem hulu merupakan dasar dari pengembangan sub sektor pertanian yang akan dikembangkan. Rencana sub sistem hulu yang ada di Kecamatan Bumiaji terdiri dari Rencana pembibitan, mesin dan peralatan

yang digunakan, pupuk dan obat-obatan serta sumber energi. Adapun Rencana sub sistem hulu yang dikembangkan di Kecamatan Bumiaji yaitu:

- Pengembangan Teknologi bercocok tanam bagi petani tanaman pangan di desa Giripurno
- Penyediaan peralatan bercocok tanam yang lebih modern
- Kios Sarana produksi budidaya jagung, padi
- Pengembangan Irigasi Teknis
- Penyediaan Bibit Jagung untuk petani di desa Pandanrejo dan Giripurno

b) Rencana Sub Sistem Budidaya

Sub sistem budidaya atau sistem usaha tani membahas mengenai jumlah produksi komoditi yang ada di Kecamatan Bumiaji. Untuk rencana sub sistem budidaya dapat dilihat rencana komoditi yang dikembangkan serta rencana lokasi pengembangan. Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut :

- **Jenis Komoditi Pertanian Tanaman Pangan**

Jenis komoditi yang dikembangkan di Kecamatan Bumiaji yaitu jenis tanaman pangan Jagung

- **Rencana Lokasi Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan**

Rencana lokasi pengembangan pertanian tanaman pangan yaitu tanaman jagung, berada di Desa Giripurno dengan luas lahan yang direncanakan yaitu 419,72 Ha.

c) Rencana Sub Sistem Hilir

Sub sistem hilir merupakan proses pengolahan dari bahan baku atau komoditi yang dikembangkan, adanya sistem hilir dapat membantu masyarakat untuk mengolah bahan baku menjadi bahan jadi yang memiliki nilai jual di pasaran. Adapun bahan rencana sub sistem hilir terdiri dari Agroindustri yang dapat dikembangkan dan Lokasi Agroindustri dapat dibahas sebagai berikut :

- **Agroindustri yang mampu dikembangkan**

Kegiatan agroindustri yang mampu dikembangkan dari komoditi unggulan jagung yakni home industri Gula jagung, permen jagung dan

beras jagung, untuk skala besar dapat dikembangkan pengemasan dari hasil olahan untuk bisa langsung dijual ke pasaran.

- **Lokasi Agroindustri**

Pengembangan *home industry* untuk pengolahan tanaman jagung dilakukan di desa Giripurno, sedangkan untuk pengemasan dan pemasarannya dilakukan di Sub Agropolitan Center yaitu pada Desa Pandanrejo.

d) Rencana Sub Sistem Penunjang

Sistem penunjang merupakan sarana pendukung dalam proses produksi maupun proses pengolahan. Sub sistem penunjang ini dapat terdiri dari kelembagaan masyarakat, lembaga keuangan ataupun kemitraan. Rencana sub sistem penunjang ini yang akan direncanakan sistem dalam sarana penunjang yang terdiri dari Rencana permodalan, Rencana Kemitraan, Rencana peran serta masyarakat serta Rencana pengembangan Agribisnis yang dibahas sebagai berikut :

- **Rencana Permodalan**

Strategi pengembangan kelembagaan keuangan termasuk Lembaga Keuangan Mikro pada Kecamatan Bumiaji berorientasi pada kemitraan petani dengan lembaga keuangan tersebut dalam hal pembiayaan, kredit, dan pemenuhan kebutuhan petani dalam hal finansial, dalam proses produksi pertanian, pengolahan, sampai dengan pemasaran produk pertaniannya

Rencana pengembangan permodalan melalui bantuan bergulir, kredit subsidi, kredit komersial secara khusus dan kredit komersial penuh, berbentuk:

- o Rencana pemberian kredit dengan bunga rendah untuk meningkatkan usaha budidaya, usaha produksi dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan,
 - ✓ Dengan syarat memiliki kelembagaan yaitu Kelompok Tani
 - ✓ Adanya rekomendasi dari dinas terkait
- o Rencana Internalisasi kredit keuangan mikro dengan collateral tanggung renteng;

- o Rencana penampungan produk usaha tani kedalam lumbung desa modern dengan sistem penerbitan warehouse receipt (girik bantuan keuangan sebesar 70% dari nilai hasil panen yang dimasukkan ke lumbung modern).

- **Rencana Kemitraan**

Oleh karena pengembangan Kecamatan Bumiaji berorientasi pada pengembangan sosial sistem, maka Pola Kemitraan Terintegrasi Vertikal (KTV). KTV terdiri dari tiga model kemitraan, yaitu pemilikan group swasta setempat, pemilikan group/Koperasi Petani dan pemilikan group/KOPME bekerjasama dengan Pemerintah Daerah

- **Rencana Peran Serta Masyarakat**

Peran serta masyarakat Kecamatan Bumiaji dalam pengembangan agribisnis gula jagung, permen jagung dan beras jagung dilakukan secara perseorangan atau melalui organisasi seperti program-program dalam kegiatan PKK, kelompok *home* industri, Koperasi Petani.

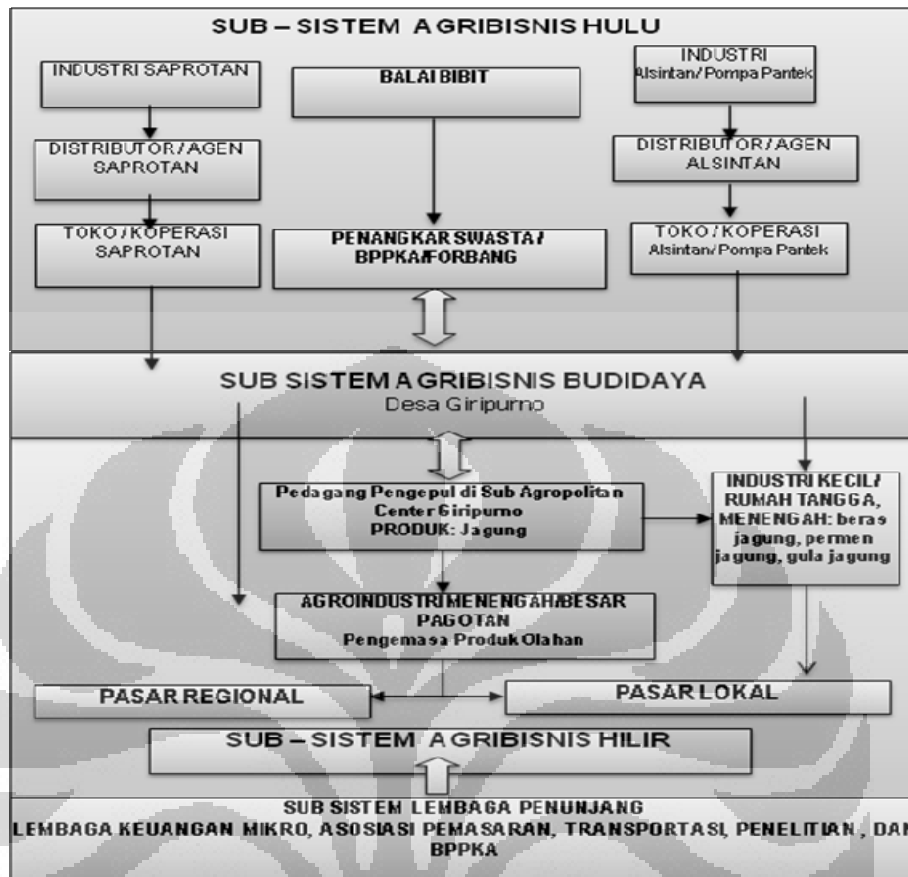
- **Rencana Sarana Penunjang**

Adapun sarana penunjang yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi ataupun pengolahan tanaman pangan jagung adalah sebagai berikut :

- Pengembangan Tempat pengolahan hasil pertanian pada Desa Giripurno
- Pasar Pengepul di Desa Pandanrejo
- Pembangunan BPP (Balai Pelatihan Pertanian) di Desa Punten
- Penambahan Sekolah Lapang dan Laboratorium di Desa Punten
- Lembaga Penelitian Pengkajian dan Pelatihan Teknologi Farming (LP₃TF) di Desa Punten
- Penyediaan sarana prasana untuk pelatihan dan penyuluhan di Desa Punten

e) **Rencana Pengembangan Agribisnis**

Rencana Pengembangan sistem agribisnis tanaman pangan disajikan dalam bentuk bagan pengembangan di bawah ini.



Sumber: Bappeda Kota Batu, 2010

Gambar 5.1

Rencana Pengembangan Agribisnis Sektor Tanaman Pangan

B. Pengembangan Sektor Pertanian Tanaman Sayur

Pengembangan Sektor pertanian tanaman sayur di Kecamatan Bumiaji didorong oleh strategi pengembangan sektor tanaman sayur. Adapun strategi sektor pertanian tanaman sayur adalah *Stable Growth Strategy* yaitu Strategi pengembangan yang dilakukan untuk mendukung potensi yang telah ada serta menggunakan peluang yang dapat menguntungkan. Pengembangan dari strategi ini adalah di Desa Tulungrejo dan Desa Sumberbrantas.

a) Rencana Sub Sistem Hulu

Dalam rencana sub sistem hulu yang direncanakan di Kecamatan Bumiaji yaitu mengenai pembibitan, pupuk dan obat-obatan, teknologi yang

digunakan serta sumber energi yang diperlukan. Adapun sub sistem hulu yang di rencanakan meliputi :

- Pengembangan teknologi bercocok tanam untuk mengoptimalkan produksi tanaman sayuran
- Pengembangan Irigasi Teknis
- Pengembangan balai bibit untuk petani sayuran
- Penyediaan kios sarana budidaya tanaman sayur

b) Rencana Sub Sistem Budidaya

Sub sistem budidaya yang dikembangkan pada kawasan perencanaan merupakan komoditi unggulan yang dilihat dari jumlah produksi yang dihasilkan setiap tahunnya. Untuk itu, dalam rencana sub sistem budidaya sudah diketahui jenis komoditi yang dikembangkan dan rencana lokasi pengembangannya. Adapun rencana sub sistem budidaya yang dikembangkan yaitu :

- **Jenis Komoditi Pertanian Tanaman Sayuran**

Jenis komoditi yang dikembangkan di Kecamatan Bumiaji untuk tanaman sayuran yaitu jenis tanaman wortel, kubis, sawi, dan kentang.

- **Rencana Lokasi Pengembangan Pertanian Tanaman Sayuran**

Untuk lokasi pengembangan pertanian tanaman sayuran yang dikembangkan yaitu di Desa Sumberbrantas dan desa Tulungrejo yang merupakan Sub Agropolitan Center pada Kecamatan Bumiaji, dengan luas lahan yang dikembangkan yaitu 730.48 Ha.

c) Rencana Sub Sistem Hilir

Sub sistem hilir merupakan proses pengolahan dari komoditi yang akan dikembangkan, adanya sub sistem hilir ini dapat bermanfaat bagi petani dalam mensejahterakan hidupnya jika dibandingkan dengan hanya menjual bahan bakunya saja. Pada rencana sub sistem hillir yang akan direncanakan meliputi Agroindustri yang mampu dikembangkan dan lokasi Agroindustri. Adapun pembahasannya yaitu :

- **Agroindustri yang mampu dikembangkan**

Kegiatan agroindustri yang dikembangkan dari tanaman sayuran dapat berupa *Home industri* sayuran organik, kripik kentang dan minuman sari sayuran (ex: minuma nutrisari)

- **Lokasi Agroindustri**

Rencana lokasi industri yang dikembangkan untuk *Home Industri* yaitu berada di Desa Sumberbrantas.

d) Rencana Sub Sistem Penunjang

Sarana penunjang merupakan fasilitasi yang mendukung kegiatan agribis pada kawasan perencanaan, untuk itu akan direncanakan sarana penunjang yang nantinya dapat membantu kegiatan agribisnis yang dikembangkan. Adapun rencana sub sistem penunjang meliputi rencana permodalan, rencana kemitraan, rencana peran serta masyarakat dan rencana sarana penunjang yang dibahas sebagai berikut :

- **Rencana Permodalan**

Strategi pengembangan kelembagaan keuangan termasuk Lembaga Keuangan Mikro pada Kecamatan Bumiaji berorientasi pada kemitraan petani dengan lembaga keuangan tersebut dalam hal pembiayaan, kredit, dan pemenuhan kebutuhan petani dalam hal finansial, dalam proses produksi pertanian, pengolahan, sampai dengan pemasaran produk pertaniannya

Rencana pengembangan permodalan melalui bantuan bergulir, kredit subsidi, kredit komersial secara khusus dan kredit komersial penuh, berbentuk:

- o Rencana pemberian kredit dengan bunga rendah untuk meningkatkan usaha budidaya, usaha produksi dan pengolahan hasil pertanian tanaman sayuran
Dengan syarat memiliki kelembagaan yaitu Kelompok Tani
Adanya rekomendasi dari dinas terkait
- o Rencana Internalisasi kredit keuangan mikro dengan collateral tanggung renteng;
- o Rencana penampungan produk usaha tani kedalam lumbung desa modern dengan sistem penerbitan warehouse receipt (girik bantuan

keuangan sebesar 70% dari nilai hasil panen yang dimasukkan ke lumbung modern).

- **Rencana Kemitraan**

Oleh karena pengembangan Kecamatan Bumiaji berorientasi pada pengembangan sosial sistem, maka Pola Kemitraan Terintegrasi Vertikal (KTV). KTV terdiri dari tiga model kemitraan, yaitu pemilikan group swasta setempat, pemilikan group/Koperasi Petani dan pemilikan group/KOPME bekerjasama dengan Pemerintah Daerah

- **Rencana Peran serta Masyarakat**

Peran serta masyarakat Kecamatan Bumiaji dalam pengembangan agribisnis sayuran organik, kripik kentang, minuman sari sayuran (ex: nutrisari) dilakukan secara perseorangan atau melalui organisasi seperti program-program dalam kegiatan PKK, kelompok *home* industri, Koperasi Petani.

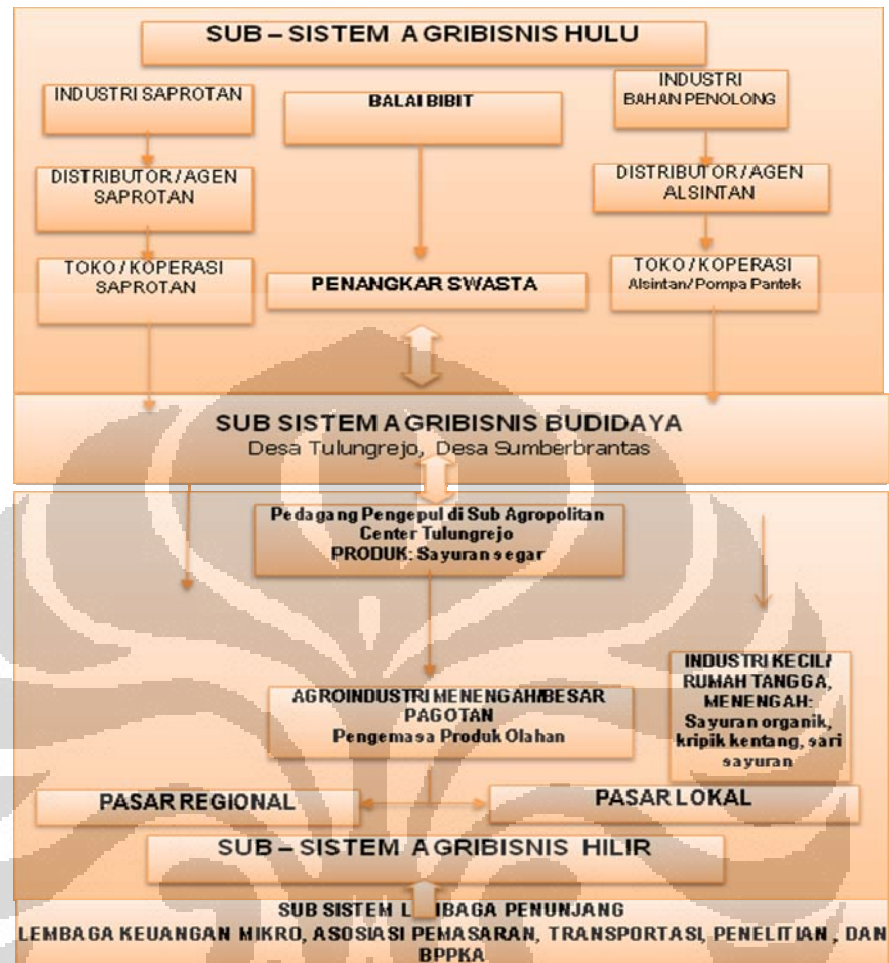
- **Rencana Sarana Penunjang**

Adapun sarana penunjang yang dibutuhkan untuk proses produksi atau pengolahan tanaman sayuran adalah sebagai berikut :

- Pengembangan tempat penyimpanan sayuran di Desa Sumberbrantas
- Pengembangan tempat pengolahan sayuran di Desa Tulungrejo
- Penambahan sekolah lapang dan Laboratorium di Desa Punten
- Penyediaan kios budidaya tanaman sayuran di Desa Tulungrejo
- Lembaga Penelitian Pengkajian dan Pelatihan Teknologi Farming (LP₃TF) di Desa Punten
- Penyediaan alat Pembuatan MOL (Mikro Organisme Lokal) di Desa Sumberbrantas

e) **Rencana Pengembangan Agribisnis**

Rencana Pengembangan sistem agribisnis tanaman sayuran disajikan dalam bentuk bagan pengembangan di bawah ini.



Sumber: Bappeda Kota Batu, 2010

Gambar 5.2

Rencana Pengembangan Agribisnis Sektor Tanaman Sayuran

C. Pengembangan Sektor Pertanian Tanaman Buah

Pengembangan Sektor pertanian tanaman buah di Kecamatan Bumiaji di dorong oleh strategi pengembangan sektor tanaman buah. Adapun strategi sektor pertanian tanaman buah adalah *Stable Growth Strategy* yaitu Strategi pengembangan yang dilakukan untuk mendukung potensi yang telah ada serta menggunakan peluang yang dapat menguntungkan. Pengembangan dari strategi ini adalah di Desa Sumbergondo

a) Rencana Sub Sistem Hulu

Sub sistem hulu pada sektor tanaman buah yang ada di kawasan perencanaan membahas mengenai pembibitan, obat-obatan dan pupuk, teknologi yang digunakan serta sumber energi. Adapun rencana sub sistem hulu yang akan direncanakan di kawasan perencanaan yaitu :

- Pengembangan Irigasi Teknis
- Pengembangan balai bibit untuk petani apel
- Penyediaan kios sarana budidaya tanaman buah

b) Rencana Sub Sistem Budidaya

Adanya sub sistem budidaya dimaksudkan untuk peningkatan jumlah produksi yang dihasilkan untuk setiap tahunnya, sub sistem budidaya yang dilakukan dapat difokuskan pada kawasan yang memiliki hasil produksi unggulan sehingga kawasan tersebut dapat berkembang dengan komoditi tersebut. Adapun rencana sub sistem budidaya yang direncanakan yaitu :

- **Jenis Komoditi Pertanian Tanaman Buah**

Jenis komoditi yang dikembangkan di Kecamatan Bumiaji adalah jenis tanaman buah Apel

- **Rencana Lokasi Pengembangan**

Untuk lokasi pengembangan pada tanaman buah yang akan dikembangkan pada kawasan perencanaan adalah Desa Sumbergondo, Bulukerto dan desa Tulungrejo dengan luas lahan yang direncanakan yaitu 382,83 Ha.

c) Rencana Sub Sistem Hilir

Sub sistem hilir merupakan pengolahan dari bahan baku komoditi pertanian yang dapat dikembangkan menjadi hasil olahan yang memiliki nilai jual di pasaran. Rencana sub sistem hilir ini yang akan dikembangkan yaitu :

- **Agroindustri yang mampu dikembangkan**

Jenis agroindustri yang dapat dikembangkan dari tanaman buah apel yaitu yogurt apel, permen apel, biskuit apel dan jus apel.

- **Lokasi Agroindustri**

Untuk lokasi agroindustri yang dikembangkan direncanakan berada di Desa Sunbergondo, dan pengemasan produk direncanakan dilakukan di Sub Agropolitan Center yaitu pada Desa Tulungrejo.

d) Rencana Sub Sistem Penunjang

Sub sistem penunjang merupakan pendukung untuk pelaksanaan kegiatan Agribisnis, untuk itu rencana sub sistem penunjang yang direncanakan terdiri dari Rencana permodalan, rencana kemitraan, rencana peran serta masyarakat, dan rencana sarana penunjang. Adapun rencana sub sistem penunjang yang akan dilakukan yaitu :

- **Rencana Permodalan**

Strategi pengembangan kelembagaan keuangan termasuk Lembaga Keuangan Mikro pada Kecamatan Bumiaji berorientasi pada kemitraan petani dengan lembaga keuangan tersebut dalam hal pembiayaan, kredit, dan pemenuhan kebutuhan petani dalam hal finansial, dalam proses produksi pertanian, pengolahan, sampai dengan pemasaran produk pertaniannya

Rencana pengembangan permodalan melalui bantuan bergulir, kredit subsidi, kredit komersial secara khusus dan kredit komersial penuh, berbentuk:

- Rencana pemberian kredit dengan bunga rendah untuk meningkatkan usaha budidaya, usaha produksi dan pengolahan hasil pertanian tanaman buah

Dengan syarat memiliki kelembagaan yaitu Kelompok Tani

Adanya rekomendasi dari dinas terkait

- Rencana Internalisasi kredit keuangan mikro dengan collateral tanggung renteng;
- Rencana penampungan produk usaha tani kedalam lumbung desa modern dengan sistem penerbitan warehouse receipt (girik bantuan keuangan sebesar 70% dari nilai hasil panen yang dimasukan ke lumbung modern).

- **Rencana Kemitraan**

Oleh karena pengembangan Kecamatan Bumiaji berorientasi pada pengembangan sosial sistem, maka Pola Kemitraan Terintegrasi Vertikal (KTV). KTV terdiri dari tiga model kemitraan, yaitu pemilikan group swasta setempat, pemilikan group/Koperasi Petani dan pemilikan group/KOPME bekerjasama dengan Pemerintah Daerah

- **Rencana Peran serta masyarakat**

Peran serta masyarakat Kecamatan Bumiaji dalam pengembangan agribisnis tanaman buah yaitu yogurt apel, permen apel, jus apel, dan biskuit apel yang dilakukan secara perseorangan atau melalui organisasi seperti program-program dalam kegiatan PKK, kelompok *home* industri, Koperasi Petani.

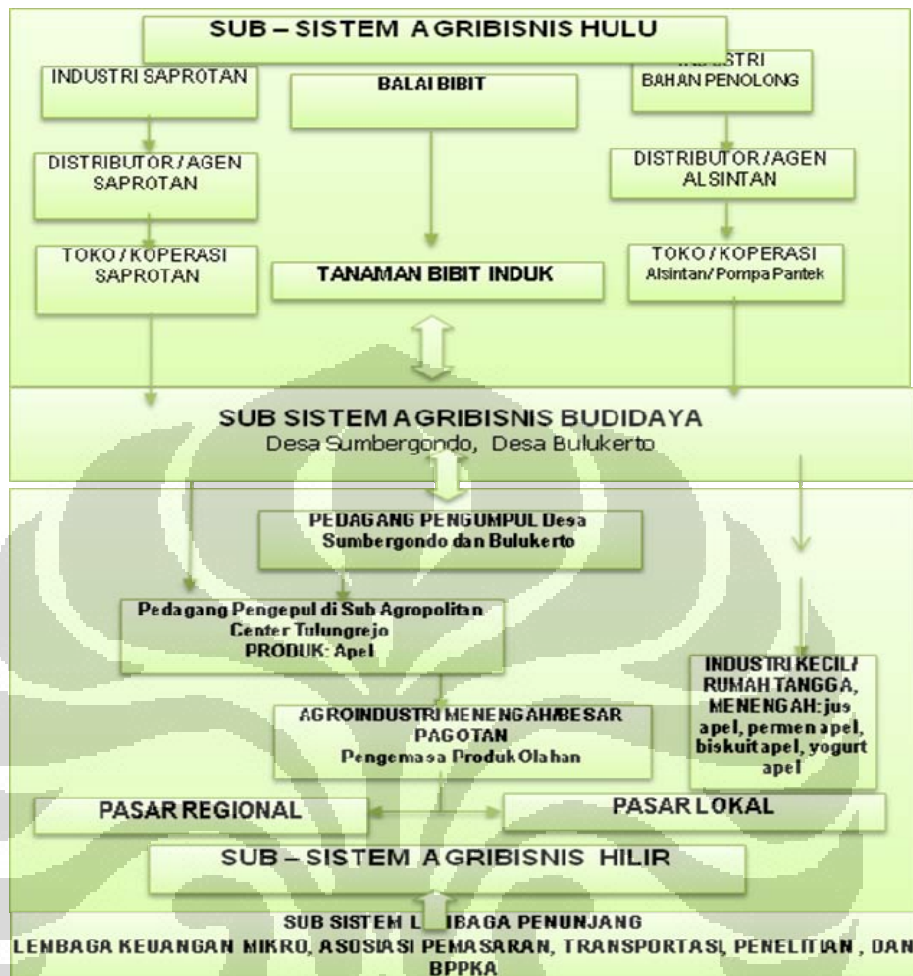
- **Rencana sarana penunjang**

Adapun rencana sarana penunjang yang akan dikembangkan pada kawasan perencanaan untuk komoditi tanaman buah yaitu :

- Pengembangan tempah pengolahan tanaman buah apel di Desa Sumbergondo dan Bulukerto
- Pengembangan Kelompok Industri usaha kecil di masing-masing desa
- Lembaga Penelitian Pengkajian dan Pelatihan Teknologi Farming (LP₃TF) di Desa Punten
- Pembangunan fasilitas workshop di pasar Agropolitan Center (desa Punten)
- Penyediaan sarana dan prasarana pelatihan untuk petani apel (Desa Bulukerto)

e) **Rencana Pengembangan Agribis**

Rencana Pengembangan sistem agribisnis tanaman Buah disajikan dalam bentuk bagan pengembangan di bawah ini.



Sumber: Bappeda Kota Batu, 2010

Gambar 5.3

Rencana Pengembangan Agribisnis Sektor Tanaman Buah

D. Pengembangan Sektor Perkebunan Hias

Pengembangan Sektor pertanian tanaman buah di Kecamatan Bumiaji didorong oleh strategi pengembangan sektor tanaman Hias. Adapun strategi sektor pertanian tanaman Hias adalah *Rapid Growth Strategy* yaitu Strategi pengembangan yang dilakukan untuk mendukung potensi yang telah ada serta menggunakan peluang yang dapat menguntungkan untuk kedepannya. Pengembangan dari strategi ini adalah di Desa Bumiaji

a) Rencana Sub Sistem Hulu

Sub sistem hulu merupakan dasar dari pengembangan sub sektor pertanian yang akan dikembangkan. Rencana sub sistem hulu yang ada di Kecamatan Bumiaji terdiri dari Rencana pembibitan, mesin dan peralatan yang digunakan, pupuk dan obat-obatan serta sumber energi. Adapun Rencana sub sistem hulu yang dikembangkan di Kecamatan Bumiaji yaitu :

- Pengembangan bibit ekspor tanaman hias
- Pengembangan teknologi bercocok tanam untuk tanaman hias
- Pengembangan balai bibit untuk petani tanaman hias di Desa Punten
- Penyediaan kios sarana budidaya tanaman hias di Desa Punten

b) Rencana Sub Sistem Budidaya

Rencana sub sistem budidaya yang akan dikembangkan di kawasan perencanaan merupakan komoditi unggulan yang ada pada kawasan tersebut. Untuk itu rancana kawasan budidaya yang menjadi unggulan yaitu komoditi yang memiliki hasil produksi terbesar per tahunnya. Adapun sub sistem budidaya yang dapat dikembangkan pada kawasan perencanaan adalah :

- **Jenis Komoditi Pertanian Tanaman Hias**

Untuk komoditi pertanian tanaman hias yang akan dikembangkan pada kawasan perencanaan adalah komoditi tanaman hias mawar, krisan, anyelir, anggrek, dan glodial.

- **Rencana Lokasi Pengembangan**

Lokasi pengembangan untuk tanaman hias direncanakan pada Desa Punten dengan luas lahan yang direncanakan yaitu 58,31 Ha.

c) Rencana Sub Sistem Hilir

Untuk sub sistem hilir pada kawasan perencanaan dilakukan dalam bentuk pengelolaan pada komoditi bahan baku yang menjadi unggulan. Untuk itu, pembahasan sub sisitem hilir yang direncanakan pada komoditi tanaman hias meliputi agroindustri yang mampu dikembangkan dan lokasi agroindustri tersebut, yang dibahas sebagai berikut:

- **Agroindustri yang mampu dikembangkan**

Agroindustri yang akan dikembangkan pada kawasan perencanaan untuk tanaman hias yaitu parfum, bahan dasar sabun mandi, bahan dasar lulur.

- **Lokasi Agroindustri**

Untuk lokasi agroindustri yang akan direncanakan di kawasan perencanaan yaitu pada Desa Bumiaji dan untuk pemasarannya berada di desa Punten.

d) Rencana Sub Sistem Penunjang

Sub sistem penunjang merupakan pendukung untuk pelaksanaan kegiatan Agribisnis, untuk itu Rencana sub sistem penunjang yang direncanakan terdiri dari Rencana permodalan, rencana kemitraan, rencana peran serta masyarakat, dan rencana sarana penunjang. Adapun rencana sub sistem penunjang yang akan dilakukan yaitu :

- **Rencana Permodalan**

Strategi pengembangan kelembagaan keuangan termasuk Lembaga Keuangan Mikro pada Kecamatan Bumiaji berorientasi pada kemitraan petani dengan lembaga keuangan tersebut dalam hal pembiayaan, kredit, dan pemenuhan kebutuhan petani dalam hal finansial, dalam proses produksi pertanian, pengolahan, sampai dengan pemasaran produk pertaniannya

Rencana pengembangan permodalan melalui bantuan bergulir, kredit subsidi, kredit komersial secara khusus dan kredit komersial penuh, berbentuk:

- Rencana pemberian kredit dengan bunga rendah untuk meningkatkan usaha budidaya, usaha produksi dan pengolahan hasil pertanian tanaman hias
Dengan syarat memiliki kelembagaan yaitu Kelompok Tani
Adanya rekomendasi dari dinas terkait
- Rencana Internalisasi kredit keuangan mikro dengan collateral tanggung renteng;
- Rencana penampungan produk usaha tani kedalam lumbung desa modern dengan sistem penerbitan warehouse receipt (girik bantuan

keuangan sebesar 70% dari nilai hasil panen yang dimasukkan ke lumbung modern).

- **Rencana Kemitraan**

Oleh karena pengembangan Kecamatan Bumiaji berorientasi pada pengembangan sosial sistem, maka Pola Kemitraan Terintegrasi Vertikal (KTV). KTV terdiri dari tiga model kemitraan, yaitu pemilikan group swasta setempat, pemilikan group/Koperasi Petani dan pemilikan group/KOPME bekerjasama dengan Pemerintah Daerah

- **Rencana Peran serta masyarakat**

Peran serta masyarakat Kecamatan Bumiaji dalam pengembangan agribisnis tanaman hias yaitu parfum, bahan dasar sabun, bahan dasar lulur yang dilakukan secara perseorangan atau melalui organisasi seperti program-program dalam kegiatan PKK, kelompok *home* industri, Koperasi Petani.

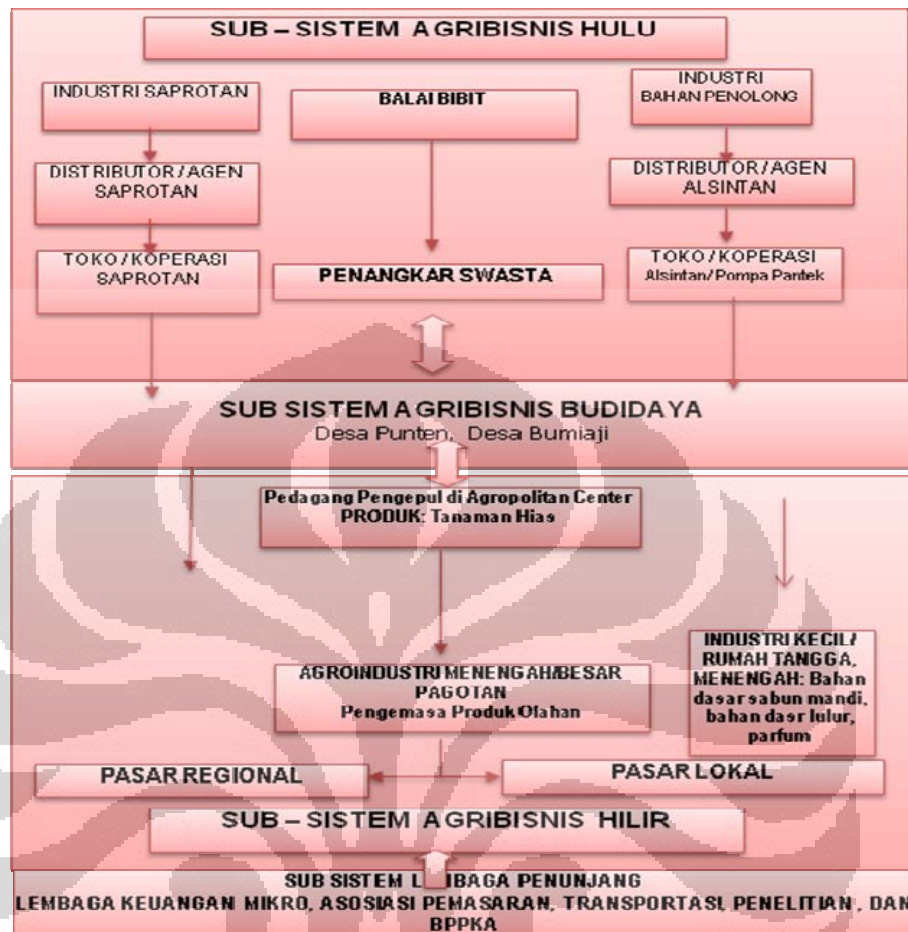
- **Rencana Sarana Penunjang**

Adapun rencana sarana penunjang yang akan di kembangkan pada kawasan perencanaan untuk komoditi tanaman hias yaitu :

- Penyediaan bibit kualitas import untuk petani tanaman mawar di Desa Punten
- Pengembangan tempat pengolahan tanaman hias di Desa Punten
- Penyediaan kios budidaya tanaman hias di Desa Punten
- Penambahan sekolah lapang dan laboratoriu penelitian di Desa Punten
- Lembaga Penelitian Pengkajian dan Pelatihan Teknologi Farming (LP₃TF) di Desa Punten
- Penyediaan workshop center di Desa Punten

e) **Rencana Pengembangan Agribisnis**

Rencana Pengembangan sistem agribisnis tanaman hias disajikan dalam bentuk bagan pengembangan di bawah ini.



Sumber: Bappeda Kota Batu 2010

Gambar 5.4

Rencana Pengembangan Agribisnis Sektor Tanaman Hias

E. Pengembangan Sektor Peternakan

Pengembangan Sektor peternakan di Kecamatan Bumiaji didorong oleh strategi pengembangan sektor peternakan. Adapun strategi sektor peternakan adalah *Rapid Growth Strategy* yaitu Strategi pengembangan yang dilakukan untuk mendukung potensi yang telah ada serta menggunakan peluang yang dapat menguntungkan untuk kedepannya. Pengembangan dari strategi ini adalah di Desa Gunungsari dan desa Bumiaji

a) Rencana Sub Sistem Hulu

Sub sistem hulu merupakan dasar dari pengembangan sub sektor peternakan yang akan dikembangkan. Rencana sub sistem hulu yang ada

di Kecamatan Bumiaji terdiri dari Rencana pembibitan, mesin dan peralatan yang digunakan, pupuk dan obat-obatan serta sumber energi. Adapun Rencana sub sistem hulu yang dikembangkan di Kecamatan Bumiaji yaitu :

- Penyediaan kios sarana budidaya peternakan
- Pengembangan bibit kelinci dan sapi di desa Gunungsari dan Bumiaji
- Penyediaan peralatan pembuatan pakan ternak yang lebih modern

b) Rencana Sub Sistem Budidaya

Rencana sub sistem budidaya yang akan dikembangkan di kawasan perencanaan merupakan komoditi unggulan yang ada pada kawasan tersebut. Untuk itu rencana kawasan budidaya yang menjadi unggulan yaitu komoditi yang memiliki hasil produksi terbesar per tahunnya. Adapun sub sistem budidaya yang dapat dikembangkan pada kawasan perencanaan adalah :

- **Jenis Komoditi Peternakan**

Untuk komoditi peternakan yang akan dikembangkan pada kawasan perencanaan adalah komoditi ternak sapi potong, sapi perah, kambing, kelinci, domba, ayam buras, dan kuda

- **Rencana Lokasi Pengembangan**

Lokasi pengembangan untuk tanaman hias direncanakan pada Desa Gunungsari dan Desa Bumiaji dengan luas lahan yang direncanakan yaitu 1533.25 Ha.

c) Rencana Sub Sistem Hilir

Untuk sub sistem hilir pada kawasan perencanaan dilakukan dalam bentuk pengelolaan pada komoditi bahan baku yang menjadi unggulan. Untuk itu, pembahasan sub sistem hilir yang direncanakan pada sub sektor peternakan meliputi agroindustri yang mampu dikembangkan dan lokasi agroindustri tersebut, yang dibahas sebagai berikut:

- **Agroindustri yang mampu dikembangkan**

Agroindustri yang akan dikembangkan pada kawasan perencanaan untuk peternakan yaitu yogurt, keju, dendeng kelinci, permen susu, kornet kelinci, dan coklat susu.

- **Lokasi Agroindustri**

Untuk lokasi agroindustri yang akan direncanakan di kawasan perencanaan yaitu Desa Gunungsari

d) Rencana Sub Sistem Penunjang

Sub sistem penunjang merupakan pendukung untuk pelaksanaan kegiatan Agribisnis, untuk itu Rencana sub sistem penunjang yang direncanakan terdiri dari Rencana permodalan, rencana kemitraan, rencana peran serta masyarakat, dan rencana sarana penunjang. Adapun rencana sub sistem penunjang yang akan dilakukan yaitu :

- **Rencana Permodalan**

Strategi pengembangan kelembagaan keuangan termasuk Lembaga Keuangan Mikro pada Kecamatan Bumiaji berorientasi pada kemitraan petani dengan lembaga keuangan tersebut dalam hal pembiayaan, kredit, dan pemenuhan kebutuhan petani dalam hal finansial, dalam proses produksi pertanian, pengolahan, sampai dengan pemasaran produk pertaniannya

Rencana pengembangan permodalan melalui bantuan bergulir, kredit subsidi, kredit komersial secara khusus dan kredit komersial penuh, berbentuk:

- Rencana pemberian kredit dengan bunga rendah untuk meningkatkan usaha budidaya, usaha produksi dan pengolahan hasil peternakan

Dengan syarat memiliki kelembagaan yaitu Kelompok Tani

Adanya rekomendasi dari dinas terkait

- Rencana Internalisasi kredit keuangan mikro dengan collateral tanggung renteng;
- Rencana penampungan produk usaha tani kedalam lumbung desa modern dengan sistem penerbitan warehouse receipt (girik bantuan keuangan sebesar 70% dari nilai hasil panen yang dimasukan ke lumbung modern).

- **Rencana Kemitraan**

Oleh karena pengembangan Kecamatan Bumiaji berorientasi pada pengembangan sosial sistem, maka Pola Kemitraan Terintegrasi Vertikal (KTV). KTV terdiri dari tiga model kemitraan, yaitu pemilikan group swasta setempat, pemilikan group/Koperasi Petani dan pemilikan group/KOPME bekerjasama dengan Pemerintah Daerah

- **Rencana Peran serta masyarakat**

Peran serta masyarakat Kecamatan Bumiaji dalam pengembangan agribisnis peternakan yaitu yogurt, keju, dendeng kelinci, permen susu, kornet kelinci, dan coklat susu yang dilakukan secara perseorangan atau melalui organisasi seperti program-program dalam kegiatan PKK, kelompok *home* industri, Koperasi Petani.

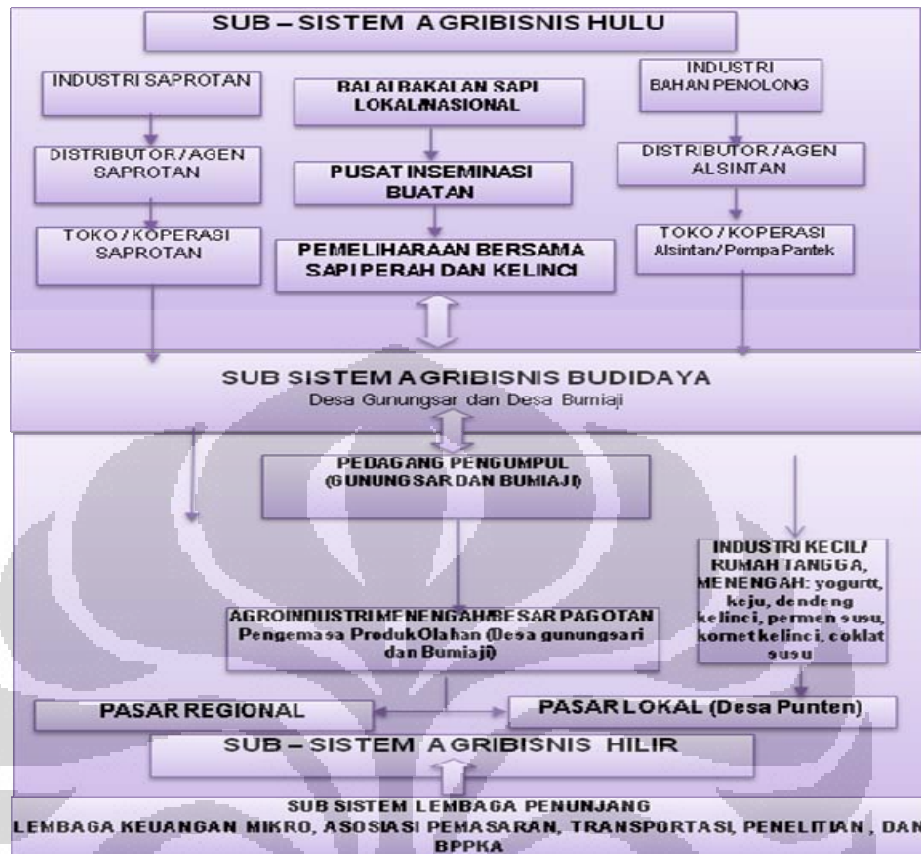
- **Rencana Sarana Penunjang**

Adapun rencana sarana penunjang yang akan di kembangkan pada kawasan perencanaan untuk sub sektor peternakan yaitu :

- Penyediaan RPH dan POSKESWAN di Desa Bumiaji
- Pengembangan pemeran susu yang modern pada desa Gunungsari
- Pengembangan pembuatan biogas di masing-masing desa
- Pengembangan pasar hewan di Desa Bumiaji
- Penyediaan tempat pendingin susu di Desa Gunungsari
- Pengembangan pembuatan pakan ternak kelinci di Desa Bumiaji
- Pengembangan Koperasi susu di Desa Gunungsari

f) Rencana Pengembangan Agribisnis

Rencana Pengembangan sistem agribisnis peternakan disajikan dalam bentuk bagan pengembangan di bawah ini.



Sumber : Bappeda Kota Batu, 2010

Gambar 5.5

Rencana Pengembangan Agribisnis Sektor Peternakan

F. Pengembangan Sektor Perikanan

Pengembangan Sektor perikanan di Kecamatan Bumiaji di dorong oleh strategi pengembangan sektor perikanan. Adapun strategi sektor peternakan adalah *Rapid Growth Strategy* yaitu Strategi pengembangan yang dilakukan untuk mendukung potensi yang telah ada serta menggunakan peluang yang dapat menguntungkan untuk kedepannya. Pengembangan dari strategi ini adalah di Desa Gunungsari dan Bumiaji

a) Rencana Sub Sistem Hulu

Sub sistem hulu merupakan dasar dari pengembangan sub sektor perikanan yang akan dikembangkan. Rencana sub sistem hulu yang ada di Kecamatan Bumiaji terdiri dari Rencana pembibitan, mesin dan peralatan

yang digunakan, pupuk dan obat-obatan serta sumber energi. Adapun Rencana sub sistem hulu yang dikembangkan di Kecamatan Bumiaji yaitu :

- Pengembangan benih ikan air tawar
- Penyediaan kios sarana budidaya perikanan
- Pengembangan teknologi pengelolaan perikanan
- Penyediaan peralatan pembuatan pakan ikan yang lebih modern

b) Rencana Sub Sistem Budidaya

Rencana sub sistem budidaya yang akan dikembangkan di kawasan perencanaan merupakan komoditi unggulan yang ada pada kawasan tersebut. Untuk itu rencana kawasan budidaya yang menjadi unggulan yaitu komoditi yang memiliki hasil produksi terbesar per tahunnya. Adapun sub sistem budidaya yang dapat dikembangkan pada kawasan perencanaan adalah :

- **Jenis Komoditi Perikanan**

Untuk komoditi peternakan yang akan dikembangkan pada kawasan perencanaan adalah jenis ikan Nila

- **Rencana Lokasi Pengembangan**

Lokasi pengembangan untuk tanaman hias direncanakan pada Desa Pandanrejo

c) Rencana Sub Sistem Hilir

Untuk sub sistem hilir pada kawasan perencanaan dilakukan dalam bentuk pengelolaan pada komoditi bahan baku yang menjadi unggulan. Untuk itu, pembahasan sub sistem hilir yang direncanakan pada sub sektor perikanan meliputi agroindustri yang mampu dikembangkan dan lokasi agroindustri tersebut, yang dibahas sebagai berikut:

- **Agroindustri yang mampu dikembangkan**

Agroindustri yang akan dikembangkan pada kawasan perencanaan untuk peternakan yaitu sarden ikan, abon ikan dan krupuk ikan

- **Lokasi Agroindustri**

Untuk lokasi agroindustri yang akan direncanakan di kawasan perencanaan yaitu Desa Pandanrejo

d) Rencana Sub Sistem Penunjang

Sub sistem penunjang merupakan pendukung untuk pelaksanaan kegiatan Agribisnis, untuk itu Rencana sub sistem penunjang yang direncanakan terdiri dari Rencana permodalan, rencana kemitraan, rencana peran serta masyarakat, dan rencana sarana penunjang. Adapun rencana sub sistem penunjang yang akan dilakukan yaitu :

- **Rencana Permodalan**

Strategi pengembangan kelembagaan keuangan termasuk Lembaga Keuangan Mikro pada Kecamatan Bumiaji berorientasi pada kemitraan petani dengan lembaga keuangan tersebut dalam hal pembiayaan, kredit, dan pemenuhan kebutuhan petani dalam hal finansial, dalam proses produksi pertanian, pengolahan, sampai dengan pemasaran produk pertaniannya

Rencana pengembangan permodalan melalui bantuan bergulir, kredit subsidi, kredit komersial secara khusus dan kredit komersial penuh, berbentuk:

- Rencana pemberian kredit dengan bunga rendah untuk meningkatkan usaha budidaya, usaha produksi dan pengolahan hasil perikanan

Dengan syarat memiliki kelembagaan yaitu Kelompok Tani

Adanya rekomendasi dari dinas terkait

- Rencana Internalisasi kredit keuangan mikro dengan collateral tanggung renteng;
- Rencana penampungan produk usaha tani kedalam lumbung desa modern dengan sistem penerbitan warehouse receipt (girik bantuan keuangan sebesar 70% dari nilai hasil panen yang dimasukan ke lumbung modern).

- **Rencana Kemitraan**

Oleh karena pengembangan Kecamatan Bumiaji berorientasi pada pengembangan sosial sistem, maka Pola Kemitraan Terintegrasi

Vertikal (KTV). KTV terdiri dari tiga model kemitraan, yaitu pemilikan group swasta setempat, pemilikan group/Koperasi Petani dan pemilikan group/KOPME bekerjasama dengan Pemerintah Daerah

- **Rencana Peran serta masyarakat**

Peran serta masyarakat Kecamatan Bumiaji dalam pengembangan agribisnis perikanan yaitu abon ikan, sarden ikan dan krupuk ikan yang dilakukan secara perseorangan atau melalui organisasi seperti program-program dalam kegiatan PKK, kelompok *home* industri, Koperasi Petani.

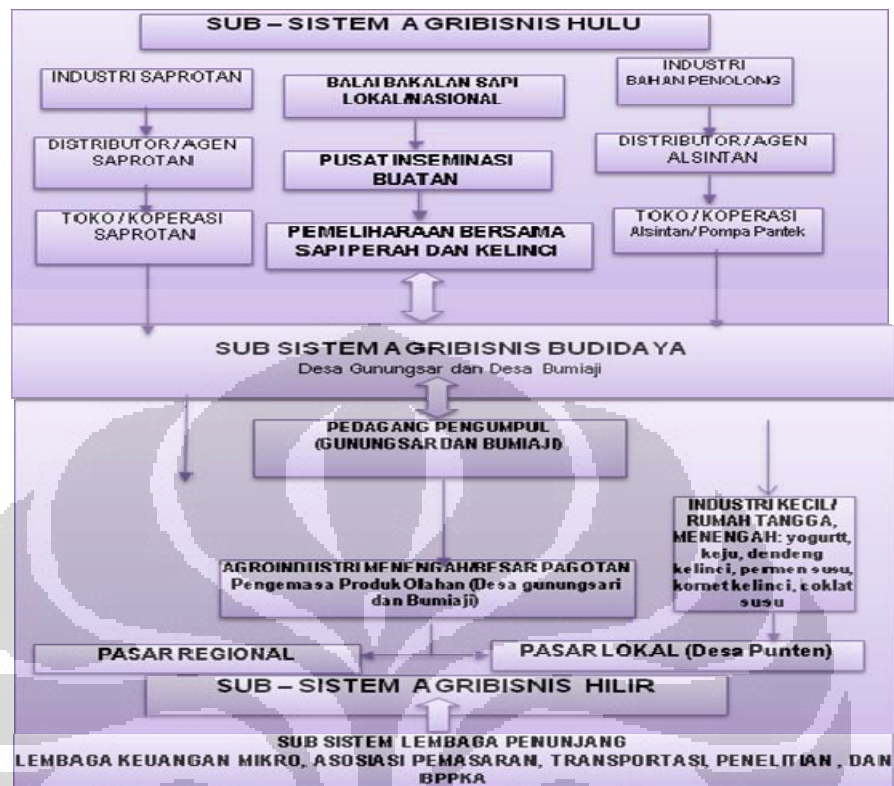
- **Rencana Sarana Penunjang**

Adapun rencana sarana penunjang yang akan di kembangkan pada kawasan perencanaan untuk sub sektor perikanan yaitu :

- Pengembangan produksi ikan di desa pandanrejo
- Penyediaan peralatan produksi perikanan untuk petani ikan di Desa Pandanrejo
- Pengembangan tempat pengelolaan ikan di desa pandanrejo
- Pembangunan gudang dan cold storage di Desa Pandanrejo
- Penyediaan Kios Budidaya di desa Pandanrejo
- Penyediaan bibit ikan yang di fasilitasi oleh BBI Kota Batu di Desa Punten

- g) **Rencana Pengembangan Agribisnis**

Rencana Pengembangan sistem agribisnis perikanan disajikan dalam bentuk bagan pengembangan di bawah ini.



Sumber: Bappeda Kota Batu 2010

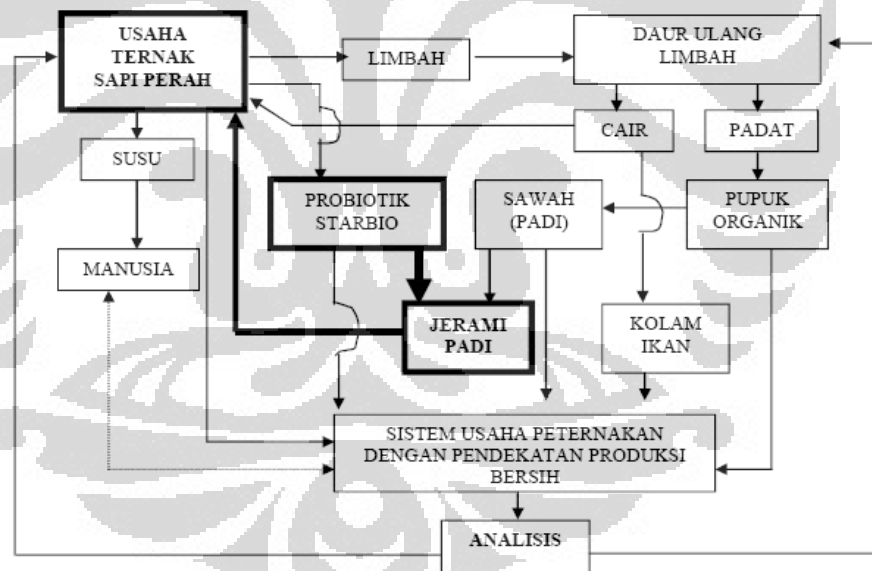
Gambar 5.6
Rencana Pengembangan Agribisnis Sektor Perikanan

G. Sistem Keterkaitan antar sektor

Dalam pengembangan kegiatan pertanian, perlu adanya dukungan dari kegiatan pertanian yang lain. Terdapat beberapa keterkaitan antar sektor yang dapat dikembangkan dalam Kecamatan Bumiaji. Keterkaitan antar sektor ini terkait dengan Sektor Peternakan – Sektor Pertanian Tanaman Pangan – Sektor Perikanan. Dalam sistem keterkaitan ini direncanakan dalam bentuk pemrosesan limbah ternak. Adapun Tata cara pemrosesan limbah ternak :

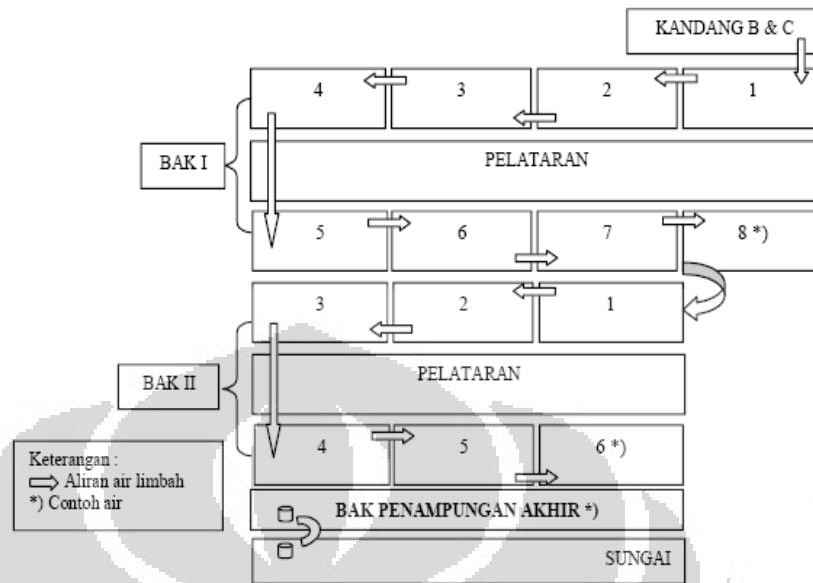
1. Penambahan starbio (bioaktivator) pada pakan sapi, sehingga mikroorganisme yang ada dalam starbio akan menguraikan protein, karbohidrat dan lemak yang ada dalam pakan dengan sempurna, sehingga mudah diserap dan dicerna oleh ternak;

2. Proses sedimentasi awal (Bak I), merupakan pengelolaan secara fisik. Dengan proses ini diharapkan terjadi pemisahan antara limbah padat dan limbah cair;
3. Limbah, kemudian dialirkan ke Bak II. Pada bak ini limbah akan mengalami proses sedimentasi ke-2 yaitu proses sedimentasi yang waktunya diperpanjang (Extended Aeration);
4. Selanjutnya limbah ditampung pada Bak III. Bak ini ditanami dengan eceng gondok (*Eichornia crassipes*) untuk membantu menguraikan limbah cair tersebut, sehingga mengurangi zat-zat pencemar yang ada dalam limbah cair; dan
5. Akhirnya limbah padat yang sudah mengendap diangkat ke atas pelataran dan dibiarkan mengering. Selanjutnya diangkut ke tempat pengomposan untuk diproses menjadi pupuk organik/kompos.



Sumber: Bappeda Kota Batu, 2010

Gambar 5.7
Keterkaitan Sektor Peternakan-Perikanan-Tanaman Pangan



Sumber: Bappeda Kota Batu, 2010

Gambar 5.8
Lokasi Pengambilan Contoh Air Limbah

5.1.2.4 Subsistem Penunjang

a. Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rencana pengembangan sumberdaya manusia, kelembagaan dan model kemitraan terhadap masyarakat pelaku agribisnis di Kecamatan Bumiaji memiliki tujuan menciptakan suatu social investment atau human capital. Pendekatan pengembangan sumberdaya manusia, dapat dilakukan dengan pendidikan formal (melalui proses pembelajaran di sekolah) dan non formal (melalui *on the job training* oleh LP3TF/BPKA). Sarana pendidikan formal merupakan sarana bagi kelangsungan kecerdasan masyarakat. Sarana pendidikan formal yang memadai akan sangat membantu masyarakat dalam proses pembelajaran (*learning process*).

Kebutuhan akan sarana pendidikan formal di suatu wilayah yang dikaitkan dengan jumlah penduduk dapat hitung berdasarkan standar sebagai berikut: Dengan adanya Rencana pengembangan sarana pendidikan komputer di Kawasan Agropolitan Kecamatan Bumiaji, secara langsung akan mendukung kemajuan

masyarakat yang ada di kawasan perencanaan dalam menunjang peningkatan mutu SDM yang profesional dalam bidang pemasaran agribisnis.

Rencana pendidikan non formal bagi masyarakat pelaku agribisnis/ petani di Kecamatan Bumiaji antara lain adalah melalui Rencana pendidikan farming, dengan metode *on the job training* dengan sasaran belajar kelompok Tani di Kawasan perencanaan. Pendidikan tersebut dapat berupa penyuluhan-penyuluhan yang diberikan oleh pengajar LP₃TF (pengajar berasal dari dinas-dinas terkait). Dengan adanya *on the job training*, diharapkan petani di Kecamatan Bumiaji mampu bekerja lebih baik untuk peningkatan kuantitas dan kualitas hasil panen mereka. Kelembagaan masyarakat pelaku agribisnis, selain dilakukan pada kegiatan bisnis juga dilakukan pada kegiatan sosial budaya. Sinergitas kelembagaan pada kegiatan bisnis dan sosial budaya akan mendorong terwujudnya *social investation* atau *human capital*.

Pengembangan Kawasan Agropolitan harus lebih diorientasikan pada suatu “*community comitment*” yang didasari integralisasi aspek sosial-budaya, sosioal-politik dan sosial-ekonomi eksisting. Upaya peningkatan peradaban masyarakat Kawasan Agropolitan Kecamatan Bumiaji sebaiknya menyentuh aspek sosial-budaya, sosioal-politik dan sosial-ekonomi masyarakat yang ada di kawasan perencanaan. Guna mendorong terjadinya percepatan dan peningkatan peradaban masyarakat Kecamatan Bumiaji dibutuhkan suatu Rencana pranata sosial yang sesuai dengan sosial-budaya setempat serta direkayasa secara *bottom-up*. Rencana tersebut dapat dilakukan melalui 8 tata, yaitu:

1. Tata Sosial Ekonomi

Merupakan lembaga swadaya yang bergerak di bidang keuangan untuk mendukung permodalan masyarakat per komunitas;

Tata sosial ekonomi di Kawasan Agropolitan Kecamatan Bumiaji dapat diwujudkan melalui:

- Lembaga Keuangan Desa (LKD) direncanakan di Sub Agropolitan Center yaitu Desa Tulungrejo dan Desa Pandanrejo
- Jaringan Distribusi Desa-Kota (JDDK);
- Industrialisasi Desa (ID).

2. Tata Pendidikan Lapang

Merupakan sistem pendidikan komunitas yang tegak diatas semangat pendalaman dan perluasan lahan pembelajaran (*learning community*), dan belajar seumur hidup (*life long learning*);

Tata Pendidikan Lapang di Kawasan Agropolitan Kecamatan Bumiaji dapat diwujudkan melalui:

- Taman Pendidikan Agribisnis (TPA) direncanakan di desa Punten
- Perpustakaan dan Taman Belajar Agribisnis (PTBA) direncanakan di Desa Punten
- Lembaga Pendidikan Ketrampilan Agribisnis (LPAK) direncanakan di Desa Punten

3. Tata Kesehatan Masyarakat

Lebih difokuskan pada pengembangan sistem pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat per komunitas (*community health care*) dan jaminan asuransi kesehatan ;

Tata Kesehatan Masyarakat di Kawasan Agropolitan Kecamatan Bumiaji dapat diwujudkan melalui:

- Balai Kesehatan Rakyat (BAKESRA) direncanakan di Desa Tulungrejo dan Desa Pandanrejo
- Asuransi Kesehatan Rakyat (AKESRA) direncanakan di Desa Tulungrejo dan Desa Pandanrejo

4. Tata Teknologi Tepat Guna

Dipusatkan pada lembaga swadaya yang bergerak dibidang pengembangan teknologi tepat guna, serta pengadaan dan pelayanan produksi untuk masyarakat;

Tata Teknologi tepat Guna di Kecamatan Bumiaji dapat diwujudkan melalui:

- Lembaga Penelitian Pengkajian dan Pendidikan Teknologi Farming (LP₃TF).

5. Tata Kependudukan Dan Keluarga Sejahtera

Merangkum lembaga swadaya pengembangan kesejahteraan keluarga sampai pengendalian jumlah kehamilan menuju norma satu anak cukup;

Tata Kependudukan dan Keluarga Sejahtera di Kecamatan Bumiaji dapat diwujudkan melalui:

- Gerakan Satu Anak untuk Sejahtera (GERSATARA);
- Dwi Dasa Wisma.

6. Tata Lingkungan Hidup

Lebih diarahkan pada tumbuhnya suatu komunitas yang sadar terhadap arti penting pelestarian lingkungan hidup serta pengembangan dan pengamanan kelestarian lingkungan hidup;

Tata Lingkungan Hidup di Kecamatan Bumiaji dapat diwujudkan melalui:

- Wira Lingkungan (WL)

7. Tata Sosial-Budaya

Difokuskan pada pengembangan olah raga dan seni, khususnya untuk menampung dan menyalurkan minat generasi muda secara sehat;

Tata Sosial-Budaya di Kecamatan Bumiaji dapat diwujudkan melalui:

- Klub Olah Raga (KOR) direncanakan di Desa Punten
- Klub Kesenian dan Kerajinan (KKK) direncanakan di Desa Punten

8. Tata Keagamaan

Dipusatkan pada peningkatan peranan tempat-tempat ibadah, disamping sebagai pusat peribadatan mahdhoh, juga sebagai wahana peribadatan sosial, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan *sains* dan teknologi.

Tata Keagamaan di Kawasan Agropolitan Kecamatan Bumiaji Dapat diwujudkan melalui:

- Lembaga Pengelolaan Tempat Ibadah (LPTI) direncanakan berada di setiap desa
- Lembaga Pengkajian Kitab Suci (LPKS) direncanakan berada di setiap desa

b. Rencana Manajemen dan Pengusahaan Kawasan

Strategi pemberdayaan masyarakat pada Kawasan Agropolitan Kecamatan Bumiaji akan melibatkan seluruh *stakeholder* terkait, antara lain aparat, pengusaha, petani, dan masyarakat lain di kawasan tersebut. Oleh karenanya, maka untuk mengembangkan Kawasan Agropolitan Bumiaji perlu strategi pemberdayaan masyarakat dengan: meningkatkan kualitas akademik masyarakat melalui penelitian, pengkajian, pengembangan aspek yang terkait dengan

agribisnis, kelembagaan masyarakat maupun pemerintah, kemitraan usaha, serta kewirausahaan masyarakat dalam arti luas.

Kegiatan dalam lingkup pemberdayaan masyarakat antara lain:

- a. Terbentuknya kelembagaan pemerintah dan masyarakat yang mendukung terwujudnya pemenuhan kebutuhan yang terkait dengan aspek hukum, agraria, permodalan, pemasaran, dan manajemen agribisnis sebagai suatu sistem, inovasi teknologi, lumbung desa, usaha bersama, koperasi dan lain sebagainya yang bersifat dinamis di Desa Punten
- b. Peningkatan dan pengembangan kelembagaan bisnis, kelembagaan eksportir, lembaga keuangan, lembaga informasi pasar di Agropolitan Center di desa Punten dan Sub Agropolitan Center berada di Desa Pandanrejo dan Tulungrejo
- c. Penguatan kelembagaan petani di Masing-masing klaster
- d. Pengembangan kelembagaan sistem agribisnis (penyedia agroinput, pengolahan hasil, pemasaran dan penyedia jasa di masing-masing klaster
- e. Pengembangan kelembagaan penyuluhan pembangunan terpadu di Desa Punten
- f. Pengembangan iklim yang kondusif bagi usaha dan investasi di masing-masing klaster

a) Rencana Pengembangan Teknologi Kawasan Agropolitan Kecamatan Bumiaji Kota Batu

Teknologi dalam pengembangan agropolitan Kecamatan Bumiaji dapat diklasifikasikan menjadi dua. Pertama adalah teknologi yang baru serta yang akan dikembangkan. Kedua adalah teknologi eksisting daerah untuk dikembangkan serta diloncatkan (revolusioner). Paket teknologi yang diterapkan di Kecamatan Bumiaji mencakup kebutuhan pada setiap sub sistem agribisnis pada setiap sub sektor pertanian (agribisnis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan dan perikanan). Koordinasi penerapannya perlu dievaluasi dalam suatu kerangka kerja. Pada inovasi teknologi di Kecamatan Bumiaji perlu memenuhi tahapan analisis (pengkajian akademis)-tahapan artikulatif (pengujian lapangan dalam bentuk demonstrasi plot)-tahapan *assimilated*. Pada tahapan assimilatif, beberapa

contoh paket teknologi farming yang dikembangkan oleh masyarakat agribisnis Kecamatan Bumiaji adalah:

- a. Hubungan budidaya mina padi dengan management pengairan dan penggunaan pestisida organik;
- b. Pembuatan Kompos, Bokasi dan lain sebagainya sebagai proses daur ulang residu produksi pertanian dan peternakan sapi potong di Desa Pandanrejo dan Desa Gunungsari
- c. Penerapan teknologi sistem mina-ayam pada daerah persawahan berpengairan teknis guna pengurangan kebutuhan air untuk pertanaman dan diversifikasi produk di Desa Bumiaji
- d. Bank Nuftah Plasma yang mengintegrasikan teknologi perbanyak vegetatif tanaman buah-buahan secara grafting dan pengembangan stok benih hortikultura

Tiga pendekatan untuk menguji fenomena adalah: analisis, artikulasi dan asimilasi. Analisis digunakan untuk mewakili bagian komponen dari fenomena alami. Komplek fenomena termasuk teknologi komponen dalam kondisi lapangan dapat ter "artikulasi" maupun ter "assimilasi" apabila telah teradopsi masyarakat petani. Sistem pertanian atau paket sistem Farming akan dilakukan "analisis" untuk mengidentifikasi ketiadaan teknologinya. Sistem baru atau paket sistem Farming baru mungkin akan di "artikulasi" komponen sistem Farming yang lama. Paket sistem Farming yang cocok dan telah terbukti meningkatkan kesejahteraan petani berarti menunjukkan adanya asimilasi teknologi dalam penerapannya.

b) Rencana Manajemen Permodalan Kecamatan Bumiaji

Strategi pengembangan kelembagaan keuangan termasuk Lembaga Keuangan Mikro pada Kecamatan Bumiaji berorientasi pada kemitraan petani dengan lembaga keuangan tersebut dalam hal pembiayaan, kredit, dan pemenuhan kebutuhan petani dalam hal finansial, dalam proses produksi pertanian, pengolahan, sampai dengan pemasaran produk pertaniannya. Kebijakan-kebijaksanaan penunjang. Seluruh keuntungan dari pembangunan usaha tani kecil tidak akan bisa dicapai jika pemerintah tidak menciptakan kebijakan

atau sistem kelembagaan yang menunjang, misalnya berupa insentif-insentif yang diperlukan, kesempatan-kesempatan berusaha dalam kegiatan ekonomi, dan kemudahan untuk memperoleh input yang diperlukan memungkinkan para petani kecil bisa meningkatkan *output* mereka sekaligus meningkatkan produktivitas mereka.

Pengembangan kelembagaan ekonomi penduduk direncanakan melalui pengembangan usaha skala rumah tangga, kelompok, gabungan kelompok asosiasi, dan koperasi. Rencana pengembangan permodalan melalui bantuan bergulir, kredit subsidi, kredit komersial secara khusus dan kredit komersial penuh, berbentuk:

1. Rencana pemberian kredit dengan bunga rendah untuk meningkatkan usaha budidaya, usaha produksi dan pengolahan hasil pertanian; di semua klaster pertanian
2. Rencana Internalisasi kredit keuangan mikro dengan *collateral* tanggung renteng di rencanakan pada semua klaster pertanian
3. Rencana penampungan produk usaha tani kedalam lumbung desa modern dengan sistem penerbitan *warehouse receipt* (girik bantuan keuangan sebesar 70% dari nilai hasil panen yang dimasukkan ke lumbung modern) direncanakan di Desa Punten

c) Rencana Manajemen Pemasaran Kecamatan Bumiaji

Garis besar strategi pemasaran Kecamatan Bumiaji terdiri dari empat langkah:

1. Produksi : Portofolio produk dalam perluasan pasar (*BCG concept*);
2. Pemasaran Komoditas: Base *On Market* (Memasukan *contractual market* kedalam sistem saham perusahaan lebih dari lima puluh persen volume produksi persatuan waktu);
3. Pemasaran Kecamatan Bumiaji menggunakan *positioning* (penanaman *image brands*);
4. Pemasaran Bumiaji menggunakan pendekatan: pemasaran Daerah Tujuan Wisata (DTW).

5.1.2.5 Sistem Prasarana Agropolitan

a. Rencana Pengembangan Jaringan Sarana Transportasi

Kegiatan transportasi pada dasarnya merupakan kebutuhan turunan bagi kegiatan pertanian di kawasan agropolitan yang ada di Kecamatan Bumiaji, meliputi:

a) Jalan Raya

• Pola Jaringan Jalan

Untuk pola jaringan jalan, yang merupakan jalan utama dengan fungsi eksternal di wilayah Kecamatan Bumiaji adalah meliputi jalan raya yang menghubungkan antara Kota Batu – Kecamatan Bumiaji dan Kota Batu – Kabupaten Malang. Pola yang terbentuk pada jaringan jalan utama ini adalah linier. Untuk akses yang berada di wilayah Kecamatan Bumiaji sendiri, pola jalan yang direncanakan adalah yang menghubungkan antara klaster-klaster pertanian yang ada di kawasan agropolitan, Kecamatan Bumiaji. Rencana pengembangan jaringan jalan di kawasan agropolitan, Kecamatan Bumiaji antara lain :

- Perbaikan jalan di jalan utama dan jalan-jalan lingkungan;
- Pelebaran jalan yang ada di wilayah kawasan agropolitan, Kecamatan Bumiaji, khususnya di bagian Desa Sumber Brantas dan sekitarnya;
- Peningkatan kelas jalan yang menghubungkan Desa Gunungsari - Punten.
- Pengembangan jalan tembus antar desa;

Rencana Pengembangan jaringan transportasi untuk mendukung sistem keterkaitan kegiatan agribisnis pada masing-masing klaster. Adapun rencana pengembangan jalan di kawasan agropolitan, Kecamatan Bumiaji adalah :

- o Rencana Jalan Usaha Tani untuk mendukung Sektor Tanaman Pangan, Sayuran dan Buah-buahan

Pengembangan jaringan jalan ini menghubungkan sistem keterkaitan agribisnis dari sektor ini. Jalan yang dikembangkan selain menuju ke pusat-pusat pelayanan agribisnis, juga dikembangkan kearah wilayah pendukungnya. Untuk itu pengembangan jaringan jalan antara lain

dikembangkan menuju pusat dan sub pusat agropolitan seperti jalan dari pusat agropolitan Desa Punten ke beberapa sub pusat agropolitan seperti jalan menuju Desa Bumiaji, Bulukerto, Sumbergondo dan beberapa desa lainnya. Adapun rencana jalan tembus yang ada meliputi:

- Jalan tembus penghubung Desa Songgokerto – Desa Sumberejo – Desa Gunungsari - Desa Punten.
- Pengembangan jalan tembus penghubung Desa Torongrejo – Desa Bumiaji.
- Rencana Jalan Tani Sektor Peternakan
 Pengembangan jaringan jalan ini menghubungkan sistem keterkaitan agribisnis dari sektor ini. Jalan yang dikembangkan selain menuju ke pusat-pusat pelayanan agribisnis, juga dikembangkan kearah wilayah pendukungnya. Untuk itu pengembangan jaringan jalan antara lain dikembangkan menuju Surabaya, Mojokerto, Kediri melalui Desa Sumber Brantas dengan jalan tembus menuju Mojokerto, Pasuruan dan Surabaya.
- Rencana Jalan Tani Sektor Perikanan
 Pengembangan jaringan jalan ini menghubungkan sistem keterkaitan agribisnis dari sektor ini. Jalan yang dikembangkan selain menuju ke pusat-pusat pelayanan agribisnis, juga dikembangkan kearah wilayah pendukungnya. Untuk itu pengembangan jaringan jalan antara lain dikembangkan menuju Surabaya, Malang, Mojokerto, Pasuruan melalui Desa Sumber Brantas menuju Mojokerto, pasuruan dan Suarabaya dan Giripurno menuju Kabupaten dan Kota Malang dengan peningkatan kelas jalan tembus.
- Rencana Jalan Tani Sektor Tanaman Hias
 Pengembangan jaringan jalan ini menghubungkan sistem keterkaitan agribisnis dari sektor ini. Jalan yang dikembangkan selain menuju ke pusat-pusat pelayanan agribisnis, juga dikembangkan kearah wilayah pendukungnya. Untuk itu pengembangan jaringan jalan antara lain dikembangkan menuju Surabaya, Malang, Mojokerto melalui Desa Sumber Brantas dan Giripurno dengan peningkatan kelas jalan tembus.

- **Hierarki Jalan Usaha Tani**

Adapun jalan usaha tani yang direncanakan di kawasan agropolitan, Kecamatan Bumiaji dengan standart yang direncanakan untuk pembagian jalan meliputi :

- **Kolektor Sekunder**

Jalan Kolektor Sekunder ini direncanakan pada ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Bumiaji dengan Kecamatan Batu yang melalui Desa Gunungsari. Fungsi jalan ini mendukung dalam jalan usaha tani untuk sektor pertanian tanaman pangan, dan sektor agroindustri. Untuk rencana jalan kolektor sekunder ini minimal lebar jalan adalah 9-14 meter, perkerasan jalan 7-12 m dengan kecepatan rata-rata 40 km/jam. Yang direncanakan yaitu :

- Jalan yang mengubungan klaster tanaman pangan, klaster perikanan, klaster tanaman hias, klaster peternakan, klaster tanaman buah dan klaster sayuran.
- Jalan yang menghubungkan kecamatan Bumiaji dengan Kota Batu dan Kecamatan lainnya.

- **Lokal Sekunder**

Jalan lokal sekunder ini yang menghubungkan desa-desa hinterland dari klaster-klaster pertanian yang terdapat di kawasan agropolitan, Kecamatan Bumiaji yaitu :

- Jalan yang mengubungkan klaster tanaman pangan, klaster peternakan dan klaster tanaman hias.

- **Lingkungan**

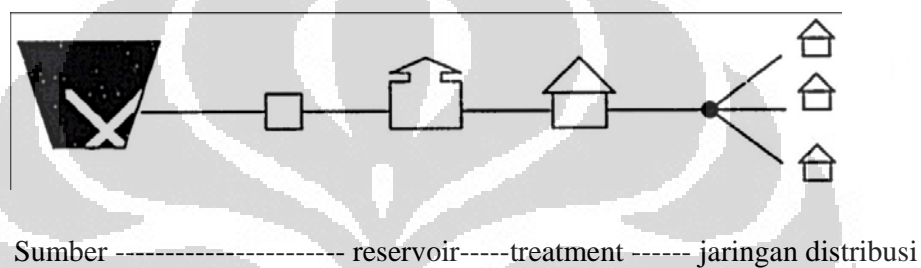
Jalan lingkungan ini adalah jalan yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan pengolahan. Dengan lebar jalan 6,5 m, perkerasan jalan 4 m dengan kecepatan rata-rata 15 km/jam.

b. Rencana Sistem Jaringan Air Bersih

Untuk meningkatkan layanan fasilitas air bersih di kawasan agropolitan, Kecamatan Bumiaji, utamanya daerah-daerah yang mengalami kesulitan air maka diperlukan upaya-upaya penanganan seperti :

- Perlindungan terhadap sumber-sumber mata air, dan daerah resapan air
- Perluasan daerah tangkapan air (catchment area)
- jaringan air bersih hingga ke wilayah perdesaan.
- Peningkatan layanan dan pengelolaan air bersih oleh PDAM dengan peningkatan sistem

Rencana penyediaan air bersih secara perpipaan dapat dilihat pada Gambar berikut ini:



Gambar 5.9
Rencana Sistem Jaringan Air Bersih

Sumber :

1. Mata Air
2. Air Sungai
3. Air Danau/ Bandungan
4. Sumur Dalam
5. Sumur Sentral/Gali → Dikelola oleh setiap konsumen sendiri, tanpa jaringan Kebocoran terjadi pada:

} Dikelola oleh PDAM

1. Pada pompa
2. Distribusi sekunder
3. Distribusi tersier

Sistem Jaringan mempengaruhi kapasitas sumber, jumlah konsumen dan prosentase kebocoran (semakin rumit sistem jaringan maka tingkat kebocoran semakin besar). Sumur air dalam sangat memungkinkan untuk keperluan industri. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menangani Air Bersih adalah : Sumber air (baik letak, kapasitas, kualitas, dan sebagainya), ketinggian tanah dan kebocoran.

Rencana Keterlibatan masyarakat dalam penyediaan air bersih adalah dengan Penyediaan air bersih untuk kawasan agropolitan, Kecamatan Bumiaji harus didesain sedemikian rupa sehingga dapat diterima oleh masyarakat lokal di kawasan agropolitan, Kecamatan Bumiaji. Nilai-nilai yang berlaku pada tingkat lokal perlu diperhatikan seperti adat istiadat dan agama. Proyek penyediaan air bersih tersebut juga harus melibatkan masyarakat. Minimal dengan menggunakan material dan tenaga kerja lokal yang tersedia. Desainnya dipilih sedemikian rupa sehingga dapat diterima masyarakat dan teknologi yang digunakan pun perlu disesuaikan dengan tingkat pengetahuan di masyarakat kawasan agropolitan, Kecamatan Bumiaji. Apabila Pengusahaan air bersih merupakan swadaya masyarakat dengan bekerjasama dengan swasta, maka pengelolaannya dapat berbentuk koperasi atau sejenis.

c. Rencana Sistem Jaringan Irigasi

Irigasi memiliki peranan penting dalam usaha untuk meningkatkan produksi pertanian. Dimana, keberadaan sarana irigasi sangat mendukung perkembangan sektor pertanian, terutama daerah pertanian tanaman pangan. Kebutuhan air irigasi pada wilayah Kecamatan Bumiaji juga akan tergantung pada banyaknya curah hujan. Dalam artian bahwa curah hujan yang cukup akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil – hasil pertanian. Pada saat musim kemarau sistem pembagian air harus sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak akan mengurangi produktivitas hasil - hasil pertanian. Mayoritas sumber air Irigasi di Kecamatan Bumiaji didukung dari sungai yang ada, selebihnya mendapatkan air irigasi dari mata air secara langsung. Namun sumber mata air tersebut ditampung di waduk lapangan, artinya waduk tersebut tidak mempunyai sumber air yang diandalkan (base flow) seperti dari sumber atau sungai yang besar, tetapi merupakan penampungan air hujan. Sehingga aliran yang dihasilkan dapat digolongkan kurang memadai. Oleh karena itu kendala yang ada di Wilayah Irigasi adalah kekurangan air. Selain itu, untuk mengoptimalkan pelayanan aliran irigasi utamanya untuk daerah yang belum terlayani aliran irigasi maka, upaya pengembangan pelayanan irigasi dilakukan dengan cara :

- Melakukan perlindungan terhadap sumber-sumber mata air;

- Melakukan perlindungan terhadap daerah aliran air, baik itu saluran irigasi, serta daerah aliran sungai;
- Mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran-saluran irigasi di masing – masing klaster;
- Pembangunan dan perbaikan pintu-pintu air di masing-masing klaster;
- Peningkatan Irigasi non teknis dan semi teknis ke Irigasi Teknis di Klaster Pertanian tanaman pangan;
- Pemeliharaan irigasi teknis di klaster pertanian tanaman pangan (sawah irigasi teknis).

Selain itu, adanya Rencana Pemerintah Kota Batu untuk Program JIDES/JITUT, dengan Pedoman Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) yaitu :

1. ***Saluran pembawa tersier***

Diperlukan sekitar 15 sampai 25 meter untuk 1 hektar areal irigasi. (15 – 25 m/ha).

2. ***Saluran pembawa kuarter***

Diperlukan sekitar 40 sampai 60 meter untuk 1 hektar areal irigasi. (40 – 60 m/ha).

3. ***Bangunan bagi***

Bangunan bagi ini diperlukan pada segenap percabangan saluran tersier. Jadi terdapat kira-kira 1 bangunan untuk 10 hektar.

4. ***Bangunan terjun***

Jika kemiringan rata-rata lahan adalah 10 %, maka hal itu secara kasar menunjukkan bahwa 1 hektar memerlukan $10/2 = 5$ bangunan terjun (5 buah/ha).

5. ***Talang***

Jumlah talang didalam jaringan pembawa tingkat usahatani biasanya sedikit sekali. Apabila tidak perlu benar, tidak akan ada talang didalam daerah irigasi tersebut.

6. ***Bangunan Lintasan***

Sebagai perkiraan kasar adalah sekitar satu bangunan lintasan untuk 20 ha areal irigasi (satu buah/20 ha).

7. *Bangunan akhir*

Pada ujung terakhir setiap saluran kuarter biasanya terdapat sebuah bangunan akhir. Dilahan terjal untuk 10 ha harus ada kira-kira satu buah (satu buah/10 ha).

8. *Alat ukur air*

Pada ujung awal setiap saluran tersier diperlukan sebuah alat ukur air. Jumlah yang diperlukan sekitar 1 unit alat ukur per 100 ha 1).

Dilihat dari Pedoman JIDES dan JITUT, maka Rencana Jaringan Irigasi di Kawasan Agropolitan Kota Batu adalah :

1. Saluran pembawa tersier = 25 m x 805 ha = 20125 m
2. Saluran pembawa kuarter = 60 m x 805 ha = 48300 m
3. Bangunan bagi = 1 x 805/10 = 81 buah
4. Bangunan terjun = 5/2 x 805 = 2012 buah
5. Talang, sesuai dengan desain teknis terakhir.
6. Bangunan lintas = 1 x 805/20 = 41 buah
7. Bangunan akhir = 1 x 805/10 = 81 buah
8. Alat ukur air = 1 x 805/100 = 9 buah

d. Rencana Sistem Jaringan Listrik

Untuk mendukung kegiatan masyarakat diperlukan adanya pengembangan sarana-sarana pendukung salah satunya adalah listrik. Secara umum pelayanan energi listrik di wilayah kawasan agropolitan Kecamatan Bumiaji telah menjangkau wilayah - wilayah perdesaan. Namun untuk mengoptimalkan pelayanan energi listrik pada masa depan, diperlukan adanya peningkatan pelayanan utamanya pada daerah - daerah yang menjadi pusat pertumbuhan wilayah dan wilayah yang menjadi target pengembangan. Adapun pengembangan pelayanan energi listrik yang dilakukan antara lain :

- Peningkatan daya energi listrik pada daerah-daerah pusat pertumbuhan dan daerah pengembangan berupa pembangunan dan penambahan gardu-gardu listrik.
- Penambahan dan perbaikan sistem jaringan listrik pada daerah-daerah yang belum terlayani.

- Untuk meningkat dan mengoptimalkan pelayanan listrik sehingga terjadi pemerataan pelayanan diseluruh wilayah kawasan agropolitan Kecamatan Bumiaji, maka dapat diasumsikan bahwa setiap KK akan memperoleh layanan jaringan listrik, sehingga tidak ada masyarakat yang belum terlayani.
- Pengembangan jaringan dengan sistem mikrohidro

e. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Jenis utilitas telepon merupakan salah satu sarana komunikasi yang sangat dibutuhkan oleh penduduk. Selain untuk melayani kebutuhan rumah tangga, utilitas telepon ini juga sangat dibutuhkan pada fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti: fasilitas pendidikan, perkantoran, fasilitas kesehatan, dan sebagainya.

Untuk melayani kebutuhan telekomunikasi penduduk di kawasan agropolitan Kecamatan Bumiaji berupa telepon ini, dilayani oleh PT. TELKOM. Kebutuhan telepon ini meliputi jaringan telepon dan sarana komunikasi lainnya seperti telepon umum (koin dan kartu) dan wartel. Untuk jaringan telepon merupakan jaringan penghubung ke sambungan telepon di tiap rumah, fasilitas umum atau fasilitas sosial. Distribusi jaringan telepon ini secara keseluruhan masih belum telah merata di wilayah kawasan agropolitan Kecamatan Bumiaji. Rencana jaringan tekekomunikasi yang dikembangkan di kawasan agropolitan Kecamatan Bumiaji terdiri dari :

- Menerapkan teknologi telematika berbasis teknologi modern;
- Pembangunan teknologi telematika pada wilayah - wilayah pusat pertumbuhan;
- Membentuk jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap wilayah pertumbuhan; serta
- Mengarahkan untuk memanfaatkan secara bersama pada satu tower BTS minimal untuk 4 operator telepon seluler dengan pengelolaan secara bersama pula

f. Rencana Sistem Prasarana Lingkungan

Rencana sistem prasarana lingkungan yang ada di Kawasan agropolitan Kecamatan Bumiaji dibagi menjadi beberapa prasarana lingkungan meliputi: rencana persampahan dan drainase. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari penjelasan dibawah ini:

a) Rencana Persampahan

Sumber sampah dan sistem pembuangan/pemanfaatan sampah di Kawasan agropolitan Kecamatan Bumiaji:

- a. Sampah organik, yaitu jenis sampah yang bisa diproses oleh alam (dapat didaur ulang secara alami), misalnya makanan, dedaunan, dan sebagainya.
- b. Sampah an organik, yaitu jenis sampah yang tidak bisa didaur ulang secara alami. Misalnya sampah plastik, porselin/ pecah belah, besi/ logam dan sebagainya.

c. Sumber sampah

Sampah Rumah Tangga:

- Merupakan sampah yang paling penting (untuk ditangani)
- Kebanyakan berupa sampah organik
- Hasil (sampah) manusia

Sampah non domestik berupa:

- Sampah organik
- Sampah an organik

Sampah Industri, berupa:

- Sampah organik dan an organik
- Mengandung bakteri tertentu, maka diperlukan studi amdal.

Ada dua jenis sistem pembuangan secara umum (seperti halnya air limbah) yaitu:

- **Sistem pembuangan *On Site***

Merupakan sistem pembuangan sampah dengan cara dibuang di lokasi sekitar tempat tinggal. Biasanya dilakukan, dengan dibakar (an organik) atau ditimbun (organik).

Syarat sistem ini:

- Lahan yang tersedia cukup
- Jumlah sampah tidak terlalu besar
- Harus dikerjakan sendiri/ ditangani sendiri-sendiri

Sistem ini tidak bisa diterapkan di daerah atau di kawasan pemukiman yang padat, karena:

- Lahan yang tersedia terbatas
- Pencemaran lingkungan karena proses penimbunan menimbulkan bau busuk dan pembakaran mengganggu lingkungan sekitarnya (asap).

Sistem ini pun memiliki sisi positif maupun negatif sebagai berikut:

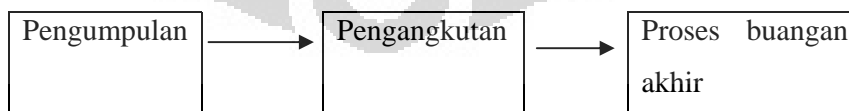
Tabel 5.12
Sistem Positif dan Negatif Rencana Persampahan

POSITIF	NEGATIF
<ul style="list-style-type: none"> • Mudah, praktis dan efektif dalam pengelolaannya • Tidak memerlukan lahan khusus untuk pengumpulannya (TPS/TPA), tidak memerlukan peralatan tertentu (Gerobak/ becak sampah, container dan sebagainya). • Tidak membutuhkan biaya yang mahal (murah dan mudah dalam pelaksanaannya). 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak sesuai / cocok untuk daerah atau kawasan yang padat. • Pencemaran lingkungan karena proses penimbunan menimbulkan bau busuk dan pembakaran mengganggu lingkungan sekitarnya (asap). • Hanya bisa diterapkan untuk sampah-sampah rumah tangga biasa, dalam jumlah tidak terlalu banyak dan tidak mengandung bahan kimia atau penyakit yang membahayakan

Sumber: Bappeda Kota Batu, 2010

- **Sistem pembuangan *Off Site***

Merupakan sistem pembuangan sampah melalui sistem dan proses tertentu, seperti dibawah ini:

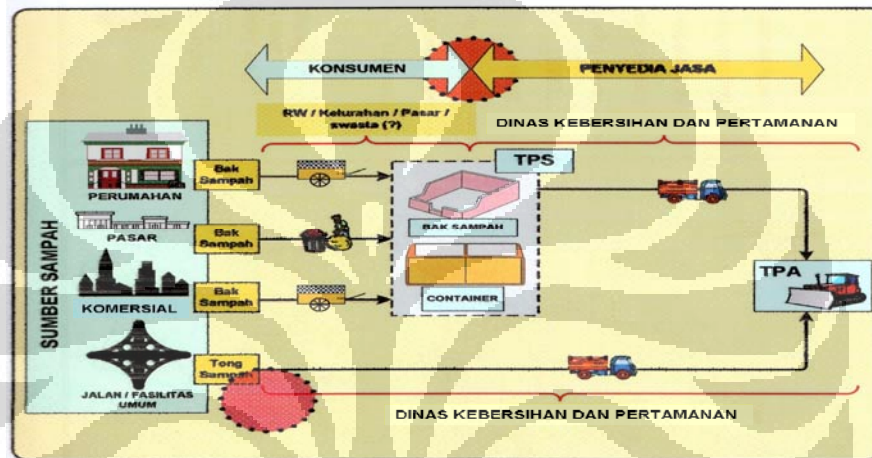


Syarat sistem ini:

- Terdapat prasarana penunjang (bak sampah, gerobak/ becak sampah, container, dsb)
- Ada pengelola (pemerintah, swadaya masyarakat, swasta)
- Teknik operasional

Rencana persampahan di Kecamatan Bumiaji yaitu untuk Rencana TPA di tempatkan di Dusun Sebrang Bendo Desa Giripurno, adapun pengembangan rencana sistem persampahan yaitu :

- Rencana operasional pengelolaan persampahan masing-masing desa
- Pengembangan sistem TPS secara disposal di masing-masing kecamatan
- pengembangan lokasi TPA di Desa Giripurno – Sebrang bendo



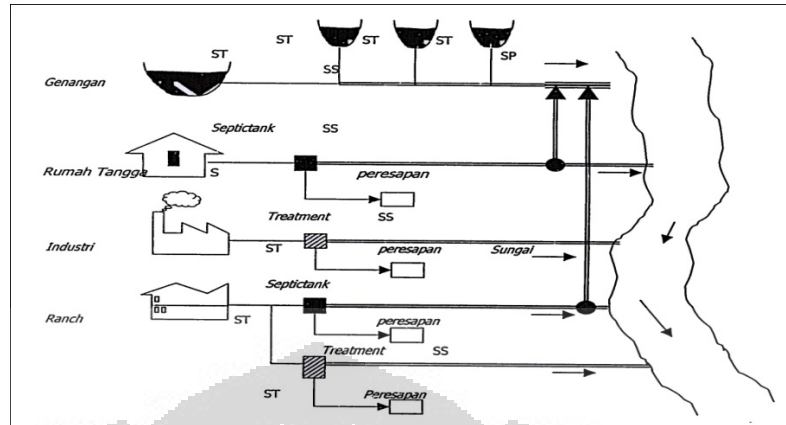
Sumber: Bappeda Kota Batu, 2010

Gambar 5.10
Rencana Sistem Persampahan

b) Rencana Kebutuhan Drainase

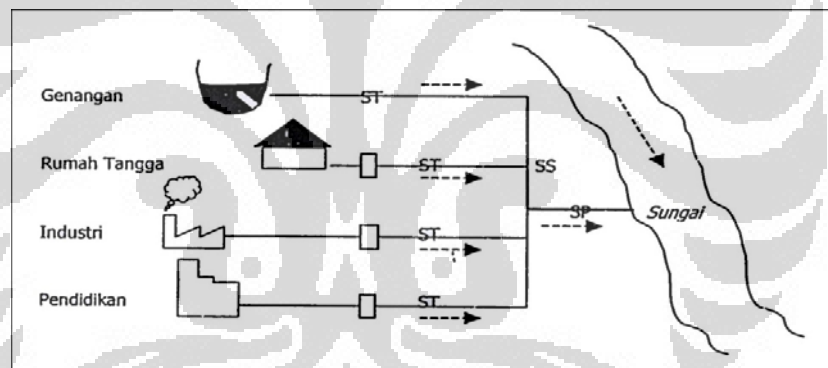
- **Sistem Jaringan**

Penanganan drainase yang terpenting adalah masalah teknologi dan biaya, karena hal ini besar pengaruhnya dalam pengadaannya. Dibawah ini akan diperlihatkan sistem jaringan sederhana (langsung mengalir ke sungai):



Sumber: Bappeda Kota Batu, 2010

Gambar 5.11
Sistem Jaringan Drainase/ Sanitasi



Sumber: Bappeda Kota Batu, 2010

Gambar 5.12
Sistem Jaringan dengan treatment

• Pengolahan Air Limbah

Sumber air Limbah antara lain berasal dari rumah tangga, publik (pasar, pendidikan, industri dan sebagainya). Dalam pengolahan air limbah dikenal ada dua macam teknik yaitu:

1. *On Site*

Pengolahan air limbah secara sederhana, biasanya menggunakan *septictank*. Penggunaan cara ini mempunyai dampak, positif maupun negatifnya, yaitu sebagai berikut :

Tabel 5.13
Sistem Positif dan Negatif Rencana Air Limbah On Site

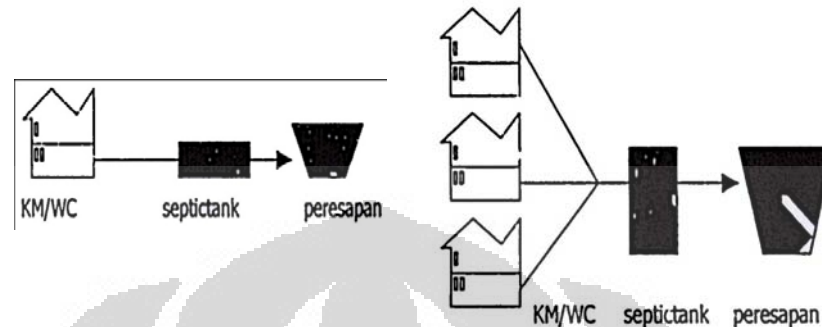
POSITIF	NEGATIF
<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memakan biaya yang besar (murah) • Sistemnya sederhana • Praktis dan mudah dalam pembuatannya 	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas terbatas, butuh buangan akhir Membutuhkan ruang khusus • Membutuhkan lahan yang luas (<i>septictank</i> tidak boleh berdekatan dengan sumber air bersih, jarak lebih kurang 10 m) • Untuk kawasan yang padat, tidak efektif dan efisien, seringkali bermasalah terutama dalam hal pencemaran dan penyebaran wabah penyakit menular)

Sumber: Bappeda Kota Batu, 2010

Sistem *On Site* masih dibedakan atas sistem *On Site* keluarga dan sistem komunal. Untuk rumah tunggal dengan halaman dan pekarangan yang luas sistem *On Site* keluarga bisa diterapkan dengan baik. Namun untuk rumah dengan tipe deret, *maizonet/ ruko* sistem ini tidak dapat diterapkan dan lebih bagus dengan sistem *On Site* yang komunal (walaupun lebih bagus lagi menggunakan sistem *Off Site*, tetapi karena terbentur biaya yang mahal biasanya banyak yang menerapkan sistem *On Site* komunal).

ON SITE KELUARGA

ON SITE KOMUNAL



Sumber: Bappeda Kota Batu, 2010

Gambar 5.13
Pengolahan limbah on site

2. Off Site

Pengolahan air limbah secara sistematis, menyangkut beberapa sistem kawasan, sistemnya tidak setempat, biasanya menggunakan rolling. Penggunaan cara ini mempunyai dampak positif maupun negatifnya, yaitu sebagai berikut :

Tabel 5.14
Sistem Positif dan Negatif Rencana Air Limbah Off Site

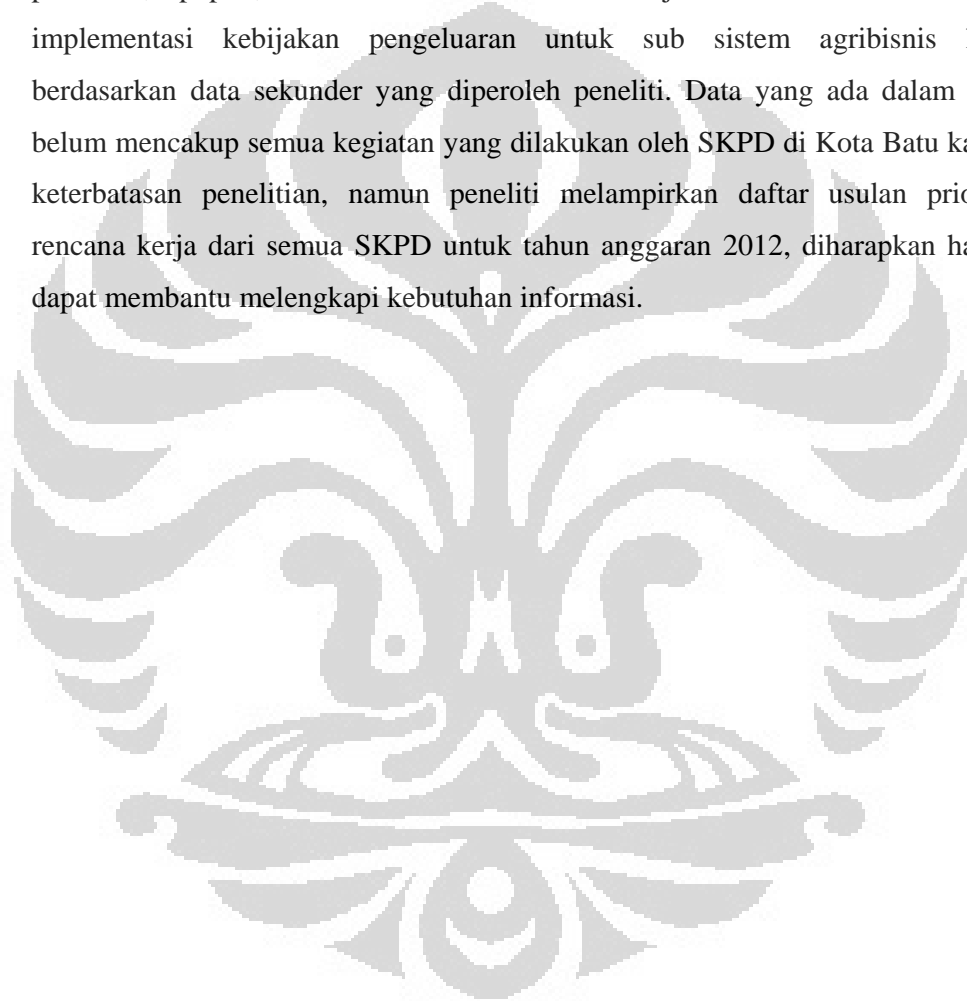
POSITIF	NEGATIF
<ul style="list-style-type: none"> • Daya tampung/ kapasitas cukup besar • Tidak terlalu membutuhkan lahan yang luas • Proses daur ulangnya bagus (dampak terhadap pencemaran lingkungan bisa dikendalikan dengan baik) • Sangat cocok untuk daerah atau kawasan yang padat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mudah dikerjakan, membutuhkan teknologi canggih karena dikerjakan dengan sistem modem. • Kontur kawasan harus bagus minimal 4% • Butuh biaya awal yang besar (mahal), karena menggunakan sistem jaringan modern

Sumber: Bappeda Kota Batu, 2010

5.1.3 Implementasi Kebijakan Pengeluaran pada Kawasan Agropolitan Kota Batu

5.1.3.1 Implementasi Kebijakan Pengeluaran untuk Sub Sistem Agribisnis Hulu

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam lingkup sub sistem agribisnis hulu (*up stream agribusiness*) yang mencakup: mesin, peralatan pertanian, pupuk, dan lain-lain. Berikut disajikan dalam tabel resume implementasi kebijakan pengeluaran untuk sub sistem agribisnis hulu, berdasarkan data sekunder yang diperoleh peneliti. Data yang ada dalam tabel belum mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh SKPD di Kota Batu karena keterbatasan penelitian, namun peneliti melampirkan daftar usulan prioritas rencana kerja dari semua SKPD untuk tahun anggaran 2012, diharapkan hal ini dapat membantu melengkapi kebutuhan informasi.



Tabel 5.15
Implementasi Kebijakan Pengeluaran untuk Sub Sistem Agribisnis Hulu

No.	SKPD / Bidang / Seksi (Implementor)	Program	Sektor	Lokasi	Sasaran	Sumber Dana	Output	Outcome
1	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Tanaman Pangan dan Holtikultura/ Holtikultura	Pengembangan tanaman pangan/holtikultura organik	Bibit Pupuk Saprotan	Desa/kecamatan di tiga kecamatan se Kota Batu	Kelompok Tani / Gapoktan	Dana APBD II	<ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran bantuan sarana produksi pertanian (bibit sayur, bibit palawija, bibit apel, bibit jeruk Keprok Batu 55, bibit padi, bibit krisan, bibit anggrek, pupuk organik dan pestisida organik) • Penyaluran bantuan prasarana pertanian (alat klimatologi, pembangunan rumah kompos dan mesin pengolah pupuk organik, serta pembangunan kios). 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian melalui peningkatan penggunaan bibit berkualitas, pupuk dan pestisida organik di kalangan petani b. Meningkatnya produk pertanian yang aman untuk dikonsumsi c. Terpenuhinya kebutuhan prasarana produksi pertanian d. Mendukung pengembangan potensi komoditas spesifik lokasi (Jeruk Keprok Batu 55) e. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani
2	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Tanaman Pangan dan Holtikultura/ Holtikultura	Pengembangan intensifikasi pekarangan	Bibit	Kec. Batu, Kec. Bumiaji, Kec. Junrejo	Anggota PKK di tiga kecamatan di wilayah Kota Batu	Dana APBD II	Penyaluran bantuan bibit tanaman biofarmaka (lidah buaya, jeruk nipis, jambu biji)	Tersedianya bibit biofarmaka dalam rangka optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan yang berguna untuk membantu meningkatkan kesehatan dan pendapatan keluarga

								petani
3	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Tanaman Pangan dan Holtikultura/ Holtikultura	Bantuan Langsung benih Unggul (BLBU)	Bibit	Kecamatan Junrejo, Kecamatan Batu, dan Kecamatan Bumiaji Kota Batu	Kelompok Tani Tanaman Pangan di daerah produksi padi yang Produktivitas padi didaerah tersebut masih dapat ditingkatkan dan ketersediaan air cukup terjamin serta mampu mengelola bantuan pemerintah secara berkesinambungan guna penguatan kelembagaan kelompok tan	Dana APBN-P	Penyaluran bantuan benih unggul tanaman pangan berupa 3.975 kg benih padi hibrida dan 6.250 kg benih padi non hibrida	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan produksi dan produktivitas padi melalui penggunaan benih unggul bersertifikat dalam rangka memperkuat ketahanan pangan b. Mengoptimalkan hasil Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) c. Menjamin terpenuhinya kebutuhan benih bermutu secara memadai dan berkesinambungan d. Meningkatkan kesadaran petani akan penggunaan benih unggul dan bermutu e. Penerapan teknologi budidaya tanaman padi f. Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Petani
4	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Tanaman Pangan dan Holtikultura/ Holtikultura	Bantuan Benih dan Pupuk Organik Cair	Bibit Pupuk	Kecamatan Junrejo, Kecamatan Batu, dan Kecamatan Bumiaji Kota Batu	Kelompok Tani / Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) di daerah pengembangan kawasan hortikultura, khususnya buah dan sayuran	Dana APBN-P, satuan kerja Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian	Penyaluran bantuan benih berkualitas varietas unggul dan pupuk organik cair untuk mendukung upaya pengembangan kawasan hortikultura, khususnya buah dan sayuran	Meningkatkan ketersediaan benih dan pupuk organik untuk mendukung pengembangan kawasan hortikultura

5	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Tanaman Pangan dan Holtikultura/ Holtikultura	Intensifikasi pekarangan	Bibit	Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu	Ibu / wanita tani yang tergabung dalam kelompok PKK Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu	Dana APBD-I	Penyerahan bantuan bibit biofarmaka dan rak vertikultur, terlaksananya percontohan tanaman sayuran, buah-buahan dan biofarmaka secara langsung di lahan pekarangan maupun secara vertikultur di 7 kelompok kader Posyandu dari 8 kelompok PKK RW Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya hasil intensifikasi pekarangan berupa aneka produk hortikultura baik sayur, buah maupun biofarmaka untuk memenuhi kebutuhan gizi dan menambah pendapatan keluarga b. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan di lingkungan pemukiman masyarakat c. Kelestarian lingkungan terjaga d. Peningkatan pendapatan petani
6	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Tanaman Pangan dan Holtikultura/ Perlindungan Tanaman dan Pengendalian Hama	Pengujian Laboratorium Pertanian	Pestisida	Kecamatan Junrejo, Kecamatan Batu, dan Kecamatan Bumiaji Kota Batu	<ul style="list-style-type: none"> a. Komoditi hortikultura di wilayah Kota Batu (jeruk, andewi, seledri, bawang prey, petsai, brokoli). Tiap komoditi diambil 2 contoh dari desa yang berbeda b. Tanah di 3 kecamatan di wilayah Kota Batu, masing-masing kecamatan diambil 2 contoh 	Dana APBD II	Pengujian residu pestisida pada hasil pertanian di wilayah Kota Batu Pengujian komposisi unsur pupuk organik di pasaran Kota Batu	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya data residu pestisida pada beberapa produk pertanian (hortikultura) di Kota Batu sebagai gambaran tingkat pemakaian pestisida pada pengelolaan budidaya pertanian dan kualitas produk pertanian yang ada di Kota Batu b. Tersedianya data jenis pestisida yang banyak digunakan petani hortikultura di Kota Batu c. Memberikan informasi

					tanah c. Unit-unit produsen pupuk lokal (pupuk organik/kompos) yang diproduksi dan/atau yang beredar di Kota Batu		tentang data dasar kadar unsur pupuk organik sebagai acuan petani dalam memilih berbagai produk pupuk organik yang beredar di pasaran Kota Batu	
7	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Tanaman Pangan dan Holtikultura/ Sarana dan Prasarana	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	alsintan	kelompok tani dibidang pertanian dan peternakan dengan dasar proposal yang diajukan ke Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok Tani "SUMBER HASIL I" , (M. Sururi), Alamat : Jl. Cempaka No. 38 Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu • Kelompok Tani "TIRTO BAROKAH", (Sudarsono), Alamat : Dusun Toyomerto Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu • Kelompok Tani "SRI MULYO III", (Ridwan), Alamat : Jl. Nurhadi No. 16/20 Dusun Cangar Desa 	Dana APBD II	Pengadaan sarana dan prasarana berupa alsintan (masing-masing 1 unit): <ol style="list-style-type: none"> 1. Hand Tractor 2. Chopper 3. APPO (Alat Pengolah Pupuk Organik) 	Terdistribusikannya Sarana dan Prasarana Alat dan Mesin Pertanian ke Kelompok Tani

					Bulukerto Kecamatan Bumiaji			
8	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Tanaman Pangan dan Holtikultura/ Sarana produksi dan permodalan	Pengembangan bibit unggul pertanian dan perkebunan	Bibit	Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Junrejo	petani buah dan sayur yang tergabung dalam gabungan kelompok tani / kelompok tani yang berada di wilayah Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Junrejo	Dana APBD II	<p>Terdistribusikannya bibit tanaman buah-buahan dan sayuran yang terdiri dari :</p> <p>a. Bibit Buah-buahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bibit Jeruk Keprok Batu 55 (5.000 phn) - Bibit Apel (10.000 phn) - Bibit Anggur (2.000 phn) <p>b. Bibit Sayuran (1 paket)</p>	<p>Terpenuhinya kebutuhan bibit buah-buahan dan sayuran</p> <p>Peningkatan kualitas produk tanaman buah-buahan dan sayuran</p> <p>Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani tanaman buah-buahan dan sayuran</p>
9	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Tanaman Pangan dan Holtikultura/ Peternakan	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	Bibit ternak kelinci	Dusun Lemah Putih Desa Sumberbrantas Kec. Bumiaji Dusun Jeding Desa Junrejo Kec. Junrejo Dusun Payan Desa Puntan Kec. Bumiaji Dusun Santrean Desa Sumberejo Kec. Batu Jl. Anggrek Atas No.5 Desa	Kelompok Tani Karya Makmur 29 Kelompok Tani Sri Sejati I Kelompok Tani Sumber Mulya Kelompok Tani Gesang Kelompok Tani Gunung Biru	Dana APBD II	Pemberian bantuan ternak kelinci	Penambahan modal untuk kelompok tani kelinci

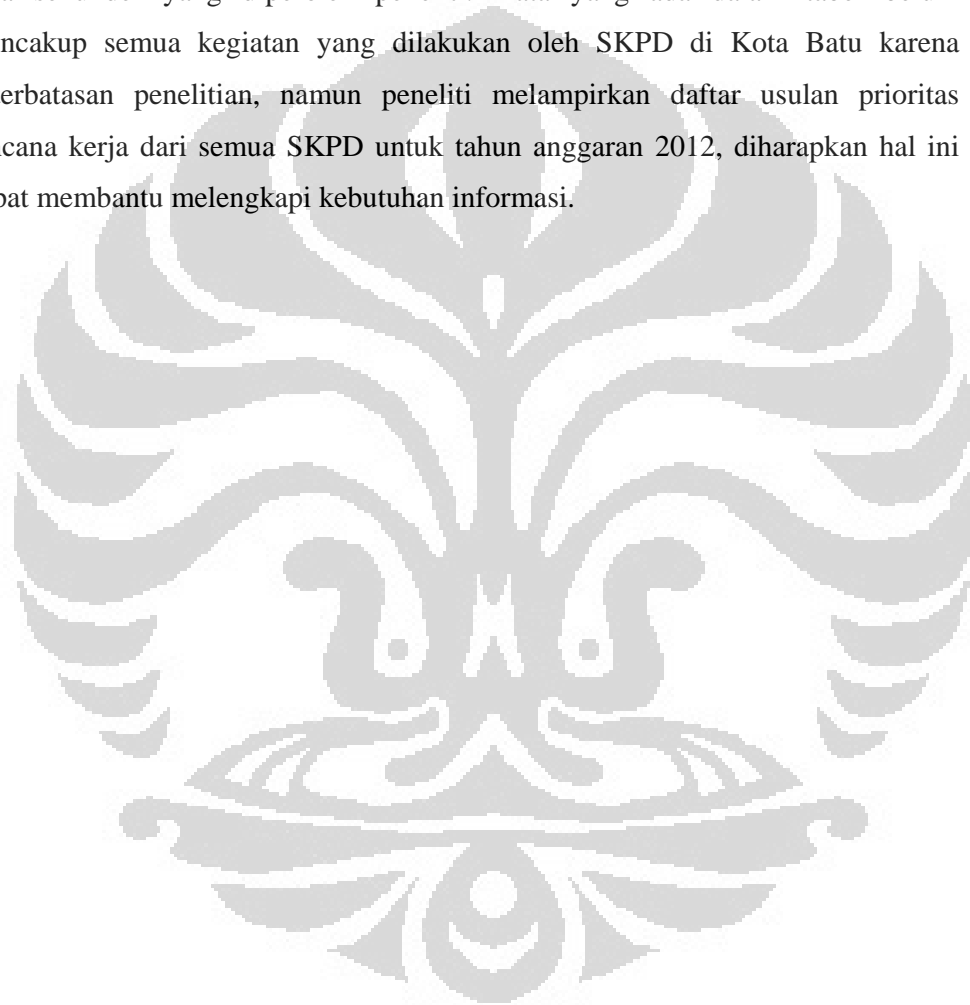
				Pesanggrahan Kec. Batu Dusun Gerdu Desa Tulungrejo Kec. Bumiaji				
10	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Tanaman Pangan dan Holtikultura/ Peternakan	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	Bibit ternak kelinci	<ul style="list-style-type: none"> Dusun Beru Desa Bumiaji Kec. Bumiaji Dusun Gangsiran Desa Tlekung Kec. Junrejo Dusun Srebet Desa Pesanggrahan Kec. Batu 	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok Tani Abimanyu Kel. Tani Sumber Harapan Mulya Kelompok Tani Margo Joyo 	Dana APBD II	Pemberian bantuan ternak kambing Peranakan Etawa/PE	Penambahan modal untuk kelompok tani kelompok tani kambing perah/PE
11	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Tanaman Pangan dan Holtikultura/ Peternakan	Penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan pembibitan peternakan	Mesin Chopper	<ul style="list-style-type: none"> Dusun Binangun Desa Bumiaji Kec. Bumiaji Dusun Gondang Desa Tulungrejo Kec. Bumiaji Dusun Jantur Desa Gunungsari Kec. Bumiaji 	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok Tani Bumiaya II Kelompok Tani Makmur Abadi Kelompok Tani Sido Maju 	Dana APBD II	Penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan pembibitan peternakan melalui bantuan mesin chopper	Peningkatan produksi peternakan
12	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Tanaman Pangan dan Holtikultura/ Peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Bibit	24 Desa yang berada di wilayah Kota Batu	Kelompok tani yang punya hubungan dengan pabrik rokok terutama pailit yang tersebar di wilayah	Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT)	Pensistribusian ternak kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pendapatan petani ternak sapi, kambing, itik dan kelinci Pemberdayaan masyarakat/kelompok

					Kota Batu			tani
13	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Kehutanan/ Seksi Perkebunan	Pengembangan hasil hutan bukan kayu	Pupuk	Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji Desa Punten, Kecamatan Bumiaji Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu Desa Sumberejo, Kecamatan Batu Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo	Kelompok tani LMDH	Dana APBD II	Masyarakat LMDH mendapatkan bantuan pupuk kandang, pupuk fosfat dan ajir sebagai penunjang keberhasilan tanaman kopi dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Pupuk kandang sebanyak 10.500 Kg masing-masing demplot @ 1.750 Kg • Pupuk Fosfat sebanyak 5.250 Kg, masing-masing demplot @ 875 Kg • Ajir sebanyak 21.000 buah, masing-masing demplot @ 3.500 Kg 	memberikan peluang kepada masyarakat sekitar hutan dalam memanfaatkan lahan di bawah tegakan untuk mengalihkan komoditi tanaman semusim dengan komoditi yang tahan naungan dalam rangka menjaga konservasi tanah
14	Dinas Koperindag/ Program Pengembangan UKM	Fasilitas bagi industry kecil dan menengah terhadap pemanfaatan Sumber daya	Alat pembuatan makanan dan minuman	Kota Batu	120 orang	DAU	Pelatihan dan pendampingan pembuatan makanan minuman dan bantuan peralatan	Menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan wirausaha baru

Sumber : data sekunder, diolah peneliti

5.1.3.2 Implementasi Kebijakan Pengeluaran untuk Sub Sistem Usaha Tani (*On Farm*)

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam lingkup sub sistem usaha tani yang mencakup: usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Berikut disajikan dalam tabel resume implementasi kebijakan pengeluaran untuk sub sistem usaha tani, berdasarkan data sekunder yang diperoleh peneliti. Data yang ada dalam tabel belum mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh SKPD di Kota Batu karena keterbatasan penelitian, namun peneliti melampirkan daftar usulan prioritas rencana kerja dari semua SKPD untuk tahun anggaran 2012, diharapkan hal ini dapat membantu melengkapi kebutuhan informasi.



Tabel 5.16
Implementasi Kebijakan Pengeluaran untuk Sub Sistem Usaha Tani (*On farm*)

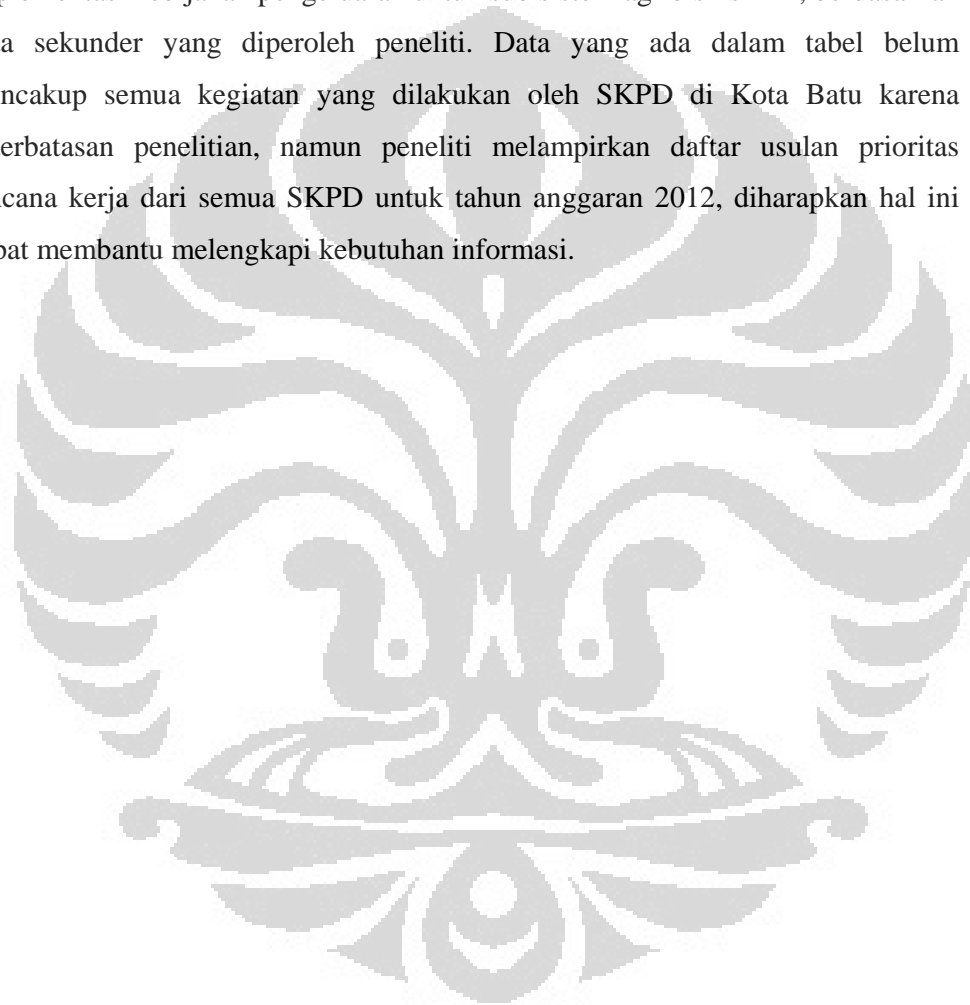
No.	SKPD / Bidang / Seksi (Implementor)	Program	Sektor	Lokasi	Sasaran	Sumber Dana	Output	Outcome
1	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Kehutanan/ Seksi Bina Produksi, Penatagunaan Hutan dan Rehabilitasi Lahan	Penanaman pohon pada kawasan hutan industry dan hutan wisata	Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Desa Sisir Kecamatan Batu Desa Ngaglik Kecamatan Batu Desa Tlekung Kecamatan Junrejo 	Kawasan hutan kota di wilayah Kota Batu	Dana APBD II	Penyusunan DED Hutan Kota Batu	Terwujudnya hutan kota sebagai tempat pelestarian plasma nutfah, penyaring dan penyerap partikel padat, timbal, debu serta peredam kebisingan dan pelestarian sumber daya alam serta air tanah
2	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Kehutanan/ Seksi Perkebunan	Pengembangan diversifikasi tanaman	Perkebunan	Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo	Lahan milik masyarakat khususnya kelompok Tani Sri Sejati II, lahan pertanian kering (tegal/pekarangan)	Dana APBD II	<ul style="list-style-type: none"> Tertanamnya Bibit Empon-empon (Tanaman Jahe) dilahan kelompok tani seluas 1,52 Ha Penyusunan Rancangan Teknis Pengembangan Tanaman Empon-empon sebanyak 5 eksemplar 	<ul style="list-style-type: none"> Mendayagunakan lahan pertanian yang sementara tidak diusahakan Alternatif pengembangan tanaman yang bernilai jual tinggi Melakukan pemberdayaan kelembagaan kelompok tani meningkatkan nilai tambah petani yang sudah ada memperkaya keanekaragaman tanaman obat-obatan
3	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Kehutanan/	Pengembangan hasil hutan	Kehutanan	Desa Sumbergondo,	Kelompok tani LMDH	Dana APBD II	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya demplot pengembangan hasil hutan 	<ul style="list-style-type: none"> Terciptanya perubahan sikap dan perilaku

	Seksi Perkebunan	bukan kayu		Kecamatan Bumiaji Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji Desa Punten, Kecamatan Bumiaji Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu Desa Sumberejo, Kecamatan Batu Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo			<ul style="list-style-type: none"> bukan kayu sebanyak 6 unit masing-masing desa seluas 5 Ha Jenis tanaman yang dikembangkan dalam demplot tersebut adalah tanaman kopi sebanyak 21.950 batang. Masing-masing demplot mendapatkan 3.660 batang 	<ul style="list-style-type: none"> masyarakat dalam pemanfaatan hutan yang mengikuti kaidah konservasi tanah sehingga berfungsi sebagai pelestari sumberdaya alam Membantu meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar hutan tanpa merusak hutan
4	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Kehutanan/ Seksi Perkebunan	Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian (Konservasi DAS Hulu Kawasan perkebunan)		Desa Sumbergondo, Desa Bulukerto, Desa Punten, Desa Giripurno, Desa Gunungsari, Desa Pandanrejo, Desa Sumberejo, Desa Tlekung, Des Beji, Desa Junrejo, Desa Torongrejo	Lahan pertanian Kemiringan lahan 15-35 % Lahan milik kelompok tani yang diusahakan untuk konservasi lahan	Dana APBN	Konservasi lahan kawasan perkebunan seluas 200 Ha dengan komoditas Kopi Arabika sebanyak 58.600 batang dari 25 kelompok tani	<ul style="list-style-type: none"> Mendayagunakan lahan pertanian yang sementara tidak diusahakan Meningkatkan nilai tambah petani yang sudah ada

Sumber : data sekunder, diolah peneliti

5.1.3.3 Implementasi Kebijakan Pengeluaran untuk Sub Sistem Agribisnis Hilir

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam lingkup sub sistem agribisnis hilir yang mencakup: industri pemasaran dan pengolahan, termasuk perdagangan untuk kegiatan ekspor. Berikut disajikan dalam tabel resume implementasi kebijakan pengeluaran untuk sub sistem agribisnis hilir, berdasarkan data sekunder yang diperoleh peneliti. Data yang ada dalam tabel belum mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh SKPD di Kota Batu karena keterbatasan penelitian, namun peneliti melampirkan daftar usulan prioritas rencana kerja dari semua SKPD untuk tahun anggaran 2012, diharapkan hal ini dapat membantu melengkapi kebutuhan informasi.



Tabel 5.17
Implementasi Kebijakan Pengeluaran untuk Sub Sistem Agribisnis Hilir

No.	SKPD / Bidang / Seksi (Implementor)	Program	Sektor	Lokasi	Sasaran	Sumber Dana	Output	Outcome
1	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Tanaman Pangan dan Holtikultura/ Pengolahan dan Pemasaran	Promosi atas hasil produksi pertanian /perkebunan unggulan daerah	Pemasaran	Kota Batu	Gabungan kelompok tani/kelompok tani dan pelaku usaha yang berada di wilayah Kota Batu	Dana APBD II	Pameran produk hasil pertanian/perkebunan Kota Batu baik tingkat nasional maupun tingkat propinsi	Terpromosikannya hasil produk pertanian unggulan daerah sehingga dapat meningkatkan pemasaran produk pertanian Kota Batu
2	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Tanaman Pangan dan Holtikultura/ Sarana dan Prasarana	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Alat olahan minuman kesehatan	kelompok tani dibidang pertanian dan peternakan dengan dasar proposal yang diajukan ke Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu	Kelompok Tani "DEWI SRI", (Sri Rahayu)	Dana APBD II	Pengadaan sarana dan prasarana berupa alat olahan minuman kesehatan : 1. Cup Sealer Semi Otomatis (1 unit) 2. Continues Bend Sealer (1 unit)	Terdistribusikannya sarana dan prasarana alat olahan ke Kelompok Tani Olahan
3			Alat olahan sari strawberry		Kelompok Tani "SUBUR MAKMUR" (Moh Hasan, SE) Alamat : Jl. Brantas No. 8 Kelurahan Ngaglik Kec. Batu		1. Juice Extractor (1 unit) 2. Cup Sealer Semi Otomatis(1 unit) 3. Mesin Wrapping (1 unit) 4. Display Cooler (1 unit)	
4			Alat olahan pengemasa na sayur organik	Kelompok Tani "SUMBER ARUM"	1. Krat Besar (20 buah) 2. Krat Sedang (20 buah) 3. Mesin Wrapping (1 unit)			

				(Purnomo) Alamat : Dusun Santrean Desa Sumberejo Kecamatan Batu	
5		Alat olahan keripik umbi dan lidah buaya		Kelompok Tani "SUMBER REJEKI" (Triningsih) Alamat : Jl. Raya Tlekung No. 386 RT. 03 RW.02 Desa Tlekung Kec. Junrejo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perajang Keripik (1 unit) 2. Oven Pengering (1 unit) 3. Spinner (1 unit) 4. Continues Band Sealer (1 unit) 5. Contues Band Sealer With Gas Filling(1 unit)
6		Alat olahan keripik buah		Kelompok Tani "SRI REJEKI" (Sustiningsih) Alamat : Jl. Wukir Ratawu Dusun Krajan Desa Torongrejo Kec. Junrejo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vacuum Fraying (1 unit) 2. Continues BanGas Filling (1 unit) 3. Krat Besar (15 buah) 4. Krat Sedang (15 buah)
7		Alat olahan susu kedelai		Kelompok Tani "SUMBER MAKMUR I"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Pembuat Susu Kedele (1 unit) 2. Cup Sealer Semi Otomatis

					(M. Rusdi) Alamat : Desa Beji Kec. Junrejo		(1 unit)	
8			Alat olahan sari buah		Kelompok Tani "SUMBER TANI" (Jamil) Alamat : Dusun Pandan Desa Pandanrejo Kec. Bumiaji		<ol style="list-style-type: none"> 1. Panci Stailless Steel (1 unit) 2. Kompor Gas+Tabung LPG (1 unit) 3. Cup sealer Semi Otomatis (1 unit) 4. Krat Besar (15 buah) 5. Krat Sedang (15 buah) 	
9	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Tanaman Pangan dan Holtikultura/ Sarana dan Prasarana	Pengembangan agroindustry di Kota Batu	alat pengolahan hasil hortikultura dan alat pengemasan sayuran organik	Kelompok tani olahan dan kelompok tani sayur organik di Kota Batu		Dana Tugas Pembantuan APBN Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur	Pengadaan alat pengolahan hasil hortikultura dan alat pengemasan sayuran organik	Terbentuknya inisiasi pengembangan kawasan hortikultura yang memenuhi skala ekonomi pedesaan
10	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Tanaman Pangan dan Holtikultura/ Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	Pengadaan sarana teknologi peternakan tepat guna	Mesin pengolah susu	Kelompok Dewi Sri Kelurahan Songgokerto, kelompok Panderman I Desa Oro-Oro Ombo, dan Kelompok Sri Rejeki Desa Junrejo sebagai lokasi penerima bantuan alat	Kelompok ternak terutama ternak sapi perah	Dana APBD II	Bantuan mesin pengolah susu (alat pembuat es krim) kepada kelompok tani terpilih	Terlatihnya SDM dalam pengolahan susu, khususnya usaha es krim dengan tujuan wirausaha kelompok ternak dalam pengolahan es krim

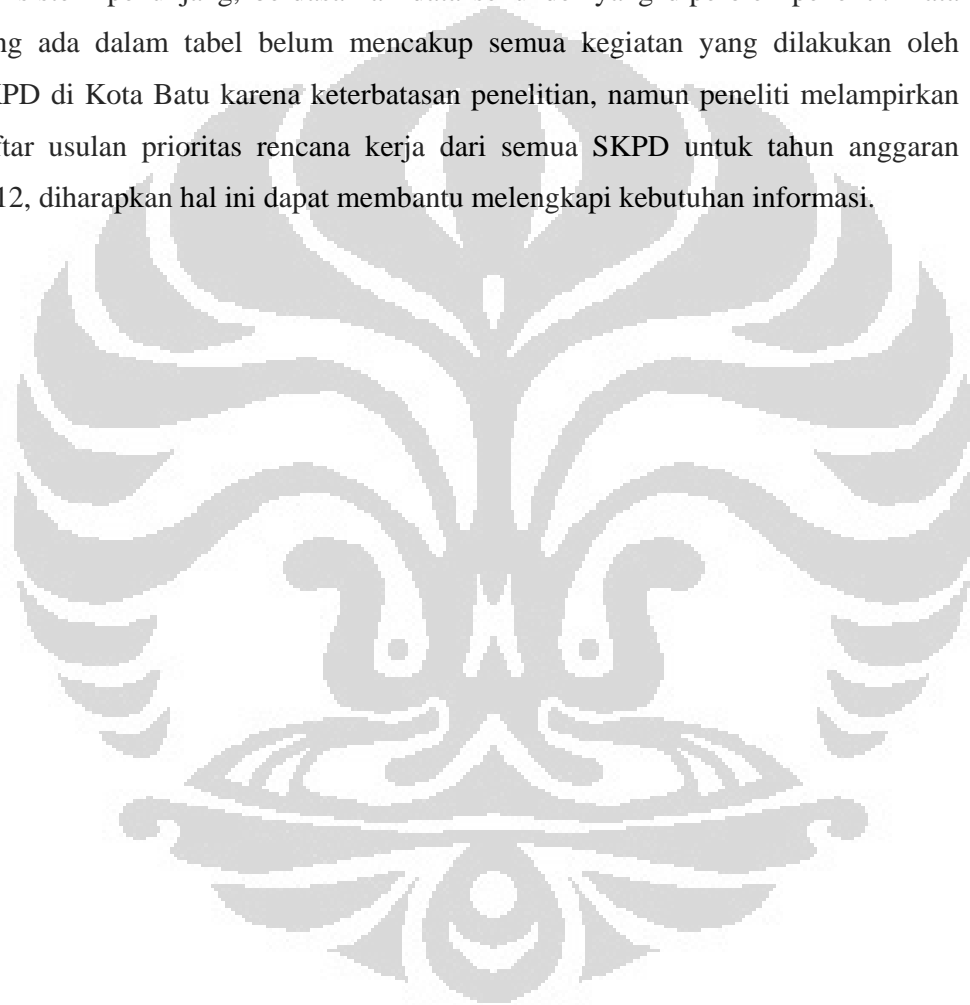
				pengolah susu (mesin es krim)				
11	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Tanaman Pangan dan Holtikultura/ Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	Pengembangan agro industry susu sapi di Kota Batu	Mesin pengolah susu	Ds. Gunungsari, Kec. Bumiaji	Kelompok ternak terutama ternak sapi perah	Dana APBN Tugas Pembantuan TA 2010	Pengadaan alat pengolah susu yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Cooling unit kapasitas 2500 lt 1 buah - Laktodensimeter Gerber 5 buah - Milk analyzer 1 buah - Betastar antibiotik test kit 10 buah - Pemanas air 1 buah - Milk can kapasitas 40 lt 5 buah - Bak penampung susu 1 buah - Pipa susu stainless 6 buah - Milk pump 1 buah 	Peningkatan kualitas susu terutama terhadap TPC (jumlah bakteri) karena penanganan susu yang baik sehingga nilai susu meningkat dan pendapatan peternak pun meningkat
12	Dinas Koperindag/ Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil	Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM	Pemasaran	Kota Batu	UMKM	DAU	Penyediaan UKM Center dan showroom /galeri bagi produk unggulan	Terciptanya fasilitas promosi dan pemasaran bai produk unggulam UMKM
13	Dinas Koperindag/ Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil	Promosi produk UMKM	Pemasaran	Kota Batu	UMKM	DAU	Keikutsertaan dalam pameran dagang	Meningkatkan peluang usaha
14	Dinas Koperindag/ Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Pembangunan Promosi Perdagangan	Pemasaran	Kota Batu	Pengusaha	DAU	Keikutsertaan dalam pameran dagang	Meningkatkan peluang usaha

		Internasional						
15	Dinas Koperindag/ Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Pengembangan pasar dan distribusi produk	Pemasaran	Kota Batu	Pengusaha	DAU	Terlaksananya pasar murah	Terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat
16	Dinas Koperindag/ Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Pengembangan pasar lelang daerah	Pemasaran	Kota Batu	Penjual dan pembeli	DAU	Keikutsertaan dalam pasar lelang komoditi	Mempertemukan langsung penjual dan pembeli
17	Dinas Koperindag/ Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Promosi produk-produk koperasi	Pemasaran	Kota Batu	Koperasi	DAU	Pameran produk koperasi	Meningkatnya pemasaran atas produk koperasi

Sumber : data sekunder, diolah peneliti

5.1.3.4 Implementasi Kebijakan Pengeluaran untuk Sub Sistem Penunjang

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam lingkup sub sistem penunjang yang mencakup: perkreditan, asuransi, transportasi, penelitian dan pengembangan, pendidikan, penyuluhan, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah. Berikut disajikan dalam tabel resume implementasi kebijakan pengeluaran untuk sub sistem penunjang, berdasarkan data sekunder yang diperoleh peneliti. Data yang ada dalam tabel belum mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh SKPD di Kota Batu karena keterbatasan penelitian, namun peneliti melampirkan daftar usulan prioritas rencana kerja dari semua SKPD untuk tahun anggaran 2012, diharapkan hal ini dapat membantu melengkapi kebutuhan informasi.



Tabel 5.18
Implementasi Kebijakan Pengeluaran untuk Sub Sistem Penunjang

No.	SKPD / Bidang / Seksi (Implementor)	Program	Sektor	Lokasi	Sasaran	Sumber Dana	Output	Outcome
1	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Tanaman Pangan dan Holtikultura/ Holtikultura	Pengembangan Sekolah Lapang Pertanian/Perkebunan	Pendidikan	Desa Bulukerto (Bumiaji) dan Desa Junrejo (Junrejo)	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok Tani Sri Mulyo I, Bulukerto • Kelompok Tani Gawe Rejo, Junrejo 	Dana APBD II	Terlaksananya Sekolah Lapang Hortikultura Menuju <i>Good Agriculture Practices (GAP)</i> untuk komoditas Apel dan Kubis Bunga	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan SDM petani dalam pengelolaan budidaya tanaman hortikultura dalam hal ini apel dan kubis bunga b. Tersampainya upaya perubahan pola pikir petani menuju budidaya tanaman sehat dan ramah lingkungan, serta sesuai dengan prosedur GAP c. Mengurangi dampak negatif penggunaan pestisida d. Meningkatkan mutu, daya saing dan nilai jual produk hortikultu
2	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Tanaman Pangan dan Holtikultura/ Holtikultura	Pengembangan agribisnis hortikultura	Modal	Desa Sumberbrantas, Ds. Bulukerto, Ds. Giripurno, Ds. Oro-oro Ombo, Ds. Sidomulyo	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas hortikultura maupun petani/pelaku usaha yang merupakan wilayah penumbuhan dan pemantapan 	Dana APBN Tugas Pembantuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersalurnya dana bantuan sosial untuk pengembangan hortikultura di kawasan DAS seluas 10 Ha b. Tersalurnya dana bantuan sosial pengembangan kawasan hortikultura terintegrasi berbasis GAP (kawasan jeruk, kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya fungsi kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) bagian hulu dan peningkatan pengembangan sayuran di kawasan DAS a. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian

				<p>budidaya sayuran, buah dan tanaman hias organik di Kota Batu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Petani/ kelompok tani tanaman hortikultura di kawasan DAS bagian hulu yang banyak mengalami penurunan fungsi sebagai daerah tangkapan air terutama akibat dari alih fungsi lahan (dari hutan menjadi lahan maupun dari lahan pertanian menjadi perumahan/bangunan) • Petugas atau petani/kelompok tani di daerah sentra produksi hortikultura dalam penerapan budidaya yang baik dan benar (GAP) dan SOP yang dapat meningkatkan mutu, produktivitas dan 	<p>tanaman hias dan kawasan sayuran) sebanyak 4 paket</p> <p>Terlaksananya fasilitasi magang sekolah lapang hortikultura melalui penyelenggaraan Sekolah Lapang <i>Good Agriculture Practices (GAP)</i> Hortikultura Komoditas Jeruk Keprok Batu 55</p>	<p>lingkungan dan terbentuknya kawasan tanaman sayuran di daerah DAS/ daerah rawan longsor dan erosi pada kelompok tani / gapoktan tanaman sayuran</p> <p>b. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi petugas, petani dan kelompok tani dalam penerapan budidaya yang baik dan benar (GAP) dan SOP</p> <p>c. Memperkuat modal petani untuk mengembangkan usaha hortikultura di kawasan pegembang</p>
--	--	--	--	---	---	--

					daya saing serta pengembangan kawasan buah organi			
3	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Tanaman Pangan dan Holtikultura/ Holtikultura	Pengelolaan Lahan dan Air	Modal	Kec. Bumiaji dan Kec. Junrejo	Kelompok tani tanaman hortikultura di lokasi area sepanjang daerah koservasi DAS (Daerah Aliran Sungai) yang memiliki potensi untuk pengembangan pertanian, yaitu kelompok tani di Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Junrejo	APBN Tugas Pembantuan	Tersalurnya dana bantuan sosial untuk pengelolaan lahan kepada 27 kelompok petani penerima	Membantu penyediaan modal usaha tani untuk kelompok
4	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Tanaman Pangan dan Holtikultura/ Holtikultura	Pengelolaan Lahan dan Air	Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Bumiaji dan Kec. Junrejo	Kelompok tani tanaman hortikultura di lokasi area sepanjang daerah koservasi DAS (Daerah Aliran Sungai) yang memiliki potensi untuk pengembangan pertanian, yaitu kelompok tani di Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Junrejo	APBN Tugas Pembantuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Pelatihan Konservasi DAS Hulu Kawasan Hortikultura b. Terselenggaranya Sekolah Lapang Konsevasi DAS Hulu Kawasan Hortikultur 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memaksimalkan peran dan partisipasi petani/kelompok tani sebagai pelaksana kegiatan di lapangan b. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam melakukan kegiatan budidaya tanaman hortikultura sekaligus melakukan kegiatan konservasi lahan dan air c. Meningkatnya partisipasi

								dan kesadaran petani serta generasi muda dalam upaya konservasi DAS Hulu dan pelestarian lingkungan d. Sebagai ajang tukar informasi, pengalaman dan koordinasi antara kelompok tan
5	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Tanaman Pangan dan Holtikultura/ Holtikultura	Sekolah Lapang Tanaman Hias Mawar Potong	Pendidikan	TPQ Al- Mutadin 9 Ds. Gunungsari Kec Bumiaji	Kelompok Tani Mawar yang memiliki agro ekologi yang sesuai	Dana APBD-I	Terlaksananya Sekolah Lapang Mawar Potong dalam rangka penerapan GAP tanaman mawar di kota Batu	<p>a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman petani dan petugas tentang pengelolaan agroekosistem secara bersama-sama sebagai dasar dalam penerapan <i>Good Agriculture Practices</i> (GAP) pada tanaman mawar</p> <p>b. Meningkatkan kemandirian petani/kelompok tani dalam mengelola agroekosistem berdasarkan GAP sehingga mampu membangun agribisnis komoditas tanaman hias khususnya Mawar</p> <p>c. Mengenal dan menggali teknologi spesifik lokasi yang memenuhi standart GAP dan berbasis pada</p>

								input lokal
6	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Tanaman Pangan dan Holtikultura/ Perlindungan Tanaman dan Pengendalian Hama	Peningkatan Sumberdaya Manusia Pertanian	Pelatihan	<p>a. Pasar Benih Ikan (PBI) Jl. Bukit Berbunga No. 238 Sidomulyo – Batu</p> <p>b. Saung Tani Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo</p> <p>c. Gapoktan Vegori, Ds. Sumberejo Kecamatan Batu</p>	Kelompok Tani, PPL, POPT (Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman), petugas teknis Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu	Dana APBD II	Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian dalam rangka Pengelolaan Tanaman Hortikultura disertai dengan kunjungan lapang untuk 50 orang peserta	<p>a. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian Kota Batu dalam berbudidaya tanaman hortikultura yang baik, sesuai dengan Standar Operasional (SOP) dan <i>Good Agriculture Practises</i> (GAP)</p> <p>b. Meningkatkan pengetahuan tentang perkembangan teknologi pertanian dan penanganan pasca panen yang baik dan benar untuk mendukung peningkatan mutu produk hortikultura yang dihasilkan oleh petani di Kota Batu</p> <p>c. Membuka akses pasar dan menciptakan peluang pasar secara mandiri</p> <p>d. Pendalaman bagi aparatur tentang sistematika pelaksanaan sekolah lapang bagi petani</p>
7	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Tanaman	Penyuluhan penerapan	Pendidikan	Desa Sumberejo, Kecamatan Batu	a. Anggota Kelompok Tani	Dana APBD II	Terlaksananya Sekolah Lapang Organisme Pengganggu	a. Peningkatan SDM petani dalam pengelolaan

	Pangan dan Holtikultura/ Perlindungan Tanaman dan Pengendalian Hama	teknologi pertanian/perke bunan tepat guna		dan Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo	Mawar Indah, Ds. Sumberejo, Kec. Batu b. Anggota Kelompok Tani Gotong Royong, Ds. Torongrejo, Kec. Junrejo		Tanaman (SL-OPT) dan demplot untuk komoditas Mawar dan Bawang Merah	budidaya tanaman mawar dan bawang merah b. Mengembangkan dan memasyarakatkan penerapan PHT (Pengelolaan Hama Terpadu) c. Tersampainya upaya perubahan pola pikir petani menuju budidaya tanaman sehat dan ramah lingkungan
8	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Tanaman Pangan dan Holtikultura/ Perlindungan Tanaman dan Pengendalian Hama	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perke bunan	Sarana prasarana	Kota Batu	PPL, Mantri Tani	Dana APBD II	Tersedianya sarana prasarana untuk mendukung kegiatan penyuluhan pertanian berupa GPS	Meningkatnya sarana serta kualitas penyuluh pertanian dan mantri tani
9	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Tanaman Pangan dan Holtikultura/ Pengolahan dan Pemasaran	Pengolahan Informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perke bunan masyarakat	Penelitian dan pengemban gan	Kota Batu	Masyarakat Kota Batu	Dana APBD II	Wawancara dan pengamatan langsung ke kelompok tani/gapoktan/industri rumah tangga dan industri skala besar yang mengolah produk pertanian/perkebunan sedangkan untuk data harga pasar produk pertanian dilakukan dengan terjun langsung ke pasar/pengamatan langsung	tersedianya data UMKM, produk olahan dan harga pasar produk olahan

10	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Tanaman Pangan dan Holtikultura/ Pengolahan dan Pemasaran	Pelatihan dan pembimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Pelatihan	Balai Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji	Petani strawberry dan pelaku usaha dibidang olahan Strawberry	Dana APBD II	pelatihan kegiatan bimbingan pengoperasian teknologi pengolahan strawberry	a. Terciptanya SDM pertanian yang terlatih di masa yang akan datang b. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani yang tergabung dalam kelompok tani komoditas strawberry
11	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Tanaman Pangan dan Holtikultura/ Sarana dan Prasarana	Pengembangan agribisnis dan agroindustri	Infrastruktur	Pembangunan konstruksi jalan usahatani	1. Dusun Pandan, Desa Pandanrejo Kec. Bumiaji 2. Dusun Jeding Desa Junrejo Kec. Junrejo 3. Dusun Ngandat Desa Mojorejo Kec. Junrejo 4. Dusun Krajan Desa Torongrejo Kec. Junrejo	Dana APBD II	Pembangunan konstruksi jalan yang terdiri jalan usahatani (4 paket)	Terbangunnya konstruksi jalan (4 paket)
12	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Tanaman Pangan dan Holtikultura/ Sarana dan Prasarana	Pengembangan agribisnis dan agroindustri	Infrastruktur	Pembangunan konstruksi jalan produksi	1. Dusun Krajan Desa Punten Kec. Bumiaji Dusun Krajan Desa Oro-oro Ombo Kec. Batu	Dana APBD II	Pembangunan konstruksi jalan yang terdiri jalan produksi pertanian (2 paket)	Terbangunnya konstruksi jalan (2 paket)
13	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Tanaman Pangan dan Holtikultura/ Sarana dan Prasarana	Pengembangan agribisnis dan agroindustri	Infrastruktur	Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usahatani	1. Dusun Dadaptulis Dalem Desa Dadaprejo Kec. Junrejo	Dana APBD II	Pembangunan konstruksi jaringan irigasi usahatani (4 paket)	Terbangunnya 4 konstruksi jaringan irigasi usahatani

					<ul style="list-style-type: none"> 2. Dusun Kajang Desa Mojorejo Kec. Junrejo 3. Dusun Ngujung Desa Pandanrejo Kec. Bumiaji 4. Dusun Santrean Desa Sumberejo Kec. Bumiaji 			
14	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Tanaman Pangan dan Holtikultura/ Sarana dan Prasarana	Pengembangan agribisnis dan agroindustri	Infrastruktur	Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Desa	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dusun Gangsiran Desa Tlekung Kec. Junrejo 2. Dusun Jantur Desa Gunungsari Kec. Bumiaji 3. Dusun Ngujung Desa Pandanrejo Kec. Bumiaji 4. Dusun Ngukir Desa Torongrejo Kec. Junrejo 	Dana APBD II	Pembangunan konstruksi jaringan, jaringan irigasi tingkat Desa	Terbangunnya 4 konstruksi jaringan irigasi tingkat desa
15	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Tanaman Pangan dan Holtikultura/ Sarana dan Prasarana	Pengembangan agribisnis dan agroindustri	Infrastruktur	Pembangunan Jaringan Pipanisasi	<ul style="list-style-type: none"> 6. Dusun Krajan (Paket I) Desa Sumberbrantas Kec. Bumiaji 7. Dusun Krajan (Paket II) Desa Sumberbrantas Kec. Bumiaji 8. Dusun Lemah Putih Desa Sumberbrantas Kec. Bumiaji 9. Dusun Jurang 	Dana APBD II	<p>Pembangunan konstruksi jaringan irigasi pipanisasi (6 paket)</p> <p>Kunjungan lapang</p>	Terbangunnya 6 konstruksi jaringan irigasi pipanisasi Dan kunjungan lapangan

					Kuali Desa Sumberbrantas Kec. Bumiaji 10. Dusun Junggo (Paket I) Desa Tulungrejo Kec. Bumiaji 11. Dusun Junggo (Paket II) Desa Tulungrejo Kec. Bumiaji			
16	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Tanaman Pangan dan Holtikultura/ Sarana dan Prasarana	Pengembangan agroindustri di Kota Batu	<ul style="list-style-type: none"> • Pembimbingan • Kemitraan 	Kelompok tani olahan dan kelompok tani sayur organik di Kota Batu		Dana Tugas Pembantuan APBN Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan teknis pengolahan produk hortikultura dan pengemasan sayuran organik • fasilitasi kemitraan (temu bisnis) 	Terbentuknya inisiasi pengembangan kawasan hortikultura yang memenuhi skala ekonomi pedesaan
17	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Tanaman Pangan dan Holtikultura/ Sarana dan Prasarana	Pengembangan agroindustri di Kota Batu	Modal	Kelompok tani olahan dan kelompok tani sayur organik di Kota Batu		Dana Tugas Pembantuan APBN Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur	Bantuan sosial Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK)	Terbentuknya inisiasi pengembangan kawasan hortikultura yang memenuhi skala ekonomi pedesaan
18	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Tanaman Pangan dan Holtikultura/ Sarana produksi dan permodalan	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> • Petani / kelompok yang memiliki komoditas unggulan pangan olahan di Kota Batu baik yang berada pada tingkat usaha pemula maupun 	Ds. Pandan Rejo	Dana APBD II	Pelatihan teknis dan non tekni bagi pelaku agribisnis	Adanya peningkatan SDM petani di bidang keamanan pangan dan penguasaan teknologi agribisnis

				menengah dan lanjut				
				<ul style="list-style-type: none"> • Gapoktan sebagai produsen bahan mentah hasil pertanian • PPL selaku petugas dan pendamping petani di lapangan 				
19	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Tanaman Pangan dan Holtikultura/ Sarana produksi dan permodalan	Peningkatan sosial ekonomi masyarakat dengan system pemasaran yang tepat	Sosialisasi Pemasaran	Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu	petani yang tergabung dalam gabungan kelompok tani (gapoktan) yang ada di seluruh wilayah Kota Batu	Dana APBD II	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi kegiatan peningkatan sosial ekonomi masyarakat dengan sistem pemasaran yang tepat • Pembuatan sarana prasarana untuk penyuluhan pertanian dan sebagai sumber informasi berupa leaflet sebanyak 1 (satu) paket 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengetahuan petani, khususnya yang tergabung dalam gapoktan, tentang sistem pemasaran produk pertanian yang tepat • Terpenuhinya sarana prasarana untuk penyuluhan pertanian
20	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Tanaman Pangan dan Holtikultura/ Peternakan	Penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan pembibitan peternakan	Gudang Kompos	Dusun Gondang Desa Tulungrejo Kec. Bumiaji	Kelompok Tani Makmur Abadi	Dana APBD II	Penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan pembibitan peternakan melalui bantuan gudang kompos	Peningkatan produksi peternakan
21	Dinas Pertanian dan	Penguatan	Modal	Ds. Gunungsari	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok tani 	Dana APBN	Penguatan modal usaha bagi	Peningkatan modal

	Kehutanan / Tanaman Pangan dan Holtikultura/ Peternakan	modal usaha kelompok		dan Ds. Bumiaji	Kelas Ds. Gunungsari • Kelompok tani Ajjaya Desa Bumiaji	Propinsi	kelompok tani kelinci	kelompok tani kelinci
22	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Tanaman Pangan dan Holtikultura/ Peternakan	Gemarampai	Pelatihan	Dusun Dresel Desa Oro-oro Ombo	Kelompok tani wanita	Dana APBN Propinsi	Pelatihan dan pemberian budidaya ayam buras	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan masyarakat miskin melalui kegiatan ekonomi produktif dengan pola padat karya • Menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan • Meningkatkan gizi masyarakat khususnya bagi anak balita dan anak sekolah dengan mengkonsumsi telur ayam secara teratur • Menggairahkan usaha peternakan rakyat khususnya komoditi buras • Menumbuhkan sikap wirausaha di kalangan ibu-ibu
23	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Tanaman Pangan dan Holtikultura/ Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	Pemeliharaan kesehatan hewan ternak dan pencegahan penyakit menular ternak	Kesehatan	Semua desa/kelurahan di tiga kecamatan se Kota Batu	Kelompok ternak terutama ternak bantuan non KUD	Dana APBD II	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan kesehatan hewan pada ternak gaduhan pemerintah maupun pada ternak kelompok ternak, untuk menangani segala permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesehatan hewan yang dapat dicapai dengan melakukan pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit

							<p>hewan dalam rangka melakukan pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan rutin, pemeriksaan dan pengujian produk hewan tersebut meliputi pemeriksaan organoleptik, fisik dan kimia. Guna memberikan jaminan keamanan manusia, hewan dan lingkungan dari ancaman penyakit hewan 	<p>hewan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaminan keamanan manusia, hewan dan lingkungan dari ancaman penyakit hewan, menghindari kemungkinan terjadinya resiko yang dapat mengganggu kesehatan (safety) baik pada hewan ternak maupun hewan non pangan
24	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Tanaman Pangan dan Holtikultura/ Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	Pengadaan sarana teknologi peternakan tepat guna	Pelatihan	Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu, Kelurahan Songgokerto, sebagai lokasi pelatihan teknologi pengolahan susu (es krim)	Kelompok ternak terutama ternak sapi perah	Dana APBD II	Pelatihan teknologi pengolahan susu, khusus es krim, dengan tujuan peningkatan ketrampilan (SDM) penerima bantuan mesin pengolah susu (mesin es krim) dalam pengolahan susu	Terlatihnya SDM dalam pengolahan susu, khususnya usaha es krim dengan tujuan wirausaha kelompok ternak dalam pengolahan es krim
25	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Tanaman Pangan dan Holtikultura/ Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	Pengembangan agro industry susu sapi di Kota Batu	Bangunan untuk olah susu	Ds. Gunungsari, Kec. Bumiaji	Kelompok ternak terutama ternak sapi perah	Dana APBN Tugas Pembantuan TA 2010	Pengadaan bangunan alat pengolah susu 1 paket	Peningkatan kualitas susu terutama terhadap TPC (jumlah bakteri) karena penanganan susu yang baik sehingga nilai susu meningkat dan pendapatan peternak pun meningkat
26	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Tanaman Pangan dan Holtikultura/	Pembangunan dan pengembangan	Pelatihan	Pasar Benih Ikan Sidomulyo, Kota Batu	Pembudidaya ikan, PPL dan tenaga teknis perikanan	Dana APBD II	<ul style="list-style-type: none"> • Workshop budidaya ikan air tawar • Monitoring produksi, hama 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan SDM perikanan terutama pembudidaya ikan, PPL,

	Perikanan	perikanan			Dinas Pertanian dan Kehutanan		dan penyakit ikan	dan tenaga teknis perikanan <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas produksi ikan • Penurunan dan pemantauan serangan hama dan penyakit ikan
27	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Tanaman Pangan dan Holtikultura/ Perikanan	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan	Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Junrejo : Ds. Torongrejo, Ds. Pendem • Kecamatan Batu : Ds. Pesanggrahan, Ds. Sumberejo, Kel. Songgokerto, Kel. Ngaglik, Kel. Sisir • Kecamatan Bumiaji : Ds. Gunungsari, Ds. Tulungrejo, Ds. Giripurno, Ds. Pandanrejo, Ds. Bumiaji 	Kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) meliputi usaha pokdakan pembesaran dan pokdakan pembenihan	Dana Alokasi Khusus (DAK)	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya • Penyediaan sarana dan prasarana Pos Penyuluhan Perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan sarana dan prasarana pembenihan dan pembesaran ikan dalam rangka penyediaan induk dan benih ikan yang berkualitas, berorientasi pasar dan sesuai standar dalam jumlah yang dibutuhkan serta berkelanjutan • Menyediakan sarana dan prasarana pos penyuluhan perikanan dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan mempermudah penyampaian informasi kepada masyarakat
28	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Tanaman Pangan dan Holtikultura/ Perikanan	Pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Kompetisi	Desa Beji Kecamatan Junrejo Balai Kartini Jakarta Pusat	Tim penggerak PKK Kota Batu	Dana APBD II	Lomba Masak Ikan Tingkat Nasional ke-8 pada tanggal 21 Oktober 2010 di Balai Kartini Jakarta Pusat	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan konsumsi makan ikan di masyarakat • Meningkatkan peluang pangsa pasar ikan dalam

								<p>negeri bagi kesejahteraan masyarakat khususnya pembudidaya dan pengolah hasil perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang cara pengolahan produk perikanan • Mendukung ketahanan pangan nasional
29	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Kehutanan/ Perencanaan Perlindungan dan Konservasi Hutan	Pembuatan bangunan konservasi tanah	infrastruktur	Desa Oro-oro Ombo	Lahan kritis dan potensial kritis	Dana APBD II	<ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya Dam Pengendali sebanyak 1 Unit sesuai dengan rancangan teknis dam pengendali • Terlaksananya pengawasan 1 paket 	<ul style="list-style-type: none"> • Mencegah longsor, erosi dan pendangkalan sungai akibat sedimentasi karena aliran sungai membawa endapan lumpur • Mengupayakan meningkatkan dan pengembangan pelaksanaan program rehabilitasi hutan dan lahan pada umumnya serta kegiatan RLKT dan pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai)
30	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Kehutanan/ Perencanaan Perlindungan dan Konservasi Hutan	Perlindungan dan pengamanan hutan terpadu	Konservasi Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Sumber Brantas, RPH Junggo • Desa Tulungrejo, RPH Punten 	Tanaman (tegakan) pokok, tanaman reboisasi dan tanaman yang dibawahnya dalam kawasan hutan yang dikelola oleh Perum	Dana APBD II	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan operasi perlindungan dan pengamanan hutan terpadu oleh Tim Perlindungan dan Pengamanan Hutan Kota Batu sesuai dengan SK Kepala Dinas Pertanian dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya keseimbangan ekosistem hutan di wilayah Kota Batu yang letaknya cukup strategis, berada di bagian hulu DAS Brantas, sehingga

				<ul style="list-style-type: none"> Desa Gunungsari, RPH Punten Desa Punten, RPH Punten 	Perhutani		<p>Kehutanan Kota Batu Nomor : 180/171/KEP/422.110/2010 tanggal 1 April 2010 tentang Pembentukan Tim Perlindungan dan Pengamanan Hutan Terpadu</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersosialisasinya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) se Wilayah Kota Batu dalam upaya perlindungan hutan dan lahan sebanyak 50 orang 	<p>kembali bermanfaat optimal sesuai fungsinya bagi kesejahteraan masyarakat dan kesenambungan kehidupan</p> <ul style="list-style-type: none"> Terciptanya perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam pemanfaatan hutan yang mengikuti kaidah konservasi tanah sehingga berfungsi sebagai pelestari sumberdaya alam Menjaga, mengamankan dan memberi perlindungan tanaman (tegakan) yang masih ada
31	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Kehutanan/ Perencanaan Perlindungan dan Konservasi Hutan	Perlindungan mata air	Konservasi Hutan	Desa Beji Desa Oro-Oro Ombo Desa Giripurno Kelurahan Songgokerto Desa Pandanrejo	Sumber mata air yang muncul di daerah sekitar masyarakat (luar kawasan hutan).	Dana APBD II	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya rancangan teknis memuat bill of quantity, rencana biaya anggaran, rencana kerja dan syarat-syarat serta gambar/bestek rancangan sebanyak 4 eksemplar Terbangunnya 5 unit perlindungan mata air berupa bangunan konstruksi reservoir (brouncuptering) di masing-masing desa Terlaksananya pengawasan sebanyak 1 paket 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi sumber-sumber air dari kekeringan dan pencemaran Mengoptimalkan pengelolaan sumber mata air untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitarnya Memberikan penyediaan air bersih untuk aktivitas masyarakat

32	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Kehutanan/ Perencanaan Seksi Bina Produksi, Penatagunaan Hutan dan Rehabilitasi Lahan	Pengembangan, pengujian, dan pengendalian peredaran hasil hutan	Sosialisasi	Sosialisasi dilaksanakan di Balai Desa Sumberejo, Kota Batu	Kepala Desa/Kelurahan se-Kota Batu, aparat, pengusaha kayu di wilayah Kota Batu, kelompok tani, LMDH dan masyarakat secara umum	Dana APBD II	Sosialisasi pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan	Menambah pengetahuan tentang tata cara perijinan hasil hutan serta penatausahaan kayu secara umum di wilayah Kota Batu
33	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Kehutanan/ Seksi Perkebunan	Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian (Konservasi DAS Hulu Kawasan perkebunan)		Desa Sumbergondo, Desa Bulukerto, Desa Punten, Desa Giripurno, Desa Gunungsari, Desa Pandanrejo, Desa Sumberejo, Desa Tlekung, Des Beji, Desa Junrejo, Desa Torongrejo	Lahan pertanian Kemiringan lahan 15-35 % Lahan milik kelompok tani yang diusahakan untuk konservasi lahan	Dana APBN	Pelatihan tentang pengelolaan lahan yang konservatif kepada kelompok tani sebanyak 50 orang selama 6 hari	Meningkatkan pengetahuan dan sikap kelompok tani tentang pengelolaan lahan yang konservatif
34	Dinas Pertanian dan Kehutanan / Kehutanan/ Seksi Perkebunan	Sekolah Lapang Konservasi DAS Hulu Kawasan Perkebunan	Pendidikan	Desa Pandanrejo, Desa Tlekung, Desa Gunungsari	25 kelompok tani yang mendapatkan dana bantuan sosial	Dana APBN	Pelatihan kelompok tani melalui 2 Paket Sekolah Lapang Konservasi Das Hulu Kawasan Perkebunan	Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan membentuk sikap kelompok tani dalam pengelolaan lahan yang konservatif
35	BPMPKB / Ekonomi dan kelembagaan/ Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa / Kelurahan	Perlombaan desa/kelurahan	Kompetisi	Kota Batu	Masyarakat Kota Batu	DAU	Sebagai Barometer tingkat keberhasilan Pembangunan di tingkat desa	Meningkatkan kapasitas masyarakat pedesaan

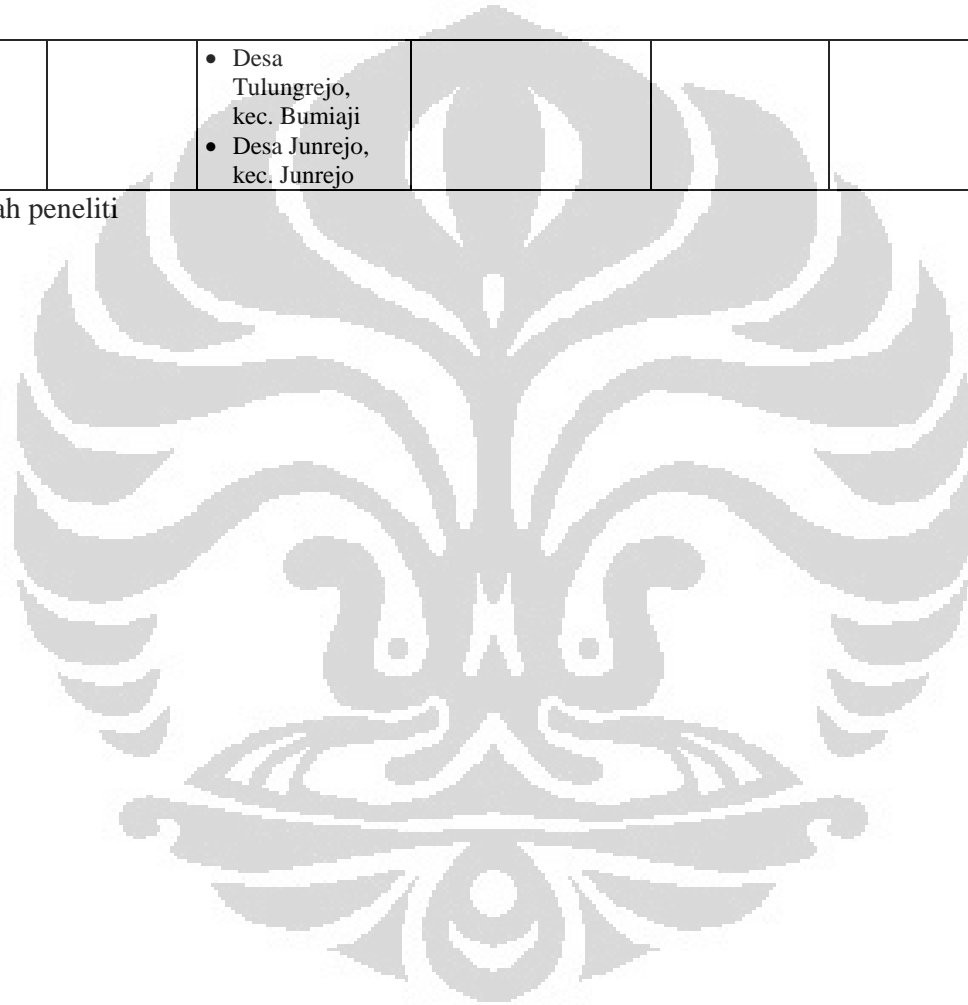
36	BPMPKB / Ekonomi dan kelembagaan/ Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa / kelurahan	Monev PNPM MP	Modal	Kota Batu	Masyarakat Kota Batu	DAU	pemberian modal dalam rangka peningkatan keberdayaan usaha ekonomi desa	Peningkatan keberdayaan usaha ekonomi desa
37	BPMPKB / Ekonomi dan kelembagaan/ Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa / Kelurahan	Program Pendampingan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK)	Pembinaan	Kota Batu	Masyarakat Kota Batu	DAU	Terselenggaranya Pendampingan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK)	Meningkatkan kapasitas masyarakat pedesaan
38	Dinas Koperindag/ Program Penciptaan Iklim usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Perencanaan , koordinasi dan pengembangan UKM	Pembinaan	Kota Batu	50 UKM Kota Batu	DAU	Terfasilitasinya pemberdayaan UKM di desa dan kelurahan	Terwujudnya sinkronisasi pemberdayaan UKM di semua desa/kelurahan dan database UKM
39	Dinas Koperindag/ Program Pengembangan UKM	Fasilitas bagi industry kecil dan menengah terhadap pemanfaatan Sumber daya	Pelatihan	Kota Batu	120 orang	DAU	Pelatihan dan pendampingan pembuatan makanan minuman dan bantuan peralatan	Menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan wirausaha baru
40	Dinas Koperindag/ Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil	Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis	Sarana dan prasarana	Kota Batu	Target 1 paket	DAU	Terwujudnya pembinaan dan perawatan UKM melalui inkubator teknologi dan bisnis	Terciptanya peningkatan akses pengembangan UKM melalui program inkubator teknologi dan bisnis
41	Dinas Koperindag/ Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil	Fasilitasi peningkatan kemitraan bagi UMKM	Pemasaran	Kota Batu	Target 1 paket	DAU	Terciptanya pembinaan UMKM melalui akses permdalan BUMN	Terwujudnya peningkatan dan pengembangan akses usaha bagi UMKM melalui kemitraan dengan BUMN
42	Dinas Koperindag/	Pelatihan	Pelatihan	UKM Kota Batu	30 UKM	DAU	Terselenggaranya pelatihan	Terwujudnya peningkatan

	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil	kewirausahaan					kewirausahaan bagi UMKM	manajemen usaha bagi UMKM
43	Dinas Koperindag/ Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	kelembagaan	Kota Batu	Masyarakat	DAU	Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi	Terbentuknya koperasi wanita bary
44	Dinas Koperindag/ Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Kemitraan	Kota Batu	Koperasi dan UMKM	DAU	Peningkatan kemitraan usaha antar kopeasi dan koperasi dengan UKM	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
45	Dinas Koperindag/ Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Pembinaan dan pengawasan koperasi	Kelembagaan	Kota Batu	Koperasi	DAU	Pengawasan koperasi dan koperasi penerima bantuan dana bergulir	Terciptanya peningkatan usaha koperasi
46	Kantor Ketahanan Pangan/ Seksi Distribusi Pangan	Kajian rantai makanan, pasokan dan pemasaran pangan	Penelitian	Kota Batu	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kecamatan • Kelompok tani • Petani • Distributor • Pedagang • Instansi pemerintah • Lembaga keuangan • Konsumen akhir 	DAU	Buku laporan akhir kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan di kota Batu	Menghasilkan: <ul style="list-style-type: none"> - data sentra produksi tanaman pangan (padi dan jagung) di Kota Batu - data lembaga dan fungsi tata niaga hasil pertanian - model rantai pasokan bahan pangan dan pemasaran hasil pertanian - Referensi dan pedoman dalam penyusunan kebijakan terkait dengan pengembangan rantai pasok pangan yang

								berkelanjutan dan pemasaran pangan di Kota Batu
47	Kantor Ketahanan Pangan/ Seksi Distribusi Pangan	Pemantauan dan analisis pangan masyarakat	Penelitian	Kota Batu	Masyarakat Kota Batu dan instansi tingkat wilayah	Dana APBD II	Survey konsumsi pangan di 3 kecamatan di Kota Batu	Data analisis pangan masyarakat
48	Kantor Ketahanan Pangan/ Seksi Distribusi Pangan	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	Penelitian	Kota Batu	Pasar di daerah Kota Batu dan SKPD terkait	Dana APBD II	Survey lapangan mengenai harga pangan pokok	Data analisis harga pangan pokok
49	Kantor Ketahanan Pangan/ Seksi Distribusi Pangan	Pengembangan Sistem Informasi Pasar	Penelitian	Kota Batu	Pasar di daerah Kota Batu dan SKPD terkait	Dana APBD II	Survey lapangan mengenai informasi pasar	Data informasi pasar
50	Sekretariat Daerah Kota Batu/ Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal/ Sub Bagian Sarana Perekonomian	Monitoring dan evaluasi perkembangan ekonomi Kota Batu tahun 2011	Penelitian	Kota Batu	SKPD terkait, swasta, dan masyarakat	Dana APBD II	Monitoring dan evaluasi perkembangan ekonomi Kota Batu tahun 2011	Tersedia informasi terkait perkembangan ekonomi serta melihat potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka mengurangi ketimpangan di Kota Batu
51	Dinas Sumberdaya Air dan Energi/ Program Pengembangan Sumberdaya	Pembuatan Instalasi Biogas	Sarana Listrik	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Pesanggrahan, Kec. Batu • Desa oro-oro ombo, Kec. Batu • Desa Tlekung, kec. Junrejo • Desa beji, kec. Junrejo • Desa Gunungsari, kec. Bumiaji 	Masyarakat	Dana APBD	Pemanfaatan energi alternatif untuk kepentingan masyarakat	Tersedianya alternatif sumber listrik

				<ul style="list-style-type: none">• Desa Tulungrejo, kec. Bumiaji• Desa Junrejo, kec. Junrejo				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: data sekunder, diolah peneliti



5.1.4 Implementasi Kebijakan Perpajakan dan Retribusi pada Kawasan Agropolitan Kota Batu

Peneliti hanya akan membahas mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan retribusi karena memang hanya dua hal ini saja yang diperoleh informasinya dari narasumber.

5.1.4.1 Pajak Bumi dan Bangunan

PBB adalah jenis pajak daerah yang sangat potensial untuk dijadikan sumber penerimaan daerah. Pengalaman banyak negara juga menunjukkan bahwa pajak-pajak serupa ini biasanya berada di tangan pemerintah daerah. Dalam hal kecukupan perolehan, keadilan dan kelayakan sebagai penerimaan daerah, pajak-pajak ini dinilai sangat memuaskan. Pengalihannya kepada daerah akan meningkatkan penerimaan asli daerah secara signifikan, disamping (harapannya) akuntabilitas daerah (Tjip Ismail, 2007, hal.208). Proporsi pajak daerah Kota Batu terhadap PAD tahun 2011 adalah 62,62 % (KUA-PPAS P Kota Batu TA 2011), dengan dialihkannya PBB menjadi pajak daerah, maka pemerintah Kota Batu memiliki kewenangan untuk menentukan tarif dan dasar pengenaan pajaknya.

Sejauh ini berdasar informasi yang diperoleh peneliti terkait dengan pengembangan kawasan agropolitan yang mana juga berhubungan erat dengan objek PBB, tidak ada ketentuan khusus ataupun fasilitas dalam PBB. Ketentuan perpajakan berlaku umum untuk semua WP PBB tidak dibedakan apakah WP bermata pencaharian sebagai petani atau bukan. Selain itu, akibat dari peralihan perekonomian menjadi sentra wisata dengan pembangunan fisik, sarana prasarana dan infrastruktur yang maju pesat, nilai tanah dan bangunan di Kota Batu jadi meningkat dalam beberapa tahun ini. Kenaikan nilai tanah dan bangunan ini membuat jumlah utang PBB yang harus dibayar masyarakat pemilik tanah dan bangunan juga naik. Tidak melihat apakah WP tersebut petani atau bukan, dan tidak melihat apakah penghasilan WP meningkat juga atau tidak, karena memang PBB bukanlah pajak subjektif. Pada akhirnya bagi beberapa WP yang tidak merasa penghasilannya meningkat, kenaikan utang pajak ini dirasa memberatkan. Berikut dipaparkan beberapa narasumber :

Sri Wahyuni mengatakan ketika ditanya tentang PBB di Kota Batu “ *iya naik, kalo di malang seperti itu..naik terus. Yang saya tau tidak ada perbedaan untuk petani, kayanya berlaku umum* ”, Suwoko pun menjawab hal yang sama:

“saya kira belum ada nah itu tadi pengembaliannya ya satu desa pajaknya dihimpun ya mba ya dihimpun pertahun, maksimal setaun pendapatannya 70jt, mereka kembalian dapat 600jt, lewat ADD, iya disini belum ada yang sampe ratusan juta maksimal 60 70 itu maksimal, itu 100% bayar semua, kecuali perhotelan ya, perhotelan kan harus dipungut sendiri, pajak penghasilan kalo PBB kan lain”

Demikian juga dengan Tunggul Madyantono menjawab permasalahan serupa:

“Jadi kalo masyarakatnya sendiri coba ditanya enak mana dulu dengan sekarang setelah jadi kota. Mereka pasti mengeluh karena kan setelah jadi kota kan jadi banyak pungutan, contohnya seperti PBB-nya otomatis yang tadinya 10ribu jadi 100ribu, padahal ekonomi masyarakat tidak berubah. Tapi karena status, terus pajak kebersihan misalnya, retribusi kebersihan. Masa buang sampah di halaman sendiri ditarik retribusi kebersihan. Nah kan gitu”

Winardi pun menyampaikan hal yang sama ketika ditanya tentang PBB:

“Sebetulnya kalau masalah PBB bagi saya itu menarik bu. Sebetulnya ini bukan membuka kekurangan di antara kita atau gimana, atau bukan karena kita tidak mau berpartisipasi terhadap pembangunan di Batu, bukan semacam itu. Tetapi saya melihatnya, malah petani lain, setelah Batu menjadi kota seperti sekarang, memang saya akui bahwa kemajuan termasuk sarana dan prasarana itu sangat bagus mulai dari jalan sampai irigasi, sampai apapun, sampai dulu jalan tanah waktu saya masih kecil, sekarang udah ga ada. Tapi mungkin karena itu, akhirnya PBB itu setiap tahun peningkatannya semakin tinggi. Malah okelah dengan alasan ini kota mungkin PBB dinaikkan, mungkin dengan alasan supaya harga tanha tinggi, tapi di sisi lain penghasilan petani tidak begitu. Saya membicarakan ini dari sisi kaca mata petani bu.

Lah petani kan lihatnya dari sana. Sejak penghasilan kami menurun, terus PBB nya naik terus. Apalagi tanah yang kering kemarin. Teman saya itu sampai ga mau bayar. Di Bumiaji okelah 10 tahun yang lalu, siapa yang ga kenal Bumiaji, setiap panen pasti beli kendaraan. Tapi sekarang, siapa yang ga tau Bumiaji, sek setiap tahun, tanahe didol (jual). Ga kuat mesti bayar pajak. Kami ini merasa bahwa PBB di Kota Batu memang terus setiap tahun peningkatannya sangat tinggi. Contohnya tiga tahun yang lalu, dulu kebun bambu saya itu per meternya masih Rp 7000. Itu tiga tahun yang lalu. Sekarang Rp 17.000. Padahal untuk manen bambu itu, saya itu masih make tangga, bukan jalan enak kaya gini. Akhirnya

saya heran juga. Lah wong penghasilannya ga ada. Naikin bambu ke jalan itu ga sebanding dengan biayanya. Okelah karena kita warga yang baik, kita bayar, tapi inilah keadaannya.”

Sebagian besar masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani tidak memahami bahwa ada prosedur yang dapat digunakan untuk menggunakan hak WP PBB mengajukan pengurangan atau keberatan dalam hal utang PBB nya, sehingga mereka pun terpaksa membayar PBB sesuai tagihan yang diberikan walaupun merasa berat, demikian disampaikan juga oleh Winardi:

“Sekarang gini bu, wong namanya karena SDMnya rendah lagi. Tapi saya lihat dari sisi petani. Untuk keberatan itu kan mesti tahu, biasalah bu kita kan baca aja banyak yang ga bisa. Biasanya Cuma ngeluh. Lah sekarang kalau mengajukan keberatan, sebetulnya susah bu. Saya akui Batu itu berkembang tapi ya saya nuwun sewu itu memberatkan. Kalau ga percaya kita ngomong ke Balai Desa, itu berat, nanti saya yang ngomong saya yang tanggung jawab. Tapi ngomong berat ya Cuma bisa ngeluh. Pajak itu memberatkan kehidupan petani. Petani itu mayoritas di Batu, 75%. Bahkan sampai ada yang ga mau bayar. Ya inilah sisi lain Kota Batu. Pajak di satu sisi dinaikkan, di satu sisi penghasilan kita kebetulan menurun.

Kalau kami melihatnya, mungkin secara teori mudah, tapi praktiknya pelaksanaannya dan hasilnya susah. Jangankan minta keringanan semacam itu, pernah dulu ga bayar PBB 2 tahun berarti nunggak 2x. Kami itu ditagihkan kok bu, nanti ga bisa milih kepala desa. Minta keringanan kan harus ke desa, ke kecamatan, kita ga tahu kemana lagi”

Eko S. sebagai Kabag Pembangunan di Setda juga mengatakan bahwa kebijakan pemberian fasilitas untuk PBB ini adalah kebijakan yang tidak familiar,

“Ada beberapa kebijakan pemerintah tentang pajak. Misalnya PBB yang sekarang dikelola daerah. Tetapi untuk sektor pertanian kan cukup sulit. Kita di sini membebani pajak terhadap baik usaha maupun produksi pertanian. Sehingga kita berpikinya, masyarakat kita kan masyarakat pertanian yang ga mendapatkan penghasilan bulanan. Oleh karena itu bagaimana bisa berjaya, kalau ditambahin pajak itu kan jadi tambah berat. Sementara ini pajak kita itu hampir 54% dari sektor pariwisata. Kalau pertanian sangat kecil sekali, mungkin bisa dikatakan tidak ada. Lah pemerintah tidak pernah memberikan subsidi terkait masalah-masalah pertanian. Jadi saya pikir kebijakan itu adalah kebijakan yang tidak familiar, karena petani itu jangan bicara hasil, hidup aja sulit, nanam aja sulit. Potensi luar biasa, tetapi kalau dengan

kebijakannya, pembebanan pajak kepada petani sangat menyulitkan.”

Selain PBB, peneliti juga belum menemukan ada fasilitas atau insentif pajak tertentu yang diterapkan untuk menginsentif pertumbuhan sektor pertanian ataupun pengembangan kawasan agropolitan di Kota Batu ini. Peneliti berpendapat bahwa pemerintah daerah Kota Batu dapat menggunakan kewenangannya untuk menjadikan PBB sebagai salah satu instrumen kebijakan untuk menginsentif sektor pertanian. Fungsi pajak bukan sekedar fungsi budgeter tetapi juga fungsi regulerend, penurunan penerimaan dari satu pos penerimaan diharapkan menjadi pendorong kegiatan ekonomi di sektor lainnya. Namun sebelumnya harus dilakukan kajian kembali untuk memperkirakan berapa *potential loss* dan *potential gain* yang akan diperoleh. Mengingat Kota Batu baru berusia 10 tahun pada tahun 2011 ini, dipahami bahwa dibutuhkan waktu lebih untuk mencari dan menerapkan sistem pajak daerah terbaik untuk Kota Batu.

5.1.4.2 Retribusi

Retribusi yang diterapkan terkait pengembangan kawasan agropolitan yaitu retribusi dari Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan Pasar Benih Ikan. Target penerimaan dari retribusi pada RPH pertahunnya sekitar Rp 30 juta, dari Psar Benih Ikan ditargetkan sekitar Rp 50 juta per tahun, informasi ini berdasar wawancara dengan Sri wahyuni, sementara peneliti belum mendapatkan informasi lebih lanjut ataupun data sekunder terkait retribusi ini karena keterbatasan penelitian.

“nah kalo untuk pendapatan..restribusinya itu dari RPH..rumah potong hewan..per tahun sekitar 30 juta untuk PAD..sama disini pasar benih ikan..dapet distribusi..pokonya dapet 50 juta per tahun”

Tidak banyak pungutan retribusi yang dilakukan pemerintah Kota Batu, karena memang saat ini lebih banyak melakukan kebijakan pengeluaran daripada pungutan terkait dengan upaya meningkatkan pembangunan ekonomi Kota Batu.

5.2 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Fiskal pada Kawasan Agropolitan Kota Batu

5.2.1 Faktor Disposisi atau Sikap

Sikap aparat pemerintah dari SKPD dalam menjalankan tugasnya mendukung dan melayani masyarakat petani di Kota Batu diakui sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan pertanian. Luki Budiarti sebagai salah satu petani yang banyak mendapat bantuan dari program pemerintah dan juga aparatnya berbagi pendapat

“Iya, jadi peran pemerintah juga banyak untuk gapoktan ini tidak berupa uang awalnya. Baru berupa uang ya baru pertama kali ini. Bukan berupa uang yang jadi barang ini ya baru sekarang ini. Dari dulu kami nda mau minta apa-apa gitu supaya kami sama dinas tetep dilihat baik-baik gitu.

Orang lainkan bilang kalo suka tidak ada bantuan gitu, memang karena merekanya yang tidak mau proaktif ya. Terus selalu menilai negatif orang gitu,

Biasanya dari dinas itu membantu memang karena orangnya terlihat berminat dan berniat untuk mengembangkan, ya kalau dibantu tapi orangnya gak mau menata administrasinya terus asal maunya terima sajakan itu nggak bisa. Makannya nyari Gapoktan yang sudah didukung dengan administrasi-administrasi gitu.

Ya ada, saya ini polos ya tidak banyak neko-neko maksudnya tidak bisa berpolitik macem-macem. Akhirnya orang dinas itu semuanya jadi baik semua, nda pernah minta-minta uang, pak polisi-pak polisi itu semua nda ada yang minta uang. Saya juga selalu melapor tentang kountainer gitu, hanya melapor aja itu disini di kota batu uang 25.000 aja, atau bayar 10.000 atau 100.000 nda penting yang penting dapat memberikan pelayanan, kemarin itu tukang saya mau bikin apa itu namanya,, pihak kepolisan itu membantu sekalin, terus pak kepala dinas pertanian itu yang dulu kurang tanggap juga menjadi membantu. Saya juga itukan baik kepada orang kementerian ya, dulu itu kapala pusat perizinan impor itu sulit kan ya, tapi asalkan saya mengikuti sistem itu saya dibantu nda pake uang yang kata orang lain untuk urusan perizinan importir itu bayar 10.000.000 atau apa, saya nda pake uang “

Ketika ditanya mengenai pajak di daerah Kota Batu ini Luki juga menyampaikan penghargaannya kepada petugas pajak di Kota Batu ini yang sangat membantu manakala akhir tahun masyarakat sudha mulai harus mempersiapkan laporan PPh nya, Luki Budiarti merasa tidak ada masalah sama sekali dengan perpajakannya.

“AR dari KPP itu, datang ke pertemuan atau datang kesini atau kami kesana gitu bu. Tapi kalau masih ada yang tungkangan berarti belum bisa mensinergikan ya. Itukan nda hanya kesaya toh keorang

lain juga toh . Kalau orang lain menganggap pajak ini ada masalah itu masalah ini, tapi mereka hanya bicara saja bukan bersal dari data yang dibikin, hanya konon katanya.

Selain itu, SKPD yang ada pun masih banyak yang memikirkan keberlanjutan program agropolitan sehingga masih fokus merancang program kerjanya untuk pengembangan agropolitan. Suwoko menyampaikan hal serupa:

“Nah kalau sekarang upaya di pertanian untuk menunjang atau memperdayakan petani sekarang ini sudah cukup tinggi. Dari sektor manapun, dari pertanian kita membangun jalan untuk sektor produksi, dari usaha tani kita support dengan Saprotan-nya, SL-nya juga. sekali lagi memang kita bantu semaksimal mungkin dari dinas..”

5.2.2 Faktor Tipe Manfaat

Seperti sudah diuraikan sebelumnya bahwa mayoritas kegiatan ekonomi masyarakat adalah dari sektor pertanian. Kondisi alam dan kultur penduduknya pun melekat sekali dengan pertanian, sehingga sudah tepat jika pemerintah memberikan program kepada masyarakat yang mana untuk kemajuan mereka sebagai petani, karena diketahui bahwa manfaat keberlangsungan program pertanian akan dapat dirasakan sampai kedepannya. Sebagaimana diungkapkan Heru Waskito :

“Jadi memang kalo diliat aktivitas kegiatan pengembangan kawasan agropolitan ini untuk pembangunan ya memang pertanian, Kota batu ya pertanian.

Kenapa pertanian, ya pertama dari alamnya cukup menunjang, disini ga ada industri, ga punya pabrik kita, kita ga punya tambang, kita ga punya laut, ya itu sebenarnya kita bagaimana mengelola sumber daya alam agar bisa menghidupi masyarakat, dengan mengembangkan potensi yang ada.

Jadi apa yang telah dilakukan Pemerintah kota batu untuk pengembangan kawasan Kota Batu, semua menunjang komoditas pertanian itu, “

5.3 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Fiskal pada Kawasan Agropolitan Kota Batu

5.3.1 Faktor Komunikasi

5.3.1.1 Kurangnya Koordinasi Tim Program Kerja Agropolitan

Tim Pokja Agropolitan yang diketuai oleh Kepala Bappeda dan beranggotakan SKPD dianggap kurang berkoordinasi dalam melaksanakan program pengembangan agropolitan. Bahkan disinyalir sebagian anggota tim pokja ini kurang memahami bagaimana konsep agropolitan, sebagaimana diungkapkan Tunggul Madyantono:

“Bahkan mungkin kelompok kerjanya juga termasuk saya juga belum paham betul agropolitan kan”

Padahal program pengembangan agropolitan adalah suatu program yang membutuhkan kerjasama dari berbagai instansi terkait dengan konsep pengembangan kawasan yang mencakup semua aspek. Suwoko berpendapat mengenai hal ini:

“ini jujur, jujur kayanya selama ini belum ada rapat koordinasi makanya saya sampaikan kalo ingin membuat satu program memajukan lewat sektor pertanian atau agrowisata, itu harus duduk bersama merumuskan dengan sesuai. Selama ini belum ada...”

ya cuma slogannya saja, sekarang seperti kemarin dinas pariwisata datang iya ada sama dengan saya, kalo dirumuskan kemudian KLH yang berkecimpung didalamnya apa, dirumuskan seperti ini kita tindaklanjuti ke pimpinan, bagaimana majunya, infrastrukturnya gimana, pendanaannya gimana, barang apa yang jalan ya susah, seperti kemaren kan istilahnya Cuma penggembira saja,

kalo mengoordinasi setingkat itu sih susah, sering undangan Kepala Bappeda, sebenarnya kalo pusat pimpinan itu , secara administrasi loh ya, itu bukan Bappeda yang mengundang, Sekda yang mengundang,,sekda yang mengundang, koordinatornya bappeda. Itu baru sampe pada datang, gitu. Agropolitan kembali lagi kepada pengagasnya siapa, itu semuanya kepada walikota, Bappeda sebagai Koordinator, oke seperti itu tapi kan bappeda mah, seperti kemarin liat desa wisata, apa yang dikembangkan oleh bappeda disana, apa sudah melibatkan kebudayaan masyarakat kita, apa sudah melibatkan kehidupan pariwisata? Dinas marga, pertanian? Kalau ini sudah masuk minimal bisara, mau bangun apa ini didesa? Bappeda apa semua anggaran dana semua dari bappeda? Ngga, ini bangun ini, bangun itu, pertanian siap, ada program bangun perba

boleh bangun saung tani boleh, untuk peningkatan jalan boleh hubungi binamarga, bangun jembatan besar binamarga, untuk fasilitas penunjangnya pariwisata punya, promosinya ada, nah itu hal terkait kan jalan, ya kan, tidak hanya ini menyampaikan program lalu tutup buku, bentar lagi ada, program lagi tutup buku, sampai kapan saya ikut ini mohon maaf tidak hanya sekali dua kali, udah sering kali, tapi golnya mana? “

Tunggul Madyantono pun mengungkap hal serupa :

“masalahnya di Bapeda justru yang kurang menunjang. Padahal kan seharusnya dia yang menyusun program kerja secara keseluruhan Dinas dibawahnya, tapi fungsinya justru sebagai pelaksana bukan perumus..

jadi kan kalo gambaran tepatnya kan setiap walikota punya visi-misi, visi-misi tu langsung diserahkan ke Bapeda diumumkan program kegiatannya, disosialisasikan. Setelah itu Dinas-Dinas mengikuti apa yang sdah disusun. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu

Bahkan kalo lari ke APBD, kita hanya dikasih duitnya..maksudnya gini kan, idealnya kan kita menyusun program kegiatan baru dananya menyesuaikan, sekarang kan terbalik. Uang sekian sesuaikanlah. Banyak pimpinan yang tidak bisa menseleraskan, yang penting duitnya habis kan gitu....

iya Tupoksi Dinas. Akhirnya penyelesaian masalah kan parsial karena fungsi-fungsi perencanaan dari Bapeda ini tidak berjalan secara maksimal...ya rapatnya itu tadi prememori. Seharusnya kan ada RPBPN, RPBNT, terus ke rapat kerja kota, jangka panjang, jangka menengah kan gitu. Rapat koordinasi pembangunan. Itu kan seharusnya Bapeda yang seharusnya “oh ini enggak sesuai dengan visi-misi” seharusnya begini kan diarahkan. Tapi karena itu tadi karena ada kebijakan, kebijakan beginian akhirnya kita mengikuti rapat itu hanya ini plot anggarannya sekian harusnya yang di review itu program kerjanya. Sehingga dibuat skala prioritas kan? Yang penting, tidak penting, kurang penting mana yang menyesuaikan, mana yang harus didahulukan, mana yang harus ditunda kan gitu. Tapi yang selama ini terjadi, justru dananya dulu “kamu dapat sekian M, kamu dapat sekian M” programnya menyusul. Itu yang terjadi. Dan setuju saya itu di semua daerah seperti itu rata-rata. Semenjak otonomi daerah”

Nindya Dwi dari KKP pun mengatakan hal serupa:

“kendala itu, pertama koordinasi yang ada itu sering ga kepace, kita udah begini yang lain ga gitu, rakor sih ada tapi ya itu jadi begitu”

Kordinasi antara tim pokja ini hanya sebatas pembagian dana, tidak ada proses pemilahan mana program prioritasnya. Program asal jalan ini pada akhirnya hanya dapat memberikan hasil yang tidak maksimal. Monitoring dan Evaluasi (Monev) juga hanya dilakukan oleh masing-masing SKPD dan bersifat

formalitas, bahkan ada SKPD yang tidak melakukan Monev karena tidak ada anggaran.

5.3.2 Faktor Sumberdaya

5.3.2.1 Kurangnya Sumber Dana

Sejak perubahan status menjadi Kota, Kota Batu dinilai telah memiliki kemampuan ekonomi yang cukup sehingga tidak bisa memperoleh Dana Alokasi Khusus pertanian. Dari 24 desa, hanya 5 kelurahan di Kota Batu. sesuai dengan pernyataan Enny Rachyuningsih:

“Kenapa DAK pertanian tidak dapat karena dengan alasan Batu ini adalah kota. Kebetulan ada perwakilan dari Kementerian Pertanian ini lalu saya cerita bahwa walaupun Batu adalah kota, 24 desa, kita itu hanya 5 kelurahan, sisanya adalah desa. Oleh karena itu Batu sangat membutuhkan dana seperti DAK terkait sektor pertanian.

dari pusat tuh apa ya, karena dianggapnya tidak maksimal, disektor pertanian juga kita ga dianggap karena dianggapnya kita itu kota, padahal kita ini desa, dari 24 desa kelurahan, 5 itu baru kelurahannya selebihnya itu desa dengan kultur kalo memang orang disini itu bisa jalan2, itu kulturenya orang disini, dan kalo di kota kaya malang itu ya ditopang oleh jasa, disini ditopang oleh pertanian, walaupun kondisi pertanian ya nomor dua ah setelah perdagangan dan perhotelan yah, misalnya hotel 45% sedangkan pertanian 15%, tapi pekerjaan kerja2 itu lebih banyak di sektor2 pertanian, iya itu berkali2 kita dipertanian loh ndak bisa dapet itu karena kota ”

Keterbatasan dana ini tentu sangat membatasi pelaksanaan program dalam rangka pengembangan kawasan agropolitan oleh masing- SKPD dan lembaga teknis. Bappeda selaku koordinator pokja harus membatasi secara proporsional sesuai prioritas plafon anggaran. Masing-masing SKPD menerima alokasi dana dari Bappeda sesuai realisasi anggaran pada tahun sebelumnya, bukan sekedar melihat usulan prioritas rancangan rencana kerja pada tahun yang bersangkutan. Diharapkan sekali kepada pemerintah pusat akan kebijakan pemberian alokasi dana kepada daerah tertentu tidak berdasarkan sistem DAU, tetapi disesuaikan dengan potensi daerah. Hal ini diutarakan oleh Eko (Kabag Pembangunan Dinas Pengairan, dalam FGD di Bappeda Kota Batu):

“Kembali ke persoalan klasik. Kalau balik ke penggunaan dana, suatu ketika membagi alokasi dana, itu tinggal sedikit. Kan ga mungkin Dinas Pertanian aja yang dikasih, yang lain ga usah, kan

ga mungkin. Alokasi dana itu ga sampai 200 miliar dan kita mau menyalurkan ke petaninya, sangat tidak mungkin. Paling tidak menyalurkan 20% dari alokasi dana. Oleh karena itu harapan kita, semestinya pemberian alokasi dana kepada daerah tertentu, itu tidak berdasar dengan sistem DAU, tetapi disesuaikan dengan potensi daerah. Oleh karena itu, perlu perhatian khusus dari Kementerian terhadap Batu sebagai sektor pariwisata dan pertanian. Dana yang dikucurkan itu ga besar. Kata kuncinya, ya dana.”

Tunggul Madyantono dari Dinas Koperindag pun menuturkan hal yang serupa mengenai keterbatasan dana:

“kebijakan anggaran belum menunjang dengan kebijakan visi Kota Batu yang agropolitan. Dan itu berakibat kepada pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini pemasaran produk pertanian ke arah hulunya, untuk promosi kita kurang karena memang anggaran untuk satu tahun untuk promosi saja di bidang perdagangan yang hubungannya dengan promosi hanya Rp 200.000.000, contoh konkritnya. Perannya sangat sentral tapi memang belum ditunjang oleh anggaran yang memadai karena memang ada skala prioritas tapi seyogyanya kita memang perlu mendapat prioritas lebih.

Untuk contoh promosi, promosi kita hanya bisa mengikuti 2x pameran, padahal yang kita promosikan banyak sekali, mulai dari hasil pertanian, hasil olahannya, sampai makanan minuman dalam kemasan itu memang tidak tercantum, kita tidak bisa mewadahi semuanya karena keterbatasan itu. Jadi kita memang selama ini belum bisa memaksimalkan fungsi dinas karena memang keterbatasan anggaran. “

Nindya Dwi dari KKP pun mengatakan hal yang sama yaitu bahwa dana yang diperoleh dari APBD dirasa kurang. Apalagi sangat terasa bila harga saprotan melambung terus.

“sarana produksi pertanian, mulai pupuk , pestisidanya itu melambung semua, mengikuti kurs dolar, nah itu yang mengganggu produksi kita,”

5.3.2.2 Penyempitan Lahan Pertanian

Luas lahan Kota Batu 202,30 Km² , 59,56 % nya diperuntukkan lahan pertanian. Sejalan dengan perkembangan perekonomian dan jumlah penduduk, luas lahan pertanian berkurang karena beralih fungsi menjadi pemukiman dan lahan usaha. Pancaningtyas dari KLH dalam FGD dengan Bappeda mengatakan juga :

“kami hanya bisa menyampaikan dari sisi konservasi yang kami lihat. Saat ini yang kami perhatikan lahan pertanian di Kota Batu semakin banyak berkurang dikarenakan dipakai untuk kawasan perumahan. Dan akhirnya untuk lahan pertanian itu merambah kawasan hutan yang menyebabkan area hutan semakin berkurang”

Kebutuhan akan lahan pertanian ini membuat penduduk merambah lahan hutan, sehingga lahan pertanian sekarang ini ada dua yaitu di dalam kawasan (hutan) dan di luar kawasan. Kemungkinan kesulitan yang timbul adalah bagi Dinas Pertanian dan Kehutanan pada saat menghitung jumlah pupuk di dalam kawasan.

5.3.2.3 Pendampingan Penyuluh Lapangan Kurang Efektif

Dinas Pertanian dan Kehutanan memberikan program pembimbingan dan pembinaan kepada petani melalui Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). PPL adalah petugas fungsional yang ditugaskan di tiap desa, satu PPL di satu desa, tugasnya adalah membina dan memberikan penyuluhan ke petani, menyampaikan aspirasi petani ke pemerintah, dan turut mensosialisasikan program pemerintah untuk kepentingan masyarakat petani. Demikian diterangkan oleh Sri Wahyuni :

*“iya..itu Bappeda juga..jadi nanti setiap kecamatan ada kaya buku pe bendel gitu ada kesehatan, pembagian benih padi atau apa, nanti keliatan lokasinya dimana, kan nanti ada ujung tombaknya kaya PPL itu..jadi nanti kalo ada kegiatan apa didistribusikan kemana lewat PPL yang fungsional yang di lapangan...
iya jadi mereka yang menjembatani lalu mereka juga tugasnya membina, menampung aspirasi yang dari bawah..jadi kita punya kelembagaan namanya Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) ini si kelompok tani yang ada di desa pada bergabung..dan si PPL ini yang mendampingi kaya kalo ada pertemuan..mungkin nanti ada informasi disini,,nanti PPL yang menyampaikan”*

Dalam hal pembinaan dan penyuluhan kepada para petani, PPL dinilai oleh masyarakat petani kurang mampu berperan menjadi orang yang dipercaya petani dan diandalkan untuk membuat perubahan pada pola pikir petani yang masih sangat tradisional dan kurang mampu beradaptasi pada perubahan. PPL cenderung tidak bisa membuat perubahan karena merasa takut pada petani, hanya mengikuti petani bukan memimpin. Petani di daerah Kota Batu ini tergolong petani yang kritis karena mereka pun sudah sejak dahulu berkecimpung di bidangnya, menghadapi PPL yang rata-rata jauh lebih muda dari mereka maka

tidak mudah bagi mereka untuk langsung menerima arahan-arahan PPL nya. Akibatnya PPL jadi enggan berkomunikasi intensif dengan petani, PPL seringkali mendampingi petani pada saat ada sosialisasi informasi terkait bantuan atau hibah. Pendapat ini disampaikan oleh Luki Budiarti sebagai Ketua Gapoktan Mitra Arjuno:

“PPL sih sekarang masih mengikuti ya, tapi terus terang masih takut. PPL-nya masih muda dan baru, orang petani itu kalau sudah kumpul kritis-kritis. Dulu itu PPL-nya sampe males ke sini karena orang-orang disini sulit dikasih tau. Karena petani disini bukan petani sekolahan orang dibilangin lah wong nyaut orang yang dari kecil udah tani kok”

Begitu juga yang disampaikan oleh Winardi sebagai Ketua Gapoktan Langgeng Mandiri:

“ya kalo PPL itu ya nyuwon sewu tak lihat itu bener emang ada yang sarjana, insinyur ato sarjana pertanian, tapi pengalamannya itu ga ngomong budidaya yang baik, yang diomongin Cuma bantuan kaya untuk kopi lah gitu lho, kaya ngomongin hama penyakit, pengendalian itu belum pernah.

Mungkin PPL yang di balarejo ya kurangnya itu, karena banyak yang ketua kelompok tani itu sarjana semua, jadi nanti malah saya yang ngomong ini nanti permasalahannya apa, karena PPL itu kuliahnya dibawah saya, ya seperti itu, itu PPL Cuma nyambut ini pak ada bantuan, kalo ga ada bantuan ya ga ngomong opo-opo.

iya kalo disini ya begitu, paling dia aktif kalo ada mau tamu, festival kaya kemaren itu, begitu, kalo satu desa ada ppl nya ya bener

Sri Wahyuni dari Distanhut pun mengatakan hal yang serupa ketika ditanya mengenai peran PPL dalam hal mengarahkan petani :

“aduh kayanya PPL ga bisa seperti itu..petani disini pinter2 malah kayanya mereka lebih kuat..hehehe”

Fungsi PPL sebagai penghubung masyarakat petani dan pemerintah adalah menyambung informasi dari pemerintah ke masyarakat (dalam hal sosialisasi hibah dan bantuan pemerintah) ataupun dari masyarakat ke pemerintah (dalam hal penyampaian kendala dan kebutuhan petani untuk pengembangan pertanian). Dengan kondisi minimnya intensitas PPL dengan petani membuat informasi program pemerintah dan manfaat penyuluhan tidak dirasakan sampai ke tingkat

petani kecil. Informasi dan manfaat penyuluhan biasanya hanya dimanfaatkan oleh pengurus Gapoktan. Berikut dipaparkan oleh Winardi:

“Saya melihat itu sebagai suatu terobosan dan saya melihatnya bahwa pembinaan dari Dinas itu baik namun cenderung baiknya kepada lembaganya atau pengurusnya. Kepada petaninya yang kecil dan langsung menyentuh itu belum. Contohnya, saya ketua Gapoktan, mungkin saya paham, teman saya paham, tapi teman kami atau anggota kami kan belum paham itu. Penyuluhannya saya rasakan bagus, Cuma penyuluhannya itu ada kalau dibutuhkan ada pertemuan. Makanya malah kami, berinisiatif dari Paguyuban Petani Madani, ini malah ga diakui oleh Dinas. Saya hanya menginginkan petani di sekitar kami itu bisa maju. Akhirnya kami bisa merangkul 700 petani di Kota Batu. Ini bukan Gapoktan, ini katakan orang di luar Gapoktan, di luar kelompok tani. Pelatihan ini telah 5 kali kami lakukan. Karena di hati nurani kami, kami menginginkan kualitas SDM petani dan sekaligus membantu program pembinaan dari Dinas Pertanian, khususnya terkait penyuluhan.”

Demikian pula pendapat Risa Agus Prasetyo dalam FGD dengan Bappeda Kota Batu :

“Misal ada bantuan pupuk dari Dinas itu kami tidak dapat. Peserta dari Gapoktan itu tidak menikmatinya sama sekali, hanya pengurus-pengurus Gapoktan saja yang menikmati. Akhirnya hasil bunga mawar potong kami tidak sehebat, tidak sebagus sesuai dengan yang diharapkan Gapoktan, itu masalah yang pertama.

Yang kedua tentang kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh Dinas Pertanian kepada Gapoktan. Itu yang hanya yang diundang saja atau sosialisasinya kepada kami petani kecil ini tidak sampai ke kami. Jadi hanya petani besar saja yang mendapatkan sesuatu ataupun sosialisasi dari pemerintah. Jadi kami hanya dapat ampas saja. Peralatan modern seperti mesin juga kami dapat, kemudian sepeda ontel juga kami dapat. Tapi yang memanfaatkan ya pengurusnya. Kami ingin membawa bunga ke agen kadang-kadang ya ngojek, karena kami tidak dipinjamkan atau gantian gitu, hanya pengurusnya saja.”

Endang Dwi dari Sekda Bidang Perekonomian pun mengatakan hal serupa mengenai pemanfaatan bantuan atau hibah oleh petani :

“ini gini lho, mereka itu kan kelompok, tapi ini ga semua.. jadi kaya ada ketua kelompok..nah kalo ada bantuan dari pusat..ini sih ya

banyak orang pintar gitu..jadi bantuannya dipake sendiri..nah anggota yang lainnya itu kaya pembantu”

Namun demikian, masyarakat cukup mengakui bahwa program dan perhatian Dinas Pertanian dan Kehutanan sudah lebih baik dari sebelumnya. Peneliti menilai hal ini ada kaitannya juga dengan kemampuan *leadership* para PPL tersebut. Implikasinya adalah materi penyuluhan yang diberikan PPL tidak bisa sepenuhnya diterima dan diaplikasikan oleh petani, contohnya perubahan iklim yang terjadi saat ini mempengaruhi produksi petani, ketidakmampuan mengatasi perubahan musim dan hanya berdasarkan iklim mengakibatkan produktifitasnya rendah. Hal ini menjadi kendala ketika petani sudah bekerjasama dengan industri mitra, gagal panen menyebabkan permintaan mitra akan suplai produk tidak terpenuhi sehingga rantai pemasaran pun tersendat. Padahal dari Dinas Pertanian dan Kehutanan dapat memberikan materi mengenai bagaimana mengatasi perubahan iklim dan menjaga produktivitas, penyampaian materi diserahkan kepada PPL. Hal ini dikatakan oleh Luki Budiarti :

“Terus pas saat ada kemitraan kita sudah berjanji pada industri, musimnya ini berubah tiba-tiba petani belum bisa mengendalikan musim. Itu mengakibatkan produktifitasnya rendah. Jadi bekerja itu hanya berdasarkan iklim.”

Permasalahan ini memang terkait dengan tingkat SDM petani, namun peneliti menilai hal ini juga ada kaitannya dengan peran PPL di lapangan. Disarankan ada upaya peningkatan SDM PPL khususnya dalam hal *leadership skill*. Menambahkan masalah keterbatasan sumberdaya ini, Tunggul Madyantono juga memaparkan bahwa di Dinas Koperindag masih kekurangan tenaga penyuluh perindustrian.

5.3.2.4 Rendahnya SDM Masyarakat Petani

Gambaran mengenai sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk usia 15 tahun keatas. Semakin besar persentase penduduk yang menamatkan jenjang pendidikan tinggi, bisa dianggap semakin tinggi tingkat intelektualnya.

Tabel 5.19
Persentase Penduduk Usia 15 tahun keatas menurut Pendidikan Yang Ditamatkan
Kota Batu Tahun 2008 - 2010

Tingkat Pendidikan	2008	2009	2010*)
Tidak belum pernah sekolah	3,45	2,55	3,87
Tidak belum tamat SD	13,30	11,21	10,99
Tamat SD	28,90	27,82	29,96
Tamat SLTP	22,96	23,29	21,87
Tamat SMTA +	24,24	26,23	25,03
Tamat PT	7,15	8,89	8,28

*Sumber : Hasil Susenas 2008 – 2010 *)angka sementara*

Sebanyak 25,03 persen penduduk Kota Batu telah menamatkan SMA sederajat, hal tersebut dapat dilihat bahwa penduduk yang tamat SMA sederajat tahun 2010 sebesar 21,87 persen. Penduduk Kota Batu yang menempuh pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi pada tahun 2010 mencapai 8,28 persen. Melihat hal ini peneliti menilai tingkat pendidikan masyarakat Kota Batu belum tinggi. Hal ini senada dengan pendapat beberapa narasumber sebagai berikut,

Winardi mengatakan :

“memang dari SDM itu banyak petani yang belum bisa baca. Di Kota Batu ini masih banyak yang belum bisa baca”

Luki Budiarti juga berpendapat demikian :

“Rata-rata petani sini mikirnya pendek, harganya ya harga pasar. Saya mesti ngajarin harga kontrak dengan komitmen yang bagus itu jadi harus betul-betul dikontrol”

Permasalahan ini berimplikasi pada implementasi kebijakan-kebijakan yang diperuntukkan untuk pengembangan agropolitan, dengan tingkat pendidikan petani seperti itu membuat pemahaman dan pola pikirnya tidak jauh ke depan. Salah satu contohnya pada program LMPH (Lembaga Masyarakat Pemangku Hutan) yang dikoordinasi oleh Perhutani. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan masuk ke dalam LMPH dan boleh menggarap lahan hutan di sela-sela pohon, dan nanti ada bagi hasil dengan Perhutani apabila sudah panen. Dipaparkan oleh Tunggul Madyantono sebagai berikut :

“masyarakat pemangku hutan. Jadi kan 60% wilayah kita hutan. Jadi masyarakat yang tinggal di pinggir hutan itu, pemangku hutan itu dapat kerjasama jadi untuk menanam tanaman semusim di sela-sela.”

Namun, yang terjadi adalah petani hanya pikir praktis saja dan untuk kepentingannya sendiri, sehingga manfaat yang diharapkan dari program ini dikhawatirkan keberlangsungannya. Luki Budiarti menjelaskan :

“Tapi justru petani yang LMPH ini yang nakal, kalau pada saat dia nda berhasil, atau pada saat harga tinggi dia nda komit, mereka kirim kesini tapi saat gagal panen utang-utang ya nda nyaut. Karena dia itukan ga punya sertifikat apa-apa ya, tapi kalau misalnya sudah punya sertifikat otomatis punya lahan artinya bangun, hasilnya bisa disimpan di bank yang itu justru lebih mudah kami dukung. Memang orang yang tingkatannya jauh lebih rendah itu cape, ngasih tau juga cape, diajak apa-apa maunya dibantu terus.

Terus disuruh nulis administrasi itu sulit, padahal sudah mau saya ajari tapi malah nda mau”

Untuk permasalahan ini, peneliti merasa perlu sekali adanya upaya peningkatan SDM untuk para petani. Dimaksudkan agar petani bisa lebih profesional, tertib administrasi, dan mampu memahami manfaat dari program-program yang diberikan pemerintah untuk jangka waktu panjang, sehingga pada akhirnya kebijakan pemerintah untuk pengembangan sektor pertanian dapat

terimplementasi dengan baik dan mencapai tujuannya. Tidak hanya itu, bagi petaninya sendiri akan mendapat manfaat tambahan yaitu perluasan pemasaran karena mitra industri dapat meningkatkan kerjasamanya dengan petani Kota Batu, tidak hanya terpusat pada petani tertentu saja yang memang taraf pendidikannya sudah tinggi sehingga mampu memenuhi ekspektasi mitranya. Peneliti yakin bahwa pada akhirnya pertumbuhan ekonomi pertanian pun akan menjadi pesat.

5.3.3 Faktor Disposisi atau Sikap

5.3.3.1 Perubahan Visi dari Sentra Pertanian ke Sentra Pariwisata

Pergantian Walikota Batu dari Imam Kabul (2002-2007) ke Edy Rumpoko (2007-2012) membawa perubahan di Kota Batu dalam hal visi dan misi pembangunan. Berdasar hasil wawancara dengan beberapa narasumber dan menilik data sekunder disimpulkan bahwa perubahan yang terjadi adalah perubahan dari visi Kota Batu sebagai sentra pertanian berbasis pariwisata menjadi sentra Pariwisata berbasis pertanian. Hal ini tentunya akan melatarbelakangi setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu sekarang ini. Dari data PPAS APBD tahun 2011 diketahui bahwa anggaran terbesar dialokasikan ke Dinas Cipta Karya dan Ruang (sebesar 55,8 Milyar), sementara alokasi anggaran untuk Dinas Pertanian dan Kehutanan ada di peringkat ke 4 (sebesar 10,9 Milyar). Edy Rumpoko memang banyak mengalokasikan ke Dinas Cipta Karya dan Ruang untuk menunjang pembangunan sektor wisata. Banyak pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana untuk meningkatkan minat wisatawan ke Kota Batu. Diantaranya pembangunan Batu Secret Zoo, Alun-Alun Kota yang berupa taman bermain, villa dan hotel, dan lainnya. Hal ini pun berdampak pada sektor pertanian yang bukan lagi menjadi prioritas utama pembangunan, anggaran untuk Dinas Pertanian dan Kehutanan dan SKPD lain yang memiliki program pendukung pengembangan agropolitan menjadi terbatas. Karena keterbatasan anggaran ini pada akhirnya SKPD harus memangkas pengeluaran untuk pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak semua rencana kerja untuk pembangunan pertanian dapat terlaksana. Berikut pemaparan pendapat dari beberapa narasumber :

Luki Budiarti ketika ditanya tentang kecenderungan pembangunan Kota Batu :

Masih ke pariwisata, tapi agro ini sudah didukung oleh Pak Walikota.

Sri Wahyuni ketika ditanya mengenai ikon Kota Batu Wisata dan pengaruhnya kepada pertanian:

“eh ini ya arena pergantian pemimpin apa walikota itu..visinya beda..ini lebih ke arah wisata, kaya alun-alun..kayanya yang penting itu mendatangkan investor..iya itu Kalau anggaran jadi 2008 ke 2009 naik, tapi untuk yang sekarang turun dan tetap”

Demikian pula dengan pendapat Heru Waskito:

“Cuma kelanjutan dari yang sudah dirintis waktu itu, oleh walikota yang dulu, sepertinya tidak mendapat sambutan yang baik, seperti saya pindah ya pengganti saya tidak bisa melanjutkan itu. Emang setelah saya keluar dari pertanian itu tahun 2006, setelah itu seterusnya pakum, memang ada kegiatan pemngembangan kawasan agropolitan yang dilaksanakan oleh dirjen pedamping PNPB, malah yang punya ide Bapemas sendiri, jadi PNB yang dijakarta mengadakan pelatihan kawasan pengembangan agropolitan,”

Permasalahan lain yang terjadi adalah dengan perubahan prioritas pembangunan ini terkait dengan sasaran peningkatan pendapatan masyarakat kecil. Sektor wisata lebih banyak menguntungkan bagi pihak pemodal dan pebisnis kalangan atas daripada pengusaha kecil. Perkembangan perekonomian Kota Batu saat ini dirasa kurang menyentuh ke lapisan masyarakat bawah, sementara lapisan masyarakat Kota Batu mayoritas adalah petani. Berikut pendapat dari para narasumber:

Suwoko dari Distanhut:

“iyaa, batu ini kan pariwisata. Pariwisata itu kan ada berapa orang yang , pernah saya sampaikan. Bukan orang itu yang jadi penonton. Saya sangat sangat apa, sangat yakin sekali dengan riset dengan yang ini nanti dengan investor nanti datang ke Bappeda dan Tanya, bagaimana pengembangan kota ini. Dialog dialog dialog, okee jadi saya tanamkan modal disini, harus menemukan disini. Sedangkan saya bilang, tu orang berat banget . ada lahan sedikit koo, sama dengan kota Malang, itu istilahnya menjadi apa ya, masalah kota-kota besar, sama seperti ini. Dimanapun letaknya. Yang hidup disini

yang berjanji hidup bahagia, bisa sampean liatin perkembangan kota yang terlihat, yang sampean tau aja. Bisa sampean lihat sampean tanyakan. Milik siapa. Ya, yang bekerja siapa? Sedangkan batu kebagian apa? Paling banter itu tadi, tukang asongan, distributor, toko obat yang lagi berenti, itu tadi.”

Tunggul Madyantono dari Dinas Koperindag:

“visinya agrowisata, tapi program dan kegiatan di APBD tidak menunjang kesana, belum menunjang kesana. Antara visi, misi, program, dan kegiatan tidak diproduksi. iya lebih ke visi pribadi. Pejabat Pemerintah sehingga program kegiatan gak nyambung”

Endang Dwi dari Setda Bidang Perekonomian pun mengatakan bahwa saat ini investasi ke Kota Batu paling banyak untuk pariwisata. Puspa Permanasri dari Dinas ESDM turut berkomentar hal serupa:

“pariwisata pun itu sepertinya perdagangan jasa. Kalo pariwisata murni jelas investornya bukan dari Batu, mereka dari luar. Jadi tidak mungkin PDRB-nya meningkat dari Batu. Kalo mereka efeknya langsung perdagangan. Kalo distribusi langsung itu mereka jadi saklek penjual gitu ya kayaknya belum bisa. Malah yang petani-petani itu cenderung terancam pendapatannya. Mereka cenderung beralih. Anaknya malahgak mau jadi petani, mending jadi pegawai ae, malah enak. Selain itu mending kerja apa di BNS atau di hotel. Tapi juga kecenderungan masyarakat Batu akhirnya semua objek wisata, hotel restoran yang ada di Kota Batu kan berjanji awal-awal mereka 80% untuk sekitar, tapi nanti gak diperpanjang. Lama-lama jadi tidak dipenuhi. Jadi mending didatangkan dari Malang yang SDM nya lebih tinggi. Mungkin mereka juga cenderungnya ke pegawai yang biasa-biasa aja bukan Top Manajer atau apa. Malah banyak yang beralih.”

Heru Waskito dari BPMPKB berpendapat juga mengenai hal ini:

“Hanya memang dulu ada pertanian yang bernuansakan wisata, itu dulu..tapi sekarang dibalik, wisatanya dulu, tapi tetep di komoditas pertanian, artinya pertanian di sini, teknologi, tanaman pangan, hasil perikanan, perkebunan, itu kita kembangkan semua jadi kawasan wisata, ada desa wisata, wisata untuk memetik apel, kemudian ada rumah inap petani, sudah kita kembangkan begitu, jadi kita sudah punya data, desa Sidomulyo, desa sangrahan sebagai kawasan desa wisata, jadi ada pengunjung datang kesana melihat nuansa, kehidupan petani, dia juga menanamkan sahamnya untuk membeli tanaman disana, nanti kalo kaya apel panen dia juga bisa...”

5.3.4 Faktor Struktur Birokrasi

5.3.4.1 Belum Terbentuknya Badan Penyuluhan (Bapelu)

Kendala manfaat penyuluhan yang kurang dirasakan oleh petani sebagaimana juga telah dipaparkan sebagian dalam masalah PPL sebelumnya, juga dimungkinkan karena belum terbentuknya Bapelu di Kota Batu yang fungsinya khusus menangani penyuluhan, kegiatan penyuluhan masih dirangkap oleh masing-masing dinas. Sebaiknya rangkaian kegiatan penyuluhan yang diberikan hendaknya juga dilengkapi dengan proses monitor dan evaluasi agar dapat diketahui apakah tujuan penyuluhan dapat terpenuhi dan bermanfaat untuk sasarannya. Demikian yang disampaikan oleh Sri Damayanti dari Kementerian Pertanian dalam FGD dengan Bappeda dan SKPD Kota Batu:

“ Mengenai pembinaan, di sini saya tidak tahu apakah ada Bappelu? Instansi penyuluhan? Mungkin ada di dinas, ga sendiri. Memang dinas itukan kaitannya dengan regulasi, kalau penyuluhan itu ada di badan penyuluhan, badan pelaksana penyuluhan. Jadi mungkin karena di sini tidak ada, maka dirangkap oleh dinas. Dan itu mungkin memang kurang, seolah-olah dikasih fasilitas tapi tidak digunakan. Tapi seharusnya memang penyuluhan itu di Bappelu. “

5.3.4.2 Belum Ada KUD Kota Batu yang Menangani Seluruh Sektor Agropolitan

KUD memiliki peran penting khususnya dalam hal pemasaran hasil pertanian. Di Kota Batu da KUD Kota Batu namun dinilai hanya fokus ke pengolahan dan pemasaran susu sapi perah, belum ada KUD yang menangani pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, ataupun hortikultura. Fokus KUD ke susu sapi perah karena sudah ada mitra swasta yang menampung sebagian besar hasil olahan susu dari Kota Batu yaitu NESTLE. Hal ini diutarakan oleh beberapa narasumber :

Winardi mengatakan:

“ ga ada disini makanya saya heran KUD itu dulu malah yang bantu, padi sama makanan sapi, ga ada itu yang nampung itu, KUD untuk nanganin sayur sama buah di batu ga ada itu.”

Luki Budiarti juga menyampaikan hal yang sama:

“ KUD itu kalau di batu hanya untuk susu, kalau dipertanian nda ada. Untuk susu-susu fermentasi atau apa itu ”

Sri Wahyuni dari Distahut pun mengatakan demikian :

“kayanya kalo KUD sini ga deh..kayanya kalo disini lebih cenderung perternakan kaya susu”

Peneliti belum bisa memperoleh informasi langsung lengkap dari pihak KUD Kota Batu karena keterbatasan proses penelitian di lapangan.

5.3.5 Faktor Kepentingan yang Dipengaruhi

Program pengembangan kawasan agropolitan memang suatu program yang harus melibatkan banyak instansi untuk pengembangan semua aspek, tujuan program ini akan dapat terealisasi jika koordinasi antara tim pokja dapat berjalan dengan baik. Permasalahan yang terjadi di Kota Batu adalah masing-masing SKPD memiliki program kerja untuk pengembangan agropolitan namun tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga yang diraskan petani adalah kadang program yang mereka terima tumpang tindih dari beberapa SKPD. Setiap SKPD ingin programnya terlaksana agar anggaran terealisasi dan anggaran tahun berikutnya tidak dikurangi, anggaran program yang tumpang tindih ini sebenarnya dapat direalokasi untuk membiayai pelaksanaan kebijakan lain yang belum tersentuh. Beberapa pendapat akan hal ini telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya, menambahkan pendapat dari Luki Budiarti di bawah ini:

“tetapi kadang ada hal-hal yang kurang sinkron kadang ada yang ingin membatu kelompok, yang Diperindag ini punya eksistensi di depan kelompok gitu. Padahalkan kelompoknya sebetulnya ya itu itu saja toh ya. Harusnya lebih dikembangkan lagi”

5.3.6 Faktor Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat

5.3.6.1 Peralihan Transaksi dari Pasar Batu ke Pasar Pujon dan Pasar Karang Ploso dan Konflik Kepentingannya

Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk bertransaksi. Di Kota Batu ada Pasar Batu yang didirikan untuk tempat penjualan dan pembelian semua komoditas pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan hasil produksi masyarakat Kota Batu. Namun, sekarang ini diakui bahwa Pasar Batu tidak berfungsi seperti itu lagi, sejak adanya Pasar Pujon dan Pasar Karang Ploso yang bukan pasar permanen. Pasar ini terbentuk sejak pembeli dari daerah

Kediri dan Surabaya mengetahui bahwa petani yang merupakan produsen langsung komoditas di pasar banyak terdapat di daerah sekitar Pujon dan Karang Ploso. Sehingga untuk mendapatkan harga beli yang lebih murah mereka langsung menemui petani di daerah tersebut sehingga lambat laun terbentuklah seperti “pasar kaget” setiap harinya. Akibatnya banyak pedagang di Pasar Batu yang beralih ke dua pasar kaget tersebut karena pembelinya pun tidak lagi berbelanja di Pasar Batu. Demikian yang diungkapkan oleh Winardi :

“dulu sebelum ada pasar pujon orang pujon ya ke batu, tapi sekarang kan ndak..anu, Karang Ploso itu kan lebih dekat dari Surabaya, jadi orang Surabaya ga mau naik ke Batu. Ganti lah di Karang Ploso, lah itu bukan pasar lho, lapangan bola gitu tapi ya sekarang penuh, jadi barang apa-apa ya dibawa kesana, kalau di Pasar Batu yang rame itu Cuma untuk yang bahan pokok yang sebelah barat sayuran itu sepi.

Kalau di Pasar Pujon itu kan Pujon punya petani sayur, terus harganya lebih murah sana. Iya daerah pertanian tapi kok pemasaran lemah, pasar juga lemah, 2 tahun lalu itu saya nyoba tanem treong yang ungu itu lho, tak jual ke pasar ga laku.

Saya bawa 1-2 kuintal, lakunya 300 rupiah sekilo, ini kan ga masuk akal “

Peneliti pun sempat meninjau ke Pasar Batu dan memang yang dilihat adalah kondisi pasar yang sepi, sedikit sekali aktivitas jual beli di pasar ini. Mengetahui hal ini pemerintah sebenarnya berniat untuk melakukan renovasi Pasar Batu agar dapat kembali menarik minat para pedagang dan pembeli untuk melakukan aktivitas jual belinya di Pasar Batu, namun rencana ini belum juga direalisasi karena terbentur kepentingan-kepentingan lain. Sebagaimana dinyatakan oleh Luki Budiarti :

“Karena orang yang mengendaikan pasar tersebut tidak bagus, jadi orang lebih baik langsung kepetani atau di Karang Ploso itu sudah ada kemasan tinggal naro jual selesai. Lah di batu itu kumuh, terus macet. Jadi petani ini nda msuk ke pasar dulu tapi langsung ke Pujon sama Karang Ploso

Ya ini akhirnya terbentuk link baru, untuk mempermudah akses. Kalo yang di Karang Ploso itu sedek ke Kediri sama Jawa Tengah. Sejak pedagang yang jauh-jauh itu tau langsung ke petaninya, terus di Batu nda ada pembedahan. Mafianya juga jelek itu, tiap-tiap pasar pasti punya mafia itu.

Iya mau direnovasi tapi selalu salah. Sebab ada pemangku kepentingan lain. Ya repot itu , kalau saya lebih baik itu dikembangkan untuk lebih bagus.”

5.3.7 Faktor Karakteristik Lembaga dan Penguasa

5.3.7.1 Ekspektasi DPRD terhadap BUMD

Salah satu permasalahan petani adalah mengenai pemasaran hasil produksi, salah satu narasumber yang merupakan petani juga mengungkapkan bahwa petani Kota Batu bias saja meningkatkan produksi dan kualitas tetapi dikhawatirkan setelah panen hasil produksi tersebut tidak terserap pasar dengan baik sehingga harga produk dibawah biaya produksi dan pada akhirnya merugi. Sebagaimana diungkapkan dibawah ini oleh Winardi :

“sesudahnya, kaya pendidikan, penyuluhan, tapi kalo sudah panen itu, jadi kalo dihitung-hitung petani malah rugi, contohnya kaya jagung manis, 1 ton itu Cuma berapa, ya harusnya mau untung apa rugi dibantu, kalo sudah ngomongin pemasaran ya begitu, harusnya kan pariwisatanya juga ke pertanian, ya itu masalahnya. Malah saya kalo ngomong, pasca yang nampung itu ga ada, “

Untuk masalah pemasaran ini peneliti mendapat informasi bahwa sebenarnya Walikota Batu ingin mengembangkan pasar dalam bentuk BUMD, namun BUMD ini tidak berjalan karena dikritik oleh anggota DPRD karena dalam awal berjalannya belum bias menghasilkan keuntungan. Hal ini sangat disayangkan sebenarnya mengingat fungsi pemerintah adalah sebagai regulator dan stabilisator perekonomian, memang untuk menjadi penghasil keuntungan tidak dapat diharapkan banyak namun dengan kebijakan BUMD ini setidaknya dapat membantu masyarakat sehingga roda perekonomian dapat berputar, dan pada akhirnya nanti pemasukan ke daerah pun akan meningkat walaupun dari pos lain. Keterangan ini diperoleh dari Luki Budiarti sebagai berikut:

“Sebetulnya pemerintah itu ingin mengembangkan pasar. Pak Edi ingin semua link UKM atau petani semua terbantu dan pasarnya dengan beliau membentuk Badan Usaha Milik Daerah. BUMD nya sudah tapi saya tidak berani banyak menyampaikan. Tapi dengan ini bibit-bibit sudah dapat masuk ke pasar koja. Dikumpulkan semua akses UKM disana, ketika bibit itu datang maka dibagikan untuk dikelola dengan dana dari BUMD itu. Tapi otomatis kalau orang bekerja itu setahun dua tahunan pasti mines toh kan invest semua, nda bisa langsung menghasilkan karena yang dibantu inikan UKM. UKM-nya yang untung tapi sarana untuk melakukan penyewaan itu dananya kan dari APBD otomatisakan perputarannya

sebetulnya dikit tapi biayanya besar. Jadi DPRD-nya marah-marah sepertinya

Saat ini sih sepertinya jalan, tapi karena DPRD-nya mau-nya pas kamu kerja ya pokoknya harus untung ini sudah rugi jadi nda usah diteruskan. Nah harusnya bukan seperti itu toh, saya ini merasa untuk setelah sekian tahun, nda langsung setahun dua tahun kerja dengan dana sekian langsung untung ya nda inikan soalnya masih berupa investasi semua.”

5.3.7.2 Preferensi Walikota Batu dalam Prioritas Pembangunan Ekonomi

Kecenderungan karakter pemimpin akan mempengaruhi kebijakannya dalam memimpin daerah. Walikota Batu Edy Rumpoko dikabarkan memiliki latar belakang sebagai pebisnis yang memiliki relasi dengan sejumlah pengusaha besar tanah air. Pimpinan ini mungkin melihat dari sudut pandangnya untuk mengembangkan Kota Batu melalui keahliannya, Kota Batu diyakini memiliki pesona pariwisata yang lebih unggul bila dikemas lebih menarik, dan karena ia memiliki sumber daya untuk ini maka jadilah ada perubahan visi Kota Batu menjadi sentra pariwisata berbasis pertanian. Peneliti tidak melihat hal ini sebagai suatu hal yang keliru secara umum, namun memang jika dilihat dari sudut pandang pembangunan pertanian tentunya preferensi pimpinan seperti ini berdampak pada berkurangnya perhatian pada pembangunan pertanian, dan SKPD harus mengikuti visi pimpinan dalam mengoperasionalkan ke dalam program kerja. Berikut sedikit yang dipaparkan narasumber Tunggul Madyantono:

“iya lebih ke visi pribadi. Di level pejabat pemerintah. Jadi program kegiatan gak nyambung. Pejabat stand dengan visi-misinya. Dinas ada yang tetap konsisten visi agro tapi ada yang mengikuti dengan Bapak Walikota”

5.3.8 Faktor Kepatuhan dan Daya Tanggap Implementor

5.3.8.1 Pemberian Izin “Pipanisasi” di Hutan yang Mengurangi Debit Air

Bagi sektor pertanian, manfaat air sangatlah penting. Dengan kondisi Kota Batu sebagai sentra pertanian tentunya kondisi mata air sangatlah berpengaruh. Dahulunya terdapat 149 mata air yang aktif di Kota Batu, kemudian berkurang

menjadi 111 mata air, itupun hanya sekitar 20-an yang masih cukup debit airnya, sisanya memiliki debit air yang kecil. Disinyalir hal ini terjadi karena adanya pemasangan pipa-pipa besar di hutan untuk disalurkan ke villa dan hotel yang dibangun di tempat dengan kemiringan yang tidak layak untuk pembangunan. Tentu saja dengan adanya pipanisasi ini akan sangat mempengaruhi debit mata air yang biasanya digunakan untuk sarana pengairan lahan pertanian.

“Terus yang menjadi permasalahan, mungkin kami dianggap merusak debit air, lah di hutan saja yang daerah dengan kemiringan yang tidak layak untuk pembangunan, lah itu kenapa diperbolehkan oleh pemerintah? Nah bener ga? Inikan jika hubungannya dengan mata air, dengan perumahan, dan ini juga hubungannya dengan lingkungan hidup. Seharusnya ya dilihat dulu, layak ga air ini diambil lagi? Itukan sebelumnya ada penelitian terlebih dahulu. Setelah di sana ada pipa-pipa, akhirnya ngomongnya itu salahnya petani, perambah hutan, digunduli. Lah kenapa dulu saya waktu kecil itu Sungai Brantas itu besar karena belum ada pipanisasi”

“Coba kalau ga percaya kalau dari LH berani, kita lihat sama-sama. Kalau nanti debit airnya ga bertambah, taruhannya saya, berapa desa itu, termasuk vila, termasuk hotel. Nah inilah sebuah kebijakan,”

Mengingat permasalahan air ini untuk kepentingan masyarakat luas termasuk kota di luar Kota batu, maka sebaiknya diupayakan konsep kemitraan yang baik dalam hal konservasi hutan, antara pemerintah, masyarakat petani, dan sektor swasta. Agar masalah dapat terpecahkan dan melindungi kepentingan semua pihak.

Dari seluruh uraian diatas mengenai faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan fiskal pada kawasan agropolitan Kota Batu, peneliti membuat resumennya dalam tabel berikut :

Tabel 5.20

**Ringkasan Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Fiskal pada
Kawasan Agropolitan Kota Batu**

No.	Kategori	Faktor Penghambat	Implikasi
1	Komunikasi	Kurangnya Koordinasi Tim Pokja Agropolitan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada pemilihan prioritas program, sehingga program dari SKPD dapat tumpang tindih • Koordinasi hanya pada saat pembagian dana, alokasi dana pun tidak berdasar pada prioritas • Tidak ada Monev
2	Sumberdaya	Kurangnya sumber dana	<ul style="list-style-type: none"> • Menghambat terealisasinya pelaksanaan program dalam rangka pengembangan kawasan agropolitan oleh masing- SKPD dan lembaga teknis.
3		Penyempitan lahan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Merambah lahan hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Perambahan lahan hutan dapat mempersulit perkiraan penggunaan pupuk
4		Pendampingan PPL kurang efektif karena inkompetensi PPL	<ul style="list-style-type: none"> • PPL tidak dapat mengarahkan petani untuk melakukan perbaikan cara bertani, administrasi, dan mengatasi perubahan iklim sehingga tingkat produktivitas rendah • Materi sosialisasi informasi program dan bantuan pemerintah tidak sampai ke petani kecil, hanya sampai dan dimanfaatkan ke pengurus Gapoktan
5		Rendahnya SDM masyarakat petani	<ul style="list-style-type: none"> • Pola pikir petani yang tidak jauh ke depan membuat respon mereka terhadap program pemerintah untuk

			<p>pengembangan pertanian kurang baik, fasilitas pemerintah disalahgunakan sehingga manfaat program, tidak berlangsung lama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mitra swasta tidak bisa meneruskan bekerjasama untuk pemasaran hasil produksi karena petani tidak komitmen memenuhi permintaan suplai.
6	Disposisi atau Sikap	Perubahan visi dari sentra pertanian berbasis pariwisata ke sentra pariwisata berbasis pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Prioritas pembangunan beralih ke pariwisata sehingga perhatian terhadap sektor pertanian berkurang, karena peralihan ini juga diadaptasi oleh sebagian SKPD (program kerja, anggaran) • Pembangunan ekonomi kurang menyentuh masyarakat kecil, karena kegiatan ekonomi sebagian besar masyarakat adalah di bidang pertanian bukan pariwisata. Perkembangan perekonomian hanya dirasakan oleh pengusaha besar dan bahkan bukan masyarakat Kota Batu
7	Struktur Birokrasi	Belum terbentuknya Bapelu	<ul style="list-style-type: none"> • Manfaat penyuluhan kurang dirasakan petani • Tidak ada Monev untuk mengetahui manfaat penyuluhan dan <i>feedback</i> dari masyarakat
8		KUD Kota Batu hanya menangani hasil olahan susu perah	<ul style="list-style-type: none"> • Pemasaran dan pengolahan hasil sektor lain (pertanian, perkebunan, perikanan, hortikultura) kurang diperhatikan .
9	Kepentingan yang dipengaruhi	Tim Pokja membutuhkan partisipasi banyak instansi, namun koordinasi Tim	<ul style="list-style-type: none"> • Program kerja tumpang tindih, masing-masing SKPD ingin menunjukkan eksistensinya

		Pokja kurang	untuk membantu petani. Padahal jika koordinasi bagus dana program kerja yang tumpang tindih bisa direalokasi untuk membiayai program lain yang belum terlaksana atau sasaran masyarakat petani yang belum tersentuh.
10	Faktor kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat	Peralihan transaksi dari Pasar Batu ke Pasar Pujon dan Pasar Karang Ploso, dan konflik kepentingannya	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar Batu yang merupakan pasar resmi Kota Batu sepi transaksi • Konflik kepentingan pihak-pihak tertentu membuat upaya menarik minat penjual dan pembeli untuk kembali ke Pasar Batu dengan merenovasi Pasar Batu belum dapat terealisasi
11	Karakteristik lembaga dan penguasa	Ekspektasi DPRD terhadap BUMD agar lebih dapat menghasilkan keuntungan	<ul style="list-style-type: none"> • BUMD tidak dapat beroperasi karena dikritik oleh DPRD tidak bisa menghasilkan keuntungan, padahal kegiatan yang dilakukan BUMD adalah untuk melakukan regulasi dan menstabilkan harga.
12		Preferensi walikota Batu terhadap sektor pariwisata sebagai sektor utama pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Berkurangnya perhatian pada pembangunan sektor pertanian, misalnya saja dari segi alokasi dana
13	Kepatuhan dan daya tanggap implementor	Pemberian izin pemasangan pipa-pipa besar di hutan untuk diarahkan ke villa dan hotel yang mengurangi debit air	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi debit air untuk pengairan lahan pertanian.

Sumber : data primer, diolah peneliti

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan yang diperoleh peneliti antara lain:

1. Implementasi kebijakan pengeluaran pada kawasan agropolitan Kota Batu tahun 2011 banyak dilakukan pada sub sistem penunjang, diikuti kemudian implementasi pada subsistem agribisnis hulu, hilir, dan yang terakhir pada subsistem usaha tani. Implementasi kebijakan pengeluaran pada kawasan agropolitan Kota Batu banyak dipengaruhi oleh perubahan visi daerah dari Kota Batu sebagai sentra pertanian berbasis pariwisata menjadi sentra pariwisata berbasis pertanian. Kebijakan perpajakan belum digunakan oleh pemerintah untuk menginsentif pembangunan agropolitan, ketentuan perpajakan masih berlaku umum. Ada dua retribusi yang dipungut terkait dengan agropolitan yaitu retribusi pada Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Benih Ikan.
2. Faktor pendukung implementasi kebijakan pengeluaran pada kawasan agropolitan Kota Batu adalah : (1) sikap aparat pemerintah daerah yang mendukung masyarakat petani, (2) respon masyarakat yang baik terhadap program pemerintah untuk pengembangan agropolitan. Faktor penghambat implementasi kebijakan pengeluaran pada kawasan agropolitan Kota Batu yaitu : (1) kurangnya koordinasi tim pokja agropolitan, (2) kurangnya sumber dana, (3) penyempitan lahan pertanian, (4) pendampingan PPL yang kurang efektif, (5) rendahnya SDM masyarakat petani, (6) perubahan visi pembangunan ekonomi dari sentra pertanian berbasis pariwisata menjadi sentra pariwisata berbasis pertanian, (7) belum terbentuknya Bapelu, belum tersedianya KUD yang menangani semua sektor, (8) banyaknya kepentingan yang terlibat dalam pengembangan agropolitan, (9) konflik kepentingan di pasar Batu, dan (10) karakter penguasa.

6.2 Saran

1. Pemerintah Kota Batu diharapkan dapat menentukan prioritas pembangunan pada sektor pertanian, yang sesuai dengan karakter dan kultur daerah baik dari segi penduduk, budaya, maupun alamnya, agar hasil perkembangan perekonomian dapat dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat, bukan hanya lapisan masyarakat tertentu.
2. Koordinasi antar anggota tim pokja Agropolitan agar dapat ditingkatkan agar program kerja yang dijalankan tidak tumpang tindih dan mampu menyentuh permasalahan yang lebih luas. Setidaknya rapat koordinasi untuk perencanaan pada awal tahun dan rapat evaluasi pada akhir tahun dapat diselenggarakan dengan efektif.
3. Peningkatan fungsi pengawasan dan evaluasi dari setiap program pengembangan agropolitan yang telah dilakukan agar dapat diketahui pasti bagaimana manfaatnya bagi masyarakat dan bagaimana urgensi keberlanjutan program tersebut di periode berikutnya. Sosialisasi di tahap awal juga harus diperhatikan, apakah informasi telah terserap sesuai sasaran atau tidak.
4. Peningkatan SDM baik dari pihak aparat pemerintah sebagai implementor (terutama yang terjun langsung ke lapangan) dan masyarakat petaninya. Hal ini bertujuan agar setiap program pemerintah untuk pengembangan agropolitan dapat dilaksanakan dengan baik, diterima dan dirasakan oleh masyarakat manfaatnya, dan pada akhirnya tercipta peningkatan produktivitas petani sehingga perluasan pasar dengan bekerjasama dengan mitra pun dapat langgeng berjalan. Adalah penting juga bagi masyarakat memahami hak-hak perpajakannya sebagai WP PBB, agar dapat dilakukan akomodasi bila terjadi beban pajak yang dirasakan terlalu berat bagi WP.
5. Menjalin kemitraan yang harmonis antara pemerintah, masyarakat, dan swasta agar setiap langkah kebijakan yang dibuat dapat memperhatikan kepentingan semua pihak atau setidaknya tidak ada pihak yang merasa dirugikan, demi kemajuan Kota Batu yang disebut sebagai Swiss kecil di Indonesia.
6. Memberikan fasilitas perpajakan untuk menginsentif pengembangan kawasan agropolitan, misalnya dengan fasilitas pengurangan atau pembebasan PBB bagi WP yang lahan pertaniannya digunakan untuk pertanian.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Arsjad, Nurdjaman et al. *Keuangan Negara*. Jakarta: Intermedia, 1992.
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI. *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*. Ed. Heru Subiyantoro dan Singgih Riphath. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2004.
-
- _____. *Era Baru Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*. Ed. Anggito Abimanyu dan Andie Megantara. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009
- Bird, Richard M. *Tax Policy And Economic Development*. London: The Johns Hopkins Press Ltd., 1992.
- Creswell, John W. *Research design: qualitative and quantitative approaches*. London: Sage Publications Ltd. 1994.
- Denzin, Norman K., dan Yvonna S.Lincoln. Trans. Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Due, John F. *Keuangan Negara: Perekonomian Sektor Pemerintah, cet.10*, terj. Iskandarsyah, Arief Janin. Jakarta: UI-Press, 1985.
- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi kedua*. Trans. Samodra Wibawa, etc. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Edward, George C. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980.
- Ekowati, Mas Roro Lilik. *Perencanaan, Implementasi & Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis)*. Surakarta: Pustaka Cakra, 2009.
- Executive Summary Penyusunan Master Plan dan Action Plan Agropolitan Kota Batu*. Batu : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu, 2010.
- Grindle, Merilee S. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press, 1980.
- Herber, Bernard P. *Modern Public Finance, Fourth Edition*. USA: Richard D. Irwin, Inc., 1979.

- Islamy, Irfan. *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Ismail, Tjip. *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta: Yellow Printing, 2007.
- Mansury, R. *Kebijakan fiskal*. Jakarta: YP4, 1999.
- _____. *Kebijakan perpajakan*. Jakarta: YP4, 2000.
- _____. *Pajak Penghasilan Lanjutan*. Jakarta: IND-HILL Co.,1996.
- Muhammad, Mar'ie. "Kebijakan Fiskal Di Masa Krisis 1997." *Kebijakan Fiskal: Pemikiran Konsep Dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004.
- Musgrave, Richard A. dan Peggy B. Musgrave. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek, ed. Kelima*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 1993.
- Neuman, W. Lawrence. *Social Research Methods: Qualitative And Quantitative Approaches*. Boston: Allyn and Bacon, 2006.
- Nugroho, Riant. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011.
- Nurmantu, Safri. *Pengantar Pajak Edisi 3*. Jakarta: Granit, 2005.
- Patton, Michael Q. *Qualitative Research And Evaluation Methods*. California: Sage Publications, Inc., 2002.
- P. H., Soetrisno. *Dasar-dasar Kebijaksanaan Ekonomi dan Kebijaksanaan Fiskal*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, UGM, 1983.
- Prasetyo, Bambang & Lina M. Jannah. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Rosdiana, Haula. *Pengantar Perpajakan: Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengkajian Perpajakan, 2003.
- Sekretariat Pokja Agropolitan. *Rapat Koordinasi Agropolitan di Kabupaten Kuningan 2010.*, Jakarta: Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian RI, 2010.
- Steinmo, Sven. *Tax Policy*. UK: Edward Elgar Publishing, 1998.

- Subiyantoro, Heru, dan Singgih Riphath . *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, Dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suprpto, Ato. “Kebijakan Penetapan Produk Unggulan untuk Kawasan Agropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Provinsi Banten”. 28 Juni 2011. Banten: Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, 2011.
- Sutopo, Ariesto Hadi, dan Adrianus Arief. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010.
- Suwandi. *Agropolitan: Meretas Jalan Meniti Harapan*. Jakarta: PT Duta Karya Swasta, 2005.
- Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus. *Ilmu Ekonomi*. Trans. Wasana M dan Jaka A. *Economics 12th ed.* Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan, 1986.
- Siahaan, Marihot P. *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sicat, Gerardo P. dan H. W. Arndt. *Ilmu Ekonomi Untuk Konteks Indonesia*. Jakarta: LP3S, 1991.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. *Kebijakan publik yang membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI, 2003.
- Taylor, Steven J., dan Robert Bogdan. *Introduction to Qualitative Research Methods : The Search for Meanings. Second edition*. USA: A Wiley-Interscience Publication, 1984.
- Tim Pokja Pengembangan Kawasan Agropolitan. *Laporan Kegiatan Tentang Pembuatan Database Kawasan Agropolitan*. Jakarta: Sekretariat Pokja Pengembangan Agropolitan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian RI, 2010.
- Thoha, Miftah. *Dimensi-dimensi prima ilmu administrasi negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Thuronyi, Victor. *Tax Law Design And Legal Drafting*. Washington D.C.: IMF, 1998.
- United Nations Development Programme Indonesia. *Sisi Lain Perubahan Iklim: Mengapa Indonesia Harus Beradaptasi untuk Melindungi Rakyat Miskinnya*. Jakarta : UNDP Indonesia, 2007.

Wibawa, Samodra, Yuyun Purbokusumo, dan Agus Pramusinto. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses, Edisi Revisi*. Jakarta: PT Buku Kita, 2008.

Witoelar, Rachmat. "Kata Pengantar". *Sisi Lain Perubahan Iklim: Mengapa Indonesia Harus Beradaptasi untuk Melindungi Rakyat Miskinnnya*. Jakarta : UNDP, 2007.

Serial

"Awat, Prediksi Meleset". *Kompas*. 30 Agustus 2010. Hal.15

"Gagal Panen, Warga di Dua Distrik Terancam Kelaparan". *Kompas*. 18 November 2011. Hal.23.

"Impor Teh Dicemaskan". *Kompas*. 18 November 2011. Hal.18.

Wang, Yanfang, dan Shuqiang Zhang. "Comparative Analysis of Agriculture Industrialization: Hebei Province and Shandong Province." *International Journal of Business and Management* 5:12 (2010): 173.

"Yingluck Belajar dari Banjir". *Kompas*. 18 November 2011. Hal.10.

Karya Lain

Bimantoro, Satya. *Agropolitan sebagai Alternatif Sarana Pembangunan Pertanian : Studi Kasus Kebijakan Perencanaan Kabupaten Kulon Progo*. Tesis Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, FE Universitas Indonesia. 2003.

Irianto, Edi Slamet. *Optimalisasi Penerimaan Keuangan Negara Guna Meningkatkan Kualitas SDM Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Lembaga Pertahanan Nasional, 2010.

Rosdiana, Haula, et al. *Akselerasi Pembangunan Agropolitan Melalui Revitalisasi Kebijakan Fiskal*. Hibah Riset Strategis Nasional UI 2011 didanai oleh DRPM Universitas Indonesia. 2011.

Simangunsong, Timbul. *Pengaruh Pengean Pajak Pertambahan Nilai terhadap Harga Hasil Pertanian dan Daya Saing di Pasaran Ekspor*. Tesis Program Magister Ilmu Administrasi kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan, FISIP Universitas Indonesia. 2002.

Publikasi Elektronik

Arestic, Philip, dan Malcolm Sawyer. "Reinventing Fiscal Policy." *Journal of Post Keynesian Economics* 26.1 (2003). Pp 3-25. <http://www.jstor.com>

Arli Aditya Parikesit, "Pertanian Organik di Jepang", 10 Agustus 2009, <http://netsains.com/2009/08/pertanian-organik-di-jepang/>

Badan Pusat Statistik. *Data Strategis 2011*. Agustus 2011. <http://www.bps.go.id/aboutus.php?65tahun=1>

_____. Statistik Indonesia 2011. Agustus 2011.

Byerlee, Derek, dan Gustavo Sain. "Food Pricing Policy in Developing Countries: Bias Against Agriculture or for Urban Consumers?". *American Journal of Agricultural Economics* 68.4 (1986). November 1986. Pp 961-969. <http://www.jstor.com>

Jha, Raghendra. "Fiscal Policy In Developing Countries: A Synoptic View." *ASARC Working Paper 01*. 13 Maret 2007, 1-39. <http://www.crawford.anu.edu.au>.

Kay, Cristobal. "Globalisation, Peasant Agriculture, and Reconversion." *Bulletin of Latin American Research* 16.1 (1997). pp 11-24. <http://www.jstor.com>

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*. 2011.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Lampiran Peraturan Presiden RI No.5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, Buku I Prioritas Nasional*. 2010. <http://www.bappenas.go.id/node/131/>

"Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Sawah di Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota, data tahun 2005- 2006". 12 November 2011. <http://www.jabarprov.go.id/index.php/subMenu/778>

LeBlanc, Michael, dan James Hrubovcak. "The Effect of Tax Policy on Agregate Agricultural Investment." *American Journal of Agricultural Economics* 68.4 (1986). November 1986. Pp 553-559. <http://www.jstor.com>

"Pertumbuhan Ekonomi Kota Batu Peringkat 4 Nasional", 21 Juni 2011. <http://www.batukota.go.id/berita/ekonomi/pertumbuhan-ekonomi-kota-batu-peringkat-4.html> .

“Profil Kota Batu”, <http://www.batukota.go.id/profil/> .

Ryerson, Robert, dan Stan Aronoff. “‘Why’ ‘Where’ Matters: Understanding and Profiting from GPS, GIS, and Remote Sensing,” Kim Geometrics Corporation, 2009. www.geoeconomy.com.

Sutjahjo, Sarjono Hadi, “Perubahan Iklim dan Ancaman Krisis Pangan Dunia”, 5 Februari 2011.

<http://metrotvnews.com/read/analisdetail/2011/02/05/134/Perubahan-Iklim-dan-Ancaman-Krisis-Pangan-Dunia->

Lain-Lain

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan & KB Pemerintah Kota Batu. *Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2011.*

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPMPKB Kota Batu Tahun 2010.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu. *Daerah Dalam Angka 2011.*

Indeks Pembangunan Manusia Kota Batu 2010.

Musrenbang Kota Batu 2012.

Produk Domestik Regional Bruto Kota Batu 2010.

Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Pemerintah Kota Batu. *Laporan Akhir Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan di Kota Batu.* 2010.

Dinas Sumberdaya Air dan Energi Pemerintah Kota Batu. *Perencanaan Fisik Kegiatan Tahun 2010 (PLTMH, PLTS, Biogas).*

Kantor Ketahanan Pangan Pemerintah Kota Batu. *Laporan Akhir Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan di Kota Wisata Batu.* 2011

Laporan Akhir Seksi Distribusi Pangan. 2010.

Keputusan Walikota Batu Nomor 180/59/KEP/422.01.3/2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Kota Batu

Pemerintah Kota Batu. *Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Batu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu Nomor 180/423/422.012/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2011.*

Pemerintah Kota Batu. *Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Batu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu Nomor 180/422.012/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) Tahun Anggaran 2011.*

Sub Bagian Sarana Perekonomian Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah Kota Batu. *Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Ekonomi Kota Batu Tahun 2011.*

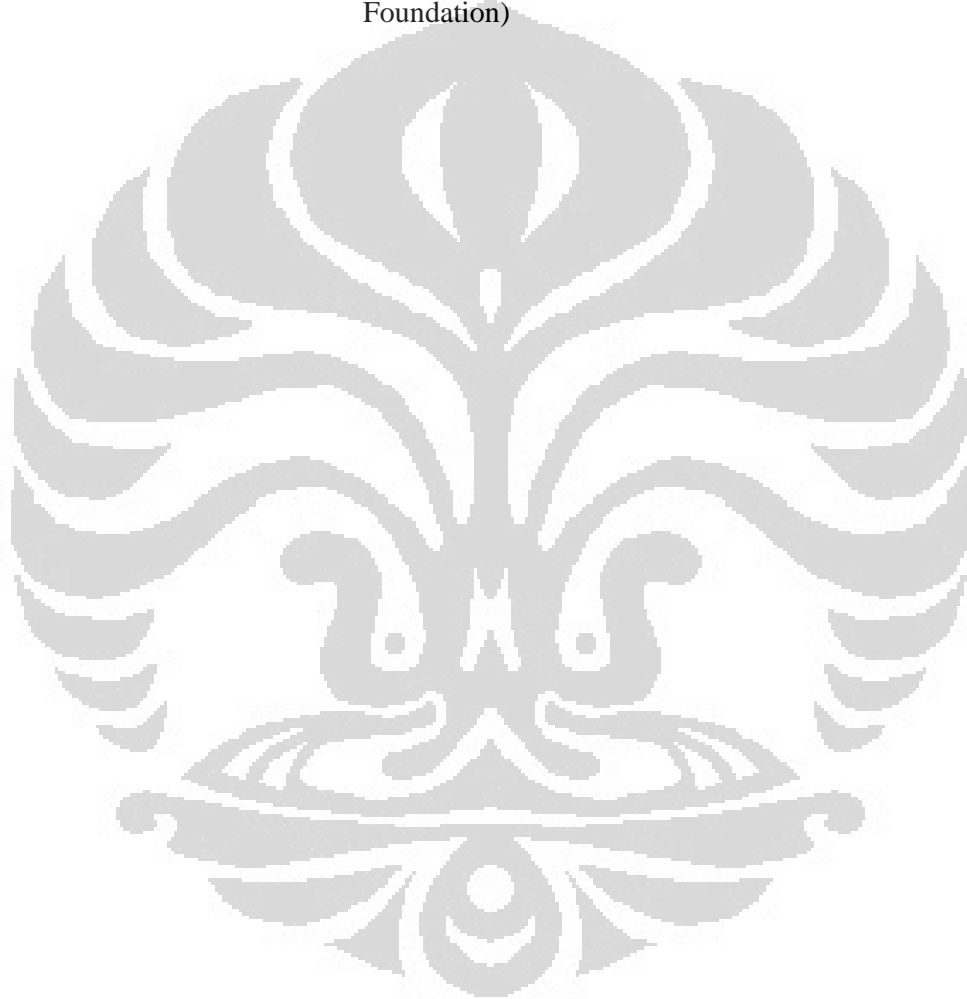




DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Neni Susilawati, S.Sos
Tempat dan Tanggal Lahir : Tangerang, 24 April 1985
Alamat : Jl. Chairil Anwar, Gg. Swadaya II No.58 RT
02 RW 01 Kel. Kreo Kec. Larangan
Tangerang 15156
Nomor Telepon, : 0856 155 7195
Surat Elektronik : neni.susilawati@gmail.com
Nama Orang Tua :
Ayah : Karso
Ibu : Munaroh
Riwayat Pendidikan Formal :
SD : SD Negeri Kreo 04, Tangerang
SMP : SLTP Negeri 153, Jakarta Selatan
SMA : SMU Negeri 47, Jakarta Selatan
S1 : Ilmu Administrasi Fiskal, FISIP Universitas Indonesia
Prestasi dan Penghargaan :
1. 2003 Mahasiswa Program PPKB UI
2. 2003 Mahasiswa Penerima Blockgrant Dana Pendidikan S1,
Direktorat Pendidikan Tinggi
3. 2004 Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan Baznas
DKI Jakarta
4. 2005-2006 Mahasiswa Penerima Beasiswa Goodwill, *Goodwill
International Foundation*
5. 2006-2008 Asisten Mahasiswa mata kuliah Metode Penelitian
Sosial dan Metode Penelitian Administrasi
6. 2010 Penerima Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (semester
1) , Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI

7. 2010 Penerima Beasiswa BPPS, Direktorat Pendidikan Tinggi
8. 2011 Penerima Bantuan Penulisan Tesis, Bidang Perubahan Iklim Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI
9. 2011 Penerima Bantuan Penulisan Tesis S2 UI-Sylff Tahun Ajaran 2011/2012 semester ganjil, Sasakawa (Tokyo Foundation)



Pedoman Wawancara
Implementasi Kebijakan Fiskal Pada Kawasan Agropolitan Kota Batu

1. Program kerja atau kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh SKPD terkait dalam rangka pengembangan kawasan agropolitan
2. (bagi Petani/Gapoktan) bantuan atau subsidi apa saja yang diterima dari pemerintah daerah, atau program bantuan/subsidi yang diketahui
3. Program Pembelian barang dan jasa oleh pemerintah daerah untuk pengembangan kawasan agropolitan
4. Program impor barang dan jasa oleh pemerintah daerah ntuk pengembangan kawasan agropolitan
5. Program Penjualan barang dan jasa oleh pemerintah daerah ntuk pengembangan kawasan agropolitan
6. Program ekspor barang dan jasa oleh pemerintah daerah ntuk pengembangan kawasan agropolitan
7. Pemberian subsidi oleh pemerintah daerah ntuk pengembangan kawasan agropolitan
8. Pemberian bantuan sosial oleh pemerintah daerah ntuk pengembangan kawasan agropolitan
9. Prosedur perolehan subsidi/bantuan
10. Kemudahan pendirian organisasi atau perusahaan oleh pemerintah daerah ntuk pengembangan kawasan agropolitan
11. Program pendidikan cuma-cuma oleh pemerintah daerah ntuk pengembangan kawasan agropolitan
12. Pemberian tanah untuk pertanian oleh pemerintah daerah ntuk pengembangan kawasan agropolitan
13. Bentuk pemberian lainnya oleh pemerintah daerah ntuk pengembangan kawasan agropolitan
14. Pemungutan retribusi oleh pemerintah daerah ntuk pengembangan kawasan agropolitan
15. Pengenaan denda oleh pemerintah daerah ntuk pengembangan kawasan agropolitan
16. Penyitaan barang oleh pemerintah daerah ntuk pengembangan kawasan agropolitan
17. Bentuk pengambilan lainnya oleh pemerintah daerah ntuk pengembangan kawasan agropolitan
18. Pemberian kredit perumahan atau kredit murah oleh pemerintah daerah ntuk pengembangan kawasan agropolitan
19. Pemberian kredit murah untuk intensifikasi pertanian oleh pemerintah daerah ntuk pengembangan kawasan agropolitan
20. Pemberian pinjaman lain oleh pemerintah daerah ntuk pengembangan kawasan agropolitan
21. Pinjaman jangka panjang (lebih dari 1 tahun) yang dilakukan oleh pemerintah daerah ntuk pengembangan kawasan agropolitan
22. Pinjaman jangka pendek (kurang dari 1 tahun) yang dilakukan oleh pemerintah daerah ntuk pengembangan kawasan agropolitan
23. Pemungutan pajak dan retribusi oleh pemerintah daerah ntuk pengembangan kawasan agropolitan

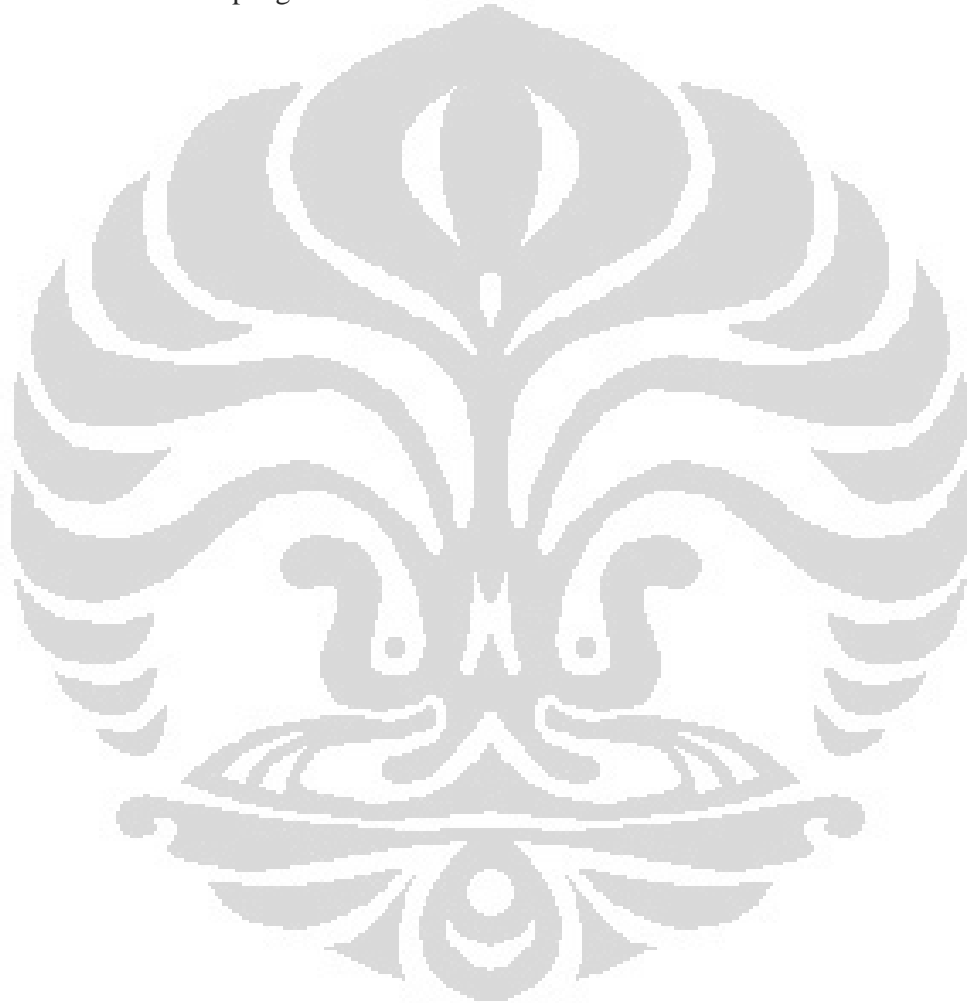
24. Fasilitas/insentif pajak yang berlaku untuk pengembangan kawasan agropolitan
25. Kemudahan administrasi dan perizinan atau fasilitas lain dalam lingkup kegiatan agropolitan
26. Evaluasi atas program yang telah dilakukan
27. Respon masyarakat terhadap program yang diberikan dan perubahan yang terjadi
28. Pendapat tentang perkembangan perekonomian Kota Batu secara umum
29. Pendapat tentang perkembangan perekonomian Kota Batu bila dilihat dari sektor pertanian (agropolitan)
30. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah ataupun masyarakat Kota Batu dalam pengembangan kawasan agropolita Kota Batu
31. Implikasi yang dirasakan sejak perubahan status menjadi Kota Batu
32. Pendapat mengenai pergeseran fokus kebijakan perekonomian dari sektor primer (pertanian berbasis pariwisata) ke sektor tersier (pariwisata berbasis pertanian)
33. Koordinasi semua pihak (Walikota, SKPD, dan masyarakat) dalam pengembangan kawasan agropolitan Kota Batu

Dalam setiap mengajukan pertanyaan tentang program kegiatan atau kebijakan pemerintah daerah, jika memang program tersebut ada, maka wawancara diperdalam dengan pertanyaan-pertanyaan terkait indikator-indikator dibawah ini:

- Tujuan kebijakan/program (jangka pendek atau panjang)
- Jenis manfaat yang dihasilkan dari kebijakan fiskal. (aktual atau formal, ritual, dan simbolis)
- Dasar hukum pelaksanaan
- Implementor
- Pengambil Keputusan
- Karakteristik lembaga dan penguasa dalam implementasi kebijakan
- Pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi (kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor)
- Sumber daya yang dilibatkan
- Sumber dana
- Besar dana
- Kelompok sasaran kebijakan
- Sistem manajemen/pelaksanaan program
- Pengukur keberhasilan
- Dampak /perubahan dan penerimaan pada masyarakat
- Derajat perubahan yang diharapkan dari kebijakan fiskal dibawah ini? (apakah mensyaratkan perubahan sikap & perilaku?)
- Kepatuhan dan daya tanggap implementor

Pedoman Observasi
Implementasi Kebijakan Fiskal Pada Kawasan Agropolitan Kota Batu

1. Kegiatan di Gapoktan dan kegiatan Petani (keberadaan toko pertanian, kegiatan proses produksi, keberadaan barang bantuan yang telah diterima)
2. Keberadaan dan penggunaan alat pertanian, alat olahan hasil produksi, saprotan, dan infrastruktur dari pemerintah
3. Pelaksanaan program promosi melalui pameran
4. Foto jalan usaha tani dan jalan produksi pertanian
5. Foto sistem pengairan



Transkrip Wawancara

1. Sri Wahyuni, Kepala Seksi Penyusunan Program, Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemerintah Kota Batu.

22 Desember 2011, Pkl. 14.00, di Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemerintah Kota Batu.

1	T:	ya namanya juga ini saya tak tahu. Kalo ini apa namanya distanhut gabung sama dinas kehutanan ga sih bu?
	J:	iya gabung dari 2009 sebelumnya gabung sama dinas pertanian terus gabung
2	T:	aku pernah denger daerah yang dekat hutan yang pemanggu hutan itu, katanya ada program sewa lahan ya bu buat masyarakat kalo mau nanemin apa gitu.. apa itu MDH ya?
	J:	(bicara dengan orang lain) mas itu kalo data yang tentang sewa lahan itu ada ga..untuk lahan hutan ya mba maksudnya heh kayanya ga ada bu..bukan dinas kehutanan itu..segi tani itu
3	T:	sharing profit kali ya bu bukan sewa..
	J:	ini bukan hutan..pertanian..disini ga ada kan ya disini Itu mah tani kayanya..disini hutani
4	T:	perhutani
	J:	itu ada kaya kopi gitu..boleh ditanami..dia menanam di bawah tanah itu
5	T:	nanti sharing profit gitu ya mas..oo itu nanti buat warga disana ya
	J:	iyaa itu memang di sharing profitkan..nanti ada MOU nya
6	T:	itu dari tahun kapan ya mas
	J:	sudah dua tahun 2009-2011... kalo mau nanya itu nanti bisa ketemu sama mba nani
7	T:	Begitu,,
	J:	nanti aku antarkan ya..aku punya data ini pengembangan kawasan
8	T:	Laporan kegiatannya ada anggarannya ga mba?
	J:	ga ada..ga ta masukan..ini Cuma kegiatannya ada
9	T:	ini kalo gini rencana kegiatan 2012 mungkin diperlukan
	J:	iya gapapa
10	T:	dalam penyusunan rencana kerja..itu selaras sama anggota pokja lain ga sih bu?
	J:	ga..tapi emang ada pertemuan untuk kepala dinas..biar ga tumpang tindih gitu kan mba?
11	T:	iya betul
	J:	iya itu kaya kemaren dibentk semacam pokja tapi bukan pokja..kaya iya jadi nanti ada pertemuan..itu kaya disperindag pertanian dengan ketahanan pangan terus pemberdayaan masyarakat..mereka gabung.. semuanya membuat draft..jadi biar ga tumpang tindih kegiatannya
12	T:	Koordinatorannya?
	J:	Bappeda..

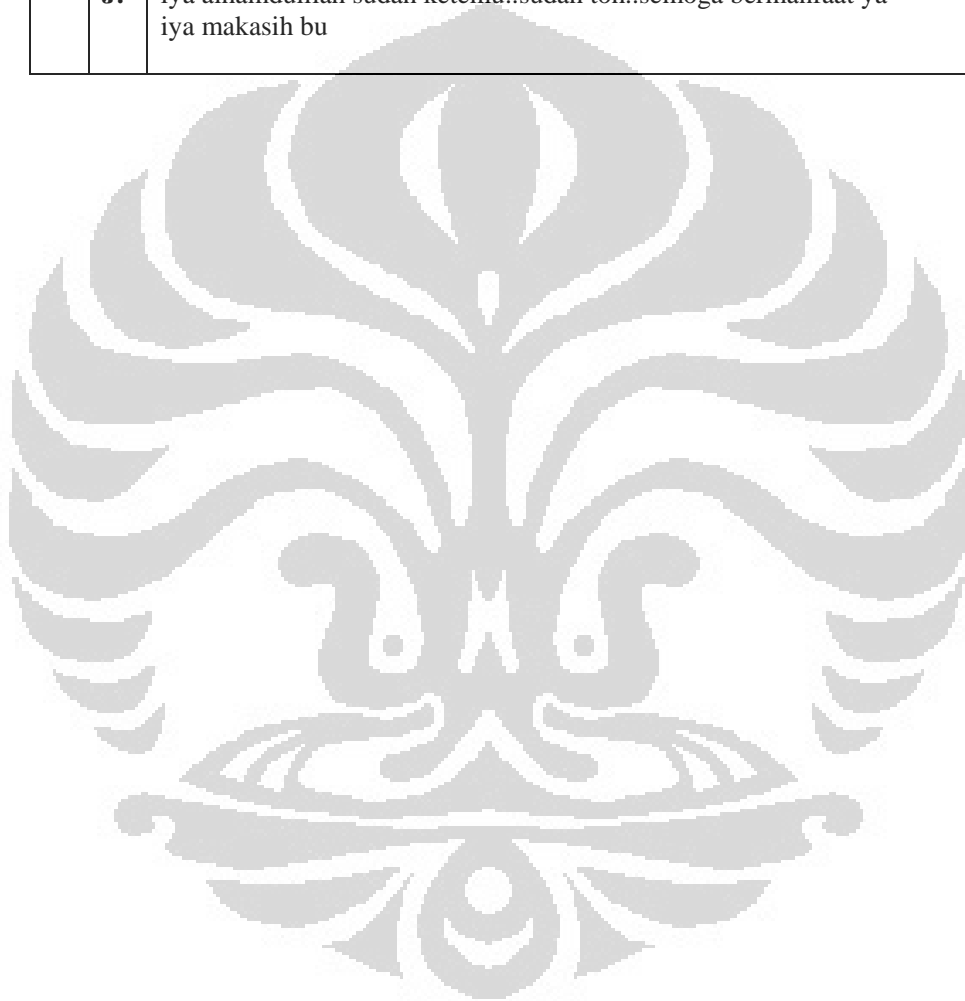
13	T: J:	Anggarannya dari siapa? dari bappeda....
14	T: J:	ooo berarti bappeda itu memang koordinatonya ya bu...itu dasarnya apa? oo iya.. kalo itu aku ga tau semua dari bappeda...jadi nanti bappeda yang menentukan pagu anggarannya..setiap dinas nanti menyesuaikan pagu dengan anggaran..misalnya dinas ini dapat pagu 8,4 M nanti ya kegiatannya menyesuaikan tidak kurang tidak lebih
15	T: J:	ooo kegiatannya ya bu yang menyesuaikan.. oo berarti bukan kegiatan dulu baru pagu ya bu itu kan sudah dulu..jadi kan ga satu kali ya..itu sebelumnya juga sudah ada..jadi pertama itu kan kita bottom up..dari desa kelurahan menentukan program yang akan dilakukan..nanti dikumpulkan..iya jadi nanti ada musyawarah tingkat kota..dan itu nanti I rekap..jadi untuk kecamatan akan direkap
16	T: J:	oo itu dikumpulkan iya..itu Bappeda juga..jadi nanti setiap kecamatan ada kaya buku pe bendel gitu ada kesehatan, pembagian benih padi atau apa, nanti keliatan lokasinya dimana, kan nanti ada ujung tombaknya kaya PPL itu..jadi nanti kalo ada kegiatan apa didistribusikan kemana lewat PPL yang fungsional yang di lapangan
17	T: J:	Satu PPL berarti satu desa ya? Oo berarti dari 24 ya iya..tapi nanti ada juga PPL bantuan, ada juga yang honorer, ada juga yang dari pusat
18	T: J:	oo PPL itu fungsinya itu menjembatani ya, kalo ada masalah disampaikan iya jadi mereka yang menjembatani lalu mereka juga tugasnya membina, menampung aspirasi yang dari bawah..jadi kita punya kelembagaan namanya Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) ini si kelompok tani yang ada di desa pada bergabung..dan si PPL ini yang mendampingi kaya kalo ada pertemuan..mungkin nanti ada informasi disini,,,nanti PPL yang menyampaikan
19	T: J:	oo jadi PPL itu seperti ini ya bu...ehm apa ya...kaya ini kan ada perubahan cuaca yang kan petani ga ngerti di kasih tau iya bener..mereka nanti yang memberi tahu
20	T: J:	oo kaya ngasih penyuluhan begitu..atau ga kaya mencarikan pelatihan gitu ya iya..namanya itu SLPHT (Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu). Jadi itu nanti petaninya ada berapa misalkan tiap hari apa..biasanya SLPHT Apel. Jadi nanti petani yang terdaftar..mereka itu sekolah istilahnya Nanti itu PPL yang ngajar..misalkan untuk budidaya organik..kaya apel yang baik itu seperti apa. Terus ada lagi petugas yang dari provinsi itu namanya petugas BOPT, itu untuk khusus tanaman apa itu hama penyakit itu..ada petugas khusus dari provinsi..gajinya dari provinsi tapi wilayah kerjanya per kecamatan..jadi nanti dia informasikan ke badan..hama penyakit apa yang ada..begitu jadi saling koordianasi ke PPL ke dinas.
21	T:	kalo ini bantuan buat masyarakat..Dinas ini melakukan pembelian barang atau jasa apa gitu untuk pengembangan agropolitan

	J:	iya itu masuk ke kegiatan..jadi misalkan ada kegiatan pengembangan agribisnis..nah di dalam kegiatan itu ada pembangunan gudang kompos, pembangunan bibit kentang, pengadaan bibit sayuran atau apalah..ya itu lewatnya pengadaan dari APBD 1, APBD 2, DAK..walaupun DAK pertanian sempat vakum tapi kini ada lagi..yang rutin itu DAK perikanan
22	T: J:	Pembelian itu masih lokal..ada yang impor? Maksudnya se indonesia gitu iya ga ada impor..paling ya paling jauh Malang lah.
23	T: J:	Kalo ekspor gimana? ada si disini yang ekspor, kaya bu luki
24	T: J:	iya..udah ketemu kan? Nah itu si bu itu yang maju..salah satu ketua gapoktan itu..dananya juga mencukupi..jadi ya bisa ekspor ke luar..
25	T: J:	kalo Gapoktan satu desa satu? Iya
26	T: J:	kalo ekspor persentasenya kaya peternakan, petani ternak gitu berapa? masih kecil tapi kayanya..setau saya karena kan resikonya juga lumayan. Saya juga tau itu kesemek apa..tapi saya juga belum ketemu orangnya..mungkin itu bu luki sudah cerita
27	T: J:	ooo masih kecil ya ruang lingkup mainnya masih lokal..oo tapi meninggal katanya..jadi bawaan..jadi tetangga nya ga ada yang berani nah ya itu..mungkin si ibu luki sudah cerita
28	T: J:	terus kalo bantuan atau subsidi bentuknya apa saja banyak itu..ada kok di program
29	T: J:	oia untuk kegiatan seperti pelatihan itu rutin atau gmana? iya rutin itu setiap tahun pasti ada
30	T: J:	by request? Apa itu sesuai permintaan petani atau apa? iya selain permintaan petani..kita kan juga harus menyampaikan program yang ada..seperti untuk mengajarkan yang organik kan petani banyak yang tidak tau..jadi kita harus kasih tau..mereka ga pake pestisida yang banyak..itu kan untuk menjaga kelestarian lingkungan..itu kan untuk kearifan lokal jadi ya kita yang mengadakan kegiatan ya kita..jadi kita harus melakukan penyuluhan
31	T: J:	kalo ini ada ga..pernah kasih lahan buat petani yang tidak punya? tidak kayanya..setau saya kayanya ndak..orang kita kantornya aja masih kontrak
32	T: J:	kontrak sama siapa? KUD
33	T: J:	KUD itu yang dicover apa aja? Apa semua usaha tani? kayanya kalo KUD sini ga deh..kayanya kalo disini lebih cenderung perternakan kaya susu
34	T:	nah kalo ini retribusi gimana?

	J:	nah kalo untuk pendapatan..retribusinya itu dari RPH..rumah potong hewan..per tahun sekitar 30 juta untuk PAD..sama disini pasar benih ikan..dapet distribusi..pokonya dapet 50 juta per tahun
35	T: J:	itu untuk RPH per hewan atau gimana? Cuma ada satu ya? iya Cuma satu
36	T: J:	kalo yang pasar benih? sebenarnya ada lagi..tapi itu punya provinsi..namanya balai benih ikan
37	T: J:	Kalo kredit murah? Untuk beli alat atau apa? ga ada..itu bukan wewenang dinas..ada memang itu kaya UKM..bukan disini tapi
38	T: J:	ada bantuan tapi kan ya..kaya uang? iya ada uang..tapi bukan kredit.
39	T: J:	kalo uang itu gimana? iya dulu itu ada PMUK , tapi sekarang ga ada, itu dari APBN
40	T: J:	OO Berati bukan alokasi dari dinas? bukan
41	T: J:	Kalo untuk pajak ada pemberlakuan khusus ga untuk agropolitan yang saya tau tidak, kayanya berlaku umum
42	T: J:	katanya naik terus ya pajak kaya untuk PBB iya naik, kalo di malang seperti itu..naik terus
43	T: J:	Fasilitas atau insentif lain untuk pengembangan agropolitan anu..bisa di liat di file aku ga apal
44	T: J:	ooo iya..terus ini..apa kendalanya kegiatan dari jenis pertanian yang untuk berkaitan ini kalo menurut saya ya..kalo untuk pengembangan kawasan agropolitan..kan sebelumnya udah di plot ya..sentra buah..sentra sayur.. dsb..kan udah ada master planning nya..tapi kayanya ga jalan..terus kayanya udah ga terlalu greget..kalo dulu kan 2006 masih ada gregetnya..kita ada studi banding gitu..
45	T: J:	nah terus kenapa tuh begitu? oo itu mungkin ini kali ya..apa karena kegiatan atau sosialisasinya yang kurang..
46	T: J:	sosialisasi dari mana kemana? mungkin dari pusat atau dari provinsi ya.. mereka itu kaya tidak memberi tahu baik aparat atau petani ada kegiatan ini untuk wilayah ini..dan menurut saya ada kepentingan suatu daerah yang harus mengerjakan ini..misalkan kementerian tanaman pangan..kan itu kaya ada kepentingan politis..nah ini menargetkan harus menyediakan pangan berapa..jadi kan daerah itu yang harusnya dipakai untuk pengembangan jadi dipake tempatnya..karena ada kegiatan SPLPP dengan kegiatan yang banyak.. Kan tiap itu apa..direkturatnya kan punya divisi sendiri-sendiri..mereka kan punya kepentingan sendiri..punya proyek sendiri dimana mereka menggalakan proyek sendiri..dengan melakukan apa gitu ke petani untuk

		<p>melakukan yang dia mau..kaya yang tanaman pangan itu kan..ada daerah yang ditarget harus produksi padi berapa ton..</p> <p>Iya jadi daerah yang tadi sudah dicanangkana dalam masterplan tadi jadi tergeser...sama ini petaninya sendiri..kan biar udah diplot misalkan dia harus menanam buah..tapi ka nada perubahan iklim atau apa..mereka kan juga mau untung..jadi susah untuk mengkotak-kotak..ya kalo kiranya mau nana mini ya ga mau rugi..</p>
47	<p>T: itu kan tadi ada peranan dari PPL itu, misalkan kan mereka turun langsung..tanya ke petani..kenapa sih bisa rugi..jadi kan bisa tetap disitu</p> <p>J: aduh kayanya ga bisa seperti itu..petani disini pinter2 malah kayanya mereka lebih kuat..hehehe</p>	
48	<p>T: oo jadi ga bisa nurut ya</p> <p>J: iya mereka punya kekuatan sendiri..itu kalo menurutku..hehehe</p>	
49	<p>T: jadi itu aja ya..oo ini..kalo kendala dana gimana?</p> <p>J: kalo dana itu..untuk pengembangan kayanya cukup</p>	
50	<p>T: kalo pendukungnya gimana..agar agropolitan nya bisa maju dan kebijakan anggarannya bisa maju gimana?</p> <p>J: ehhh..</p>	
51	<p>T: ini kultur ya?</p> <p>J: iya kayanya itu memang sudah begitu</p>	
52	<p>T: iya ini balik lagi alokasi dana nya itu sama program ya..jadi program</p> <p>J: mengikuti dana iya jadi program menyesuaikan dengan dana..kan dari sana diplot segini</p>	
53	<p>T: ooo jadi nanti dinas tinggal menyesuaikan aja ya..ehm terus ini..ada monev ga?</p> <p>J: oo iya ada..</p>	
54	<p>T: itu gimana..apakah melihat program di lapangan ga..ini di masyarakat ada perubahan dilihat lagi ga..ada perbaikan ga..kalo iya dimasukkan untuk RKA selanjutnya?</p> <p>J: ada..monev itu ada..kan dari pembangunan itu..jadi dari Bappeda, dari pembangunan juga meminta laporan ke kita..apa saja yang sudah dilakukan.</p>	
55	<p>T: ada ga permohonan agropolitan, perkembangan petani dari tahu ke tahun?</p> <p>J: aku ga ada punya..kalo monev aku ga begitu ini..dan ga ada itu yang dari tahun ke tahun</p>	
56	<p>T: ini agropolitan itu masuknya 2003?</p> <p>J: aku baru masuk 2005, jadi kalo 2003 aku ga tau</p>	
57	<p>T: oo..terus ini kan Batu itu iconnya batu kota wisata, ada pengaruh ga untuk agropolitan sendiri?</p> <p>J: eh ini ya karena pergantian pemimpin apa walikota itu..visinya beda..ini lebih kearah wisata, apa agro, kaya alun-alun..kayanya yang penting itu mendatangkan investor..iya itu</p>	
58	<p>T: nah kalo seperti itu..petani itu gimana..kan kalo agrowisata belum tentu ke level bawah ya..kan di atas</p>	

	J:	iyaa..iyaa..nah kalo gitu sampean Tanya ke petaninya..petaninya itu musti kalo petani mengeluh..kok ga keliatan pertaniannya
59	T: J:	itu berpengaruh ke anggarannya..alokasi untuk pertanian, apa dipotong apa gimana kalo itu anggrannya sekitar 9an..
60	T: J:	itu berkurang atau gimana? jadi 2008 ke 2009 naik, tapi untuk yang sekarang turun dan tetap
61	T: J:	kayanya itu cukup bu iya alhamdulillah sudah ketemu..sudah toh..semoga bermanfaat ya iya makasih bu



Transkrip Wawancara

2. Suwoko, Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemerintah Kota Batu.

20 Desember 2011, Pkl. 14.00, di Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemerintah Kota Batu.

1	<p>T: langsung aja ya pak ya, jadi kan saya kan disini ngebahas kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal kan instrumennya banyak pak, seperti dia kan ada pengeluaran, pajak, dan retribusi. Dan ini saya bahasannya juga semuanya, jadi ada subsistem agribisnis hulu, hilir, usaha tani sama jasa penunjangnya juga. Nah mungkin nanti yang saya tanyakan juga kan kalo memang tidak relevan kita skip pertanyaan lain aja gitu ya. Pertama, ada ga pak program pembelian barang dan jasa oleh pemerintah daerah untuk pengembangan kawasan agropolitan ini? Apa saja, pokoknya yang pemerintah daerah beli barang atau jasa yang dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan.</p> <p>J: Ok, menyangkut lingkup di dunia pertanian itu sangat banyak, tiap taun juga digulirkan, itu kalo infrastruktur itu jukdes, paham ga jukdes? Jaringan irigasi tingkat desa, jaringan irigasi tingkat usaha tani, jalan produksi, jalan usaha tani, rumah kompos kemudian alat produksi pupuk organik kemudia ada lagi itu, yang yang, itu yang infrastruktur, kemudian yang industry penunjang pertanian, pengolahan kebetulan yang itu macem-macem, mulai dari alat penggorengan segala macem itu itu, alat vakum, pengemasan untuk produksi,</p>
2	<p>T: itu beli semua pak?</p> <p>J: iya, kita itu kemudian disampaikan ke kelompok tani itu selain itu juga masih banyak, selain pembinaan bantuan modal juga ada</p>
3	<p>T: bantuan modal juga ada, oke. Itu salah satu kebijakan pengeluaran juga ya pak ya?</p> <p>J: iya betul</p>
4	<p>T: nah, apa namanya istilahnya ada poperdanya atau dasar hukumnya kan?</p> <p>J: dasar hukum jelas, soalnya gini kan kalo di dinas itu kita sekarang kan menginjak 2012, 2011 ya, yang akan kita laksanakan pada 2012 kita kan udah masuk rencana anggaran itu ditujukan ke DPR, DPRD disahkan baru nanti 2012 kita mengacu ke program yang sudah disahkan itu, itu seterusnya berlaku seterusnya itu kalo nanti ditengah semester perlu ada yang disikapi lagi itu masuk kesemester dua, masuk ke istilahnya PAK, perubahan anggaran keuangan, gitu. Akhirnya tidak menambah keuangan maksudnya mengalihkan, yang sifatnya prioritas</p>
5	<p>T: oh ya, nah itu tujuan program-program maksudnya pembelian itu ya tujuannya jangka panjang atau jangka pendek pak?</p> <p>J: kebanyakan yang disampaikan itu jangka panjang</p>
6	<p>T: itu untuk target berapa taun?</p> <p>J: minimal 5 tahun, untuk alat-alat berat itu ya, untuk penunjang. Untuk infrastruktur diatas sepuluh tahun</p>
7	<p>T: sepuluh tahun, untuk jangka pendek setaun gitu ada ga pak?</p> <p>J: setaun itu...</p>
8	<p>T: seperti pupuk misalnya,</p> <p>J: ahh pupuk itu kan untuk sekali pake, itu sifatnya stimulant, tidak selamanya kelompok tani itu bergantung kepada dinas. Kalo tiap tahun benih dari kita, pupuk dari kita nanti bangsa ini jadi apa ?</p>
9	<p>T: berarti itu terkaitnya didinas pertanian aja atau sama lembaga-lembaga lainnya pak?</p> <p>J: lembaga lain juga sama, lembaga lain juga sama kebetulan selain di dinas pertanian ya, itu yang</p>

		kerjasama sama kelompok kelompok itu biasanya ada disperindag yang mengatur distribusi pupuk, kemudia di UKM, UKM ada perhatian juga di home industry juga sama , pemberdayaan masyarakat, nakertos, juga sama. Banyak, sendi-sendi yang memberikan bantuan permodalan , bimbingan kepada kelompok-kelompok masyarakat itu.
10	<p>T: kalo yang tadi program-program itu yang melaksanakan di dinas itu dinas pertanian itu di tangan bapak ya dinas tanaman pangan dan hortikultura? Atau ada divisi lain?</p> <p>J: banyak, disini kan dinas pertanian ini terbagi menjadi lima bidang , pertama bidang tanaman pangan dan hortikultura, saya ini. Kemudian bidang produksi pemasaran hasil pertanian itu termasuk alat alat olahan itu dimasukkan disini, termasuk alat-alat yang menunjang produktivitas petani termasuk traktor, kaya tadi itu masuk ke bidang P2HP ini, disini juga ada peternakan, peternakan ini juga ada membantu memberikan fauna sapi plus alat-alat produksinya , sapi kemudian milk kaen, karpet , kalengnya, dibelikan semua itu sudah dalam bentuk siap gunting, sehingga kita bener-bener sampe saat ini</p>	
11	<p>T: itu perolehannya dari mana? Sapi-sapi itu berarti</p> <p>J: ya dana alokasi, dana dana</p>	
12	<p>T: maksudnya, berarti dinas ini beli?</p> <p>J: ya , dilelangkan dipihak ketiga kan, dinas itu tidak bisa membeli apapun, tidak ada DPA nya, itu bisa beli sendiri, tidak bisa itu dipihak ketiga kan, sampe ATK seperti ini dipihak ketiga kan, dilelang.</p>	
13	<p>T: kalo tadi itu sumber dananya dari itu ya, kita ngajuin anggaran dulu baru nanti kalo ada penyesuaian ditengah tahun biasa seperti itu ya, nah kalo itu pak besar dananya apa namanya, untuk pembelian itu ya, pembelian barang dan jasa, ada ga laporan yang saya bisa liat. Seperti laporan kegiatan, laporan kegiatan yang kaya tadi ya yang dari dinas pengembangan barang dan jasa misalnya bantuan-bantuan apa, yang bisa saya temukan disitu pak?</p> <p>J: kalo cari di, saya sendiripun ga bisa menyebutkan, masing-masing pos itu udah ada pos masing-masing, satu misalnya saja, satu paket irigasi itu berkisar antara 8 9 juta, itu dipaketkan. Kadanga-kadanag juga sampai 66 juta, itu sudah ada alokasinya masing-masing.</p>	
14	<p>T: itu ada laporan tertulisnya kan?</p> <p>J: ada</p>	
15	<p>T: bisa saya liat ga pak?</p> <p>J: nah itu kalo kesana kamu, nanti sampean bukan hanya disini, disini terlalu simple, bukunya di mba Sri sana, di bagian program</p>	
16	<p>T: mba sri itu bagian program</p> <p>J: program bagian pangan</p>	
17	<p>T: iya sih, program juga rencananya diwawancarain juga, tapi belum sempet dapet nomer konteknya.</p> <p>J: iya nanti, gapapa</p>	
18	<p>T: kalo import barang dan jasa ada juga ga sih pak?</p> <p>J: import, kalo import kayanya belum ya. Karna di tahun ini tuh mencanangkan produk dalam negeri, produk-produk local.</p>	
19	<p>T: kalo penjualan barang dan jasa memang di,</p> <p>J: bentar lagi, kalo barang import memang mesin bukan kita yang impor, mesin alat instan itu banyak yang impor, tapi bukan kita yang mendatangkan loh ya, tapi memang distributornya ada, pabrikannya ada.</p>	

20	T: J:	oooo, tapi yang request dinas pertanian kan? iya
21	T: J:	nah itu kan berarti ada ya program import barang itu, jadi masuk kedalam program anggaran tadi itu pak, anggaran tahunan itu? maksudnya, disinikan yang tidak diutamakan alat importnya alat instan bukan, tidak. Missal alat instan untuk produk A, nah itu yang kita minta, bukan berarti kita minta kepada importirnya, tidak. Nanti terlalu berbelit-belit, susah, nah itu yang dipasaran ada tuh apa, gitu , semisal kita make traktor merek dakuta, ya kita make dari sana. Dakuta juga import toh dari jepang, bisa saja nanti diarahkan ke produk cina, nah kita ngga bisa menerima seperti itu, sifatnya gimana, itu udah termasuk pengadaan barang. Caranya mendapatkan barang seperti apa itu ada, keadaannya itu
22	T: J:	kalo penjualannya pak, misalnya petani yang ngumpulin produknya terus nanti dinas yang menjualkan, ada ga yang kaya gitu? ngga ada
23	T: J:	ngga ada ya, kalo ekspor? ekspor kayanya belum
24	T: J:	belum yah, kalo ini pak pemberian subsidi , tadi itu subsidi pasti ada dari pemerintah, kalo kaya pupuk-pupuk itu semacam pupuk organic katakanlah itu mengacu pada peraturan pemerintah, kita ngga bisa, kita hanya membantu untuk penyalurannya saja. Tapi kalo pupuk anorganik sesuai dengan program kita , kemaren saja kita membutuhkan pupuk anorganik itu sekitar 490 ton, taun ini saja 490 Ton, kita berikan
25	T: J:	nah itu mekanisme pemberiannya kekelompok petani iya kekelompok petani yang sudah kita atur, sudah kita rencanakan taun yang lalu
26	T: J:	mekanismenya mereka yang mengajukan atau sudah ada yang mengajukan ya mengajukan, maksudnya mereka mengajukan lalu kita ajak interaktif, kita atur cara kerjasamanya kaya apa, kita diskusikan, matangkan baru kita distribusikan. Seperti itu
27	T: J:	kalo apa namanya, untuk kegiatan pengembangan kawasan ini pemerintah memberikan satu fasilitas kemudahan ga sih pak, kemudahan organisasi misalnya. Misalnya ada satu usaha nih di industri pengolahan apa sih pengolahan keripik apa, keripik buah misalnya gitu, itu ketentuannya berlaku seperti usaha lain atau ni karena dia agropolitan dikasih insentif atau diberikan kemudahan apa gitu pak? oohh ndak juga, cuman kalo dalam proses perizinan, legalitasnya sama kaya yang lain , Cuma nanti dalam prosesnya membutuhkan pembinaan , ada yang bilang juga kalo mereka tidak mengusulkan kita kan gatau kekurangan mereka tuh apa, kekurangan mereka apa, kalo mereka ada program seperti itu ya kita tindaklanjuti, banyak mba yang tadi itu, seperti yang saya sampaikan dimuka tadi itu alat olahan itu sampai kreasikan,sampai kita membuat itu hasil mawar destinator buatan minyak mawar ada,
28	T: J:	nah itu berarti hubungannya sama, bukan sama dinas pertanian ya kalo pemberian usaha kaya gitu, koperindag ya hubungannya sama yang kemudahan pemberian organisasi itu naaahh, di batu ini kebetulan sudah terbentuk itu KP3. Kantor pelayanan perizinan terpadu
29	T: J:	itu dibawah apa pak? ya kantor perizinan, jadi semua tersentral disana, KP3T. KPPT, kantor pelayanan perizinan terpadu. Itu semua disana

30	T:	tapi memang tidak ada spesial treatment ya pak buat agropolitan, ya sudah seperti di usaha lainnya
	J:	justru kalo ingin mengembangkan atau memajukan itu support kita di pembinaan bukan karena anget-anget kuku gitu istilahnya, menjamur mendirikan industry ini itu kemudian masih dengan jalan itu bukan harapan, sama kita sama, kemudian kita lihat apa pembinannya kah apa permodalannya kah,
31	T:	kalo apa namanya, pelatihan penyuluhan gitu ada ga pak ya
	J:	ada
32	T:	itu regularly
	J:	iya regular
33	T:	tiap apa pak biasanya
	J:	ya tiap tahun ada
34	T:	satu kali?
	J:	tiap tahun ada anggarannya. Secara berjenjang, kalo penyuluhan itu minimal satu kelompok tani tuh sepuluh kali. Satu paketnya puluhan pertemuan.
35	T:	oohh gitu itu minimal satu kelompok tani sepuluh kali , nah itu kalo misalnya penyuluhnya, penyuluhnya dari dinas apa
	J:	nah disini kana da kelompok penyuluh itu satu desa minimal satu penyuluh
36	T:	berarti penyuluh itu memang dibawahnya dinas pertanian,
	J:	iya
37	T:	kaya misalnya gajinya mereka itu alokasinya dari dinas pertanian
	J:	iya sama, sama, sama.
38	T:	mereka memang pegawainya dinas pertanian?
	J:	iya
39	T:	selain pendidikan, pelatihan, penyuluhan itu ada didikan lain ga pak?
	J:	ya sifatnya untuk meningkatkan SDM ya mereka juga kadang2 juga kita ikutkan workshop, diklat, diklat itu tidak hanya kesini, sengaja kesini
40	T:	ooo, workshop misalnya
	J:	misalnya pembinaan kelembagaan itu ya per kelompok, dinas juga berkerjasama dengan dinas yang lain, ini misalya kerjanya gimana, keuangannya gimana bisa kerjasama dengan dinas yang lain.
41	T:	kalo ini pak, kaya ketinggian tanah misalnya ya buat lahan pertanian ada ga sih program pemberian tanah ke petani, atau peminjaman tanah atau apa yah pokoknya program penyediaan lahan pertanian lah untuk petani yang tidak mempunyai lahan
	J:	okee, kalo sepanjang ini kayanya belom ada mba, usaha pemerintah memberikan lahan atau menyewakan lahan itu ndak ada,
42	T:	oohh ndak ada ya
	J:	batu ini masih kota kecil, lain lagi kalo diluar Jawa yah. Batu ini kota kecil, semakin lama penduduknya semakin padat lahannya terbatas. Yang terjadi apa, luas lahan pertaniannya semakin menyempit
43	T:	dari apa berdirinya batu ini 2002 ya, ehh 2001. Nah agropolitannya baru 2003 yah, itu semakin

	J:	kesini lahan pertaniannya semakin menyempit pak? heehh
44	T: J:	itu jadi disiasatinya seperti apa pak? makanya itu RT RW nya itu ya kemaren itu untuk wilayah pengembangan baik perumahan, industry perhotelan itu sangat dibatasi sekali, karena difokuskan untuk agropolitan itu, kalo untuk pengembangan di batu itu boleh kantor2 bisnis, perumahan boleh. Tapi kalo untuk industry kecil maupun besar itu masih dibatasi. Satu lagi kalo udah masuk kesitu ibaratnya ini ada yang mendukung ketahanan pangan khusus padi itu didaerah pendem
45	T: J:	daerah mana pak? Desa Pendem,
46	T: J:	itu kecamatan apa pak? kecamatan suryorejo, itu sudah diperdakan, ada SK gubernur sehingga disana itu ada kawasan kurang lebih 10 Ha, khusus pangan, kalau seumpama pemiliknya itu ingin mengalihfungsikan itu harus ada lahan penggantinya, lahan itu. Hingga untuk mempertahankan luasnya volume produksi padi.
47	T: J:	kalo secara umum, agropolitan di Kota Batu ini menyumbangkan apa, untuk pertumbuhan ekonomi kota Batu ini signifikan ga sih pak? sangat signifikan sekali
48	T: J:	atau memang satu sector utama ohh ngga, batu ini masih 60% ketergantungan dari sector pertanian.
49	T: J:	pertanian, peternakan, perkebunan gitu ya pak ya iyaa, batu ini kan pariwisata. Pariwisata itu kana da berapa orang yang , pernah saya sampaikan. Bukan orang itu yang jadi penonton. Saya sangat sangat apa, sangat yakin sekali dengan riset dengan yang ini nanti dengan investor nanti datang ke Bappeda dan Tanya, bagaimana pengembangan kota ini. Dialog dialog dialog, okee jadi saya tanamkan modal disini, harus menemukan disini. Sedangkan saya bilang, tu orang berat banget . ada lahan sedikit koo, sama dengan kota Malang, itu istilahnya menjadi apa ya, masalah kota-kota besar, sama seperti ini. Dimanapun letaknya. Yang hidup disini yang berjanji hidup bahagia, bisa sampean liatin perkembangan kota yang terlihat, yang sampean tau aja. Bisa sampean lihat sampean tanyakan. Milik siapa. Ya, yang bekerja siapa? Sedangkan batu kebagian apa? Paling banter itu tadi, tukang asongan, distributor, toko obat yang lagi berenti, itu tadi. Yang mau
50	T: J:	kalo ini pak, kan sentra agropolitannya di batu itu di bumiaji ya pak ya iya
51	T: J:	nah apa sih kota lainnya tuh, kenapa Cuma bumiaji pak? Maksudnya di kota batu itu sentranya Cuma di bumiaji? Itu yang membuat, kita, bapak menentukan sentranya di bumiaji tuh apa pak? ya, memang itu menunjukkan dari budayanya, kultur dari sejak dulu kala. Disana memang terkenal agrarisnya disana. Pusat perkotaannya disana, nahh mohon maaf kalo dulu di reja itu , bukan berarti kita membelokkan tidak. Cukup minus waktu itu, cukup minus sehingga dicukupkan untuk perhatian lebih kesana, sehingga semuanya berkembang sama-sama. Sekarang sudah mulai menggeliat semua, dulu disana sangat murah sekali. Karna asal luas, sekarang udah ga ada daerah murah disana. Karena apa? Karena daerah2 murah ada punya magnet sendiri, pendidikan, sentra wisata, pusat pendidikan, sehingga ngga ada dana yang terisolir ngga ada. Terjangkau semua.
52	T:	ada berapa kecamatan si pak di kota batu?

	J:	3
53	T: J:	3 ya, bumiaji, pandan rejo ya oo bumiaji nama desa dijadikan nama kecamatan, batu nama desa juga jadi nama kecamatan, pandan rejo juga gitu. Ini asal muasalnya kan batu itu hanya sebuah kecamatan, sebuah kecamatan kemudian ditingkatkan menjadi kota administrative. Karena adanya autoda, harus ditingkatkan atau dilebur. Kalau layak ditingkatkan berarti jadi kota atau kabupaten, kalo ndak mampu dilebur. Sama halnya dengan conro, conro itu 10 tahun lebih tua dari batu menjadi kota dinas, sehingga dalam evaluasi karena ada autoda tidak memenuhi kriteria jadi kota sehingga dikembalikan lagi menjadi kabupaten lagi. Nah batu yang muda mampu meraih kesitu sehingga dari kecamatan ditingkatkan menjadi kota administrative. Sehingga wilayah yang ada ini harus dipecah minimal undang2 itu menjadi 3 kecamatan, nah undang2 itu dari kultur yang ada, batu, bumiaji, pandan rejo. Itu budayanya kita. Tetapi hingga sekarangpun sama, wilayahnya tetep, Cuma populasinya dan aktifitasnya lebih beragam.
54	T: J:	iya kelihatan sih perkembangan batu. Kan suami saya kan orang malang pak, pas terakhir cerita di batu gini gini gini, loh dulu ga ada itu dulu ga ada itu, jadi saya kalo saya boleh ngomong, luas wilayah kota malang dengan kota batu, lebih luas kota batu. Secara teritorialnya, karena perkembangannya masih di sentral. Sehingga sempit, padahal masih banyak daerah yang belum disentuh. Aslinya, naahh ini masih diicer sama orang2 yang punya potensi kembangkan dulu kembangkan dulu banyak yang suka di batu, kalo malang kan semua sector udah penuh, nah itu
55	T: J:	kalo batu jadi kelihatan sekali kan pertumbuhannya, sama dengan pak walikota begitu dapat langsung menghubungi universitas sekota malang untuk membangun aktifitas di sini, terbukti UIN sudah mendirikan disini, dipojokkan sini UIN itu, semua saya pesan satu pak saya, silahkan sendiri pilih sendiri mana yang suka. Kalo pak ali kan gampang2 susah, Cuma ada opsi negative pak ali mborong disana kan, nanti kan, kagok
56	T: J:	nah pengembangannya juga itu menyeluruh ya pak apa disektor hulu maksudnya disektor pertanian maksudnya alat2 tani, hilirnya usaha taninya, jasanya memang dibangun serempak gitu ya sama, sampai itu hanya subburd dipermukaan semua yang tertinggal, tertinggal jangan sampe semacam itu
57	T: J:	dan, apa semua aspek dalam agropolitan memang dikembangkan ya, maksudnya pertaniannya, perkebunannya, peternakannya, soalnya kan kalo didaerah lain ga semuanya pak. Kaya didaerah gorontalo kan jagung saja, terus kalo di bangle sapinya saja, kalo disini saya lihat semuanya dikembangkan jadi potensial makanya kita pilih lebih memperhatikan kota batu. karena kan pertumbuhan ekonominya lumayan naik yah sampean udah tau masing2 desa kelurahan itu berapa itu ADD? Mungkin satu2nya kota di Indonesia yang punya ADD ya dikota batu
58	T: J:	yang punya apa pak? ADD, alokasi dana desa.
59	T: J:	nah itu kan aku harus ke bapada ya, nah kemaren itu udah jadwalnya hari senin, ternyata kan ayahnya bu Eni meninggal, jadi kata saya ya sudah nanti saja bu masih berkabung gitu kan, makanya aku ke dinas2 aja dulu ke bu Eninya mungkin besok. Kita juga kan bisa minta datanya juga. Itu penting ya pak ya ADD itu diluncurkan pertama kali oleh walikota pertama itu Cuma 75 juta/desa itupun desa tetangga sodara kita kabupaten malang, ndak sampe segitu mungkin sekitar kecamatan karena kecamatannya banyak ya, kecamatan itu 25 juta tingkat kecamatan desanya sebagian berapa?

		Nah makanya disini meskipun maksa jadi jadi, nah sekarang mencapai 600
60	T: J:	600 per apa? 600 perdesa
61	T: J:	perdesa? 600juta perdesaa?? Ooww itu ada berapa desa pak? ada 24.
62	T: J:	nanti penggunaannya perdesa itu terserah desanya sendiri ada ada, memang dialokasikan perdesanya segitu merata untuk program apa? Juga ada SPJ nya juga. Termasuk disana insentif perangkat desanya, pengelolanya , operasional desa 100 juta. Banyak dana2 seperti itu makanya kalo disini pengen maju , maju bersama bukan hanya dipermukaan saja. Selain dana ADD itu masih bisa mengusulkan misalnya bangunan ini ga layak didesa, ngurusinnya ke dinas terkait, seperti tadi dinas pertanian, mau ini mau ini boleh karena kan operasi dengan perindag kesehatannya kan boleh itu. Sehingga kita sama sama majukan bersama , bukan berarti...
63	T: J:	ADD itu sejak tahun berapa pak? sejak tahun 2001,
64	T: J:	2001 ya, ini menarik pak ADD ini, kemaren kendalanya itu kan karena batu tuh kota karena ga dapet DAK yah, saya tanyakan berarti jadi sumber dananya itu kan terbatas, tapi dilain pihak malah justru bisa memberikan ADD itu kedesa2 itu ya kenapa, saya juga ndak tau,DAU nya terkecil, satu Indonesia tuh
65	T: J:	dahulunya? DAU
66	T: J:	oo, dana alokasi umum DAU nya kan batu paling kecil, kecil, tapi yang memanfaatkan sedikit, ya sama kan dengan pendapatan terkecil karena kita keluarga kecil
67	T: J:	ya pas pas juga kan, tapi seperti kota malang triliyun yang membutuhkan banyak, sehingga dibagi2 sodaranya banyak sehingga ya harus menerima yang kecil itu. Nah batu kebetulan meski DAU nya kecil, 500 M, ga sampe , cuman kemaren 480an lah. Mentoknya seperti itu
68	T: J:	ya tapi karena rakyat karena cuma wilayah kecil dibagi bagi bagi, cukuplah agak besar
69	T: J:	menarik sekali ADD ini, jadi karena ada kebijakan tersebut ya jadinya bisa maju, bsa tumbuh bareng2 gitu ya yaa, kalo DAK, DAK sebenarnya bukan tidak ada, tapi ada melalui instansi terkait. Misalnya dinas pertanian itu ya, misalnya pengen maju pertanian kan kalo mengacu induknya dipusat, ini semua punya dirjen, ada linknya dirjen. Seperti ada desa nere, pangan desa nere, perhutanan malah departemen sendiri, perkebunan departemen sendiri, perternakan perikanan, nah kalo kita DAU kecil kan mba, nah kita butuhnya banyak, luar biasa, ini tiap tahun rata2 kita buth 10 bagian budidaya air tawar, ditawarkan perhutani mau ga seperti in, mau mau pak. Airnya yang kota terbagus kita bangun,
70	T: J:	sudah pak? sudah sudah semenjak 3 tahun, itu merupakan DAK
71	T:	nah saya membutuhkan program2, rinciannya, recordnya pak , pasti ada rinciannya kan pak yah,

	J:	nah itu kalo bisa saya mau liat pak, karena kan bisa buat analisisnya juga yah. Ini programnya seperti ini alokasinya seperti ini, fasilitasnya seperti ini. gitu jadi sudah suatu saat sampean bisa hubingin itu mba sri
72	T: J:	mba sri ya, dan memang mba sri itu yang mencatat semua ini? ya karena mba sri tu paling senior , saya dulu disitu tapi dirolling, makin kesini oke tambah pengalaman makin kesini bisa,
73	T: J:	tapi boleh kan pak kalo saya minta copyan laporan data ya nanti dialognya gimana untuk mengeluarkan data itu, karena kalo kita merilis itu sangat riskan sekali. Karena berhubungan dengan angka2
74	T: J:	kalo perlu saya sebenarnya ga membutuhkan angkanya pak Cuma program aja nah itu kan nanti bisa dikomunikasikan, minta apa trus sama mba sri kan bisa di copy kan yang sekiranya aman, gitu. Kita khawatir
75	T: J:	bukan untuk public lahh iyaa, nanti kan maunya bantu yam bantu, tapi nanti kalo menyengsarakan sendiri, ya susah
76	T: J:	mudah2an ngga pak, kalo apa nanya, ada nga program yang d kasih bantuan atau fasilitas apa tapi masyarakatnya kurang memanfaatkan atau dia mangkir tanggungjawab misalnya gitu, trus dia harus bayar denda ada ga atau ditarik lagi bantuannya , apa pak? kita ngga sampai gitu karena kita hidup di pertanian, pedesaan, orang pedesaan itu hatinya peka. Ya sangat peka, sedangkan waktu itu ngomong masalah gitu aja, memang sampean harus tau masalah itu beda
77	T: J:	gimana pak maksudnya? desa memberi kita memberi kita ngga tau etikanya kita memberi ndak mau. Kita dialog dulu, kita memberi kita dialog dulu mbak, ada program segini , iya, yang sampean harapkan apa? Itu baru klep, kalo ga tau ni pak ada segini tak kasih, belum tentu butuh. Apa pak ini untuk apa, akhirnya mangkak, nah itu makanya selama ini apa yang disampaikan itu sesuai dengan kebutuhan dan harapan petani, jangan sampai jadi hal yang mubazir,
78	T: J:	kalo retribusi ada ga si pak gimana?
79	T: J:	retribusi, bantuan2 hmm kalo retribusi ngga ada, kita bukan dnas penghasil, kalo dinas penghasil itu cuman RPH (Rumah potong hewan), kemudian
80	T: J:	itu udah ditarik retribusi? ya, karena hewan juga ditarik dana kebersihan, ya itu, karena rumah itu khusus untuk motongnya, ya itu berkisar antara 10 rebu 15 ribu/ ekor untuk nambah kebersihan itu aja. Kemudian apa ya, perikanan, hasil dari budidaya ikan itu karena kan
81	T: J:	itu divisi apa pak yang narik2 itu retribusi itu? peternakan dan perikanan
82	T: J:	di distanhut ini kan? untuk satu bidang, bidang peternakan dan perikanan,
83	T: J:	berarti kaya ada karcis ya pak ya iya kaya gitu,

84	T: J:	nah nanti retribusi itu masuk trus di pull disini aja , apa lari kemana? gini, ini kan ditarget ditarget masuk target PAD kan, misalnya target 30 juta pertain, ya harus PAD itu
85	T: J:	kalo pertanian dari mana aja sih pak ya dari itu tadi
86	T: J:	itu aja? Ga ada yang lainnya? ndak ada, itu aja
87	T: J:	pasar hewan ada ngga sih pak pasar hewan ada, uniknya di batu tuh bukan kita yang ngelola, dari kabupaten
88	T: J:	oo dari kabupaten dari kabupaten, sama dengan SUMUR sebenarnya bukan milik batu,
89	T: J:	tapi adanya di batu iya, itulah secara de facto, memang wilayah itu milik batu tapi karena akses itu berhubungan dengan finansial batu masih keberatan mengajukan finansial, itu waktu dulu didekatkan wilayah kabupaten masih oke, sumur itu masuk batu ngga papa tapi ganti 5 M, karena masih ada tanggungan finansial kepada pihak ketiga sama dengan wilayah yang kita beli, orang batu nda usahmemikirkan itu dululah, masyarakatnya masih membutuhkan yang ini, sampe sekarang ga perlu dipikirkan udah
90	T: J:	kabupaten malang berarti ya pak iya, harus bisa bawa seperti itu, coba kita saklek2 kan, kabupaten itu kan ga berkuasa, secara autoda kan sudah nah itu
91	T: J:	tapi pemanfaatannya kan masyarakat mana , yang jual beli disitu masyarakat mana? nah kalo pasar, penjualnya banyak orang sini, kalo dasarnya dasar kabupaten
92	T: J:	karena dulu didirikannya sebelum ada kota batu berdiri ya sebelum, lama, ini kan dulu wilayah itu satu sodara , semuanya kan kabupaten malang yang paling tua, kemudian mendirikan kota malang, mendirikan lagi kota batu, kalo renstranya kabupaten dipecah lagi, kabupaten malang utara, seperti lawang, singosari, karang tengah, kemudian malang selatan, penjen dan sekitarnya itu, malang utara sampai sana, itu renstranya karena autodanya sudah dihentikan pemekaran wilayah itu do, sudah ndak ada ingin memekarkan lagi. Kalo memang pemerintah ingin memberikan kebijakan politik tuh banyak daerah2 yang ingin mekar, karena apa, satu sisi untuk memudahkan administrasi pemerintah, administrasi masyarakat, sebab apa administrasi membantu bukan untuk sendiri, sumurr didaerah sana administrasi dikota malang, apa ngga menyiksa namanya. Sehari mengurus nda kerja belum yang lain besok balik lagi , haduh administrasi aja udah buyar dengan yang lain2.
93	T: J:	iya sih kalo begitu kan pendekatan pelayanan ya pak ya iya, satu yang dimasukkan dalam autoda itu yang benar, SDM masyarakat, infrastruktur wilayah, cukup sudah mekar sudah.
94	T: J:	dan biasanya kalo dia apa namanya ada juga ga pak permintaan masyarakatnya minta udah deh bikin kota sendiri aja gitu biar lebih enak pelayanannya gitu, pemikirannya aja dulu yaa, kembali kepada itu, karena masyarakat batu itu punya ingin, ingin maju, sehingga waktu dari kecamatan, bupati, kepada kota itu menunjukkan tahapan2 yang jelas itu juga membutuhkan waktu yang sangat lama seperti kota2 yang lain,
95	T:	nah itu ak, geliat2 yang cepat itu berarti dari masyarakat itu

	J:	dari masyarakat sendiri kemudian dari perkumpulan oke, LSM oke, masyarakat oke, kita pikirkan kemudian kita berjuang gimana cara berjuangnya , bagaimana cara mendapatkan satu visi, kita bentuk pokja2 itu, kita bentuk maju maju bersama,
96	T: J:	saya lihat juga kota batu ini seimbang pak antara instansinya dengan masyarakatnya juga iyaa, sehingga kita kan ini umurnya msih pendek sehingga orang berjuang mendirikan ini dengan kental sekali, erat, nanti kalau sudah termakan usia termakan waktu mana tokoh pendiri dulu sama administrasi berganti itu agak berbeda, itu saya masih bisa mengetahui pendirinya tapi yang mendirikan kan usianya sudah uzur, naah itu, emang biasa masih hangat2 begini masih penghormatan kepada pendiri2 itu masih tinggi bahkan setiap tahun pasti ada peringatannya itu, setiap tahun ulang tahun kota batu pasti diperingati, hingga tidak ada ketersinggungan, dulu berjuang bersma2 setelah berhasil banter2an sendiri2, seperti itu
97	T: J:	kalo ini pak, buat apa tuh, ada ngga program kredit murah dari pemerintah buat intensifikasi pertanian, kepanganan selama ini khusus untuk pertanian itu belum
98	T: J:	belum, pertanian dan perkebunan itulah semuanya tapi kalo untukusaha kecil itu masuk ke program pemerintah KUR
99	T: J:	kaya usaha rakyat itu masuk tapi batasnya 1000 itu
100	T: J:	1000an? seribu, satu jutaan orang sini tuh menyebut satu juta rupiah seribu,
101	T: J:	jadi dinominasi, jadi utk pertanian itu ya, tapi untuk usahanya itu ya apa aja pak ya? Ngga harus terkait dengan apa namanya pengolahan produk pertanian ngga pak ya? iya masuk
102	T: J:	ngga maksudnya umum saja, iya
103	T: J:	itu berarti ada dikoperindag itu yah iyaa,
104	T: J:	kalo apa namanya pinjaman itu pak oleh pemerintah, misalnya petani mau apa namanya buka usaha apa misalnya yang terkait dengan pertanian, perkebunan , agropolitan tapi ngajuin dananya ada ngga pinjamannya? masalahnya gini saya sampaikan, kita tidak pernah menyulitkan, tidak pernah memindahkan, kalo memang ada bantuan modal, baik itu bantuan finansial maupun agunan itu sifatnya hibah, tapi kita itu bergulir, supaya apa? Supaya ada tanggungjawab, jangan2 nanti kalo dikasihkin ahh sepenuhnya milik saya ngga saya kembangkan juga gapapa, jadi siasat 1 seperti itu karena kelompok ya, saya bantu kita bantu tolong dikembangkan, dikelola kelompok itu sendiri, nah nanti hasilnya diawasi tidak mengembalikan kepada dewan, itu maksudnya seperti itu.
105	T: J:	nanti tahun berikutnya kelompok yang lain, itu kebersamaan, 1 tahun itu bisa membagikan 20 kelompok, tiap tahun ada melalui APBN,
106	T: J:	itu nanti ke bapanya ada meeting time ya pak ya, iyaa,
107	T: J:	mau pulang ya pak ya, tapi abis itu ada laporan kan pak ya kaya LPJ, ya jelas

108	T: J:	nah hasil laporannya itu apakah diterima saja atau ada evaluasi dari dinas itu? ya kita evaluasi panjang sifatnya normative ndak papa, tapi kalo sifatnya ga bagus ya biar aja taun depan ga dikasih lagi gitu. Ga mungkin kita menarik paksa itu ga
109	T: J:	okee, kekeluargaan sekali ya pak iyaa, karena kita dalam pengucuran pun sangat lunak sekali, ga pake jaminan gapapa
110	T: J:	tapi itu ke petani ya pak ya ke petani, tapi kekelompok tani itu dengan kekuatan hukm membuka rekening sendiri jadi kita mengalokasikan dana itu kerekening masing2, kita gaberhak memotong sepeserpun, sangat fleksibel sekali, sangat afikasi sekali, langsung kita cek ini bagaimana udah kita ke bank aja berikan ini cairkan kesini kesini kesini yaudah , petani buka buku tabungan cairkan sudah masuk kan oke sekarang sampean gunakan untuk apa o iya saya cairkan sekian kamu tulis sekian sekian sekian itu, sama dengan ADD seperti itu
111	T: J:	kalo ini pak terkait pajak berarti Cuma PBB ya pak ya pajak sementara ini masih kecuali kalau ada pengerjaan lain, misalnya kaya non kegiatan industry kan itu bisa aja, ada pajak penghasilan namanya
112	T: J:	iya, apa namanya ada ga sih fasilitas2 khusus di pajak misalnya kalau dia tuh usahanya usaha pengolahan hasil ternak misalnya PPH nya dia dapet, kalo PPH itu kan dia pusat ya diserah ya pak ya, PBB ja dia kan misalnya PBB nya dapet penurunan sekian persen, gitu pak, ada ga kaya gitu saya kira belum ada
113	T: J:	belum ada mungkin masih biasa ya gini, nah itu tadi pengembaliannya ya satu desa pajaknya dihimpun ya mba ya dihimpun pertahun, maksimal setaun pendapatannya 70jt, mereka kembalikan dapat 600jt,
114	T: J:	kembalikan maksudnya gimana pak lah lewat ADD, iya disini belum ada yang sampe ratusan juta maksimal 60 70 itu maksimal, itu 100% bayar semua, kecuali perhotelan ya , perhotelan kan harus dipungut sendiri, pajak penghasilan kalo APBB kan lain,
115	T: J:	kayanya si memang disini memang kebanyakan kebijakannya bukan dari kebijakan pajak yah masih kebijakan pengeluaran, yang mendukung program ini, nah kalau sejauh ini masalah yang dihadapi pak dalam pengembangan wilayah agropolitan ahh gini, yang di hadapi masalah dari tahun ke tahun tidak adanya proteksi, proteksi produk , produk pertanian itu sendiri kalah dengan barang import sehingga kalah bersaing dengan barang luar, itu 1, kedua harga saprotan melambung
116	T: J:	saprotan? iya, sarana produksi pertanian, mulai pupuk , pestisidanya itu melambung semua, mengikuti kurs dolar, nah itu yang mengganggu produksi kita, mengimbangi
117	T: J:	nah harga itu apa itu, dinas itu mengikuti saja harga itu atau gini kan selama ini kecuali padi, padi kan harga kapas sudah di brid oleh pemerintah oleh bulog, nah untuk resminya kan ndak ada, mengikuti pasar, pasar bagus ya bagus pasar ini yaa, sehingga permainannya gitu
118	T: J:	karena masih juga mengikuti kebijakan pusat yang banyak mempengaruhi kebijakan daerah ya pak ya iya

119	<p>T: kalo apa namanya, ada ga sih pak rapat kerja, kalo dikotanya kan ada pokjanya ya yang ketuanya itu bappeda, trus dinas pertanian kan itu nya pak ya, ada rapat koordinasinya ga ?</p> <p>J: ini jujur, jujur kayanya selama ini belum ada makanya saya sampaikan kalo ingin membuat satu program memajukan lewat sector pertanian atau agrowisata, itu harus duduk bersama merumuskan dengan sesuai. Selama ini belum ada</p>	
120	<p>T: ohh, sejak 2003??</p> <p>J: ya Cuma slogannya saja, sekarang seperti kemarin dinas pariwisata dating</p>	
121	<p>T: disparbud tu ada pa tandatangannya?</p> <p>J: iya ada sama dngan saya, kalo dirumuskan kemudian LH yang berkecimpung didalamnya apa, dirumuskan seperti ini kita tindaklanjuti ke pimpinan, bagaimana majunya, infrastrukturnya gimana, pendanaannya gimana, barang apa yang jalan ya susah, seperti kemaren kan istilahnya Cuma pengembira saja,</p>	
122	<p>T: oh gitu?</p> <p>J: iya, kebijakan darimana? Kebijakan bukan di level bawah</p>	
123	<p>T: diatas?</p> <p>J: iyaa, (telepon berdering)</p>	
124	<p>T: ohh itu dari bappedanya sendiri, tidak mengoordinasi gitu pak?</p> <p>J: kalo mengkoordinasi setingkat itu sih susah, sering undangan kepala bappeda, sebenarnya kalo pusat pimpinan itu , secara administrasi loh ya, itu bukan bappeda yang mengundang, sekda yang mengundang</p>	
125	<p>T: oohh gitu,</p> <p>J: iya, sekda yang mengundang, koordinatornya bappeda. Itu baru sampe pada datang, gitu</p>	
126	<p>T: hmm apa namanya kalo kebijakan2 secara umum agropolitan siapa pengambil keputusannya siapa? Bappeda bukan?</p> <p>J: agropolitan kembali lagi kepada penggagasnya siapa, itu semuanya kepada walikota,</p>	
127	<p>T: bukan bappeda ya</p> <p>J: bappeda sebagai coordinator, oke seperti itu tapi kan bappeda mah, seperti kemarin liat desa wisata, apa yang dikembangkan oleh bappeda disana, apa sudah melibatkan kebudayaan masyarakat kita, apa sudah melibatkan kehidupan pariwisata? Dinas marga, pertanian? Kalau ini sudah masuk minimal bisara, mau bangun apa ini didesa? Bappeda apa semua anggaran dana semua dari bappeda? Nggga, ini bangun ini, bangun itu, pertanian siap, ada program bangun perba boleh bangun saung tani boleh, untuk peningkatan jalan boleh hubungi binamarga, bangun jembatan besar binamarga, untuk fasilitas penunjangnya pariwisata punya, promosinya ada, nah itu hal terkait kan jalan, yak an, tidak hanya ini menyampaikan program lalu tutup buku, bentar lagi ada, program lagi tutup buku, sampai kapan saya ikut ini mohon maaf tidak hanya sekali dua kali, udah sering kali, tapi golnya mana?</p>	
128	<p>T: ohh gitu, jadi selama ini bergerak sendiri2 pak?</p> <p>J: iyaa, kalo gitu wisata gembar gembor, ahh saya wisata baru disektor apa? Masyarakat kita ngga tertentu masalah wisata, tiap hari itu yang hobbynya dipertanian itu dipertanian, oke wisata di sector apel, dilihatnya fluktu siapa? Petani sendiri toh? Bukan petani wisata, kalo ingin ada keterkaitan itu datang wisata dan bilang pak bu sampean butuh opo? Tak bantu, gatau baik muncul disini ada nasional daerah petik buah sini sini baru pariwisata berperan, kemudian infrastruktur mendukung ga disana, namanya pariwisata butuh fasilitas, infrastruktur, ada ngga</p>	

		disana? Nonsense toh, masalah dewan masalah tani itu
129	T: J:	berarti selama ini masuk ke sektoral ya, apa belum ada satu program kerja pak yang real gitu yang keroyokannya berapa dinas gitu pak, gimana mba?
130	T: J:	apa namanya selama ini, apa belum ada satu program yang sudah real dan nyata dan kelihatan gitu itu keroyokannya semua dinas gitu pak? kayanya kalo beramai2 setau saya belum ada
131	T: J:	jadi masing2 bergerak di itu ya sesuai dengan wilayahnya masing2, setau saya seperti itu,
132	T: J:	karena kalo dari pusat pun sebenarnya bilang ini kendalanya memang seperi itu dengan terkait dengan harus kerjasama dengan banyak pihak, makanya saya sebagai staff mengamati sebenarnya ga sulit apalgi dengan batu seperti ini , kegotongroyongannya masih solid, itu tinggal bupati nya lah, wakil walikotanya lah, instansinya lah, semua untuk ikut serta membangun , itu nanti ga bisa kerja sendiri, itu Cuma komitmennya yang sama, konsepnya yang sama, kita pihak ketigakan Cuma mengerjakan itu, apa sulitnya? Iya kan? Itu aja . melibatkan juga masyarakat batu, sangat senang untuk dilibatkan, bentar ya
133	T: J:	iya silahkan pak maaf ya
134	T: J:	iya pak gapapa, terus pak apalagi pak selain yang koordinasi masalah koordinasi itu, kira2 masalah apa lagi , kalo masalah budget masih ini ga? kalo masalah budget mengikuti dirjen sesuai dengan anggaran yang diajukan, itu masing2
135	T: J:	sejauh ini apakah masih ada kendala untuk ahh itu saya kira sudah, apa ya dinamika rutin, dinamika rutin ditambah dengan rencana kegiatan kita ajukan kepada pemerintah kemudian di fasilitaskan oleh DPR, nah itu mesti ada argument, argument untuk mempertahankan , kalo kita ngga gisa mengargumentasikan ini ya dicoret sama DPR, ya itu
136	T: J:	nah apakah masalah anggaran itu menjadi kendala utama? Untuk pengembangan masalah argopolitan disini atau ada masalah lain yang lebih krusial gitu pak minimal kalo dana ya memang perlu namun tidak semata2 kita disini korrdinasi, bukti dari keseriusan dan kesungguhan untuk membuktikan itu, sebesar apapun anggaran tersedia tapi kita ndak punya planning yang bagus ndak akan tercapai, ga akan bagus Cuma simbolis aja itu dari
137	T: J:	karena selama ini system kerjanya terpisah ya pak ya iya, industry masing2, wisata masing2, seperti itu
138	T: J:	pisah2 aja udah lumayan maju ya pak ya apalagi kalo udah 1 gitu ya pak ya, ibu sri nya ada ga pak ya? Ibu sri itu ketua bidang program ya pak ya keliatannya ada

Transkrip Wawancara

3. **Tunggal Madyantono, Sekretaris Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Pemerintah Kota Batu.**

22 Desember 2011, Pkl. 08.00, di Kantor Dinas Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Pemerintah Kota Batu.

1	T: J:	itu peserta pamerannya siapa, Pak? UKM-UKM
2	T: J:	oohh. Umum ya berarti? yang dari binaan Perindagri
3	T: J:	oohh. Dinas-dinas ada juga, pak? dinas sih enggak. Dinas paling pertanian aja (Bapak Tunggal menerima telepon, wawancara terhenti) nanti saya sebagai apa nih?
4	T: J:	nah perwakilah dari Koperindag. Nah disini Bapak Kepala Bagian atau..? saya sekretaris
5	T: J:	Sekretaris Kepala Dinas, Pak? Sekretaris Dinas
6	T: J:	ohh Sekretaris Dinas ya apa perlu dengan Kepala Dinasnya langsung?
7	T: J:	ooh kalo gitu sih gapapa. Tapi nanti liat informasinya, nanti Kepala Koperindag juga ke staffnya ya pak. Jadi kita disini risetnya focus agropolitan, pak. Jadi kita sudah ke Dinas Pertanian, jadi nanti semua Dinas kita coba gali informasi mengenai ada ga sih pak program-program dari Koperindag untuk mengembangkan kemajuan agropolitan di kota Batu ini? kalo mengacu ke Pidi ya ada tapi tidak secara langsung. Kita mendukung melalui program yang ada hubungannya dengan Tupoksi kita. Kalo hubungannya dengan agropolitan kita memfasilitasi para pelaku agropolitan melalui pameran yang ada hubungannya dengan Tupoksi kita. Nanti pengelompokan Koperasi setelah Koperasi terbentuk, mereka berkarya ita memberikan bantuan. Kalo mereka dalam bentuk UKM, ya kita salurkan dari bidang UKM. Jadi kita membantu sepanjang itu berhubungan dengan Tupoksi kita.
8	T: J:	selama ini yang sudah real yang sudah dilakukan apa saja, Pak? Yang berhubungan dengan agropolitan, misalnya ada dari UKM di bidang pertanian nanti kelompok tani terus para pelaku usaha di bidang pertanian dan olahannya kan beda tempat.
9	T: J:	oh ada juga ya kelompok taninya iya kelompok taninya dan perkembangannya. Dari hasil pertaniannya sampe ke makanan olahan
10	T: J:	jadi tujuannya untuk memasarkan ya, Pak? iya promosi dan pemasaran
11	T: J:	itu baru tahun ini atau sudah program tahunan? itu dari awal menjabat sesuai dengan visinya Bapak Walikota sebagai kota agropolitan otomatis kan misi-misinya menyesuaikan
12	T:	2000 berapa pak? 2009?

	J:	iya 2007. 2012 ini terakhir.
13	T: J:	iya 4 tahun Dinas kan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah kota visi misinya menyesuaikan seperti itu. Dan ini satu tahun dua tahun lalu karena keterbatasan anggaran, tahun ini baru terlaksana lagi, dua tahun tidak.
14	T: J:	jadi dulu 2007 pernah, 2008 , 2009. 2010 enggak ya. focus ke luar
15	T: J:	keluar tuh maksudnya? ke pameran di luar daerah
16	T: J:	oh dari Koperindagnya? iya dari Koperindag tapi melibatkan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini para pelaku usaha
17	T: J:	selain bentuk promosi seperti pameran itu ada lagi ga, Pak? bantuan modal kerja
18	T: J:	oh ada pemberian bantuan modal kerja. Itu bagaimana mekanisme pemberiannya, Pak? mekanisme pemberiannya memang kemarin itu sedang ada sedikit masalah. Masalah pengembaliannya sih bukan masalah penyalurannya. Pengembaliannya itu kalau aturan keuangan seharusnya disetor ke Kas Daerah baru pembagian hasilnya di untuk Bank ya dipihak Bank. Tapi kemaren itu terjadi pihak Bank langsung memotong haknya tanpa melalui Kas Daerah sehingga jadi temuan pemeriksa.
19	T: J:	pemberiannya ke masyarakat gimana, Pak? Mereka yang mengajukan atau kita yang menawarkan? Ada survey... iya. Ada survey, ada pengajuan. Sekarang memang lagi diperbaiki operasionalnya
20	T: J:	itu dari tahun berapa pak? 2011 atau sebelumnya sudah ada? iya dari 2010 ada 2,1 M. sebagian sudah ada yang mengembalikan, tapi pengembaliannya belum diatur prosedurnya harus ke Kas Daerah dulu akhirnya uang perputarannya tidak lancar gitu
21	T: J:	oh gitu, itu pinjaman jangka panjang atau jangka pendek, Pak? pinjaman lunak menengah
22	T: J:	berapa tahun Pak maksimal? 3-5 tahun
23	T: J:	maksimum atau minimum jumlah pinjamannya? nah kalo itu saya belum tahu pasti. Saya kan juga baru beberapa bulan
24	T: J:	oh begitu pak. Sebelumnya dimana? sebelumnya saya di Pencatatan Sipil
25	T: J:	itu dikasihkannya ke....? ada yang ke Koperasi juga, Kelompok Tani, ke UKM ada
26	T: J:	oh enggak per pribadi ya? oohh enggak. Kalo Pemerintah ga mungkin menyerahkan ke pribadi, harus ke kelompok usaha
27	T: J:	ada lagi ga pak selain itu? Program? programnya ya bantuan promosi saja melalui pameran-pameran ke luar daerah

28	<p>T: kalau koperasi itunya ada ya Pak? KUD itu? Kemarin sih sempet ngobrol juga dengan Gapoktan. Mereka adalah kendalanya kalau habis panen produknya itu harganya jatuh sekali karena tidak bisa dipasarkan, tidak terserap oleh pasar gitu. Jadi kendalanya di pemasaran. Jadi bukan seharusnya itu Koperasi ya? Nah kalo KUD pak, KUD cuma fokusnya ke itu, tapi kalo program-program tani seperti Jagung kurang diakomodasi, itu gimana ya Pak?</p> <p>J: idealnya kan mereka membentuk Kelompok Tani, Kelompok Tani itu uturus menjadi transportasi teru kita bina menjadi Koperasi seperti itu. Memang kebanyakan Koperasi disini enggak KUD. Koperasinya seperti Koperasi petani peternak. Koperasi petani ada, tapi bermasalah dengan kepengurusannya. Koperasi Tani dibentuk oleh Kelompok Tani. Ya memang sebagian besar Koperasi itu akan bermasalah kalau sudah mulai besar. Pengurusnya sudah mulai tidak murni ke kelompoknya. Akhirnya murni ke pribadi. Sehingga sering terjadi justru koperasi sudah mulai maju justru mulai bermasalah dengan kepengurusannya</p>	
29	<p>T: hmmm justru seharusnya kalau sudah maju malah lebih solid lagi ya</p> <p>J: ya memang ada seperti ini tetep. Tapi kalo koperasi yang baru-baru, yang kecil-kecil gitu anggotanya koperasi akur, sekarang justru tidak akur lagi.</p>	
30	<p>T: jadi gitu ya. Kalo dari Koperindag sendiri ada pembinaan ga Pak untuk koperasi. Dari kelompok tani ayo didorong untuk membentuk koperasi</p> <p>J: iya selalu seperti itu karena kita ada salah satu Tupoksinya adalah menumbuhkembangkan koperasi yang belum menjadi ada. Itu ada monitoring dan evaluasi rutin.</p>	
31	<p>T: kalo sekarang ada berapa koperasi Pak?</p> <p>J: koperasi... 140</p>	
32	<p>T: itu satu kota ya? Itu komposisinya macem-macem ya pak? Kebanyakan Koperasi SIMpan Pinjam atau Koperasi produksi?</p> <p>J: ya rata-rata Koperasi Primer, tapi SIMpan Pinjam juga banyak</p>	
33	<p>T: jadi kemaren tuh ada yang mau pinjem ke Koperasi tapi bunganya lebih besar di KOperasi daripada di Bank</p> <p>J: ya memang karena koperasinya kan dapat giliran dana dari Bank. Otomatis kalo dia mau untung kan harus lebih besar dari Bank</p>	
34	<p>T: ya iya. Itu jadi kendala juga gitu kan. Nah program ini nanti saya bisa minta datanya gak Pak? Laporan Kegiatan atau Laporan Tahunan gitu? Program-program yang tadi Bapak sebutkan, jadi saya dapat gambaran lebih detil gitu Pak.</p> <p>J: iya nanti ada Lakip-nya</p>	
35	<p>T: Lakip apa tuh Pak?</p> <p>J: Laporan akuntabilitas</p>	
36	<p>T: oh boleh Pak. Kalo dikopi Pak?</p> <p>J: iya tapi masih dipinjem. Untuk persiapan. Soalnya jam 2 siang itu rencananya pembukaan dimajukan jadi jam 8 pagi</p>	
37	<p>T: besok itu ya? Sama Pak Walikota</p> <p>J: iya makanya jadi kelabakan juga</p>	
38	<p>T: iya jauh juga dari jam 2 ke jam 8. Kemudian kalo yang bantuan itu Pak, selain yang tadi bapak sebutkan ada lagi ga Pak?</p> <p>J: ya ada, bantuan dalam bentuk peralatan</p>	

39	T: J:	oh peralatan, peralatan apa ya pak? peralatan kalo mereka sudah menjadi kepala produksi rumah tangga ya kita akan memfasilitasi, seperti untuk kemasan, untuk pengolahan...
40	T: J:	itu alatnya dipinjamkan atau dikasihkan? kita hibah
41	T: J:	berarti dikasihkan ke kaum Tani? Jadi sasarannya selalu kelompok ya Pak? iya, kita ga mungkin memberikan bantuan pribadi harus kelompok
42	T: J:	iya, jadi petani tuh harus ikut ke kelompok kalo dia mau dapet bantuan. Nah mekanismenya sendiri, mereka bisa dapet itu kalau mereka mengajukan atau kembali...? ya kita menilai ke lapangan langsung. Jadi sampe kelayakan usahanya, segala macam.
43	T: J:	jadi yang dijadikan bantuan yang sudah layak gitu Pak? Atau yagn sudah maju? yang punya prospek
44	T: J:	walaupun belum maju? ya walaupun belum maju, kalo sudah maju kan kita gak perlu bantu
45	T: J:	nilainya untuk yang punya prospek gimana Pak? yak kan ada kriterianya. Yang jelas dari produk yang dihasilkan, pangsa pasar yang dia masuki, kita nilai kelayakannya dari situ. Sama kelompoknya bagaimana pengurusan kelompoknya.
46	T: J:	berarti alatnya itu beli ya Pak? Koperindagnya beli? iya
48	T: J:	darimana Pak? Impor atau local Pak? dalam negeri kalo alat-alat tepat guna
49	T: J:	berarti dari APBD ya Pak? iya
50	T: J:	kalo Koperindag sendiri alokasi untuk yang seperti itu berapa persen Pak dari APBD? APBD secara keseluruhan?
51	T: J:	hhmm mungkin kalo berdasarkan yang diterima? enggak sampe 50%
52	T: J:	untuk yang bantuan-bantuan seperti itu ya? Boleh tahu ga Pak nominalnya berapa? saya kurang hafal
53	T: J:	kira-kiranya gitu Pak? Haha atau nanti di laporan tadi gak? sekitar 200an juta
54	T: J:	itu yang diterima Koperindag atau yang disalurkan? yang diterima 2 koma
55	T: J:	yang 200 yang disalurkan ya? 200 kali 3
56	T: J:	kalo impor pernah ada ga Pak? enggak, enggak pernah

57	T:	kalo membantu menjualkan? Untuk masyarakat petani ada ga? Atau yaudah promosi atau pemasaran aja?
	J:	ya promosi pemasaran lewat pameran, terus kita juga ada pasar lelang. Pasar lelang setiap 2 bulan sekali tapi itu penyelenggaranya provinsi bukan kota. Tingkat provinsi. Jadi di pasar lelang, kita kumpulkan pelaku-pelaku usaha langsung transaksi di situ
58	T:	pasar lelang itu pesertanya UKM yang seperti apa? Yang besar-besar atau semuanya boleh?
	J:	semuanya boleh masuk. Jadi pada saat itu apabila nanti misalnya ada orang yang butuh beras, ya cari siapa yang punya beras
59	T:	jadi kayak pasar kaget dong Pak?
	J:	iya seperti itu difasilitasi Pemerintah Provinsi
60	T:	itu terakhir kapan Pak?
	J:	nah ini, bulan ini seharusnya sudah ada. Misalnya kemaren ada transaksi 100 Ton gula. Salah satu yang tidak boleh diwakili memulainya
61	T:	gabung disitu, <i>supply</i> ya. Kalo ekspor ada ga sih Pak? Ada ga sih di kota Batu ini produk masyarakat yang di ekspor ke luar
	J:	kalo disini yang diekspor itu bunga.
62	T:	itu diekspor kemana Pak?
	J:	itu ke Singapura, Jepang, Belanda
63	T:	Belanda, saingan ya sama...
	J:	mawar
64	T:	mawar aja atau..?
	J:	ada mawar sama anggrek
65	T:	disini petani mawar dimana sih Pak?
	J:	petani mawar di Desa Sumber Rejo
66	T:	ada lagi Pak selain bunga yang diekspor?
	J:	hasil olahan ini yang kita ekspor itu ubi ungu
67	T:	itu dibikin apa? Kripik atau...?
	J:	pasta ke Jepang
68	T:	itu siapa Pak pelaku bisnisnya yang mengekspor?
	J:	di sana di Junggo sana, Desa Tulung Rejo
69	T:	itu ada ya Pak ya? Industry Ubi Ungu itu ya Pak. Bapak punya nomor kontaknya ga Pak?
	J:	nanti saya mintakan
70	T:	biar nanti saya berkunjung ke sana. Kemudian ada ga Pak kemudahan pendirian organisasi atau perusahaan bagi masyarakat yang bergerak di bidang agropolitan?
	J:	kalo kita di sini tidak hanya agropolitan saja, semua pelaku usaha kepengurusannya gratis ya
72	T:	oohh, biaya administrasinya?
	J:	iya, administrasi legalitas, SIUP, PBB, tanda daftar perusahaan, Surat Tempat Izin Usaha, Surat Usaha Perdagangan, Pendirian Usaha Baru
73	T:	oh gitu gratis, semuanya ya pak ya. Syarat-syarat standar aja ya Pak? Tapi kalo enggak gratis tuh

	J:	berapa sih tuh Pak? ya sekitar 500an ribu
74	T: J:	itu udah semua surat smape jadi ya Pak? iya. Kalo dulu sebelum digratiskan sekitar 500-750 ribu
75	T: J:	pertumbuhan perusahaan-perusahaan itu bagaimana Pak? sekarang datanya di perizinan sana. Dulu kan kita SIUP, PBB disini, sekarnag karena sudah disatukan semua, datanya di perizinan
76	T: J:	itu sejak kapan Pak gratisnya? gratisnya itu sejak 2008 ya. 2009 kalo gak salah
77	T: J:	itu maksudnya untuk... iya untuk menumbuhkan kewirausahaan
78	T: J:	disosialisasikan gak Pak selama ini? Ke masyarakat? ya pastinya
79	T: J:	atau ketika mereka baru mau mengurus surat baru dikasih tahu ini gratis enggak itu lewat desa-desa.
80	T: J:	pembinaan ada ya Pak ya ada program pembinaannya secara rutin? ada. Kan Tupoksinya memang seperti itu. Malah disini kekurangan tenaga penyuluh perindustrian
81	T: J:	tiap apa Pak? Dalam setahun berapa kali? 3 bulan sekali
83	T: J:	tapi itu yang dibina itu semua ya? Maksudnya bukan Cuma agropolitan itu ya? Bergulirlah iya semua
84	T: J:	setahu Bapak disini tuh ada gak pembebasan lahan atau pemberian tanah dari Pemkot ke Petani yang tidak punya lahan untuk digarap gitu Pak? enggak pernah ada
85	T: J:	enggak pernah ya. Karena keterbatasan itu ya? kalau kerjasama dengan pihak perhutani ada. Tapi kalo Pemerintah Pemkot Batu gak ada
86	T: J:	kalo kerjasama Perhutani dengan siapa, Pak? masyarakat pemangku hutan. Jadi kan 60% wilayah kita hutan. Jadi masyarakat yang tinggal di pinggir hutan itu, pemangku hutan itu dapat kerjasama jadi untuk menanam tanaman semusim di sela-sela.
87	T: J:	oh diantara pohon-pohon itu iya, termasuk tanaman rumputnya. Pakan sapi.
88	T: J:	itu mereka nyewa gak sih? ada yang nyewa, ada yang. Istilahnya mereka juga punya program pembinaan kan? Dari Perhutani punya program pembinaan
89	T: J:	Perhutani kantornya di sini? enggak di Malang

90	T: J:	kalo pertanian tuh gak gabung sama perhutanan ya? iya enggak
91	T: J:	ya itu tadi sih, yang kerjasama dengan pemangku hutan mereka diberikan fasilitas ada
92	T: J:	kalo pungutan-pungutan lainnya Pak? Ada gak Pak retribusi atau pajak? yang berhubungan dengan agropolitan, ada tapi tidak banyak
93	T: J:	seperti apa Pak? paling retribusi kecil kalau ada transaksi di pasar
94	T: J:	oh kayak itu ya, ternak ya? ternak, terus transaksi, pajak kebersihan itu juga ada
95	T: J:	kalau BPHTB-nya berlaku umum Pak? umum
96	T: J:	pernah ada fasilitas ga Pak atau pengurangan pajak? kalau untuk agro enggak pernah. Paling kalau ada pengurangan pajak misalnya yang tadinya untuk jadi rugi karena berdasarkan pajak penetapan kebijakan
97	T: J:	pembangunan d Kota Batu ini lebih banyak ke sector pertanian agropolitan atau ke wisata. Soalnya saya lihat pembangunan pariwisatanya lumayan ya semenjak Pak Edy jadi di wisata yang sangat berkembang. Jadi agropolitannya enggak bisa menyaingi menyeimbangi ya karena seperti yang saya sebutkan tadi. Antara visi, misi, program, dan kegiatan tidak diproduksi
98	T: J:	visinya kan agrowisata Pak? iya, visinya agrowisata, tapi program dan kegiatan di APBD tidak menunjang kesana, belum menunjang kesana
99	T: J:	kita lebih ke pariwisata bukan? iya lebih ke visi pribadi. Pejabat Pemerintah
100	T: J:	di level mana tuh Pak? pejabat
101	T: J:	walikota maksudnya? ini penilaian pribadi
102	T: J:	iya gapapa program kegiatan gak nyambung
103	T: J:	itu Dinas-Dinasnya bagaimana Pak? Mengikuti itu atau? iya ada sebagian Dinas yang tanggap dengan ininya, apa kebaikan. Perda yang asal jadi
104	T: J:	jadi mengikuti visi-misi yang tidak sinkron dengan program kerja pejabat stand dengan visi-misinya. Tapi ada yang konsisten diikuti dengan Bapak Walikota
105	T: J:	oohh begitu. Koperindag termasuk yang mana Pak? kalo di sini temen-temen masih
106	T:	masih pariwisata Pak?

	J:	agropolitan
107	T:	agropolitan, tapi kan pariwatanya tidak. Mosi masyarakatnya kan di agropolitan ya Pak? Di wisata masyarakat juga tidak banyak yang dipekerjakan. Ya memang berkembang kotanya tapi tidak jelas kita membangun
	J:	pembagian duitnya tidak pernah baik. Hasil pembangunan.
108	T:	jadi kemarin kan ada tuh beritanya waktu saya buka di batu.go.id, peringkat 4 nasional ya Pak pertumbuhan ekonomi kota Batu
	J:	lebih tinggi dari pertumbuhan nasional. Angka pertumbuhannya
109	T:	angka, nomor 4 sih Pak
	J:	iya secara nasional nomor 4, tapi ke empat kabupaten/kota ini angka pertumbuhannya kan lebih tinggi dari pertumbuhan nasional
110	T:	yang pertama, kedua, ketiga tuh apa ya Pak?
	J:	saya enggak, enggak ini
111	T:	itu kan datanya dari Bapenas kan ya, tapi saya sempat ke Bapenas tapi belum oh mungkin karena data tahun 2012 belum <i>publish</i> kali ya?
	J:	oohh belum-belum
112	T:	oh jadi baru omongan lisan menterinya saja. Nah boleh di <i>share</i> ga Pak, kira-kira Dinas yang masih jalan ke visi-misinya agro itu, ya setahu Bapaklah secara pribadi bergaul dengan Dinas lainnya kan?
	J:	masalahnya di Bapeda justru yang kurang menunjang. Padahal kan seharusnya dia yang menyusun program kerja secara keseluruhan Dinas dibawahnya, tapi fungsinya justru sebagai pelaksana bukan perumus
113	T:	perumusnya siapa Pak?
	J:	tidak jelas. Akhirnya langsung ke
114	T:	soalnya kalo saya lihat ke SK-nya itu koordinatornya itu Bapeda ya?
	J:	iya Tupoksi itu, sesuai Tupoksinya itu
115	T:	iya seharusnya perumus kebijakannya seharusnya Bapeda ya. Mungkin nanti tingkat walikota <i>me-approve</i> lah
	J:	jadi kan kalo gambaran tepatnya kan setiap walikota punya visi-misi, visi-misi tu langsung diserahkan ke Bapeda diumumkan program kegiatannya, disosialisasikan. Setelah itu Dinas-Dinas mengikuti apa yang sdah disusun. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu
116	T:	gimana Pak kenyataannya?
	J:	Dinas-dinas cari program sendiri-sendiri akhirnya
117	T:	hmm jadi tidak terkoordinasi gitu ya Pak
	J:	iya bisa dibilang seperti itu. Bahkan kalo lari ke APBD, kita hanya dikasih duitnya
118	T:	yang enggak dikasih apanya?
	J:	maksudnya gini kan, idealnya kan kita menyusun program kegiatan baru dananya menyesuaikan, sekarang kan terbalik. Uang sekian sesuaikanlah. Banyak pimpinan yang tidak bisa menseleskan, yang penting duitnya habis kan gitu
119	T:	jadi selama ini anggota-anggota program agropolitan ini merupakan program bersama gitu ya Pak?

	J:	iya jadi program bersama
120	T: J:	yang diatur oleh Bapeda. Tapi selama ini enggak ada ya Pak ya belum ada
121	T: J:	jadi masing-masing ya sudah bergerak sendiri-sendiri sesuai dengan Tupoksi Dinasnya iya Tupoksi Dinas. Akhirnya penyelesaian masalah kan parsial
122	T: J:	iya betul, padahal kan agropolitan ini harus jadi program keroyokan, enggak Cuma dari satu Dinas aja. Enggak dari Pertanian aja, enggak harus dari Bina Marga aja misalnya karena fungsi-fungsi perencanaan dari Bapeda ini tidak berjalan secara maksimal
123	T: J:	hhmm perencanaannya tidak maksimal. Bagaimana ini Pak? Ini kan tapi harusna mulai dari tahun 2003 kan Pak? Agropolitan ini. Klaho Batu kan ikutnya dari 2003 kan Pak? 2003 iya walikota pertama
124	T: J:	iya, tapi Pokjanya per tahun 2007 ya, SKnya itu iya SK-nya baru pejabat baru ini dibikin lagi. Kalo dulu masih dalam bentuk wacana. Pak Edy dilaksanakan, tapi pelaksanaannya ya begitu ke lapangannya kurang menggigit karena proses perencanaannya yang tidak maksimal
125	T: J:	di Bapeda ini ya Pak? Titiknya memang di Bapeda ini ya Pak? Kemudian, rapat koordinasi gitu pernah ada gak Pak semenjak tahun 2007 itu? ya rapatnya itu tadi prememori. Seharusnya kana da RPBPN, RPBNT, terus ke rapat kerja kota, jangka panjang, jangka menengah kan gitu. Rapat koordinasi pembangunan. Itu kan seharusnya Bapeda yang seharusnya “oh ini enggak sesuai dengan visi-misi” seharusnya begini kan diarahkan. Tapi karena itu tadi karena ada kebijakan, kebijakan beginian akhirnya kita mengikuti rapat itu hanya ini plot anggarannya sekian
126	T: J:	oh sebatas itu rapatnya? Anggaran gitu ya? Tapi programnya masing-masing DINas tidak di review harusnya yang di review itu program kerjanya. Sehingga dibuat skala prioritas kan? Yang petning, tidak penting, kurang penting
127	T: J:	nanti dana menyesuaikan? mana yang menyesuaikan, mana yang harus didahulukan, mana yang harus ditunda kan gitu. Tapi yang selama ini terjadi, justru dananya dulu “kamu dapat sekian M, kamu dapet sekian M” programnya menyusul. Itu yang terjadi. Dan setahu saya itu di semua daerah seperti itu rata-rata. Semenjak otonomi daerah
128	T: J:	jadi dananya dulu, baru programnya ya. Pembagian dananya teru berdasarkan apa dong kalo gitu? ya berdasarkan perhitungan masa lalu, tahun anggaran sebelumnya. Misalnya tahun lalu dikasih 100, terus realisasinya berapa. Ya terus kalo yang tidak mampu, diturunin tahun ini.
129	T: J:	makanya nanti akhir tahun habis begitu ya, supaya enggak dikurangin kan seperti itu kan akhirnya kegiatannya yang tadinya pelatihan menjadi demasa
130	T: J:	total dana utnuk agropolitan di kota Batu ini berapa sih Pak yang dibagi ke DINas-dinas itu? ya kalo itu saya tidak tahu, itu sesuai dengan APBD
131	T: J:	hhmm pas rapat itu memang tidak itu, pasa rapat kemaren ya saya tidak inget itu berapa besarnya

132	T: J:	kalo Koperindag sendiri? kalo Koperindag kan dapetnya 2M
133	T: J:	oh iya 2M, 2,1 tadi ya nah untuk bayar gaji pegawai dan lain-lain itu 1,4, jadi enggak sampe separo itu ke masyarakatnya
134	T: J:	ehh permasalahan secara umum dana yang ini ada kendala dana gak sih Pak? Maksudnya ini dananya kurang kalo segini atau merasa sebenarnya cukup dananya bisa disesuaikan Cuma koordinasinya saja, pelaksanaannya saja ke masyarakatnya, gimana Pak? kalo kendala memang dari setiap tahapan ada kendalanya. Jadi dari perencanaan cari duitnya, duit menyesuaikan program kegiatan tapi sekarang dibalik program kegiatan menyesuaikan dengan anggaran kan gitu. Itu pertama. Terus kedua izin pelaksanaannya. Izin pelaksanaannya temen-temen masih berpikir tentang proyek kegiatan dan lain-lain
135	T: J:	jadi sasaran ke masyarakatnya kurang diperhatikan begitu ya karena itu awalnya yang penting temen-temen memenuhi, ada kegiatan
136	T: J:	dampaknya ke masyarakat, perubahan ke masyarakat diperhatikan ga? tidak begitu
137	T: J:	yang penting terlaksana gitu ya? Berarti tidak ada program terlaksana ke masyarakat enggak ada evaluasi gitu. Yang penting terlaksana gitu. Tapi memang rata-rata di tiap daerah memang seperti itu. Kemudian evaluasi secara menyeluruh dari tim Pokja tadi ada enggak Pak? Jadi misalnya akhir tahun nih ada rapat evaluasi lagi di evaluasinya hanya sekedar memenuhi kewajiban untuk terlaksana
138	T: J:	dan dananya habis begitu. Tapi tidak pernah ada ya pengukuran ke masyarakat ini program ini ya ada tapi tidak ada formalitas
139	T: J:	enggak <i>feedback</i> maksudnya? <i>feedback</i> -nya ke anggaran. Ada <i>feedback</i> , masukan, diusulkan program kegiatan baru pada saat pembahasan nanti mentok-mentoknya
140	T: J:	enggak ada dana? enggak ada dana. Dananya sudah diposisikan. Saran saya diganti lagi
141	T: J:	sebenarnya bisa dipotong Pak dititik itu, perencanaan itu anu, memberi kewenangan, di stop atau harus ada yang dipotong
142	T: J:	di <i>cut</i> -lah di titik mana. Ya apalagi kan Kota Batu kan luar biasa kalo untuk agropolitan sebenarnya iya potensinya ada. Tapi belum secara maksimal
143	T: J:	berarti kalo saya mau lihat program kerja tiap-tiap Dina situ selaras atau tidak kita harus lihat APBD-nya. APBD itu di <i>publish</i> ga sih Pak? seharusnya di <i>publish</i>
144	T: J:	di web? jadi nanti kan programnya apa kegiatannya apa. Terus hasil capaiannya yang ingin dicapai apa kan ada. Nah kalo kita mau rinci satu-satu, memang ada program yang tidak nyambung, kegiatan yang tidak nyambung dengan programnya. Ya itu tadi, asal menghabiskan dana
145	T:	Bapeda ada program-program itu dari setiap Dinas Pak?

	J:	lho harusnya kan ada
146	T: J:	sebagai coordinator ya iya
147	T: J:	iya saya baru bisa ketemu, ibu Eny-nya baru bisa masuk hari senin. Masih berkabung kan? Kemarin minta spotnya “aduh belum bisa, ibu Enynya belum hadir”, “oh yasudah” minta ke yang lain.
148	T: J:	iya tapi kan harus sesuai instruksi Ibu Eny. Ada lagi ga Pak kendala lainnya? Saya baru wawancara dengan Bapak baru terbuka yang seperti ini nih. Sebenarnya ini yang saya cari gitu dari kemarin. Masalah implementasinya, ternyata memang ada yang tidak tanggap. Makanya ketika ke masyarakatnya tidak nyampe gitu dan untuk Batu sendiri kan kota dengan pola pikir desa
149	T: J:	jadi bagaimana Pak? ya orangya masih berpola pikir desa, tapi sudah jadi kota
150	T: J:	iya maksudnya implikasinya dan juga ada banyak program kerja yang tidak nyambung. Tidak direspon oleh masyarakat karena mereka masih berpola pikir tradisional. Peran petani ada? Jadi terjadi lonjakan biaya
151	T: J:	dulu awalnya waktu berubah jadi kota itu awalnya gimana sih Pak? ini kecelakaan istilahnya. Jadi gini, kota itu kalau dinilai untuk lolos, kan ada dari jumlah penduduk, dari jumlah kecamatan, dari jumlah luas wilayah, dan lain-lain, dalam tanda kutif Batu belum memenuhi syarat. Nah bisa lolos itu karena kepentingan politik pejabat walikota.
152	T: J:	yang dulu atau? sebelum jadi Kota Batu. Jadi pejabat Bupati Malang ingin mencalonkan diri menjadi gubernur, supaya dianggap berprestasi, dia bisa mengembangkan kota dan kota itu adalah Kota batu. Jadi Kota Batu dipaksakan untuk menjadi kota supaya Bupati Malangnya dinilai berprestasi terus jadi Gubernur. Kan gitu dulunya, jadi ini korban politik. Jadi kalo itung-itungan, sekarang yang namanya kota harusnya kan kelurahan semua, tapi disini kelurahannya Cuma tiga, yang lainnya kan masih dalam bentuk desa pemerintahannya.
153	T: J:	oh iya ya. Di Batu ini belum ada kelurahan ya Pak ya? ya ada kelurahannya Cuma tiga
154	T: J:	yang kecamatan itu? empat sekarang, Kelurahan Cinggir, Kelurahan rebo, Kelurahan Temas, sama Kelurahan Akhir. Baru empat kelurahannya. Seharunya yang namanya kota, tidak ada desa tapi kelurahan semua. Tapi karena itu tadi
155	T: J:	oh begitu ya. Bisa ya memaksakan begitu? ya buktinya bisa
156	T: J:	yang mensetujui untuk menjadi kota itu siapa? DPR kan
157	T: J:	kok bisa ya? yang penting ada masukan ke sana. Akhirnya dewannya setuju kan
158	T: J:	berarti kan pasti ada manipulasi data Pak? ya memang seperti itu

159	T: J:	saya pikir ada gerakan dari masyarakat atau memang dari pejabatnya yang pengen ya gerakan dari masyarakat tidak ada, tapi tokoh-tokoh masyarakatnya ada
160	T: J:	gerakan untuk mau jadi kota? gerakan untuk mau jadi kota itu kan bisa ditilik kan sekarang, demo bisa bayar, nah seperti itulah trik, ceritanya gitu. Jadi kalo masyarakatnya sendiri coba ditanya enak mana dulu dengan sekarang setelah jadi kota. Mereka pasti mengeluh karena kan setelah jadi kota kan jadi banyak pungutan
161	T: J:	banyak pungutan? jelas
162	T: J:	yang nambah apa Pak pungutannya? ya contohnya seperti PBB-nya otomatis
163	T: J:	oh iya, naik ya naik
164	T: J:	iya kemarin keluhannya juga begitu yang tadinya 10ribu jadi 100ribu
165	T: J:	padahal ekonomi masyarakat.. tidak berubah. Tapi karena status
166	T: J:	statusnya malah lebih pusing terus pajak kebersihan misalnya, retribusi kebersihan. Masa buang sampah di halaman sendiri ditarik retribusi kebersihan. Nah kan gitu (Bapak Tuggul menerima telepon, wawancara terhenti)
167	T: J:	perubahan status suatu daerah. Nah itu jadi suatu kendala ya Pak? Belum berkembangnya agropolitan ini itu bisa dibilang ya itu tadi pola pikir petani ya bagaimana dia biaya produksi rendah, pemasarannya mudah, kan gitu aja yang mereka pikir. Mereka belum berpikir ke kawasan. Jadi sepanjang terpenuhi mereka enggak pusing dengan maunya pemerintah mau korup atau pemerintahnya jalannya enggak bener, mereka enggak perlu tahu. Disini adem ayem karena memang seperti itu. Jadi bukan berarti disini tidak ada masalah, masalah banyak tapi orang tidak peduli
168	T: J:	karena kan Kota Batu itu 2001 ya Pak ya. Agropolitan tu dicanangkan 2002. Nah kota Batu ikut bergerak 2003-nya. Maksudnya baru jadi Kota Batu langsung ikutan gitu kawasannya padahal sebenarnya untuk menjadi kawasan itu butuh koordinasi pengerjaan kawasan tidak mudah gitu kan ya kalo boleh jujur, pencetusnya sendiri mungkin belum tahu apa itu agropolitan
169	T: J:	pencetusnya yang baru gitu maksudnya? iya
170	T: J:	siapa tuh Pak, tau enggak Pak? ya itu walikota pertama. Bahkan mungkin kelompok kerjanya juga termasuk saya juga belum paham betul agropolitan kan
171	T:	kalo Bapak sendri sudah buat <i>master plan</i> -nya. Kalau saya lihat sih lumayan komperhensif ya sebenarnya. Cuma kan ini makanya kita lihat, perencanaannya mungkin seperti itu tapi pelaksanaannya koordinasi dengan DINas-dinas kurang. Itu kendalanya. Kalau pertumbuhan

	J:	ekonomi masyarakatnya sendiri tingga Pak? secara makro, iya. Tapi secara mikro ya seperti tadi
172	T: J:	jadi yang merasakan tingkat atasnya iya, disini perputaran uang tinggi memang. Tapi tidak kepada petani langsung kepada masyarakat langsung kan, pada pelaku usaha, bahkan yang punya pusat oleh-oleh bukan orang Batu
173	T: J:	oh gitu, yang punya industry pengolahan apel misalnya yang itu orang batu. Enggak maksudnya Pusat Oleh-oleh yang tiap hari toko-toko itu kan orang Malang, orang Surabaya yang melihat peluang usaha. Yang orang Batu sebagian kecil. Ada memang yang orang Batu tapi pemilik modalnya bahkan orang Denpasar
174	T: J:	oh gitu ya. Jadi dari masyarakat kitanya belum. Paling ya ekspor industry yang sudah merasakan. Karena kan pasti sudah di atas bunga juga bukan petaninya, pedagangnya
175	T: J:	oohh pedagangnya ya. Berarti dia yang ngumpulin ya Pak? Kalo Ibu Sri ini dia dia mengolah
176	T: J:	kalo kredit murah ada enggak sih Pak? Pinjaman murah? Tadi ya yang itu ya modal kerja itu ya Pak? Selain itu enggak ada Pak? enggak ada
177	T: J:	itu umum ya. enggak Cuma agropolitan. Ya udah Pak saya rasa itu saja cukup memberikan informasi buat saya. ya

Transkrip Wawancara

4. Nindya Dwi S., Kepala Seksi Distribusi Pangan, Kantor Ketahanan Pangan Pemerintah Kota Batu.

21 Desember 2011, Pkl. 10.00, di Kantor Kantor Ketahanan Pangan Pemerintah Kota Batu.

1	J:	kalo 2010 udah statistic..iya baru memang
	T:	itu berarti lingkupnya apa aja?
	J:	kalo seksi ada 3, TI, Distribusi pangan, ketersediaan pangan, keamanan pangan
2	T:	ibu kepala bidang?
	J:	kepala seksi..disini masih kantor..terus itu mau ada lomba..batu trade ekspo
3	T:	oo boleh itu..ada pelaku usaha?
	J:	iya itu, ada dari kadin juga, dari tanggal 23-27, kita juga masuk ke pameran
4	T:	itu apa aja yang dipamerin
	J:	ya produk dari batu, kalo SKPD ya dipamerin itu nya, kalo ketahanan pangan ya itu juga yang dipamerin
5	T:	oo itu tiap tahun?
	J:	kebetulan ini acaranya cukup besar, karena yang ngadain depderindag, jadi kita ikut..tapi kalo tiap tahun ya mungkin ya...tapi kita baru diikutsertakan tahun ini.
6	T:	kalo lomba itu..untuk bapak-bapaknya apa ibu?
	J:	oo kalo itu program dharma wanita..beda..itu dari pemkot Batu..kalo ini bannernya macem-macem
7	T:	ooo..itu peta kerawanan pangan..itu yang rawan apa...ooo ga ada ya
	J:	iya ga ada..sebenarnya dari tahun 2008 itu masih ada..
8	T:	itu kecamatan apa?
	J:	Kecamatan Batu..tapi itu ya..kan macem-macem ya indikatornya..tapi kalo ini lebih banyak pengangguran...jadi kalo daerahnya sendiri kurang subur dari daerah lain..jadi ya programnya..orang-orang disitu dibikin peta
9	T:	oooo
	J:	ini ada tambahan kok..belum pada datang
10	T:	itu yang bikin, kantor KKP ini?
	J:	iya..tapi kerja sama dengan brawijaya...ehhh kita ini sering melakukan kerja sama..kaya sama unair untuk pengujian lab...kaya penanganan pangan..karena Cuma disana Itu di fakultas teknologi pangan
11	T:	kalo ini pamplet apa, beras, jagung ini, akses pangan gimana itu?
	J:	kalo ini ya kaya beras yang diakomodir karena yang paling tinggi..iya karena kan beras yang significant ya..iya kan nyetak sawah juga ga bisa langsung..ini kan harus difokuskan ya ...kalo ketahanan pangan kan industry rumah tangga ya itu ga Cuma petani.. semua profesi lah Sebenarnya untuk penyebaran akses ini ada pemetaannya tapi belum dibuat ya belum focus

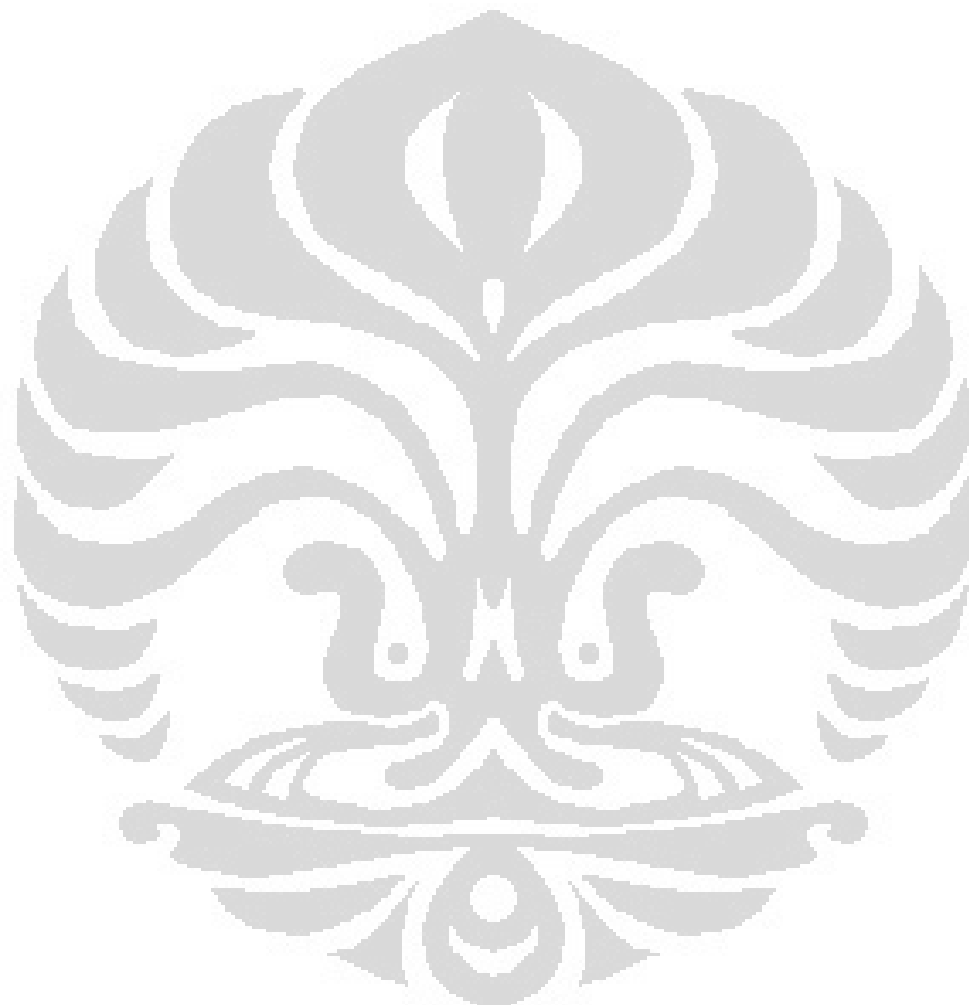
		<p>kesana..kalo rumah tangga kan itu berate kecukupan pangan..nah kalo kecukupan itu nanti aksesnya seperti apa..jadi kan kalo akses pangan itu distribusinya dia cukup, tinggi atau rendah</p> <p>Kalo akses pangan itu ada tiga, ada fisik, ekonomi sama social... jadi kalo fisik itu infrastruktur..jarak pasar ada apa tidak..kalo ekonomi itu..bekerjanya..bekerjanya itu kurang dari seminggu 36 jam itu tergolong rendah..terus pendidikan juga yang lulus sd..terus sama ini PDRD..kita juga agak kesusahan karena BPS tak jadi satu..bapeda juga..jadi kalo akses pangan belum ada..kalo ketahanan pangan udah ada.</p>
12	<p>T: apa ini ya focus rumah tangga ya</p> <p>J: iya jadi focus ke rumah tangga bagaimana memnuhi pangan..pangan yang bagaimana..pangan yang bergizi dan itu harus pangan</p>	
13	<p>T: ada ga program pembelian jasa atau barang untuk ketahanan pangan</p> <p>J: iya ada..itu hibah kan yang maksudnya..kalo hibah itu kaya ada untuk membeli alat buat es krim</p>	
14	<p>T: itu belinya local atau apa</p> <p>J: iya dari sini..kan kita ada pasar</p>	
15	<p>T: itu dananya dari mana</p> <p>J: APBD</p>	
16	<p>T: itu kantor yang mengajukan atau bagaimana?</p> <p>J: iya..kita kan punya kegiatan program apa..kita mau beli alat es krim</p>	
17	<p>T: itu beli es krim karena disini banyak susu ya?</p> <p>J: iya..itu kan tadi di dusun drestel tadi itu..kan ada program desa mandiri tahan pangan..kan dilihat tadi itu tanda nya apa..kalo merah muda kan berarti rawan pangan..jadi kita focus ke pemberdayaan masyarakat..biar daerah itu bisa balik lagi agar nanti kalo pas pemetaan ga keluar tanda merah lagi..karena memang karena di dusun itu tadi banyak pengangguran itu..makanya desa itu kita kasih bantuan es krim...banyak mba sebetulnya..sebelumnya juga ada dodol..nah sekarang ini es krim</p>	
18	<p>T: ada lagi mba selain itu?</p> <p>J: terus kalo yang satu lagi di dusun koyokerto itu lagi difokuskan itu tadi alat fakturisasi susu..kan memang sedang di program itu untuk yogurt kemudian itu untuk keju..tapi alatnya belum kan kita juga menyesuaikan dengan anggaran itu</p>	
19	<p>T: oooo iya.. kalo impor ada ga?</p> <p>J: ga kayanya masih disini</p>	
20	<p>T: kalo tadi kan pembelian..kalo penjualan? Itu kan misalkan kantor buat dan dijual ke masyarakat?</p> <p>J: kalo penjualan...kalo kita mungkin ga..paling masyarakat langsung..jadi kalo sekarang masih dalam promosi..diselingi penjualan itu..tapi kalo penjualan khusus belum terlalu luas..jadi penjualannya itu bisa disalurkan lewat pameran itu..jadi mereka itu kita ikutkan</p>	
21	<p>T: tadi sasaran kebijakannya itu berarti langsung ke masyarakat kan ya.. itu masalah pemberiannya gimana..apa kelompok tani yang mengajukan apa gimana..</p>	

	J:	iya bukan kelompok tani ya mungkin..jadi kita gini..kan kita tau dusun rawan pangan ini dusun koyokerto..jadi kan mereka itu pasti punya wadah..jadi itu nanti kita kumpul jadi satu..ga hanya kelomok tani..jadi nanti kita lihat..siapa yang aktif itu kan kadang ada yang mau ada yang tidak...nah yang mau tadi nanti kita jadikan kelompok...tapi disini bukan kelompok tani yang harus mengurus berbagai hal macam pertanian
22	T: J:	kalo akunitas itu yang membentuk kantor? Bukan mereka membentuk sendiri? kita yang koordinir
23	T: J:	berarti di survey dong sebelumnya o iya...kan kita dapat datanya 2008 itu dari dinas pertanian terus turun ke lapangan kok ga bisa gini..begitu
24	T: J:	Kalo ekspor? oo kalo ekspor belum
25	T: J:	kalo subsidi dari pemerintah ada ga mba? ehm.. subsidi ya..ini kemarin..eh ini maksudnya untuk dana bergulir atau apa?
26	T: J:	oo apa aja kalo bergulir..ini mungkin kegiatannya dari APBN ya..cuman kita punya pemikiran..kalo sekali kita kasih bantuan kan habis..jadi kita juga sudah memberdayakan mereka supaya tetap jalan..jadi programnya di APBN. Nah ada kan seperti system kewaspadaan pangan dan gizi itu fokusnya di balita dan gizi yang dibawah garis merah..jadi kita kasih bantuan ke 5 keluarga..dananya itu bentuknya bantuan tapi kita buat semacam bergulir..cuman mereka yang melakukan..jadi dana kita berikan dan tolong diputar.. jadi kita ga akan ngambil..
27	T: J:	oo jadi hibah gitu heeh..jadi semua rata-rata hibah..kalo anggaran tahun depan ini saya mau buat gudang gitu..jadi intruksi kan sebenarnya dari kita..jadi tiap daerah itu harus punya gudang cadangan pangan. Memang gudang ini untuk mengatasi daerah yang kolaps, tapi rata-rata itu kita benar-benar beri bantuan..kalo misalkan itu, hanya subsidi saja ya bentuknya seperti itu
28	T: J:	itu dari masyarakatnya responnya gimana? Bagus ga? iya alhamdulillah..mereka reponya positif ya..jadi kaya 5 keluarga itu sebelumnya belum pernah menerima...jadi mereka positif aja. Rencana mereka dibelanjakan semua..mereka semua usul ada yang beli kambing, bebek, ada yang mesin jahit..ya tersedah..mereka yang beli sendiri..kita Cuma ngasih.
29	T: J:	itu berapa mba, per keluarga? yg dari apbn itu per keluarga lima juta
30	T: J:	itu untuk sekali pemberian? iya sekali
31	T: J:	itu lewat programnya setahun sekali? untuk tahun depan kita dapat lagi..itu kan baru jadi baru sekali..tapi nanti ada lagi..semuanya baru

32	T: oo iya kan mulainya tahun 2010 ya. Mba dulu dinas pertanian ya? J: awalnya dulu iya dinas pertanian bidang ketahanan pangan. Awal february 2010, kita jadi Kantor ketahanan pangan
33	T: nah kalo secara umum kan agropolitan itu ada hulu, hilir, jasa petani dan penunjang. Pemerintah kasih itu di bagian yang mana? J: mungkin kalo itu ya dilihat dari sasaran mereka. Tergantung fokusnya kemana..kaya kita kan focus ke rumah tangga ya mungkin kegiatannya istilahnya ga ikut hulu hilir tadi.
34	T: jadi lebih ke usaha tani ya J: iya..mungkin, tapi bukan Cuma petani ya..semua profesi bisa.
35	T: kalo di KKP sendiri gad a program khusus untuk agropolitan ya? J: kalo khusus mungkin belum ya.. jadi kita orang yang sudah dibuat pusat..itu program APBN, itu ya desa mandiri pangan
36	T: itu desa mana aja? J: desa dresel sama mendem..tapi tani itu dresel..kalo mendem itu ternak..itu kambing itu lho..
37	T: kalo desa mandiri pangan itu apa maksudnya..itu diharapkan seperti apa? J: jadi itu kan desanya sudah diketahui desa rawan pangan..kita perdayakan agar desa itu bisa mengelola desanya sendiri paling tidak sama seperti yang lain. Mungkin karena kita ga focus ke desa saja ya kita ke dusun juga, kita memberikan bantuan selama 4 tahun, dari tahun pertama nih diliat bagus ga nih..pengembangannya bagaimana usaha yang mereka sudah lakukan untuk jadi desa yang mandiri, jadi kalo tahun pertama dinilai sukses, nanti akan diberikan lagi, begitu seterusnya, maksimal tahun ke4. Dan nanti diangkat menjadi desa mandiri.
38	T: kalo komunikasi antar organisasi berjalan ga? J: kalo kerjasama kita melakukan koodinasi kaya sama dinas pertanian tentang system informasi ketahanan pangan, kan dinas punya persepsi sendiri..itu seperti apa..jadi nanti koordinasikan.. mungkin kalo di mereka lebih ke informasi ya..kalo kita mungkin ke infrastrukturnya.
39	T: jadi memang ada ya satu proyek dikerjakan bersama-sama J: kalo satu proyek mungkin gay a..ini cumin biar ga tumpang tindih aja kita koordinasi
40	T: kalo dari Bappeda sendiri koordinasinya bagaimana? J: mungkin ya, saya juga ga menjelekkkan sih, bappeda udah bagus banget lah,, tapi mungkin ada beberapa, dana yang harusnya bagian kita itu suka ga dikasih ya..jadi kurang sedikit..
41	T: bantuan tadi itu ya yang keluarga tadi..kalo kaya pelatihan gitu ada? J: iya ada. Jadi, balai propinsi, balai penelitian,
42	T: selain pemberian hibah atau dan, ada pemberian lainnya ga? J: bentuk lain ga ada
43	T: kalo pemberian lahan? J: oo lahan ga

44	T:	ada ga sih..kaya penyewaan lahan biar petani bisa mengolah? Karena kan semua petani punya lahan
	J:	mungkin kalo antar petani ada, kalo disini ga ada
45	T:	kalo kredit?
	J:	kredit murah disini belom..itu nanti hubungannya sama LMPD, lembaga distribusi pangan, Cuma kalo di Kota Batu saya belum siap
46	T:	Kendala?
	J:	kendala itu, pertama koordinasi yang ada itu sering ga kepake, kita udah begini yang lain ga gitu,
47	T:	emang ga ada rakornya mba?
	J:	ada tapi ya itu jadi begitu tapi kalo kendala sih, kedua itu, kalo saya pribadi SDM, tapi bukan mereka ga ini, backgroundnya mereka itu bukan pertanian, jadi ada yang sarjana ekonomi, kaya saya sarjana teknik. Tapi ya ga semua..Cuma memang sedikit. Lalu yang ketiga itu koordinasi dengan desa, tapi memang biasanya lancar, tapi ka nada desa yang ga welcome. Kaya itu kita kan mengumpulkan data-data pangan di mendem, itu susah sekali untuk desa mandiri pangan. Iya jadi ada 3000 orang tapi yang survey 21 orang.
48	T:	ooohh. Ga kerjasama universitas atau mahasiswa gitu
	J:	ga..kemaren itu, kita mikirnya dana lah ya
49	T:	oo dananya menjadi kendala ya
	J:	ya lumayan. Jadi gini lho dana APBD Kota Batu, ya namanya juga bagi-bagi ya, kan ga mungkin semua plot disini. Jadi ga konsentrasi di APBD saja, karena tahun ini kita sudah dapet dana dari APBN, terus DAK. Jadi ga terlalu risau sebenarnya.
50	T:	DAK dapet?
	J:	iya
51	T:	oo itu nanti yang gudang cadangan makanan yang mau dibangun kaya lumbung gitu?
	J:	iya itu udah ada lahanny, udah acc juga, jadi nanti buat nyimpen, tapi ga melulu beras, kan kadang orang maunya beras terus. Jadi itu rencananya gudangnya itu nanti dibuat seperti kios, kios pangan.
52	T:	jadi nanti bisa jual murah ya
	J:	iya,,itu untuk stabilisasi harga..tapi kita Cuma bisa memantau saja tidak bisa intervensi harga, nah itu nanti kita ada radio gitu setiap hari jam setengah 10 untuk informasi harganya.
53	T:	eh, ada lagi mba kendalanya
	J:	ya itu tadi, ya APBD sih sebenarnya kurang, itu saja
54	T:	berapa sih APBD nya sekarang?
	J:	750
55	T:	nah dari dana tersebut, bisa memenuhi berapa persen dari kebutuhan yang ada?
	J:	iya ini anggarannya untuk KKP, ya hamper semua dananya untuk bantuan, kalo saya pribadi sih itu bantuan.

56	T: J: T:	kalo apa namanya ada data program kerja KKP ga? tupoksi atau apa apa ya,, yang boleh di publish saja.



Transkrip Wawancara

5. Endang Dwi S. (Kasie Penanaman Modal, Bidang Perekonomian) dan **Abdillah** (Kepala Bidang Perekonomian) **Sekretariat Daerah Kota Batu.**

21 Desember 2011, Pkl. 18.00, di Kantor Setda Kota Batu .

1	J: Kalo disini Cuma membantu koordinator T: Koordinator dari dinas-dinas itu? J: iya, seperti memasarkan Kota Batu juga disini. Sebetulnya penanaman modal itu, harusnya lho mba, sudah punya lembaga sendiri, tapi di Kota Batu masih ikut Industri perekonomian, apa ya istilahnya, dompleng lah
2	T: ooo, mungkin karena belum siap itu ya, jadi lembaga sendiri J: iya,
3	T: kalo dari program ekonomi sekdaya, ada ga sih bu yang buat pengembangan agropolitan? J: itu kan pertanian
4	T: iya maksudnya kan kalo ekonomi ada yang umum J: oo iya, kalo umumnya kan ekonomi itu mengurangi pengangguran, yang alhamdulillah setelah dipegang bapaknya berkurang, setelah itu mengentas kemiskinan yaitu dengan mereka kita perdayakan makanya kita itu sejahtera dengan perkapita tertinggi. J: kalo penanaman modal itu sudah ada kantor sendiri, semua daftar dan data ya di kantor itu, ada di perijinan. Kalo di provinsi ya kaya BPS itu jadi blue print. Ya jadi kita juga harus nunggu dari kantor itu, jadi kalo minta data ya kita minta dulu, jadi ya kita ga punya data apa-apa
5	T: oo jadi kaya ketergantungan ya? J: iya
6	T: iya jadi gini untuk pengembangan agropolitan kan Kota Batu menjadi kota agrowisata, ya jadi bagaimana mengenai kebijakan fiscal yaitu pengeluaran dan pajak terkait anggaran dalam pengembangan ini? ya tadi itu kan sekda membantu pengimplementasian kebijakan? J: iya tapi kan masukan tadi dari dinas pendapatan, ya tapi kan selama in sudah diusahakan, kalo menurut apa itu, saya kemaren sempet baca, jadi kalo masalah pajak itu investor itu yang menanamkan modal bis dikenakan pajak tapi dengan syarat pekerjanya harus dari masyarakat local
7	T: itu dengan PPh? J: itu kaya pemotongan gitu J: terus akhirnya ya masuk ke situ, ga ada sangkutannya dengan sekda, jadi kalo pajak wisata itu ya harus dipotong, tapi kalo investasinya lebih besar pusatnya ya pasti lebih besar. Ya itu tadi syaratnya harus pekerja harus dari local
8	T: oo itu aja syaratnya? J: ya banyak
9	T: terus itu yang kebijakanya itu KKP atau dispendanya J: Dispenda, ehm jadi penanaman modal disini itu apa istilahnya. J: kita Cuma coordinator pak J: kita Cuma coordinator, secara teknis kita ga menangani, jadi kalo dari dinas pendapatan itu, apa itu istilahnya itu tangan panjang, perpanjangan tangan
10	T: oo jadi ada insentif gitu ya dari pajak

	J:	iya
	J:	jadi kemaren itu aturannya gini, ada perda 2010, tentang pajak daerah, itu memang pengenaannya sangat tinggi, sehingga pengusaha yang mendampingi keberatan, nah dari dinas pendapatan itu, mengajukan untuk mendapatkan insentif. Nah, insentif itu untuk berupa pemotongan pajaknya
11	T:	oo, jadi itu berlaku umum ya, tidak hanya pertanian, tapi wisata umum juga
	J:	iya, nah kalo disini itu paling banyak sektor wisata,kalo pertaniannya...
12	T:	nestle ya?
	J:	kaya PNBM itu lho, kaya pelumbungan padi, tanaman-tanaman
13	T:	nestle itu kan dia swasta ya
	J:	perindustrian itu
14	T:	iya maksudnya, mengolah
	J:	nestle ga disini mba, di Pasuruan
15	T:	yang dibatu itu yang disamping KUD itu?
	J:	ya, itu mungkin kantor perwakilan aja itu
16	T:	Oo begitu
	J:	jadi agropolitan di batu yang peternakan itu kecil Cuma 22 ton sehari,
17	T:	oo kecil ya, soalnya kemaren dari Bappeda itu, bisa 50 juta per tahun,
	J:	oo tapi saya kemaren baca Koran begitu
18	T:	Koran apa
	J:	jawa pos
19	T:	oo batu udah punya Koran sendiri belum sih
	J:	ada, itu yang realita juga tentang batu
	J:	tapi kalo khusus batu tok, ga
	J:	Kenapa ambil batu? Anak UI kok
20	T:	iya jadi kemaren itu kita udah ke cianjur, kuningan, tapi batu yang masuk ke semua subsectornya ada, jadi pilih batu
	J:	tapi ga semua juga, apelnnya tidak, apa namanya ada masalah juga. Kan pelabuhan lautnya itu juga..apa namanya harga bisa juga jatuh kalo pertanian itu, karena ga bisa
21	T:	oo...kalo monev dari batu sendiri?
	J:	iya
22	T:	oo iya bu kendalanya pengembangan apa sih bu di agropolitan ini?
	J:	kalo dulu kan pupuk kandang ya, nah sekarang itu pupuk buatan, itu tanahnya rusak
23	T:	kenapa ga pake..itu kan sapi..pertenakan..kotorannya bisa dipake..
	J:	iya bisa dipake..seperti kotoran sapi..kaya biogas gitu..tapi sebtulnya.kaya daun-daun bisa juga dipake pupuk...apa ya kurang cepat kayanya
24	T:	atau teknologinya mungkin ya
	J:	ya
25	T:	atau selama ini masyarakat, manual aja? Apa pemerintah ga kasih teknologi

	J:	sebetulnya pemerintah, dan dari petani juga banyak pengolahan itu..apa mungkin ini..kurang telaten apa gimana ya..atau mungkin sosialisasi dari dinas peternakan..PPL ga konfirmasi..kan dia itu keliling ya..harusnya melapor
26	T: J:	nah kalo invest sendiri lebih banyak ke pariwisata ya? iya
27	T: J:	kalo agropolitan sendiri kurang ya iya..tapi kayanya berubah arah ya mba..kan dulu apel..
28	T: J:	oo itu selain pupuk apa lagi bu mungkin di satu sisi itu kalah
29	T: J:	kalah dengan produk impor? iya
30	T: J:	oo memang banyak produk impor yang masuk ya? oo bukan banyak lagi mba
31	T: J:	itu ga dibatasi? belum..jadi ya itu yang minat global itu..di satu sisi..kan kalo local itu perawatannya tinggi..pengeluaran banyak
32	T: J:	dari kebijakan sendiri, kalo dana atau anggaran gitu? kayanya ga itu..kan ada DAK..di pertanian lho ya..ada itu DAK..tapi itu kadang ya..DAK itu kan untuk kabupaten..ini kan kota..jadi kita kaya terkatung-katung
33	T: J:	tapi kalo kita mengajukan proposal..bisa? harusnya bisa..kan walaupun kota kita untuk pertanian
34	T: J:	tapi emang peraturannya mengatur gitu..kalo kota kalo pertanian ga bisa? saya kurang..persisnya ga tau..karena DAK itu prioritasnya ke kabupaten..tapi seakan-akan kota itu ga punya pertanian..padahal batu beda dari kota yang lain..tidak industry
35	T: J:	kalo subsidi ada ga sih? Buat pengembangan agropolitan? Apa subsidi pupuk, apa subsidi lahan? ada..dulu itu ada..kita dulu industry perekonomian..tapi sekarang diambil alih pertanian..jadi yang tahu pertanian..kerja sama..ehmm kalo pupuk subsidi itu seharusnya ga boleh dijual di kota lain..harus di kota itu juga...
36	T: J:	kalo itu bu, untuk yang mau melakukan usaha agropolitan itu, ada kemudahan untuk yang agropolitan? kaya kelompok tani gitu ya, kalo itu ada. Tapi itu ya mereka itu melakukan penawaran tinggi.
37	T: J:	apa maksudnya? ini gini lho, mereka itu kan kelompok, tapi ini ga semua.. jadi kaya ada ketua kelompok..nah kalo ada bantuan dari pusat..ini sih ya banyak orang pintar gitu..jadi bantuannya dipake sendiri..nah anggota yang lainnya itu kaya pembantu
38	T: J:	ooo seharusnya ga gitu kan ya iya
39	T: J:	kaya ini bu, misalkan ya, saya mau bikin PT apa ya, ya PT lah untuk pengolahan hasil pertanian agropolitan, berarti kan dapet kemudahan kalo disini sebenarnya mudah

40	T: J:	itu berlaku umum ya iya, ga ada perbedaan
41	T: J:	kalo pelatihan bu, pelatihan ada? ada pelatihan
42	T: J:	kalo apa namanya, pemberian lahan pertanian? pemerintah ga punya lahan mba, tapi kalo punya petani itu ada sewa, kayanya itu lewat kepala desa..nah itu nanti petani lain nyewa gitu..kaya ditanami kopi
43	T: J:	ooo gitu, nyewa sewanya itu pertahun
44	T: J:	itu daerah mana bu yang di sewa? kecamatan batu
45	T: J:	ehm..apa lagi ya..kalo ini kredit murah ada ga? banyak..lewat BRI..yang itu koordinatonya dinas koperasi dan perindustrian..banyak
46	T: J:	tapi itu sasarannya untuk apa? UKM, untuk petani-petani itu ada..untuk buruh tani
47	T: J:	maksudnya untuk buruh tani? iya..dia itu kan ga punya lahan, dia itu bisa dibantu buka usaha UKM kecil-kecilan..modalnya mulai dari 3 juta itu kan nanti macam-macam jenisnya..ya nanti di koperindag itu ngurusnya
48	T: J:	pinjamannya itu bisa jangka pendek bisa jangka panjang ya bu iya

Transkrip Wawancara

6. Puspa Permanasari, Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan energi, Dinas ESDM Pemerintah Kota Batu.

23 Desember 2011, Pkl. 14.30, di Kantor Dinas ESDM Kota Batu

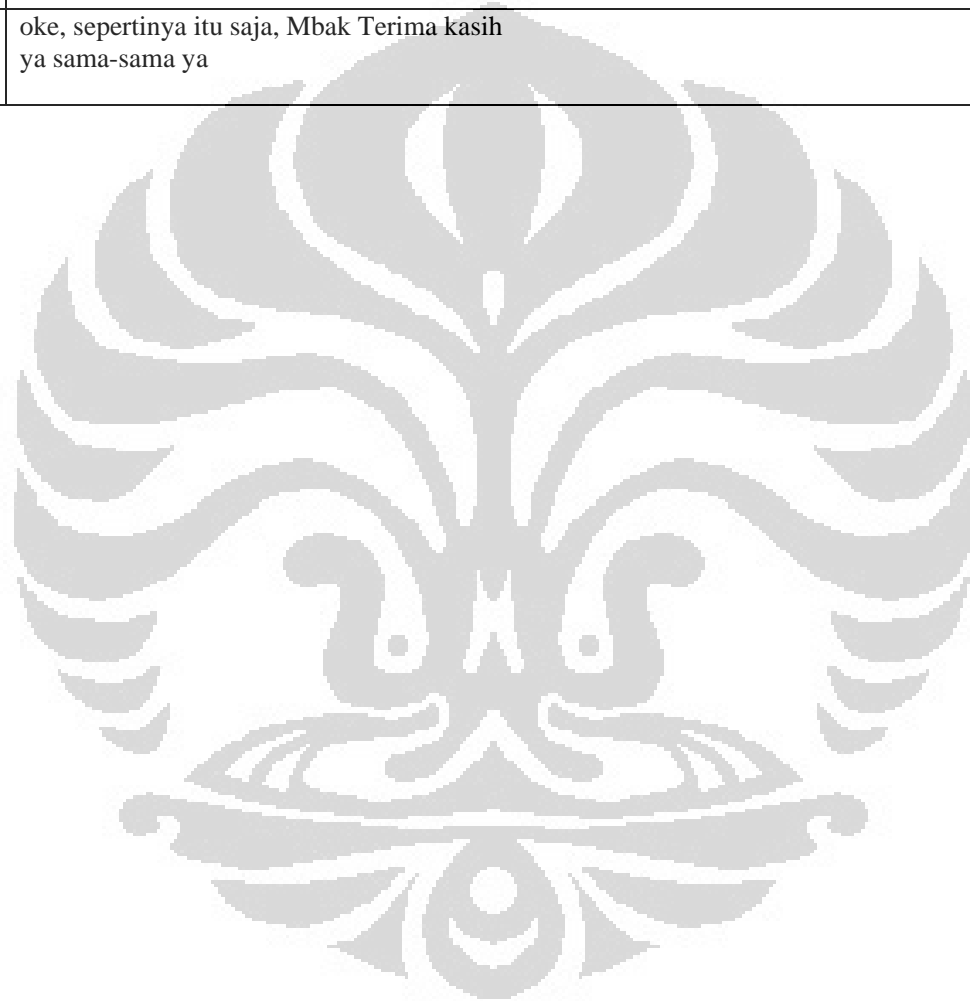
1	T:	Baik Mbak saya lanjut ya. Aku kan wawancara ke Dinas-Dinas, saya ingin tahu kebijakan-kebijakan atau program kerja di masing dinas itu dalam mendukung pengembangan agropolitan di Batu ini apa saja. Termasuk juga alokasi anggarannya. Mungkin Mbak bisa <i>share</i> kalau di ESDM ini, atau juga mungkin mbak atau pengairan dan bina marga bagaimana kegiatannya secara umum.
	J:	kalo disini kita kan energy ya. Energy alternative, jadi kerjasama juga dengan KLH. Ke KLH udah?
2	T:	ke KLH belum sempet, Mbak.
	J:	jadi bikin biogas. Jadi peternak-peternak itu dibantu untuk mengolah limbah kotorannya menjadi biogas. Jadi mereka bisa tidak lagi menebang hutan, bisa diganti dengan biogas untuk bahan bakar. Terus limbahnya tidak mengotori daerah yang dibawahnya karena kalau disini kan bukit sama lereng jadi kalau hujan kalau itu ga ditampung, ga dimanfaatkan. Jadi desa atau kelurahan yang dibawahnya terkena. Jadi mereka juga bisa hemat. Terus seratur ribu untuk satu bulannya.
3	T:	oh untuk bahan bakar.
	J:	he eh. Jadi gak beli LPG. Terus mereka juga jadi mandiri. Desanya itu bisa membuat pemotong rumput sendiri. Kayak urunan di komunalnya itu.
4	T:	pemotong rumput sendiri?
	J:	untuk pakan sapi. Kan harus dipotong tuh rumputnya jadi kecil-kecil. Jadi mereka bikin pemotong rumput sendiri, mereka urunan. Alat pemotong rumput itu beli. Iya dana dari Biogas
5	T:	oh jadi mereka berbentuk kelompok gitu ya?
	J:	ya kelompok, urunan.
6	T:	Biogas aja? Kan ada jenset.
	J:	kan kalo dari Bilbes kan mereka malemnya ga masak, jadi energinya itu bisa untuk menghidupkan jenset jadi untuk lampu
7	T:	jadi jenset juga untuk biogas ya, bukan pake solar
	J:	iya. Jadi mereka kan udah selesai masaknya. Jadi untuk malemnya dipake itu
8	T:	jensetnya itu beli juga atau dari sini?
	J:	bantuan. Ada bantuan dari swasta ada juga dari sini.
9	T:	oh dari sini ada juga? Itu yang dikasih daerah mana, Mbak?
	J:	Toyomerto, sama Brau. Tapi yang utama masih di Toyomerto karena kelompoknya udah pinter gitu lho di sana itu. Mereka bisa memanfaatkan.
10	T:	dan mereka mayoritas peternak ya, Mbak?
	J:	iya, satu orang itu satu KK itu dari sapi sendiri sama sapi orang lain bisa 5. Di Toyomerto aja bisa 1350 sapi.
11	T:	oh jadi bantuannya jenset itu ya. Berarti pengolahan limbahnya itu berupa alat ya?
	J:	ya biogas itu
12	T:	itu alat kan?

	J:	biogas itu ditanam, jadi konstruksi. Ditanam di dalam tanah, nah itu ada saluran pipanya.
13	T: J:	oh itu boleh Mbak nanti saya minta datanya. Aku pernah liat ada cairannya juga ya? Itu dikasih juga cairannya? ya dari situ. Dari situ. Dari kotorannya. Yang mana cairan apa?
14	T: J:	aku pernah liat itu di Bali. Jadi itu cairannya buat pupuknya atau buat biogasnya? Kalau untuk pupuknya Mbak, pengolahan kotorannya kan bisa buat pupuk tuh enggak ya. Cuma buat biogas itu kan.... enggak, itu kan biogasnya udah keluar, itu yang sudah mengering, itu dipake pupuk. Yang sudah hilang gas metannya. Kalo itu kan malah mati. Mereka itu kotoran yang sudah tidak terpakai biogas untuk Manisah, kalau kita menyebutnya labu siem ya. Sayur yang buat sayur asem, labu siem, labu siem. Itu pupuknya buat dipake labu siem. Itu penghasil labu siem juga.
15	T: J:	dijual juga ga? dijual. Kalau keluar daerah. Jadii ga mengenal musim, jadi mereka panennya setiap tahun, sepanjang tahun.
16	T: J:	oh anu, maksudnya pupuknya dijual juga? oh belum. Pernah waktu Agro, pupuknya stroberi mau dibeli, tapi mereka ditarget satu bulannya setor berapa gitu buat kotorannya. Jadi belum bisa memenuhi. Jadi untuk sendiri. Kan gini kalo dikontrak butuh berapa, kan harus dipenuhi, nah itu kelompok petaninya masih belum bisa. Jadi gak jadi.
17	T: J:	itu dari tahun berapa, Mbak? kalo Dubes disitu mulainya dari tahun 2003an deh kayaknya.
18	T: J:	oh memang kan agropolitan pertama kali di Batu kan 2003 ya. Sampai sekarang tuh? dulu sih masih satu, kan.
19	T: J:	udah berapa sekarang yang udah ditanam? kemaren tuh berapa ya 13 gitu ya. Dari kementerian ESDM kemaren kesini, masuk nominasi gitu Toyomerto. Tapi emang masih kotor Desanya. Paling tinggi di Panderman. Penghasilnya ya buahnya labu siem itu. Kalo sayur kan di Sungai Berantas. Kalo yang di Sungai Berantas itukan pakenya pupuk kambing ya. Kotoran sapinya tuh kalo disitu sudah diolah, jadi murni dari biogas mereka sendiri karena merka jauh dari pemukiman. Jadi peternaknya juga ga dari Sungai Berantas sana.
20	T: J:	jadi tuh 13 itu buat 13 poktan atau gapoktan? Kelompok Tani. Kalo gak salah kelompok taninya disitu kalo gak 2, ndak ndak banyak kok.
21	T: J:	jadi 13 itu 13 KK atau...? eehmm meskipun nanti ya datanya tak kirim. Kelompok tani itu mempunyai banyak anggota, nah anggotanya itu mempunyai perkumpulan sendiri yang terbentuk karena mereka berdekatan semuanya dan dibangun komunal itu paling dekat gitu. Kalu sudah, ya nanti dibangunin ini ya karena mereka lokasinya paling dekat. Karena lokasi aja.
22	T: J:	berarti pembeliannya dari sini karena.... kan ada lokasinya. Jadi ini lho lokasi bebas yang bisa dibangun.
23	T: J:	oh gitu. Jadi bukan berdasarkan poktan. Poktan ini satu, poktan ini satu, enggak begitu ya? enggak.
24	T:	kalau Distanhut ngasihnya per gapoktan. Beda ya kalo ESDM. Soalnya mereka kan harus

	J:	membangun konstruksi jadi yang banyak petaninya disitu ya. Iya peternak.
25	T: J:	oh iya peternak. Ada lagi Mbak selain itu? kalo yang di Bina Marga kan pasti memenuhi jalan desa, ya. Jalan desa otomatis merusak hutan mereka, prasarana. Jadi pemenuhannya minta jalan, kita bangun. Jalan desa ditingkatkan. Kalo dipengairan, di irigasinya dibuat dam-dam kecil kayak gitu.
26	T: J:	iya seharusnya saya wawancara sama itu ya. iya bapak Hafid.
27	T: J:	Alat-alatnya tadi berarti beli ya berarti. pengadaan, jadi ada dana dari APBD.
28	T: J:	jadi alatnya beli ya? kalo alatnya iya, kan sudah pengadaan gitu.
29	T: J:	impor atau dari lokal? lokal aja. Datanya di email ya?
30	T: J:	kalo ada hardnya tapi hardnya harus dikopi ya. Tapi kalo ada <i>hardcopy</i> , <i>hardcopy</i> , Mbak. Kan aku juga minjem data kan tadi dari Bappeda. Minta program atau laporan. Kalo yang lain sih ngasihnya Lakip. Lakip.. hmmm
31	T: J:	Yang 2011-nya belum ya Mbak ya? 2011 tuh kita ga ngerencanakan biogas.
32	T: J:	lalu apa 2011? 2011 ke PJU
33	T: J:	PJU apa tuh? Penerangan Jalan Umum. <i>Solarcell</i> sama KLH.
34	T: J:	nah itu. Itu bagaimana boleh aku kopi ga? berarti yang PJU udah berjalan dong ya? iya, Mbak.
35	T: J:	tapi emang yang agropolitan yang kena emang ini ya, Mbak. Kalo yang PJU itu kan gak terlalu. 2010 Biogas juga? yang paling banyak pengairan. Irigasinya.
36	T: J:	iya sih kayaknya sama deh, Mbak 2010. 2010-nya gak ketemu
37	T: J:	tapi kurang lebih sama ya dengan 2009-nya? iya, Cuma beda lokasi aja
38	T: J:	terus setelah dikasih alat-alat ini, terus dilakukan pembinaan juga ga petani peternaknya? kita pendekatannya kalo mereka istilahnya kalo mereka ga rusak, bisa digunakan itu enggak ada pembinaan. Itu umumnya kita ketemuan satu untuk rapat koordinasi untuk kita punya program penambahan jenset. gitu aja. Kalo untuk maintenencenya mereka sendiri
39	T:	nah itu dievaluasi juga ga? Setelah dikasih bantuan ini dilihat ada perubahan dari mereka, dari

	J:	penerimaannya, dampaknya ada ga, atau dipake gak sih ni. Ada monevnya ga ke mereka? kalau dilihat secara akibatnya ya lebih baik kedepan. Tapi kalo dari segi monev dalam bentuk terjun ke masyarakat untuk istilahnya mengevaluasi langsung, enggak. Itu kan tergantung dana ya. Kita gak pernah ngeluarin dana monev.
40	T: J:	nah terkait dana Mbak. Dana itu eehh apa namanya kalo disini dana menyesuaikan program atau program menyesuaikan dana? kita sih ada ini ya usulan, usulan dari apa namanya Desa Kelurahan waktu musrenbang itu. Akhirnya di prioritaskan mana yang membutuhkan terus disesuaikan dananya. Mereka misalkan ada yang minta 10, gak mungkin dipenuhi semua 10 ternyata kita ajukan prioritas 5 maka di approve dewan tidak sampe 5, 3 aja.
41	T: J:	pernah denger ga sih Mbak ada Beasiswa pendidikan untuk anak-anaknya petani atau peternak gitu? ga pernah ya. Tapi kalo bantuan dana orang miskin dan yang kesulitan itu pernah deh.
42	T: J:	tapi bukan yang khusus anaknya petani ya? Kalo kredit Mbak? Ada ga? Kredit murah, entah itu buat rumah, lahan, atu intensifikasi pertanian gitu? gak pernah liat ya. Mungkin kalo yang dipegang sama koperasi ada kali ya
43	T: J:	selama ini kendala dalam pengembangan agropolitan yang dirasakan atau yang dialami dinas ESDM ini apa, Mbak? kendala ya? Untuk pengembangan agropolitan? Sebentar saya tanya, agropolitan yang berhasil itu apa indikatornya?
44	T: J:	pertama itu yang pasti pendapatan masyarakat, peningkatan kesejahteraan disitu kotanya pengawasannya petaninya itu bergerak dari hulu ke hilir, maksudnya dari tani terus pengolahan terus dari industry-industri jasa, pendukungnya juga ada di lingkup itu semua, jadi kota pertanian. Tapi indicator utamanya adalah pendapatan, peningkatan pendapatan petani. kalo dilihat dari PDRB-nya kalo kota Batu ini lebih banyak dimana?
45	T: J:	PDRB nah itu dia. Kalo dari 2007, itu kan lebih banyak di pariwisata. Kalau pertaniannya, kalo pertaniannya, dia ga peningkatan sih kalo yang aku liat. menurun atau stagnan?
46	T: J:	stagnan. Sedangkan kalo Kota Batu pertumbuhannya tahun 2011 ini kan katanya peringkat 4 nasional ya. Tapi ternyata bukan dari pertanian tapi dari pariwisata. pariwisatapun itu sepertinya perdagangan jasa. Kalo pariwisata murni jelas investornya bukan dari Batu, mereka dari luar. Jadi tidak mungkin PDRB-nya meningkat dari Batu. Kalo mereka efeknya langsung perdagangan. Kalo distribusi langsung itu mereka jadi saklek penjual gitu ya kaayaknya belum bisa. Malah yang petani-petani itu cenderung terancam pendapatannya. Mereka cenderung beralih. Anaknya malahgak mau jadi petani, mending jadi pegawai ae, malah enak. Selain itu mending kerja apa di BNS atau di hotel. Tapi juga kecenderungan masyarakat Batu akhirnya semua objek wisata, hotel restoran yang ada di Kota Batu kan berjanji awal-awal mereka 80% untuk sekitar, tapi nanti gak diperpanjang. Lama-lama jadi tidak dipenuhi. Jadi mending didatangkan dari Malang yang SDM nya lebih tinggi. Mungkin mereka juga cenderungnya ke pegawai yang biasa-biasa aja bukan Top Manajer atau apa. Malah banyak yang beralih.
47	T: J:	oh iya ya. Iya jadi kan ngeliatnya petani mah enak dulu jamannya sebelum tahun 2007 katanya gitu. Pertanian lebih nyentuh ke level bawah. Sekarang katanya cuma ya paling yang besar-besar itu aja yang nikmat. Katanya gitu. petaninya ngomong gitu?

48	T: J:	Iya begitu iya, kalo yang saya liat juga seperti itu. Untuk pariwisatanya juga. Katanya pariwisata Kota Batu tuh meningkat. Tapi masyarkatnya.. PDRB pariwisata meningkat. “Tapi pariwisata yang mana ya?”. Mereka tuh ya cuma yang kecil-kecil itu. Perdagangan jasa, Jadi tukang ojeg.
49	T: J:	kalo pungutan-pungutan Mbak, itu ada gak Mbak? Retribusi? gak tau ya.
50	T: J:	kalo ini kan enggak ya. Engga dipungut ya. murni bantuan, malah dihibahkan. Jadi itu bukan menjadi milik kita, tapi ada pernyataan hibah dari pemerintah kota.
51	T: J:	oke, sepertinya itu saja, Mbak Terima kasih ya sama-sama ya



Transkrip Wawancara

7. Heru Waskito, Kepala Bidang Usaha Ekonomi dan Kelembagaan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Batu.

23 Desember 2011, Pkl. 11.00, di Kantor BPMPKB Kota Batu

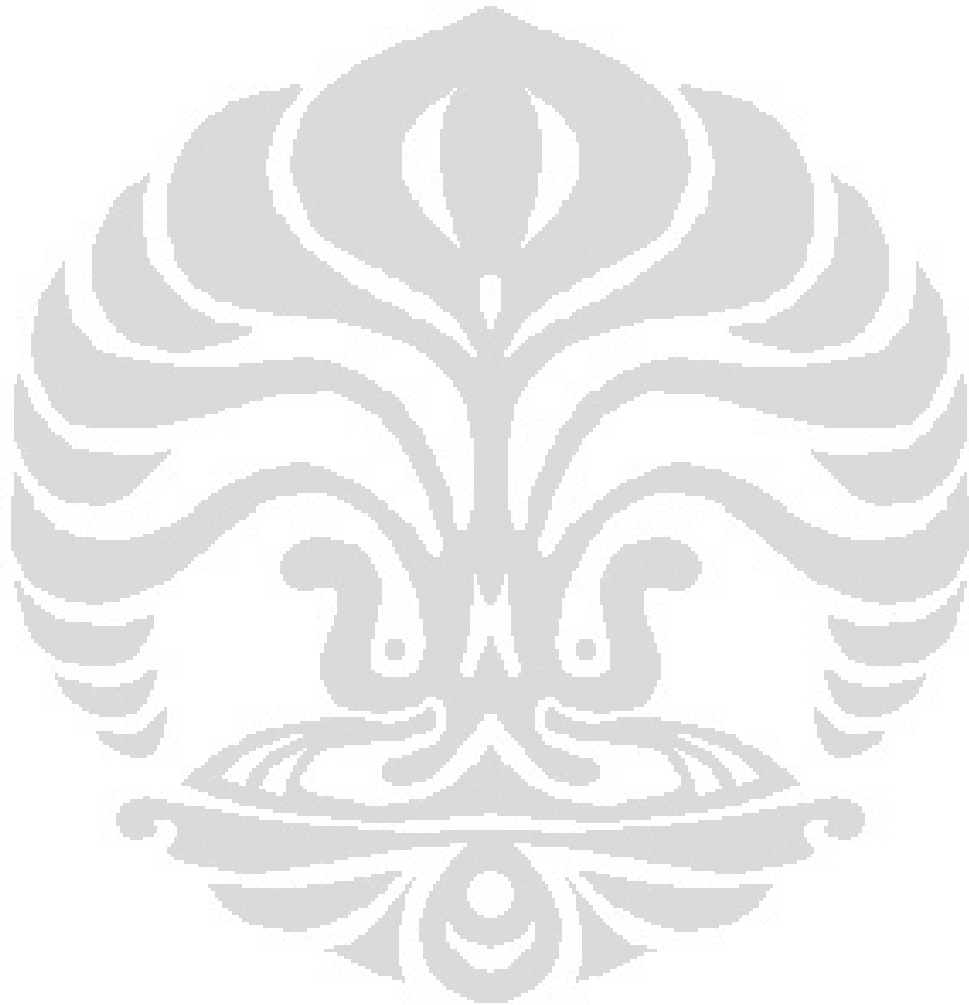
1	<p>T: Iya jadi saya mau Tanya mengenai agropolitan, perkembangannya, dan ini badan ini BMPKB ada ga sih kontribusinya untuk pengembangan agropolitan?</p> <p>J: jadi gini, konsepnya itu kan kalo pengembangan kawasan itu tidak pada wilayah administrasi, tapi kita melihat potensi komoditas unggulan yang ada disini tuh yang mau dikembangkan apa...yang bisa menunjang perekonomian dan merangsang pembangunan. Jadi kenapa itu kita membentuk pokja, leadernya ada di bappeda, bagaimana kawasan itu bisa dikembangkan, bagaimana peranan masing-masing itu bisa memahami pengembangan wilayah itu, jadi seperti PU, itu dia tugasnya apa, dia akan menunjang perbaikan jalan-jalan, jembatan, bikin bangunan, kaya balai-balai pertanian juga, termasuk waktu itu juga melibatkan lembaga perguruan tinggi. Itu kaya ada balai-balai penelitian semua kita libatkan. Nah, dulu itu kita sempat bangun di Bappeda, jadi kita ikutkan balai penelitian, UPTD kita libatkan, kembali dengan peranan masing-masing, tapi terkait dengan Bapemas yang merupakan salah satu anggota pokja. Dimana perannya itu terkait dengan pemberdayaan masyarakat, ini kan, potensinya itu komoditas pertanian, sebagai salah satu yang pencarian masyarakat dan disinilah bagaimana peran bapemas menunjang kawasan itu,, Pengembangan itu ya lewat kelembagaan, Gapoktan, ya kelompok tani itu, Kemudian kalo kita melalui Kopma, Kelompok masyarakat kita fasilitasi, Ada pembantuan alat, pelatihan gitu, jadi alatnya tuh, teknologi tepat guna ada, kemudian ada bantuan ya sesuai potensi pertanian, bantuannya kaya pengolah pupuk, bakul sayur, kita juga melakukan pelatihan agar bisa membuat kerajinan-kerajinan sesuai dengan pengembangan potensinya. Termasuk juga dengan penguatan kelembagaannya, kita di masyarakat punya KPM, Kelompok Pemberdayaan Masyarakat, kemudian kita juga mengembangkan UPK-UPK (pengelola keuangan) di masing-masing desa, kemudian kita juga melibatkan LBMD sama PNPMK, jadi lembaga pemberdayaan masyarakat tingkat desa kita libatkan semua, Tapi hanya, bila kita kembali ke konsep awal tentang pengembangan agropolitan, itu dulu udah kita setting 5 tahun ke depan, apa-apa yang akan kita laksanakan, masing-masing, peranannya apa fungsinya apa, kita susun sama-sama, dan tiap tahun. Seperti waktu itu kita kembangkan Desa Sidomulyo sebagai desa pengembangan bunga, itu ada bunga potong, bunga hias, sudah kegiatan itu kita arahkan kepada pengembangan bunga, kita udah punya settingnya itu, kemudian nanti dinas pariwisata yang akan mengekspose, dengan mengikuti event-event kegiatan baik itu nasional maupun internasional. Di tempat saya juga begitu, kita akan mengembangkan kelompok masyarakat dengan memberikan bantuan dan pelatihan-pelatihan. Di san adi batu petaninya dengan bibitnya, permodalan, dengan melibatkan balai pusat PMD yang ada di malang, untuk ikut membantu kegiatan itu. Termasuk waktu itu kita melibatkan dinas pendidikan, jadi dinas pendidikan waktu itu membuat program, kerja sama dengan brawijaya, anak-anak petani yang nantinya akan dikembangkan jadi pengusaha muda itu disekolahkan Cuma-Cuma dengan D1, diploma D1, khusus waktu itu tanaman hias, ini tiap tahun berubah, tahun pertama tanaman hias, tahun kedua tanaman apel, saat ini taman. Lah itu ada kebijakan, jadi memang kebijakan pak walikota, satu angkatan itu 40 untuk membuat diploma kerja sama dengan brawijaya untuk mendidik anak petani tadi, tapi syaratnya ya Cuma pokonya lulus sekolah menengah atas, sma atau stm ga ada masalah.</p>
---	--

		nanti bisa sekolah D1 yang dikelola dinas pendidikan,
2	<p>T: itu berjalan pak?</p> <p>J: sampe saat ini berjalan, malah kita kembangkan dengan membuat sekolah menengah kejuruan yang khusus ada pertanian, ini kita dipaksa jadi kita kuatkan kelompok masyarakat, kita kembangkan Gapoktan, kita libatkan semua, jadi masing-masing, nah waktu itu saya masih masuk tim juga, tim seleksi, mengajar disana D1 itu lho.</p> <p>Nanti bisa ditanyakan di dinas pendidikan, khususnya waktu itu, pengembangan kawasan pertanian ini, kawasan agropolitan ini, dengan kita membantu untuk menambah keterampilan, serta pengetahuan kepada anak petani itu. Nanti mungkin d1, 2,3 bisa lanjut ke brawijaya, tapi yang jelas sampe saat ini masih berjalan.</p> <p>Terkait dengan kondisi saat ini, lah memang visinya masih terkait, jadi visi yang lalu itu walikota itu salah satunya untuk pengembangan agropolitan yang berbasis kawasan pertanian, lah kalo yang ini ga, ini kota batu sebagai kota pariwisata yang berbasis pertanian, memang salah satu misinya ada untuk pengembangan agropolitan itu, Cuma kelanjutan dari yang sudah dirintis waktu itu, oleh walikota yang dulu, sepertinya tidak mendapat sambutan yang baik, seperti saya pindah ya pengganti saya tidak bisa melanjutkan itu.</p> <p>Padahal di tingkat 1 , di Bappeda tingkat 1 ada bidang khusus untuk pengembangan kawasan agropolitan. Lucunya mbak atik ini pengeya dimajukan pengembangan kawasan di madiun, apa gunung lawu itu, padahal kita masuknya kawasan bromo, kita dimasukkan ke kawsan pengembangan itu, kan kita itu dibagi per wilayah.</p> <p>Emang setelah saya keluar dari pertanian itu tahun 2006, setelah itu seterusnya pakum, memang ada kegiatan pemngembangan kawasan agropolitan yang dilaksanakan oleh dirjen pedamping PNPB, malah yang punya ide Bapemas sendiri, jadi PNB yang dijakarta mengadakan pelatihan kawasan pengembangan agropolitan,</p> <p>Jadi memang kalo diliat aktivitas kegiatan pengembangan kawasan agropolitan ini untuk pembangunan ya memang pertanian, Kota batu ya pertanian.</p> <p>Kenapa pertanian, ya pertama dari alamnya cukup menunjang, disini ga ada industry, ga punya pabrik kita, kita ga punya tambang, kita ga punya laut, ya itu sebenarnya kita bagaimana mengelola sumber daya alam agar bisa menghidupi masyarakat, dengan mengembangkan potensi yang ada.</p> <p>Jadi apa yang telah dilakukan Pemerintah kota batu untuk pengembangan kawasan Kota Batu, semua menunjang komoditas pertanian itu,</p> <p>Hanya memang dulu ada pertanian yang bernuansakan wisata, itu dulu..tapi sekarang dibalik, wisatanya dulu, tapi tetep di komoditas pertanian, artinya pertanian di sini, teknologi, tanaman pangan, hasil perikanan, perkebunan, itu kita kembangkan semua jadi kawasan wisata, ada desa wisata, wisata untuk memetik apel, kemudian ada rumah inap petani, sudah kita kembangkan begitu, jadi kita sudah punya data, desa Sidomulyo, desa sangrahan sebagai kawasan desa wisata, jadi ada pengunjung datang kesana melihat nuansa, kehidupan petani, dia juga menanamkan sahamnya untuk membeli tanaman disana, nanti kalo kaya apel panen dia juga bisa,</p> <p>Peranan PMP disini ya terkait pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaannya, termasuk masyarakat di masing-masing desa nanti kita fasilitasi.</p>	
3	<p>T: pemberian bibit juga, alat pertanian juga?</p> <p>J: iya, tapi Cuma kan beda, beda kalo dinas pertanian masalah teknisnya, kalo disini manusianya, dimana manusianya dulu yang tidak berdaya jadi berdaya, terutama masyarakat miskin, kemudian juga ada PKM, juga ada program pengembangan swadaya masyarakat. Kemudian juga nanti masalah sanitasi perkotaan,</p>	
4	<p>T: jadi memang sepertinya Bapemas ini punya banyak program ya untuk mendukung pengembangan pertanian tadi, tapi dari segi sumber daya manusia nya ya?</p> <p>J: iya , jadi kami langsung menyentuh kepada masyarakatnya, tentunya jadi banyak</p>	

		<p>aspeknya, dan kalo di liat secara politis kita ini punya peranan yang cukup penting, Dulu pokja kita ga masuk, tapi kita upayakan kita jadi tim peneliti dalam program pengembangan kawasan itu, kita akan langsung membina masyarakatnya itu, didominasi sektor pertanian semua, bagi yang tidak mampu, kita juga ada bedah rumah, bantuan alat teknologi tepat guna, sama kaya dinas tapi kita manusianya. Ya jadi itu memang pertaniannya. Karena ya tadi kita memang ga ada pabrik, ada pabrik tekstil Cuma sudah tutup. Daya hidupnya ya disitu.</p>
5	<p>T: J:</p>	<p>paling ada pabrik susu ya pak itu kan Cuma koperasi saja, dulu ada pabrik kuno yang cukup besar ada dulu, telektani yang dulu ada masalah</p>
6	<p>T: J:</p>	<p>beda sama selekta ya pa iya beda, dulu ada yang cukup besar mul laut, juga ada himpunan petani anggrek, ada juga agronoflora yang bisa ekspor bunga ke jepang. Takatani bisa mengembangkan koperasi ke belanda</p>
7	<p>T: J:</p>	<p>pada saat penyusunan program, kaya ada rakor ya pak? oo iya, kita memang dulu ajak lembaga perguruan tinggi dan penelitian, dulu itu Bappeda, balai penelitian, balur,, dia juga punya program pengembangan agropolitan, Cuma teknisnya itu peternakan, kemudian juga dilirik di telukum itu, jadi local penelitian teluk samurti, itu khusus untuk tanaman, kaya waktu apel kita tidak produktif kita datangkan bibit dari belanda, kita kembangkan dulu ada 12 varietas, kita juga survey, dulu ngajak petani kita ke belanda dulu itu, emang kan dulu sumber kita dari apel. Dulu kita juga kembangkan tanaman bunga, yang sampai saat ini sudah bagus, dulu juga sempatkan kembangkan pasar ikan</p>
8	<p>T: J:</p>	<p>nah berarti memang kegiatannya selaras ya pak iya, dulu itu dinas cipta karya, yang untuk potong hewan, dinas bina marga, irigasi desa, ada jalan desa, ada tempat yang aksesnya tidak bagus ya bina marga yang atur</p>
9	<p>T: J:</p>	<p>kalo anggaranya? jadi gini kegiatan kita semua kan dari APBD, kita ga pernah ambil dari pusat, ada dari pusat penelitian itu untuk ada kajian juga untuk kawasan agropolitan kerja sama dengan unair jember, yang mana asal kegiatan itu dari bappeda tingkat 1, jadi masing2 kabupaten kota diadakan de plot, untuk melihat potensi komoditas apa yang cocok Makanya ini bukan hanya dinas saja, tapi bagaimana ruang lingkup dengan balai-balai penelitian, dimana nanti itu kita bisa menampilkan apa yang menjadi unggulan disamping dengan apa yang ada di situ, ini kan apel satu2nya komoditas subtropik yang ada di Indonesia. Lah nama apel batu pas itu masih suhunya 18 dan karena perubahan iklim sekarang batu itu 28, jadi tanaman apel udah ke daerah atas, apa itu desa punten yang cocok untuk apel. Dan kita udahantisipasi, apel ini kan bisa ditanam bertahun2, kalo tanah itu asupan gizi nya kurang, jadi gini kalo petani apel panen sampai 30-40 ton tiap tahun dua kali dengan perlakuan khusus. Jadi artinya gini, jadi apa yang dimasukan ke tanah, pupuk itu, pupuk instan hanya NPK aja, lah pupuk yang dikasihkan itu ga ada 5 persennya, jadi ya paling yang urea hanya 1-2 ton, total yang diambil petani, kan kalo setaun itu berarti berapa yang keluar. Kualitas apel, dan pengembangannya itu juga sudah kita kembangkan dengan pengembangan organik kita pake pupuk kompos, kandang, dengan keadaan yang seperti itu kita sudah mengantisipasi kalo apel itu nantinya akan digeser dengan komoditas yang lain, karena saingan Kaya apel impor yang masuk bebas ke Indonesia karena pasar bebas itu, kan akan merubah suasana. Jadi kita sudah kembangkan di atas 800 meter secara eksklusif, nah sekarang ini tanaman</p>

		<p>dan bunga, bunga itu belum ada masalah, bunga itu bisa ditanam dimana saja, kita di batu itu ada sentra yang bisa untuk, Kalimantan, sulawesi bali, sampe papua,</p> <p>Kita melakukan mapping, untuk kawasanbnga, ada bunga potong, anggrek, kita mapping waktu itu, dan disitu kita bisa menghitung, akan melibatkan petani dan pengusaha berapa, nah makanya kita itu bikin Gapoktan jadi kita buat tersistem, makanya dari situ paling tidak untuk 5 tahun ke depan kita itu bisa langsung mengevaluasi,</p> <p>Kna kalo kita memang mau tetap mengembangkan apel harusnya kita punya tempat penampungan apel, nah kalo kaya gini apel murah, harusnya kalo lagi murah gini ya kita tamping dulu, di gudang-gudang penyimpanan,</p> <p>Kenapa harga apel itu murah, karena itu biasanya, pada hujan bulan tulak ini, bulan desember ini bersamaan dengan mangga, rambutan, kalo sudah begini apel kalah bersaing, karena pembeli lebih senang beli rambutan itu karena murah.</p> <p>Dan pada saat kondisi seperti itu, apel disimpan dan bisa bertahan sampe 4 bulan berikutnya, kita itu dulu sudah membuat kaya kabupaten itu nanti sebagai supliernya, kaya kabupaten malang, jadi sudah ada itu sentra-sentra untuk menampung, sehingga kegiatan ini bisa diadakan tiap tahun, dan ada lelang, lelang komoditas, kita datangkan semua pembeli,</p>
10	<p>T: itu tiap tahun ya</p> <p>J: iya, kita tapi itu sudah diambil oleh provinsi,</p>	
11	<p>T: o yang di pasar lelang itu ya</p> <p>J: iya</p>	
12	<p>T: itu pak tadi yang bantuan alat itu, bapemas melakukan pembelian ya, langsung?</p> <p>J: oo iya, jadi ini langsung, tiap tahun</p>	
13	<p>T: itu belinya impor apa?</p> <p>J: oo engga, ya desa disini aja, kita dengan kelompok2, kita berikan teknologi,</p>	
14	<p>T: pernah ada ekspor impor ga pak?</p> <p>J: belum-belum</p>	
15	<p>T: oo jadi semua pake produk local ya?</p> <p>J: Iya-iya, jadi disini kita penguatan lembaga itu kaya UPK, kaya misalkan dapat bantuan keuangan, nanti masing2 petani dapat bantuan 1 juta, nanti kelompok, peserta didik nanam apa</p> <p>Terkait bantuan memang ada dua pola, ada yang dari pusat, PNPM, jadi masing-masing , tapi ada juga yang kaya raskin itu melalui provinsi langsung kepada kelompok-kelompok, PMK juga begitu langsung kepada kelompok-kelompok, kita itu hanya monev aja.</p>	
16	<p>T: kalo kaya kredit murah ada ga sih pak untuk pengembangan ini?</p> <p>J: iya dulu itu yang kredit di depenrindag sama koperasi, itu bantuan alat, kita malah hibah bantuan social begitu, masalahnya apa, yang kita didik itu masyarakat yang tidak mampu, makanya kita itu hibah lansung kaya BKPM, semua dapet, tahun ini ada yang dapet 100 juta, digilir gitu, nanti tahun depan diganti desa yang lain,</p>	
17	<p>T: nah untuk yang tadi pak yang pendidikan itu kan berarti untuk yang sudah lulus sma ya pak</p> <p>J: iya yang sudah lulus selama setahun Cuma-Cuma</p>	
18	<p>T: itu sekolahnya di brawijaya?</p> <p>J: lho disini, di dinas pendidikan, dosennya yang datang kesini itu dari brawijayanya,</p>	

19	T: J:	oo kalo begitu terima kasih ya pak informasinya iya, nanti minta aja datanya sama mereka ya
----	------------------------	--



Transkrip Wawancara

8. Awanto Pribowo, Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Batu.

23 Desember 2011, Pkl. 14.00, di Kantor BPMPKB Kota Batu

1	T: J:	di bapemas ini prokernya program kerjanya banyak tentang untuk agropolitan ya pak ya ya yang mendukung kerjanya aja, jadi kan yang dimulai dari ekstra, ekstra itu, kemudian kita bagi menjadi kerjasama gitu , program kerjasama tuh bagaimana, nah nanti itu perlu juga kan
2	T: J:	karena memang agropolitan ini pembangunannya harus mulai dari semua ini yah, ga Cuma dari dinas pertanian, semuanya mendukung , makanya kita kebetulan sekarang juga kan ini kalo liat visi misinya ini kalo pariwisata harus dengan pertanian juga
3	T: J:	beda dengan sebelum 2007 ya, mungkin ditinjau lagi cara kerjanya bagaimana,
4	T: J:	nah itu kalo dari bapemas sendiri, mengikuti kebijakan diatasnya jadi kebijakannya menyesuaikan apa ya menyesuaikan, memang ada program yang sifatnya itu nasional supaya apa, IKN itu kan sifatnya nasional dan berkelanjutan yang memang dikatakan , memang satu program yang memang disesuaikan dengan visi dan misi walikota, jadi kalo ini ditinjaunya dari apa?
5	T: J:	kebijakan pengeluaran, kebijakan pungutan, pengeluaran itu misalnya kalo kita kasih bantuan , alat, itu kan juga kebijakan pengeluaran, kalo dari pungutan misalnya dari pajak, retribusi, seperti itu, nah dengan memberikan bantuan subsidi itu kan merupakan salah satu upaya mendorong yah, pengembangan agropolitan itu, nah itu yang mau kita lihat apa saja sih yang kebijakan2 disini dari berbagai aspek, kebijakan dari sini kan kalo, anda sendiri yang bilang, ini yang masuk kedalam. Ini rencana kerja sebagian besarnya aja, liat aja disini, nanti mungkin lebih lengkap semuanya disini,
6	T: J:	ini termasuk yang sudah terealisasi ya pak yang sudah terealisasi nanti sebetulnya ada yang laporan lakip itu
7	T: J:	nah itu pak, lakip itu yang saya butuh kalo dilakip itu sangat ada perbandingan antara program dan realisasi, tapi ini 2007
8	T: J:	yang 2011 belum selesai dibuat ya pak ya iyaa, contohnya itu . ini RKM 2011. Kalo filenya ini dari simdar ga bisa dicopy,
9	T: J:	ini boleh saya copy? boleh,
10	T: J: T:	jadi memang kegiatannya itu menyesuaikan dengan dana ya pak ya iya, lakipnya berarti 2010 ya pak? Gapapa pak buat saya buat perbandingan aja.

Transkrip Wawancara

9. Luki Budiarti , Ketua Gapoktan Mitra Arjuno dan pemilik CV Arjuno Flora, Desa Junggo, Kota Batu

22 Desember 2011, Pkl. 11.00, di CV Arjuno Flora, Desa Junggo, Kota Batu

1	<p>J: Saya itu aslinya orang ndeso, cuman ketua Gapoktan aja sama pengelola MPA Arjuna Flora</p> <p>T: makannya direkomendasikan karena, Gapoktan flora dari tahun berapa ya bu?</p> <p>J: Kalau Arjuna Flora ini dari tahun 2000</p>
2	<p>T: Ibu yang punya,ownernya ya?ibu elis?</p> <p>J: Maaf itu ade saya tapi yang ngurusin semuanya sama karena lahan yang kami pake juga lahannya orang tua jadi dikelola sama-sama,,, jadi beliau punya peran disini. Aslinya mana kok jauh?</p>
3	<p>T: Saya asli Jakarta, suami saya Trenggalek tinggal di Malang</p> <p>J: ohhh iya makannya kalo Jakarta moso langsung naik apa, kendaraan... Ade saya dulu kerja di Jakarta rumahnya disini, kalo pulang bawa mobil sendiri tapikan 20 jam lebih</p>
4	<p>T: Kalo lagi musim mudik 32 jam, ini apa namanya eee ini bunga aja atau sama buah juga</p> <p>J: kerjanya, apapun dibidang hortikultur ada pulang kami kerjakan, tapi yang lebih fokus kami kebunga potong sama ini,,,sama ada ketela ungu yang di ekspor ke Jepang</p>
5	<p>T: di olah ya bu katanya jadi pasta, atau ada olahan selain pasta?</p> <p>J: kalau dulu si sempat jadi kripik atau jadi macem-macem olahan,,,, sekarang sudah ga nutup lagi sama tenang dan pikirannya</p>
6	<p>T: emang ga dikerjakan orang gitu, tambahan?</p> <p>J: Iya mempekerjakan orang tapikan semua harus ada responsibility masing-masingnya,,,seperti supervisor-nya itu supervisor bagian bunga, supervisor kebun, supervisor processing,untuk di bagian-bagian ini....</p>
7	<p>T: Jadi saya ini bu sedang ada riset dari UI pas bulan oktober kita sudah bertemu dengan Bapeda, Bapeda mengundang dari dinas-dinas, dan waktu itu ada Pak Winardi mungkin ibu kenal, itu yang tinggal di daerah mana itu? Jadi sekarang ini kita mau lanjut, kita mau ambil data sedikit-sedikit,,, ada waktu luangnya kapan baru kita ambil data. Kebetulan tadi ketemu Papak dari KEMENRINDAG, terus kami bertanya ada kenal ini ga pak dari Gapoktan?ohhh iya ini ibu,,, bilanganya Ibu Sri, makannya tadi aku nanya ini rumah Ibu Sri Budiarti tapi ini kok,,, ga tau aku bingung bu. Kita ini aja bu mau tanya-tanya, sharing, sebenarnya kita risetnya tentang agropolitan, kan Batu ini apa namanya,sebenarnya dibatu ini masyarakatnya kerja diagropolitan, seperti pertanian, perikanan dan sebagainya, dan kita juga meneliti mengenai kebijakan-kebijakan yang diterapkan untuk mengembangkan pertanian. Makannya kita mewawancara ibu sebagai,, ibu ketua Gapoktan, apa tadi bu?</p> <p>J: Ketua Gapoktan Mitra Arjuna</p>
8	<p>T: ada berapa Poktan disini bu?</p> <p>J: sebenarnya ada 15, sekarang lebih saya fokuskan yang ada peran kepada gapoktan itu yang kami bina</p>
9	<p>T: Ohhh gitu</p> <p>J: Artinya,, saya punya peran itu masih terus eksis mau mengembangkan organisasinya, kalau yang lain itu karena dulu hasil verifikasi proyek PLA itu artinya Penengendalian Lahan dan Air</p>

10	T: J:	Oleh siapa? Oleh dinas pertanian juga, terus akhirnya dapat pohon-pohon untuk ditanam dilahan-lahan petani. Tapi prinsip kami yang produktif saja, artinya menanam jambu, terong belanda, gitu itu sudah jarang,, sebentar ya
11	T: J:	Maaf ibu mengganggu kesibukannya, Ohhhalah ya nda saya yang minta maaf ini, karena kita dibulan oktober november apa itu bu aktifitasnya, jenengan tau?
12	T: J:	Ga bu Rapat dimana-mana, rapat seluruh dinas dan instansi seIndonesia
13	T: J:	Akhir tahun ya ibu? Iya terus kalau sudah desember acaranya apa bu? itu ceremonial dimana-mana, sama target-target laporan-laporan nah itu berimbas pada kegiatan kami juga
14	T: J:	Itu jadi agak tersendat ya? Ya,, nda ya kitakan istilahnya, kalau saya bekerja di Arjuna Flora untuk cari rezeki bisa untuk membantu gitu, kalo di Gapoktankan nilainya sangat sosial ya,,gitu tapi kami ngelihat bahwa Gapoktan itu nganu ...
15	T: J:	Apa ini dapat bantuan atau fasilitas apa gitu bu? Ini ada bantuan untuk pakageing, perlengkapan untuk procesing jagung, cabe
16	T: J:	Ini ada jagung dan cabe, untuk dibuat jadi apa? Untuk dijadikan saos dan tepung
17	T: J:	Tepung, ohhh iya ini dapat bantuan dari mana bu? Dari dana APBN dan Direjen....
18	T: J:	Jadi itu dibawah Kementrian Perhutanan Iya kementrian perhutanan
19	T: J:	Ibu sering kesana.... ketemu dengan siapa bu? Kalau disana mau yang diapa?
20	T: J:	Kalo disana saya kenalnya yang di pengembangan SDM ketemu dengan Pak Ridwan Ohhh SDM, kalau saya disana itu di Direktorat Tanaman Hias, Direktorat apa...? Dirjen Holtikultural ya eee terus sayuran dan perternakan? Terus mengelola basil di Kementrian Pertanian ya. Yang di Ragunan satu lagi yang dimana,,kan dua,, Sistem holti itu beda lagi,,
21	T: J:	Ohhh berarti ga lewat dinas pertanian batu ya? Lewat , saya selalu semuanya melewati dari bawah. Tapi karena kegiatan kami gapoktan itu Mitra Arjuna dan Arjuna Flora sering presentasi di lingkup nasional akhirnya kementrian tau terus ada peluang. Waktu disana di Hotel Bidakara kami diundang, terus kok semua kok mengurusin bantuan-bantuan, sementara saya datang kesinikan diundang hanya untuk menyaksikan gitukan. Nah apa bisa kami juga ada dukungan dari pemerintah karena sudah dari tahun 2007 kami mengadakan apa?membentuk gapoktan terus melakukan kegiatan-kegiatan kemitraan itu kok langsung dengan investor kok tidak ada dukungan dengan pemerintah. Akhirnya dari situ terus, ada programnya langsung ke pihak acara itu langsung dibelakang kami dikasih tau ada banyak program salah satunya <i>two in one</i> tapi gapoktanya harus sudah berjalan ,managementnya harus benar, terus orangnya harus ada , kelompok taninya harus nyata, nah itu akhirnya kami, ke bawah lagi ke dinas pertanian, terus minta tanda-tangan ke kepala dinas daerah terus dinas provinsi, tapi awalnya tau dari Jakarta.

22	T: J:	apa bu two in one? Program three in one ya
23	T: J:	Iya three in one Iya apa itu saya lupa, itu ada datanya semua. Gapoktan punya investor terus dikaitkan dengan industri ya....
24	T: J:	Iya Terus Gapoktan membudidayakan cabe di lewat apa, didukung oleh benih terus dari investor nah hasilnya di kontrol oleh industri dekat, investor dekat masuk ke pabrik.
25	T: J:	Jadi selama ini apa lagi bu bantuan yang pernah diterima ini dari 2007 Iya 2007 dari dinas pertanian itu dapat bantuan traktor sudah dari dinas pertanian, alat pengering cabe dari dinas provinsi terus ini dana APBN ya dilewatkan ke dinas pertanian.,
26	T: J:	Ini mengajukan atau... Mengajukan
27	T: J:	Atau lewat survei? Kalo disurvei jelas ya, itu pasti terus ditanyai apa mau ada ini,,ini,, terus kami membuat proposal, datanya ada kalo perlu
28	T: J:	Ohhh iya bu datanya nanti, sekarang kita ngobrol-ngobrol aja. Eee apa namanya nah ibukan ini ekspor ke Jepang, selain ke Jepang kemana lagi? Ke Thailand, ke China tapi itu jadi satu link ya artinya begini saya punya kenalan orang Jepang, orang Jepang ini punya link market di Thailand terus saya dari sini harus ngirimkan langsung ke Thailand, dari Thailand uangnya bisa langsung ke Arjuna Flora,
29	T: J:	Ooohh Jadi orang Jepangnya ini membuat link
30	T: J:	Jadi leadingnya ya bu, itu ibu dapatkan dengan investor itu langsung dari pemerintah atau... Langsung
31	T: J:	Eem memang ada kenalan ya,, dulu ibu kuliah di Jepang apa gimana bu? Saya itu nda sengaja kursus bahasa Jepang terus saya itu setelah lulus kuliah banyak kerja dengan orang Jepang di proyek, sayakan arsiteknya
32	T: J:	Ohhh arsitek , luar biasa,, Kerja saya itu di Legon di Paiton , di Sumatra Selatan, Palembang itu perusahaan Indonesia join dengan Cina juga Jepang akhirnya referensi saya juga banyak toh dan waktu satu proyek selesai satu proyek selesai,lah ternyata saya punya referensi. Terus waktu kursus bahasa Jepang di Malang itu ketemu dengan yang apa? Yang orang importir ya,importir dari Jepang yang transleternya sama guru saya
33	T: J:	Ohhhh Terus ditanya dia coba menanam bunga di lereng Gunung Bromo tapi gagal karena yang diajak kerja sama itu orang yang punya pabrik besar gitu terus ga jalan, dipikir dia ga biasa ngurusin pertanian gitu.
34	T: J:	Berarti bermula dari situ ya bu ya? Dari situ akhirnya kenal dengan orang Jepang,tapi mulanya di proyek-proyek
35	T:	Itu berarti mulai 2002 ya

	J:	Dari tahun 2000 saya,kalo yang Gapoktan. Setelah saya katakan kerja dirumah kok malah lebih baik dibandingkan saya kerja menjadi karyawan. Jadi karyawan enak tiga bulan sekali naik pesawat, dari Palembang, dari Cilegon naik pesawat. Waktu itu kan sudah zaman bandara Malang sudah kebuka naik pesawat terus tapi ternyata gaji kita waktu diitung-itung jadi karyawan loh kok nggak sesuai kehidupannya kok tetep-tetep aja padahal dalam artian hidup ini seperti sudah mewah toh, mobil sudah dikasih, fasilitas semua dikasih perusahaan, hidup ga mikir loh sampe rumah kok saya ga bisa bikin rumah gedong, lah saya kan sudah sarjana sudah kerja dibagaiman mesin jabatannya sudah ada tapi kok kalo diitung ya waktu itu gaji tiga juta sudah besar.
36	T: J:	Tahun 2000 Tahun 1998 itu kalo dihitung setahun, kita bisa bikin rumah atau kita beli mobil akhirnya saya ambil keputusan waktu krisis nyari kerjaan sulit mending tani saja didukung sama orang tua saya bertani sambil jualan apel pinggir jalan, terus akhirnya berkembang sampe sekarang , ga boleh berhenti. Nah ini sekarang ini muter-muter keun dana,, ya sudah lebih dari satu milyar setahun sudah jauh lumayan lebih baik dari pada yang dulu
37	T: J:	Ini hubungan dengan, itu..... Minta apa boleh saya investasi terus membentuk PMA join dengan perusahaan lokal disini Luki kan pahannyakan sudah besar,terus dari saya juga ada gitu. Ini masih angan-angan tapi saya masih sedikit-sedikit untung ruginya. Ya tempatnya disini, ya walaupun keliatan kecil begini-begini saya ngerjain proyek di rumah sakit nilainya lebih dari satu milyar, untuk bangun UGD rumah sakit
38	T: J:	Kan arsitek... Terus saya itu saya 2004-2006 itu dapat untung lebih dari 200 juta menanam rumput di Bandara Djuanda, nanam pohon-pohon di lahan parkirnya, di Bandara Djuanda yang baru itu saya
39	T: J:	Ohhh iya? Itu saya bisa berangkat haji dari situ,terus ternyata berkembang-kembang tapi ya gitu tempatnya disini kecil, yang penting ada komputer, ada web, ada faxes, ada internet
40	T: J:	Dulu punya web juga ya? Ada web tapi saya nda mau sebab untuk sekarang melayani market yang ada, saya itu saya sudah tidak bisa
41	T: J:	Tapi ibu sudah melibatkan pekan-pekan dalam lingkungan ini, untuk mensuplay permintaan? Sekarang hanya setiap sore kalau jualan ke supermarket suplayer supermarket itu dilayani oleh petani-petani , rencananya ini nanti jadi itu semakin kita kembangkan lagi terus sekarang ini petani didanai oleh Bank Jatim hampir tiga milyar
42	T: J:	Se-apa? Segapoktan mitra arjuna ini,
43	T: J:	Setahun? Sekarang ini kami membentuk klaster kentang difasilitasi oleh BI oleh dana DBRR-nya BI itu ya tapi gapoktan kami jalan, terus membangun klaster kentang, menanam kentang di daerah sini lalu dananya pake kredit bunga
44	T: J:	Berapa bu bunganya?itu pinjaman atau? Iya pinjaman 2,5%
45	T: J:	Itu setahun? Iya kayanya tapi itu jatohnya 8 atau 9nan

46	T: J:	8 atau 9? 8 sampai 9 persen setahun, kan ada pembayaran yang lain, kan per enam bulan bisa beda lagi gitu
47	T: J:	Itu mengajukan ke Bank Jatim ya bu Iya kerja sama BI dengan gapoktan akhirnya menanyakan siapa bank yang ditunjuk, atas rekomendasi petani jadi ke Bank Jatim, Bank Jatim dipanggil apa mau memfasilitasi dana untuk menanam kentang yang sudah punya pasar, yang kemungkinan pasarnya di Singapura .
48	T: J:	Berarti ibu ini selain petani juga pengumpul juga ga si bu? Pengumpul dan pengolah. Tapi bagaimana pun <i>good manufacturing</i> atau GMP itu penting toh, sekarang ini banyak prodak olahan Batu itu bermunculan karena memang Gapoktan menginginkan di Batu ini semua orang seBatu kalau bisa terbantu. Tapi kadang orang-orang ini banyak kepentingan. Di dinas-dinasnya nda pinter nangkap nah saya selaku orang biasa dari Gapoktan kan punya urusan untuk menyampaikan kepemerintah bahwa begini,,,, begini,,,, itu kadang ditanggapi dan ada feedback , seperti dinas pertanian sudah mulai ada ada feedbacknya
49	T: J:	Selama ini ibu dibantunya dengan dinas pertanian aja bu? Ada dari dinas lain, hari ini sore nanti ke DIPERINDAG mau pameran kami harus berpartisipasi,
50	T: J:	Pasti ibu datang? Ya walaupun saya tidak datang pasti ada dari kelompok yang anggotanya berpartisipasi, tadi sudah siap-siap. Mau di inikan UPAKARTI tapi penghargaan sebenarnya nda begitu penting tapi saya juga pernah dapat penghargaan bu, eksportir berprestasi tahun 2007 hadiahnya pameran ke Jepang.
51	T: J:	Ohh itu skalanya apa bu? Itu sekalanya nasional,
52	T: J:	Ibu sepertinya sering ke Jepang? Ke Jepang sudah tinggal 3 kali, bersama pak wali kota, kemudian ke Thailand diharapkan seluruh orang Batu itu berperan, seperti di Thailand ini, atau dimana. Meski kita keliatan tradisional tapi sudah maju gitu. Untuk kesana harus mengajukan ke Dinas ASEAN ekspo, ke Cina juga, terus ke Belanda, ke Malaysia. Di Belanda itu saya sekolah disana 1 bulan.
53	T: J:	Enak ya bu sudah ke manca negara Tiap bulan atau dua bulan sekali ada tamu Jepang tidur dirumah saya.
54	T: J:	Tentang bantuan itu bu? Orang lainkan bilang kalo suka tidak ada bantuan gitu, memang karena merekanya yang tidak mau proaktif ya. Terus selalu menilai negatif orang gitu,
55	T: J:	Sebenernya dari pemerintah itu bantuannya banyak ya bu? Iya sebenarnya banyak, tapi selalu ada miscomunikasi kadang itu orang-orang itu membentuk kelompok, terus kalo sudah dibantu tidak merasa terima kasih terus akhirnya WPL-nya malas datang. Ini menjadi hal-hal yang misunderstand. Kami perinsipnya kalau ada tamu dari mana aja kami terima, kami apa adanya kami tidak pernah mengada-adakan, kalo ada kegiatan ini ya memang ada. Kadang kami juga turun kekampung, terus kalo ada pihak yang mau membantu yang boleh. Biasanya dari dinas itu membantu memang karena orangnya terlihat berminat dan berniat untuk mengembangkan, ya kalau dibantu tapi orangnya gak mau menata administrasinya terus asal maunya terima sajakan itu nggak bisa. Makannya nyari Gapoktan yang sudah

		didukung dengan administrasi-administrasi gitu.
56	T: J:	Saya melihat ibu rapih sekali dokumen-dokumennya Iya,, kemarin itu baru pindahan jadi baru akses internetnya yang sudah sama program-program yang masuk dikomputer, karena kemarin abis di instal ulang. Ini kalo selesai urusan dengan pihak lain pasti dibawa kesini, nanti berapa orang saya ajak kesini, untuk menaru filenya disini, ditata disini, diketik begini ya kaya gitu. Terus yang laporan juga silahkan buat disini. Setiap sabtu kami bikin laporan dan kami ada. Disinikan suka digunakan untuk rapat-rapat , jadi suka diangkat-angkat. Ini sebetulnya rumah saya kadang kalo malam-malam saya juga suka tidur disini, tapi saya tidurnya dirumah orang tua, biar orang tua tidak merasa kehilangan semuanya. Orang tua saya punya anak 3, perempuan semua yang paling kecil itu lulusan teknik sipil biasanya dia ngerjain proyek juga bikin buku tentang bangunan atau fondasi.
57	T: J:	Siapa namanya? Herni Haryanti
58	T: J:	Apa ibu nulis buku juga? Ya,,, nda saya ini nda sempat.
59	T: J:	Ada kemudahan-kemudahan ga yang didapat waktu pendirian usaha? Ya ada, saya ini polos ya tidak banyak neko-neko maksudnya tidak bisa berpolitik macem-macem. Akhirnya orang dinas itu semuanya jadi baik semua, nda pernah minta-minta uang, pak polisi-pak polisi itu semua nda ada yang minta uang. Saya juga selalu melapor tentang kountainer gitu, hanya melapor aja itu disini di kota batu uang 25.000 aja, atau bayar10.000 atau 100.000 nda penting yang penting yang dapat memberikan pelayanan, kemarin itu tukang saya mau bikin apa itu namanya,,, pihak kepolisian itu membantu sekalin, terus pak kepala dinas pertanian itu yang dulu kurang tanggap juga menjadi membantu. Saya juga itukan baik kepada orang kementrian ya, dulu itu kapala pusat perizinan impor itu sulit kan ya, tapi asalkan saya mengikuti sistem itu saya dibantu nda pake uang yang kata orang lain untuk urusan perizinan importir itu bayar 10.000.000 atau apa, saya nda pake uang
60	T: J:	Tapi memang prosedurnya gak ada administrasi Iya nda ada
61	T: J:	Itukan berarti memang normalnya sistem seperti itu, makannya ibu hanya mengikuti Terus kalau di Batu misalnya ada administrasi perizinan biasanya itu dikasih tau dan tidak sebesar yang kita pikirkan, tetapi kadang ada hal-hal yang kurang sinkron kada ada yang inggin membatu kelompok, yang diperindak ini punya eksistensi di depan kelompok gitu. Padahal kelompoknya sebetulnya ya itu itu saya toh ya. Harusnya lebih dikembangkan lagi, membentuk kelompok masing-masing pada tingkatan RT atau Rw sudah ada semua, tapi semua pihak sepertinya punya ego untuk bantu kelompok jadi itu banyak fasilitas untuk meningkatkan produktifitas mulai dari tingkata SDM-nya ataupun tingkatan ekonominya ini harapannya pak wakil kota.
62	T: J:	Fasilitas-fasilitas yang diberikan apakah diberikan kepada petani-petani gapoktan-gapoktan yang telah maju atau gapoktan yang belum maju? Yang belum maju itu yang menjadi tanggungan ketua Gapoktan sini,
63	T: J:	Apakah yang sudah maju yang dilirik atau apakah yang belum maju mereka ingin bantu? Yang belum maju itu harus dari gapoktan, yang menyampaikan keluhannya.
64	T: J:	Jadi harus menunjukkan minatnya gitu bu, jadi masyarakat harus menunjukkan minatnya dulu ya bu baru ada bantuan Bukan ada bantuan atau ga, kalau saya pribadi ya, saya merasa dilingkungan ini harus

		didorong pekan-pekan untuk jadi satu kelompok nanti kalo sudah jadi kelompok jadi lebih enak ini wacana dari saya. Enaknya kalau sudah membentuk kelompok kalau ada rapat-rapat dapat difasilitasi tidak satu-satu orang tapi bisa lewat kelompok, kalau dulukan kelompok itu kita bikin itu siapa-siapa yang berminat tapi kan tempatnya ga ada jadi cuman bisa rapat-rapat saja akhirnya bosen jadi nda mau nerusin, rapat-rapat ga ada hasilnya, kalau sekarang ada rapat koordinasi
65	T: J:	Beserta orang dinas? Ya orang dinasnya ditelepon suruh datang. Sekarang ini sudah terbentuk kelompok tani yang dibentuk dari gapoktan kami. Tiap bulan suka ketemu, ini sudah sekian kali. Akhirnya kelompok ini eksis dan petani ini maju. Waktu ada dosen yang mengadakan penelitian dari Brawijaya, untuk menanam rumput ditebing-tebing itu bekerja sama dengan kelompok tani. Akhirnya mereka itu dapat pohon, pohon apel gitu. Kalau ketua kelompok itu harus pintar bikin ini struktur artinya kalau sudah ketata kelompok inikan bisa jalan. Kita yang dari gapoktan bisa memberikan fasilitas, kadang saya kasih buku ke kelompok, jadi mereka bisa berkembang. Buku-buku itu bida dijadikan buku tamu,notulen buku apa gitu. Saya itu sosialnya gitu,,
66	T: J:	Kalau pungutan-pungutan retribusi itu gimana bu? Nda ada nda berani, iya nda ada kalau ditempat saya ini. Hanya sumbangan kalau ada kegiatan-kegiatan.
67	T: J:	Misalnya PBB itu tidak ada instentif atau fasilitas jadi berlaku umum saja gitu ya, katanya ada kenaikan ya bu di pertanian, dan pariwisata. Harga tanah naik jadi PBB juga naik padahal ga seluruh lahan untuk pertanian Kalau itu kami nda protes. Rata-rata orang disini bukan orang yang ahli demo
68	T: J:	Tapi itu jadi kendala atau keluhan? Kalau saya liat diinternet itu ya komunitas batu atau LSM yang memang lebih protes. Tapi kami berkeyakinan tidak mau berpolitik-berpolitik seperti itu. Ini tidak memberatkan, kalau memang bisa asal jalan dengan baik ya weenak jadi ga banyak orang protes.
69	T: J:	Ini pasarnya diluar atau didalam Kalo Gapoktan kemitraan cabe itu kebanyakan suplay DAPBB, kalau yang sayur udah masuk di lokal-lokal, kalau kentang dikirim kejakarta tapi saya usahakan dikirim ke Singapur soalnya sudah keSingapur dua kali. Rata-rata petani sini mikirnya pendek, harganya ya harga pasar. Saya mesti ngajarin harga kontrak dengan komitmen yang bagus itu jadi harus betul-betul dikontrol.
70	T: J:	Harga bagus bu? Pasti terutama untuk sayur
71	T: J:	Terkait dengan impor itu bagaimana? Kalau impor itu kan sempat geger dieng pada protes ke kementrian perindak sama ke pertanian. Kenapa dibolehkan impor kentang ke Jawa Tengah. Kalau sekarang ini yang jadi kendala, Impor boleh kalau untuk dikonsumsi. Sebabnyakan harga kentang disini tinggi, untuk menetralsir harga tapi petaninya protes kemarin, beberapa bulan lalu ya. Nah itu otomatis harga kentang itu cuman 3.500 impor dari cina itu, lah kami disini jual 7.000. Jadi marah semua. Sekarang jalan pintasnya, impor ga begitu laku jadi tumbuh toh pikiran kentang ditanam untuk jadi bibit. Padahal kalau kita impor bibit nda boleh kan jadi masalah itu. Kamikan mau impor bibi dari Belanda jadi ga jadi
72	T: J:	Gak bolehnya kenapa bu? Karena tidak direkomendasi oleh karangtina, sebab dianggap dari belanda itu masih mengandung cacing emas.

73	T: J:	Berarti kalau dari pajak-pajaknya itu tidak ada kendala? Tiap tahun ada kunjungan langsung jadi nda perlu pake konsultan-konsultanan.
74	T: J:	Siapa yang kunjungan bu? AR dari KPP itu, datang ke pertemuan atau datang kesini atau kami kesana gitu bu. Tapi kalau masih ada yang tungkangan berarti belum bisa mensinergikan ya. Itukan nda hanya kesaya toh keorang lain juga toh . Kalau orang lain mengangap pajak ini ada masalah itu masalah ini, tapi mereka hanya bicara saja bukan bersal dari data yang dibikin, hanya konon katanya.
75	T: J:	Kalau pengusaha itu banyak dibantu pemerintah ga si bu? Ga ada bantuan dari pemerintah itu cari sendiri terus disisi lain kami disini ada batu wisata. Sebetulnya pemerintah itu ingin mengembangkan pasar. Pak Edi ingin semua link UKM atau petani semua terbantu dan pasarnya dengan beliau membentuk Badan Usaha Milik Daerah.
76	T: J:	Ohh sudah ingin membentuk BUMD Sudah tapi saya tidak berani banyak menyampaikan. Tapi dengan ini bibit-bibit sudah dapat masuk ke pasar koja. Dikumpulkan semua akses UKM disana, ketika bibi itu datang maka dibagikan untuk dikelola dengan dana dari BUMD itu. Tapi otomatis kalau orang bekerja itu setahun dua tahunan pasti mines toh kan invest semua, nda bisa langsung menghasilkan karena yang dibantu inikan UKM. UKM-nya yang untung tapi sarana untuk melakukan penyewaan itu dananya kan dari APBD otomatis perputarannya sebetulnya dikit tapi biayanya besar. Jadi DPRD-nya marah-marah seperti nya
77	T: J:	Sekarang masih jalan? Sepertinya jalan, tapi karena DPRD-nya mau-nya pas kamu kerja ya pokoknya harus untung ini sudah rugi jadi nda usah diteruskan. Nah harusnya bukan seperti itu toh, saya ini merasa untuk setelah sekian tahun, nda langsung setahun dua tahun kerja dengan dana sekian langsung untung ya nda inikan soalnya masih berupa investasi semua.
78	T: J:	Pasarnya itu mengakomondir semua kebutuhan masyarakat? Iya seperti oleh-olehan souvenir, bikin kaos.
79	T: J:	Itu berperan pada stabilitas harga juga ga si bu? Itu ya untuk memberikan satu dorong untuk UKM Batu mendapatkan pasar. Tapi sebetulnya bantuan dari pemerintah tidak ada. Ini untuk wisata lokal. Mungkin ada bantuan itu ya,, yang pameran itu, untu promosi. Tapi artinya kalo yang besar-besar nilainya ga. Kalau saya berpartisipasi di pameran itukan supaya kami juga berperan, tapi untuk cari uang dimaperan itu berat kok ya..
80	T: J:	Jadi pameran itu ya untuk promosi intinya, bukan untuk jualan ya bu. Iya
81	T: J:	Kalau penyuluhan pelatihan itu sering ada? Hari ini Gapoktan ada KKMB artinya konsultan apa... mitra Bank.
82	T: J:	Artinya banyak berhubungan dengan pusat juga ya tentang pelatihan-pelatihan gitu? Kemarin yang APBN ini juga ada, dari dinas juga ada. Setiap rapat porvinsi pasti ada PBL.
83	T: J:	P: Nah itu peran penyuluh itu gimana bu?aktif menyuluhkan kepada petani apa justru mengikuti geliatnya petani? Emmm sekarang masih mengikuti ya, tapi terus terang masih takut.
84	T:	Kenapa bu?

	J:	PBL-nyakan masih muda dan baru, orang petani itu kalau sudah kumpul kritis-kritis. Dulu itu PBL-nya sampe males ke sini karena orang-orang disini sulit dikasih tau. Karena petani disini bukan petani sekolahan orang dibilangin lah wong nyaut orang yang dari kecil udah tani kok. Tapi sekarang ini setelah saya kembangkan gapoktan ini supaya jalan pak PBL-nya itu berani memberikan informasi.
85	T: J:	Ini PBL-nya dari dinas pertanian kan ya bu? Kredit murah itu bu? Iya tadi itu yang bank Jatim, Bank Mandiri, Bank Agro juga kemarin sudah mau masuk kesini kami moso semua-nya mau masuk kami ikuti-kan nda gitu.
86	T: J:	Itu semua pemerberian kredit itu dari bank ya?ga ada dari dinas?atau bermitra dengan pemerintah seperti difasilitasi oleh pemerintah? Ada mungkin di tempat lain, tapi kalau di kami itu nda. Paling ada itu investor yang biasanya di utangi bibit.
87	T: J:	Ohhh berarti secara umum, kalau saya simpulkan majunya para petani itu bukan banyak peran dari pemerintah ya bu tapi dari petani sendiri yang harus aktif dulu? Iya petaninya harus aktif dulu, cari pasar dulu baru setelah itu didukung dengan pemerintah. Kalao yang disini sekarang dengan kondisi bantuan sekian ratus juta, 850 juta sekian ini dianggap pemerintah ini berperan gitu toh. Kalau dibilang nda berperan kok ya nda pantes gitu. Terus kami berkembang ini juga setelah ada rapat-rapat akhirnya dipertemukan kami dengan pengusaha gitu toh. Itu dulu dari dinas pertanian provinsi mengundang kami tidak melalui sinar batu sebab tahun 2007 ada penghargaan itu otomatis seluruh akses ke kementerian tau akhirnya banyak undang-undangan tingkat nasional yang masuk kesini . otomatis kami yang awalnya hanya diamankan sekarang merasa terdukung oleh pemerintah, terus namanyakan jadi baik. Gapokta disini ini sudah dikenal di pusat, gitu loh. Tapi kada dinas waktu ganti kepala dinas, gapoktan ini nda diakui soalnya dulu ada peraturan satu desa satu gapoktan. Nah ini sudah terlanjur berdiri mengurus SPT, SSP, langsung bekerja dengan kemitraan cabai otomatis dianggap sudah besar dan diketahui orang pusat tapi tiba-tiba gapokta ini harus dilebur, ya kita nda mau sama dinas.
88	T: J:	Pengurusan administrasinya kalau dilebur jadi ribet ya bu? Iya kan sudah ada akte pendirian, sudah ada macem-macem. Kalau kita disuruh ganti kok gampang sekali ya. Makannya disini tetap jalan, tapi berhubung nda punya tempat ya otomatis ketua itu harus jadi promotor supaya gapoktan ini jalan akhirnya fasilitas yang ada di arjuna flora ini silahkan dipake untuk keperluan gapoktan. Waktu kemitraan cabe didepan sini semua cabe pada menumpuk untuk dikirim kejakarta.
89	T: J:	Itu dapat mitra ABC itu cari sendiri ya bu? Ya karena hasil petani di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan. Tapi sekarang ini sudah tau, walaupun kerjaan disini masih tradisional tapi sudah ada produk bisa ekspor akhirnya bisa mitra. Terus otomatis kami harus selalu terima. Orang itu bisa berkembang kalau jiwanya juga besar toh, untuk menjadikan orang lain bisa belajar akhirnya kami sering diundang untuk rapat-rapat. Sapai kemarin ada rapat di Makasar tingkat nasional.
90	T: J:	Kalau sering rapat-rapat link juga jadi banyak lagi ya bu? Iya, jadi peran pemerintah juga banyak untuk gapoktan ini tidak berupa uang awalnya. Baru berupa uang ya baru pertama kali ini. Bukan berupa uang yang jadi barang ini ya baru sekarang ini. Dari dulu kami nda mau minta apa-apa gitu supaya kami sama dinas tetep dilihat baik-baik gitu.
91	T: J:	Kalau lahan semuanya modal sendiri ya bu? Lahan-lahannya itu punya petani masing-masing, ada lahan hutan ditanami dengan sistem LMPH itu.

92	T: J:	Itu sistem sewa itu ya bu, yang boleh ditanami disela-sela itu ? Iya. Tapi justru petani yang LMPH ini yang nakal, kalau pada saat dia nda berhasil, atau pada saat harga tinggi dia nda komit, mereka kirim kesini tapi saat gagal panen utang-utang ya nda nyaut. Karena dia itukan ga punya sertifikat apa-apa ya, tapi kalau misalnya sudah punya sertifikat otomatis punya lahan artinya bagus, hasilnya bisa disimpan di bank yang itu justru lebih mudah kami dukung. Memang orang yang tingkatannya jauh lebih rendah itu cape, ngasih tau juga cape, diajak apa-apa maunya dibantu terus.
93	T: J:	Jadi kalau untuk lahan pemerintah itu kasih fasilitas boleh pake lahan? Tapi itu perlakuan yang khusus untuk orang-orang LMPH aja, Lembaga Petani Hutan.
94	T: J:	Itu memang petani yang berada disekitar hutan itu ya bu? Iya, kalau yang didesa ini, lahannya sewa boleh.
95	T: J:	Kalau kredit untuk intensif pertanian ada nggak bu? misalnya mau beli pupuk atau mau beli alat? Kalau itu dari gapoktan sini yang memfasilitasi, tapi karena uang 400 juta nda kembali sekarang jadi nda berani.
96	T: J:	Ohh itu dari gapoktan lalu dari pemerintahnya ada nggak? Ya tetep melalui KUR itu, tetap ada pemerintah membantu memberikan intensif bunga ke banknya.
97	T: J:	Pemerintahnya itu dari dinas perindak? Pemerintah dari kementerian langsung.
98	T: J:	Selama ini kendala bagaimana? Kedalanya itu nyari waktu yang pas untuk bisa ketemu dengan petani itu nda bisa pasti habis magrib. Terus disuruh nulis administrasi itu sulit, padahal sudah mau saya ajari tapi malah nda mau. Terus pas saat ada kemitraan kita sudah berjanji pada industri, musimnya ini berubah tiba-tiba petani belum bisa mengendalikan musim. Itu mengakibatkan produktifitasnya rendah. Jadi bekerja itu hanya berdasarkan iklim.
99	T: J:	Itukan harusnya peran dari PPL, bagaimana kita harus menghadapi perubahan iklim? Kalau saya ngajarnya untuk lihat kebun di kediri untuk lihat cabe, ke pengalangan untuk lihat kentang. Ya nda bisa memfasilitasi semua, saya buka LCD proyektor untuk informasi dari saya tentang luar negeri di Jepang gini, di Belanda gini. Sampean ini kalo nda berperan, nda berpikir sebentar lagi itu akan hancur. Kalau pupuk sekarang harus pake pupuk organik, caranya begini. Terus didukung dengan kegiatan PNPM akhirnya kelompok itu diajari pupuk organik. Pake sampah-sampah dikebun. Kalau di tempat saya saya bikin dari pupuk kambing, ya pokoknya semuanya yang bisa mendekati organik. Terus saya suruh lihat kebun saya yang sudah greenhouse. Itu jauh lebih mudah, atau ngga saya kasih foto-foto kegiatan saya. Saya ngasih taunya itu,,, kendalanya sebetulnya banyak. Komitment tentang kerja sama itu,,, diamana kita sudah janji dengan pabrik kirim 700 ton ternyata barangnya cuman 70 ton-lah kan saya kena protes.
100	T: J:	Terus gimana bu? Jadi harus dibuktikan dilapangan, jadi kerjaan kami yang gapoktan ini harus profesional kaya orang yang kerja diperusahaan. Terus pengurus itu pada saat kemitraan harga sekian untuk petani, kelebihanannya untuk pengelolaan gapoktan. Masalahnya yang lain lagi cari waktu untuk ketemu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan, untuk pengembangan SDM.
101	T:	Kalau secara umum di batu ini perkembangan kota agro-pariwisata ini, lebih ke argo atau pariwisata?

	J:	Masih ke pariwisata, tapi agro ini sudah didukung oleh Pak Walikota. Pak Walikota ini sudah membangun pasar yang bagus terus petaninya bisa langsung mengembangkan, sehingga bisa mendatangkan wisatawan. Tapi kena demo sama orang pasar. Jadi batu ini tidak menjual hal kumuh maunya. Misalnya dibatu mau ada orang minta izin untuk bikin rusun sederhana langsung ditolak oleh sama teman-teman. Inginnya kota batu ini benar-benar mewah tapi ngasih taunya kepetani itu susah. Susah mengubah perilaku petani jadi lebih baik.
102	T: J:	T: Katanya pasar batu sekang sudah gak rame?malah rame di pasar Pujon sama Karang Ploso?itu kenapa ya bu? J: Karena orang yang mengendaikan pasar tersebut tidak bagus, jadi orang lebih baik langsung ke petani atau di Karang Ploso itu sudah ada kemasan tinggal naro jual selesai. Lah dibatu itu kumuh, terus macet. Dari petani ini nda msuk ke pasar dulu tapi langung ke Pujon sama Karang Ploso
103	T: J:	T: Apa karena lokasi-nya jauh bu?kenapa langsung dibawa ke dua pasar itu? J: Ya ini akhirnya terbentuk link baru, untuk mempermudah akses. Kalo yang di Karang Ploso itu dekat ke Kediri sama Jawa Tengah.
104	T: J:	T: Karena pasarnya banyak di Kediri, Jawa tengah,Surabaya ya bu?kalau ke batu pembelinya lebih jauh jadi lebih baik ke dua daerah itu ya? J: Tapi kalau dulu eksis sekali,
105	T: J:	T: Tapi itu perubahannya sejak apan bu? J: Sejak pedagang yang jauh-jauh itu tau langsung ke petaninya, terus dibatu nda ada pembedahan. Mafianya juga jelek itu, tiap-tiap pasar pasti punya mafia itu.
106	T: J:	T: Sama pak walinya apa ga direnovasi? J: Iya mau direnovasi tapi selalu salah. Sebab ada pemangku kepentingan lain. Ya repot itu , kalau saya lebih baik itu dikembangkan untuk lebih bagus.
107	T: J:	T: Terus kalau KUD itu perannya gimana bu?bukannya bisa untuk membantu pemasaran ya? J: KUD itu kalau di batu hanya untuk susu, kalau dipertanian nda ada. Untuk susu-susu fermentasi atau apa itu.
108	T: J:	T: Tapi seharusnya KUD itu sejak awal untuk semuanya ya? J: Disini kalau mau bikin koprasi cape, masa semuanya hanya kita yang jalan nah maunya kelompok lain yang lebih eksis juga.
109	T: J:	T: Nah koprasi pertanian gimana? J: Kami hanya ancang-ancang aja bikin, sudah dari dua tahun lalu mau bikin koprasi tapi ya susah, nanti kalau sudah jadi kita harus bikin laporan-laporan SHU-SHU kan nambahin kerjaan lagi. Kami juga sudah berpikir, kami sudah diminta, sudah ada rapat-rapat anggota gitu, dokumennya mana tapi nda diterusi nah kalau yang lainkan.
110	T: J:	T: Disini ordernya lumayan kan ya bu? J: Iya lumayan,,, itu ibu eli kalau ngatur penjualan bunga sampe nda karu-karuan.
111	T: J:	T: Kalau bunga banyaknya pasar ke mana? J: Ke Jakarta , Jogja, Solo, Semarang
112	T: J:	T: Itu bisa tahan ya bu? J: Kalau diekspor itu umbinya,
113	T: J:	T: Kalau keluar kota itu yang bunganya? J: Iya bunganya yang keluar kota. Itu kami nda jualan tanaman hias, itu bunga potong dari

		bibit yang diimpor jadi gak jual tanaman.
114	T: Lah tadi katanya gak boleh impor bu? J: Iya itu impor kentang nda boleh, kalau saya di Arjuna Flora itu selalu impor. Kalau tanaman sayur-sayur itu,,,,, kalau melihat dari kegiatan saya, dengan impor bunga, kan kalau dari luar bunganya aneh-aneh. Nah kalau orang itu yang lain nggak punya, jadi harganya bisa diatas rata-rata, dan pasar kita yang mengatur, kita bikin harga terus pasarnya jalan. Harga itu nda naik turun kaya harga sayuran. Bunga kami stabil, itu yang bisa bagus. Kalau petani bisa seperti itu, nda terpengaruh dengan situasi diluar artinya di pasar lokal yang suka mengotak-atik harga, ya itu sebetulnya sudah dihitung untung sudah diitung BEP. Jadi harusnya mengikuti alur ini, kalau mau ini saya punya MOU, kemarin MOU kentang udah, MOU cabe sudah. Kalau disetujui petani ini mau kita kumpulkan. Tadi pagi saya ditelepon dari Jakarta dia bilang cabe di vietnam gagal panen, juga di Thailand, ternyata bila desember sampai maret Cina, Thailan, Malaysia Filipina impor dari vietnam. Nah vietnamkan sekarang gagal, itu ada baiknya agar para petani kemitraan kita tanam cabe dibulan ke dua, sehingga agustus november desember mudah untuk dijual?	
115	T: Kalau cabe itu berapa bulan panennya? J: Itu empat bulan kalau di pare tiga bulan. Dataran rendah lebih panas soalnya.	
116	T: Disini banyak terpengaruh oleh perubahan cuaca gak si bu?nah itu menyiasatinya bagaimana?itu harus ada pengetahuan lebihkan ya? J: Kalau mensiasatinya yang benar itu harus pake GreenHouse. Terus pada saat kemarau pake springkel, kalau pada saat kurang matahari dikasih lampu. Supaya suhu ini tetap masa dormasi harus di suhu pluse tiga, harus dijaga. Sehingga rutinitas masa panen berlangsung terus sepanjang tahun untuk bunga.	
117	T: Ini mempelajari sendiri atau dapat dari mana? J: Saya setiap hari menulis laporan kalau hari ini hujan, hari ini terang,,, T: Jadi ibu kaya riset ya?	

Transkrip Wawancara

10. Winardi (Ketua Gapoktan Langgeng Mandiri) dan Bpk. Miskan (Sekretaris Gapoktan)

21 Desember 2011, Pkl. 12.30, di rumah Winardi, Desa Pandan Rejo, Kota Batu

1	J:	kenyataannya petani ngomong apa adanya, kadang-kadang nyambi dinas kebalikan,,dinas ngomongin... Saya sudah 3 kali ke bappeda, saya juga heran, saya pikir sering dia itu ngebidangin itu
	T:	ada gapoktan disini?
	J:	ada, saya juga pengurus
2	T:	yang gapoktan untuk apa yang sapi
	J:	sebetulnya kalo disini tidak dipisah2, ternak atau apa, awalnya memang dilihat tanaman pangan atau semuanya sekarang ya holtikultura, tapi akhirnya kemaren semua harus bisa, ya jadi secara keseluruhan jadi satu, Kalo kelompok tani di saya itu semua ada, mulai dari perternakan, perikanan biar sedikit itu ada, lalu perkebunan, perkebunan itu apa kopi, ikannya ikan lele, peternakannya kambing sama sapi, tapi sapi hanya 11 ekor, holtikultura iya, tanaman pangan iya, malah punya hutan anu kayu-kayu,
3	T:	ooo, kalo di batu itu ada berapa gapoktan si pak?
	J:	kalo gapoktan ya berarti 25, 1 desa kan 1 gapoktan, aturannya baru 2 tahun lah, kalo dulu ndak, setiap produk gini ada gapoktannya, kaya gapoktan tanaman pangan di revisi jadi PAM, iya perkebunan, perikanan anu akhirnya jadi satu gapoktan.
4	T:	oo pokonya sekarang bentuknya per desa?
	J:	iya gitu,
5	T:	berarti bapak untuk di desa yang desa palaraja ini ya
	J:	iya, kepala kelompok tani iya, gapoktan iya. Sebetulnya gapoktan saya ini belum lama, masih sekitar 2 tahun, tapi kemaren alhamdulillah juara 1,2 se kota batu pas kemaren festival itu menang,
6	T:	festival apa ya?
	J:	kelompok tani ya
7	T:	penilaiannya itu apa ya?
	J:	ya banyak ya cerdas cermat juga, memang 40 persennya itu lapang, jadi katakanlah ini jenis hama apa, penyakit apa, memang ada prakteknya. Macem-macem, kebetulan kepepet, jumlahnya itu kan, kelompok tani kan aktif hamper 500 kira-kira sekian,
8	T:	oo banyak ya
	J:	iya
9	T:	pengen tahu juga pak program-program yang sudah dilakukan pemerintah kota batu untuk pengembangan agropolitan ini ya, yang pertama bantuan apa saja yang

	<p>J: ada, subsidi apa saja yang ada programnya untuk tani? kira-kira menurut saya, untuk satu tahun terakhir memang sudah ada, kalo bantuan untuk petani, mungkin kalo petani bantuan, ada yang mendapat kontraktor pengolah tanah, ada yang perontok padi, terus alat-alatnya itu untuk membuat pupuk kandang, itu setempatnya dikasih biaya buat pengolahannya proses pembuatan komposnya kaya dikasih bangunan rumah gitu</p>
10	<p>T: pengolahan limbah? J: iya ada, tapi hanya satu menurut saya di kota batu ini yang setengah hati, kita memang dibantu tapi selepas itu ya akhirnya kita juga, contohnya apa, semua dibantu tapi pas ngomong panen itu kaya ga ada nilainya,</p>
11	<p>T: o jadi pascanya ya J: iya, sesudahnya, kaya pendidikan, penyuluhan, tapi kalo sudah panen itu, jadi kalo dihitung-hitung petani malah rugi, contohnya kaya jagung manis, 1 ton itu Cuma berapa, ya harusnya mau untung apa rugi dibantu, kalo sudah ngomongin pemasaran ya begitu, harusnya kan pariwisatanya juga ke pertanian, ya itu masalahnya. Malah saya kalo ngomong, pasca yang nampung itu ga ada,</p>
12	<p>T: oo gitu J: tapi dulu ya ayah saya petani itu jualnya ya hanya ke pasar sayur saja ya sekalipun jual ke Surabaya mereka yang datang, tapi sekarang kan kita yang jualan itu per produk, jadi saya juga malah heran kan mestinya pariwisata itu membantu karena biar pariwisata pun, ya pertanian juga, kan pariwisata untuk pertanian itu, tapi mana? Contohnya kita ngomongin petik apel, karena kita daerah apel, orang kita Cuma dapet 1 persen itu bukan wisata pertanian tapi kaya wisata hiburanlah, kalah kita itu, iya kaya pelatihan yang sudah dikasih itu tidak sebanding, ya itu kenyataan yang ada di batu begitu Tapi kalo dinas disbanding 2 tahun yang lalu memang saya akuin itu sudah bagus tapi program setengah hati, tapi kalo sudah ngomongin panen, ya wes</p>
13	<p>T: pasarnya itu pasar local ya? J: iya..lah terus ya ini kalo bicara apel, dulu itu setiap sawah juga bisa ditanami, tapi karena perubahan iklim ya banyak yang mati itu.. Itu mungkin dulu kan petani itu banyak yang pake obat gitu, ya overdosis begitu mungkin tanahnya,</p>
14	<p>T: iya masalahnya itu ya, kesuburan tanahnya J: hilang,</p>
15	<p>T: nah harus pemulihan dulu ya, nah setelah itu tanam apa dong? J: anu sekarang diubah, kita ga nanam tanaman hortikultura, apel-apelan, tapi kita ubah sayuran, sama yang paling mudah ya itu jagung manis, waktunya itu pendek jarak tanam sama masa panen, terus yang kedua biayanya ga terlalu tinggi, untuk pestisida ya pupuk ga terlalu tinggi, jadi ya hamper 60 persen ini. lah malah hamper semua sawah kayanya, jadi sampe ga laku, lah orang sampe 1000 ton itu lho.</p>
16	<p>T: nah itu ga dipasarkan ke luar? J: loh iya itu, sampe Surabaya, karena sudah terlalu banyak ya dibawa itu ke Jakarta,</p>

		tapi kan karena sudah terlalu banyak. Tapi kalo panen itu ya, harganya turun, sama panen itu lho bareng-bareng gitu jadi turun.
17	T: J:	ada kaitanya sama barang impor ga itu harganya? kalo impor itu ya kalo jagung ga, kan buah-buahan ya biasanya, paling itu juga anggur, apel, kalo sedikit kayanya jagung ga ada hubungan kesana
18	T: J:	kalo KUD Pak? ga ada disini makanya saya heran KUD itu dulu malah yang bantu, padi sama makanan sapi, ga ada itu yang nampung itu, KUD untuk nanganin sayur sama buah di batu ga ada itu. Lah kita sudah ngomong-ngomong itu, tapi ya belum juga ada. Nah yang berat itu kalo pembinaan itu waktu pertemuan malam tok, katakanlah kalo kita itu rapat kelompok, yang sering dibicarakan itu hanya bantuan, teknik budidayanya mana, ya kalo PPL itu ya nyuwon sewu tak lihat itu bener emang ada yang sarjana, insinyur ato sarjana pertanian, tapi pengalamannya itu ga ngomong budidaya yang baik, yang diomongin Cuma bantuan kaya untuk kopi lah gitu lho, kaya ngomongin hama penyakit, pengendalian itu belum pernah. Mungkin PPL yang di balarejo ya kurangnya itu, karena banyak yang ketua kelompok tani itu sarjana semua, jadi nanti malah saya yang ngomong ini nanti permasalahannya apa, karena PPL itu kuliahnya dibawah saya, ya seperti itu, itu PPL Cuma nyambut ini pak ada bantuan, kalo ga ada bantuan ya ga ngomong opo-opo, Jadi saya hanya melihatnya seperti itu, jadi katankanlah kalo inovasi, untuk program ini itu ga pernah selama 2 tahun ini
19	T: J:	tapi kalo masyarakat secara umum perekonomiannya memang agro ini ya iya, kalo khususnya di batu ya, hamper 80 persen itu petani ya, kalo di desa-desa malah 90 persen, Ya ada buruh tani juga yang kerja ama orang itu
20	T: J:	ada ga, itu kan tadi ada buruh tani, pemerintah nyewain lahannya buat mereka ga ada itu,
21	T: J:	apa karena itu ya sempit ya lahanya sangat sempit, ini ya disini itu punya lahan 1000 meter itu sudah petani, malah ada yang 500 meter, ini khususnya balarejo lho, saya ga ngomong daerah lain. Disini tu ya yang punya 1 hetare tanah di satu desa tuh bisa dihitung, itu ga lebih dari 20 orang
22	T: J:	ga lebih dari berapa? 20 orang, satu desa itu
23	T: J:	satu desa itu berapa hectare sih? kalo yang di balarejo ini sekitar 300an
24	T: J:	kalo ekspor ke luar negeri gitu? oo ga ada itu, sangat local sekali,

25	T: kalo ke luar kota? J: ya kalo luar kota ya Surabaya itu, malang, Jakarta itu hanya kemarin saja karena banyak ya. Dulu nek apel iya, dulu ya luar jawa, tapi kalo sayur itu paling jauh Surabaya,
26	T: petani langsung memasarkan atau lewat koperasi, ada koperasi ga? J: ga ada, se kota batu ga ada koperasi,
27	T: lah tadi saya liat J: koperasi simpan pinjam itu
28	T: nah mengenai pinjaman itu, ada ga kredit dari pemerintah itu, J: nah kalo kredit yang disosialikan memang ada, tapi itu dari bank mandiri, kalo dari dinas kayanya ga ada, sulit kayanya, jadi petani itu menurut saya ya paling tidak dipercayai oleh pemerintah, tau itu kenapa, padahal ka nada tanah ya, tapi pasti dibilang apa itu kerjanya petani ya pokoknya paling tidak dipercaya, mungkin kalo menurut bank petani ini usaha yang tidak ada kepastian. Kaya pajak itu juga mahal sekali, lah kalo untuk pegawai negeri gapapa tapi kalo untuk usaha semacam ini..
29	T: pajak itu pbb? J: ya itu mahal sekali, tiap tahun ada peningkatan, kaya ini pas tanam apel, kaya di bumiaji, desa kerso, jadi apel itu hidup ga mau mati ga mau, tapi tempat it uterus naik, padahal tanah tegal itu,
30	T: tiap tahun pasti naik ya J: iya pasti itu, tapi memang ya akhirnya untuk pembangunan, tapi ya kalo saya, itu petani akan susah kalo begitu, contohnya ya sekarang ini, kaya jagung, idealnya itu 1200 per kilo, lah 1900 itu untuk tenaga kerja, jelas ga balik toh 30000 nanti buat bayar tenaga kerja. Kaya temen saya itu kemaren pas panen jagung Cuma dapet uang 350.000 mba. Padahal itu untuk nyangkulnya aja ga cukup, biayanya itu kan 800 lah kalo segitu ya ga cukup
31	T: nah yang membuat petani bertahan itu jadi apa pak kalo sudah begitu J: yak arena ga ada pilihan, tapi kalo ada pilihan ya saya akan pindah, kan pekerjaan petani yang seperti itu ya kaya iseng toh, tapi karena ga ada pilihan ya mau gimana lagi, tapi ini untuk petani kecil lho ya, kalo petani besar saya ga ngomong.
32	T: terus dapet penghasilan tambahannya dari mana? J: kalo saya jadi makelar, nah yang kaya buruh tani itu nanti kalo sorenya usaha apa lagi, kaya dagang makanan gitu,
33	T: jadi makelar apa pak? J: yo tanah yao semuanya lah nek malem, kalo pagi sampe sore saya tetep tani,
34	T: pungut-pungutan lain pak? J: ga ada
35	T: oo jadi yang memberatkan Cuma pbb aja ya J: ya

36	T: J:	kalo petani ga dapet bantuan ya pak? Sekolah atau apa? ga
37	T: J:	tapi ada bos kan? lah itu mah Cuma bunyi nya to, orang buku paket bayar, ini bayar
38	T: J:	terus pak? iya kalo pbb memang memberatkan, itu kan berlaku umum, tapi saya akui memang kalo sarana dan prasarana sudah bagus, kalo pinjem itu kaya KUD malah bunganya lebih mahal itu,
39	T: J:	jadi masalahnya itu di pemasaran ya, kalo penyuluhan kan petani udah pada pinter, tapi kalo panen ini mau dikemanakan. Nah ini pak, kaya di kuningan kemaren itu bapedanya bikin stabilisasi harga, pokoknya nanti itu petani amanlah itu, tapi Cuma berjalan setahun. Tapi mungkin ada permainan politik atau apa. Padahal kan lembaga seperti itu Iya harusnya ada begitu untuk stabilisasi harga. iya enak ya, tapi ya kalo disini ya itu KUD nya itu belum pernah saya melihat pertanian dan peternakan ada, dulu pernah ngomong katanya ada pendingin buat apel tapi mana ga ada,
40	T: J:	ooo sebenarnya sosialisasi program ada, tapi mana gitu ya? itu bukan dari pemerintah kota batu, itu kaya kalo ada yang nyalon walikota, itu idenya begitu, tapi ya gada toh, itu Cuma dibicarakan saja, dari saya kecil mana ga ada
41	T: J:	disini ada mitra sama swasta? kemaren itu pernah nyoba tapi skalanya kecil, kaya jagung manis lalu, tapi hanya bermitra dengan masyarakat umumnya, tapi ya itu aturan bermitranya ga jelas kaya mereka bilang nanti saya jualkan ke pasar begitu, lah kalo gitu biar saya saja yang jual, dan tidak memberi kepastian, kaya untuk pemasaran dia ga berani jamin itu dua bulan yang lalu, ya tak itung-itung ya ga bisa itu
42	T: J:	jadi kendala utamanya itu di pemasaran ya pak? pemasaran sama modal tadi, orang pinjam ga dipercaya, dulu memang kalo pemasaran bagus, kaya dulu itu 95 ke bawah eaktu apel masih bagus ada dusun namanya bumiaji dia bisa beli sampe 300, rumahnya ya mewah, tapi ya karena era reformasi itu kacau semuanya, bantuan yang ada juga kadang tak tepat.
43	T: J:	paling kerasa itu ya emang ya petani ya pak iya bukan petani saja, pedagang juga itu. Kalo sekarang itu ya yang salah itu bantuannya Kan yang kita butuhkan itu misalkan A tapi yang dikasih apa,
44	T: J:	loh memang ga pake pengajuan gitu? anu, biasanya memang ada pengajuan, kadang emang ada bantuan yang pas tapi waktunya lagi ga pas. Contoh bantuan datengnya Itu harusnya awal musim kemarau, eh musim hujan datang baru datang, kaya kopi kemaren.
45	T: J:	lama di birokrasi kali pak iya, tapi emang ngomongnya begitu, tapi ya ga jadi cocok itu ya. Setelah batu jadi

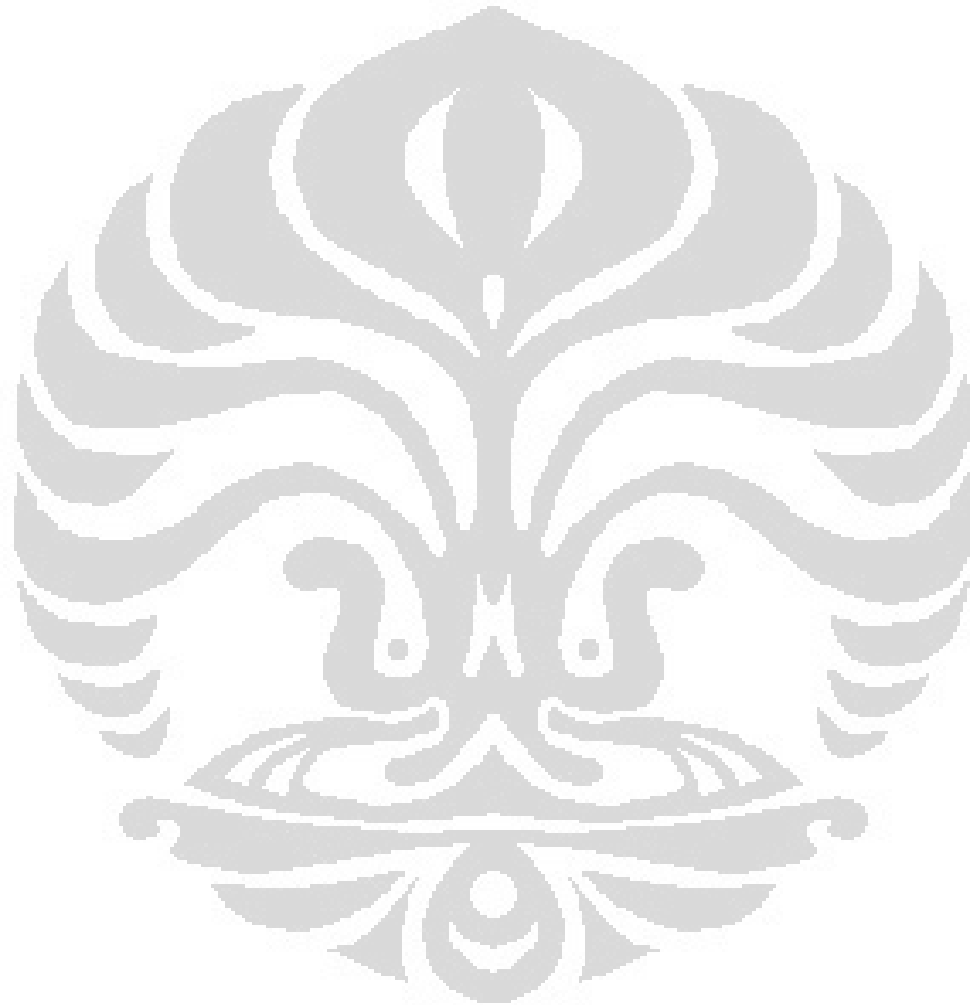
		kota ya memang lebih baik tapi tidak semua itu. Harusnya kan kalo bikin program yang tepat
46	T: J:	ooo lah pasarnya aja ga ada
47	T: J:	pasar batu pasarnya ada tapi ga ada pedagangnya, jualnya malah itu di pasar kecil gitu, pasar batu itu kalah sama pasar pujon
48	T: J:	lah kenapa begitu pak? dulu sebelum ada pasar pujon orang pujon ya ke batu, tapi sekarang kan ndak
49	T: J:	lah kenapa dulu pada ke batu pak anu, karang plosu itu kan lebih dekat dari Surabaya, jadi orang Surabaya ga mau naik ke batu. Ganti lah di karang plosu, lah itu bukan pasar lho, lapangan bola gitu tapi ya sekarang penuh, jadi barang apa-apa ya dibawa kesana,
50	T: J:	oo pantes pas kesana kok ga terlalu rame nah yang rame itu Cuma untuk yang bahan pokok yang sebelah barat sayuran itu sepi.
51	T: J:	nah pujon kenapa rame kan pujon punya petani sayur, terus harganya lebih murah sana. Iya daerah pertanian tapi kok pemasaran lemah, pasar juga lemah, 2 tahun lalu itu saya nyoba tanem treong yang ungu itu lho, tak jual ga laku. Saya bawa 1-2 kuintal, lakunya 300 rupiah sekilo, ini kan ga masuk akal
52	T: J:	disini ada usaha pengolahan hasil tanamana tani? Kaya misalkan ubi dibikin keripik ubi? ya ada tapi rumahan, tapi ya sedikit,
53	T: J:	kalo di kuningan itu banyak pa ya itu makanya
54	T: J:	mungkin kalo disini kaya apel ya apel, nangka juga, tapi bukan nangka batu, ngambil dari jawa tengah itu,
55	T: J:	oo gitu iya kripih nangka ngambilnya ya dari sana, disini ga ada pohon nangka loh. Ngambilin dari trenggalek, ya jadi aneh gitu
56	T: J:	iya ya sedikit ya pengolahannya, kecil-kecil itu, paling 1-2, belum ada yang besar gitu belum. Jadi disini itu hanya produksi sayuran atau holtikultura, ga pernah ada yang ngolah atau apa itu ga ada
57	T: J:	nah kalo penyuluhan, pelatihan gitu ada ga? pernah ada, karena disini kan unggulannya stroberi, kita pada datang gitu, katakanlah nanti buat minuman stroberi begitu, tapi ya setelah itu ga ada tindak

		lanjutnya, jangankan dicanangkan lah dilaksanakan juga ga
58	T: J:	oo ga pernah ada nanti siapa nih yang mau coba gitu? tapi ya hanya sekali itu, kelanjutannya ga da, jadi ya kaya setengah hati, dananya Cuma sampe disitu mungkin, nanti kalo ada yang perorangan maju, nanti baru diakui dan dibina,
59	T: J:	loh yang dibina? iya yang jago malah,
60	T: J:	padahal disini kan jagung itu banyak ya, bisa bikin gula jagung, tapi disini kan banyak ternak, ya memang sih dipetakan tapi, ya kalo ada yang bisa ditanam ya ganti lagi
61	T: J:	oo, emang ga pernah ada monitor atau apa ada..tapi itu kan dinas, tapi ya kenyataannya, kita tak bantu tanam kopi yo mati, malah kalo menurut saya pertanian meningkat ya dulu jamannya saya dibawah 90
62	T: J:	menurut bapak pertumbuhan ekonomi di batu gimana, kan secara nasional peringkat 4 pak? bagus tapi kan Cuma wisata, nek pertanian ya jauh, itu wisata yang ngambil kaya hotel , penginapan segala macem itu, du pak imam yang maju keagamaan, nah kalo yang sekarang itu wisata, nah pak edi memang pembangunan pesat. Tapi dulu kalo petani meniggal itu dapet santunan, kalo sekarang diapus Nah pak edi itu kan kalo sama yang kelasnya besar itu masuk, china-china itu, tapi kalo kelas kecil ya ga bisa itu,
63	T: J:	oo begitu ya pak, nag kalo agropolitan disini kan semua sektor, saya piker pariwisatanya disini melihat agropolitan juga, tapi ternyata lebih ketutup sama pariwisata ya? iya itu, lah contohnya petik buah apel ada, tapi ga begitu laku lho
64	T: J:	iya sih nah kalo agrowisata laku itu, tapi kalo yang dibuat petani mah ga laku, kaya kota wisata dibentuk dasar desa, tapi kok kayanya ga pernah itu ke desa tamunya. Bisa ada sih, tapi kalo kita punya link sendiri, bukan dari dinas,
65	T: J:	kalo bantuan dari pemerintah itu pernah ga pak sifatnya uang cash? ga pernah, selalu dalam bentuk tanaman, kaya kopi
66	T: J:	maksudnya bibit pak? iya, pokoknya itu sama sarana pertanian, eh ada itu kemaren uang mba, tapi itu dari kementerian pertanian yang masuk, tapi itu juga bukan uang toh mba, kredit itu, orang dikembalikan, bunganya juga berat,
67	T: J:	sekarang masih, dan memang dari pusat ya iya dari pusat, bergulir itu, 100 juta untuk petani satu desa, yap ling 1 juta 1 petani
68	T: J:	ada insentif lain ga pak ga ada itu, lah kalo kita itu jadi kelompok tani, ketuanya, gapoktan itu social loh

		mba, lah duit 50ribu aja gada, pokonya petani itu hubungannya social. Ooo batu itu peringkat 4 toh?
69	T: J:	iya pak ke 4 nasional, tapi sih memang benar nek wisatanya berkembang sekali dibanding pak imam dulu Tapi ya Cuma pelaku besar saja, petani kecil ya ga, walau ada pembebasan ya malah nganggur itu jadi tukang parker
70	T: J:	iya itu seperti bu eny yang bappeda kayanya juga dia bakal di copot, karena menurut beliau itu, dia mempertahankan ya itu kawasan reservasi hutan iya lah wong tanahnya itu juga dibeli murah, 1000 meter Cuma 25 juta itu, saya ngomong apa adanya lah saya juga kalo dipecat dari masyarakat ya ga popo
71	T: J:	wah murah nya, saya beli itu mah, loh terus dipake buat apa? ya itu proyek itu, lah makanya, daerah gunung ya diuruk ya diapain itu, lama-lama ya abis, tapi memang ada juga yang mahal. Ya itu, kayu-kayu banyak yang mati, tanaman ga mau, yah kepepet akhirnya di jual juga murah tenan, tapi untuk yang bumiaji itu, memang ga boleh itu dibuat rumah yang besar itu ga boleh kan di ruang tata kotanya begitu,
72	T: J:	yang untuk agro itu Cuma bumiaji ya pak iya
73	T: J:	itu karena apa pak, kultur nya? ya memang dari dulu petani, tapi ada pengrajin memang. Tapi karena mepet ya, hutan itu dijadikan lahan oleh petani,
74	T: J:	hutan mana? ya semua di batu kaya dipinggir-pinggir itu banyak yang dijadikan begitu. Baru agak tertata ya baru-baru inilah, tapi yak arena itu longsor, banjir bandang juga pernah dulu, jembatan semua ilang tahun 2001 apa 2002 itu, semua pada hanyut. Nah tapi baru setelah itu petani yang hutan ditata. Petani hutan kan banyak, nah sekarang yang ditanam itu kopi,
75	T: J:	ada ga pak, kegiatan dari pemerintah yang memberikan dampak yang cukup besar buat petani koyo e belum itu, tapi memang untuk penyuluhan atau pembinaan lebih bagus ya dari intesitasnya lebih sering itu,
76	T: J:	setahun berapa kali itu pak ooo kadang-kadang per kelompok beda mba, tergantung banyaknya. Nah sekarang itu gapoktannya aktif, dinasnya juga aktif, tapi ya itu Cuma sebatas itu, nek udah ngomongin pemasaran, pasca panen ya sendiri-sendiri. Sebetulnya ya itu petani itu ya yang harus gerak sendiri kalo mau maju, kalo mau ya harus usaha sendiri, kalo saya bilang sama teman-teman ya nasib kita ga bisa menggantungkan pada yang lain, ya kita sendiri. Ya harus inisiatif sendiri, kita bikin kelompok itu ya bukan untuk dapet bantuan. Kaya ini mereka kan saya arahkan untuk kopi, padahal kan ini bukan daerah kopi, kita juga arahkan supaya punya hutan kayu, sama ini tanam tengong laut, nah

		tengong laut ini ga umum.
77	T: J:	apa pa? sengon laut,
78	T: J:	tapi emang beneran ga ada bantuan pinjaman ya pak, soalnya katanya ada iya mungkin ada
79	T: J:	sosialisasinya kali ya pa kurang tahu, tapi kalo pun ada pasti sulit, lah saya aja dulu pernah bawa surat tanah lengkap bukan bpkb aja
80	T: J:	oo emang jaminannya apa bpkb. tapi ya emang sulit mba kalo petani tadi buat pinjamnya
81	T: J:	ooo jadi begitu? iya kalo mba Tanya petani ya mayoritas jawabannya seperti itu, yang akan jawab bagus ya Cuma petani besar, tapi kalo mba Tanya yang dibawah saya juga pasti ga akan berani jawab macem-macem, lah tadi saya mah dipecat ya gapapa
82	T: J:	jadi rumit ya pak, kita mau usaha tapi modalnya susah sebenarnya kota itu harus memfasilitasi petani, kaya tanah di lelang ya sudah biasa itu batu
83	T: J:	selama ini hubungannya hanya dinas pertanian ya pak iya yang lain ga pernah, mungkin petani yang suka ke bappeda ya Cuma saya, nek yang lainnya kan Cuma iya-iya. Lah kaya misalkan kita dapet 1 juta ya buat apa, lah wong sekarang apa-apa mahal.
84	T: J:	iya jadi ini saya itu sama ibu haula dari ui kaya sedang digalakan riset karena ui mau jadi universitas riset begitu, tapi memang dilombakan nanti kalo menang ya hibah, ada juga yang pengmas pak, nanti mungkin saya akan shre ke teman-temang kall mau pengmmas disini, ya temen saya dulu itu pengmasnya UMKM oo UMKM itu disini banyak tapi ya ga jalan
85	T: J:	ini pak katanya kan 1 desa itu ada 1 pedamping itu gimana lah ya itu yang tadi saya cerita, sebenarnya pendamping itu ada, dinas aktif juga, tapi ya hanya sebatas ngasih bantuan kalo nanti pas pemasaran ya itu tadi.
86	T: J:	ooo begitu, nah kalo di kuningan itu penyuluhnya aktif pak, tanyain petaninya semacam itu, jadi bisa bagus mereka, tapi memang penyuluhnya bukan dari dinas pak. iya kalo disini ya begitu, paling dia aktif kalo ada mau tamu, festival kaya kemaren itu, begitu, kalo satu desa ada ppl nya ya bener
87	T: J:	ya selebihnya sih saya sudah paham, ya saya selaku akademisi, ya hanya bisa share ke pemerintahnya, terima kasih pak atas masukannya, tapi memang kalo ui kan hibahnya terbatas jadi masih deket-deket pak di depok pak iya nanti kalo memang ada penelitian lagi ya kalo bisa bantu ya saya bantu

88	T: iya pak J: iya jadi inget saya kuliah dulu, lah saya itu ketua senatnya, makanya saya itu berani ngomong begitu, itu semua teman-teman saya suruh tanam sengan laut, karena sengan laut itu semua laku itu, yang atas itu bisa buat pabrik tahu.
89	T: iya begitu pak, nanti kalo main ke Jakarta bisa ke tempat saya J: iya sama nanti kalo ke batu lagi ya kesini lagi



Transkrip Wawancara

11. Enny Rachyuningsih , Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Batu.

6 Oktober 2011, Pkl. 09.00, Kantor Bappeda Kota Batu. Wawancara oleh Dr. Haula Rosdiana, M.Si

1	J:	kan kalo batu memang kompleks masalahnya ya, pasti ada kekurangan sana-sini, jadi APBD kita itu kecil sekali, kantor juga kan masih banyak yang sewa,kaya pemberdayaan tuh kan masih nyewa, kita kan punya rencana tapi belum tahun ini, jadi belum maksimal, kita sudah susun berapa blok....tapi memang ini keterbatasan APBD
2	T: J:	T: iya tapi kan sudah coba diperbaiki toh, memang dari pusat tidak ada? J: APBD kita Cuma 475 tapi memang kecil sekali, 50 persennya untuk pegawai, pegawai kita, tapi ini sedang dikelola
3	T: J:	T: iya memang seperti itu, kalo saran saya sih yang akan harusnya yang digalakkan itu pariwisata itu yang diperkuat karena itu basis yang bisa...pertanian kan itu yang maju, dan itu dasar kita tertarik untuk meneliti kebijakan fiskalnya itu seperti apa, iya itu seperti di Tulung Agung, pak bungaran tapi ya memang tergantung leadernya siapa pemimpinya.. J: iya...seperti kalo apel itu terbatas tempatnya, terus kalo kita itu, tingkat provinsi di target gitu, satu itu dana, dana nya memang sangat minim sekali, blok office kita tahun ini menelan milyar dari dana yang ada, tapi alhamdulillah kita dibantu LSM terutama dari program-program
4	T: J:	T: ehm ya karena mereka juga punya kewajiban ya, karena dipaksa... mengingat tadi tempat terbatas ya bu, kalo PU itu gimana bu perananya? J: iyaa begitu...oo kalo PU kita dapet dana-dana seperti yang untuk percepatan infrastruktur, kan banyak daerah pelosok-pelosok yang perlu dana itu, kaya itu DAK, nah DAK yang untuk pertanian itu ya banyaknya ya yang untuk itu...irigasi begitu..tapi ya itu pokonya kan kabupaten
5	T: J: T:	T: iya seharusnya itu kementerian keuangan bisa mendefinisikan, ga bisa itu hanya formalitas kenamaan saja J: menurunkan parameternya, jangan karena kota begitu, jangan bilang tingkat kota dulu, harus lihat kecamatan, kan dulu itu saya yang pas di pemberdayaan pernah menarik dana yang untuk PNPM yang dari menkokesra, saya kan sempat debat begitu...iya parameternya itu harusnya diturunkan, ga bisalah begitu, ya paling tidak tingkat desalah, pasti akan tau...ooo di desa ini dapet berapa kali. Kalo dari kecamatan ya ga semua dapat. Lalu kemudian dilakukan evaluasi agar pendapat saya itu dipertimbangkan, kan nanti masyarakat juga yang menggunakan kalo PNPM, kan tidak ada kontrak, tidak ada pengadaan, kan apa itu <i>multifier effect</i> nya terlihat.. makanya saya dulu ngotot begitu.. T: iya memang harus begitu bu, ada yang evaluasi, kan yang di atas kadang ga tau apa yang di lapangan
6	T: J:	T: kebetulan teman saya yang dari pertanian juga sedang mengevaluasi masalah agropolitan, karena sempat stagnan, karena awal neliti juga waktu itu sempet waktu itu , wahh di average state emang harus di emit, iya pak itu bahkan harus di 105 itu ya, sementara anggaran itu disediakan dari Negara itu sampe 286M, compare dengan Bima itu yah bu ya, karena Bima itu jauh sekali , Bima tuh luar biasa menambah, jadi maksudnya tuh ko kita ga diinfokan, karena kita kan konsepnya besar nih, karena kita disamping ketahanan pangan, bagaimana sekarang dengan adanya perubahan iklim juga bahkan tidak menduganya, padahal kalo kita berbicara bagaimana tadi diininya ada pokja kan gitu yah, program gitu kan, konsep ini kan kami meyakini J: kadang2 kita dilematis ya, karena alih fungsi itu tidak bisa dihindari , seperti itu, apalagi

		kalo nanti kita lihat batu ini wilayah sebagian besarnya hamper hutan, luasnya itu sekitar dua belas ribu Sembilan ratus delapan puluh sekian hektar, tapi separonya itu wilayah hutan, nah kalo sudah begitu kan tidak bisa ngapa2in, kemaren reformasi itu pinggir2 hutan sudah digunakan untuk pertanian, nah diatas itu, nah mungkin kalo sudah seperti itu nanti kita pelan2 memperbaiki lagi, tapi kalo sudah regulasinya perdanya itu sudah geser alih fungsinya itu tidak kepaake yang kita,
7	<p>T: kami sebenarnya lebih ingin melihat bagaimana merevitalisasi kebijakan fiscal baik itu dari sisi anggaran maupun sisi invest pajak sehingga pembangunan agropolitan ini bisa terakselerasi, kita lebih seperti itu, karena situasi yang tadi sudah saya katakan adanya semacam dana bersama ya ada yang melalui dari KUR, ada juga yang lewat ini kementerian pertanian, ada juga yang dari dana APBD, tentu saja kan yang didaerah yang lebih tau persoalannya bagaimana yang tadi terkait sengan soal anggaran, bagaimana yang terkait dengan barangkali dengan masalah2 perpajakan juga, jadi perlu ada perpajakan treatment, yang terkait dengan agro, mungkin lebih lebih ini ingin tau lebih banyak seperti ini</p> <p>J: sebenarnya kalo ditingkat regulasi peraturan daerah dikita itu kan kebetulan batu ini kan baru berdiri dari tahun 2001 kemaren, waktu di 2001 kepemimpinan walikota yang pertama sampai dengan, ehh 2002 waktu itu transisi, 2002 sampai dengan 2007 memang sudah ditetapkan di di MPR kita masih kerja, kita tetapkan faktor2 kawasan agropolitan, itu juga kita tindaklanjuti , Cuma kalo memang kita kelembagaannya memang yang kurang kita urus gitu loh, sehingga inipun kita masih dalam proses tapi kalo ade2 masih ingin membutuhkan kendaraan insya allah diinstansi terkain kita masih menyediakan , karena masterplan untuk wilayah agropolitan cukup kita buat di wilayah nanti , untuk menindaklanjuti masterplan itu seperti apa perlu tahapan.</p>	
8	<p>T: kalo ini bu, ketika mengajukan sebagai katakanlah agropolitan ini inisiatifnya tentunya dari batu sendiri ya bu</p> <p>J: iya , karena memang kita sadar kekuatan kota batu itu sudah di dua tempat bahkan ditahun ini kita sedang merencanakan rencana pembangunan jangka panjang dengan beberapa fasilitas yang menunjang, kita sadar bahwa batu ini layak paling tidak 20 tahun kedepan untuk menjadi wilayah pariwisata dan pertanian yang tidak merusak lingkungan, semua seperti itu mulai dari semua cendikiawan malang raya, sampai dengan ditingkat yang paling rendah itu kita undang, semua masih sepakat jadi memang iya kita pertahankan, pariwisataapun tidak ada artinya jika tidak misalnya kita tidak peduli dengan lingkungan karena kita tahu persis orang wisatawan datang ke batu tuh yang dicari satu view nya bagus, airnya bersih , udaranya juga bersih</p>	
9	<p>T: batu itu memang puncak jaman dulu,</p> <p>J: lah kalo semua ini sudah hilang itu akan ditinggalkan kok, wisatawan ga ada artinya apa2, jadi kami sadar betul konsep dan barometer kota sekarang itu bukan dari pariwisatanya, jadi pariwisatanya merupakan dampak dari lingkungan itu, jadi basis kekayaan kita yang utama ini yang harus kita pertahankan, kalo semuanya itu kita sudah paham, pemanasan global warming itu kita tidak talar benar, air kita sudah kotor, itu ya, bahkan ketinggian bangunan itu tetap kita jaga, tidak boleh seperti Jakarta, bisa ambrol itu, ada jangka2 tertentu, kita sadar betul itu, komitmen kita itu dari alun2 sampai batu keatas itu, alun2 kita ga akan isikan kawasan2 pertanian, kecuali yang alami perumahan penduduk tuh baru ya kita , walaupun memang dari keselamatannya walalupun tidak seluruhnya</p>	
10	<p>T: itu ketika merumuskan mungkin ada bunga, mungkin ada apel kali ya</p> <p>J: iya meskipun apel itu salah tinggal home gitu yah, gimanapun juga ya itu tadi mungkin sudah selama ini pake di pestisida, kimia juga, tanah ini sudah ga bersahabat, perlu ya itu, selama in andalan dari masyarakat produksi apel mengalami ini mungkin tidak siap katakanlah masa pacekliknya itu kita tidak siap, ada pertanian kebetulan juga anggota poktan, kita akan hadirkan nanti tentang apel, bunga, sayur, cluster2, juga rencana, kita rencanakan air tawar, kalo ada satu dusun pernah itu produksinya 4,5 ton, sapinya itu</p>	

		lebih banyak jumlahnya dari jumlah manusianya, itu semua, ya itu semua kalo hilang, kekuatan kita itu aja, pariwisata ga ada artinya , kalo batu itu gersang panas, sama aja kaya DKI , disini juga kan ga perlu pake AC, makanya kan pernah ibu menteri pernah nginep disini, wah ini nih asli , selimutnya dibuang kemana, dingin banget,
11	T: J:	kalo dari pusat tuh bentuk bantuannya apa ya bu ya dari pusat tuh apa ya, karena dianggapnya tidak maksimal , disektor pertanian juga kita ga dianggap karena dianggapnya kita itu kota, padahal kita ini desa, dari 24 desa kelurahan, 5 itu baru kelurahannya selebihnya itu desa dengan kultur kalo memang orang disini itu bisa jalan2, itu kulturenya orang disini, dan kalo di kota kaya malang itu ya ditopang oleh jasa, disini ditopang oleh pertanian, walaupun kondisi pertanian ya nomor dual ah setelah perdagangan dan perhotelan yah, misalnya hotel 45% sedangkan pertanian 15%, tapi pekerjaan kerja2 itu lebih banyak di sektor2 pertanian,
12	T: J:	ya jadi karena pertanian, iya itu berkali2 kita dipertanian loh ndak bisa dapet itu karena kota
13	T: J:	berarti seharusnya kementerian keuangan ber ini juga ya berkoordinasi , jangan hanya melihat formalitas juga, waktu di Indramayu waktu di kabupaten juga dia ga dapet bu, kalo bantuan dari ahli itu, kalo di bangle kan yang saya tau dia dapet bantuan dari Taiwan, kalo disini ada ga bu?
14	T: J:	kita baru pernah dapat tapi waktu itu dibidang kentaki, tahun 2011 ini dari aussie, karena kita ternasuk kota2 yang pemrakarsanya waktu itu terus kalo misalnya kalo di Bangli itu polanya agak sedikit unik, ternyata dia juga dapat dukungan dana itu dari kota lain gitu, karena istilahnya bangle gaboleh bangun hotel, ga boleh disana, kalo dia bangun nanti dampak pasarnya jadi bisa ini, tapi akhirnya bisa memfasilitasi diri dari pajak diberikan kepada bangle, kompensasi dari dia ga boleh bangun itu , kalo disini gimana itu bu?
15	T: J:	kalo disini ga begitu, Cuma gini kita itu seperti yang ibu sudah bilang tadi kita itu hulunya, yang mengairi sekitar 14 kabupaten di jawa timur itu batu, kita juga ada 11 mata air, kebetulan kabupaten malang dan kota malang itu sangat tergantung pada ini, ya itu tadi , jadi mereka itu mengambil air dari batu dan memberikan fasilitas, jadi kompensasi
16	T: J:	iya jadi karena penggunaan air, itu aja. Tapi yang tau persis ya PDAM ga ada pemblokiran mata air
17	T: J:	ngga sampe begitu, Cuma ya itu kalo sampe mata air dikota batu rusak dia ga dapet pasokan air itu, terus kan yang mengenai development itu kan bbukan sekedar issu kota atau kabupaten itu ya, jadi seluruh masyarakat,
18	T: J:	iya karena itu kemaren kita mengadakan MOU dengan bernagai bidang, salah satunya dengan walikota malang karena kita sadar betul ga akan bisa, apalagi kota batu mendeklarrasikan sebagai kota pariwisata , tau sendiri pariwisata juga tidak mengenal administrative tercantum dengan data lain , bangli, apakah ada? Nah ini kan tatanan ya pariwisatanya, jadi kita coba juga mengurusinya itu, sementara tiga tiga nya ini punya keunggulan sendiri, terkait dengan perhubungan tuh kota batu, terkait dengan perkotaan, fasilitas perkotaan mau dekat atau pemandangan, kalo mau pemandangan laut itu ada , Cuma memang tiga daerah ini sudah disediakan. Cuma kalo tidak salah untuk tingkat nasional kita masih dimalang raya ini, tapi sisanya dikota malang tapi kalo itu bu, yang terkait masalah pajak ada ngga instansi yang invest masalah pertanian, mungkin dari, biasanya kalo alat pertanian itu dibantu dari alat instannya,
19	T:	kebetulan dinas pertanian tidak membantu, biar nanti dijelaskan secara tehnik

	J:	kalo disini ada miss antara pembayaran pajak dengan masa transisi perdanya, karena sekarang emmang sedag transisi perdanya, ada penetapan dari omset nah ini kan ada masa transisi,
20	T: J:	undang2nya yang baru udah dikeluarkan dan disahkan bu udah udah , tapi kan kembali lagi butuh waktu yang , ketika masalah waktu inilah wajib pajak masih menggunakan peraturan yang lama, ditopang dengan peraturan yang baru,
21	T: J:	iya menmang begitu, mellui beberapa temuan tadi memang tidak berkait dengan masalah pajak tadi, tapi ya itu bukannya tidak mau tapi karena terbentur peraturan, klo bentuk clusternya itu bu ada apa aja ada cluster buah, bunga,
22	T: J:	saya masih penasaran sama sapi itu bu kalo disini agak lama bisa saya antar ketempat2 sapi, arena kebetulan letaknya rada jauh karena dikelola sangat tradisional, kita belum punya kandang kumulatif, bareng2, kemaren ada tawaran SDM nya dari BII, mencoba untuk membangun tapi
23	T: J:	tadi 45 ton itu, susunya 4,5 ton
24	T: J:	oohh 4,5 itu susunya, dagingnya atau apanya bu susunya, itu satu dusun
25	T: J:	satu dusun, ada berapa dusun yang disini kebetulan kemaren kita punya lokasi terosip, setiap taun kita tetapkan kita deklarasi nah kebetulan, tahun 2009 andalannya itu di pertanian,
26	T: J:	itu dipasarkannya kemana aja bu kita punya KUD, koperasi, dikumpulkan disitu mereka yang menyalurkan kepada public,

TRANSKRIP FGD
Bappeda, Dinas-Dinas terkait, dan Kelompok Tani di Kota Batu
Kamis, 6 Oktober 2011

Peserta Wawancara Mendalam	Pewawancara
1. Enny Rachyuningsih (Kepala Bappeda Kota Batu)	1. Dr. Haula Rosdiana, M.Si
2. Pancaningtyas (KLH)	2. Dra. Inayati, M.Si
3. Nindya D.S. (KKP/ Ketahanan Pangan)	3. Murwendah, S.IA
4. Tunggul (Deperindag)	4. Damayanti
5. Endang Dwi N. (Perekonomian)	
6. Eko S. (Kabag Pembangunan)	
7. Risa Agus Prasetyo (SMP Negeri 6/ Petani Mawar)	
8. Suwoko S.P. (Distanhut)	
9. Sariono (Bappeda)	
10. Arief S. (Kec. Bumiaji)	
11. Lukik W. (Cipta Karya)	
12. Winardi (Gapoktan)	
13. Saji (Gapoktan/ Giripurno)	
14. Himawan S. (Cipta Karya)	
15. Dian Tri H. (Disparbud)	
16. A. Bhaskara (Bappeda)	
17. Retno Dwi A. (Bappeda)	
18. Fitta R. (Bappeda)	
19. Restu (Bappeda)	
20. Henry B (Bappeda)	
21. Retno Shinta D. (Bappeda)	
22. Irianto Marzuki (Bappeda)	
23. Belli Y.	
24. W. Rafli (Bappeda)	
25. Vathoni C. E. (Bappeda)	
26. Sri Damayanti (BPPS Kementerian Pertanian)	
27. Patah Hariyanto (Bappeda)	

Enny Rachyuningsih (Kepala Bappeda Kota Batu) : Assalamu'alaikum Wr. Wb., yang saya hormati tim peneliti dari Universitas Indonesia, saya ucapkan selamat datang di Kota Batu. Lalu bapak/ ibu dari SKPD terkait, dari dinas pertanian, kantor ketahanan pangan, dari perekonomian, dari KLH, deperindag, bina marga, dari pembangunan. Terima kasih Pak Eko selaku kepala pembangunan.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT pada pagi hari ini, kita bisa bertemu dalam suasana sehat wal'afiat, bahagia dan penuh dengan semangat. Mungkin perlu kami informasikan kepada bapak/ ibu... oh dari gapoktan, hadir ya pak. Bahwa Bappeda Kota Batu kedatangan tamu yaitu tim dari Universitas Indonesia yang akan melakukan penelitian atau survey yang terkait dengan agropolitan. Kebetulan Batu ini merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang dikunjungi, tepatnya ada 3 yaitu kuningan, bangli di Bali dan ketiga di Kota Batu. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, ini adalah Ibu Dr. Haula, beliau adalah selaku ketua tim dan di sebelah kanan ini adalah Ibu Sri Damayanti dari Kementerian Pertanian.

Sebelumnya saya juga sudah curhat ke Ibu Dama, kenapa DAK pertanian tidak dapat karena dengan alasan Batu ini adalah kota. Kebetulan ada perwakilan dari Kementerian Pertanian ini lalu saya cerita bahwa walaupun Batu adalah kota, 24 desa, kita itu hanya 5 kelurahan, sisanya adalah desa. Oleh karena itu Batu sangat membutuhkan dana seperti DAK terkait sektor pertanian. Mungkin dari tim dari UI akan sedikit saya paparkan sedikit informasi dari Kota Batu terkait agropolitan. Jika nanti membutuhkan informasi penting atau detail terkait teknis, monggo ditanyakan langsung kepada SKPD atau kepada Gapoktannya. Untuk observasi fisik ke lapangan, nanti akan kami temani. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai.

Kota Batu itu terdiri dari 3 kecamatan dan kebetulan kami adalah kota baru. Umur kami baru 10 tahun. Tanggal 17 Oktober 2001, Kota Batu lahir dan dulu hasil pemekaran dari wilayah kabupaten Malang dengan luas wilayah mencapai sekitar 19.984 dan sebagian besar wilayah kita adalah hutan. Visi kita adalah pada tahun 2012 ingin menjadikan Kota Batu sebagai sentra pariwisata dengan berbasis pertanian. Seperti yang saya utarakan sebelumnya juga, kita telah membuat Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk 20 tahun kedepan dan kami masih menganggap bahwa 20 tahun kedepan

bahwa Batu masih ditopang dengan kedua sektor ini, yaitu sektor pariwisata dan sektor pertanian.

Jumlah penduduk pada tahun 2010 berdasarkan hasil sensus nasional, terakhir sekitar 108.299 jiwa. Kebetulan tingkat pertumbuhan penduduknya cukup kecil. Untuk pariwisata, kita memiliki beberapa cluster-cluster, kita memang paling banyak memiliki objek wisata alam, ada agro kusuma, wisata air terjun, macam-macam. Ada juga objek wisata buatan. Kekuatan Batu sebagai kota pariwisata adalah dengan udaranya yang bersih dan air yang bersih juga. Dan ini sangat tergantung oleh lingkungan. Orang surabaya tidak akan mendapatkan air jika tidak dari Batu. Oleh karena itu hal tersebut menjadi tanggung jawab kita semua baik pemerintah maupun masyarakat untuk menjaga konservasi alam di Batu sehingga kondisi ini dapat terus terjaga dan RTRW kita dapat terwujud. Ini untuk akomodasi hotel sebagai pariwisata cukup memadai, untuk jumlah kamar, jumlah tempat tidur cukup memadai, ada juga hotel bintang lima, tiga, empat dll cukup banyak.

Ini kunjungan wisata dari tahun ke tahun berdasarkan data dari BPS. Meningkat, mulai tahun 2005-2010 mencapai 10 juta lebih. Nah ini sektor pertanian, ada kawasan-kawasan, untuk sentra sayur mayur ada di Desa Sumber Brantas dan sekitarnya. Ini arahnya ke bawah semua, Kecamatan Bumiaji, jadi dari Bappeda tinggal ke atas. Untuk kawasan sentra kawasan apel juga di Kecamatan Bumiaji. Terus, bunga juga di lokasi dekat Bappeda ini di Desa Sidomulyo, Desa Gunung Sari, Punten dan sekitarnya. Hanya di kawasan bawah itu khusus untuk tanaman pangan, yaitu ada di Desa Sundulrejo. Bahkan kita sudah ditetapkan dan diproses, oleh Gubernur tentang lahan pangan pertanian berkelanjutan. Itu kemarin di DPRD baru ditetapkan untuk lokasinya adalah Pendem dan Sundulrejo, tapi yang lainnya belum, tapi nanti akan didiskusikan lagi.

Lalu hasil-hasil pengembangan, ada beberapa komoditi unggulan pertanian termasuk hortikultura, tanaman hias, buah, apel sebagai ikon kita, jeruk, alpukat, strawberi, kesemek. Lalu sayur mayur, wortel, kubis, bahkan hampir ada semua. Tanaman hias, juga peternakan mulai dari sapi potong sampai sapi perah. Tadi saya juga ceritakan ke tim bahwa kita punya penghasil susu sapi itu mencapai 4,5 ton, bahkan jumlah penduduknya lebih sedikit dibanding jumlah sapi. Ini kira-kira peluang pasar komoditi pertanian di Kota Batu, kita minimal suplai semuanya dari Batu. Bahkan kalau tidak salah untuk komoditas mawar, di Gunung Sahari kalau tidak salah kita

khusus mawar itu suplainya dari Gunung Sahari.

Lalu ini terkait RTRW kita, kita tetap tidak jauh dari konsep agropolitan, untuk wilayah kawasan Bumiaji, kasarnya wilayah atas dari alun-alun itu sangat kita hindari untuk pembangunan guna konservasi alam Kota Batu. Lalu ini peruntukan RTRW, dengan luas 19.000 sekian, atau katakanlah 20.000 ha, untuk diambil wilayah hutan sudah mencapai 11.000 sekian, belum lagi ditambah dengan ruang terbuka hijau, sehingga untuk kawasan budidaya sangat kecil sekali. Sebenarnya kalau jujur bahwa Batu ini sebenarnya tidak boleh terlalu membebani wilayahnya, belum lagi kalau kita bicara tentang kemiringan, kemiringan di atas 20-40 sudah tidak mungkin dilakukan pembangunan gedung. Walaupun kita termasuk kawasan pariwisata, kawasan yang terbangun untuk wilayah wisata hanya 260 ha.

Kawasan agropolitan yang ada di Bumiaji mencapai 12.798,42 ha, hampir 64% dari luas wilayah Kota Batu, yang terdiri dari 9 desa. Untuk rencana cluster-clusternya seperti ini, untuk cluster pertanian tanaman buah

Sri Damayanti : Assalamu'alaikum wr wb. Perkenalkan sebelumnya nama saya Sri Damayanti, saya ini perencana madya di Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Deptan. Maksud kedatangan saya kali ini dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan agropolitan di Kota Batu. Selain kegiatan monev, kebetulan kami juga mengantar Ibu Haula untuk melaksanakan penelitian di Kota Batu terkait agropolitan. Di Departemen Pertanian sendiri, program pengembangan pertanian dengan bentuk kawasan agropolitan ini stagnan, jadi seolah-olah tidak berkembang karena mungkin kebijakan pimpinan. Jadi ganti pimpinan, lain kebijakannya. Karena agopolitan sangat penting dan ini akan kita lihat lagi.

Kementerian Pertanian memiliki beberapa program yang namanya pengembangan cluster, padahal cluster itu kan kalo dilihat dari konsep tata ruang, agropolitan kan itu merupakan payung cluster tapi kita orang bagian perencanaan sendiri melihat bahwa agropolitan sendiri merupakan bagian dari cluster dan nanti akan ditetapkan apa sebaiknya agropolitan sebagai payungnya atau bagian dari cluster. Oleh karena itu di sini dan melalui monev ini kita akan mendengarkan masukan dari Bapak/ Ibu dan kebetulan yang hadir juga dari dinas atau instansi terkait dengan agropolitan, yang bisa mewakili petani.

Haula Rosdiana : Assalamu'alaikum wr wb. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Haula Rosdiana, peneliti dan dosen dari Universitas Indonesia. Judul penelitian saya terkait dengan agropolitan adalah "Akselerasi Pembangunan Agropolitan Melalui Revitalisasi Kebijakan Fiskal." Jadi kenapa ini yang diambil temanya? Mungkin tadi sudah dikatakan Bu Dama, sesuatu yang dianggap unggul justru tampaknya setelah itu tidur. Lalu di RJPMN, tahun 2010-2014 mulai dimunculkan lagi agropolitan. Bahkan harus mencapai jumlah 205. Nah itu kan paling tidak harus ada minimal 205 bahkan lebih, karena kita baru punya 140an lah, 130-an.

Terkait dengan hal tersebut, dari yang kami tahu bahwa agropolitan adalah project bersama dalam arti ini misi yang bukan hanya diemban oleh kementerian pertanian atau oleh pemda saja tetapi juga ada Pekerjaan Umum (PU), justru yang menjadi leadernya adalah PU karena pengajuan untuk infrastruktur itu ke PU dan dana terbesar itu ada di PU. Tentu saja agropolitan tidak akan berhasil tanpa adanya institusi lain yang mendukung, misalnya untuk pemasaran produksi kalau sudah berproduksi, makanya dibutuhkan instansi terkait perindustrian. Untuk tahap pertama ini mungkin saya ingin memperoleh masukan dari bapak/ ibu sekalian bagaimana peran institusi yang bapak/ibu pimpin terhadap pengembangan agropolitan. Sementara itu saja, nanti saya akan naikkan isunya menjadi kebijakan fiskal terkait anggaran dan insentif perpajakan. Mungkin yang pertama bisa dimulai dari bapak Kabag Pembangunan.

Eko S. (Kabag Pembangunan) : Assalamu'alaikum Wr Wb. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Eni bahwa Kota Batu merupakan kota agropolitan. Mungkin awalnya bisa kita lihat dari sejarah Kota Batu sendiri, apakah Kota Batu merupakan kota agropolitan atau megapolitan. Karena yang namanya kota pasti punya visi. Kita punya cita-cita, punya harapan agar kota kita dalam jangka waktu 10, 20 tahun bisa maju dengan segala potensinya. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa dari zaman dahulu, pertanian ini menjadi sektor andalan di samping kita itu julukannya Switzerland kecil. Jadi kita itu adalah gambaran swiss kecil, sebutan dari bangsa Belanda. Itulah kenapa kita mengambil ikon agropolitan karena kita tidak bisa memungkiri bahwa kita itu adalah dari jumlah kawasan yang ada, 24 persen adalah lahan hunian dan sisanya pertanian. Yang digunakan untuk rumah dan fasilitas lainnya hanya 24 persen dan sisanya adalah lahan pertanian. Tetapi ada beberapa hal yang disampaikan bu eni tadi adalah conditional real, tidak bisa pungkiri bahwa banyak sekali

usaha-usaha di sektor pertanian baik sayur, buah, maupun bunga. Ibu saat ini posisinya di Desa Sidomulyo, 1200 m ke arah utara itu adalah sentra bunga di kota wisata batu yang merupakan barometer Jawa Timur.

Cuma yang menjadi persoalan ada suatu kebijakan-kebijakan yang ada justru menghambat potensi yang ada dan mungkin bisa diselesaikan oleh ibu-ibu sekalian. Untuk potensi pasti ada, kita andalan Jawa Timur. Zamannya Pak Harmoko kalau ibu dengar di radio itu pasti menyebutkan harga bawang tergantung kota batu. Sekarang semuanya sudah bergeser karena Pak Harmoko sudah tidak ada lagi sehingga radio memberitakan harga pokok kentang bawang sudah tidak ada lagi. Jadi dulu kenapa disebut tingkat nasional. Bahkan dulu sebagai kecamatan disebutkan bahwa untuk ukuran harga sayur mayur, mereka mengatakan bahwa kota batu sebagai pijakan harga sehingga dapat dikatakan bahwa potensinya luar biasa. Cuma yang menjadi masalah, saya akan mencoba menyampaikan beberapa persoalan terkait sektor pertanian. Setelah era reformasi banyak perubahan mendasar terkait kondisional pertanian, khususnya jajaran PERHUTANI di pulau Jawa. Karena PERHUTANI itu kan adanya di pulau Jawa, di luar Jawa ga ada. Yang menjadi persoalan dan perlu disikapi bahwa lahan pertanian kita ada dua, ada yang di dalam kawasan, ada yang di luar kawasan. Yang saya maksud kawasan ini adalah kawasan hutan. Okelah dengan adanya program-program dari PERHUTANI itu luar biasa, karena unsur hara di dalam kawasan itu luar biasa. Ga usah dipupuk jadilah tanaman di sana. Sehingga potensi-potensi di dalam kawasan ini perlu penataan secara khusus agar orientasi kita terhadap produksi dalam kawasan bisa berjalan, sehingga ekosistem yang ada Kota Batu bisa dijaga. Oleh karena itu perhatian kita, kami mohon untuk konsep pemikiran ibu selaku peneliti, peneliti itu memiliki kemampuan lebih untuk menentukan, beda dengan konsultan. Kalau konsultan itu komponen orang kesulitan. Artinya apa ini menjadi masalah bahwa di dalam kawasan ini banyak potensi yang luar biasa, tetapi hutan ini harus dijaga. Data tahun 2006-2007, untuk kawasan di atas itu hampir 14.000 ha. Itu sudah revisi, banyak yang gundul di era reformasi. Tapi sekarang sudah mulai hijau kembali karena gerakan kita untuk menyelamatkan hutan luar biasa. Oleh karena itu untuk mengalihkan, karena dikatakan tadi oleh bagian SDM, mengalihkan terbinasa oleh yang mengalahkan. Petani yang di kawasan ini perlu suatu mindset, paradigma yang luar biasa.

Kawasan Sumber Brantas itu tahun 1941 itu ga ada itu tanah yayasan, semua itu tanah negara bebas. Oleh karena itu di sana sudah banyak tanah yayasan. Bagaimana tanaman-tanaman di sana bisa beralih fungsi yang awalnya hanya tanaman bulanan menjadi tanaman tahunan. Karena terus terang saja, di atas itu sangat berpengaruh kepada kondisi di bawah. Kalau sekarang saja sedimennya tinggi, kalau nanam kentang, kubis, sayur mayur pokoknya, kalau hujan sedikit otomatis sedimen ke Sungai Brantas itu luar biasa. Bagaimana kita mengubah pola dari yang tanaman yang tadi menjadi tanaman punya nilai manfaat lebih tetapi tidak mempengaruhi ekosistem yang ada. Ini perhatian secara khusus. Kalau itu bisa dilakukan, karena masyarakat di sekitar hutan ini kalau dia bisa mengelola lahan yang minimal dengan hasil yang maksimal, pasti sedikit banyak dia keluar dari kawasan untuk menggarapa yang di luar kawasan. Sehingga target daripada tegakan hutan ini bisa bisa hijau bu, karena kalau ga begini..orang hidup dan nanam di hutan. Nah nanti yang repot adalah dinas pertanian, kalau mengcover jumlah pupuk. Pupuk ga mungkin dihitung kalau sudah masuk kawasan, lah kalau pupuk sudah masuk kawasan, lah pupuk nanti itu akan jadi masalah bu di lahan pertanian. Oleh karena itu harapan kita, agar suatu kajian-kajian/ cluster-cluster yang bisa menjadi nilai lebih bagi khalayak di kota wisata Batu bisa menjadikan titik-titik mana yang bisa dikembangkan. Yang dikatakan Bu Eni tadi, contohnya kesemek. Kesemek itu hanya bisa hidup di daerah yang saya sebutkan tadi, di Klepung karena ketinggian dan sebagainya yang luar biasa dan tanaman itu mempunyai nilai jual tinggi. Dan gizinya luar biasa, memang iya. Namun di sini yang menjadi persoalan, sekarang ini jika mau mengembangkan biji kesemek menjadi kesemek itu ga gampang. Di sini ada Lolib yang di Klepung itu adalah peneliti-peneliti yang pakarnya nasional, itu masalah jeruk. Tetapi mereka belum mampu memberikan kontribusi kepada kotanya bagaimana jeruk bisa berkembang dengan baik. Artinya apa, kita berharap agar sinkronisasi suatu program dari pusat justru itu sudah lama dipikirkan. Balai distro?? Itu sudah lama di sini, tapi menelitinya aja tinggi, naik pangkat, ya sudah begitu saja. Tetapi bagaimana belum bisa diterapkan di kita. Di sini dulu ada namanya jeruk punten bu, mulai dari zaman Belanda, jeruk punten itu luar biasa. Sekarang jadi jeruk batu 55 yang kalau kontes menang terus. Tapi yang menang ya itu Lolib kita di sini ga ada itu jeruk batu 55 ga ada itu. Oleh karena itu menurut harapan saya, peneliti itu jangan hanya mencari target dalam kontes keilmuan, tetapi bagaimana supaya bisa disampaikan ke masyarakat bisa memberikan nilai tambah. Oleh karena itu harapan kita agar peneliti UI bisa ke Lolib

Itu luar biasa bu, tapi di Klepung cari jeruk saja sulit. Dia meneliti di Klepung tetapi mengembangkan jeruk di Klepung aja ga ada.

Berikutnya masalah apel, apel adalah ikon masyarakat Kota Batu. Kalau ibu liat logo kota kita pasti kita tampilkan apel untuk Kota Batu. Karena apel untuk di daerah tropis itu terbesar di dunia adalah di Kota Batu. Luasannya luar biasa. Tetapi dengan berbagai pengobatan yang pupuknya yang kimianya luar biasa, ini berpengaruh terhadap produksi. Ya sekarang kita bayangkan orang usia 50-70 tahun itu beranak kan ga mungkin. Ini sudah butuh waktunya perbaikan secara utuh. Kalau petaninya, SDM nya, saya pikir itu luar biasa. Cuma sekarang bagaimana revitalisasi konsep menanam apel yang baik dan benar, ini perlu untuk peningkatan SDM. Petaninya itu banyak bu, tapi yang jadi persoalan yang membuat saya sedih, apel itu kita kecil bu. Dulu pas zaman kakek saya petani apel, apel satu saja cukup, tapi sekarang semakin berkurang bu. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama, di satu sisi petani kita sudah mulai meningkatkan dengan petani kita sudah tidak lagi memakai pupuk-pupuk yang kimia. Sudah kembali lagi ke pupuk alami dan sebagainya. Tetapi di satu sisi perlu support secara khusus dari pakar peneliti tadi. Supaya arah dan tujuan dari pengembangan pertanian itu dapat berjalan dengan baik. Jadi jika ibu meneliti di Kota Batu sebagai sentra agropolitan di Indonesia, Indonesia itu gambarannya ada di Kota Batu bu. Jadi kalau lihat DPR di pusat itu sama dengan DPRD di sini. Faktanya banyak lho bu. Di sini sangat damai, oleh karena itu harapan kita, saya juga berharap apa yang menjadi hasil karya ibu itu bisa memberikan sumbangsih lebih bagi masyarakat Kota Batu sehingga kita bisa menjadikan batu sebagai barometer agropolitan. Bagi ibu yang di kementerian, saya berharap dana yang ada di Batu itu sangat terbatas bu. Gimana kita mau memprioritaskan kebutuhan untuk pembangunan sektor pertanian, APBD kita saja hanya sekitar 400 miliar-an, gajinya teman-teman kita yang di sini dan kawan-kawan itu sudah 200 sekian miliar per tahun. Kalau dana yang triliunan yang di pusat itu tidak bisa dikucurkan di daerah, kapan kita bisa memogramkan pertanian sebagai sektor andalan. Harapan kita bukan hanya DAU, diharapkan sumbangsih dari dana bantuan dari pemerintah mungkin DAK atau bentuk bantuan-bantuan lainnya yang bisa diarahkan pada petani, tapi yang sifatnya jangan hanya hibah karena kalau hibah prosesnya suka sulit karena diatur pusat. Oleh karena itu mindset ini harus dibuat program yang jelas, sehingga cluster-cluster pertanian tadi dapat

ditingkatkan dengan lebih baik.

Dan yang paling penting, Jawa Timur itu ... (istilah Jawa). Jadi usaha apapun kalau dilakukan tanpa biaya itu ga bisa. Nah oleh karena itu, di samping penelitian yang maksimal, harapan kita ada support. Kalau kita mengandalkan APBD sangat sulit. Oleh karena itu, harapan kita ada support itu tadi, bagaimana Kementerian yang ada di pusat dapat mengalokasikan dana secara khusus untuk revitalisasi program-program andalan Indonesia. Saya katakan andalan Indonesia, apel itu hanya ada di Batu bu yang bisa berkembang, meskipun ada di Tumpang sana, tetapi orang di Jakarta taunya apel itu dari Batu. Dan sekarang Batu itu bukan bagian dari Malang bu, tapi sudah merdeka, 10 tahun kita melaksanakan ulang tahun, harapan kita Batu bisa bersanding dengan kabupaten lain dan tercatat di level yang lain. Ya mungkin pendapat saya seperti itu. Wassalamu'alaikum wr wb.

Enny : Selanjutnya mungkin perwakilan dari pertanian.

Rachyuningsih
(Kepala
Bappeda Kota
Batu)

Suwoko S.P. : Assalamu'alaikum wr wb. Yang terhormat ibu pimpinan. Kami mewakili Distanhut akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan pertanian di Kota Batu. Kalau bicara tentang petani Kota Batu, dari sisi SDM sudah baik dan tidak diragukan lagi. Tapi entah kenapa banyak masalah terkait dengan biaya produksi. Kalau meningkatkan produksinya, kualitasnya unggul, petani itu bisa. Tapi nanti hasil akhirnya itu barang itu akan utuh karena dapat proteksi harga. Itu yang membuat petani itu kita ada yang kapok-kapokan. Mereka yang tidak mengharapkan hasilnya dari situ terus berjaya sampai sekarang. Tapi yang mindednya di situ tinggi, ya dihantui hal itu, ga jalan. Lalu kenapa seperti apel ikon Kota Batu sekarang produknya turun? Sebenarnya tidak bu. Karena mereka itu utuh di daerah, karena terjadi peralihan kebun yang di atas itu sekarang naik ke kawasan sekitar perhutanan. Di sana produksinya tinggi. Bagi petani yang butuh penghasilannya tinggi, sekarang sudah mengalir sepanjang tahun. Dan lagi kalau mau hitung-hitungan, kalau ga ada proteksi harga jual, itu banyak yang kolaps sekarang baik sayur maupun buah. Kemudian kekhawatiran kami terhadap perkembangan Kota Batu ini tidak menutup kemungkinan pada saatnya nanti akan

terjadi penyempitan lahan pertanian.

Nah usulan kami adalah adanya RTRW yang menetapkan dan mendukung kawasan agropolitan. Karena info terakhir ada sekitar 13 kabupaten yang masuk kawasan hutan ber-SK Gubernur. Usulan kami di Batu ini, yaitu Tolrejo dan Pendem, kalau memang sudah diusulkan dan sudah di SK-kan, kalau kita memanfaatkan memang itu lahan petani, kita ga bisa maksakan nanam ini itu, kami berharap ada lahan pengganti. Karena lahan untuk perumahan itu ga bisa ditawar, peningkatan penduduk juga diikuti peningkatan perumahannya juga, tapi jangan pertaniannya dan itu harus ditetapkan seperti itu. Nah kalau sekarang upaya di pertanian untuk menunjang atau memperdayakan petani sekarang ini sudah cukup tinggi. Dari sektor manapun, dari pertanian kita membangun jalan untuk sektor produksi, dari usaha tani kita support dengan Saprotan-nya, SL-nya juga. sekali lagi memang kita bantu semaksimal mungkin dari dinas. Tapi dinas bisa apa bu karena kita ga bisa mengcover itu. Karena produksi ditentukan oleh pasar sampai sekarang. Lain dengan harga panen yang sudah dipatok, harga susupun dipatok. Tapi untuk panen nonpadi, baik buah maupun sayur, biasanya jatuhnya ke sana, mengingat harga saprotannya melambung tinggi mengikuti kurs dollar. Sementara itu yang saya sampaikan, terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb

Nindya D.S. : Terima kasih. Kami dari KLH bertanggung jawab dalam penyediaan (KKP/ Ketahanan Pangan) pangan yang bergizi, berimbang, dan aman untuk dikonsumsi. Dan kegiatan inti dari ketahanan pangan itu, kita memiliki Program Aksi Desa Mandiri Pangan. Program ini tidak bisa melakukan hanya dalam waktu 1 tahun. Jadi pada saat kegiatan Kota Batu itu mengeluarkan *pilot project* mengenai 4 hal itu, salah satunya mengentaskan kemiskinan. Ada beberapa perbedaan barometer dari kami tapi pada dasarnya sama, hanya saja program yang kami lakukan tidak hanya dilakukan 1 tahun tetapi 4 tahun untuk Program Aksi Desa Mandiri Pangan. Jadi bagaimana caranya kami bisa membina mereka atau memberdayakan masyarakat di kawasan tersebut untuk bisa diberdayakan dalam berusaha agar mereka bisa memiliki tambahan kebutuhan lain. Sehingga kebutuhan di desa rawan pangan itu bisa tercukupi. Dan untuk keamanan pangan bu, terus terang untuk di Kota Batu kita memang belum ada OKPD (Otoritas Keamanan Pangan Daerah), jadi pembentukannya memang ditentukan oleh Walikota Batu karena itu bukan sebuah proses yang gampang untuk kita memulainya. Karena itupun bertujuan dari

propinsi juga, jadi kemungkinan OKPD dari propinsi.

Selanjutnya terkait distribusi, inti dari kegiatan distribusi pangan memang mengidentifikasi sentra-sentra produksi pertanian, komoditas pertanian unggulan, lalu tata niaga hasil pertanian dan membuat model rantai pasokan. Jadi sebetulnya ketahanan pangan ini ingin memberdayakan petani secara khusus, ya kita ga bisa memberdayakan petani secara khusus, kita juga bantu akses rumah tangga tersebut dalam memperoleh pangan. Jadi tidak secara spesifik untuk petani, kita bicara tentang masyarakat luas dalam hal ini lingkungannya adalah rumah tangga. Jadi apapun profesinya, kita bedayakan mereka untuk bisa memperoleh tambahan agar kebutuhan pangan mereka bisa tercukupi. Inti ketahanan pangan mungkin secara sederhana bisa digambarkan seperti itu bu. Jadi tidak hanya bagaimana petani itu dari mulai mereka menanam produksi dan sebagainya, tapi justru bagaimana masyarakat itu bisa berpikir untuk mencukupi kebutuhan pangan tersebut agar hidup lebih sehat. Sementara itu dulu bu, terima kasih.

Haula Rosdiana : Langsung saja ya takut saya lupa, apakah kegiatan tersebut secara spesifik lingkungannya agropolitan?

Nindya D.S. : Secara spesifik mungkin tidak, terkait mungkin dan berhubungan. (KKP/ Ketahanan Pangan) Tapi ya kita tidak hanya bersinggungan dengan petani. Jadi dengan masyarakat luas, otomatis peran kita akan cukup dari Kota Batu untuk cadangan pangannya. Apakah cadangan pangan di Batu ini cukup, kurang atau memadai dan sebagainya. Jadi lebih ke bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat itu seperti apa.

Enny : Selanjutnya mungkin Bina Marga. Ada Bina Marga? (Tidak ada). Rachyuningsih : Mungkin bisa diwakilkan. Pengairan bagaimana? Kalau tidak ada, (Kepala mungkin Kabag Pembangunan bisa mewakili. Bappeda Kota Batu)

Eko S. (Kabag : Untuk sektor pertanian, manfaat air sangat penting untuk hidup. Pembangunan) Banyak air juga masalah. Yang jelas di Batu terdapat 40 sekian mata air. Dengan kondisi Kota Batu sebagai sektor pertanian, artinya kondisi mata air tersebut berpengaruh. Oleh karena itu banyak sumber mata air sangat penting, karena posisi Kota Batu itu kawasan tinggi. Jadi kalau lihat Sungai Brantas itu hulunya di sini dan melewati 14 kota. Oleh karena itu masalah pengairan ini sangat penting, nah sekarang ini bagaimana agar mata air ini dapat

dimanfaatkan secara maksimal. Itu kata kuncinya, kalau zaman Belanda itu jangan bangun jalan dulu, tapi bangun saluran tersier dulu. Lah inilah yang perlu kita lakukan. Itu masalah penggabungan saluran tersier yang mengarah ke kawasan pertanian, itu perlu ditata dengan baik. Pintu-pintu air itu perlu ditata dengan baik, karena untuk bisa mensuplai air ke kawasan pertanian. Yang kedua, kalau untuk jalan, itu keliling desa juga sudah ada semua jalannya. Nah persoalannya kalau bangun jalan, luas wilayah Kota Batu +- 200 km persegi, memang lebar jalannya kurang, tidak lebih dari 2,5 m. Lalu jika dikaitkan dengan kondisi tersebut, yang dipikirkan adalah bagaimana membangun kawasan lingkungan di kawasan perkotaan. Tetapi kalau yang termasuk akses jalan pedesaan, itu jadi jalan daerah, tidak ada dana negara. Sekarang ini perlu dilakukan penataan saluran air. Dulu waktu kecil, kanan kiri saya banyak saluran air/sungai dan kini sudah tidak semua lagi begitu dan ga pernah banjir. Nah kalo sekarang air kan mengikuti volume aja. Kalau bikin bejana mungkin. Bagaimana air ini tidak mubazir dan bisa dimanfaatkan petani kalau sistem pengairannya juga dapat ditata dengan baik.

Ketika kita bicara pengairan, itu sangat perlu. Kalau bisa jalan, hubungannya kalau dengan bina marga, sejak berdiri Kota Batu, belum ada jalan alternatif. Sabtu minggu macet. Lah kita mikirnya kebijakan yang ada di pertanian, untuk arus produksi di pertanian, saya pikir tidak ada kendala. Cuma harus ada pembatas/ regulasi bagaimana petani itu ga masuk kawasan. Kalau pertanian ada di semua kawasan berarti kawasan itu menjadi lahan pertanian. Kalau urusan perut itu repot, kan gitu. Oleh karena itu regulasi terhadap kawasan dan di luar kawasan itu sangat perlu. Yang namanya Desa Telorejo. Itu ada suatu pengaturan desa yang menetapkan bahwa air bersih di Batu itu wajib. Sehingga sedimen air untuk nanam bibit kentang, wortel dll itu ga sampai turun ke dasar. Nah sekarang kita ga bisa mengatur masyarakat seperti itu. Oleh karena itu regulasi untuk masyarakat itu perlu diatur lagi. Harapan kita ada rekomendasi terkait cluster, pola tanam, pengaturan sistem pengairan tadi. Karena kalau tidak ditata dengan baik, jangan harap lambat laun melihat tanaman padi. Kalau di sini nanam padi itu untungnya kecil tapi risikonya juga kecil juga. Harga gabah sudah ditetapkan.

Yang menjadi permasalahan kalau kita berbicara pertanian, pertanian di Kota Batu itu banyak sekali ditentukan harga pasar, harga apel itu ga pasti. Kembali ke masalah pengairan tadi, masalah saluran air yang menuju lahan pertanian perlu ditata dengan baik, tetapi kalau

Batu dipaksa begitu ya menghancurkan. Kalau begitu ya mereka ga makan. Sekarang harus diatur sistem irigasinya supaya bisa baik.

Kembali ke persoalan klasik. Kalau balik ke penggunaan dana, suatu ketika membagi alokasi dana, itu tinggal sedikit. Kan ga mungkin Dinas Pertanian aja yang dikasih, yang lain ga usah, kan ga mungkin. Alokasi dana itu ga sampai 200 miliar dan kita mau menyalurkan ke petaninya, sangat tidak mungkin. Paling tidak menyalurkan 20% dari alokasi dana. Oleh karena itu harapan kita, semestinya pemberian alokasi dana kepada daerah tertentu, itu tidak berdasar dengan sistem DAU, tetapi disesuaikan dengan potensi daerah. Oleh karena itu, perlu perhatian khusus dari Kementerian terhadap Batu sebagai sektor pariwisata dan pertanian. Dana yang dikucurkan itu ga besar. Kata kuncinya, ya dana.

Haula Rosdiana : Apakah ada juga kaitannya dengan pajaknya pak? Misalnya ketika beli alistan, kena PPN-nya atau yang lainnya bagaimana pak?

Eko S. (Kabag Pembangunan) : Ada beberapa kebijakan pemerintah tentang pajak. Misalnya PBB yang sekarang dikelola daerah. Tetapi untuk sektor pertanian kan cukup sulit. Kita di sini membebani pajak terhadap baik usaha maupun produksi pertanian. Sehingga kita berpikirnya, masyarakat kita kan masyarakat pertanian yang ga mendapatkan penghasilan bulanan. Oleh karena itu bagaimana bisa berjaya, kalau ditambahin pajak itu kan jadi tambah berat. Sementara ini pajak kita itu hampir 54% dari sektor pariwisata. Kalau pertanian sangat kecil sekali, mungkin bisa dikatakan tidak ada. Lah pemerintah tidak pernah memberikan subsidi terkait masalah-masalah pertanian. Jadi saya pikir kebijakan itu adalah kebijakan yang tidak familiar, karena petani itu jangan bicara hasil, hidup aja sulit, nanam aja sulit. Potensi luar biasa, tetapi kalau dengan kebijakannya, pembebanan pajak kepada petani sangat menyulitkan.

Haula Rosdiana : Kalau insentif pajaknya pak?

Eko S. (Kabag Pembangunan) : Kebijakannya ga sampai situ. Kalau untuk alokasi dana, luar biasa sekali kalau bisa diberikan ke sektor pertanian. Saya hanya berharap agar petani tidak terbebani, dan bagaimana caranya agar dana dari pusat itu bisa diarahkan untuk pertanian.

Haula Rosdiana : Terkait insentif tadi, kalau di pertanian itu biasanya ada bantuan ga

pak? Yang saya tahu, misalnya untuk Karawang itu dibantu juga Gapoktan-Gapoktannya untuk alsintannya saja. Apakah kemudian pembelian alsintan itu juga dikenakan pajak? Apakah dikasih insentif?

Saji (Gapoktan/ Giripurno) : Begini bu, semua yang diberikan baik itu alsintan maupun komposisi atau berupa hewan yang pengadaannya itu dilakukan oleh Dinas, itu sudah dilakukan sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa. Itu masih berlaku seperti itu. Sehingga yang diberikan kepada kelompok tani itu tidak sebanyak jumlah kelompok taninya, tapi mengikuti jumlah anggaran itu. Semuanya baik dalam bentuk bantuan hewan, pupuk, saprotan, alsintan semuanya begitu.

Haula Rosdiana : Ada ga semacam pembebasan pajaknya pak?

Saji (Gapoktan/ Giripurno) : Kalau bisa dihilangkan ya mau saja bu sehingga bisa meningkatkan belanjanya itu. Kalau peraturannya masih mengacu ada PPN, PPh, ya kita tetep ngikutin itu bu. Kalau kita ga ngikutin itu, nanti kita kena masalah bu.

Haula Rosdiana : Seharusnya hal itu perlu ada ya, pak?

Saji (Gapoktan/ Giripurno) : Iya bu. Kalau ada, itu sangat bagus sekali bu. Kalau petaninya bisa lebih tinggi lagi bu.

Haula Rosdiana : Seharusnya pemerintah juga membantu Gapoktan dan mengingat peran Gapoktan sendiri dalam mendukung perkembangan kawasan agropolitan.

Winardi (Gapoktan) : Kehadiran kami berdua di sini untuk mewakili pekerjaan kami sebagai petani. Kami juga membentuk paguyuban kelompok petani dan juga melakukan kerjasama dengan LSM. Mungkin ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Kalau ada pilihan lain selain jadi petani, ya saya maunya juga memilih yang lain. Benar seperti yang disampaikan bapak dari dinas pertanian tadi bahwa petani di Batu punya beberapa keterbatasan ya, pertama minimnya SDM. Yang kedua, faktor tanah, lingkungan dan sebagainya mungkin nanti bisa kami sampaikan satu per satu. Bahwa berdirinya Gapoktan menurut kami, memang secara organisasi itu lebih baik, daripada pertanian yang tahun-tahun sebelumnya/ periode yang lalu. Tetapi di sisi lain kalau kami boleh jujur bu, sebagai hati nurani petani bu, kami mohon maaf jika bertentangan dengan Dinas Pertanian dan dari kebijakan kota, kami menyampaikan apa adanya sebagai katakanlah perasaan

jujur kami, pembinaan selama ini kami akui lebih baik. Tetapi di sisi lain lain, kadang-kadang di hati nurani saya secara pribadi, kami juga mewakili yang lain, kami sepakat bahwa Dinas Pertanian dalam pembimbingan dan pembinaan memang lebih baik, tapi kami melihat masih ada setengah hatinya bu. Setengah hatinya begini, kami i bibit dikasih, teori penanaman dikasih, tapi setelah itu kami dibiarkan bu. Lah ini memang kenyataannya.

Contohnya saya orang Panerejo, unggulan di sana adalah strawberi. Strawberi dibantu bu, entah kualitasnya baik atau tidak, saya tidak tahu bu. Tapi yang jelas setelah kami tanam, justru kami rugi Rp 7.000.000. Kenapa? Karena bibitnya bibit lokal, nuwun sewu pak, ini supaya demi perbaikan. Sekarang Gapoktan punya hutang Rp 7.000.000 gara-gara tanam bibit dari Dinas. Katanya bibitnya unggul ya kami tanam. Kami petani tahu persis cara menanam, tetapi produksinya rendah, tidak lebih baik dari produk lokal. Dari situ, kita pasti rugi kita. Yang kedua, pengalamannya bahwa petani menginginkan adanya pendampingan berkelanjutan, secara kontinu. Sepertinya bagaimana peningkatan mutu, panen yang bagus, pemasaran, pengemasan. Contohnya, saya sampaikan lagi memang benar bahwa Batu merupakan sentra produksi hasil pertanian. Contohnya Kecamatan Bumiaji. Menariknya sewaktu saya masih kecil, ayah saya sebagai petani ada bedanya dengan sekarang. Dulu itu, ayah saya mungkin lebih tradisional dibandingkan saya, karena tahunnya berubah, pasti modern saya. Tetapi kenyataannya untuk peningkatan mutu dan hasil produksi pertanian itu, menurut saya, belum tentu lebih baik dibandingkan ayah saya dulu. Misalnya kita menghasilkan produk pertanian, orang Batu, siapa ga kenal? Malah anehnya sekarang di pasar, di Peloso, dulu saya waktu kecil jelas bahwa pasar yang di selatan itu bisa nampung sayur. Lah sekarang ada pedagangnya, ga ada sayurannya, kalau ga ada sayurannya ya ga ada yang mau beli. Pedagangnya sekarang adanya di perbatasan Batu. Inilah keadaan yang menurut saya, ya bagaimana ini kebijakan dari pemerintahan kota.

Saya tidak menyalahkan salah satu pihak. Mungkin petani sebagai objek, katakanlah dalam pembangunan Kota Batu. Tetapi kenyataannya hasilnya yang saya rasakan bahwa agropolitan masih belum menyentuh. Mohon maaf, kalau mungkin saya ngomong demikian dan dipecah jadi warga Kota Batu ya monggo. Ini petani yang bilang apa adanya. Saya menginginkan dari apa yang kami sampaikan ini nanti dapat menjadi sebuah koreksi dan perbaikan ke

depan.

Selanjutnya, bahwa kami menginginkan bahwa jangan semua ini disalahkan dan dibebankan ke petani. Karena nasib kami sudah berat bu sebagai petani. Mencari bibit, mencangkul, memanen, memasarkan sendiri dan yang anehnya itu adalah rugi ditanggung sendiri. Saya berpikir dengan teman-teman bahwa agropolitan itu yang mana? Bagi kami yang kami rasakan manfaatnya itu yang mana? Mungkin ada manfaatnya bu, namun belum sesuai dengan harapan kami. Sepantasnya belum menurut kami. Dari situ, bahwa kebetulan apakah petaninya kurang bagus? Saya sendiri adalah orang LNDH, menggarap sebagai petani. Banyak yang saya pegang, kenapa? Karena saya secara pribadi prihatin bu. Sudah hasilnya belum sesuai dengan harapan, memang dari SDM itu banyak petani yang belum bisa baca. Di Kota Batu ini masih banyak yang belum bisa baca. Contohnya kemarin itu kami melaksanakan pelatihan sekitar 70 orang dengan BNKB dari Jakarta. Ini dijembatani oleh LSM, oleh LIB bu, yang dibina oleh Pak Budi dari Bappeda.

Saya melihat itu sebagai suatu terobosan dan saya melihatnya bahwa pembinaan dari Dinas itu baik namun cenderung baiknya kepada lembaganya atau pengurusnya. Kepada petaninya yang kecil dan langsung menyentuh itu belum. Contohnya, saya ketua Gapoktan, mungkin saya paham, teman saya paham, tapi teman kami atau anggota kami kan belum paham itu. Penyuluhannya saya rasakan bagus, Cuma penyuluhannya itu ada kalau dibutuhkan ada pertemuan. Makanya malah kami, berinisiatif dari Paguyuban Petani Madani, ini malah ga diakui oleh Dinas. Saya hanya menginginkan petani di sekitar kami itu bisa maju. Akhirnya kami bisa merangkul 700 petani di Kota Batu. Ini bukan Gapoktan, ini katakan orang di luar Gapoktan, di luar kelompok tani. Pelatihan ini telah 5 kali kami lakukan. Karena di hati nurani kami, kami menginginkan kualitas SDM petani dan sekaligus membantu program pembinaan dari Dinas Pertanian, khususnya terkait penyuluhan.

Kebetulan kemarin saya sendiri mewakili pelatihan dari PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian) dari Desa Panerejo, dari Kementerian Pertanian. Itu mendapatkan 100 juta. Setelah kami melaksanakan pelatihan 6-7 hari di Malang. Dana itu cair 1-2 bulan berikutnya. Dana ini memang dikhususkan untuk pengembangan usaha petani yang tergabung dalam Gapoktan. Nah di sana, yang pertama tanpa jaminan dan tanpa agunan; yang kedua, bunganya bunga lunak dan merupakan aset Gapoktan, yang didalamnya dibina,

sekaligus dibimbing dan diawasi oleh Dinas Pertanian Kota Batu sampai pusat. Itu dananya digunakan awal pertama untuk 100 orang petani yang tergabung di Gapoktan. 1 orang itu Rp 1.000.000, dan untuk masa pengembalian disepakati 5 bulan. Itu disesuaikan karena Desa Panerejo itu sekarang merupakan sentra tanaman apel sekitar tahun 1990. Dulu itu masih bagus, tapi karena sekarang apelnya itu tinggal batangnya, batang yang mati, dan akhirnya sekarang menjadi petani jagung manis. Jagung manis mayoritas dan buahnya adalah strawberi. Dihitung 5 bulan itu berarti kita hitung masa panen jagung manis. Dan 5 bulan itu bergulir sesuai dengan petani yang membutuhkan.

Haula Rosdiana : Kalau pengalaman petani terkait dengan kebijakan subsidi, atau kebijakan pajaknya bagaimana pak?

Winardi (Gapoktan) : Sebenarnya gini bu, kalau ngomong tentang subsidi, petani juga maunya gitu. Kalau subsidi ya ada subsidi pajak juga demikian, kalau bisa seminimal mungkin iyalah. Tapi kalau dibebaskan ya kita juga ga layaklah. Jadi kami sepakat diberi subsidi, terus ada pajak juga kami bisa menerima asalkan itu masuk akal, sesuai realita. Mungkin kedepannya, dari kami pribadi, itu menginginkan bahwa kedepan kami bisa lebih mandiri. Kenapa? Mulai awal saya mendirikan Gapoktan dengan nama “Langgeng Mandiri” itu di hati saya memiliki pemikiran semacam itu. Sudahlah, dana dari pemerintah disyukuri, tapi kalau mempunyai pemikiran untuk mandiri. Sebanyak apapun dikasih, itu kurang ada manfaat. Akhirnya kenapa saya ini memiliki inisiatif dengan teman-teman yang 700 petani tadi, sampai buat paguyuban padahal sudah ada Gapoktan, poktan. Kenapa? Karena saya ingin mewadahi petani yang tidak ikut poktan dan banyak juga petani yang ga ikut Gapoktan. Itu saya hitung ya. Itu sebetulnya yang ikut tidak hanya setengah. Memang alasannya kalau saya lihat mungkin karena wawasan organisasi/ berkelompok petani itu kurang ke arah sana. Terus yang kedua mungkin alasannya bahwa ikut kelompok tani atau Gapoktan mungkin ya alasannya podo-podo wae. Nah itu adalah citra bu. Biasanya memang demikian, saya tidak menyalahkan yang kaya gitu. Memang kalau memang dipikir kalau gabung di poktan hanya duduk-duduk bersama, rapat-rapat bersama, hanya absen, hanya arisan ya semacam itu. Tetapi nilai bahwa untuk meningkatkan ilmu, teori, pengalaman, di bidang pertanian itu adalah dirasa kurang. Akhirnya petani menganggapnya ya acuh tak acuh. Contohnya di kampus saya, jumlah petani 100, yang masuk Gapoktan hanya sekitar 39, berarti yang 60 itu ga ikut. Jelas ini realita, apalagi

yang di kampungnya teman saya, orang itu sampai sekitar 700, kelompok taninya yang ikut hanya 20 bu. Ini ya mohon maaf ya Pak Woko, memang kenyataannya demikian. Sebetulnya saya lihat lebih bagus daripada 10 tahun atau 5 tahun yang lalu lebih bagus untuk penataan Gapoktan, kelompok tani. Tapi kenyataannya bahwa kelompok tani di Kota Batu yang tergabung masih belum sesuai harapan, mungkin demikian. Ini hanya gambaran, jangan ada yang sakit hati, ga enak itu. Ini gambaran untuk kebaikan kita. Mungkin sementara itu saja bu.

Enny Rachyuningsih (Kepala Bappeda Kota Batu) : Baik, sebelum lanjut ke Deperindag. Kita dengarkan masukan dari petani mawar? Ada?

Risa Agus Prasetyo (SMP Negeri 6/ Petani Mawar) : Terima kasih, nama saya Risa Agus Prasetyo, petani mawar potong. Kalau pagi menjadi guru, kalau sore menjadi petani, kalau gurunya guru BLH (Budidaya dan Lingkungan Hidup). Untuk agropolitan mawar potong sangat prospek sekali di Gunung Sari. Akan tetapi jujur saja Pak Woko, akan tetapi manfaat dan fasilitas dari pemerintah Kota Batu itu kami tidak merasakan. Misal ada bantuan pupuk dari Dinas itu kami tidak dapat. Peserta dari Gapoktan itu tidak menikmatinya sama sekali, hanya pengurus-pengurus Gapoktan saja yang menikmati. Akhirnya hasil bunga mawar potong kami tidak sehebat, tidak sebagus sesuai dengan yang diharapkan Gapoktan, itu masalah yang pertama.

Yang kedua tentang kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh Dinas Pertanian kepada Gapoktan. Itu yang hanya yang diundang saja atau sosialisasinya kepada kami petani kecil ini tidak sampai ke kami. Jadi hanya petani besar saja yang mendapatkan sesuatu ataupun sosialisasi dari pemerintah. Jadi kami hanya dapat ampas saja. Jadi mungkin untuk pertanian mawar potong itu sangat prospek sekali karena kami sudah bisa menjual komoditi kami sampai Rawabelong. Dan hotel-hotel di Kota Batu juga ngambilnya dari kami, untuk acara-acara penting ngambil mawarnya juga dari kami. Juga mungkin tanggal 8 nanti akan ada Batu Flower Festival, ngambil bungan mawar juga akan ditampilkan di Kota Wisata Batu.

Haula Rosdiana : Ya tadi terkait dengan bantuan, mungkin selain pupuk, apakah ada lagi bantuan yang diberikan pemerintah kepada petani?

Risa Agus : Peralatan modern seperti mesin juga kami dapat, kemudian sepeda Prasetyo (SMP ontel juga kami dapat. Tapi yang memanfaatkan ya pengurusnya. Negeri 6/ Petani Kami ingin membawa bunga ke agen kadang-kadang ya ngojek, Mawar) karena kami tidak dipinjamkan atau gantian gitu, hanya pengurusnya saja.

Haula Rosdiana : Memangnya proses pemberian bantuannya bagaimana?

Risa Agus : Waduh kurang tahu karena kami petani kecil. Yang tahu hanya Prasetyo (SMP pengurusnya saja. Negeri 6/ Petani Mawar)

Haula Rosdiana : Apakah mungkin si petaninya yang mengajukan permohonan atau pusat menganalisis kebutuhan daerah, lalu dropping atas bantuannya atau bagaimana?

Winardi : Begini ya bu, untuk pupuk subsidi, pupuk pangan organik. Itu dari (Gapoktan) Dinas Pertanian mengalokasikan dan menganggarkan dana, kemudian didistribusikan sesuai kebutuhan petani. Kami warga desa menginformasikan kebutuhan sekian-sekian sesuai kebutuhan masing-masing, lalu nanti dikasih didistribusikan kemana, tahun ini sekian ton, dan nanti pengawasannya dilakukan oleh Deperindag.

Jadi Dinas Pertanian mengagendakan kebutuhan pupuk bersubsidi untuk Batu sekian ton dan itu rekomendasi dari kami, nanti jumlahnya ditetapkan oleh Dinas. Nanti jumlah masing-masing kebutuhan petani tergantung dengan daya beli dan kapasitas penggunaannya, ga bisa dipaksakan begitu ga bisa. Sekali lagi kalau menyangkut rekan-rekan Gapoktan, terkait sumbangan atau stimulan yang diberikan oleh Dinas, ini memang ada masyarakat yang mendapatkan bantuan ada yang tidak. Tapi prinsipnya kita jalan terus bu, tidak mengandalkan bantuan. Nah regulasinya kalau memang memberikan bantuan itu ke kelompok tani, Gapoktan sesuai dengan profesi masing-masing. Apa yang dibutuhkan itu kita memaparkan ke kelompok tani dengan apa? Ya dinas nanya, memang mau butuh apa? Butuh apa? Kalau bisa tahun ini kita anggarkan, ya seperti itu. Kalau masalah cukup ga cukup, ya itu sifatnya stimulan. Dengan ada tidak ada, kita tetep nanem, gitu.

Lalu untuk menanggapi yang di Gunung Sari itu. Mawar memang menjadi primadona di sana daripada menanam tanaman pangan atau yang lain. Walaupun banjir bunga, tetep dibeli dengan harga standar.

Bunganya itu bagus dan laku, sehingga petani tidak kapok menanam.

Haula Rosdiana : Kalau mekanisme pengawasannya gimana? Tadi kan dikasih bantuan malah bukannya memecahkan masalah tapi jadi masalah. Lalu bagaimana dari pihak otoritas pertanian mengatasi pemanfaatan dananya dan ada sanksi jika ada penyalahgunaan?

Winardi (Gapoktan) : Yah mungkin ada baiknya kita berbaik sangka saja bu. Masa kita mau menginterogasi seperti yang di TV kan ga mungkin. Kita panggil siapa pengurusnya, kita bicarakan, yang penting programnya kan jalan. Kalau memang parah ya tahun depan ga kita anggarkan lagi. Dan ada mekanisme pertanggungjawaban. Selain itu juga ada hibah, tapi ya kita berikan ke kelompok, nanti kalau sudah berkembang, nanti dananya kita alihkan ke kelompok lain.

Enny Rachyuningsih (Kepala Bappeda Kota Batu) : Selanjutnya perwakilan Deperindag.

Tunggul (Deperindag) : Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi sesuai tupoksi, sebetulnya Deperindag memiliki tupoksi untuk pertumbuhan ekonomi secara makro. Berhubungan dengan agropolitan memang perlu diakui khususnya untuk kebijakan anggaran masih eblum sinkron. Artinya kebijakan anggaran belum menunjang dengan kebijakan visi Kota Batu yang agropolitan. Dan itu berakibat kepada pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini pemasaran produk pertanian ke arah hulunya, untuk promosi kita kurang karena memang anggaran untuk satu tahun untuk promosi saja di bidang perdagangan yang hubungannya dengan promosi hanya Rp 200.000.000, contoh konkritnya. Sedangkan untuk pengolahan hasil ini ditangani oleh banyak dinas, baik ketahanan pangan, pertanian sendiri dan perindustrian juga berperan serta dalam pengolahan hasil pertanian. Jadi di Dinas UKM, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang melayani 3 Kementerian itu sangat berperan penting karena setiap kelompok itu nanti kita bina untuk menjadi prakoperasi dan koperasi. Hasil pertaniannya nanti kita bantu melalui pengolahan hasil panen melalui bidang perindustrian. Untuk bantuan modal ada dari bidang UKM sedangkan untuk promosinya nanti oleh bidang perdagangan. Perannya sangat sentral tapi memang belum ditunjang oleh anggaran yang memadai karena memang ada skala prioritas tapi seyogyanya

kita memang perlu mendapat prioritas lebih.

Untuk contoh promosi, promosi kita hanya bisa mengikuti 2x pameran, padahal yang kita promosikan banyak sekali, mulai dari hasil pertanian, hasil olahannya, sampai makanan minuman dalam kemasan itu memang tidak tercantum, kita tidak bisa mewadahi semuanya karena keterbatasan itu. Jadi kita memang selama ini belum bisa memaksimalkan fungsi dinas karena memang keterbatasan anggaran. Mungkin itu yang bisa dijadikan informasi. Tapi memang untuk kelompok petani yang sudah kita bina menjadi prakoperasi itu ada 147 dan itu memang butuh pembinaan rutin, jadi setiap bulan ada pembinaan dan itupun masih terkendala oleh keterbatasan.

Haula Rosdiana : Untuk mengikuti kegiatan atau pelatihan itu apakah ada ketentuan bagi si petani? Atau semuanya boleh misalnya untuk mengikuti pameran. Ada paten produk ga pak?

Tunggul (Deperindag) : Untuk pameran kita memang memberikan kesempatan bagi yang sudah kita tampilkan karena ini nanti berdampak dengan jumlahnya ke sana. Kalau kelompok yang kita anggap mampu, kita tidak berani memamerkan atau memasarkan karena kita khawatirnya kita pada saat transaksi terjadi dan petani belum bisa memenuhi kuota pesanan, nanti berefek tidak baik buat penyelenggara pameran dan kita juga.

Untuk paten sudah banyak bu. Tapi untuk paten produk belum bu, mungkin satu dalam proses itu, ketela ungu, spactra. Nah itu masih dalam proses. Karena untuk biaya paten itu kan sangat tinggi dan kita tidak mampu untuk memfasilitasi, kalau paten merk sudah banyak, tapi kalau paten produk biayanya di atas Rp 50.000.000. Ada koordinasi dengan propinsi memang, tapi tidak semua bisa terlayani karena provinsi itu kan melayani berapa kabupaten, 35 kabupaten.

Endang Dwi N. (Perekonomian) : Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak Tunggul dari Deperindag. Seperti di perekonomian kan juga punya kegiatan pemasaran tapi kita utamakan setiap tahun itu, yang tahun 2011 ini 4x pameran di 2 daerah. Jafintinya kita menjembatani dari produk-produk UKM yang ada di Kota Batu, kita tampilkan di sana dan di pameran itu kita akan ketemu dengan para investor. Jadi sebagai jembatanlah. Selain itu, kita juga saya sebutkan dari UKM itu produknya apa aja, produk itu sudah ada nomor telepon juga dalam sebuah buku/ katalog. Semua produk UKM yang kiranya dapat

memenuhi pesanan, kadang-kadang UKM itukan kalau masih kecil sekali, satu bulan kan belum tentu produksi, ada targetnya dulu. Selain itu, betul yang disampaikan Bu Eni tadi, waktu kita pameran kan kita juga ketemu dari Kementerian Pertanian, itu saya tanya karena di sini agropolitan, saya tanya: kenapa kata teman-teman, di Batu suka kurang bantuan dari DAK, pusat itu. Ternyata katanya itu bisa mengajukan proposalnya karena di sini namanya Kota Batu, tapi kenyataannya kan desa. Kita memamerkan kerajinan juga, produk-produk Kota Batu, makanan dan minuman juga bisa.

Haula Rosdiana : Jadi tidak dilaporkan ya? Incidental saja?

Endang Dwi N. (Perekonomian) : Jadi masih sebatas sebagai jembatan saja bu, itu banyak. Sudah ada laporannya juga. Setiap tahun mesti ada, masih kasarannya skala kecil, ambil barang, lalu dijual di luar daerah atau di luar negeri. Iya insidental.

Enny : Selanjutnya dari KLH.

Rachyuningsih
(Kepala
Bappeda Kota
Batu)

Pancaningtyas (KLH) : Terima kasih, kami dari lingkungan hidup. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko tadi dan kami hanya bisa menyampaikan dari sisi konservasi yang kami lihat. Saat ini yang kami perhatikan lahan pertanian di Kota Batu semakin banyak berkurang dikarenakan dipakai untuk kawasan perumahan. Dan akhirnya untuk lahan pertanian itu merambah kawasan hutan yang menyebabkan area hutan semakin berkurang. Dan ini akan mengakibatkan semakin berkurangnya sumber mata air sebagaimana yang disampaikan Pak Eko tadi. Sebenarnya kita dulu ada 111 sumber mata air yang aktif, sekarang sudah banyak berkurang. Sekitar 20-an sekarang yang ada ya Bu Eni? Itupun sudah banyak yang tidak aktif lagi. Dengan demikian hal itu juga akan menyebabkan debit air semakin menurun dan kalau kita lihat suhu udara di Kota Batu, yang biasanya kita ada di kisaran 19-20 derajat, saat ini sudah mencapai 25 derajat. Saya kira hal itu juga berpengaruh terhadap produktivitas pertanian.

Haula Rosdiana : Lalu upaya dilakukan apa?

Pancaningtyas : Dalam upaya melestarikan lingkungan kami.. yang banyak tahu sih Bapak Bambang selaku kepala kantor kami, banyak melakukan

(KLH) kegiatan konservasi lahan. Sekarang ini untuk hutan di daerah Gunung Rejo diusahakan agar hutan yang banyak gundul itu ditanami beberapa pohon, terus juga mengupayakan hutan di sana. Juga di daerah Klepung.

Haula Rosdiana : Adakah dana dari negara luar?

Pancaningtyas : Belum ada bu.

(KLH)

Winardi : Jadi kalau kita melihat di wilayah dalam kawasan, kalau yang melihat (Gapoktan) yang dibicarakan itu dari lingkungan hidup, berarti sama dengan membicarakan kami. Kalau dilihat ini menjadi semacam pemahaman bu, mungkin kalau dilihat tahun sekitar antara tahun 1997-1998 saat zaman reformasi memang benar. Anggap sajalah petani mungkin perambah hutan yang menyebabkan hutan setengah gundul, tidak 100 persen gundul. Tapi untuk periode yang terakhir ini, kira-kira anggaplah 5-7 tahun terakhir, malah menurut saya petani perambah hutan ini adalah termasuk pelopor reboisasi di sana. Jadi gini, lebih baik fair-fair-an saja, saya lihat setiap temuan pasti akhirnya nyalahin petani perambah hutan kaitannya dengan sumber mata air. Lah inikan sebagai pengumpulan data, untuk tahun 1997-2000 ya betul. Tapi untuk sekarang ini sudah tidak seluruhnya benar. Satu, lahan yang aslinya dulu terbuka karena ditebangi, sekarang sudah dilakukan reboisasi oleh pemerintah. Yang kedua, tanaman hutan yang seperti pinus itu ditumpang sarikan dengan kopi, itu tanpa merusak pinusnya.

Terus kalau masalah mata air, kalau menurut saya bukan sepenuhnya kesalahan petani. Ini bisa juga kesalahan kebijakan pemerintah, termasuk lingkungan hidup. Kenapa? Kalau debit air itu menurun, benar bu. Tapi apakah itu total kesalahan petani?? Belum tentu. Kenapa?? Sekarang contohnya mata air berkurang, sumber air berkurang. Itu kalau dilihat kasat mata dari air Brantas ya benar. Tapi kalau dilihat di bawah tanah, pipa air yang disuplai PDAM berapa? Contoh saja dari yang masuk hutan ke Desa Sumber Bondo itu saya lihat ada 7 pipa besar bu. Nah itu jangan salahkan sepenuhnya petani, aah ini petani perambah hutan. Era itu sebenarnya sudah berubah. Yang bermasalah kebijakannya. Kalau era itu dianggap tidak berubah ya jangan salahkan sepenuhnya ke petani, berarti pemerintahnya juga tidak berhasil. Terus yang menjadi permasalahan, mungkin kami dianggap merusak debit air, lah di hutan saja yang daerah dengan kemiringan yang tidak layak untuk pembangunan, lah itu kenapa

diperbolehkan oleh pemerintah? Nah benar ga? Inikan jika hubungannya dengan mata air, dengan perumahan, dan ini juga hubungannya dengan lingkungan hidup. Seharusnya ya dilihat dulu, layak ga air ini diambil lagi? Itukan sebelumnya ada penelitian terlebih dahulu. Setelah di sana ada pipa-pipa, akhirnya ngomongnya itu salahnya petani, perambah hutan, digunduli. Lah kenapa dulu saya waktu kecil itu Sungai Brantas itu besar karena belum ada pipanisasi.

Coba kalau ga percaya kalau dari LH berani, kita lihat sama-sama. Kalau nanti debit airnya ga bertambah, taruhannya saya, berapa desa itu, termasuk vila, termasuk hotel. Nah inilah sebuah kebijakan, jadi saya mohon kedepannya bagi petani yang mungkin sudah hitam jangan dikambingkan, jadi kambing hitam. Kami sudah hitam bu.. terima kasih. Mohon ini sebagai koreksi, terima kasih.

Enny Rachyuningsih (Kepala Bappeda Kota Batu) : Jadi yang mungkin petani sekarang beda dengan petani yang dulu, sudah kembali ke jalan yang benar ya pak? Ya memang data yang ada di Bappeda, dari sekitar 149 mata air itu tinggal 111 mata air, itu juga sebenarnya ga mati. Hanya mungkin debit airnya yang kecil. Lalu yang kaitannya dengan lingkungan hidup, ya dengan Bappeda juga koordinasi. Jadi kalau ada izin terkait dengan perumahan, itu saya selalu menyebutkan bahwa 30% area harus digunakan untuk ruang terbuka. Itu untuk yang publik. Untuk yang privat, itu 20% dari luas lahan itu selalu saya sampaikan untuk digunakan sebagai ruang terbuka.

Benar dengan yang bapak katakan bahwa itu sepenuhnya bukan salah petani. Kalau petaninya salah, pemerintahnya juga salah, mungkin sektor yang mengambil air juga salah. Karena itu konsep kemitraan untuk konservasi memang harus kita lakukan. Kita jangan salahkan siapa-siapa, di sini ada masalah, maka kita selesaikan bersama-sama. Dan kita tahu bahwa air di Kota Batu itu digunakan untuk menghidupi orang-orang di Kota Malang yang sampai sekarang harganya juga belum pasti. Mungkin ada tambahan dari pihak kementerian?

Sri Damayanti (BPPS Kementerian Pertanian) : Sekali lagi, agropolitan awal-awal itu dicanangkan tahun 2002 itu adalah tidak berdir sendiri, maksudnya tidak hanya satu instansi yang berusaha tetapi ini melibatkan bermacam instansi seperti PU, perdagangan, perindustrian, penyuluhan, permodalan dsb. Dan ini digunakan untuk perkembangan pertanian. Jadi kita itu sistemnya kalau kita punya koordinasi yang baik, saya rasa semua akan berjalan dengan baik. Nah agropolitan ini kan komoditas unggulan, unggulan

itu yang kita kembangkan untuk agroindustri, dengan didukung juga oleh instansi terkait yang berkoordinasi dengan baik, jadi tidak berdiri sendiri. Mengenai anggaran DAK, Memang Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat yang mengalir langsung ke pemerintah daerah/ kabupaten. Setahu saya memang dasarnya alokasi itu memang karena potensi wilayah, kapasitas fiskal dan kemudian keperluan kabupaten. Ya mungkin bisa diusulkan karena ini kan yang mengeluhkan Bappeda.

Enny : Kita dari pertanian yang dapat Dakon (Dana Konsentrasi).

Rachyuningsih
(Kepala
Bappeda Kota
Batu)

Sri Damayanti : Dakon memang dapat dari masing-masing eselon 1 dan itu termasuk untuk kegiatan penyuluhan. Mungkin jika ada masukan (adzan). Jadi untuk DAK tadi, memang dari Kementerian Keuangan dan pemda mengalokasikan anggaran daerah itu seperti yang dikatakan sebelumnya adalah kapasitas fiskal kemudian potensi wilayah dan yang diberikan hanya kabupaten. Itu kan yang menetapkan kan Kemenkeu atas usulan Bappenas, Bappenas atas usulan masing-masing Kementerian teknis. Jadi kita Kementerian teknis kan taunya potensi. Jadi kalau Kemenkeu menetapkan kabupaten bukan kota, kita tidak bisa intervensi ke sana. Mungkin nanti Bappeda bisa ke Bappenas, nanti Bappenas ke Kemenkeu dan itu memang harus dilihat peraturan tentang DAK.

Mengenai pembinaan, di sini saya tidak tahu apakah ada Bappel? Instansi penyuluhan? Mungkin ada di dinas, ga sendiri. Memang dinas itu kan kaitannya dengan regulasi, kalau penyuluhan itu ada di badan penyuluhan, badan pelaksana penyuluhan. Jadi mungkin karena di sini tidak ada, maka dirangkap oleh dinas. Dan itu mungkin memang kurang, seolah-olah dikasih fasilitas tapi tidak digunakan. Tapi seharusnya memang penyuluhan itu di Bappel. Mungkin itu saja bu, sementara dari saya.

Enny : Kira-kira itu, bu haula, informasi yang bisa kami berikan baik dari SKPD maupun dai teman-teman dari Gapoktan dan dari petani mawar yang tadi mewakili. Kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Dan nanti kalau mau survey nanti bisa ditemani dari teman-teman di sini.

Inayati	: Assalamu'alaikum Wr. Wb. Saya Inayati, mohon maaf karena hadir terlambat. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait PBB. Apakah selama ini petani merasa berat dengan PBB yang harus dibayarkan, terutama terkait dengan jatuh tempo pembayaran PBBnya. Apakah mahal, atau hasil panennya sudah tidak bagus, lebih baik ga bayar atau gimana? Saya hanya ingin tahu kondisi di lapangannya seperti apa.
Winardi (Gapoktan)	: Sebetulnya kalau masalah PBB bagi saya itu menarik bu. Sebetulnya ini bukan membuka kekurangan di antara kita atau gimana, atau bukan karena kita tidak mau berpartisipasi terhadap pembangunan di Batu, bukan semacam itu. Tetapi saya melihatnya, malah petani lain, setelah Batu menjadi kota seperti sekarang, memang say akui bahwa kemajuan termasuk sarana dan prasarana itu sangat bagus mulai dari jalan sampai irigasi, sampai apapun, sampai dulu jalan tanah waktu saya masih kecil, sekarang udah ga ada. Tapi mungkin karena itu, akhirnya PBB itu setiap tahun peningkatannya semakin tinggi. Malah okelah dengan alasan ini kota mungkin PBB dinaikkan, mungkin dengan alasan supaya harga tanha tinggi, tapi di sisi lain penghasilan petani tidak begitu. Saya membicarakan ini drai sisi kacamata petani bu. Lah petani kan lihatnya dari sana. Sejak penghasilan kami menurun, terus PBB nya naik terus. Apalagi tanah yang kering kemarin. Teman saya itu sampai ga mau bayar. Di Bumiaji okelah 10 tahun yang lalu, siapa yang ga kenal Bumiaji, setiap panen pasti beli kendaraan. Tapi sekarang, siapa yang ga tau Bumiaji, sek setiap tahun, tanahe didol (jual). Ga kuat mesti bayar pajak. Kami ini merasa bahwa PBB di Kota Batu memang terus setiap tahun peningkatannya sangat tinggi. Contohnya tiga tahun yang lalu, dulu kebun bambu saya itu per meternya masih Rp 7000. Itu tiga tahun yang lalu. Sekarang Rp 17.000. Padahal untuk manen bambu itu, saya itu masih make tangga, bukan jalan enak kaya gini. Akhirnya saya heran juga. Lah wong penghasilannya ga ada. Naikin bambu ke jalan itu ga sebanding dengan biayanya. Okelah karena kita warga yang baik, kita bayar, tapi inilah keadaannya.
Haula Rosdiana	: Bisa ga pak mengajukan keberatan?
Winardi (Gapoktan)	: Sekarag gini bu, wong namanya karena SDMnya rendah lagi. Tapi saya lihatkan dari sisi petani. Untuk keberatan itu kan mesti tahu, biasalah bu kita kan baca aja banyak yang ga bisa. Bisanya Cuma ngeluh. Lah sekarang kalau mengajukan keberatan, sebetulnya susah

bu. Saya akui Batu itu berkembang tapi ya saya nuwun sewu itu memberatkan. Kalau ga percaya kita ngomong ke Balai Desa, itu berat, nanti saya yang ngomong saya yang tanggung jawab. Tapi ngomong berat ya Cuma bisa ngeluh. Pajak itu memberatkan kehidupan petani. Petani itu mayoritas di Batu, 75%. Bahkan sampai ada yang ga mau bayar. Ya inilah sisi lain Kota Batu. Pajak di satu sisi dinaikkan, di satu sisi penghasilan kita kebetulan menurun.

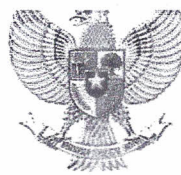
Haula Rosdiana : Proses untuk minta pengurangan atau apa gimana? Bisa ga?

Winardi (Gapoktan) : Kalau kami melihatnya, mungkin secara teori mudah, tapi praktiknya pelaksanaannya dan hasilnya susah. Jangankan minta keringanan semacam itu, pernah dulu ga bayar PBB 2 tahun berarti nunggak 2x. Kami itu ditagihkan kok bu, nanti ga bisa milih kepala desa. Minta keringanan kan harus ke desa, ke kecamatan, kita ga tahu kemana lagi.

Enny Rachyuningsih (Kepala Bappeda Kota Batu) : Ibu, mohon maaf sekali karena seharusnya yang bisa menjawab semua adalah perwakilan desa atau kecamatan. Mungkin adanya demikian dulu. Jika ada data yang kurang, nanti bisa kami arahkan ke sana.

Inayati : Tidak apa-apa ibu, sebenarnya yang memang yang ingin kami gali ya dari sisi petani. Mungkin jika ada informasi lain yang ingin kami gali, bisa dibicarakan di luar forum ini. Terima kasih

Haula Rosdiana : Baik, untuk menutup pertemuan hari ini, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak ibu sekalian. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi kita semua.



WALIKOTA BATU
KEPUTUSAN WALIKOTA BATU
NOMOR: 180/59 /KEP/422.01 3/2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN
WALIKOTA BATU

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan dan mensinergikan berbagai potensi yang ada (program masyarakat dan pemerintahan) serta untuk mengembangkan sistem dan usaha agribisnis, maka perlu membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Program Pengembangan Kawasan Agropobtan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemhentukaii Peraturan Perundang-undangan
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perneriniahn Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor X tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemenintah Pengganli Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Pemerintahan 1)aerali menjadi Undang-undang,
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemenintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemenntah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 16 tahun 2006 tenlang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 tahun 2003 tentain Kewenangan Pemerintah Kota Batu;
10. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang WilayahKota Batu Tahun 2003-2013;

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Pertanian republik Indonesia tanggal 16 Oktober 2002 Nomor 312/TU.210/A/X/2002 tentang Program Rintisan Kawasan agropolitan Tahun 2003.
2. Surat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian anggal 28 Oktober 2002 Nomor : K/TU.210/312 /X/2002 tentang Sosialisasi Agropolitan,
3. Surat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian tanggal 27 Nopember 2002 tentang Program Rintisan Kawasan Agropolitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Program Pengembangan Kawasan Agropolitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum daiarn Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan ini memnunvai tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan program pengembangan Kawasan Agropolitan
2. Mempersiapkan dan melaksanakan sosialisasi untuk program pengembangan Kawasan Agropolitan
3. Melakukan koordinasi dan sosialisasi baik perencanaan pelatihan maupun dalam pelaksanaan program pengembangan Kawasan Agropolitan:
4. Memberikan pelayanan informasi.
5. Membantu memecahkan masalah,
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batu
Pada tanggal 15 Mei 2007



Tembusan

- Yth.Sdr.
1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Kepala Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur;
 3. Ketua DPRD Kota Batu,
 4. Kepala Badan Pengawas Kota Batu,
 5. Anggota POKJA yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Walikota Batu

Nomor : 180/59/KEP/422/013/2007

Tanggal.: 15 Mei 2007

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN**

NO	JABATAN DALAM POKJA	JABATAN DALAM DINAS
1	Penanggung Jawab	Walikota Batu.
2	Pembina	Sekretaris Daerah Kota Batu.
3	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Batu
4	Sekretaris	Kepala Dinas Pertanian Kota Batu.
5	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas Pemukiman dan Bina Marga Kota Batu2. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Energi Kota Batu3. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu,4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu5. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Batu6. Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu7. Kepala Kantor Perhubungan Kota Batu,8. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Batu,9. Kabid. Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Kota Batu10. Kabid. Program Dinas Pertanian Kota Batu,11. Kabid. Tanaman Pangan dan Perkebunan Dinas Pertanian Kota Batu,12. Kabid. Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian Kota Batu,13. Kabid. Sosbud Badan Perencanaan Daerah Kota Batu,14. Kabid. Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Daerah Kota Batu,15. Kabid. Data dan Penelitian Badan Perencanaan Daerah Kota Batu.





LOKASI
KAWASAN AGROPOLITAN
TAHUN 2002 - 2009

DAFTAR LOKASI AGROPOLITAN / MINAPOLITAN
 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN - KEMENTERIAN PERTANIAN
 TAHUN 2002 - 2009

O	PROVINSI	No	KABUPATEN	KECAMATAN	KAWASAN	KOMODITAS UNGGULAN	LUAS KAWASAN	LEGALITAS KAWASAN	KAWASAN MINA POLITAN			KETERANGAN		
									KABUPATEN	KECAMATAN	KAWASAN			
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1	Aceh Besar	Indrapuri Montasik	Indrapuri	Rambutan	101.181 ha	SK. Mentan No.312/TU.210/A/X/2002 SK. Gub. NAD No.12 Th.2003						
		2	Aceh Singkil	Simpang Kiri										
		3	Aceh Tengah	Pegasing										
		4	Pidie											
		5	Aceh Selatan		Kluet									
2	Sumatera Utara	6	Karo	Merek	Bukit Barisan				Serdangbordagal	Tanjung Beringin				
		7	Simahungun	Silimaluta Purba										
		8	Dairi											
		9	Toba Samosir											
		10	Tapanuli Utara	Siborong-borong										
		11	Asahan	Medeng Derus										
3	Sumatera Barat	12	Batubara		Tanjung Tiram				Pesisir Selatan	Mandeh				
		13	50 Koto		Mungka									
		14	Tanah Datar	Kota Baru										
		15	Pesisir Selatan											
		16	Dharmasraya		Sibung									
		17	Agam	IV Angkat Candung Baso	Ampek Angkat Candung	Sapi dan Kerbau Penggemukan	8.295 ha	SK. Mentan No.312/TU.210/A/X/2002 SK. Bupati No. 29/2003						
		18	Solok	IV Koto Tilatang Kamang Bauhampu Sungai Paur	Lembah Gumanti	Martiss dan Kentang	72.554 ha	SK. Mentan No.312/TU.210/A/X/2002 SK. Bupati Solok No.42/BUP-2004						
		19	Indragiri Hilir	Tempuling Batang Tuaka Enok Keritan Reteh	Tempuling	Padi dan Kelapa	1.401,68 ha	SK. Mentan No.312/TU.210/A/X/2002						
		20	Indragiri Hulu		Reang Barat						Kuantan Singingi	Teso		
		4	Kepulauan Riau	21	Karimun	Kundur Utara								
				22	Bintan		Tuapaya						Bintan	Mantang
		5	Jambi	23	Tanjung Jabung Timur	Rantau Rasau							Batanghari	Pemayang
24	Muara Jambi													
25	Kerinci			Kumpuh Ulu										
26	Sorolangun				Singaur									
27	Bungo				Jujuran									
28	Merangin				Batang Mesumai									

PROVINSI	No	KABUPATEN	KECAMATAN	KAWASAN	KOMODITAS UNGGULAN	LUAS KAWASAN	LEGALITAS KAWASAN	KAWASAN MINA POLITAN			KETERANGAN
								KABUPATEN	KECAMATAN	KAWASAN	
Sumatera Selatan	29	Ogan Ilir	Indralaya	Bakung	Jagung	41.639 ha	SK. Mentan No.312/TU.210/A/X/2002	OKI			Simah Pulau Padang
	30	Muara Enim	Gelumbang	Semedo			SK. Lok. Gub. Sumsel No.01/Kpts-PL/bp.u/III/2003				
	31	Pagar Alam	Dempo Utara				SK. Lok. Gub. Sumsel No.02/Kpts-PL/bp.u/III/2003				
	32	OKU	Martapura	Baturaja Timur							
Bangka Belitung	33	Musi Rawas		Muara Beliti							
	34	Beliitung	Membalong	Membalong	Lada dan Manggis	464.135 ha	SK. Mentan No.312/TU.210/A/X/2002 SK. Bupati Belitung No.315/IV/2003				
	35	Bangka		Mendo Barat				Bangka Selatan			Salepliat
Bengkulu	36	Bangka Tengah	Pangkalan Baru								
	37	Bengkulu Utara	Padang Jaya	Padang Jaya	Siak dan Ikan Mas	272.286 ha	SK. Mentan No.312/TU.210/A/X/2002 SK. Gub. Bengkulu No.394 Tahun 2002 SK. Bupati Bengkulu Utara No.617 Tahun 2003				
	38	Rejang Lebong	Giri Mulya Air Besi Kerkap Arga Mukmur Selupu Rejang Sidang Kelingi Curup Bermani Ulu Ujan Mas Luanmah Segimin	Selupu Rejang	Hortikultura (cabe, tomat, kubis, sawi, dan wortel)	15.792 ha	SK. Mentan No.312/TU.210/A/X/2002 SK. Gub. Bengkulu No.394 Tahun 2002				
	39	Kepahiang									
	40	Bengkulu Selatan									
Lampung	41	Lebong		Lebong Tengah							
	42	Seluma		Seluma Selatan							
Lampung	43	Lampung Tengah	Terbanggi Besar	Terbanggi Besar	Jagung dan Sapi Potong	20.296 ha	SK. Mentan No.312/TU.210/A/X/2002 SK. Gubernur No.522/2361/05/2002				
	44	Lampung Barat	Batu Brak					Lampung Selatan	Ketapang		
Banten	45	Lebak	Wanasalam					Sorang	Pontang		
	46	Pudeglang	Menes								
	47	Serang									
	48	Tangerang	Larangan Sepatan								
Jawa Barat	49	Cianjur	Pacet	Pacet	Sayuran Dataran Tinggi (wortel, bawang daun)		SK. Mentan No.312/TU.210/A/X/2002 SK. Bupati Cianjur No.512/Skep.175-Pe/2002				
	50	Bekasi	Babelan Kota	Babelan Kota	Sayuran Dataran Rendah	5.525 ha	SK. Mentan No.312/TU.210/A/X/2002 SK. Gubernur No.520/3482/Binprod/2003				
	51	Kuningan	Cigugur	Cigugur	Sapi	117.857,55 ha	SK. Mentan No.312/TU.210/A/X/2002				
	52	Bogor	Leuwiliang	Leuwiliang	Manggis	8.918 ha	SK. Mentan No.312/TU.210/A/X/2002 SK. Bupati No.590/191/Kpts/Huk/2004				
	53	Ciamis		Panumbangan							
	54	Sukabumi		Kadudampit							
	55	Subang									
	56	Indramayu	Segala Herang Karangsong								

PROVINSI	No	KABUPATEN	KECAMATAN	KAWASAN	KOMODITAS UNGGULAN	LUAS KAWASAN	LEGALITAS KAWASAN	KAWASAN MINA POLITAN			KETERRANGAN
								KABUPATEN	KECAMATAN	KAWASAN	
Jawa Tengah	57	Pemalang	Belik Pulosari Watuumpul Moga Randudongkal	Walisarimadu	Sayuran Dataran Tinggi (cabe, tomat, kentang)	111.530 ha	SK. Mentan No. 312/TU.210/A/X/2002 SK. Bupati Pemalang Mo.188.4/06/2003				
	58	Magelang	Dukun Bagian Atas Sawangan Candimulyo Tegalrejo Ngablak Grabag	Merapi Merbabu	Sayuran Dataran Tinggi (jeruk keprok, kelengkeng), dan sapi	32.502 ha	SK. Mentan No. 312/TU.210/A/X/2002				
	59	Brebes		Larangan				Banyumas		Beji	
	60	Boyolali		Groasebo							
	61	Banjarnegara		Jakabaya							
	62	Semarang	Sumowono								
	63	Wonosobo	Sukoharjo								
64	Batang	Limpung Bawang									
65	Purbalingga										
66	Purworejo		Bagelen								
67	Cilacap		Majenang								
Daerah Istimewa Yogyakarta	68	Kulonprogo	Kalibawang Nanggulang Girimulyo Samigaluh Turi	Kanggo Samimulyo Temon	Biofarmaka (empon-empon), kakaoy, dan kambing, sapi	10.222,75 ha	SK. Mentan No. 312/TU.210/A/X/2002 SK. Bupati No. 222 Tahun 2002				
	69	Sleman									
	70	Gunung Kidul						Gunung Kidul		Playen	
71	Bantul			Imogiri							
Jawa Timur	72	Banyuwangi	Bangorejo	Bangorejo	Jeruk Siam	2.988 ha	SK. Mentan No. 312/TU.210/A/X/2002				
	73	Lumajang	Jambe Kumbu	Seroja	Pisang	25.061,28 ha	SK. Mentan No. 312/TU.210/A/X/2002 SK. Bupati Lumajang No.185.45/498/427.12/2003				
	74	Tulungagung	Sendang	Sendang	Sapi Perah	9.645.526 ha	SK. Bupati Tulungagung No.322 Tahun 2004				
	75	Mojokerto	Pacet								
	76	Ngawi	Paron								
	77	Batu	Batu								
	78	Bangkalan	Socah								
	79	Madiun		Gedang Sari							
80	Pamekasan		Rupananandur					Tringgalek		Watulimo	
Kalimantan Barat	81	Pontianak	Pontianak Utara	Siantan	Lidah Busya	803,78 ha	SK. Mentan No. 312/TU.210/A/X/2002 SK. Gubernur No.521/21/ekonn-A/2002				
	82	Singkawang		Pengualang							
	83	Sambas						Sambas		Jawai	
	84	Kubu Raya		Rasau Jaya							
Kalimantan Tengah	85	Seruyan		Seruyan Hilir							
	86	Kotawaringin Timur		Teluk Sampit							
	87	Kapuas	Kapuas	Bassarang	Sapi Potong	25.600 ha	SK. Mentan No. 312/TU.210/A/X/2002 SK. Gubernur No.521.23/134/Ex/2002				
	88	Barito Timur	Dusun Tengah								
	89	Hulu Sungai Utara		Amuntai				Banjar		Cindai Alus	

No	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	KAWASAN	KOMODITAS UNGGULAN	LUAS KAWASAN	LEGALITAS KAWASAN	KAWASAN MINA POLITAN			KETERANGAN
								KABUPATEN	KECAMATAN	KAWASAN	
8	Kalimantan Selatan	90 Hulu Sungai Tengah 91 Barito Kuala	Labuan Amas Utara Madastana								
9	Kalimantan Timur	92 Kutai Timur 93 Bulungan 94 Pasir 95 Panajam Paser Utara	Kalioraang Sandaran Sangkalirang Tanjung Selor	Sangsaka	Kakao dan Pisang	104.926 ha	SK. Mentan No. 312/TU.210/A/X/2002				
0	Sulawesi Utara	96 Minahasa Selatan 97 Bolaang Mongondow 98 Sangihe 99 Minahasa 100 Tomohon 101 Minahasa Utara 102 Bolaang Mongondow Utara	Modoinding Paser Modayag Tampaso Baru Tamako Pakakan Tomohon Minut	Modoinding Angaasan Dumoga Bolmut	Kentang	12.610 ha	SK. Mentan No. 312/TU.210/A/X/2002 SK. Gubernur No. 520/4/346/2003	Malinau Minahasa Selatan		Kalinuaok Tatapann	
1	Gorontalo	103 Pohuwatu 104 Kota Gorontalo 105 Gorontalo 106 Boalemo 107 Bonebolango 108 Gorontalo Utara	Randangan Paguat Marisa Pantlanggio Taludini Lemito Popayato	Randangan	Jagung	192.632 ha	SK. Mentan No. 312/TU.210/A/X/2002				
	Sulawesi Tengah	109 Donggala 110 Perigi Moutong	Balaesang Bolano Lambu	Balaesang	Kakao		SK. Mentan No. 312/TU.210/A/X/2002 SK. Gubernur No. 520/4195/Distanbun/2002 SK. Bupati Donggala No. 186.45/BID.II/39994.60/03				
	Sulawesi Barat	111 Mamuju Utara 112 Majene		Pasang Kayu Sendana							
	Sulawesi Selatan	113 Barru 114 Enrekang 115 Soppeng 116 Tanah Toraja 117 Poso 118 Morowali 119 Selsyar 120 Bone 121 Sidrap	Barru Alla Lili Riaja Lalabata Marioriwawao Lili Rilau	Tuwung Jennae Napu Witaponda Bontonanai Pasaka Allakuang	Sapi Potong Padi dan Jagung	19.932 ha 81 km2	SK. Mentan No. 312/TU.210/A/X/2002 SK. Bupati No. 195 Tahun 2002 SK. Gubernur No. 321.1/5496/SET/2003	Tojo Una-una Luwu Timur Gowa		Wakai Maliit Bontonompo	

PROVINSI	No	KABUPATEN	KECAMATAN	KAWASAN	KOMODITAS UNGGULAN	LUAS KAWASAN	LEGALITAS KAWASAN	KAWASAN MINA POLITAN			KETERANGAN
								KABUPATEN	KECAMATAN	KAWASAN	
Sulawesi Tenggara	122	Buton	Bondosala	Lasalimu Selatan				Kolaka		Labandia	
	123	Bombana									
	124	Konawe									
	125	Konawe Selatan		Lalambu							
Bali	126	Bangli	Kintamani	Kintamani	Kopi arabika, jeruk, dan Penggemukan sapi	52.081	SK. Mentan No. 312/TU.210/A/XX/2002				
	127	Tabanan	Bawuri								
	128	Gianyar	Payangan								
	129	Jembrana	Melaya								
	130	Badung		Pelaga				Klungkung		Nusa Penida	
Nusa Tenggara Barat	131	Lombok Barat	Alas Manggalewa	Kuripan				Bima		Woha	
	132	Lombok Timur		Sembalun							
	133	Sumbawa Barat		Komuter Setelu							
	134	Dompu									
Nusa Tenggara Timur	135	Belu	Kupang Timur Kupang Tengah Iteng	Betun				Sikka		Pesisir Sikka	
	136	Kupang		Oesao							
	137	Manggarai									
Maluku	138	Seram Bagian Timur	Kairatu	Werinama							
	139	Seram Bagian Barat									
	140	Maluku Tengah									
Maluku Utara	141	Halmahera Timur	Sahu	Wasile							
	142	Halmahera Barat									
	143	Halmahera Tengah									
Papua	144	Jayapura	Distrik Nimboran Distrik Nimbokrang Distrik Kemtuk Distrik Kemtuk Gresi					Waropen		Waropen Bawah	
	145	Nabire									
Irian Jaya Barat	146	Manokwari									
Papua Barat								Raja Ampat		Selat Segawin	

nber: Departemen PU, Deptan, Bappenas

Tabel P. 01
 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
 Tahun 2006 - 2010 (Juta Rupiah)

No.	Sektor/ Sub-sektor	2006*)	2007*)	2008*)	2009*)	2010**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Pertanian	383,259.50	436,958.12	490,871.98	531,163.35	590,056.43
	1.1. Tanaman Bahan Makanan	328,069.47	376,127.49	421,950.41	458,035.95	509,968.10
	1.2. Tanaman Perkebunan	3,061.20	2,093.45	2,316.03	2,436.86	2,702.57
	1.3. Peternakan	50,725.34	57,189.49	64,921.17	68,892.34	75,406.73
	1.4. Kehutanan	902.09	967.70	1,058.69	1,127.97	1,244.18
	1.5. Perikanan	501.40	580.00	625.67	670.23	734.85
II	Pertambangan Dan Penggalian	4,275.62	4,902.99	5,590.48	6,093.59	6,798.54
	2.1. Pertambangan Migas	-	-	-	-	-
	2.2. Pertambangan Non Migas	-	-	-	-	-
	2.3. Penggalian	4,275.62	4,902.99	5,590.48	6,093.59	6,798.54
III	Industri Pengolahan	140,040.70	158,097.27	183,113.25	200,089.42	219,595.87
	3.1. Makanan, Minuman & Tembakau	63,292.01	72,399.76	85,254.44	94,955.24	105,829.96
	3.2. Tekstil, Kulit & Alas Kaki	10,968.54	13,056.08	14,821.65	15,698.89	17,218.97
	3.3. Barang dari Kayu & Hasil Hutan Lain	18,737.36	20,172.04	23,435.80	24,928.03	26,998.00
	3.4. Kertas & Barang Cetak	5,321.41	6,508.91	7,620.75	8,283.48	8,963.62
	3.5. Pupuk Kimia & Barang dari Karet	12,324.05	13,592.26	15,219.94	15,832.92	16,807.91
	3.6. Semen & Barang Galian Non Logam	24,262.86	26,736.58	30,351.39	33,204.81	35,569.53
	3.7. Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-	-	-
	3.8. Alat Angkutan, Mesin & Peralatan	1,572.59	1,619.22	1,795.34	1,986.58	2,226.35
	3.9. Barang-barang Lainnya	3,561.89	4,012.41	4,613.94	5,199.47	5,981.54
IV	Listrik Dan Air Bersih	28,550.63	33,057.12	38,522.87	42,447.96	47,014.29
	4.1. Listrik	25,443.99	29,384.59	34,107.08	37,480.38	41,478.46
	4.2. Air Bersih	3,106.65	3,672.53	4,415.79	4,967.58	5,535.83
V	Bangunan	27,981.46	34,119.81	42,181.41	49,774.12	57,765.45
VI	Perdagangan, Hotel Dan Restoran	876,444.46	992,712.44	1,179,491.92	1,360,959.46	1,578,555.55
	6.1. Perdagangan	599,624.43	681,560.38	826,627.74	947,334.86	1,085,824.87
	6.2. Hotel	228,664.73	253,488.05	283,184.28	332,447.25	398,273.46
	6.3. Restoran	48,155.30	57,664.01	69,679.90	81,177.35	94,457.23
VII	Pengangkutan Dan Komunikasi	70,123.17	79,264.24	92,206.27	102,468.73	113,495.57
	a. Angkutan	34,046.04	37,160.29	45,443.81	49,611.14	53,186.14
	1. Angkutan Rel	-	-	-	-	-
	2. Angkutan Jalan Raya	32,850.49	35,796.47	43,889.76	47,859.04	51,294.71
	3. Angkutan Laut	-	-	-	-	-
	4. Angkutan Penyebrangan	-	-	-	-	-
	5. Angkutan Udara	-	-	-	-	-
	6. Jasa Penunjang Angkutan	1,195.55	1,363.82	1,554.05	1,752.10	1,891.42
	b. Komunikasi	36,077.14	42,103.95	46,762.46	52,857.59	60,309.43
	1. Pos dan Telekomunikasi	34,034.80	39,701.15	43,966.28	49,700.68	56,731.56
	2. Jasa Penunjang Komunikasi	2,042.33	2,402.80	2,796.18	3,156.91	3,577.87
VIII	Kuangan, Persewaan Dan Jasa Perusahaan	79,813.17	90,053.70	102,800.17	114,603.63	127,881.73
	8.1. Bank	2,299.52	2,775.29	3,387.06	3,895.88	4,589.62
	8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank	18,980.99	21,757.49	25,593.86	27,898.07	31,344.63
	8.3. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-	-
	8.4. Sewa Bangunan	51,609.40	57,653.74	64,815.27	72,917.51	80,895.47
	8.5. Jasa Perusahaan	6,923.25	7,867.18	9,003.98	9,892.17	11,052.01
IX	Jasa - Jasa	274,808.82	326,427.72	389,773.28	444,089.72	510,401.61
	a. Pemerintahan Umum	134,369.85	170,420.75	213,806.30	246,570.49	289,209.84
	b. Swasta	140,438.97	156,006.97	175,966.98	197,519.23	221,191.76
	1. Sosial Kemasyarakatan	29,880.88	35,909.10	40,958.81	45,886.10	50,878.21
	2. Hiburan dan Kebudayaan	29,831.00	32,778.01	37,287.22	45,116.76	54,300.94
	3. Perorangan & Rumah tangga	80,727.10	87,319.87	97,720.96	106,516.37	116,012.62
Produk Domestik Regional Bruto		1,885,297.53	2,155,593.42	2,524,551.63	2,851,689.98	3,251,565.04

Keterangan :

* Angka diperbaiki disesuaikan PDRB DAU

** Angka sementara

Tabel P. 02
 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
 Tahun 2006 - 2010 (Juta Rupiah)

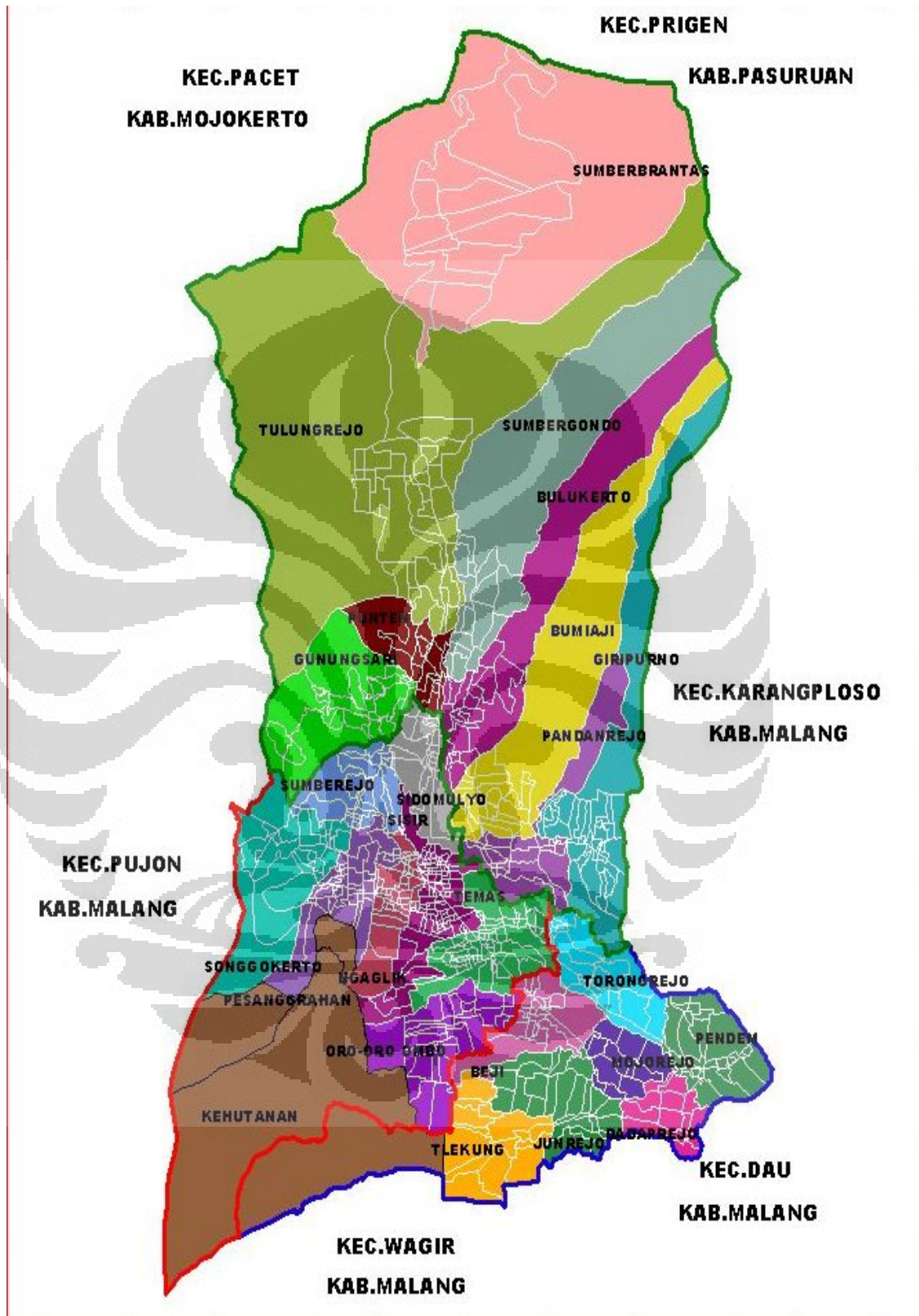
No.	Sektor/ Sub-sektor	2006*)	2007*)	2008*)	2009*)	2010**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Pertanian	231,261.60	245,663.59	260,734.94	276,609.23	293,477.84
	1.1. Tanaman Bahan Makanan	198,974.69	211,390.71	224,370.10	238,101.55	252,935.28
	1.2. Tanaman Perkebunan	1,930.50	1,296.33	1,328.61	1,393.85	1,463.54
	1.3. Peternakan	29,489.76	32,073.07	34,093.67	36,122.24	38,039.38
	1.4. Kehutanan	528.96	540.71	557.41	580.38	601.99
	1.5. Perikanan	337.69	362.77	385.14	411.21	437.66
II	Pertambangan Dan Penggalian	2,475.75	2,677.77	2,862.80	3,024.26	3,223.58
	2.1. Pertambangan Migas	-	-	-	-	-
	2.2. Pertambangan Non Migas	-	-	-	-	-
	2.3. Penggalian	2,475.75	2,677.77	2,862.80	3,024.26	3,223.58
III	Industri Pengolahan	82,298.25	87,241.89	92,800.24	97,984.13	103,882.34
	3.1. Makanan, Minuman & Tembakau	37,819.81	40,338.86	43,514.92	46,561.05	50,216.62
	3.2. Tekstil, Kulit & Alas Kaki	6,579.42	7,178.80	7,530.56	7,840.82	8,232.86
	3.3. Barang dari Kayu & Hasil Hutan Lain	10,428.77	10,634.21	11,304.17	11,884.07	12,478.27
	3.4. Kertas & Barang Cetak	3,049.87	3,418.90	3,634.30	3,755.32	3,905.53
	3.5. Pupuk Kimia & Barang dari Karet	7,482.73	7,824.69	8,212.79	8,386.08	8,637.66
	3.6. Semen & Barang Galian Non Logam	13,612.46	14,404.71	14,911.76	15,672.26	16,299.15
	3.7. Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-	-	-
	3.8. Alat Angkutan, Mesin & Peralatan	968.04	936.78	981.65	1,012.37	1,052.87
	3.9. Barang-barang Lainnya	2,357.15	2,504.94	2,710.10	2,872.16	3,059.38
IV	Listrik Dan Air Bersih	15,769.58	17,198.37	18,688.04	20,357.01	22,178.68
	4.1. Listrik	13,930.46	15,152.16	16,417.37	17,880.15	19,503.67
	4.2. Air Bersih	1,839.12	2,046.21	2,270.68	2,476.85	2,675.00
V	B a n g u n a n	14,580.51	16,459.94	18,369.29	20,355.02	22,781.36
VI	Perdagangan, Hotel Dan Restoran	510,687.95	541,721.51	576,043.60	613,384.16	654,827.72
	6.1. Perdagangan	339,826.83	360,080.50	381,145.21	403,670.90	427,553.53
	6.2. Hotel	142,142.55	150,642.18	161,273.96	173,266.00	187,512.96
	6.3. Restoran	28,718.57	30,998.83	33,624.43	36,447.26	39,761.23
VII	Pengangkutan Dan Komunikasi	38,678.84	41,567.81	44,790.82	48,009.81	51,495.08
	a. Angkutan	17,488.61	18,195.13	18,858.72	19,634.86	20,449.40
	1. Angkutan Rel	-	-	-	-	-
	2. Angkutan Jalan Raya	16,811.06	17,458.28	18,067.58	18,786.67	19,538.13
	3. Angkutan Laut	-	-	-	-	-
	4. Angkutan Penyebrangan	-	-	-	-	-
	5. Angkutan Udara	-	-	-	-	-
	6. Jasa Penunjang Angkutan	677.56	736.84	791.15	848.19	911.26
	b. Komunikasi	21,190.22	23,372.68	25,932.10	28,374.95	31,045.69
	1. Pos dan Telekomunikasi	19,915.04	21,940.40	24,382.37	26,703.57	29,229.73
	2. Jasa Penunjang Komunikasi	1,275.18	1,432.28	1,549.73	1,671.39	1,815.96
VIII	Kuangan, Persewaan Dan Jasa Perusahaan	49,140.17	52,667.11	56,294.06	60,108.19	64,057.56
	8.1. Bank	1,178.39	1,346.90	1,483.21	1,640.58	1,820.39
	8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank	11,361.78	12,301.40	13,172.34	14,147.09	15,249.15
	8.3. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-	-
	8.4. Sewa Bangunan	32,367.14	34,461.29	36,739.19	39,127.23	41,474.87
	8.5. Jasa Perusahaan	4,232.85	4,557.51	4,899.33	5,193.29	5,513.16
IX	Jasa - Jasa	145,815.73	159,690.67	174,362.75	189,060.80	206,141.74
	a. Pemerintahan Umum	61,437.45	70,352.03	79,061.61	88,177.41	98,529.04
	b. Swasta	84,378.27	89,338.65	95,301.14	100,883.39	107,612.70
	1. Sosial Kemasyarakatan	17,076.99	19,030.74	20,848.60	22,176.27	23,791.54
	2. Hiburan dan Kebudayaan	16,577.38	17,575.34	18,809.13	20,199.12	21,828.20
	3. Perorangan & Rumahtangga	50,723.91	52,732.57	55,643.41	58,508.00	61,992.96
Produk Domestik Regional Bruto		1,090,708.37	1,164,888.66	1,244,946.54	1,328,892.60	1,422,065.90

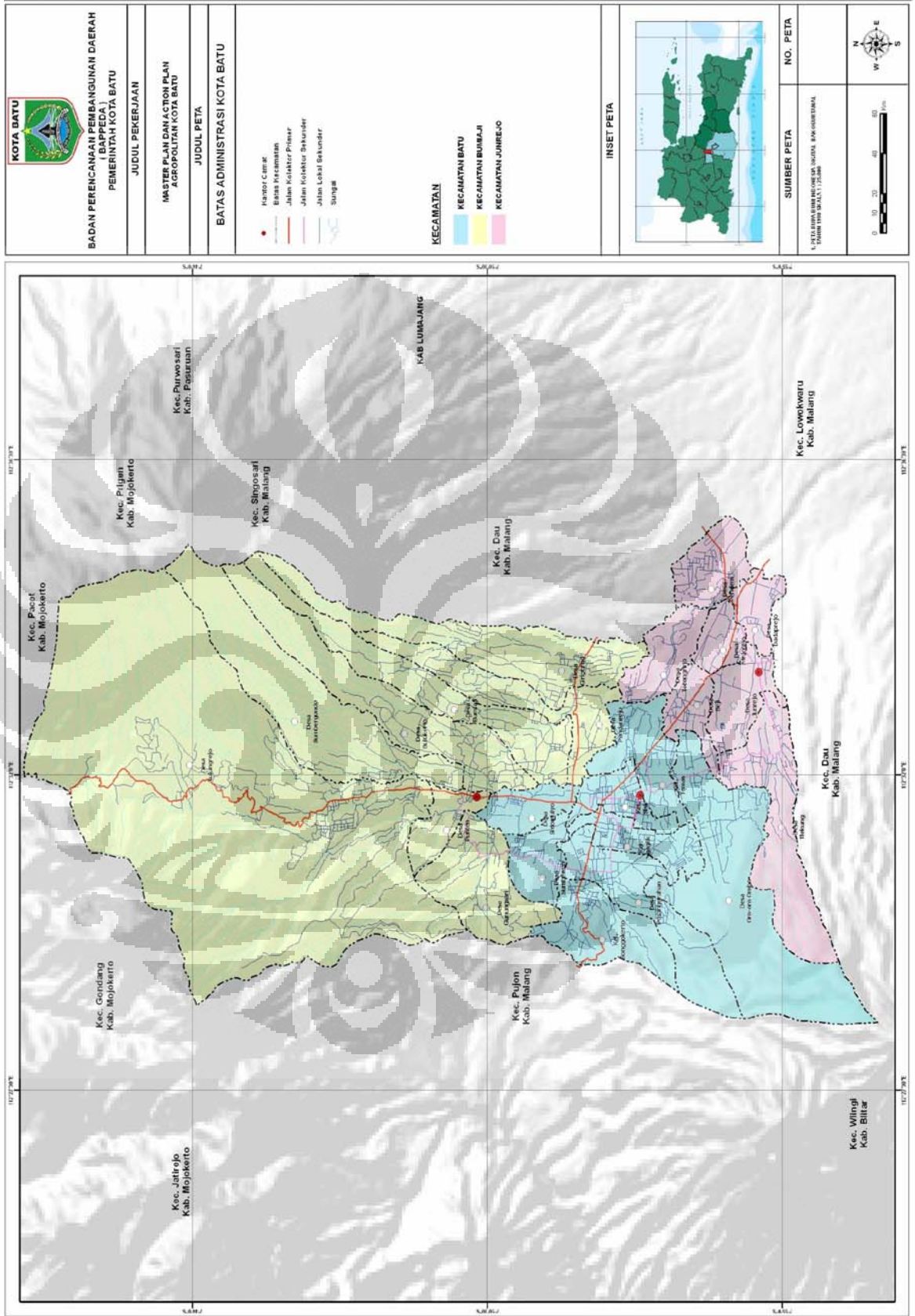
Keterangan :

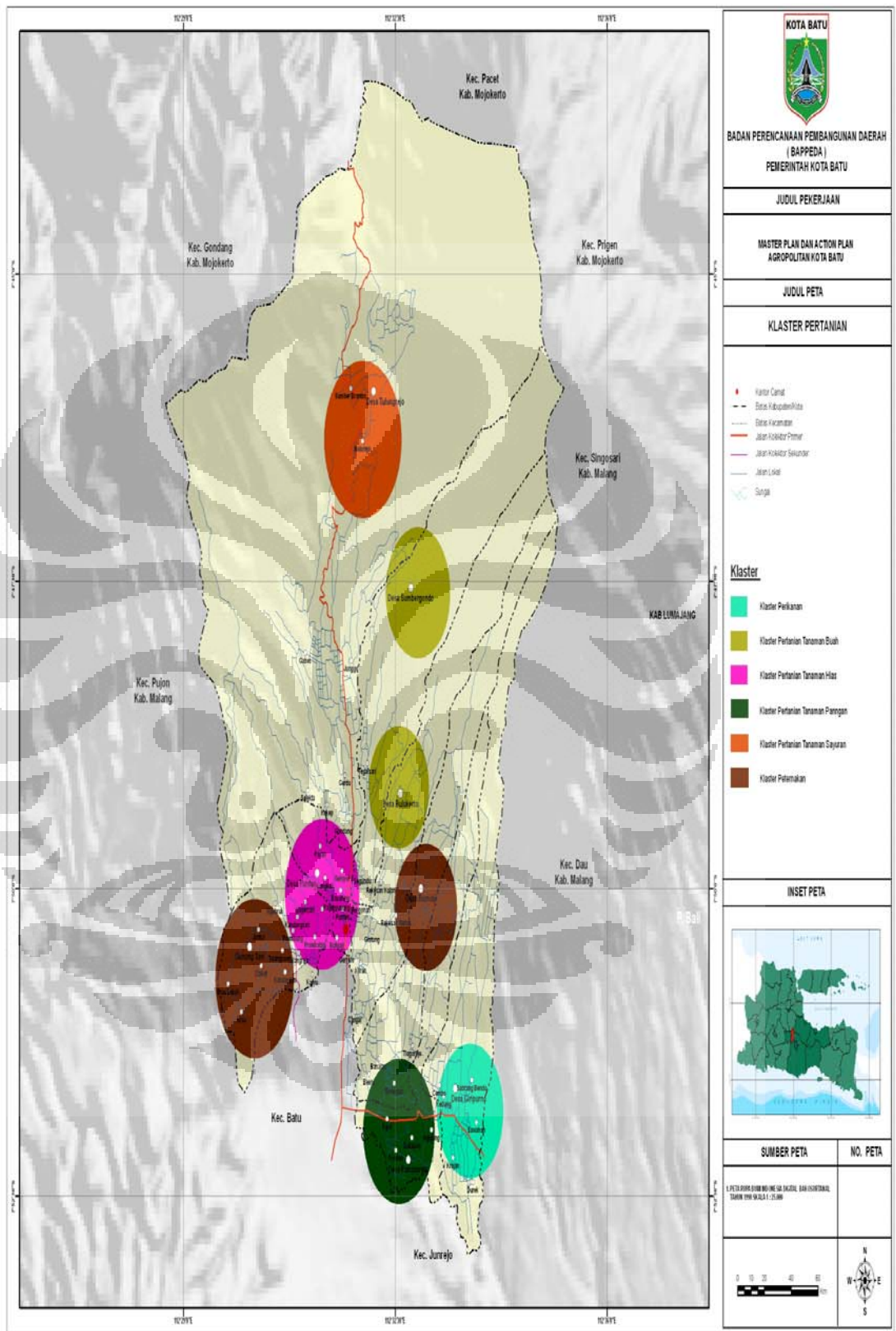
* Angka diperbaiki disesuaikan PDRB DAU

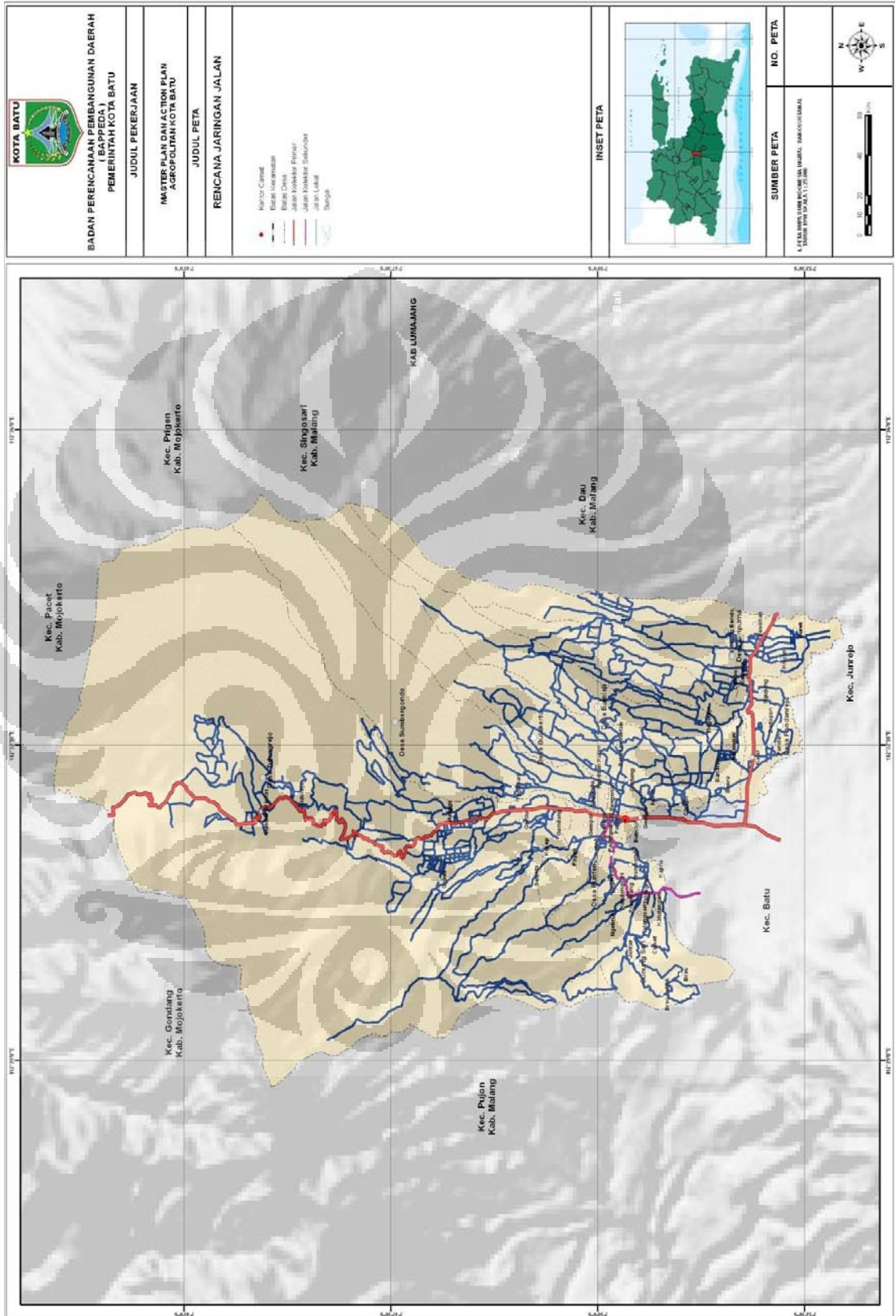
** Angka sementara

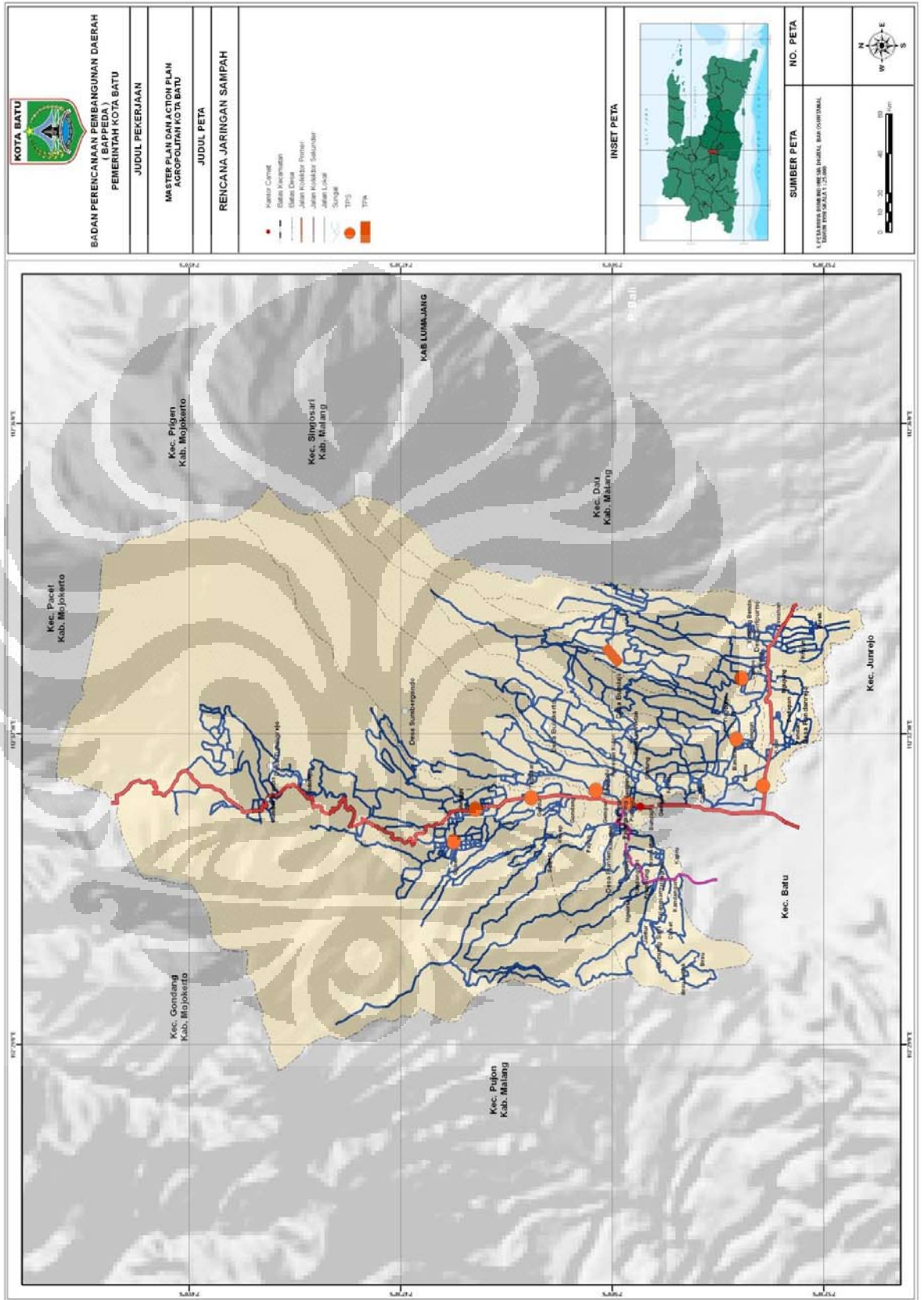
PETA KOTA BATU

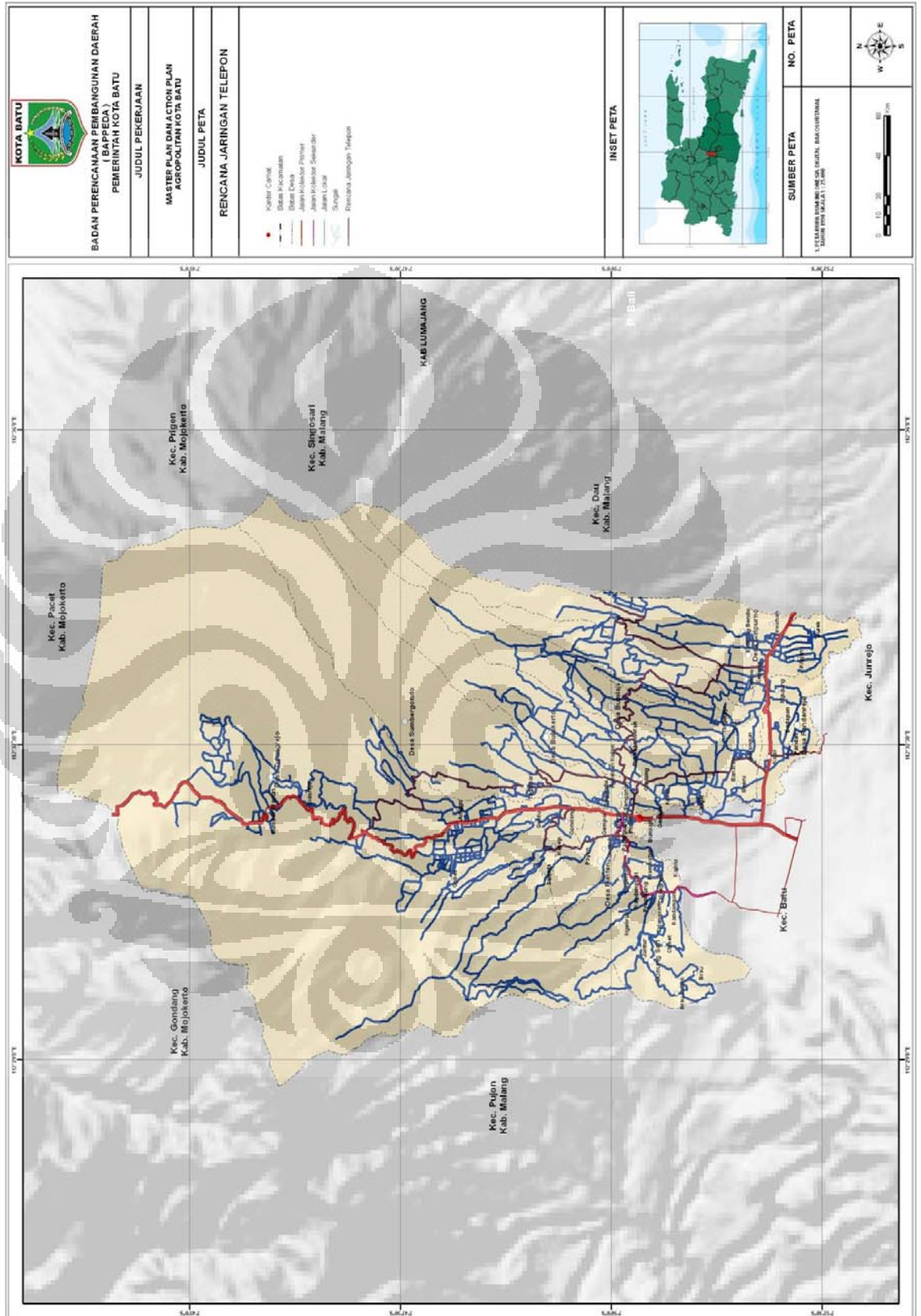












1. Implementasi Kebijakan Pengeluaran untuk Sub Sistem Agribisnis Hulu

Pengembangan Tanaman Pangan/ Holtikultura Organik



Pengembangan Intensifikasi Pekarangan



BLBU dan BLP



Pengarahan dan Penyerahan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Dan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) TA. 2011



Bantuan Bibit Kentang



Bantuan Pupuk Organik Cair



Bibit Lidah Buaya



Bibit Jeruk Nipis

Pengembangan Agrobisnis Holtikultura



Pembangunan Kios



Alat Klimatologi di
Ds.Torongrejo Kec. Junrejo

Pendistribusian Alsintan



Alat dan Mesin Pertanian (Chopper) yang diserahkan ke Kel. Tani "TIRTO"



Bibit jeruk Keprok Batu 55 dan bibit anggur yang akan didistribusikan kepada petani.



Pelatihan Budidaya Kambing Perah



Pemberian Bantuan Ternak



Pembangunan gedung gudang kompos di Dsn. Gondang, Ds. Tulungrejo, Kec. Bumiaji



Pengadaan mesin chopper di Kecamatan Bumiaji



Pemberian bantuan bibit ternak sapi dan kambing



Pemberian bantuan bibit ternak kelinci dan itik

2. Implementasi Kebijakan Pengeluaran untuk Sub Sistem Usaha Tani



Survey Lokasi di Jl. Wilis
Kelurahan Sisir



Survey Lokasi di Dusun
Gangsiran



Penanaman bibit tanaman empon-empon di lahan kelompok tani



Pendistribusian bibit tanaman kopi kepada masyarakat LMDH guna pelaksanaan demoplot.

3. Implementasi Kebijakan Pengeluaran untuk Sub Sistem Agribisnis Hilir

Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian /Perkebunan Unggulan Daerah



Pameran Agro dan Food Expo
2011



Pekan Flori dan Flora Nasional
(P2FN) 2011



Jenis - jenis Alat Olahan Sari Strawberry



4. Implementasi Kebijakan Pengeluaran untuk Sub Sistem Agribisnis Jasa Penunjang

Pengembangan Sekolah Lapang Pertanian/Perkebunan



Pengarahan dan Penyerahan Bansos Sumber Dana APBN



Penyerahan Bansos Oleh Kabid. Tanaman Pangan dan

Pengelolaan Lahan dan Air



Penyaluran Dana Bantuan Sosial Kegiatan Pengelolaan Lahan dan



Peningkatan Sumberdaya Manusia Pertanian



Pembukaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Pertanian



Peserta Mengikuti Penyampaian Materi Yang

Pengujian Laboratorium Pertanian



Penyampaian Materi Oleh Narasumber Dari Lab.



Penanaman Bibit Bawang Merah Pada Lahan Demplot

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan



Pengadaan *Global Positioning*

Pelatihan Dan Pembimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna



Pembangunan konstruksi jalan yang terdiri jalan usahatani dan jalan produksi pertanian



Pembangunan Jalan Usahatani di Dusun Pandan Desa Pandanrejo Kec.



Pembangunan Jalan Produksi di Dusun Krajan Desa Oro-oro Ombo Kec.

Pembangunan konstruksi jaringan irigasi



Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Desa



Pembangunan Jaringan Irigasi PIPANISASI di Dusun Krajan (Paket I)

Kunjungan lapang



Kunjungan lapang ke areal kebun pertanian organik



Bimbingan teknis pengolahan produk hortikultura



Rapat koordinasi dengan kelompok tani Makmur Abadi



Pelatihan Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian di Ds. Pandanrejo, Kec. Bumiaji



Pelatihan Pertanian Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan di Ds. Pandanrejo, Kec. Bumiaji



Sosialisasi kegiatan peningkatan sosial ekonomi masyarakat dengan sistem pemasaran yang tepat.



Pelatihan teknis budidaya dan pemberian paket budidaya ayam buras di Ds. Oro-oro Ombo



Pelayanan keswan dan kesmavet



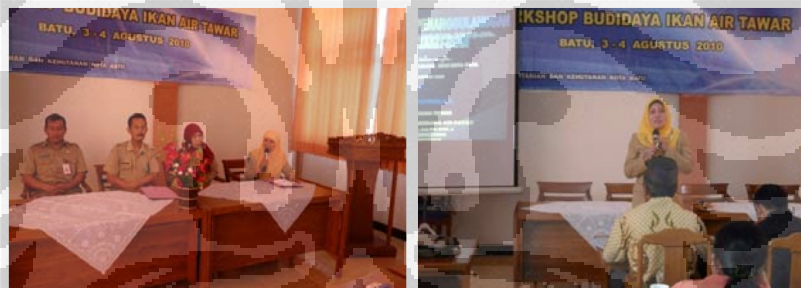
Pengadaan obat-obatan, vaksin AI, dan alat-alat kedokteran hewan



Pelatihan pengolahan susu



Pembangunan bangunan untuk olah susu
penampungan susu



Workshop Budidaya Ikan Air Tawar



Monitoring Hama dan Penyakit Ikan



Kawasan budidaya air tawar
di Desa Gunungsari



Pos Penyuluhan Perikanan



Lomba Masak Ikan Tingkat Kota Batu



Lomba Masak Ikan Tingkat Propinsi Jawa Timur



Pembuatan bangunan konservasi tanah/dam pengendali di Desa Oro-Oro Ombo



Operasi perlindungan dan pengamanan hutan terpadu oleh Tim Perlindungan dan Pengamanan Hutan Kota Batu dan sosialisasi upaya perlindungan hutan kepada masyarakat LMDH



Pembangunan unit perlindungan mata air berupa bangunan konstruksi reservoir (brouncuptering) di Desa Beji



Pembangunan unit perlindungan mata air berupa bangunan konstruksi reservoir (brouncuptering) di Desa Pandanrejo



Pelatihan tentang pengelolaan lahan yang konservatif kepada



Sosialisasi peredaran hasil hutan dan kayu



Sekolah Lapang Konservasi Das Hulu Kawasan Perkebunan